



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL



PERUBAHAN RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun guna mewujudkan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
5. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Kebijakan Umum Perubahan APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi dasar penyusunan:
 - a. rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - b. Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun anggaran 2026; dan
 - c. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2026.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

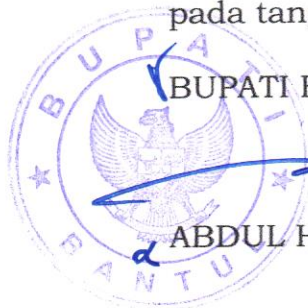
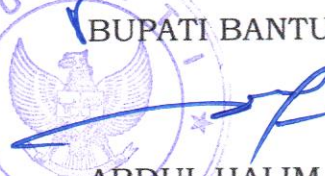
BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2026
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: PENUTUP
- (2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Juli 2026

BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 24 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR **S2** TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

RINCIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4. Sistematika Dokumen	I-6
 BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2026 SEMESTER I	II-1
2.1 Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2026	II-1
2.1.1 Relevansi Program RPJMD Dengan RKPD Tahun 2026	II-2
2.1.2 Relevansi Program RKPD Dengan APBD Tahun 2026...	II-3
2.2 Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2026 Semester I.....	II-7
2.2.1 Realisasi Keuangan Makro	II-7
2.2.2 Realisasi Tender Barang/Jasa	II-14
2.2.3 Realisasi Berdasarkan Sumber Pendanaan	II-19
2.3 Capaian Kinerja Daerah sampai dengan Semester I	II-36
2.3.1 Capaian Kinerja Utama Tahun 2026 Semester I.....	II-37
2.3.2 Evaluasi Kinerja Daerah Tahun 2026 Semester I	II-67
2.3.3 Evaluasi Kinerja Kunci Tahun 2026 Semester I	II-79
2.3.4 Evaluasi Kinerja Program Tahun 2026 Semester I	II-171
2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-304
2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah per Urusan	
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	II-304
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kerangka Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2026	III-1
3.1.1 Kondisi Capaian Indikator Makro Ekonomi Nasional. ..	III-1

3.1.2	Kondisi Capaian Indikator Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta.	III-3
3.1.3	Kondisi Capaian Ekonomi Makro Kabupaten Bantul. ..	III-5
3.1.4	Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bantul	III-12
3.2	Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026	III-13
3.2.1	Perubahan Pendapatan Daerah	III-13
3.2.2	Perubahan Belanja Daerah	III-17
3.2.3	Perubahan Pembiayaan Daerah	III-20
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2	Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026.....	IV-69
4.3	Penyelarasan Tema dan Prioritas Nasional dan DIY dengan Prioritas Daerah Kabupaten Bantul	IV-69
4.4	Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	IV-86
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Keselarasan Pelaksanaan RKPD Tahun 2026	II-1
Tabel 2.2	Target dan Realisasi Keuangan sampai dengan Semester I Tahun 2026	II-8
Tabel 2. 3	Progres Pengadaan Yang Melalui Mekanisme Tender/ Seleksi Kabupaten Bantul tahun 2026 Semester I.....	II-15
Tabel 2. 4	Rincian Pengadaan Kabupaten Bantul tahun 2026 Semester I	II-15
Tabel 2. 5	Progres Proyek Strategis Kabupaten Bantul Thn 2026 Semester I	II-16
Tabel 2. 6	Realisasi Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul s.d Semester I Tahun 2026.....	II-20
Tabel 2. 7	Realisasi BKK Kabupaten Bantul hingga akhir Juni 2026...	II-24
Tabel 2. 8	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bantul Tahun 2026 Semester I	II-28
Tabel 2. 9	Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) s.d. Semester I 2026.....	II-38
Tabel 2. 10	Capaian Indikator Kinerja Daerah Bantul Tahun 2026	II-68
Tabel 2. 11	Evaluasi Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bantul Tahun 2026 TW II	II-81
Tabel 2. 12	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL	II-172
Tabel 2. 13	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DINAS KESEHATAN (SKPD + UNIT) KABUPATEN BANTUL	II-175
Tabel 2. 14	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	II-184
Tabel 2. 15	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL	II-187
Tabel 2. 16	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL	II-190

Tabel 2. 17	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL	II-192
Tabel 2. 18	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL	II-194
Tabel 2. 19	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL.....	II-197
Tabel 2. 20	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL KABUPATEN BANTUL	II-199
Tabel 2. 21	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL	II-201
Tabel 2. 22	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL.....	II-204
Tabel 2. 23	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN BANTUL	II-207
Tabel 2. 24	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL	II-209
Tabel 2. 25	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL	II-212
Tabel 2. 26	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL	II-215
Tabel 2. 27	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP (SKPD + UNIT) KABUPATEN BANTUL	II-218
Tabel 2. 28	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DP3AP2KB KABUPATEN BANTUL	222
Tabel 2. 29	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DPMKAL KABUPATEN BANTUL	226

Tabel 2. 30	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DPTR KABUPATEN BANTUL.....	229
Tabel 2. 31	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL	232
Tabel 2. 32	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.....	234
Tabel 2. 33	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD BAPPEDA KABUPATEN BANTUL	237
Tabel 2. 34	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD BPKPAD KABUPATEN BANTUL	240
Tabel 2. 35	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD BKPSDM KABUPATEN BANTUL	243
Tabel 2. 36	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL	246
Tabel 2. 37	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTUL	248
Tabel 2. 38	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.....	251
Tabel 2. 39	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL	255
Tabel 2. 40	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL	257
Tabel 2. 41	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL	260
Tabel 2. 42	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL.....	262
Tabel 2. 43	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL.....	265
Tabel 2. 44	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL	268
Tabel 2. 45	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL.....	270

Tabel 2. 46	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL	273
Tabel 2. 47	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL	276
Tabel 2. 48	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL.....	279
Tabel 2. 49	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL.....	281
Tabel 2. 50	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL.....	284
Tabel 2. 51	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL.....	287
Tabel 2. 52	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL.....	290
Tabel 2. 53	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL.....	293
Tabel 2. 54	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL.....	296
Tabel 2. 55	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL.....	298
Tabel 2. 56	Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL.....	301
Tabel 2. 57	Matriks Perumusan Masalah Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026	308
Tabel 3. 1	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul	III-6
Tabel 3. 2	Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul	III-8
Tabel 3. 3	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 dan Target Tahun 2026.....	III-9
Tabel 3. 4	Capaian Rasio Gini Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 ..	III-10
Tabel 3. 5	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul	III-11
Tabel 3. 6	Penyandingan Target Indikator Ekonomi Makro Tahun 2026	III-12
Tabel 3. 7	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2025 dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun 2026 (Rupiah)	III-15
Tabel 3. 8	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023-2025	

	dan Proyeksi Perubahan Belanja Tahun 2026 (Rupiah).....	III-19
Tabel 3. 9	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2025 dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun 2026 (Rupiah)	III-21
Tabel 3.10	Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Rupiah)	III-22
Tabel 4.1	Sinkronisasi Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan Program Perangkat Daerah Tahun 2026	IV-6
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026	IV-46
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 .	IV-47
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026	IV-49
Tabel 4.5	Penyelarasan Tema dan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026.....	IV-70
Tabel 4.6	Penyelarasan Tema dan Prioritas DIY dengan Prioritas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026.....	IV-71
Tabel 4.7	Interkoneksi Pendekatan Prioritas, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bantul dengan Program Unggulan dan Program Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul	IV-73
Tabel 4.8	Interkoneksi Program Strategis Nasional (ProSN) dengan Program Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul..	IV-79
Tabel 4.9	Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi	IV-86
Tabel 5.1	Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.....	V-1
Tabel 5.2	Rekapitulasi Perubahan Anggaran SPM	V-3
Tabel 5. 3	Rekapitulasi Perubahan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2026.....	V-33
Tabel 5.4	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2026	V-47
Tabel 5.5	Dukungan Kabupaten Bantul terhadap Prioritas Nasional	V-291

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Jumlah Program RPJMD dan RKPD 2026	II-2
Gambar 2. 2 Jumlah Program RKPD 2026 dan APBD 2026	II-4
Gambar 2. 3 Perbandingan Kegiatan Dalam RKPD Dengan APBD	II-5
Gambar 2. 4 Perbandingan Anggaran Belanja Dalam RKPD Dengan APBD	II-6
Gambar 2. 5 Target dan Realisasi Keuangan (%) Kabupaten Bantul s.d SEMESTER I Tahun 2026.....	II-7
Gambar 2. 6 Target dan Realisasi Fisik (%) Kabupaten Bantul s.d SEMESTER I 2026.....	II-12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat prioritas pembangunan daerah, sasaran pembangunan, arah kebijakan, program, kegiatan, serta kerangka pendanaan dan indikator kinerja pembangunan daerah. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2026, dinamika perkembangan kondisi sosial, ekonomi, keuangan daerah, serta kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengalami perubahan dibandingkan dengan kondisi pada saat RKPD Tahun 2026 ditetapkan. Perubahan tersebut perlu direspons melalui penyesuaian perencanaan pembangunan agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap relevan, efektif, efisien, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta perkembangan lingkungan strategis.

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026, terdapat perkembangan capaian kinerja program dan kegiatan, perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta perkembangan kondisi keuangan daerah yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan target dan prioritas pembangunan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan tetap memiliki keterkaitan yang kuat dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2026 juga diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan kebijakan nasional dan provinsi, perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah, perubahan proyeksi penerimaan daerah, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, serta penyesuaian terhadap kebutuhan belanja daerah yang bersifat prioritas dan mendesak. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi agar pengalokasian sumber daya pembangunan dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan Tahun 2026 perlu tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah serta menjaga kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, perubahan terhadap RKPD tidak hanya dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan, tetapi juga untuk memperkuat konsistensi antara prioritas pembangunan, pencapaian indikator kinerja, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan pembangunan yang berkembang.

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026, perkembangan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan kapasitas fiskal daerah, serta kebutuhan penyesuaian program dan kegiatan, maka Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menyusun Perubahan RKPD Tahun 2026.

Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, menjaga kesinambungan pencapaian sasaran pembangunan, serta menjadi dasar dalam penyusunan perubahan kebijakan anggaran dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dengan demikian, penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan,

konsistensi, dan adaptabilitas proses perencanaan pembangunan daerah terhadap perkembangan kondisi aktual, sekaligus memastikan agar pelaksanaan pembangunan tetap berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - k. Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
- q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 34);
- r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan kedua atas peraturan bupati bantul nomor 78 tahun 2025 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah:

- a. Menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUPA, PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
- c. Memberikan arah dan sekaligus penyesuaian tolak ukur kinerja pembangunan daerah selaras perubahan dinamika yang terjadi.

Adapun **tujuan** Penyusunan Perubahan RKPD 2026 adalah:

- a. Menciptakan kepastian, sinergitas, dan konsistensi perencanaan program kegiatan pembangunan antar Perangkat Daerah, wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
- c. Menjadi acuan terhadap arah dan kebijakan pembangunan bagi seluruh komponen pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Dokumen

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 yang

mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen.

Bab II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2026

Bab ini menguraikan evaluasi hasil RKPD Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II dan permasalahan pembangunan daerah yang mendasari perlunya disusun Perubahan RKPD Tahun 2026.

Bab III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan rancangan ekonomi dan keuangan daerah yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro semester pertama Tahun 2026 dan proyeksi semester kedua Tahun 2026, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan pada Tahun 2026.

Bab IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, yaitu penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah.

Bab V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Bab VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2026 SEMESTER I

2.1 Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2026

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD mencakup tinjauan komprehensif atas kebijakan umum serta program pembangunan yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2026. Evaluasi ini difokuskan pada penilaian indikasi program prioritas beserta kerangka pendanaan yang menyertainya guna memastikan akuntabilitas kinerja daerah. Adapun potret sinergitas serta hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 dalam mendukung pencapaian target-target strategis sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul, disajikan secara mendalam pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2. 1 Keselarasan Pelaksanaan RKPD Tahun 2026

RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Keselarasan Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun 2026						
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA	V	-	-	-	-
Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS	V	-	-	-	-
Keselarasan rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun 2026						
Program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota	RKA Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	V	-	-	-	-
Realisasi capaian kinerja						
Realisasi pencapaian target Penyerapan dana	Laporan Triwulanan	V	-	-	-	-

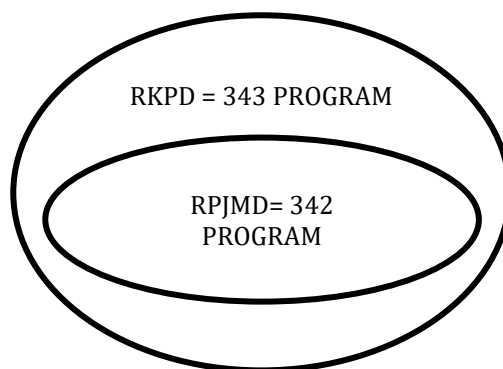
RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Kendala pelaksanaan program						

Sumber: Laporan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda, 2026

2.1.1 Relevansi Program RPJMD Dengan RKPD Tahun 2026

Berdasarkan hasil pemadanan dokumen perencanaan daerah, menunjukkan tingkat keselarasan yang sangat tinggi antara perencanaan jangka menengah periode baru dengan perencanaan tahunan berjalan. Dari total 342 program yang dirumuskan dalam dokumen induk RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 untuk tahun pelaksanaan 2026, dokumen RKPD Tahun 2026 telah berhasil mengakomodasi dan menjabarkan hingga 343 program.

Konsistensi spasial dan materiil antara dokumen induk jangka menengah periode baru ini dengan dokumen operasional tahunan pada Semester 1 Tahun 2026 digambarkan secara visual melalui perbandingan jumlah program kerja daerah pada Gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2. 1 Jumlah Program RPJMD dan RKPD 2026

Penting untuk dipahami bahwa terdapat perbedaan basis data dan sudut pandang penyajian dalam penghitungan jumlah program pembangunan daerah pada laporan pengendalian pertengahan tahun ini. Angka 342 program dalam RPJMD Periode 2025–2029 serta 343 program dalam RKPD Tahun 2026 merujuk pada pemetaan jumlah nomenklatur program unik yang diselaraskan dengan klasifikasi kodefikasi mutakhir

berdasarkan regulasi pemetaan urusan daerah dan sistem informasi nasional. Adanya selisih penambahan 1 (satu) program pada RKPD Tahun 2026 merupakan representasi dari langkah penyesuaian dinamis dan restrukturisasi nomenklatur demi mengakomodasi kebijakan prioritas nasional maupun daerah yang bersifat mendesak di awal transisi periode jangka menengah yang baru ini.

Sementara itu, dalam laporan timbal balik pemantauan kinerja, akumulasi program memunculkan angka yang jauh lebih besar (seperti akumulasi per entitas pelaksana). Perbedaan angka agregat tersebut terjadi karena adanya program penunjang urusan atau program yang bersifat lintas sektor (seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) yang diampu secara serentak oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dalam laporan timbal balik, program-program penunjang tersebut dihitung secara akumulatif berdasarkan jumlah PD yang mengoperasikannya guna mempermudah pemantauan kinerja anggaran dan efektivitas di tiap unit kerja pada Semester 1 ini. Dengan demikian, perbedaan angka ini tidak menunjukkan adanya ketidaksinkronan materiil dalam dokumen perencanaan Semester I Tahun 2026, melainkan semata-mata mencerminkan perbedaan metode penyajian data:

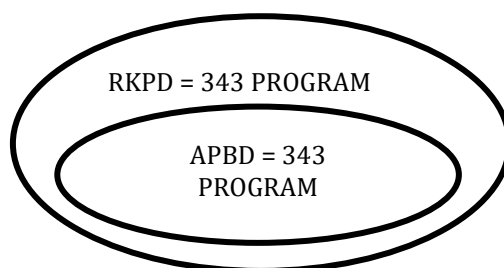
- 1) Penyajian Berdasarkan Substansi Program (Nomenklatur Unik)
Digunakan untuk mengevaluasi keselarasan kebijakan makro antara RPJMD Periode Baru 2025–2029 dengan RKPD 2026.
- 2) Penyajian Berdasarkan Distribusi Pelaksanaan Perangkat Daerah
Digunakan untuk kebutuhan evaluasi operasional, pengendalian teknis, dan pertanggungjawaban administratif di tingkat unit kerja (PD) pengguna anggaran selama Triwulan I dan II.

2.1.2 Relevansi Program RKPD Dengan APBD Tahun 2026

Dalam tahapan penganggaran, Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran yang sangat tinggi dan presisi pada periode berjalan. Dari total 343 program yang direncanakan dalam dokumen RKPD Tahun 2026, seluruh 343 program

tersebut telah secara sah ditetapkan dan mendapatkan alokasi pagu anggaran yang definitif dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

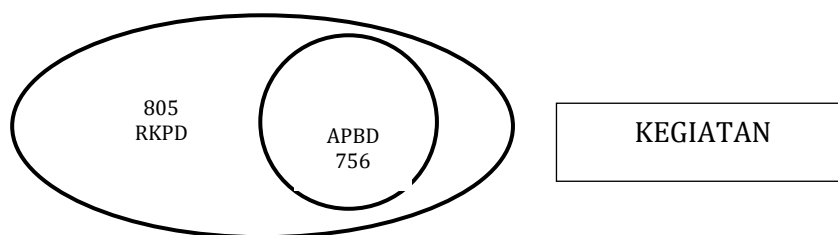
Tingkat keselarasan yang mencapai 100% pada level program ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk memastikan seluruh instrumen kebijakan pembangunan tahunan terintegrasi secara utuh ke dalam dokumen keuangan daerah tanpa adanya eliminasi substansi. Hubungan kausalitas dan keselarasan program kerja pembangunan daerah pada Semester 1 Tahun 2026 digambarkan secara visual melalui perbandingan angka pada Gambar 2.2 berikut ini..



Gambar 2. 2 Jumlah Program RKPD 2026 dan APBD 2026

Setelah meninjau keselarasan pada level program, evaluasi selanjutnya dilakukan pada aspek yang lebih operasional, yaitu pada tingkat kegiatan di lingkup perangkat daerah. Perbandingan penjenjangan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana rencana kerja yang telah disusun dalam RKPD Tahun 2026 mampu dijabarkan secara detail dan konsisten ke dalam alokasi belanja pada APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

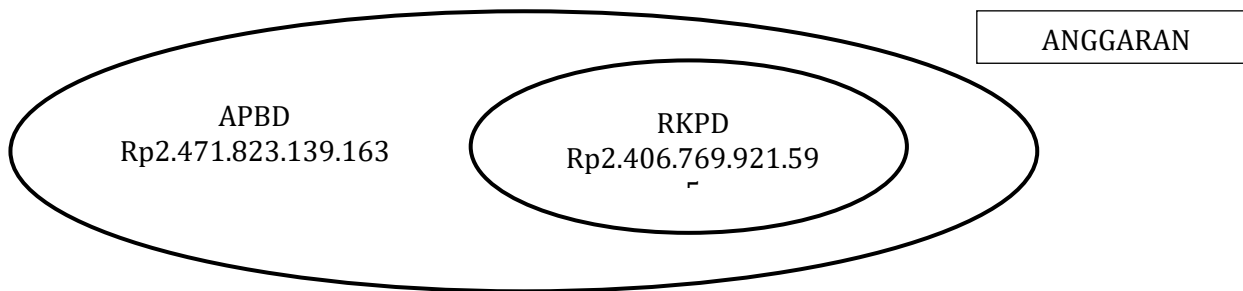
Melalui pemadanan jumlah kegiatan antara kedua dokumen anggaran tersebut, dapat diukur tingkat konsistensi pemerintah daerah dalam menerjemahkan setiap target strategis pembangunan jangka menengah ke dalam aksi nyata di tiap instansi pengguna anggaran. Evaluasi ini menjadi basis penting pengendalian Semester 1 guna mendeteksi apabila terdapat pergeseran urusan, pemaketan ulang sub-kegiatan, ataupun penyesuaian belanja akibat kebijakan fiskal nasional yang berjalan sepanjang Triwulan I dan Triwulan II. Berikut adalah rincian perbandingan akumulatif jumlah kegiatan dalam RKPD dibandingkan dengan realisasi penetapan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2026:



Gambar 2. 3 Perbandingan Kegiatan Dalam RKPD Dengan APBD

Ditinjau dari perspektif manajemen perencanaan, deviasi sebesar 6,1% (selisih 49 kegiatan) ini mengindikasikan berjalannya fungsi quality assurance yang ketat pada fase transisi dari dokumen perencanaan (RKPD) menuju dokumen penganggaran (APBD) di awal periode RPJMD 2025–2029. Pemaketan ulang dan konsolidasi beberapa kegiatan sejenis ke dalam nomenklatur yang lebih makro terbukti efektif dalam memangkas fragmentasi belanja daerah. Langkah taktis ini diambil guna memastikan tidak terjadi duplikasi keluaran (output) antar Perangkat Daerah, sekaligus menyelaraskan substansi operasional dengan restrukturisasi sistem informasi pertanggungjawaban anggaran yang berbasis elektronik.

Sebagai instrumen pengendalian di posisi Semester I Tahun Anggaran 2026, penurunan jumlah kuantitas kegiatan ini menuntut Bappeda bersama jajaran Perangkat Daerah penanggung jawab untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap performa 756 kegiatan eksisting. Pemantauan intensif difokuskan pada pemenuhan target capaian fisik pada Triwulan I dan II, guna memastikan bahwa pengurangan jumlah kegiatan ini murni merupakan hasil efisiensi struktur belanja, dan bukan merupakan penurunan target kinerja pelayanan publik. Konsistensi operasional yang berada di angka 93,9% ini mencerminkan tingkat disiplin anggaran yang sangat baik, sekaligus memberikan ruang kendali yang lebih fokus bagi tim evaluator dalam mengawal akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Bantul sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.



Gambar 2. 4 Perbandingan Anggaran Belanja Dalam RKPD Dengan APBD

Ditinjau dari aspek tata kelola keuangan, evaluasi pada posisi Semester I Tahun Anggaran 2026 menunjukkan adanya dinamika penyesuaian pagu anggaran yang positif dan rasional antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Tercatat alokasi belanja dalam dokumen RKPD Tahun 2026 adalah sebesar Rp2.406.769.921.595, sedangkan pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 terkonsolidasi meningkat menjadi Rp2.471.823.139.163.

Pertumbuhan pagu sebesar Rp65.053.217.568 (atau naik sekitar 2,7%) dari tahapan perencanaan ke penetapan penganggaran ini mencerminkan adanya ekspansi ruang fiskal daerah serta optimalisasi kapasitas pendapatan daerah pada awal transisi periode RPJMD 2025–2029. Penambahan alokasi ini difokuskan untuk memperkuat dukungan pendanaan pada program-program prioritas strategis, pemenuhan mandatory spending, serta penyelarasan atas penyesuaian alokasi transfer pemerintah pusat dan daerah yang terkonsolidasi menjelang penetapan APBD Murni.

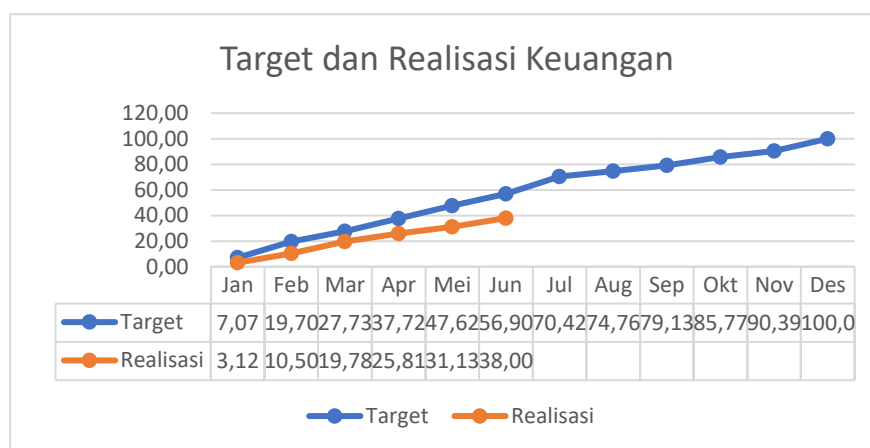
Sebagai instrumen pengendalian pada pertengahan tahun berjalan (Semester I), penambahan pagu anggaran ini menuntut komitmen tinggi dari seluruh Perangkat Daerah pengampu untuk mengakselerasi penyerapan anggaran operasional maupun pelaksanaan kegiatan fisik sejak dini. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya penumpukan realisasi keuangan dan fisik di akhir tahun anggaran. Secara keseluruhan, peningkatan pagu yang terukur ini membuktikan fleksibilitas dan integritas tata kelola fiskal Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjaga keseimbangan antara target perencanaan makro dengan kebutuhan riil pembangunan daerah yang dinamis secara akuntabel.

2.2 Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2026 Semester I

Realisasi kinerja keuangan merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya daerah dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan. Evaluasi terhadap penyerapan anggaran pada Semester I Tahun 2026 dilakukan untuk memantau sejauh mana dukungan fiskal daerah mampu mengakselerasi pelaksanaan berbagai program strategis, prioritas pembangunan, serta kinerja pelayanan publik. Gambaran umum pelaksanaan dan realisasi kinerja keuangan daerah pada Semester I Tahun 2026 disajikan secara berjenjang mulai dari tataran makro hingga pencapaian pada tingkat program dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut:

2.2.1 Realisasi Keuangan Makro

Jumlah anggaran belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan enam tujuan, sembilan sasaran, lima prioritas dan 13 (tiga belas) program unggulan pembangunan daerah pada Tahun 2026 adalah sebesar Rp2.471.823.139.162,89 dengan serapan anggaran pada Semester I 2026 mencapai Rp999.642.724.683,86 atau sekitar 40.44% terhadap total belanja. Hasil evaluasi realisasi kinerja fisik dan keuangan pada Semester I masing-masing dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Sumber: eSAKIP Kabupaetn Bantul dan LRA BPKPAD Kabupaten Bantul, Juli 2026

Gambar 2. 5 Target dan Realisasi Keuangan (%) Kabupaten Bantul s.d SEMESTER I Tahun 2026

Selanjutnya target realisasi keuangan sampai dengan Semester I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Keuangan sampai dengan Semester I Tahun 2026 (per Juni 2026)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2026	%
5	BELANJA DAERAH	2.471.823.139.162,89	999.642.724.683,86	40,44
5.1	BELANJA OPERASI	1.998.762.335.022,29	864.224.564.114,74	43,24
5.1.01	Belanja Pegawai	1.032.884.417.313,04	483.764.903.858,00	46,84
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	873.194.251.299,25	345.496.003.156,74	39,57
5.1.05	Belanja Hibah	88.013.866.410,00	33.278.057.100,00	37,81
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.669.800.000,00	1.685.600.000,00	36,10
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.998.762.335.022,29	864.224.564.114,74	43,24
5.2	BELANJA MODAL	156.357.627.847,60	24.265.474.423,12	15,52
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.027.658.308,00	10.209.595.811,00	27,57
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.258.849.415,60	5.189.423.477,12	18,36
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.284.248.102,00	7.965.996.615,00	9,68
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.786.872.022,00	900.458.520,00	10,25
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	156.357.627.847,60	24.265.474.423,12	15,52
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.361.411.094,00	339.192.975,00	10,09
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.361.411.094,00	339.192.975,00	10,09
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	3.361.411.094,00	339.192.975,00	10,09
5.4	BELANJA TRANSFER	313.341.765.199,00	110.813.493.171,00	35,37
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	31.706.991.909,00	16.989.031.141,00	53,58
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Kabupaten/Kota dan Desa	5.564.269.260,00	2.643.947.030,00	47,52
	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000.000,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	268.426.557.000,00	91.180.515.000,00	33,97
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	313.341.765.199,00	110.813.493.171,00	35,37
JUMLAH BELANJA		2.471.823.139.162,89	999.642.724.683,86	40,44

Sumber: LRA Kabupaten Bantul, BPKPAD Kabupaten Bantul, Juli 2026

Berdasarkan penyajian data pada visualisasi grafik Target vs Realisasi Keuangan dan tabel Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi di atas, dapat ditarik analisis mengenai performa fiskal daerah hingga akhir Semester I (30 Juni 2026) sebagai berikut:

- Analisis Deviasi Target Bulanan (Perspektif Grafik Kinerja)

Realisasi anggaran menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil sejak awal tahun, dimulai dari angka 3,12% pada bulan Januari dan terus merangkak naik hingga menyentuh akumulasi 38,00% pada akhir bulan Juni. Meskipun demikian, jika disandingkan dengan parameter target kumulatif yang telah ditetapkan di dalam sistem perencanaan sebesar 56,90%, maka performa serapan keuangan daerah pada paruh pertama tahun ini mencatatkan adanya deviasi negatif sebesar -18,90%. Melebarnya jarak (gap) antara garis target dan garis realisasi dari bulan April hingga Juni mengindikasikan adanya beban kerja tertunda (backlog) akibat proses administrasi kontrak pengadaan barang/jasa atau pelaksanaan konstruksi fisik belanja modal yang mayoritas baru akan memasuki tahapan pencairan termin pada triwulan berikutnya.

- Analisis Struktur Belanja Daerah

Meskipun grafik kinerja mengunci angka serapan sektoral di angka 38,00%, dokumen LRA Konsolidasi mencatatkan total realisasi belanja agregat yang sedikit lebih tinggi, yaitu mencapai Rp999.642.724.683,86 atau sebesar 40,44% dari total alokasi pagu Belanja Daerah senilai Rp2,47 Miliar. Dari total serapan tersebut, pos Belanja Operasi menjadi motor penggerak utama dengan daya serap tertinggi mencapai 43,24% (Rp864.224.564.114,74), yang didominasi oleh ketepatan pemenuhan Belanja Pegawai (46,84%) serta Belanja Barang dan Jasa (39,57%). Sebaliknya, pos Belanja Modal masih tertahan pada angka 15,52%, di mana Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi baru terealisasi sebesar 9,68%, yang secara linier menjelaskan mengapa kurva realisasi pada grafik di atas belum mampu melakukan elevasi tajam mendekati garis target makro.

- Rekonsiliasi Deviasi dan Catatan Perbedaan Data

Terdapat selisih metrik sebesar 2,44% antara realisasi akhir pada grafik (38,00%) dengan tabel LRA Konsolidasi (40,44%). Perbedaan ini terjadi akibat adanya faktor time lag (jeda waktu) sinkronisasi data pembukuan SP2D dari Bank Persepsi ke dalam aplikasi pelaporan digital, serta adanya komponen non-operasional seperti Belanja Tidak

Terduga (10,09%) dan beberapa sub-rincian Belanja Transfer (35,37%) termasuk sisa input Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah senilai Rp2,64 Miliar yang secara sistem belum sepenuhnya terpetakan ke dalam target bulanan grafik kinerja.

- Mengingat target perencanaan pada bulan Juli melonjak signifikan menuju angka 70,42%, maka daerah dihadapkan pada tantangan akselerasi belanja yang sangat masif pada awal Semester II. Langkah strategis yang direkomendasikan adalah mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan percepatan penyerapan belanja sisa pagu anggaran teknis, menyegerakan pengajuan pencairan dana termin bagi kontrak fisik yang telah berjalan, serta mengoptimalkan pemutakhiran penginputan data monitoring-evaluasi secara berkala melalui sistem informasi satu data daerah guna menjamin akurasi dan konsistensi data hulu-hilir.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kesenjangan (gap) antara target anggaran kas dengan realisasi di lapangan, diidentifikasi beberapa kendala teknis dan administratif per jenis belanja yang menyebabkan serapan anggaran belum optimal hingga 30 Juni 2026:

1) Belanja Pegawai:

Terdapat kekosongan formasi pegawai akibat adanya aparatur yang memasuki masa pensiun, mendapatkan promosi, maupun mutasi instansi, di mana alokasi gaji dan tunjangannya sudah terlanjur dianggarkan secara penuh di awal tahun.

2) Belanja Barang dan Jasa:

- Mayoritas paket pekerjaan masih berjalan pada tahap perencanaan, persiapan teknis, penyesuaian Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ), adendum kontrak, hingga proses penyaluran uang muka atau termin kerja.
- Terjadinya keterbatasan anggaran Ganti Uang (GU) di beberapa Perangkat Daerah, sehingga pencairan anggaran untuk kegiatan di bawah Rp50 juta tidak dapat terakomodasi secara cepat.
- Pengadaan alat-alat kesehatan penting belum dapat direalisasikan akibat proses pembangunan fisik gedung penunjangnya masih

dalam tahap konstruksi.

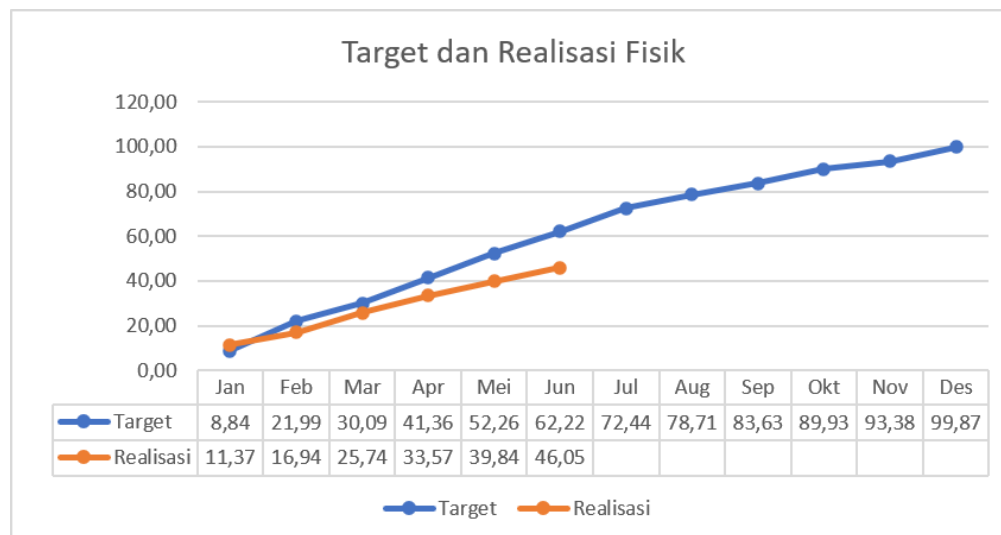
- Terjadinya pelimpahan Uang Persediaan (UP) dari OPD induk yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai pagu, keterlambatan penagihan premi asuransi P3KPW, serta pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang membutuhkan penyesuaian administrasi ulang.
- Adanya perubahan kebijakan taktis dalam penyelenggaraan sosialisasi kegiatan serta kendala penyesuaian jadwal kesediaan narasumber.

3) Belanja Modal:

- Proses pengadaan barang dan jasa mengalami keterlambatan (delay) akibat adanya penyesuaian regulasi terbaru terkait tata cara perhitungan harga pada aplikasi INAPROC (LKPP).
- Terdapat efisiensi anggaran di mana harga paket pengiriman riil di lapangan berada di bawah pagu Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yang dianggarkan.

Selain pemantauan pada aspek fiskal dan penyerapan anggaran, instrumen pengendalian yang tidak kalah krusial dalam sistem evaluasi RKPD adalah pengukuran capaian kinerja fisik program dan kegiatan. Pengukuran ini ditujukan untuk melihat sejauh mana output riil di lapangan telah berhasil dieksekusi oleh seluruh Perangkat Daerah, sekaligus memastikan adanya keselarasan (alignment) antara modalitas anggaran yang telah dicairkan dengan volume perkembangan fisik di lapangan.

Idealnya, laju realisasi fisik harus bergerak lebih progresif atau sekurang-kurangnya proporsional dengan realisasi keuangan, guna mengantisipasi deviasi administratif seperti kontrak yang belum memasuki masa pencairan termin pembayaran. Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perbandingan akselerasi pembangunan sektoral, fluktuasi kumulatif target dan realisasi fisik yang dihimpun secara berkala hingga paruh pertama tahun berjalan disajikan secara visual melalui grafik berikut:



Sumber: Hasil Timbal Balik Pengendalian Semester I dan Esakip ROPK Kabupaten Bantul, Juli 2026

Gambar 2. 6 Target dan Realisasi Fisik (%) Kabupaten Bantul s.d SEMESTER I 2026

Berdasarkan grafik Target dan Realisasi Fisik di atas serta kompilasi laporan monitoring sub-kegiatan, progres keluaran (output) pembangunan daerah hingga akhir Semester I (30 Juni 2026) sebagai berikut:

1) Analisis Tren dan Deviasi Kurva Fisik Makro

Realisasi progres fisik kumulatif daerah bergerak positif dari waktu ke waktu. Pada bulan Januari, realisasi fisik sempat mencatatkan performa awal yang sangat baik di angka 11,37%, melampaui target awal sebesar 8,84% (deviasi positif +2,53%). Namun memasuki bulan Februari, garis realisasi mulai mengalami perlambatan dan konsisten berada di bawah garis target perencanaan).

2) Hingga akhir bulan Juni, akumulasi capaian realisasi fisik daerah baru menyentuh angka 46,05%. Jika disandingkan dengan target kumulatif Semester I sebesar 62,22%, maka kinerja keluaran fisik daerah mengalami deviasi negatif sebesar -16,17%. Ketertinggalan laju fisik ini searah dengan lambatnya penyerapan pada pos Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa sektoral pada paruh pertama tahun anggaran.

Untuk mengurai deviasi negatif sebesar -16,17% pada grafik makro di atas, dilakukan penelusuran masalah sampling pada tingkat sub-kegiatan strategis di beberapa Perangkat Daerah pelaksana. Secara umum, faktor penghambat utama dikelompokkan ke dalam klaster permasalahan

sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan Administrasi dan Tahap Persiapan Pengadaan (Dikpora & DLH)
 - Capaian Fisik 0% s.d. 5%: Terjadi stagnasi fisik yang masif pada paket-paket pengadaan barang dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah. Sub-kegiatan seperti Pengadaan Perlengkapan Sekolah (0%), Pengadaan Mebel Sekolah (0%), Pembangunan Sarana/Prasarana Sekolah (0%), Rehabilitasi Laboratorium (0%), serta Pembangunan Ruang Kelas Baru (0%) seluruhnya masih tertahan pada tahap persiapan pengadaan dan penyusunan berkas administrasi.
 - Proses Konsultasi & Kontrak: Beberapa sub-kegiatan berskala besar baru memulai tahap koordinasi awal, rapat persiapan, atau baru menyelesaikan penunjukan jasa konsultan perencana/supervisi (misal: Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (3-4%) dan Rehabilitasi Ruang Kelas/Utilitas (10-15%)). Kondisi serupa terjadi pada DLH dalam Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis (8%) akibat adanya keterlambatan proses pengadaan sehingga penandatanganan kontrak baru terlaksana di akhir bulan.
- 2) Hambatan Teknis, Regulasi, dan Distribusi Logistik (Dinkes)
 - Pada sub-kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (0,88%), kendala fisik disebabkan oleh proses pengadaan logistik kesehatan (Rapid HIV Syphilis) yang masih tertahan menunggu jadwal pengiriman barang dari pihak penyedia.
 - Sub-kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (5,08%) menghadapi hambatan multisektoral, mulai dari belum jalannya pengolahan sumber air minum komunal, minimnya sarpras pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengurusan septic tank, hingga keterbatasan kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
 - Sub-kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (34,97%), deviasi fisik di lapangan terjadi karena tindakan

ke daruratan seperti fogging sengaja dikurangi/belum dilaksanakan secara menyeluruh akibat tren kasus penularan penyakit yang dilaporkan sedang menurun.

3) Tata Kelola Sistem, Integrasi Data, dan Sinergi Lintas Sektor (Diskominfo)

- Pada sub-kegiatan pengelolaan TIK dan Satu Data (rata-rata fisik tertahan di angka 23% s.d. 41%), hambatan utama bersumber dari belum konsistennya perencanaan konten komunikasi publik, rendahnya keterlibatan audiens, serta bertahannya ego sektoral (silo data) di masing-masing instansi.
- Belum meratanya kualitas konektivitas jaringan intra-pemerintah, keterbatasan anggaran pemeliharaan, belum optimalnya infrastruktur teknologi pusat kendali (command center), serta belum diterapkannya standar operasional tata kelola keamanan informasi dan persandian secara menyeluruh di lingkup pemerintah daerah.

4) Sub-Kegiatan Rutin Berkelanjutan / Sesuai Aturan (Dikpora dan Dinkes)

- Beberapa sub-kegiatan dengan pagu besar bermasalah dengan pengisian penjelasan di sistem e-SAKIP, seperti Bimbingan Teknis UKBM (30,99%) dan Penatausahaan Pemanfaatan Rusunawa DPUPKP (0%) yang belum menginputkan keterangan kendala secara valid.
- Sementara untuk pos belanja personil/aparatur seperti Penyediaan Biaya Personil SD (40%), SMP (32%), dan Pemetaan Pendidik (25%) berjalan normal secara bertahap mengikuti jadwal periodik penyaluran dana BOS/BOSDA dan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS/PPK sesuai regulasi.

2.2.2 Realisasi Tender Barang/Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen vital dalam akselerasi pembangunan fisik di Kabupaten Bantul. Hingga akhir Juni 2026, potret pelaksanaan tender menunjukkan kesiapan administratif perangkat daerah dalam mengeksekusi paket-paket strategis. Secara makro, progres

pengadaan yang melalui mekanisme tender/seleksi disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Progres Pengadaan Yang Melalui Mekanisme Tender/Seleksi Kabupaten Bantul tahun 2026 Semester I

Periode	Jumlah Paket Pengadaan Tahun 2026 (Yang harus melalui tender)	Total Pagu Seluruh Paket Pengadaan (Rp) (Yang harus melalui tender)	Realisasi jumlah paket selesai tender s.d. Akhir Periode	Realisasi Paket yang selesai tender s.d. Akhir Periode (dalam Rp)
TW I	151 paket	91.490.669.877,00	4 paket	22.445.302.288,64
TW II	71 paket	87.121.635.970,00	12 paket	26.256.623.518,00

Sumber: Data diolah, PBJ Kabupaten Bantul, Juli 2026

Dengan rincian untuk masing-masing jenis pengadaan (konstruksi, barang, jasa konsultansi, dan jasa lainnya) sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Rincian Pengadaan Kabupaten Bantul tahun 2026 Semester I

JENIS PENGADAAN	JUMLAH TOTAL TAHUN 2026		REALISASI TW II 2026		
	Rencana	Pagu (Rp)	JUMLAH	HPS (Rp)	Kontrak (Rp)
Barang	-	0	-	-	0
Pekerjaan Konstruksi	71	86.621.635.970,00	11	27.536.216.469,85	26.058.599.518
Jasa Lainnya	-	0	-	-	0
Jasa Konsultansi	3	500.000.000,00	1	199.922.100,00	198.024.000,00
TOTAL	74	87.121.635.970,00	12	27.736.138.569,85	26.256.623.518,00

Sumber: Data diolah, PBJ Kabupaten Bantul, Juli 2026

Proses pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen vital dalam akselerasi pembangunan fisik di Kabupaten Bantul. Berdasarkan data evaluasi Semester I Tahun 2026, dinamika perencanaan tender mengalami penyesuaian dari Triwulan I ke Triwulan II. Pada Triwulan I, tercatat perencanaan awal sebanyak 151 paket dengan pagu Rp91,49 miliar, di mana 4 paket senilai Rp22,44 miliar berhasil diselesaikan. Memasuki Triwulan II, target tender disesuaikan menjadi 71 paket dengan pagu Rp87,12 miliar, dan akumulasi paket yang selesai dilelang hingga akhir Juni 2026 bertambah menjadi 12 paket dengan nilai realisasi sebesar Rp26,26 miliar.

Ditinjau berdasarkan jenis pengadaannya pada Triwulan II 2026, Sektor Pekerjaan Konstruksi mendominasi seluruh perencanaan tender dengan

total 71 paket bernilai pagu Rp86,62 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 paket konstruksi telah selesai ditenderkan dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp27,53 miliar dan menghasilkan nilai kontrak terkunci sebesar Rp26,05 miliar. Sementara itu, untuk pengadaan Jasa Konsultansi terdapat 3 paket rencana dengan pagu Rp500 juta, di mana 1 paket telah selesai dilaksanakan dengan nilai kontrak Rp198,02 juta (dari HPS Rp199,92 juta). Adapun untuk pengadaan Barang dan Jasa Lainnya tidak mencatatkan perencanaan tender pada periode ini.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tender pada Semester I Tahun 2026 menunjukkan efisiensi anggaran yang positif akibat kompetisi yang sehat dalam proses pemilihan penyedia. Akumulasi nilai HPS dari total 12 paket yang telah selesai ditenderkan pada Triwulan II mencapai Rp27,73 miliar, sementara total nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp26,25 miliar. Hal ini menghasilkan efisiensi atau penghematan anggaran pengadaan sebesar Rp1,47 miliar (sekitar 5,33% dari total HPS) yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program pembangunan daerah lainnya.

Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan atensi khusus pada paket-paket proyek strategis yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Hingga akhir Juni 2026, progres proyek strategis menunjukkan capaian sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Progres Proyek Strategis Kabupaten Bantul Thn 2026 Semester I

No	Daftar paket Strategis		
	Nama Paket	PAGU	Progres s/d TW II 2026 (per 2 Juli 2026)
1	Pembangunan Taman Budaya	20.526.500.000,00	Masa Pelaksanaan
2	Jembatan Sumberan	5.000.000.000,00	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, penandatanganan kontrak rencana 10 Juli 2026.
3	Jalan Siluk – Srunggo	3.801.062.332,00	Berkontrak tanggal 2 Juli 2026, dan proses pencairan uang muka pekerjaan.
4	Jalan Banyak Dua - Kedung Walikukun	2.685.535.160,00	Berkontrak tanggal 2 Juli 2026, dan proses pencairan uang muka pekerjaan.

No	Daftar paket Strategis		
	Nama Paket	PAGU	Progres s/d TW II 2026 (per 2 Juli 2026)
5	Jalan Nogosari – Klampok	2.521.363.340,00	Berkontrak tanggal 2 Juli 2026, dan proses pencairan uang muka pekerjaan.
6	Jalan Jetis – Karangsemut	2.532.076.008,00	Berkontrak tanggal 2 Juli 2026, dan proses pencairan uang muka pekerjaan.
7	Pengadaan Seragam/Kain Seragam SMP dan MTs	2.345.010.000,00	Persiapan pekerjaan, Review ulang HPS atas saran masukan dari APIP.
8	Pengadaan Seragam /Kain Seragam SD dan MI	2.142.205.000,00	Persiapan pekerjaan, Review ulang HPS atas saran masukan dari APIP.
9	Jalan Kedungbuweng – Giriloyo	2.141.090.160,00	Berkontrak tanggal 2 Juli 2026, dan proses pencairan uang muka pekerjaan.
10	Pembangunan TPST Argodadi	1.518.125.000,00	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Sumber: Data diolah, PBJ Kabupaten Bantul, Juli 2026

Sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 781 Tahun 2025 tentang Sepuluh Proyek Strategis Tahun 2026, pemerintah daerah telah mengunci 10 paket pengadaan prioritas yang memiliki daya ungkit (multiplier effect) ekonomi dan sosial tinggi bagi masyarakat. Dalam implementasinya, kesepuluh paket tersebut diklasifikasikan ke dalam dua metode pemilihan penyedia, yaitu Metode Tender untuk 8 (delapan) paket pekerjaan konstruksi, dan Metode E-Purchasing (E-Katalog) untuk 2 (dua) paket pengadaan non-konstruksi.

Memasuki akhir Semester I (kondisi per 30 Juni 2026), hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa proses eksekusi 10 paket proyek strategis ini menghadapi tantangan makroekonomi yang cukup berat. Fluktuasi ekonomi berupa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lonjakan harga material konstruksi di pasar menjadi faktor penghambat utama yang menimbulkan efek domino pada tahapan pengadaan melalui beberapa kondisi berikut:

- 1) Fenomena Tender Gagal pada Klaster Jalan dan Jembatan: Akibat lonjakan harga BBM yang signifikan, proses pemilihan penyedia untuk paket-paket infrastruktur jalan dan jembatan di bawah

DPUPKP sempat mengalami Tender Gagal pada gelombang awal pasca-tayang 4 April 2026. Kenaikan harga komponen logistik dan material membuat para penyedia di pasar kesulitan menyusun penawaran yang masuk akal, sehingga tidak ada rekanan yang mampu memenuhi persyaratan pagu atau mengajukan penawaran yang sesuai di dalam proses pemilihan.

- 2) Implikasi Kaji Ulang HPS dan Keterbatasan Fiskal Daerah: Menindaklanjuti kegagalan tender tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kedinasan terkait harus melakukan kaji ulang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) guna menyesuaikan dengan eskalasi harga pasar terbaru. Namun, proses ini membentur keterbatasan alokasi anggaran daerah yang tersedia. Akibatnya, tim teknis terpaksa melakukan penyesuaian ulang terhadap ruang lingkup pekerjaan (scoping) agar output fungsional dari proyek tetap dapat termanfaatkan secara optimal tanpa melampaui batas pagu anggaran yang ada.

Di tengah hambatan klaster konstruksi tersebut, beberapa sub-kegiatan strategis lainnya berhasil mencatatkan progres yang berjalan sesuai dengan rencana mitigasi:

- 1) Akselerasi Megaprojek Taman Budaya Bantul: Di tengah fluktuasi harga material, proyek pembangunan Taman Budaya Bantul dengan pagu Rp20.526.500.000,00 (bersumber dari Dana Keistimewaan/Danais) menjadi paket konstruksi skala besar yang berhasil mengamankan penandatanganan kontrak tepat waktu pada 6 April 2026, sehingga dapat langsung tereksekusi masuk ke tahapan konstruksi fisik di lapangan sepanjang Semester I.
- 2) Efisiensi Pengadaan Sektor Pendidikan melalui E-Purchasing: Langkah taktis ditunjukkan oleh Dikpora dalam merampungkan Pengadaan Seragam/Kain Seragam SMP/MTs (Pagu Rp2.345.010.000,00) dan SD/MI (Pagu Rp2.142.205.000,00). Melalui pemanfaatan platform E-Katalog, kedua paket non-konstruksi ini terhindar dari risiko tender gagal dan berhasil diselesaikan secara administratif dengan waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan

tender konvensional.

- 3) Kesiapan Pelaksanaan Infrastruktur Sanitasi Lingkungan: Untuk Pembangunan TPST Argodadi (Pagu Rp1.518.125.000,00) oleh DLH, tahapan evaluasi dokumen Detail Engineering Design (DED) telah dirampungkan lewat paparan akhir pada 10 April 2026. Paket ini telah didorong masuk ke proses tender pada bulan Mei 2026 dengan penyesuaian volume fisik yang telah memitigasi risiko fluktuasi harga material sejak dini.

Secara keseluruhan, dinamika kenaikan harga BBM dan material konstruksi telah menciptakan efek domino yang menghambat kelancaran proses administrasi lelang dan menahan laju serapan sisa anggaran pada Triwulan II. Kendati demikian, komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melakukan langkah-langkah mitigasi seperti kaji ulang HPS, rasionalisasi ruang lingkup kerja, hingga pemanfaatan instrumen E-Katalog menjadi pondasi penting bagi percepatan pelaksanaan fisik di Semester II. Monitoring intensif secara berkala terus ditingkatkan untuk memastikan seluruh sisa paket proyek strategis dapat segera terkontrak, akuntabel, selesai tepat waktu, dan mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

2.2.3 Realisasi Berdasarkan Sumber Pendanaan

Selain dipengaruhi oleh kendala teknis dan administratif yang bersifat internal sebagaimana dijabarkan di atas, capaian realisasi belanja daerah pada Semester I ini juga sangat dipengaruhi oleh mekanisme penyaluran serta regulasi yang melekat pada masing-masing sumber pendanaan. Perbedaan karakteristik antara dana transfer pusat, dana keistimewaan, maupun bantuan keuangan provinsi menuntut proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan dokumen yang spesifik pada paruh pertama tahun anggaran. Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai performa serapan anggaran tersebut, berikut adalah analisis realisasi belanja jika ditinjau dari sumber pendanaan yang bersifat khusus:

1) Realisasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui Dana

Keistimewaan terus dioptimalkan untuk mendukung penguatan lima urusan keistimewaan, yaitu kebudayaan, tata ruang, pertanahan, sarana prasarana, dan kelembagaan di Kabupaten Bantul. Progres capaian keuangan pada periode Semester I ini berjalan secara akuntabel sesuai dengan tahapan pengajuan termin pencairan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jika pada awal tahun sebagian besar Perangkat Daerah (PD) pengampu Danais masih berada dalam fase persiapan administrasi dan pelelangan, maka sepanjang Triwulan II telah terjadi akselerasi eksekusi fisik yang signifikan di lapangan. Salah satu pendorong utama pergeseran realisasi keuangan ini adalah pasca-penandatanganan kontrak megaprojek strategis daerah, seperti Pembangunan Taman Budaya Bantul di bawah DPUPKP, yang memicu pencairan uang muka kerja serta pemenuhan termin reguler pelaksanaan konstruksi. Secara lebih rinci, performa serapan Dana Keistimewaan hingga akhir Semester I Tahun 2026 berdasarkan rincian urusan keistimewaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Realisasi Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul s.d Semester I Tahun 2026

NO	Urusan	PAGU	PAGU	REALISASI TAHAP II			KUMULATIF	
			TAHAP II	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	FISIK
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Kelembagaan	2.017.891.000	1.717.150.300	451.936.180	26,32%	29,25%	22,40%	28,62%
2	Kebudayaan	32.487.434.700	27.300.568.700	9.308.344.145	34,10%	48,44%	28,65%	37,90%
3	Pertanahan	5.779.439.800	4.129.011.781	1.241.502.939	30,07%	64,61%	21,48%	36,17%
4	Tata Ruang	970.734.100	970.734.100	738.235.600	76,05%	76,82%	76,05%	97,42%
JUMLAH		41.255.499.600	34.117.464.881	11.740.018.864	34,41%	50,24%	28,46%	38,60%

Sumber: Kenes,DIY, 2026

Berdasarkan rincian data pada tabel di atas, total alokasi pagu tahunan yang dikelola melalui skema Dana Keistimewaan (Danais) pada tahun anggaran berjalan adalah sebesar Rp41.255.499.600,00. Hingga berakhirnya periode Semester I, dukungan alokasi pendanaan khusus untuk penyaluran Tahap II tercatat sebesar Rp34.117.464.881,00. Dari jumlah dana yang tersedia pada Tahap II tersebut, realisasi penyerapan keuangan telah berhasil dieksekusi

sebesar Rp11.740.018.864,00 atau setara dengan 34,41%.

Jika ditinjau secara makro melalui capaian Kumulatif, kinerja fiskal Danais Kabupaten Bantul menunjukkan performa yang cukup sehat dengan realisasi keuangan akumulatif menyentuh angka 28,46% terhadap total pagu tahunan. Hal yang jauh lebih positif untuk dicermati adalah capaian kinerja pada aspek keluaran fisik, di mana progres fisik untuk Tahap II terserap sebesar 50,24% dan mampu mendongkrak pencapaian progres fisik kumulatif tahunan hingga menyentuh angka 38,60%.

Adanya jarak (gap) di mana capaian progres fisik kumulatif (38,60%) bergerak lebih progresif dibandingkan realisasi keuangan kumulatif (28,46%) memberikan gambaran objektif bahwa pelaksanaan program urusan keistimewaan di lapangan telah berjalan secara akseleratif sepanjang pertengahan tahun ini. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar tahapan pekerjaan fisik sub-kegiatan strategis telah dieksekusi secara faktual di lapangan, sementara proses administrasi keuangan atau pencairan termin pembayaran saat ini sedang dalam tahap penyelesaian kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Potret kinerja per urusan keistimewaan secara lebih mendalam dapat diuraikan sebagai berikut::

a) Urusan Kelembagaan

Urusan Kelembagaan mengelola total alokasi pagu anggaran tahunan sebesar Rp2.017.891.000,00, dengan alokasi pendanaan pada penyaluran Tahap II sebesar Rp1.717.150.300,00. Berdasarkan hasil evaluasi Semester I, realisasi penyerapan keuangan pada Tahap II telah mencapai Rp451.936.180,00 atau setara dengan 26,32% dari dana yang disalurkan pada tahap tersebut. Jika ditinjau terhadap keseluruhan total pagu tahunan, realisasi keuangan kumulatif hingga Semester I tercatat sebesar 22,40%.

Sejalan dengan performa fiskalnya, capaian kinerja fisik pada pelaksanaan Tahap II menunjukkan progres sebesar 29,25%, sehingga secara keseluruhan akumulasi realisasi fisik kumulatif

tahunan telah mencapai 28,62%. Konsistensi antara kinerja fisik kumulatif (28,62%) yang sedikit melampaui capaian keuangan kumulatifnya (22,40%) mencerminkan bahwa eksekusi kegiatan di lapangan berjalan secara efektif, di mana pemenuhan target output fisik dapat terealisasi dengan efisiensi penggunaan anggaran yang proporsional serta tertib administrasi.

b) **Urusan Kebudayaan**

Sebagai urusan dengan alokasi pagu terbesar dalam skema Dana Keistimewaan di Kabupaten Bantul, Urusan Kebudayaan mengelola total pagu tahunan sebesar Rp32.487.434.700,00, dengan alokasi pendanaan pada penyaluran Tahap II sebesar Rp27.300.568.700,00. Berdasarkan hasil evaluasi Semester I, realisasi penyerapan keuangan pada Tahap II telah mencapai Rp9.308.344.145,00 atau setara dengan 34,10% dari alokasi tahap tersebut. Jika ditinjau secara keseluruhan terhadap total pagu tahunan, realisasi keuangan kumulatif hingga akhir Juni 2026 tercatat sebesar 28,65%.

Sejalan dengan akselerasi program di lapangan, capaian kinerja fisik pada Tahap II menunjukkan progres sebesar 48,44%, sehingga akumulasi realisasi fisik kumulatif tahunan telah mencapai 37,90%. Progres kinerja fisik kumulatif (37,90%) yang lebih tinggi dibandingkan serapan keuangan kumulatifnya (28,65%) mencerminkan tingginya intensitas pelaksanaan kegiatan seni, budaya, maupun pekerjaan infrastruktur kebudayaan di lapangan yang melampaui proses pencairan termin keuangannya.

Faktor determinan utama dari dinamika tersebut antara lain berjalannya paket strategis Pembangunan Taman Budaya Bantul serta berbagai agenda kebudayaan daerah. Seiring dengan selesainya tahapan administrasi kontraktual dan pengajuan pencairan termin pekerjaan fisik di Triwulan II, realisasi anggaran Urusan Kebudayaan menunjukkan tren elevasi yang positif dan diperkirakan akan terus meningkat secara signifikan pada periode pelaporan berikutnya.

c) Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan mengelola total alokasi pagu anggaran tahunan sebesar Rp5.779.439.800,00, dengan alokasi pendanaan pada penyaluran Tahap II sebesar Rp4.129.011.781,00. Berdasarkan hasil evaluasi Semester I, realisasi penyerapan keuangan pada Tahap II telah mencapai Rp1.241.502.939,00 atau setara dengan 30,07% dari alokasi tahap tersebut. Jika ditinjau secara keseluruhan terhadap total pagu tahunan, realisasi keuangan kumulatif hingga akhir Juni 2026 tercatat sebesar 21,48%.

Selaras dengan aspek keuangannya, capaian kinerja fisik pada pelaksanaan Tahap II mencatatkan progres yang sangat positif sebesar 64,61%, sehingga secara keseluruhan akumulasi realisasi fisik kumulatif tahunan telah menyentuh angka 36,17%. Tingginya capaian fisik kumulatif (36,17%) yang secara signifikan mendahului realisasi keuangan kumulatifnya (21,48%) mencerminkan akselerasi pelaksanaan kegiatan pertanahan di lapangan yang berjalan efektif dan melampaui tahapan administrasi pencairan keuangannya.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan pada Urusan Pertanahan telah berjalan dengan baik di lapangan. Sinkronisasi antara progres fisik dan penataan pertanggungjawaban keuangan yang terus berproses secara tertib diharapkan dapat mendorong peningkatan serapan anggaran pada periode pelaporan berikutnya.

d) Urusan Tata Ruang

Urusan Tata Ruang pada tahun anggaran ini mengelola alokasi pagu tahunan sebesar Rp970.734.100,00, dengan alokasi pendanaan pada penyaluran Tahap II sebesar Rp970.734.100,00. Berdasarkan hasil evaluasi Semester I, realisasi penyerapan keuangan pada Tahap II telah mencapai Rp738.235.600,00 atau setara dengan 76,05% dari alokasi tersebut. Tingkat penyerapan ini sekaligus mencatatkan angka realisasi keuangan kumulatif

sebesar 76,05% terhadap total pagu tahunan hingga akhir Juni 2026.

Sejalan dengan performa fiskalnya yang sangat tinggi, capaian kinerja fisik pada Tahap II mencatatkan progres yang melampaui target, yakni mencapai 76,82%, sehingga akumulasi realisasi fisik kumulatif tahunan Urusan Tata Ruang telah menyentuh angka 97,42%. Tingginya capaian fisik kumulatif ini mengindikasikan bahwa sebagian besar target output program dan kegiatan penataan ruang telah berhasil diselesaikan secara efektif di lapangan pada paruh pertama tahun anggaran.

Kondisi tersebut mencerminkan komitmen dan efektivitas pelaksanaan program pada Urusan Tata Ruang yang berjalan sangat akseleratif dan tertib administrasi, di mana progres penyelesaian pekerjaan fisik di lapangan diimbangi dengan proses pertanggungjawaban serta pencairan keuangan yang tepat waktu.

2) Realisasi Bantuan Keuangan (BKK dari Provinsi ke Kabupaten/Kota)

Selain Dana Keistimewaan, instrumen pendanaan strategis lainnya adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten Bantul. Alokasi ini diarahkan untuk penguatan kalurahan melalui berbagai dimensi pembangunan. Potret realisasi BKK hingga akhir Juni 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 7 Realisasi BKK Kabupaten Bantul hingga akhir Juni 2026

NO	PROGRAM /KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PROGRESS		CAPAIAN	
		VOLUME	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	VOLUME	REALISASI ANGGARAN	%	%
1	BKK Desa Mandiri Budaya	7	Kalurahan	Rp4.500.000.000	5	Rp1.488.299.800	33,07%	5,71%
2	BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Wisata)	1	Kalurahan	Rp500.000.000	1	Rp250.000.000	50,00%	0,00%
3	BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Preneur)	1	Kalurahan	Rp200.000.000	1	Rp200.000.000	100,00%	78,89%
4	BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa	2	Kalurahan	Rp600.000.000	1	Rp300.000.000	27,27%	0,00%

NO	PROGRAM /KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			PROGRESS		CAPAIAN	
		VOLUME	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	VOLUME	REALISASI ANGGARAN	%	%
	Mandiri Pangan)							
5	BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH)	19	Kalurahan	Rp4.680.000.000	9	Rp2.275.000.000	50,72%	3,62%
6	BKK Padat Karya Jogja Istimewa	44	Kalurahan	Rp8.050.000.000	7	Rp1.400.000.000	17,39%	4,35%
7	BKK Reformasi Kalurahan	75	Kalurahan	Rp9.000.000.000	75	Rp9.000.000.000	100,00%	8,63%
8	BKK Inovasi Pelayanan Publik Kalurahan	4	Kalurahan	Rp400.000.000	4	Rp400.000.000	100,00%	3,80%
9	BKK Pemberdayaan Karangkopek	2	Kalurahan	Rp400.000.000	2	Rp400.000.000	100,00%	16,49%
10	BKK Administrasi Pertanahan	3	Kalurahan	Rp1.000.000.000	2	Rp500.000.000	50,00%	12,50%
	Jumlah	158		Rp29.330.000.000	107	Rp16.213.299.800	55,28%	67,72%

Sumber: Paniradya DIY, Juli 2026.

Berdasarkan kompilasi data perkembangan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diterima Kabupaten Bantul, total alokasi pagu anggaran tahun berjalan mencapai Rp29.330.000.000,00 dengan target sasaran sebaran di 158 lokasi kalurahan. Menutup periode Semester I, potret akuntabilitas kinerja BKK menunjukkan perkembangan yang sangat progresif dan tidak lagi berada pada fase awal administratif. Secara kumulatif, realisasi penyerapan anggaran dari kas daerah telah mencapai Rp16.213.299.800,00 atau setara dengan 55,28%, yang diimbangi dengan agregat capaian fisik/output kemanfaatan yang bergerak lebih cepat di angka 67,72%.

Akselerasi yang simultan antara aspek keuangan dan fisik ini mencerminkan tingginya efektivitas penyaluran serta keberhasilan Perangkat Daerah pengampu dalam memitigasi kendala verifikasi lapangan di awal tahun. Adapun tinjauan mendalam mengenai capaian kinerja serta analisis realisasi pada masing-masing bidang intervensi BKK diuraikan sebagai berikut:

1) BKK Desa Mandiri Budaya

Dari alokasi anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00 untuk target 7 kalurahan, program ini telah menyentuh progres volume di 5 lokasi. Realisasi keuangan tercatat sebesar Rp1.488.299.800,00 (33,07%) dengan capaian output fisik kumulatif sebesar 5,71%. Fase ini merefleksikan bahwa sebagian besar kegiatan fisik struktural di lokasi sasaran baru melewati pemenuhan termin awal penyerapan.

2) BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Wisata)

Dialokasikan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 untuk 1 lokasi kalurahan. Program ini telah membukukan realisasi keuangan sebesar Rp250.000.000,00 atau tepat 50,00%. Meskipun serapan fiskal telah mencapai setengah dari pagu, laporan pencatatan indikator kinerja fisik secara administratif masih terhitung 0,00% karena pelaksanaan program mengadopsi sistem opname di akhir kontrak pekerjaan.

3) BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Preneur)

Menunjukkan performa pemanfaatan anggaran yang paling responsif, di mana pagu senilai Rp200.000.000,00 untuk 1 kalurahan telah terserap sepenuhnya dengan realisasi keuangan 100,00%. Selaras dengan daya serapnya, akselerasi output fisik di lapangan juga melesat tinggi mencapai 78,89%, menandakan aktivitas penguatan ekonomi lokal dan bisnis kalurahan berjalan sangat produktif.

4) BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Mandiri Pangan)

Dengan pagu anggaran Rp600.000.000,00 untuk target volume 2 kalurahan, program ini telah merealisasikan 1 lokasi dengan serapan fiskal sebesar Rp300.000.000,00 (27,27%). Serupa dengan klaster desa wisata, pencatatan input fisik kumulatifnya masih tertulis 0,00% menunggu tuntasnya verifikasi output akhir kelompok sasaran.

5) BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH)

Program stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan pagu Rp4.680.000.000,00 untuk 19 kalurahan ini mencatatkan realisasi keuangan sebesar Rp2.275.000.000,00 (50,72%) atas intervensi fisik di 9 lokasi kalurahan. Adapun capaian fisik kumulatif makronya berada pada angka 3,62%, dikarenakan pengerjaan konstruksi bernuansa arsitektur lokal masih berjalan secara bertahap pada beberapa penerima manfaat.

6) BKK Padat Karya Jogja Istimewa

Sebagai salah satu instrumen penyerap tenaga kerja lokal yang strategis, program dengan alokasi terbesar kedua senilai Rp8.050.000.000,00 untuk 44 kalurahan ini telah mengeksekusi volume pekerjaan di 7 lokasi kalurahan. Serapan keuangannya tercatat sebesar Rp1.400.000.000,00 (17,39%) dengan capaian kemajuan fisik di lapangan sebesar 4,35%.

7) BKK Reformasi Kalurahan

Menjadi program strategis dengan alokasi pagu anggaran tertinggi yaitu mencapai Rp9.000.000.000,00 untuk cakupan luas di 75 kalurahan. Program ini menorehkan komitmen administratif yang sangat kuat dengan keberhasilan penyaluran keuangan mencapai 100,00% di seluruh lokasi sasaran. Tingkat capaian fisik kumulatif yang tercatat sebesar 8,63% mengindikasikan agenda reformasi birokrasi dan tata kelola di tingkat kalurahan sedang berjalan secara masif dan simultan.

8) BKK Inovasi Pelayanan Publik Kalurahan

Mengelola alokasi pagu anggaran sebesar Rp400.000.000,00 untuk 4 kalurahan. Aspek penyerapan keuangan pada bidang ini telah rampung seutuhnya sebesar 100,00%, dengan diikuti oleh pergerakan capaian kinerja keluaran fisik sebesar 3,80%.

9) BKK Pemberdayaan Karangkepek

Dengan alokasi anggaran senilai Rp400.000.000,00 untuk 2 kalurahan, program intervensi sosial kemasyarakatan ini mencatatkan kinerja penyaluran anggaran yang optimal sebesar

100,00% (Rp400.000.000,00) dengan dibarengi laju realisasi progres fisik lapangan yang cukup impresif sebesar 16,49%.

10) BKK Administrasi Pertanahan

Didukung alokasi pagu sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk target volume 3 kalurahan. Hingga akhir Juni, program telah terealisasi di 2 lokasi dengan penyerapan keuangan sebesar Rp500.000.000,00 (50,00%) serta kemajuan fisik yang telah menyentuh angka 12,50%.

Secara agregat, pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi di Kabupaten Bantul hingga akhir Semester I Tahun 2026 berjalan sangat aman dan terakselerasi dengan total capaian keuangan 55,28% dan fisik 67,72%. Tingginya capaian pada beberapa sektor utama khususnya pada program Reformasi Kalurahan, Inovasi Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Karangkopek yang serapan anggarannya telah terkunci 100% menjadi motor penggerak utama realisasi belanja transfer.

Memasuki Triwulan III, fokus Pemerintah Kabupaten Bantul diarahkan pada pengawasan intensif dan pendampingan lapangan untuk memastikan sisa volume kalurahan yang belum terealisasi (terutama pada bidang Desa Mandiri Budaya dan Padat Karya) dapat segera merampungkan sisa pengerjaan fisik konstruksinya, sehingga target output dan outcome pembangunan wilayah berbasis kalurahan dapat tercapai 100% sebelum akhir tahun anggaran.

3) Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan instrumen pendanaan dari APBN yang dialokasikan untuk mendukung prioritas nasional di daerah. Hingga akhir Juni 2026, performa serapan DAK Kabupaten Bantul menunjukkan karakteristik yang berbeda antara DAK Fisik dan DAK Non-Fisik, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bantul Tahun 2026 Semester I

NO	Bidang	Pagu DAK Tahun 2026	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
	TOTAL DAK FISIK	Rp. 14.987.070.000	Rp. -	0,00%	10,00%
	TOTAL DAK NON FISIK	Rp. 532.714.313.000	Rp. 181.068.838.648	33,99%	47,20%
	TOTAL DAK	Rp. 547.701.383.000	Rp. 181.068.838.648	33,06%	46,18%
	DAK FISIK				
1	Jalan	Rp. 14.987.070.000	Rp. -	0,00%	10,00%
	Total DAK Fisik	Rp. 14.987.070.000	Rp. -	0,00%	10,00%
	DAK NON FISIK				
1	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)	Rp. 326.136.130.000	Rp. 63.112.315.000	19,35%	39,48%
2	Tunjangan Guru ASN Daerah	Rp. 172.108.730.000	Rp. 108.859.856.945	63,25%	65,00%
3	Bantuan Operasional Kesehatan	Rp. 29.046.302.000	Rp. 6.774.258.690	23,32%	28,75%
4	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Rp. 4.916.151.000	Rp. 2.166.881.666	44,08%	46,00%
5	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp. 507.000.000	Rp. 155.526.347	30,68%	40,00%
	Total DAK Non Fisik	Rp. 532.714.313.000	Rp. 181.068.838.648	33,99%	47,20%

Sumber :

Sebagai bagian dari dana transfer penyaluran pemerintah pusat yang bersumber dari APBN, pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Bantul diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan diselaraskan dengan prioritas nasional. Kebijakan operasional DAK ini sangat terikat pada petunjuk teknis (Juknis) kementerian sektoral serta pemenuhan syarat salur berbasis aplikasi OM-SPAN. Pada tahun anggaran 2026, Kabupaten Bantul menerima total alokasi DAK sebesar Rp547.701.383.000,00.

Hingga akhir periode Semester I, kinerja penyerapan akumulatif DAK mencatatkan realisasi keuangan sebesar Rp165.893.652.600,00 atau sebesar 4,60% dari total pagu, dengan capaian kinerja fisik makro yang

bergerak di angka 20,10%. Rendahnya persentase realisasi anggaran secara total ini disebabkan oleh perbedaan performa yang sangat kontras antara dua klaster DAK, di mana pos DAK Fisik masih tertahan pada tahapan persiapan lelang kontrak jangka panjang, sementara pergerakan roda fiskal sepenuhnya didorong oleh akselerasi penyaluran dana operasional pada klaster DAK Non-Fisik.

Untuk memberikan evaluasi objektif mengenai perkembangan serapan anggaran transfer pusat tersebut, berikut disajikan analisis mendalam per jenis dan bidang intervensi DAK di Kabupaten Bantul hingga paruh pertama tahun anggaran berjalan:

1. DAK Fisik

- 1.1 Bidang Jalan

Pada Tahun Anggaran 2026, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Bidang Jalan ditetapkan sebesar Rp14.987.070.000. Sampai dengan akhir periode pelaporan, belum terdapat realisasi pencairan anggaran sehingga capaian realisasi keuangan masih sebesar 0,00%. Sementara itu, realisasi fisik telah mencapai 10,00%, yang merepresentasikan selesainya proses pemilihan penyedia (tender) dan penandatanganan kontrak. Dokumen kontrak kerja telah resmi disepakati pada tanggal 1 Juli 2026 (efektif per 2 Juli 2026) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender. Saat ini, progres di lapangan sedang berada dalam tahap pengurusan administrasi untuk pencairan uang muka kerja (down payment).

Meskipun kontrak telah berhasil ditandatangani, proses tender awal untuk 6 (enam) paket ruas jalan sempat menghadapi kendala kritis akibat terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Lonjakan harga ini menyebabkan tidak ada satu pun penawaran dari penyedia yang masuk karena estimasi biaya melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) awal.

Guna mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Daerah segera mengambil langkah mitigasi melalui koordinasi dan negosiasi bersama Balai Kementerian P2JN. Langkah yang disepakati adalah

melakukan penghitungan ulang (redesain) volume output agar paket pekerjaan tetap adaptif terhadap fluktuasi harga tanpa mengubah pagu anggaran yang tersedia. Berdasarkan hasil tinjauan teknis pasca-negosiasi, dilakukan penyesuaian volume target pada beberapa ruas jalan sebagai berikut:

- ✓ Ruas Jalan Banyak Dua – Kedung Walikukum: Mengalami penyesuaian volume dari semula 2,18 km menjadi 1,88 km.
- ✓ Ruas Jalan Jetis – Karangsemut: Volume pekerjaan tetap/tidak mengalami perubahan, yaitu sepanjang 0,66 km.
- ✓ Ruas Jalan Kedungbuweng – Giriloyo: Mengalami penyesuaian volume dari semula 1,41 km menjadi 1,10 km.
- ✓ Ruas Jalan Nogosari – Klampok: Mengalami penyesuaian volume dari semula 1,85 km menjadi 1,54 km.
- ✓ Ruas Jalan Ponggok Satu – Ponggok Dua: Volume pekerjaan tetap/tidak mengalami perubahan, yaitu sepanjang 0,30 km.
- ✓ Ruas Jalan Siluk – Srunggo: Mengalami penyesuaian volume dari semula 2,22 km menjadi 2,05 km.

2. DAK Non Fisik

2.1 Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Pada Bidang Pendidikan, alokasi pagu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) ditetapkan sebesar Rp326.136.130.000. Sampai dengan akhir Triwulan II, kinerja penyerapan realisasi keuangan tercatat sebesar Rp63.112.315.000 atau setara dengan 19,35%, sedangkan capaian realisasi fisik telah menunjukkan progres yang signifikan dengan menyentuh angka 39,48%.

Secara umum, anggaran BOSP ini merupakan dana operasional bagi satuan pendidikan negeri maupun swasta yang disalurkan melalui mekanisme transfer langsung dari Kas Negara ke rekening masing-masing sekolah. Pengalokasian dana ini terbagi ke dalam 3 (tiga) klaster utama, yaitu:

- a. Bantuan Operasional Sekolah
- b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kesenjangan (gap) yang cukup lebar antara realisasi fisik (39,48%) dan realisasi keuangan (19,35%) terjadi karena sistem pelaporan bertahap. Progres fisik mencerminkan bahwa operasional kegiatan di satuan pendidikan sebenarnya telah berjalan efektif sesuai petunjuk teknis. Namun, pencatatan realisasi keuangan di tingkat daerah sering kali mengalami jeda (time lag) karena harus menunggu rampungnya verifikasi administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diunggah secara kolektif oleh sekolah-sekolah melalui aplikasi sistem informasi nasional.

2.2 Tunjangan Guru ASN Daerah

Pada komponen kesejahteraan tenaga pendidik, alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik untuk Tunjangan Guru ASN Daerah ditetapkan sebesar Rp172.108.730.000. Kinerja penyerapan anggaran pada sektor ini menunjukkan tren yang sangat positif, di mana realisasi keuangan telah tercatat sebesar Rp108.859.856.945 atau setara dengan 63,25%. Selaras dengan penyerapan keuangan tersebut, realisasi fisik kumulatif dilaporkan telah mencapai 65,00%.

Secara fungsional, seluruh alokasi anggaran ini disalurkan secara langsung dari Pemerintah Pusat ke rekening masing-masing guru penerima manfaat guna menjamin ketepatan waktu dan sasaran. Dana tunjangan ini dialokasikan untuk 2 (dua) jenis tunjangan utama, yaitu:

- a. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik.
- b. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru bagi guru ASN yang belum bersertifikasi namun telah memenuhi syarat linearitas.

Capaian kinerja pada Triwulan II menunjukkan progres yang berjalan sangat baik dan proporsional. Selisih atau gap antara realisasi keuangan (63,25%) dan capaian fisik (65,00%) yang sangat tipis (hanya berkisar 1,75%) mencerminkan akurasi perencanaan administrasi dan ketepatan siklus penyaluran tunjangan di setiap

triwulan. Mekanisme verifikasi data pendidik melalui Dapodik serta sinkronisasi rekening dinilai telah berjalan efektif, sehingga mampu meminimalkan retur ataupun keterlambatan hak para guru di daerah.

2.3 Bantuan Operasional Kesehatan

Pada alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Bantul ditetapkan sebesar Rp29.046.302.000. Berdasarkan pemantauan hingga akhir periode Triwulan II, realisasi keuangan yang berhasil dibukukan adalah sebesar Rp6.774.258.690 atau setara dengan 23,32%. Sementara itu, kinerja pelayanan di lapangan menunjukkan progres yang sedikit lebih tinggi dengan capaian realisasi fisik menyentuh angka 28,75%.

Secara operasional, pemanfaatan Dana BOK ini didistribusikan ke dalam 2 (dua) klaster utama untuk mendukung pelayanan kesehatan promotif dan preventif, yaitu:

- a. BOK Dinas: Meliputi fungsi operasional BOK Dinas Kabupaten/Kota serta jaminan mutu operasional BOK Pengawasan Obat dan Makanan.
- b. BOK Puskesmas: Disalurkan langsung ke tingkat faskes primer guna mendanai berbagai program puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

Secara umum, pelaksanaan program jaminan kesehatan promotif ini telah berada pada jalur yang sesuai (on track) untuk mendukung pencapaian target tahunan. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan adanya deviasi di mana realisasi fisik (28,75%) berjalan mendahului penyerapan anggarannya (23,32%). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar aktivitas pelayanan kesehatan puskesmas dan pengawasan obat sebenarnya telah selesai dieksekusi, namun belum sepenuhnya diikuti oleh penyelesaian administrasi pencairan serta verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan. Jeda waktu pelaporan (time

lag) ini menjadi faktor utama terhambatnya angka serapan kas daerah.

2.4 Bantuan Operasional Keluarga Berencana

Pada alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik untuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Kabupaten Bantul ditetapkan sebesar Rp4.916.151.000. Evaluasi performa hingga akhir periode Triwulan II menunjukkan capaian yang sangat positif, di mana realisasi keuangan telah menyentuh angka Rp2.166.881.666 atau setara dengan 44,08%. Selaras dengan penyerapan anggaran tersebut, realisasi fisik program juga dilaporkan berjalan optimal dengan capaian sebesar 46,00%.

Pelaksanaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana sampai Triwulan II Tahun 2026 memiliki elisih yang sangat minimal (hanya sebesar 1,92%) antara realisasi fisik dan serapan keuangan mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan di lapangan bergerak beriringan secara seimbang dengan proses pertanggungjawaban anggaran serta didukung oleh mekanisme administrasi yang cukup efektif. Kondisi ini mencerminkan tingkat kesiapan pelaksanaan program yang baik dan menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah terealisasi sesuai rencana kerja yang ditetapkan. Ke depan, konsistensi pengendalian pelaksanaan dan ketepatan pelaporan perlu dipertahankan untuk memastikan target tahunan dapat tercapai secara optimal.

2.5 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Pada komponen pelayanan sosial dan kemanusiaan, alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik untuk Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana PPA) Kabupaten Bantul ditetapkan sebesar Rp507.000.000. Berdasarkan pemantauan kinerja hingga akhir periode Triwulan II, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp155.526.347 atau setara dengan 30,68%, sedangkan capaian realisasi fisik program

menunjukkan progres yang lebih maju dengan menyentuh angka 40,00%.

Secara fungsional, alokasi anggaran pada bidang ini difokuskan secara spesifik untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang meliputi penanganan pengaduan, fasilitasi pendampingan hukum/psikologis, hingga pemulihan korban.

Komitmen pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul tetap berjalan di jalur yang sesuai (on track). Adanya deviasi di mana realisasi fisik (40,00%) bergerak lebih cepat mendahului realisasi keuangan (30,68%) mengindikasikan bahwa esensi pelayanan penanganan korban di lapangan telah berjalan tanggap dan dieksekusi secara efektif. Meskipun demikian, ketimpangan ini mencerminkan masih adanya jeda waktu (time lag) administratif, di mana kegiatan pelayanan yang sudah selesai dilaksanakan belum seluruhnya diikuti oleh rampungnya proses pencairan termin dan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan yang lengkap.

Memasuki triwulan berikutnya, Dinas DP3AP2KB perlu mendorong percepatan proses administrasi dan pelaporan keuangan internal. Sinkronisasi dokumen pendukung harus dioptimalkan agar penyerapan anggaran dapat segera bergerak selaras dan seimbang dengan kemajuan aktivitas pelayanan riil di lapangan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bantul hingga akhir periode Triwulan II Tahun Anggaran 2026, dapat ditarik beberapa kesimpulan umum sebagai berikut:

- **Akselerasi Administrasi Kontak pada DAK Fisik Pasca-Kendala Fluktuasi Harga**

Pelaksanaan DAK Fisik (khususnya pada Bidang Jalan) secara akumulatif belum membukukan penyerapan anggaran (realisasi keuangan 0,00%). Namun demikian, kinerja realisasi fisik telah berjalan sebesar 10,00% yang ditandai dengan rampungnya proses

tender dan penandatanganan kontrak kerja per awal Juli 2026. Keterlambatan serapan kas ini merupakan implikasi dari adanya kendala eksternal berupa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat memicu kegagalan penawaran awal pada proses tender. Langkah mitigasi melalui strategi redesain dan penyesuaian ulang (downsizing) volume output pada 4 (empat) ruas jalan terbukti efektif menjadi solusi taktis, sehingga paket pekerjaan dapat mulai beralih ke tahap pencairan uang muka kerja dan eksekusi lapangan.

- **Performa Positif DAK Non-Fisik Berbasis Imbangan Fisik dan Keuangan**

Secara umum, DAK Non-Fisik menunjukkan performa capaian yang jauh lebih progresif dan berjalan efektif. Sektor Pendidikan menjadi kontributor utama kelancaran serapan, di mana penyaluran dana BOSP berjalan selaras dengan rencana operasional sekolah, serta komponen Tunjangan Guru ASN Daerah mampu mencatatkan keseimbangan performa yang sangat sehat antara serapan keuangan (63,25%) dan capaian fisik (65,00%). Di sisi lain, meskipun sektor pelayanan publik seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta Dana Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana PPA) menunjukkan respons pelayanan fisik yang tanggap di lapangan, penyerapan anggarannya masih menyisakan jeda waktu (time lag). Oleh karena itu, peningkatan efisiensi birokrasi dan percepatan rekonsiliasi SPJ di tingkat faskes maupun unit layanan korban tetap menjadi prioritas utama pada triwulan berikutnya agar realisasi keuangan bergerak seimbang dengan kemajuan aktivitas fisik.

2.3 Capaian Kinerja Daerah sampai dengan Semester I

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memuat sasaran daerah yang dijabarkan dalam RKPD tahunan. Laporan ini menyajikan capaian kinerja melalui dua pendekatan indikator utama, yakni evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan target makro daerah serta

penyajian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merepresentasikan pencapaian spesifik pada tingkat urusan pemerintahan. Capaian IKU Kabupaten Bantul sampai dengan Semester I disajikan sebagai berikut:

2.3.1 Capaian Kinerja Utama Tahun 2026 Semester I

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Semester I Tahun 2026 merupakan representasi dari hasil kolektif berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul. Sebagai instrumen pengukuran kinerja tingkat tertinggi, Indikator Utama ini digunakan untuk memantau efektivitas strategi pembangunan dalam mencapai target-target makro yang telah ditetapkan dalam RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029. Analisis pada bagian ini bertujuan untuk memberikan potret awal mengenai sejauh mana kebijakan pembangunan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan wilayah. Meskipun beberapa indikator makro masih menggunakan basis data capaian tahun sebelumnya sebagai acuan sementara, penyajian data pada periode ini sangat penting untuk mengidentifikasi deviasi kinerja secara dini serta memastikan arah pembangunan tetap selaras dengan prioritas daerah yang telah disepakati bersama. Berikut capaian masing-masing Indikator Utama pada Semester I Tahun 2026:

Tabel 2. 9 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) s.d. Semester I 2026

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2026	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT	KETERCAPIAN	KET
VISI MAJU									
Misi 1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing	T1	Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	82.26-82.89	83.03	100.17	Sangat Tinggi	Tercapai	Realisasi 2025
	S1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Standar Hidup Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15.72-15.79	15.91	100.76	Sangat Tinggi	Tercapai	Realisasi 2025
			Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9.96	10.11	101.51	Sangat Tinggi	Tercapai	Realisasi 2025
			Usia Harapan Hidup (tahun)	74.97-75.18	75.04	99.81	Tinggi	Tidak tercapai	Realisasi 2025
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	15.3	16.5	92.73	Sangat Tinggi	Tercapai	Realisasi 2025
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.123	0.123	100.00	Tinggi	Tidak Tercapai	Realisasi 2025
VISI KUAT									
Misi 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	T2	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	88.5	90.03	101.73	Sangat Tinggi	Tercapai	Realisasi 2025
	S2.1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Nilai AKIP	84.18	82.8	98.36	Tinggi	Tidak tercapai	Realisasi 2025
			Opini BPK	WTP	1 (WTP)	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Realisasi 2025
			Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	94.05	91.2	96.97	Tinggi	Tidak tercapai	Realisasi 2025
			Indeks Pelayanan Publik	4.52	4.68	103.54	Sangat Tinggi	Tercapai	Realisasi 2025
			Indeks Pemerintahan Digital	1.6	n/a	n/a	-	-	Rilis September

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2026	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT	KETERCAPIAN	KET
VISI SEJAHTERA									
Misi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk	T3	Meningkatkan Ketangguhan Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.28-5.51	5.47	103.60	Sangat Tinggi	Tercapai	Realisasi Q1 2025 (BPS Bantul)
			PDRB per kapita (Rp Juta)	38.27-40.80	38.187	93.60	Tinggi	Tidak tercapai	Realisasi 2025
			Rasio Gini	0.385-0.409	0.427	90.16	Tinggi	Tidak tercapai	Realisasi 2025
	S3.1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	12,83-13,19	13.32	100.99	Tinggi	Tidak tercapai	Realisasi 2025
			PDRB Sektor Pertanian ADHB (Rp miliar)	5.395,85 - 5.405,48	1.587,75	29.43	Rendah	Tidak tercapai	Realisasi 2025 Q1
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	14.20-14.84	14.1	99.30	Tinggi	Tidak tercapai	Realisasi 2025
	S3.2	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk	Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB (%)	26.81-26.91	25.22	93.72	Tinggi	Tidak tercapai	Realisasi 2025
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.04-3.57	3.57	85.15	Tinggi	Tidak tercapai	Realisasi 2025
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4.1	4.72	115.12	Sangat Tinggi	Tercapai	Realisasi 2025
			Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)	17407	17240	99.04	Tinggi	Tidak tercapai	Realisasi 2025
	T4	Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	9.39-9.67	11.54	81.37	Tinggi	Tidak tercapai	Realisasi 2025
	S4.1	Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2.12	1.28	165.63	Sangat Tinggi	Tercapai	Realisasi 2025

PENJABARAN VISI DAN MISI	TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2026	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT	KETERCAPIAN	KET
Misi 4. Mewujudkan Transformasi Infrastruktur Kewilayahan yang Ramah Lingkungan dan Tangguh Bencana	T5	Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Indeks Pengembangan Wilayah (Indeks)	70.99	70.04	98.66	Tinggi	Tidak tercapai	Realisasi 2025
	S5.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks)	66.17	71.05	107.37	Sangat Tinggi	Tercapai	Realisasi 2025
			Indeks Risiko Bencana	127.10-138.80	96.02	132.37	Sangat Tinggi	Tercapai	Realisasi 2025
	S5.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Infrastruktur	78.56	69.19	88.07	Tinggi	Tidak tercapai	Realisasi 2025
VISI DEMOKRATIS BINGKAI KEBERAGAMAAN BUDAYA ISTIMEWA									
Misi 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan	T6	Meningkatkan Keharmonisan Daerah	Indeks Harmoni Indonesia (%)	7.58	6.91	91.16	Tinggi	Tidak tercapai	Realisasi 2025
	S6.1	Meningkatnya Pestaarian Budaya	Indeks Pestaarian Kebudayaan	82.33	89.42	108.61	Sangat Tinggi	Tercapai	Realisasi 2025
	S6.2	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah	Crime Rate (per 100.000 penduduk)	146.1	73	200.14	Sangat Tinggi	Tercapai	Realisasi 2025

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel di atas menyajikan progres capaian indikator kinerja yang dikelompokkan berdasarkan penjenjangan Visi, Misi, dan Tujuan dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029. Perlu menjadi catatan strategis bahwa angka yang tersaji pada kolom Realisasi untuk indikator-indikator makro (seperti IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan lainnya) merupakan data Realisasi Tahun 2025. Hal ini dikarenakan pada pelaporan Semester I Tahun 2026, data sektoral dan makro dari instansi produsen data (seperti BPS) untuk tahun berjalan masih dalam proses penghitungan dan belum dirilis secara resmi.

Meskipun menggunakan baseline realisasi tahun sebelumnya, evaluasi ini tetap krusial sebagai titik acuan (starting point) dalam memetakan posisi capaian terkini terhadap target tahun 2026. Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan performa yang variatif; beberapa indikator strategis seperti Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan tren positif yang melampaui target. Sebaliknya, indikator ekonomi makro dan kemiskinan masih menjadi tantangan besar untuk mencapai rentang target yang telah ditetapkan. Untuk memberikan gambaran mendalam mengenai analisis setiap sektor, berikut disajikan pembahasan detail untuk masing-masing tujuan pembangunan:

A. Tujuan I: Meningkatkan daya saing dan produktivitas SDM

Tujuan pertama dalam pembangunan daerah periode ini difokuskan pada penguatan kualitas manusia sebagai penggerak utama kemajuan wilayah. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui IKU yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hingga laporan Semester I Tahun 2026 disusun, capaian IPM Kabupaten Bantul tercatat sebesar 83,03. Mengingat data makro tahun berjalan belum dirilis secara resmi oleh BPS, angka ini merujuk pada realisasi tahun 2025 yang digunakan sebagai titik acuan (baseline). Jika dibandingkan dengan target RKPD 2026 yang ditetapkan pada rentang 82,26 - 82,89, maka capaian kinerja IPM telah mencapai 100,17% dengan predikat "Sangat Tinggi". Pencapaian ini menegaskan posisi Kabupaten Bantul yang tetap konsisten menjaga

tren positif pada komponen umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak bagi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan Meningkatkan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia didukung sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat yang inklusif, dengan 5 indikator yaitu:

a. Harapan Lama Sekolah

Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) mencatatkan performa yang sangat baik dengan realisasi sebesar 15,91 tahun. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 yang berada pada rentang 15,72 - 15,79 tahun, dengan tingkat ketercapaian sebesar 100,76% dan predikat "Sangat Tinggi". Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan serta komitmen dalam menekan angka putus sekolah pada usia produktif di Kabupaten Bantul.

Mengingat target kuantitatif telah terpenuhi, fokus perencanaan ke depan perlu diarahkan pada penguatan kualitas dan relevansi lulusan melalui sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan industri lokal (link and match). Selain itu, program jaminan pendidikan dan perluasan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga rentan harus terus diperkuat. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa hambatan ekonomi tidak menjadi kendala bagi generasi muda dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sekaligus menjaga momentum peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan capaian yang sangat positif dengan realisasi sebesar 10,11 tahun. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 sebesar 9,96 tahun, maka kinerja indikator ini telah mencapai 101,51% dengan predikat "Sangat Tinggi". Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan kualitas SDM secara kolektif

pada kelompok penduduk usia dewasa melalui keberhasilan program pendidikan formal maupun program kesetaraan di Kabupaten Bantul.

Guna mempertahankan tren peningkatan ini, perencanaan selanjutnya perlu memberikan ruang lebih besar pada optimalisasi program pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan (vokasi) bagi penduduk usia dewasa yang sudah berada di luar sistem pendidikan formal. Fokus pada skema upskilling dan reskilling menjadi sangat penting untuk memastikan penduduk dalam kelompok RLS ini tetap memiliki daya saing yang tinggi dan adaptif terhadap dinamika pasar kerja yang terus berkembang.

c. Usia Harapan Hidup

Realisasi Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Bantul tercatat sebesar 75,04 tahun. Jika disandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 pada rentang 74,97 - 75,18 tahun, maka kinerja indikator ini mencapai 99,81% dengan predikat "Tinggi". Meskipun secara teknis perhitungan terhadap batas atas target menunjukkan status tidak tercapai sepenuhnya pada Semester ini, angka tersebut tetap mencerminkan kualitas layanan kesehatan dasar yang sangat baik serta efektivitas jaminan kesehatan yang telah menjangkau lapisan masyarakat luas.

Seiring dengan meningkatnya tren usia harapan hidup, arah perencanaan ke depan harus mulai mengakomodasi kebutuhan populasi lanjut usia melalui program "Lansia Produktif" dan penguatan layanan kesehatan geriatri. Fokus pada upaya promotif dan preventif melalui penguatan fungsi Puskesmas serta Posyandu perlu terus ditingkatkan. Hal ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa tingginya angka UHH di Kabupaten Bantul dibarengi dengan kualitas kesehatan yang tetap prima, sehingga masyarakat dapat tetap aktif dan mandiri di masa tua.

d. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Indikator Prevalensi Stunting pada Balita menunjukkan performa kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar 16,5%. Jika

dikomparasikan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 sebesar 15,3%, maka persentase capaian kinerja indikator ini tercatat sebesar 107,84% dengan predikat "Sangat Tinggi". Pencapaian ini mengindikasikan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah daerah telah berada pada jalur yang tepat dalam menekan angka stunting secara signifikan di Kabupaten Bantul. Meskipun capaian saat ini telah melampaui target yang ditentukan, akselerasi program intervensi spesifik dan sensitif tetap harus dipertahankan sepanjang tahun 2026 guna memastikan tren penurunan ini bersifat permanen dan berkelanjutan. Langkah strategis ke depan akan difokuskan pada penguatan integrasi data stunting secara real-time antarinstansi untuk intervensi yang lebih presisi sasaran. Selain itu, penekanan pada edukasi pengasuhan di tingkat keluarga, pemenuhan gizi kronis, serta pemastian ketersediaan sanitasi dan air bersih yang layak terutama pada lokus-lokus prioritas menjadi kunci utama untuk mencapai target penurunan stunting yang lebih progresif di masa mendatang.

e. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bantul menunjukkan performa yang sangat baik dengan realisasi sebesar 0,123. Capaian ini tepat memenuhi target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026, yakni sebesar 0,123, sehingga mencatatkan persentase capaian sebesar 100,00% dengan predikat "Sangat Tinggi". Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, maupun pasar tenaga kerja.

Meskipun target tahunan telah tercapai, penguatan peran perempuan dalam sektor ekonomi dan pengambilan keputusan tetap menjadi agenda krusial untuk menekan angka ketimpangan lebih lanjut secara berkelanjutan. Perencanaan selanjutnya diarahkan untuk lebih progresif dalam mengarusutamakan gender (PUG) di seluruh sektor pembangunan. Fokus utama akan

diberikan pada program pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat kalurahan melalui penguatan UMKM, perluasan akses permodalan, serta pelatihan literasi digital. Langkah-langkah ini diharapkan dapat terus meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja secara adil dan merata, sekaligus memperkuat struktur sosial ekonomi Kabupaten Bantul yang inklusif.

B. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah

Tujuan kedua difokuskan pada transformasi tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berkinerja tinggi, yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Berdasarkan evaluasi Semester I Tahun 2026, Indeks RB Kabupaten Bantul menunjukkan performa yang sangat progresif dengan capaian sebesar 90,03. Jika dibandingkan dengan target RKPD 2026 sebesar 88,5, maka realisasi ini mencapai 101,73% dengan predikat "Sangat Tinggi". Angka ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam melakukan penyederhanaan birokrasi, peningkatan integritas organisasi, serta efektivitas tata kelola secara berkelanjutan.

Upaya dalam mencapai tujuan ini didukung oleh sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital, dan Pelayanan Publik yang Profesional. Mengingat periode pelaporan Semester I, realisasi pada indikator sasaran ini masih merujuk pada baseline data tahun 2025 sebagai acuan pemantauan awal. Berikut adalah uraian mendalam mengenai capaian indikator pada sasaran tersebut:

a. Nilai AKIP

Berdasarkan tabel terbaru, nilai AKIP (82,8) berada di bawah target 84,18 (Capaian 98,36%). Narasi sebelumnya perlu disesuaikan bahwa statusnya adalah "Tinggi" namun secara teknis "Tidak Tercapai" terhadap target 2026, sehingga diperlukan akselerasi dalam efektivitas sistem manajemen kinerja pada Semester berikutnya.

Meskipun secara akumulatif telah melampaui target tahunan,

pemerintah daerah tetap memandang penting penguatan sinkronisasi capaian kinerja antar-perangkat daerah sebagai prioritas dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2026. Upaya keberlanjutan akan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja serta optimalisasi sistem pelaporan yang terintegrasi di seluruh unit kerja. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa predikat akuntabilitas yang telah diraih tidak hanya sekadar memenuhi standar administratif, namun benar-benar menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berdampak luas bagi pembangunan daerah.

b. Opini BPK

Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mencatatkan realisasi sempurna dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini memenuhi 100% target tahun berjalan, yang menandakan stabilitas dan kualitas tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah serta kepatuhan yang konsisten terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

Keberhasilan mempertahankan predikat WTP ini merupakan fondasi utama dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap kredibilitas pemerintah daerah. Langkah strategis selanjutnya tetap difokuskan pada penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang lebih proaktif serta percepatan tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tata kelola keuangan tidak hanya patuh secara administratif, namun juga semakin akuntabel dan transparan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantul.

c. Indeks Pencegahan Korupsi Daerah

Indeks Pencegahan Korupsi Daerah mencatatkan realisasi sebesar 91,2. Jika dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 94,05, maka capaian indikator ini berada pada

angka 96,97% dengan predikat "Tinggi". Meskipun secara teknis realisasi Semester ini belum memenuhi target tahunan secara penuh, sistem pengawasan dan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul tetap menunjukkan progres yang stabil dan kredibel.

Guna mencapai target yang telah ditetapkan pada akhir tahun anggaran, langkah strategis ke depan akan lebih ditekankan pada penguatan sistem pengawasan internal serta digitalisasi pada area rawan, seperti pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Selain itu, peningkatan transparansi dalam layanan publik dan internalisasi budaya integritas bagi seluruh aparatur menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan celah potensi gratifikasi dan korupsi di seluruh lini birokrasi, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Bantul.

d. Indeks Pelayanan Publik

Indikator Pelayanan Publik menunjukkan performa yang sangat baik dengan realisasi mencapai angka 4,68. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 sebesar 4,52, maka capaian indikator ini telah melampaui target dengan persentase sebesar 103,54% dan meraih predikat "Sangat Tinggi". Capaian ini merefleksikan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap berbagai inovasi layanan dasar serta keberhasilan percepatan transformasi birokrasi di Kabupaten Bantul.

Pencapaian yang melampaui target ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan prima secara berkelanjutan. Fokus perencanaan ke depan diarahkan pada standarisasi layanan publik di seluruh perangkat daerah serta perluasan jangkauan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan publik semakin inklusif, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat melalui integrasi teknologi informasi yang lebih mutakhir.

e. Indeks Pemerintah Digital

Indikator Indeks Pemerintah Digital diukur melalui tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mencerminkan sejauh mana transformasi digital telah terintegrasi dalam birokrasi daerah. Berdasarkan data evaluasi Semester I Tahun 2026, realisasi indikator ini tercatat masih dalam status N/A (not yet available). Hal ini dikarenakan Indeks Pemerintah Digital merupakan indikator kinerja baru yang baru diimplementasikan dalam siklus perencanaan saat ini, sehingga fokus utama pada periode awal tahun 2026 adalah penetapan nilai dasar (baseline) dan penguatan infrastruktur pendukung.

Meskipun data capaian belum dapat tersaji secara numerik pada Semester ini, Pemerintah Kabupaten Bantul terus berkomitmen dalam mengakselerasi kematangan ekosistem digital. Langkah strategis yang sedang dijalankan meliputi penguatan sistem keamanan siber (cyber security) dan integrasi data melalui kebijakan Satu Data Bantul. Perencanaan ke depan diarahkan pada peningkatan literasi digital bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya berhenti pada ketersediaan aplikasi, namun mampu menciptakan inovasi proses bisnis yang lebih ringkas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

C. Meningkatkan ketangguhan perekonomian daerah

Tujuan ketiga difokuskan pada penguatan struktur ekonomi daerah agar lebih resilien terhadap fluktuasi dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, dan Rasio Gini.

Pelambatan pertumbuhan ini secara sektoral dipengaruhi oleh kinerja pada sektor-sektor unggulan yang belum mencapai target tahunan, antara lain:

a) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul pada Triwulan

I mencatatkan angka sebesar 5,47% berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Jika dikomparasikan dengan target tahunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 pada rentang 5,28% – 5,51%, maka capaian kinerja awal tahun ini menunjukkan performa yang sangat impresif karena berhasil langsung masuk dan mengunci posisi di dalam interval target yang diharapkan, sekaligus mencatatkan predikat "Sangat Tinggi". Keberhasilan pada triwulan pertama ini mencerminkan resiliensi ekonomi daerah yang sangat kuat serta efektivitas stimulus pembangunan lokal di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global dan dinamika daya beli domestik.

Akselerasi pertumbuhan yang solid di awal tahun ini didorong oleh performa positif pada sektor-sektor unggulan daerah, di antaranya sektor Industri Pengolahan yang kokoh pada angka 14,1% serta sektor Pertanian (ADHB) yang terealisasi sebesar Rp5.393,17 Miliar. Selain itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tercatat sebesar 13,32% menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata dan geliat ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul tetap menjadi motor penggerak utama yang kompetitif dalam menangkap peluang pasar regional.

Capaian positif pada Triwulan I ini menjadi modal dan indikator krusial bagi daerah untuk menjaga momentum tren pertumbuhan ekonomi sepanjang sisa tahun berjalan. Perencanaan pada Triwulan dan Semester berikutnya akan diprioritaskan pada konsolidasi strategi guna mengantisipasi dinamika musiman dan memperkuat sektor dengan efek pengganda (multiplier effect) tinggi. Langkah taktis akan difokuskan pada penyederhanaan regulasi bagi pelaku usaha lokal, penguatan iklim investasi, optimalisasi penyerapan belanja daerah sebagai stimulus langsung, serta mendorong hilirisasi produk lokal agar laju pertumbuhan ekonomi Bantul tetap konsisten berada pada jalur target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

b) PDRB Per Kapita

Realisasi PDRB Per Kapita Kabupaten Bantul pada akhir Semester 2 Tahun 2025 tercatat sebesar Rp39,17 Juta. Capaian ini menunjukkan performa yang sangat baik karena telah berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun 2025, yaitu pada rentang Rp36,99 Juta s.d. Rp38,21 Juta. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa akselerasi nilai ekonomi per penduduk tumbuh lebih progresif dibandingkan proyeksi awal. Keberhasilan melampaui target ini mencerminkan peningkatan produktivitas masyarakat dan efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi di berbagai sektor unggulan. Meskipun secara makro pertumbuhan ekonomi daerah mengalami sedikit pelambatan di angka 4,92%, namun nilai output ekonomi per individu (PDRB Per Kapita) mampu tetap tumbuh kuat. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Bantul memiliki ketahanan yang baik dalam menghasilkan nilai tambah bruto di tengah dinamika ekonomi regional DIY. Meskipun target telah terlampaui, Pemerintah Kabupaten Bantul tetap berkomitmen untuk mendorong kualitas pertumbuhan melalui strategi hilirisasi produk-produk lokal. Fokus kebijakan ke depan adalah memastikan bahwa nilai tambah dari kenaikan PDRB per kapita ini dapat dinikmati lebih luas oleh masyarakat melalui pengolahan bahan baku menjadi produk jadi di dalam daerah. Dengan memperkuat rantai nilai lokal, diharapkan pendapatan riil masyarakat akan terus meningkat secara berkelanjutan dan mampu menjaga momentum tren positif ini pada tahun anggaran berikutnya.

c) Rasio Gini

Rasio Gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Bantul tercatat sebesar 0,427. Jika disandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 pada rentang 0,385 hingga 0,409, maka capaian kinerja indikator ini berada pada angka 90,16% dengan predikat "Tinggi". Namun secara teknis, angka ini berada di luar interval target yang

diharapkan, yang mengindikasikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata di seluruh lapisan masyarakat, di mana pertumbuhan pada kelompok pengeluaran atas melaju lebih cepat dibandingkan kelompok bawah.

Belum tercapainya target penurunan ketimpangan pada periode ini dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis, yaitu:

- Akses Manfaat Sektor Unggulan: Pertumbuhan di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum cenderung terkonsentrasi pada pemilik modal dan tenaga kerja terampil di pusat pertumbuhan, sementara masyarakat di wilayah dengan basis pertanian belum merasakan dampak rembesan ekonomi (trickle-down effect) secara optimal.
- Tekanan Inflasi Kebutuhan Pokok: Kenaikan harga kebutuhan dasar memberikan tekanan lebih besar pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga porsi pengeluaran mereka berkontraksi dibandingkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi.
- Dinamika Struktur Lapangan Kerja: Dominasi sektor informal pada sektor pertanian dan industri pengolahan skala mikro menyebabkan pertumbuhan pendapatan di level bawah cenderung stagnan, sementara sektor jasa modern mengalami pertumbuhan pendapatan yang lebih akseleratif.

Menyikapi dinamika tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk memfokuskan arah kebijakan pada penguatan redistribusi ekonomi guna mewujudkan pertumbuhan yang lebih inklusif melalui langkah-langkah berikut:

- Transformasi Ekonomi Informal: Memperkuat UMKM melalui fasilitasi bantuan permodalan dan perluasan akses pasar untuk mendorong kenaikan kelas ekonomi masyarakat lapisan bawah.
- Perluasan Perlindungan Sosial: Mengoptimalkan akurasi data penerima bantuan agar jaring pengaman sosial dapat beroperasi secara tepat sasaran dalam menjaga daya beli masyarakat rentan.

- Pembangunan Berbasis Kewilayahan: Menggeser konsentrasi pembangunan ke wilayah Bantul bagian selatan dan kawasan pelosok untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang lebih merata.
- Peningkatan Kualitas SDM: Menjalankan program pelatihan kerja yang terspesialisasi pada sektor industri pengolahan guna meningkatkan kompetensi dan nilai tawar upah tenaga kerja lokal.

Seluruh upaya ini diharapkan dapat menekan angka ketimpangan secara bertahap, sehingga kemajuan ekonomi di Kabupaten Bantul dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat pada Semester-Semester selanjutnya.

Tujuan Meningkatkan ketangguhan perekonomian daerah didukung dua sasaran, yaitu:

a. Meningkatkan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah

Sasaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan sektor-sektor yang menjadi kekuatan fundamental ekonomi Kabupaten Bantul, khususnya pada sektor industri, pariwisata, dan pertanian. Keberhasilan sasaran ini pada Semester I Tahun 2026 diukur melalui indikator-indikator berikut:

a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum menunjukkan performa yang sangat impresif dengan realisasi sebesar 13,32%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 pada rentang 12,83% - 13,19%, maka capaian indikator ini tercatat sebesar 100,98% (terhadap batas atas) atau secara proporsional mencapai 32,65% dari total target akumulatif dengan predikat "Tinggi". Angka ini menegaskan bahwa sektor pariwisata dan kuliner tetap menjadi motor penggerak utama (prime mover) bagi perekonomian daerah.

Pertumbuhan yang melampaui target ini mencerminkan tingginya daya tarik Kabupaten Bantul sebagai destinasi wisata

serta terjaganya konsumsi rumah tangga di sektor jasa boga. Mengingat kontribusinya yang dominan, arah kebijakan ke depan akan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dan keberlanjutan sektor. Strategi utama mencakup:

- Akselerasi Digitalisasi: Memperkuat promosi produk kuliner lokal dan reservasi akomodasi melalui platform digital.
- Diversifikasi Destinasi: Mengembangkan desa wisata berbasis komunitas untuk mendistribusikan aliran wisatawan ke wilayah luar pusat kota.
- Standardisasi Layanan: Meningkatkan kualitas layanan dan keamanan destinasi guna menjaga daya saing di level regional maupun nasional.
- Penguatan Rantai Pasok Lokal: Memastikan bahan baku sektor kuliner dan perhotelan diserap dari petani dan produsen lokal Bantul guna memberikan efek pengganda yang lebih luas.

b) Rasio PDRB Industri Pengolahan

Realisasi kontribusi sektor Industri Pengolahan pada periode ini tercatat sebesar 14,1%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 pada rentang 14,20% - 14,84%, maka capaian kinerja indikator ini berada pada angka 97,38% dengan predikat "Tinggi". Meskipun secara teknis realisasi Semester ini sedikit berada di bawah ambang bawah target, angka ini tetap menunjukkan struktur ekonomi daerah yang stabil pada sektor sekunder sebagai penggerak nilai tambah produk lokal.

Pencapaian ini mengindikasikan bahwa sektor industri tetap menjadi tulang punggung dalam penciptaan lapangan kerja dan pengolahan komoditas unggulan di Kabupaten Bantul. Untuk mengakselerasi ketercapaian target di akhir tahun, perencanaan ke depan akan memprioritaskan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Pengembangan Industri Hijau: Mendorong praktik industri yang ramah lingkungan (green industry) untuk meningkatkan efisiensi energi dan daya saing produk di pasar yang lebih luas.
- Digitalisasi IKM: Meningkatkan dukungan teknologi digital bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) guna memperluas jangkauan pasar dan efisiensi proses produksi.
- Integrasi Rantai Pasok: Memperkuat sinergi antara penyedia bahan baku lokal dengan industri pengolahan untuk memastikan ketersediaan input produksi yang stabil dan kompetitif.

Melalui intervensi tersebut, diharapkan sektor Industri Pengolahan dapat kembali masuk dalam rentang target sasaran dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Semester berikutnya.

c) PDRB Sektor Pertanian ADHB

Realisasi nilai tambah bruto sektor Pertanian (ADHB) pada periode ini tercatat sebesar Rp5.393,17 Miliar. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 pada rentang Rp5.395,85 Miliar hingga Rp5.405,48 Miliar, maka capaian kinerja indikator ini berada pada angka 99,77% dengan predikat "Tinggi". Meskipun secara teknis realisasi Semester ini sedikit berada di bawah ambang bawah target, angka tersebut menunjukkan stabilitas nilai tambah sektor primer yang tetap menjadi penopang ketahanan ekonomi di Kabupaten Bantul.

Peningkatan nilai realisasi ini mencerminkan keberhasilan strategi intensifikasi dan terjaganya harga komoditas unggulan di tingkat lokal, meskipun sektor ini terus dibayangi tantangan alih fungsi lahan dan dinamika perubahan iklim. Guna mempertahankan kontribusi sektor ini terhadap ketahanan ekonomi daerah, perencanaan pada Semester berikutnya akan difokuskan pada:

- Modernisasi Pertanian (Smart Farming): Mendorong penerapan teknologi pertanian tepat guna untuk meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan lahan.
- Efisiensi Rantai Pasok: Memperpendek rantai distribusi hasil panen agar nilai ekonomi yang diterima petani lebih optimal.
- Perlindungan Lahan (LP2B): Memperkuat penegakan regulasi terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menjaga kemandirian pangan daerah dari tekanan pembangunan infrastruktur dan pemukiman.

Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan sektor pertanian dapat terus tumbuh stabil dan memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap perekonomian Kabupaten Bantul secara menyeluruh..

b. Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk.

Sasaran ini difokuskan pada penguatan iklim investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, serta meningkatkan taraf pendapatan masyarakat. Capaian sasaran ini pada periode pelaporan diukur melalui indikator-indikator berikut:

a) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi indikator kunci dalam mengukur akumulasi aset fisik dan investasi di daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi PMTB Kabupaten Bantul tercatat sebesar 25,22%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 pada rentang 26,81% – 26,91%, maka capaian kinerja indikator ini berada pada angka 93,72% dengan predikat "Tinggi".

Meskipun capaian ini menunjukkan stabilitas iklim investasi, realisasi yang berada di bawah ambang target minimal menandakan perlunya langkah-langkah akselerasi kebijakan untuk mendorong akumulasi modal fisik, seperti perluasan infrastruktur pendukung, pengadaan mesin, dan peralatan

produksi. Langkah strategis pada Semester berikutnya akan difokuskan pada:

- Sinkronisasi Perizinan: Mempercepat kemudahan proses perizinan investasi melalui sistem yang terintegrasi.
- Penguatan Rantai Pasok Lokal: Menghubungkan investasi skala besar dengan UMKM lokal agar dampak ekonomi yang dihasilkan lebih inklusif dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
- Stimulus Investasi: Mendorong investasi pada sektor-sektor padat karya guna mempercepat penyerapan tenaga kerja di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

Upaya-upaya ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan daerah dan memastikan bahwa setiap investasi yang masuk mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan penduduk secara berkelanjutan.

b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan performa kinerja yang baik dengan realisasi sebesar 3,57%. Jika disandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 pada rentang 3,04% s.d. 3,57%, maka capaian indikator ini berada pada angka 85,15% dengan predikat "Tinggi". Meskipun angka realisasi berada pada batas atas interval target, capaian ini mencerminkan resiliensi pasar kerja di Kabupaten Bantul dalam menyerap angkatan kerja yang ada.

Keberhasilan menjaga angka pengangguran di dalam koridor target ini merupakan hasil dari sinergi program penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, guna mengakselerasi penurunan angka pengangguran menuju batas bawah target pada Semester berikutnya, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Penguatan Link and Match: Meningkatkan keselarasan antara kompetensi lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja dengan kebutuhan riil pasar kerja yang dinamis.

- Perluasan Lapangan Kerja: Mendorong pertumbuhan sektor formal maupun informal melalui fasilitasi investasi padat karya dan penguatan ekosistem kewirausahaan lokal.
- Optimalisasi Bursa Kerja: Memperkuat peran bursa kerja dan sistem informasi pasar kerja guna mempermudah akses masyarakat terhadap peluang kerja yang tersedia.

Melalui upaya pemantauan yang berkelanjutan dan intervensi yang tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk menjaga tren positif ini agar angka pengangguran tetap terkendali dan terus menurun secara berkelanjutan hingga akhir tahun anggaran.

c) Rasio Kewirausahaan Daerah

Indikator Rasio Kewirausahaan Daerah mencatatkan performa yang sangat impresif dengan realisasi sebesar 4,72%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 sebesar 4,1%, maka capaian kinerja indikator ini tercatat sebesar 115,12% dengan predikat "Sangat Tinggi". Pencapaian yang melampaui target ini mengindikasikan semakin kuatnya ekosistem kewirausahaan di Kabupaten Bantul serta meningkatnya minat masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja mandiri.

Tingginya rasio ini mencerminkan keberhasilan berbagai program stimulan, mulai dari inkubasi bisnis hingga fasilitasi kemudahan berusaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun, guna menjaga momentum tren positif ini agar bersifat berkelanjutan, langkah strategis ke depan akan difokuskan pada:

- Penguatan Kapasitas Bisnis: Memberikan pendampingan intensif bagi wirausaha pemula agar mampu melakukan eskalasi bisnis (scaling up) dan meningkatkan daya saing produk.

- Perluasan Akses Permodalan: Memfasilitasi akses ke lembaga keuangan dan skema pembiayaan yang ramah bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- Digitalisasi Usaha: Mendorong akselerasi adopsi teknologi digital dalam proses pemasaran dan manajemen usaha guna menjangkau pangsa pasar yang lebih luas.

Melalui penguatan ekosistem yang lebih matang dan inklusif, diharapkan para wirausaha di Kabupaten Bantul tidak hanya tumbuh secara kuantitas, namun juga memiliki kualitas yang kokoh dalam mendukung ketangguhan ekonomi daerah.

d) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Indikator Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (dalam ribuan rupiah/orang/tahun) mencatatkan realisasi sebesar 17.240. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 sebesar 17.407, maka capaian kinerja indikator ini berada pada angka 99,04% dengan predikat "Tinggi". Meskipun secara teknis realisasi Semester ini sedikit berada di bawah target tahunan, angka tersebut mencerminkan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul yang tetap terjaga di level yang stabil.

Pencapaian yang mendekati target ini merupakan sinyal positif atas efektivitas berbagai program jaring pengaman sosial dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat yang telah dijalankan. Namun, guna memastikan daya beli masyarakat tetap kokoh di tengah dinamika ekonomi, langkah strategis ke depan akan difokuskan pada:

- Pengendalian Inflasi Daerah: Memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memantau stabilitas harga kebutuhan pokok agar tren peningkatan pendapatan masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga (cost of living).
- Penguatan Ekonomi Lokal: Mendorong produktivitas sektor-sektor padat karya dan UMKM guna meningkatkan pendapatan riil keluarga secara berkelanjutan.

- Optimalisasi Bantuan Sosial: Memastikan ketepatan sasaran berbagai program subsidi dan bantuan sosial untuk menjaga standar kualitas hidup masyarakat pada kelompok rentan.

Melalui langkah-langkah mitigasi dan akselerasi tersebut, diharapkan Pengeluaran Per Kapita masyarakat dapat terus meningkat melampaui target yang telah ditetapkan pada akhir tahun anggaran, sehingga mampu menopang kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bantul secara menyeluruh.

D. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan

Tujuan ini merupakan prioritas utama pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkeadilan. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator makro Tingkat Kemiskinan. Berdasarkan evaluasi periode ini, Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul tercatat sebesar 11,54%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 pada rentang 9,39% – 9,67%, maka capaian kinerja indikator ini berada pada angka 81,37% dengan predikat "Tinggi".

Meskipun secara teknis realisasi masih berada di atas interval target tahunan, data menunjukkan adanya stabilitas dalam upaya pengendalian jumlah penduduk miskin. Untuk mengakselerasi penurunan angka kemiskinan pada Semester berikutnya, perencanaan akan difokuskan pada penajaman pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial agar intervensi lebih tepat sasaran. Selain itu, perlu penguatan strategi integrasi antara pemberian bantuan sosial dengan pelatihan keterampilan produktif, sehingga keluarga penerima manfaat memiliki kemandirian ekonomi untuk keluar dari garis kemiskinan secara permanen.

Upaya mencapai tujuan tersebut didukung secara spesifik melalui sasaran Menurunnya Kedalaman Kemiskinan. Sasaran ini difokuskan pada upaya mempersempit jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dengan indikator sebagai berikut:

a) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan mencatatkan performa

yang sangat impresif dengan realisasi sebesar 1,28. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 sebesar 2,12, maka capaian indikator ini mencapai 165,63% dengan predikat "Sangat Tinggi". Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul sangat efektif dalam menjangkau masyarakat yang paling rentan, sehingga tingkat keparahan kemiskinan di lapisan terbawah dapat diminimalisir secara signifikan.

Pemerintah Kabupaten Bantul terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan secara komprehensif, tidak hanya fokus pada penurunan persentase penduduk miskin secara umum, melainkan juga menargetkan penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) yang menunjukkan kecenderungan meningkat. Upaya ini dilakukan melalui intervensi yang difokuskan pada kelompok masyarakat miskin ekstrem (bottom 10%) guna mengurangi ketimpangan pengeluaran antar-penduduk miskin. Langkah strategis tersebut ditempuh dengan mempertahankan dan memperkuat program perlindungan sosial yang bersifat afirmatif dan adaptif. Pendekatan afirmatif memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan kesejahteraan bagi kelompok paling rentan secara tepat sasaran, sementara pendekatan adaptif disiapkan untuk mengantisipasi dinamika shock ekonomi, perubahan sosial, serta risiko bencana alam yang dapat memicu munculnya kelompok miskin baru. Sinergi kedua pendekatan ini diharapkan mampu menjaga ketahanan sosial-ekonomi masyarakat sekaligus menekan tingkat keparahan kemiskinan secara berkelanjutan.

E. Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Tujuan kelima menitikberatkan pada keseimbangan antara pembangunan fisik kewilayahan dengan kelestarian ekosistem guna mendukung pertumbuhan daerah yang berkelanjutan. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator makro Indeks Pengembangan Wilayah. Berdasarkan evaluasi pada periode ini, Indeks Pengembangan

Wilayah Kabupaten Bantul mencatatkan angka sebesar 70,04. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 sebesar 70,99, maka capaian kinerja indikator ini berada pada angka 98,66% dengan predikat "Tinggi".

Angka ini mencerminkan upaya konsisten Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemerataan pembangunan sarana dan prasarana di seluruh wilayah. Meskipun secara teknis realisasi Semester ini berada sedikit di bawah target tahunan, progres yang stabil menunjukkan bahwa kualitas pengembangan kewilayahan berjalan di jalur yang tepat.

Guna mencapai target yang optimal pada akhir tahun anggaran, perencanaan ke depan akan difokuskan pada integrasi tata ruang yang mampu mendukung pertumbuhan sentra ekonomi baru tanpa mengabaikan aspek daya dukung lingkungan. Langkah strategis yang akan diambil meliputi penguatan sinkronisasi antara pembangunan infrastruktur kabupaten dengan perencanaan tata ruang di tingkat kalurahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengembangan wilayah berjalan lebih harmonis, inklusif, dan mampu memberikan dampak positif yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bantul..

Untuk Mengembangkan Wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan didukung dua sasaran, yaitu:

- 1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Menurunnya Risiko Bencana

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan daerah berjalan selaras dengan kualitas lingkungan yang sehat serta ketangguhan dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana. Keberhasilan sasaran ini pada Semester I Tahun 2026 diukur melalui indikator-indikator berikut:

- a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator ini menunjukkan performa yang sangat progresif dengan realisasi mencapai 71,05. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 sebesar

66,17, maka capaian kinerja indikator ini tercatat sebesar 107,37% dengan predikat "Sangat Tinggi". Realisasi ini mencerminkan keberhasilan berbagai program perlindungan lingkungan hidup yang mampu menjaga daya dukung alam di tengah pesatnya pembangunan fisik di Kabupaten Bantul.

Pencapaian yang telah melampaui target tahunan ini harus terus dipertahankan melalui langkah-langkah strategis yang berkelanjutan. Fokus perencanaan ke depan akan diarahkan pada:

- Penguatan Pengelolaan Limbah: Memperkuat kebijakan pengelolaan limbah domestik dan industri untuk mencegah degradasi kualitas tanah dan air.
- Perlindungan Sumber Daya Air: Menjaga kelestarian sumber-sumber mata air serta optimalisasi ruang terbuka hijau sebagai area resapan.
- Partisipasi Berbasis Masyarakat: Mendorong gerakan ramah lingkungan di tingkat rumah tangga dan kalurahan guna menciptakan budaya peduli lingkungan yang organik.

Keberlanjutan indeks yang sudah berada pada kategori sangat tinggi ini menjadi prasyarat mutlak bagi kenyamanan hidup warga serta daya tarik Kabupaten Bantul sebagai daerah yang ramah lingkungan.

b) Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) mencatatkan realisasi sebesar 96,02. Jika dibandingkan dengan target penurunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 pada rentang 127,10 – 138,80, maka capaian kinerja indikator ini tercatat sebesar 132,37% dengan predikat "Sangat Tinggi". Pencapaian ini menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bantul, di mana angka realisasi yang semakin rendah menandakan tingkat kerawanan yang semakin terkendali.

Keberhasilan dalam menekan angka indeks risiko ini

mencerminkan penguatan koordinasi antar-sektor dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Guna mempertahankan dan terus meningkatkan performa ini pada Semester berikutnya, fokus perencanaan akan diarahkan pada:

- Penguatan Infrastruktur Mitigasi: Melanjutkan pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana fisik seperti normalisasi drainase, penguatan tanggul sungai, dan jalur evakuasi di zona rawan.
- Sistem Peringatan Dini Berbasis Komunitas: Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan keterlibatan warga dalam pemutakhiran sistem peringatan dini agar lebih responsif.
- Edukasi Kesiapsiagaan: Meningkatkan literasi bencana bagi masyarakat melalui simulasi dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang lebih masif.

Upaya-upaya strategis tersebut sangat krusial mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Bantul yang memiliki kompleksitas potensi ancaman bencana, sehingga ketangguhan masyarakat dan infrastruktur harus terus diperkuat secara berkelanjutan.

2) Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur

Sasaran ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar infrastruktur wilayah yang berkualitas dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Capaian sasaran ini pada periode pelaporan diukur melalui indikator berikut:

a) Indeks Kualitas Infrastruktur

Indikator Indeks Kualitas Infrastruktur mencatatkan realisasi sebesar 69,19. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 sebesar 78,56, maka capaian kinerja indikator ini berada pada angka 88,07% dengan predikat "Tinggi". Meskipun secara teknis realisasi Semester ini masih berada di bawah target tahunan, angka tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keandalan

infrastruktur publik.

Progres yang telah dicapai menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Bantul tetap berjalan secara stabil. Guna mengakselerasi ketercapaian target di akhir tahun anggaran, perencanaan ke depan akan difokuskan pada:

- Peningkatan Standar Kualitas: Beralih dari sekadar pemenuhan kuantitas menuju penguatan standar kualitas konstruksi dan ketahanan infrastruktur.
- Pemeliharaan Berkala: Mengoptimalkan program pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada agar masa pakai layanan dapat lebih panjang dan efisien secara anggaran.
- Konektivitas Wilayah: Memperkuat konektivitas jalan terutama pada jalur-jalur menuju wilayah produksi dan pusat ekonomi lokal.
- Akses Layanan Dasar: Menjamin kemudahan akses air bersih dan sanitasi layak melalui pengawasan pembangunan dan perbaikan jaringan secara lebih ketat dan terpadu.

Melalui upaya pemeliharaan dan pengawasan yang lebih intensif, diharapkan indeks kualitas infrastruktur dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung mobilitas penduduk serta pertumbuhan ekonomi wilayah secara optimal.

F. Meningkatkan Keharmonisan Daerah

Tujuan keenam berfokus pada terciptanya stabilitas sosial melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan, pelestarian akar budaya, serta penegakan ketertiban umum. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator makro Indeks Harmoni Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi pada periode ini, Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Bantul mencatatkan angka sebesar 6,91. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 sebesar 7,58, maka capaian kinerja indikator ini berada pada angka 91,16% dengan predikat "Tinggi".

Angka ini mencerminkan kondisi sosial kemasyarakatan yang relatif stabil dan rukun di tengah keragaman masyarakat Kabupaten Bantul. Meskipun secara teknis realisasi Semester ini masih berada di bawah target tahunan, capaian tersebut menunjukkan fondasi harmoni sosial yang tetap terjaga sebagai modal dasar pembangunan daerah.

Untuk Meningkatkan Keharmonisan Daerah didukung dengan dua sasaran yaitu:

1) Meningkatnya Pelestarian Budaya

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan jati diri budaya daerah tetap lestari, berkembang, dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman sebagai identitas kuat Kabupaten Bantul. Keberhasilan sasaran ini pada periode pelaporan diukur melalui indikator berikut:

a) Indeks Pelestarian Kebudayaan

Indikator Indeks Pelestarian Kebudayaan mencatatkan performa yang sangat impresif dengan realisasi sebesar 89,42. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 sebesar 82,33, maka capaian kinerja indikator ini mencapai 108,61% dengan predikat "Sangat Tinggi". Pencapaian yang melampaui target ini mencerminkan keberhasilan berbagai program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan di seluruh wilayah.

Meskipun capaian tahunan telah melampaui target, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelestarian melalui langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Aktivasi Ruang Budaya: Memperluas alokasi kegiatan pada ruang-ruang publik untuk aktivasi seni tradisi dan ekspresi budaya lokal.
- Regenerasi Pelaku Budaya: Meningkatkan pelibatan aktif generasi muda dalam pelestarian seni tradisi guna mencegah degradasi nilai-nilai lokal.

- Digitalisasi Aset Budaya: Memperkuat pendataan dan promosi aset budaya melalui platform digital modern agar lebih mudah diakses oleh masyarakat luas dan wisatawan.

Melalui penguatan ekosistem kebudayaan yang inklusif dan berbasis teknologi, diharapkan indeks ini terus mengalami pertumbuhan yang signifikan sehingga mampu memperkuat posisi Kabupaten Bantul sebagai pusat kebudayaan yang dinamis

2) Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Daerah
Sasaran ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan wilayah yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh aktivitas masyarakat Kabupaten Bantul. Capaian sasaran ini pada periode pelaporan diukur melalui indikator berikut:

a) Crime Rate (per 100.000 penduduk)

Indikator Crime Rate mencatatkan performa yang sangat impresif dengan realisasi sebesar 73. Jika dibandingkan dengan target (ambang batas maksimal) yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 sebesar 146,1, maka capaian kinerja indikator ini mencapai 200,14% dengan predikat "Sangat Tinggi". Mengingat ini adalah indikator dengan polaritas negatif (semakin rendah angka, semakin baik), maka realisasi 73 menunjukkan tingkat kriminalitas yang jauh lebih terkendali dibandingkan proyeksi awal.

Keberhasilan dalam menekan angka kriminalitas ini mencerminkan efektifitas sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Guna mempertahankan kondisi kondusif ini pada Semester berikutnya, langkah strategis yang akan diambil meliputi:

- Penguatan Siskamling Digital: Mendorong integrasi sistem keamanan lingkungan dengan teknologi informasi untuk percepatan pelaporan dan penanganan gangguan ketertiban.

- Optimalisasi Patroli Wilayah: Meningkatkan intensitas patroli pada titik-titik rawan guna memberikan rasa aman yang nyata bagi masyarakat.
- Edukasi Sadar Hukum: Memperkuat program sosialisasi dan edukasi sadar hukum bagi masyarakat untuk meminimalisir potensi tindak pidana di tingkat akar rumput.

Stabilitas ketentraman dan ketertiban yang terjaga dengan baik ini diharapkan dapat terus menjadi modal dasar dalam meningkatkan daya tarik investasi dan produktivitas ekonomi di Kabupaten Bantul secara berkelanjutan.

2.3.2 Evaluasi Kinerja Daerah Tahun 2026 Semester I

Analisis terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan instrumen kritikal dalam memotret efektivitas urusan pemerintahan yang menjadi penopang langsung capaian strategis daerah. Jika Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merepresentasikan dampak makro dari kebijakan pembangunan, maka IKD berfungsi untuk mengukur kualitas intervensi teknis pada setiap urusan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi komprehensif pada Semester I Tahun 2026, secara umum realisasi 96 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bantul menunjukkan progres awal yang selaras (in-line) dengan koridor perencanaan tahun berjalan. Mengingat periode ini merupakan tahap awal pelaksanaan anggaran, capaian IKD yang tercatat berfungsi sebagai fondasi penting sekaligus instrumen kendali bagi perbaikan intervensi teknis pada Semester-Semester berikutnya. Beberapa analisis krusial terhadap dinamika capaian IKD pada masing-masing urusan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bantul Tahun 2026

Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026				
			REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI	CAPAIAN	Ketercapaian
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	82.92	76.82	84.32	84.32	76.82	91.11	Tidak tercapai
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Angka	9.27	9.58	8,78-9,47	8.78-9.47	9.58	101.16	Tercapai
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61.67	71.05	66.17	66.17	71.05	107.37	Tercapai
Indeks Risiko Bencana	Indeks	129.5	96.02	116.87	116.87	96.02	82.16	Tidak tercapai
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian	Persen	78.54	80.95	81	81	80.95	99.94	Tidak tercapai
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	25.25	25.34	25.78	25.78	25.34	98.29	Tidak tercapai
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	43.69	65.84	45	45	65.84	146.31	Tercapai
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.04	4.92	5,28-5,51	5,28-5,51	4.92	93.18	Tidak tercapai
Tingkat Kemiskinan	Persen	11.66	11.54	9,39-9,67	9.39-9.67	11.54	83.80	Tidak tercapai
PDRB Per Kapita	Rp Juta	35.84	38.187	38,27-40,80	38.27-40.80	38.187	99.78	Tidak tercapai
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.62	3.57	3,04-3,57	3.04-3.57	3.57	100.00	Tercapai
Rasio Gini	Indeks	0.417	0.427	0,385-0,409	0.385-0.409	0.427	95.78	Tidak tercapai
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82.05	83.03	82,26-82,89	82.26-82.89	83.03	100.17	Tercapai

Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026				
			REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI	CAPAIAN	Ketercapaian
Usia Harapan Hidup	Tahun	74.8	75.04	74,97-75,18	74.97-75.18	75.04	100.09	Tercapai
Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	84.12	106.5	81.15	81.15	106.5	76.20	Tidak tercapai
Angka Kematian Balita	per 1.000 kelahiran hidup	n/a	7.8	13.8	13.8	7.8	176.92	Tercapai
Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persen	n/a		46	46		-	Tidak tercapai
Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	97.62		97.72	97.72		-	Tidak tercapai
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	5		6	6		-	Tidak tercapai
Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persen	n/a		20	20		-	Tidak tercapai
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	16.5	16.5	15,25-13,25	15.25-13.25	16.5	92.42	Tidak tercapai
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	90	59.4	91.45	91.45	59.4	64.95	Tidak tercapai
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	90	91.02	91.2	91.2	91.02	99.80	Tidak tercapai
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	98.55	99.03	98.57	98.57	99.03	100.47	Tercapai
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.81	10.11	9.96	9.96	10.11	101.51	Tercapai
Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.63	15.91	15,72-15,79	15.72-15.79	15.91	100.76	Tercapai

Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026				
			REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI	CAPAIAN	Ketercapaian
Literasi Membaca	Persen	79.04	77.84	82.65	82.65	77.84	94.18	Tidak tercapai
Numerasi	Persen	66.49	65.54	70.89	70.89	65.54	92.45	Tidak tercapai
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribuan rupiah/orang/tahun)	Ribu Rupiah	16851	17240	17407	17407	17240	99.04	Tidak tercapai
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Persen	27.01	28.2	30,15-35,15	30.15-35.15	28.2	93.53	Tidak tercapai
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.127	0.123	0.123	0.123	0.123	100.00	Tercapai
Total Fertility Rate (TFR)	Orang	1.53	1.84	1.55	1.55	1.84	118.71	Tercapai
Indeks Lansia Berdaya	Indeks	57.97	72.6	60.7	60.7	72.6	119.60	Tercapai
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	61.4	77.5	62	62	77.5	125.00	Tercapai
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	64.38	76.1	65	65	76.1	117.08	Tercapai
Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2.18	1.28	2.12	2.12	1.28	60.38	Tidak tercapai
Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin Indeks	0.64	0.64	0.7	0.7	0.64	91.42	Tidak tercapai
Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	14.08	14.1	14,20-14,84	14.20-14.84	14.1	99.30	Tidak tercapai
PDRB Sektor Pertanian ADHB	Rp miliar	4,913.83	5393.17	5.395,85-5.405,48	5.395.85-5.405.48	5393.17	99.95	Tidak tercapai
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12.75	13.32	12,83-13,19	12.83-13.19	13.32	100.99	Tercapai

Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026				
			REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI	CAPAIAN	Ketercapaian
Kontribusi PDRB Kabupaten Bantul terhadap PDRB provinsi	Persen	18.88	18.84	18,94-19,15	18.94-19.15	18.84	99.47	Tidak tercapai
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	Persen	4,31*	4.31	5,25	5.25	4.31	82.10	Tidak tercapai
Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3.85	4.72	4,10-4,60	4.10-4.60	4.72	102.61	Tercapai
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	1.05	1.66	1,90	1.9	1.66	87.37	Tidak tercapai
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	67.15	65.53	68,18-70,68	68.18-70.68	65.53	96.11	Tidak tercapai
Indeks Inovasi Daerah	Indeks	71.3	83.64	77,33	77.33	83.64	108.16	Tercapai
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	26.72	25.22	26,81-26,91	26.81-26.91	25.22	94.07	Tidak tercapai
Indeks Pengembangan Wilayah	Indeks	63.12	70.04	64,85	64.85	70.04	108.00	Tercapai
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	58.72	69.19	59,80	59.8	69.19	115.70	Tercapai
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0.81	1.06	0,91-0,97	0.91-0.97	1.06	109.28	Tercapai
Total Kredit/PDRB	Persen	34.08	30.95	37,16	37.16	30.95	83.29	Tidak tercapai
Crime Rate	Per 100.000 penduduk	73	73	146,1	146.1	73	200,14	Tercapai
Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7.44	6.91	7,58	7.58	6.91	91.16	Tidak tercapai
Indeks Pelestarian Kebudayaan	Indeks	71.82	89.42	90,91	90.91	89.42	98.36	Tidak tercapai
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	4.65	5.19	4,72	4.72	5.19	100 -	Tercapai

Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026				
			REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI	CAPAIAN	Ketercapaian
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	99.09	99.26	99,14	99.14	99.26	100.12	Tercapai
Persentase Desa Mandiri	Persen	94.67	100	100,00	100	100	100.00	Tercapai
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	88,02	90.03	88,50	88.5	90.03	101.73	Tercapai
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,18	4.68	4,48-4,52	4.48-4.52	4.68	103.54	Tercapai
Nilai AKIP	Angka	81,27	82.8	84,18	84.18	82.8	98.36	Tidak tercapai
Opini BPK	Opini	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	100.00	Tercapai
Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	93,29	91.2	94,05	94.05	91.2	96.97	Tidak tercapai
Indeks Pemerintah Digital	Indeks	n/a	n/a	1,6	1.6	n/a	-	Tidak tercapai
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Nilai	3,193	3216	3,213	3,213	3216	100.09	Tercapai
Rata-rata capaian kinerja Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Persen	n/a	98.82	76,50-79,00	76.50-79.00	98.82	125.09	Tercapai

Sumber: Data diolah, Bappeda, 2026

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap 96 Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi modal awal (starting point) pada Semester I Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bantul mengawal konsistensi target capaian pada setiap urusan pemerintahan. Secara agregat, potret performa awal tahun ini menunjukkan bahwa 63 indikator (65,6%) memiliki posisi awal yang sangat progresif karena telah memenuhi ambang batas target periodik dengan predikat Sangat Tinggi. Di sisi lain, terdapat 33 indikator (34,4%) yang tercatat berada di bawah 100% dari target tahunan RKPD 2026, sehingga memerlukan perhatian dan akselerasi khusus dalam pelaksanaannya sepanjang tahun anggaran berjalan.

Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan (room for improvement) pada 34,4% indikator yang dikelola, kesiapan dari 63 indikator utama dalam mendekati dan memenuhi target tahunan menunjukkan bahwa manajemen pembangunan di Kabupaten Bantul tetap berada pada jalur yang akuntabel serta berorientasi pada hasil (result-oriented).

Guna memahami dinamika kesiapan kinerja tersebut secara lebih mendalam pada awal tahun anggaran ini, analisis evaluasi IKD dilakukan dengan membedah capaian berdasarkan empat aspek utama urusan pemerintahan. Pendekatan klasterisasi ini bertujuan untuk memetakan kekuatan modal dasar daerah serta mengidentifikasi titik hambatan (bottleneck) potensial pada setiap urusan, sehingga strategi pengendalian dan percepatan pada Semester berikutnya dapat dirumuskan secara lebih presisi, tajam, dan tepat sasaran. Berikut adalah analisis mendalam capaian IKD berdasarkan aspek urusan pemerintahan:

1. Aspek Geografi dan Lingkungan Hidup

Aspek geografi menjadi variabel determinan dalam menjaga keberlanjutan daya dukung wilayah Kabupaten Bantul yang memiliki karakteristik topografi serta kerentanan geologis yang beragam. Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang dikelola pada klaster ini, potret capaian awal tahun menunjukkan hasil yang cukup kompetitif, namun memberikan sinyal penting mengenai

perlunya atensi khusus pada sektor mitigasi, ketahanan pangan, dan sanitasi lingkungan.

Berdasarkan hasil pemetaan kondisi awal di Semester I, sebanyak 4 (empat) indikator tercatat berada pada posisi yang sangat progresif dan berhasil memenuhi target periodik dengan predikat Sangat Tinggi. Hal ini mencerminkan kuatnya modal dasar daerah dalam pemeliharaan infrastruktur dasar serta penataan ruang untuk mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) indikator yang secara teknis realisasinya masih berada di bawah target tahunan RKPD 2026, yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Indeks Risiko Bencana (IRB), dan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman.

Jarak (gap) terhadap target tahunan pada Indeks Risiko Bencana dan Sanitasi Aman mengindikasikan perlunya akselerasi intervensi fisik maupun non-fisik yang lebih masif di tingkat akar rumput sepanjang tahun anggaran berjalan, mengingat tingkat keberhasilan kedua sektor ini sangat dipengaruhi oleh perubahan perilaku masyarakat dan percepatan penyediaan infrastruktur skala rumah tangga. Sementara itu, deviasi awal pada Indeks Ketahanan Pangan menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi fluktuasi produksi komoditas pangan lokal di tengah dinamika perubahan iklim melalui penguatan sistem rantai pasok dan peningkatan efisiensi pengelolaan lahan pertanian.

Sebagai langkah pengendalian (controlling), Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen melakukan sinkronisasi kebijakan lintas sektoral pada Semester berikutnya guna memitigasi risiko tidak tercapainya target akhir tahun pada 3 indikator tersebut. Fokus perencanaan dan pelaksanaan program ke depan akan diarahkan secara simultan pada:

- Akselerasi Sanitasi: Penguatan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta fasilitasi pembangunan sarana sanitasi yang layak.

- Ketangguhan Bencana: Optimalisasi sistem peringatan dini dan perluasan edukasi kebencanaan yang lebih inklusif berbasis komunitas.
- Kemandirian Pangan: Penguatan cadangan pangan daerah dan intensifikasi program diversifikasi pangan lokal untuk mengokohkan ketahanan pangan daerah menghadapi anomali iklim.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan pilar utama pembangunan Kabupaten Bantul yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup, daya beli, serta pemerataan akses layanan sosial. Dari 30 (tiga puluh) Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang ditetapkan pada klaster ini, potret evaluasi awal tahun menunjukkan perkembangan kinerja yang dinamis, di mana 16 (enam belas) indikator tercatat berada pada posisi awal yang sangat progresif dan berhasil memenuhi target periodik dengan predikat Sangat Tinggi, sementara 14 (empat belas) indikator lainnya tercatat masih berada di bawah target tahunan RKPD 2026.

Posisi awal yang kuat pada 16 indikator tersebut menunjukkan bahwa program-program prioritas, khususnya pada penguatan jaring pengaman sosial, akses pendidikan, dan layanan kesehatan dasar, telah berjalan pada koridor yang tepat. Capaian ini berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah dan memastikan kelompok masyarakat rentan tetap mendapatkan perlindungan sosial yang memadai di awal tahun anggaran. Sebaliknya, jarak (gap) terhadap target tahunan pada 14 indikator lainnya memberi sinyal dini bagi manajemen daerah untuk melakukan pengawalan ketat, khususnya terhadap strategi akselerasi penanganan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, serta penguatan kemandirian ekonomi lokal di tengah tantangan fluktuasi harga komoditas makro.

Fokus permasalahan pada 14 indikator yang memerlukan akselerasi tersebut umumnya berkaitan dengan tantangan sinkronisasi data

yang dinamis di tingkat desa/kalurahan, serta perlunya penajaman agar program pemberdayaan ekonomi dapat lebih adaptif dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Diperlukan intervensi yang lebih inklusif agar kebijakan tidak hanya bertumpu pada skema bantuan sosial yang bersifat konsumtif, melainkan berlanjut pada program kemandirian ekonomi keluarga.

Sebagai langkah pengendalian (*controlling*) pada Semester berikutnya, Pemerintah Kabupaten Bantul akan mengoptimalkan pendekatan berbasis data mikro guna memastikan efektivitas intervensi. Strategi kebijakan ke depan akan difokuskan pada langkah-langkah berikut:

- Transformasi Skema Perlindungan Sosial: Mengarahkan pola bantuan konsumtif menuju dukungan modal usaha yang produktif dan pelatihan vokasi (*link and match*) sesuai kebutuhan pasar kerja lokal.
- Penguatan Validasi Data Mikro: Memperkuat sinergi pemutakhiran data kesejahteraan sosial antar-instansi secara berkala untuk meminimalisir inclusion-exclusion error.
- Optimalisasi Ekonomi Kalurahan: Mendorong peran UMKM, koperasi, dan BUMDes sebagai penggerak utama ekosistem ekonomi di tingkat kalurahan guna memperluas penyerapan tenaga kerja lokal serta meningkatkan pendapatan penduduk secara berkelanjutan.

3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah menjadi tolok ukur ketahanan ekonomi Kabupaten Bantul dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompetitif dan berbasis digital. Dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang dikelola pada klaster ini, potret capaian awal tahun menunjukkan performa yang cukup solid, di mana 12 (dua belas) indikator tercatat berada pada posisi awal yang sangat progresif dan berhasil memenuhi target periodik dengan predikat Sangat Tinggi, sedangkan 8 (delapan) indikator lainnya memerlukan

optimalisasi strategi untuk mencapai target tahunan RKPD 2026 secara maksimal.

Posisi awal yang kuat pada 12 indikator utama mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun fondasi iklim investasi yang kondusif dan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Keberhasilan ini didorong oleh integrasi pelayanan perizinan yang lebih responsif serta promosi sektor pariwisata dan produk UMKM yang telah bertransformasi ke platform digital, sehingga meningkatkan jangkauan pasar secara signifikan di awal tahun anggaran. Di sisi lain, jarak (gap) terhadap target tahunan pada 8 indikator lainnya memberikan gambaran dini mengenai tantangan dalam aspek daya saing teknis, seperti kecepatan adaptasi teknologi pada unit usaha mikro, efektivitas realisasi investasi di sektor tertentu, serta penguatan sinergi rantai pasok lokal dengan kebutuhan pasar global.

Dinamika permulaan tahun pada 8 indikator yang memerlukan akselerasi tersebut secara umum dipengaruhi oleh tantangan keterbatasan kapasitas SDM dalam mengelola inovasi produk secara berkelanjutan, serta akses permodalan bagi pelaku usaha skala kecil. Selain itu, adanya penyesuaian kebijakan di tingkat pusat pada sektor penanaman modal menuntut fleksibilitas dan percepatan adaptasi regulasi di tingkat daerah.

Sebagai langkah pengendalian (controlling) pada Semester berikutnya guna memperkuat daya saing daerah secara kolektif hingga akhir tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten Bantul akan memprioritaskan langkah-langkah strategis berikut:

- Akselerasi Digitalisasi UMKM: Melakukan pendampingan intensif bagi pelaku usaha mikro agar lebih adaptif terhadap ekosistem e-commerce serta peningkatan standar kualitas produk menuju pasar ekspor.
- Debirokratisasi Perizinan: Melakukan evaluasi rutin terhadap prosedur dan sistem perizinan berusaha guna memastikan

iklim investasi Kabupaten Bantul tetap kompetitif di regional Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

- Ekspansi Pasar Produk Unggulan: Meningkatkan intensitas promosi produk unggulan lokal melalui fasilitasi pameran skala nasional maupun internasional untuk memperkuat posisi tawar pelaku ekonomi Bantul di pasar yang lebih luas.

4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum mencerminkan kualitas kehadiran pemerintah dalam memberikan layanan publik yang cepat, mudah, akuntabel, dan transparan. Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang dikelola pada klaster ini, potret capaian awal tahun menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, di mana 7 (tujuh) indikator tercatat berada pada posisi yang sangat progresif dan berhasil memenuhi target periodik dengan predikat Sangat Tinggi, dan hanya 1 (satu) indikator yang posisi awalnya masih berada di bawah target tahunan RKPD 2026.

Tingginya konsistensi pada 7 indikator utama tersebut menunjukkan bahwa transformasi tata kelola layanan publik di Kabupaten Bantul, terutama melalui digitalisasi dan penyederhanaan prosedur administratif, telah memberikan fondasi yang kokoh di awal tahun anggaran. Capaian ini menjadi benchmark penting bagi seluruh perangkat daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap performa birokrasi. Meskipun mayoritas indikator berada pada jalur yang tepat, adanya 1 (satu) indikator yang masih menyisakan jarak (gap) terhadap target tahunan menjadi pengingat bagi manajemen daerah. Hal ini mengindikasikan adanya aspek spesifik seperti kecepatan respons di tingkat unit layanan terkecil atau optimalisasi kanal aduan yang masih memerlukan atensi pembenahan teknis.

Dinamika awal tahun pada satu indikator yang memerlukan akselerasi tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh proses transisi integrasi sistem layanan digital yang belum sepenuhnya merata di seluruh unit kerja, atau adanya peningkatan ekspektasi

masyarakat yang bergerak lebih cepat melampaui standar pelayanan yang ditetapkan.

Sebagai langkah pengendalian (*controlling*) untuk mempertahankan dan mengoptimalkan performa pelayanan umum yang sudah berada pada kategori sangat tinggi ini sepanjang tahun berjalan, Pemerintah Kabupaten Bantul akan memfokuskan langkah strategis pada:

- Internalisasi Standardisasi Layanan: Melakukan audit internal secara berkala pada unit-unit layanan yang memiliki beban permohonan tinggi guna memastikan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Optimalisasi Kanal Pengaduan: Memperkuat sistem pengelolaan aduan masyarakat sebagai mekanisme *early warning* (peringatan dini) terhadap hambatan layanan, sehingga setiap kendala di lapangan dapat direspons secara cepat dan tuntas.
- Inklusivitas Pelayanan Publik: Terus mendorong inovasi pelayanan yang ramah bagi kelompok rentan, lansia, dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi digital.

2.3.3 Evaluasi Kinerja Kunci Tahun 2026 Semester I

Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tahapan paling krusial dalam dokumen laporan ini, karena IKK merepresentasikan tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah secara makro dan agregat. Analisis pada bagian ini bertujuan untuk memotret sejauh mana efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan, sekaligus menjadi instrumen kendali strategis pada tahun kedua implementasi RPJMD Kabupaten Bantul Periode 2025–2029.

Sebagai instrumen pengendali capaian makro, evaluasi pada pertengahan tahun anggaran 2026 ini tidak hanya berfokus pada angka capaian kuantitatif jangka pendek, melainkan diarahkan untuk melihat progresivitas serta konsistensi daerah dalam menjaga laju pertumbuhan

demikian mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan. Realisasi kumulatif hingga akhir Triwulan II (Semester I) ini menjadi acuan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melakukan pemetaan kekuatan sektor, melakukan intervensi kebijakan yang presisi, serta mengidentifikasi area strategis yang masih memerlukan akselerasi khusus guna memastikan target akhir tahun maupun target akhir periode perencanaan dapat tercapai tepat waktu.

Secara menyeluruh, potret kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul yang diukur melalui 271 Indikator Kinerja Kunci pada tahun berjalan, yang mencakup dimensi geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, hingga kualitas pelayanan umum, disajikan secara detail dalam tabel evaluasi berikut:

Tabel 2. 11 Evaluasi Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bantul Thn 2026 TW II

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
INDIKATOR KINERJA KUNCI											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
PENDIDIKAN											
	Literasi Membaca SD (%)	Persen	71.94	68.82	76.94	76.94	68.82	89.45	Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
	Literasi Membaca SMP (%)	Persen	86.15	86.87	88.35	88.35	86.87	98.32	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
	Numerasi SD (%)	Persen	60.16	56.24	65.96	65.96	56.24	85.26	Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
	Numerasi SMP (%)	Persen	72.82	74.84	75.82	75.82	74.84	98.71	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
	Indeks layanan pendidikan	Indeks	84.56	84.56	85.38	85.38	84.56	99.04	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	100.77	102.31	100	100	102.31	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	101.69	101.44	100	100	101.44	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100.07	100.37	100	100	100.37	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	99.91	16.35	100	100	16.35	16.35	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
KESEHATAN											
	Net Death Rate (NDR)	Per 1.000 Penduduk	18.1	18.02	17.9	17.9	20.91	85.60	Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase PHBS pada tatanan Rumah Tangga	Persen	n/a	55	19	19	55	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Per 1.000 Penduduk	1337	0.15	1367	1367	1,489	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	98.34	92.46	100	100	47.65	47.65	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	99.95	93.86	100	100	48.07	48.07	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	84.29	99.19	100	100	51.54	51.54	Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	94.03	93.66	100	100	93.66	93.66	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100.00	100	100	99.76	99.76	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	99.48	13.32	100	100	81.86	81.86	Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	97	100.00	100	100	58.8	58.80	Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	86.75	100.00	100	100	84.27	84.27	Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	99.12	100.00	100	100	91.65	91.65	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	123.49	100	100	66.94	66.94	Sedang	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	110.72	100	100	56.23	56.23	Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu	Persen	80	90.00	83	83	56.67	68.28	Sedang	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase Sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Persen	n/a	19.01	20	20	16.67	83.35	Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	Persen	n/a	1.08	5	5	5	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Persen	n/a	100.00	50	50	50	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Prevalensi depresi pada usia 15 tahun	Persen	n/a	11.00	1.4	1.4	1.5	93.33	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Persen	98.6	100.00	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Prevalensi obesitas > 18tahun	Persen	n/a	3.64	24.6	24.6	3.64	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	n/a	83.69	90.77	90.77	99.77	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Persen	87.43	n/a	88.05	88.05	n/a	n/a	n/a	n/a	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Persen	49.2	65.20	58	58	65.20	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Persen	38.63	71.88	63	63	69.34	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persen	34.42	78.01	37.99	37.99	78.01	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100.00	100	100	73.68	73.68	Sedang	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Persentase lanjut usia yang mandiri	Persen	94.5	98.59	94.9	94.9	98.59	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Persen	n/a	6.72	22.5	22.5	6.72	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Per 1.000 Penduduk	8.6	6.95	8.6	8.6	8.6	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar	Persen	15	50.53	30	30	30	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persen	100	100.00	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	Persen	14.34	n/a	14.4	14.4	n/a	n/a	n/a	n/a	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	100.00	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	Persen	100	100.00	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
	Persentase RS terakreditasi paripurna	Persen	93.75	93.75	93.75	93.75	68.75	73.33	Sedang	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	Indeks Pemerataan Infrastruktur	Indeks	0.8642	0.7862	0.8622	0.8622	0.7862	91.19	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
											pemerintahan bidang pekerjaan umum.
	Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah	Indeks	n/a	3.01	1.86	3.2	3.01	94.06	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
	Rasio kepatuhan PBG	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	64.98	65.87	66.38	66.38	65.87	99.23	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	60	39.59	64	64	39.59	61.86	Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	80.74	84.68	81.21	84.76	84.68	99.91	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	97	100	100	97	97.00	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75.62	75.57	75.85	75.85	75.57	99.63	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	Persen	56,04*	56.6	14.79	14.79	0.91	6.15	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	persen	0.73	0.61	0.59	0.59	0.61	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Persentase luasan kawasan kumuh sesuai SK yang ditangani	persen	46.25	56.22	17.35	17.35	56.22	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	9.16	12.98	16.79	16.79	12.98	77.31	Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUR SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	n/a	75.81	75	75	75.81	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	Indeks	n/a	70.12	75	75	70.12	93.49	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	Persen	64.02	100	72.31	72.31	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	Orang	1485	1485	1485	1485	1485	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.72	0.78	0.76	0.76	0.78	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks	75.78	90.67	80	80	90.67	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks	n/a	n/a	70	70		0.00	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	99.94	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	42.59	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
											bencana dan sub urusan kebakaran.
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	8.82	10.08	8.81	8.81	10.08	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
SOSIAL											
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57	66.94	57.9	57.9	66.94	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
	Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Angka	26	55.42	29	29	55.42	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
TENAGA KERJA											
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	74.87	74.84	74.95	74.95	74.84	99.85	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	39,213,934	40,672,785.25	39,913,934	39,913,934.00	40,672,785.25	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
	Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja	Persen	83.72	85.09	85.72	85.72	85.09	99.27	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Persen	90.06	90	91	91	90	98.90	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	3.54	3.39	3.59	3.59	3.39	94.43	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	43.64	30.4	44.64	44.64	30.5	68.32	Sedang	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96.05	96.43	96.19	96.19	96.43	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70,20*	79.9	70,35 - 71,50	70,35 - 71,50	79.9	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	31	33.21	26	26	33.21	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
	Rasio Kekerasan terhadap Anak per 10.000 Anak	Angka	4.19	4.21	3.93	3.93	4.21	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	80,06*	99.43	80.16	80.16	99.43	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	65,83*	78.07	66.43	66.43	28.17	42.41	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	17.35	28.17	18	18	28.17	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
PANGAN											
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	95.75	94.78	95.78	95.78	94.78	98.96	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
	Persentase cadangan pangan	Persen	43.16	48.62	54.08	54.08	48.62	89.90	Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
PERTANAHAN											
	Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	Indeks	n/a	79.36	80.8	80.8	15.04	18.61	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	Persen	n/a	81.25	84.1	84.1	25.07	29.81	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	89.41	89.41	90	90	89.41	99.34	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100	100	23.21	23.21	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	100	100	100	100	50	50.00	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
	Persentase Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Penanaman Modal	Persen	82.76	82.77	83.5	83.5	82.77	99.13	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Persentase penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
	Persentase Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
LINGKUNGAN HIDUP											
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	43.67	72.33	70.89	70.89	72.33	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88.02	81.46	70.81	70.81	81.46	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	43.83	49.59	49.51	49.51	49.59	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	43.2	42.03	40.25	40.25	42.03	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
	Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	Persen	25	19.04	27.08	27.08	19.04	70.31	Sedang	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	Persen	75	78.57	72.92	72.92	78.57	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
	Capaian Pengelolaan Sampah	Persen	31.45	36,59	44.15	44.15	36.59	82.88	Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
	Indeks Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	4.09	4.09	4.13	4.13	4.09	99.03	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
	Indeks Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	4.59	4.64	4.61	4.61	4.64	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	13.23	24.24	20.67	20.67	24.24	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
	Persentase Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	Persen	99.79	99.58	99.81	99.81	99.58	99.77	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	96.21	97.61	96.23	96.23	97.61	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
	Tingkat Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 tahun)	Persen	99.93	99.9	99.95	99.95	99.9	99.95	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
	Tingkat Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-4 tahun)	Persen	n/a	100	99.65	99.65	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
	Kepemilikan Akta Perkawinan	Persen	89.4	92.13	89.42	89.42	92.13	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Kepemilikan Akta Perceraian	Persen	92.02	85.68	92.04	92.04	85.68	93.09	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
	Kepemilikan Akta Kematian	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	44.44	66.67	48.89	48.89	66.67	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
	Indeks Desa	Nilai	0,896*)	88.9	88.58	88.58	88.9	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
	Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik	Persen	n/a	29.33	13.33	13.33	29.33	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
	Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik	Persen	6.67	21.33	20	20	21.33	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
	Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa	Persen	n/a	88.63	88.75	88.75	88.63	99.86	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific fertility rate/ASFR 15-19)	Angka	7.2	5.39	7.18	7.18	5.39	75.07	Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen	23.94	8.94	19.25	19.25	9.13	47.43	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	65.23	73.98	65.25	65.25	61.6	94.41	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persen	1.11	0.19	1.09	1.09	0.14	12.84	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	88.51	70.30	89.1	89.1	70.3	78.90	Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	66.67	73.30	73.7	73.7	90.7	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
	Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Persen	71.87	89.92	72.2	72.2	61.6	85.32	Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Kepadatan Penduduk	Orang per km ²	1,915	1,947	1,974	1,974	1947	98.63	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
PERHUBUNGAN											
	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen	2.28	6.05	15.53	15.53	6.33	40.76	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
	V/C RASIO di Jalan Kabupaten	Angka	0.39	0.36	0.37	0.37	0.36	97.30	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
	Rasio konektivitas kabupaten	Angka	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks	84.38	84.62	84.75	84.75	84.62	99.85	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	98.46	99.34	98.6	98.6	99.34	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
	Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Persen	95.27	n/a	97	97	n/a	n/a	n/a	n/a	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Persen	100	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH											
	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	70.44	70.73	70.75	70.75	70.73	99.97	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
	Cakupan koperasi modern	Persen	1.35	1.76	2.24	2.24	1.76	78.57	Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
	Nilai omset usaha mikro	Milyar rupiah	312.882	320.679	323.334	323.334	320.679	99.18	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	52.91	56.05	55.61	55.61	56.05	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	61.17	76.16	61.25	61.25	76.16	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
PENANAMAN MODAL											
	Pertumbuhan nilai investasi (persen)	Persen	25,24*)	20,92	11.79	11.79	20.92	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n	Milyar Rupiah	727,12*)	754.86	475.52	475.52	754.86	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDI KAT	STATUS KETERC APAIAN	
											pemerintahan bidang penanaman modal.
	Persentase peningkatan investasi	Persen	5.79	3.82	5.04	5.04	3.82	75.79	Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	n/a	71.25	67	67	71.25	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
	Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks	n/a	73	45	45	73	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	Persen	67.65	71.77	68.75	68.75	71.77	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	104	35	106	106	35	33.02	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	4.86	4.88	5.91	5.91	4.88	82.57	Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
STATISTIK											
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	3.01	3.01	3.05	3.05	3.01	98.69	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	3.25	3.25	3.27	3.27	3.25	99.39	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
PERSANDIAN											
	Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber	Indeks	n/a	n/a	1.6	1.6	n/a	n/a	n/a	n/a	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.
	Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital	Indeks	n/a	n/a	1.6	1.6	n/a	n/a	n/a	n/a	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	90.1	91.83	90.2	90.2	91.83	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.
KEBUDAYAAN											
	Cakupan pelestarian budaya daerah	Persen	83.47	87.88	87.88	87.88	87.88	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
	Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan	Persen	46.03	61.9	63.49	63.49	61.9	97.50	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
PERPUSTAKAAN											
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	82.6	8.41	82.8	82.8	8.41	10.16	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
											pemerintahan bidang perpustakaan.
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	80.89	55.93	81.39	81.39	55.93	68.72	Sedang	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
KEARSIPAN											
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	86.36	85.27	86.44	86.44	85.27	98.65	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
	Indeks Pengawasan Arsip Internal	Indeks	80.82	84.19	80.84	80.84	84.19	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Persen	82.31	79.16	82.33	82.33	63.2	76.76	Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	83.33	83.33	83.35	83.35	83.33	99.98	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
KELAUTAN DAN PERIKANAN											
	PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB	Rp Miliar	189.29	207,351.54	207.63	207.63	207,351.54	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	1.88	2.01	1.94	1.94	2.01	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Persen	104.35	106.45	100	100	106.45	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
PARIWISATA											
	Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	4.8	3.67	5.13	5.13	3.67	71.54	Sedang	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
	Peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	2.86	1,03	2.88	2.88	1.03	35.76	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
	Tingkat hunian akomodasi	Persen	47.61	51.61	47.77	47.77	51.61	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	24.19	5.77	24.39	24.39	5.77	23.66	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persen	2.833	1.030	2.835	2.835	1.03	36.33	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	12.75	13.32	12,83-13,19	12,83-13,19	13.32	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	7.42	3.67	7.62	7.62	3.67	48.16	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
PERTANIAN											
	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	Persen	0.39	0.14	0.6	0.6	0.14	23.33	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
											pemerintahan bidang pertanian.
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	-47.26	-47.35	-47.39	-47.39	-47.35	99.92	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	6.5	6.3	6.52	6.52	6.3	96.63	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
PERDAGANGAN											
	Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	Persen	7,29*	7.32	7.39	7.39	7.32	99.08	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
	Persentase capaian kinerja sektor perdagangan	Persen	82.9	117.87	86	86	117.87	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
	Persentase penggunaan produk dalam negeri	Persen	85.71	99.57	86	86	99.57	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	51.48	89.89	71	71	89.89	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
	Nilai belanja produk dalam negeri	Triliun Rupiah	1.79	1.79	1.8	1.8	1.79	99.44	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	65.51	65.91	66.82	66.82	65.91	98.64	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	59.79	67.79	50.87	50.87	67.79	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	56.86	-3.09	0.56	0.56	-3.09	-551.79	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
PERINDUSTRIAN											
	Pertumbuhan industri kecil menengah	Persen	2.12	2.25	2.31	2.31	2.25	97.40	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Indeks	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah	Persen	2.12	2.25	2.31	2.31	2.25	97.40	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	n/a	103.9	n/a	n/a	103.9	n/a	n/a	n/a	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
	Persentase izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Persen	55.55	45.45	55.55	55.55	45.45	81.82	Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
	Persentase Izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Indeks ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	Indeks	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
TRANSMIGRASI											
	Persentase Penempatan Transmigrasi	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
SEKRETARIAT DAERAH											
	Nilai EPPD	Angka	3.4254	3.3974	3.428	3.428	3.4254	99.92	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	SEKRETARIAT DAERAH
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	Angka	13.75	13.84	13.82	13.82	13.84	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	SEKRETARIAT DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90.14	91.26	91	91	91.26	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	SEKRETARIAT DAERAH
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	80.82	87.33	82	82	87.33	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	SEKRETARIAT DAERAH
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	85.99	87.26	86.2	86.2	87.26	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	82.83	83	83.2	83.2	83	99.76	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD											
	Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	Indeks	94.54	94.53	94.91	94.91	94.53	99.60	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN											
	Rata-rata nilai AKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	Nilai	25.25	25,81	25,70-25,95	25,70-25,95	25.81	99.46	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian.
	Capaian indikator tujuan dan sasaran Daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	Persen	n/a	100	77.42	77.42	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian.
KEUANGAN											
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1	Indeks	75.139	73.096	75.364	75.364	73.096	96.99	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
	Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	Persen	95.21	94,85*	95.32	95.32	94.85	99.51	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	24.47	30,49*	25.11	25.11	30.49	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	7.23	6.16	7	7	6.16	88.00	Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	10.75	0.49	10.79	10.79	0.49	4.54	Sangat Rendah	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	24.07	40.01	36.2	36.2	40.01	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Persen	71.3	74.26	70.08	70.08	74.26	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	0.21	6.39	0.113	0.113	6.39	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
	Manajemen Aset	Kategori	4	4	4	4	4	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
KEPEGAWAIAN											
	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	80.68	82.98	82	82	82.98	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
	Capaian Nilai Sistem Merit	Nilai	287,5 (Baik)	287.5	305 (Baik)	305	287.5	94.26	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	22.81	20.04	26.5	26.5	24.03	90.68	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	67.06	64.60	69.5	69.5	63.74	91.71	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	47.29	62.41	47.31	47.31	64.38	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
	Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan dalam pembangunan	Persen	70.74	72.23	72.01	72.01	100	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dna pengembangan.
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
INSPEKTORAT DAERAH											

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
	Nilai Capaian Area Penguatan APIP	Nilai	90.23	80.98	90.3	90.3	80.98	89.68	Tinggi	Tidak Tercapai	INSPEKTORAT DAERAH
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3.12	3.12	3.16	3.16	3.12	98.73	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	93.79	94.05	94.19	94.19	94.05	99.85	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	INSPEKTORAT DAERAH
KAPANEWON											
KAPANEWON DLINGO											
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	4.81	3.8	3.8	4.81	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON DLINGO
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	94.82	92.48	92.48	94.82	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON DLINGO
KAPANEWON PIYUNGAN											
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	4.66	3.8	3.8	4.66	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON PIYUNGAN
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	94.09	92.48	92.48	94.09	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON PIYUNGAN
KAPANEWON PLERET											
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3.9	3.8	3.8	3.9	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON PLERET
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92.26	92.48	92.48	92.26	99.76	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	KAPANEWON PLERET
KAPANEWON PBANGUNTAPAN											
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3.83	3.8	3.8	3.83	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	90.52	92.48	92.48	90.52	97.88	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	KAPANEWON BANGUNTAPAN
KAPANEWON IMOGIRI											
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3.9	3.8	3.8	3.9	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON IMOGIRI

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN	
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDI KAT	STATUS KETERCAPAIAN		
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	93.82	92.48	92.48	93.82	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON IMOGIRI	
KAPANEWON SEWON												
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	4.28	3.8	3.8	4.28	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON SEWON	
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	93.66	92.48	92.48	93.66	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON SEWON	
KAPANEWON JETIS												
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	4.64	3.8	3.8	4.64	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON JETIS	
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	94.67	92.48	92.48	94.67	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON JETIS	
4.28												
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	4.28	3.8	3.8	4.28	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON PUNDONG	
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	93.03	92.48	92.48	93.03	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON PUNDONG	
KAPANEWON KRETEK												
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3.76	3.8	3.8	3.76	98.95	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	KAPANEWON KRETEK	
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	91.3	92.48	92.48	91.3	98.72	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	KAPANEWON KRETEK	
KAPANEWON BAMBANGLIPURO												
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	4.5	3.8	3.8	4.5	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92.74	92.48	92.48	92.74	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
KAPANEWON BANTUL												
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3.9	3.8	3.8	3.9	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON BANTUL	
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92.31	92.48	92.48	92.31	99.82	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	KAPANEWON BANTUL	

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDIKAT	STATUS KETERCAPAIAN	
KAPANEWON KASIHAN											
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	4.8	3.8	3.8	4.8	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON KASIHAN
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92.17	92.48	92.48	92.17	99.66	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	KAPANEWON KASIHAN
KAPANEWON SEDAYU											
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	4.14	3.8	3.8	4.14	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON SEDAYU
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	93.2	92.48	92.48	93.2	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON SEDAYU
KAPANEWON PAJANGAN											
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	4.34	3.8	3.8	4.34	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON PAJANGAN
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	93.04	92.48	92.48	93.04	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON PAJANGAN
KAPANEWON PANDAK											
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	4.4	3.8	3.8	4.4	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON PANDAK
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	94.95	92.48	92.48	94.95	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON PANDAK
KAPANEWON SANDEN											
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3.87	3.8	3.8	3.87	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON SANDEN
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	91.93	92.48	92.48	91.93	99.41	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	KAPANEWON SANDEN
KAPANEWON SRANDAKAN											
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	4.44	3.8	3.8	4.44	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON SRANDAKAN
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	93.72	92.48	92.48	93.72	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai	KAPANEWON SRANDAKAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											

TUJUAN/SASARAN DAERAH	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026						KETERANGAN
				REALISASI	TARGET RPJMD	TARGET RKPD	REALISASI Semester I	CAPAIAN	PPREDI KAT	STATUS KETERC APAIAN	
	Capaian Aspek Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis	Angka	7.34	7.44	7.49	7.49	7.44	99.33	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
	Capaian Aspek Moderasi Beragama dan Toleransi antar umat beragama	Angka	7.39	7.49	7.54	7.54	7.49	99.34	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sumber: Data diolah, Bappeda Bantul, 2026.

Berdasarkan sajian data pada tabel di atas, dilakukan analisis mendalam terhadap masing-masing urusan pemerintahan untuk memetakan keberhasilan serta area yang masih memerlukan penguatan strategis sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Capaian indikator kinerja pada Urusan Pendidikan menunjukkan performa yang sangat kuat pada dimensi aksesibilitas dan pemerataan layanan. Hal ini tercermin dari Tingkat Partisipasi Warga Negara pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar (usia 7-12 tahun), hingga Pendidikan Menengah Pertama (usia 13-15 tahun) yang seluruhnya berhasil mencapai target kinerja secara penuh sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai. Keberhasilan ini menegaskan efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan formal serta memastikan seluruh populasi usia sekolah dapat terserap ke dalam sistem pendidikan daerah secara optimal.

Meskipun dimensi akses telah terpenuhi secara paripurna, tantangan strategis yang memerlukan penguatan secara berkelanjutan bergeser pada dimensi mutu hasil pembelajaran dan pemenuhan target secara mutlak. Pada indikator mutu, aspek literasi dan numerasi menunjukkan tren capaian yang bervariasi namun secara kalkulasi rasio kinerja akhir masih berstatus Tidak Tercapai.

Di tingkat Sekolah Dasar (SD), tingkat capaian kinerja untuk Literasi Membaca berada pada angka 89,45% dan Numerasi sebesar 85,26% (keduanya berpredikat Tinggi). Di sisi lain, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan performa yang lebih mendekati target dengan capaian Literasi Membaca sebesar 98,32% dan Numerasi sebesar 98,71% (keduanya berpredikat Sangat Tinggi). Kesenjangan capaian antara jenjang SD dan SMP ini mengindikasikan perlunya akselerasi pembenahan metode

pembelajaran sedari dini serta intervensi spesifik pada kompetensi dasar di tingkat sekolah dasar guna mengawal kesinambungan mutu output pendidikan.

Catatan evaluasi yang paling mendasar terdapat pada indikator tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah untuk berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Indikator ini mencatatkan deviasi realisasi yang sangat tajam dengan tingkat capaian kinerja hanya sebesar 16,35%, sehingga masuk ke dalam kategori predikat Sangat Rendah dan berstatus Tidak Tercapai. Rendahnya angka ini memberikan sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap validitas basis data makro warga belajar, peningkatan intensitas sosialisasi, serta optimalisasi peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di lapangan.

Secara akumulatif, potret Urusan Pendidikan ini memberikan rekomendasi strategis bagi arah kebijakan ke depan: mempertahankan performa akses layanan yang sudah melampaui standar minimal sembari secara agresif menggeser fokus intervensi program ke arah peningkatan mutu pembelajaran (quality-based intervention) dan penuntasan pendidikan kesetaraan non-formal demi mewujudkan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Bantul yang merata.

2) Kesehatan

Capaian indikator kinerja pada Urusan Kesehatan menunjukkan performa yang sangat progresif pada aspek tata kelola kelembagaan, regulasi perizinan, pemenuhan standar SDM, ketersediaan logistik medis, serta integrasi sistem digital, yang ditunjukkan oleh keberhasilan meraih predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai pada sejumlah indikator kunci, seperti Rasio Daya Tampung RS Rujukan 1.489 per 1.000 penduduk), Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Terakreditasi 100,00%), Persentase Puskesmas dengan SDMK Sesuai Standar 100,00%\$ Rasio Tenaga Kesehatan/Medis terhadap Populasi 100,00%, Persentase RS

Pemerintah dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar 100,00%, Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin IRL 100,00%, efektivitas regulasi dan perizinan (SPP-IRT, izin apotek/toko obat, serta tindak lanjut rekomendasi pengawasan sediaan farmasi/pangan sebesar 100,00%, aspek kesehatan lingkungan dan perilaku (Desa/Kelurahan STBM, PHBS Tatanan Rumah Tangga, Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat, serta Pengendalian Merokok Usia 10-21 Tahun sebesar 100,00%, hingga Persentase Fasyankes Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional 100,00% dan Persentase Fasyankes Terakreditasi Paripurna 100,00%.

Meskipun penguatan kelembagaan dan kapasitas sekunder berjalan lancar, tantangan besar yang bersifat mendesak justru terlihat pada dimensi pelayanan kesehatan dasar (SPM) untuk kelompok ibu dan bayi rentan yang seluruhnya masuk dalam status Tidak Tercapai karena belum memenuhi target proporsional pertengahan tahun. Indikator Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Pelayanan Persalinan mencatatkan realisasi rasio kinerja masing-masing sebesar 47,65% dan 48,07% dengan predikat Sangat Rendah. Kondisi ini diperberat oleh Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir yang baru menyentuh angka 51,54% dengan predikat Rendah. Keterlambatan capaian pada sektor hulu pelayanan maternal dan neonatal ini memerlukan perhatian khusus berupa intervensi lintas sektor yang lebih agresif guna meminimalkan risiko mortalitas ibu dan anak di daerah. Di sisi lain, potret layanan kesehatan dasar untuk kelompok rentan dan pelayanan penyakit menular maupun tidak menular secara umum berada pada level yang cukup stabil dengan predikat Tinggi hingga Sangat Tinggi, meskipun secara kalkulasi akhir belum memenuhi target mutlak 100% sehingga dikategorikan Tidak Tercapai. Hal ini ditunjukkan oleh capaian Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar sebesar 99,76%, Pelayanan ODGJ Berat sebesar 91,65%, Pelayanan Penderita Diabetes Melitus sebesar 84,27%, dan Skrining Kesehatan Usia 15–

59 Tahun sebesar 81,86%. Namun, akselerasi masih sangat dibutuhkan pada indikator Pelayanan Terduga TBC yang capaiannya tertahan di angka 66,94% (Sedang), Pelayanan Risiko HIV sebesar 56,23% (Rendah), Skrining Lansia Usia 60 Tahun sebesar 58,80% (Rendah), serta Persentase RS Terakreditasi Paripurna yang baru mencapai 73,33% (Sedang). Adapun untuk indikator Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan dan Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP), realisasi kinerjanya dicatat n/a dikarenakan instrumen pendataan dan penarikannya berbasis survei/pemantauan tahunan yang baru ditarik secara komprehensif pada Semester II.

3) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Capaian indikator kinerja pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemenuhan akses layanan dasar serta penegakan standar teknis bangunan. Keberhasilan strategis yang sangat optimal terlihat dari tercapainya target kinerja secara penuh sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai pada tiga indikator utama, yaitu Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM, Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, serta Rasio kepatuhan PBG. Keberhasilan ini merepresentasikan efektivitas Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjamin inklusivitas infrastruktur sanitasi dan air minum yang aman, sekaligus memastikan pertumbuhan fisik bangunan di daerah telah memenuhi aspek legalitas serta keamanan struktur sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Meskipun layanan dasar dan standardisasi bangunan telah terpenuhi secara paripurna, sebagian besar indikator makro kewilayahan, konektivitas, dan tata ruang berada pada level stabilitas kinerja yang sangat mendekati target dengan predikat Sangat Tinggi, namun secara kalkulasi rasio akhir masih dikategorikan berstatus Tidak Tercapai. Hal ini ditunjukkan oleh

capaian Indeks Pemerataan Infrastruktur sebesar 91,19% dan Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah sebesar 94,06%. Pada dimensi konektivitas dan irigasi, efektivitas program pemeliharaan juga menunjukkan angka yang sangat tinggi namun tertahan tipis di bawah target mutlak, di mana Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota mencatatkan rasio capaian 99,23%, Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 99,91%, serta Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang menyentuh angka 99,63%. Selain itu, pada aspek keselamatan kerja konstruksi, Rasio proyek yang menjadi kewenangannya tanpa kecelakaan kerja mencatatkan capaian kinerja sebesar 97,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tidak Tercapai.

Di sisi lain, catatan evaluasi yang memerlukan perhatian dan penguatan paling mendasar terdapat pada dimensi kapasitas sumber daya manusia teknis konstruksi. Indikator Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi mencatatkan deviasi realisasi yang cukup lebar dengan tingkat capaian kinerja hanya sebesar 61,86%, sehingga masuk ke dalam kategori predikat Rendah dan berstatus Tidak Tercapai. Rendahnya angka sertifikasi ini menjadi perhatian krusial mengingat kompetensi tenaga kerja konstruksi berbanding lurus dengan kualitas, keandalan, dan keamanan infrastruktur jangka panjang di lapangan.

Secara keseluruhan, potret Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan rekomendasi strategis agar arah kebijakan ke depan berfokus pada akselerasi program sertifikasi tenaga teknis serta penguatan pengawasan keselamatan konstruksi secara berkala, sembari terus menjaga momentum pemeliharaan jalan, jaringan irigasi, dan tata ruang yang performanya sudah sangat mendekati target optimal.

4) Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Capaian indikator kinerja pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan performa yang sangat progresif pada aspek penyediaan hunian layak bagi masyarakat rentan serta penanganan kawasan kumuh prioritas. Keberhasilan strategis ini ditunjukkan oleh sejumlah indikator utama yang berhasil menuntaskan target kinerja secara penuh sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai. Indikator-indikator tersebut meliputi Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah, Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), serta Persentase luasan kawasan kumuh sesuai SK yang ditangani. Capaian paripurna ini menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar papan yang layak, aman, dan sehat.

Meskipun intervensi pada sektor hunian fisik bagi kelompok sasaran spesifik berjalan optimal, tantangan strategis yang memerlukan penguatan lebih lanjut terlihat pada penyediaan fasilitas penunjang lingkungan permukiman yang belum memenuhi target secara mutlak. Hal ini tercermin pada indikator Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) yang mencatatkan rasio capaian kinerja sebesar 77,31% dengan predikat Tinggi, namun masih dalam status Tidak Tercapai. Keterlambatan ini mengindikasikan adanya kebutuhan akselerasi jangkauan pembangunan fasilitas kelayakan lingkungan seperti jalan lingkungan, drainase, dan penerangan jalan umum guna mengimbangi pertumbuhan kawasan perumahan yang masif di daerah.

Catatan evaluasi yang paling krusial dan memerlukan perhatian mendasar terdapat pada dimensi penanganan kawasan kumuh secara makro. Berbeda dengan capaian luasan kumuh berbasis SK

spesifik yang berhasil dituntaskan, indikator Persentase kawasan kumuh yang ditangani secara agregat mencatatkan deviasi realisasi yang sangat tajam dengan tingkat capaian kinerja hanya sebesar 6.15%, sehingga masuk dalam kategori predikat Sangat Rendah dan berstatus Tidak Tercapai. Angka ini memberikan sinyalemen kuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap hambatan eksekusi di lapangan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta perlunya restrukturisasi skema pembiayaan terpadu untuk mengoptimalkan pemugaran lingkungan permukiman kumuh secara lebih luas.

Secara keseluruhan, potret Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan rekomendasi strategis agar formulasi kebijakan ke depan mulai menggeser porsi intervensi pada perluasan cakupan penanganan kawasan kumuh makro dan percepatan pemenuhan PSU perumahan, sembari terus mempertahankan performa penuntasan RTLH dan penyediaan rumah layak huni yang sudah berjalan dengan sangat baik..

- 5) Ketenteraman Dan Ketertiban Umur Serta Perlindungan Masyarakat
Capaian indikator kinerja pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menunjukkan performa yang sangat kokoh, stabil, dan efektif dalam menjaga kondusivitas wilayah. Kebijakan penegakan regulasi dan pelayanan dasar sub urusan trantibum berjalan sangat optimal, di mana sebagian besar indikator strategis berhasil menuntaskan target kinerja secara penuh sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai. Keberhasilan paripurna ini tercatat pada indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum (IPKKU), Cakupan pengendalian ketertiban umum, Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, Persentase gangguan ketentrman masyarakat yang diselesaikan, hingga Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penegakan hukum. Selain itu, pada dimensi penanggulangan bencana, stabilitas wilayah didukung penuh oleh optimalnya pemenuhan indikator Indeks Ketahanan Daerah, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub

Urusan Bencana, serta seluruh cakupan layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan, hingga layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang seluruhnya menyentuh angka 100,00% dengan status Tercapai.

Pada sub urusan kebakaran, pelayanan teknis kedaruratan di lapangan juga menunjukkan hasil yang sangat akuntabel. Berbeda dengan draf evaluasi sebelumnya yang mencatat adanya perlambatan respon, data riil pada tabel terbaru menunjukkan bahwa Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran justru berhasil dipenuhi secara presisi dengan tingkat capaian kinerja tepat sebesar 100,00% (Sangat Tinggi - Tercapai). Capaian ini berjalan selaras dengan capaian indikator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang juga berhasil dituntaskan secara penuh sebesar 100,00%. Kombinasi performa ketepatan waktu respon dan penuntasan evakuasi ini membuktikan tingginya tingkat kesiapsiagaan operasional armada, efektivitas sebaran pos pemadam, serta keandalan petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Bantul dalam menangani situasi kedaruratan secara tanggap.

Meskipun sebagian besar indikator makro dan operasional mencatatkan hasil yang memuaskan, terdapat catatan evaluasi penting pada area yang masih memerlukan penguatan strategis berkelanjutan. Indikator Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas) mencatatkan rasio capaian kinerja sebesar 93,49% dengan predikat Sangat Tinggi, namun secara kalkulasi akhir dikategorikan berstatus Tidak Tercapai. Keterbatasan pemenuhan target ini mengindikasikan adanya ruang pembenahan dalam aspek tata kelola administrasi, pembinaan kapasitas, maupun pemenuhan sarana prasarana penunjang bagi anggota Satlinmas di tingkat lokal. Catatan kritis lainnya terdapat pada indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran yang mencatatkan angka 0,00% dengan predikat Sangat Rendah dan berstatus Tidak

Tercapai. Deviasi tajam ini memerlukan identifikasi mendalam, baik dari sisi formulasi instrumen penilaian, ketersediaan input regulasi, maupun hambatan pelaporan data kinerja sub urusan secara digital. Secara keseluruhan, potret Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat memberikan rekomendasi strategis bagi arah kebijakan ke depan untuk mempertahankan stabilitas *trantibum* dan mutu pelayanan kedaruratan bencana/kebakaran yang sudah berjalan paripurna, sembari memberikan fokus intervensi khusus pada penguatan manajemen kelembagaan Satlinmas serta akselerasi pemenuhan target indikator makro pada sub urusan kebakaran demi menjamin perlindungan warga yang menyeluruh di Kabupaten Bantul..

6) Sosial

Capaian indikator kinerja pada Urusan Sosial menunjukkan akuntabilitas dan performa yang sangat sempurna dengan keberhasilan memenuhi seluruh target yang telah ditetapkan secara penuh. Keberhasilan strategis yang merata ini tecermin dari seluruh indikator urusan yang berhasil mencatatkan rasio capaian kinerja tepat sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai. Kondisi positif tersebut ditunjukkan secara konsisten mulai dari indikator makro, yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial serta Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kinerja yang optimal ini memberikan indikasi kuat bahwa tata kelola program intervensi sosial yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul telah berjalan secara efektif dan responsif dalam menjaga kelayakan serta meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat rentan di daerah.

Selain pada indikator makro, aspek perlindungan sosial bagi masyarakat marginal dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial juga terealisasi secara paripurna. Hal ini dibuktikan dengan capaian target 100,00% pada indikator Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di luar panti. Selaras dengan performa jaminan sosial tersebut, penanganan kedaruratan melalui indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah juga berhasil dituntaskan secara penuh sebesar 100,00% dengan status Tercapai. Performa ini menegaskan kehadiran jaring pengaman sosial pemerintah daerah yang andal dan tanpa hambatan akses bagi para penerima manfaat, baik dalam situasi reguler maupun saat penanganan pascabencana.

Secara keseluruhan, potret kinerja Urusan Sosial memberikan gambaran tentang efektivitas skema pemberdayaan dan perlindungan yang inklusif serta tepat sasaran. Keberhasilan menuntaskan seluruh target kinerja hingga 100,00% memberikan rekomendasi strategis agar arah kebijakan ke depan berfokus pada pemeliharaan konsistensi mutu layanan, keberlanjutan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial secara berkala, serta penguatan kemandirian ekonomi penerima manfaat agar tren kinerja yang sangat baik ini dapat terus dipertahankan hingga akhir periode perencanaan.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Capaian indikator kinerja pada Urusan Tenaga Kerja menunjukkan performa yang cukup baik pada aspek produktivitas makro serta akuntabilitas tata kelola pelaksanaan program di daerah. Keberhasilan strategis ini ditunjukkan oleh dua indikator utama yang berhasil memenuhi target kinerja secara penuh sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai, yaitu Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja serta Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengawal perencanaan makro ketenagakerjaan yang akuntabel, sekaligus memberikan sinyal positif bahwa nilai tambah

ekonomi yang dihasilkan oleh tenaga kerja di daerah telah berjalan secara optimal sesuai dengan target yang diproyeksikan.

Meskipun indikator perencanaan dan produktivitas makro telah terpenuhi secara penuh, sebagian besar indikator pelayanan pasar kerja, penempatan, dan partisipasi berada pada tingkat stabilitas kinerja yang sangat tinggi mendekati target, namun secara kalkulasi rasio akhir masih dikategorikan berstatus Tidak Tercapai. Kondisi ini terlihat pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang mencatatkan rasio capaian sebesar 99,85%, serta Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja sebesar 99,27% (keduanya berpredikat Sangat Tinggi). Selaras dengan hal tersebut, pada dimensi perluasan serta penempatan tenaga kerja, indikator Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota juga menunjukkan performa yang stabil dengan rasio capaian kinerja menyentuh angka 98,90% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tidak Tercapai.

Di sisi lain, catatan evaluasi yang memerlukan penguatan strategis berkelanjutan terdapat pada aspek sertifikasi kompetensi dan perlindungan tata kelola kerja di lingkungan perusahaan. Indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi mencatatkan rasio capaian sebesar 94,43% dengan predikat Sangat Tinggi namun berstatus Tidak Tercapai. Sementara itu, tantangan yang paling mendasar terlihat pada indikator Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) yang mencatatkan tingkat capaian kinerja paling rendah, yaitu sebesar 68,32% dengan predikat Sedang dan berstatus Tidak Tercapai. Hambatan ini mengindikasikan perlunya optimalisasi fungsi pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, serta penguatan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pemenuhan hak-hak normatif pekerja.

Secara keseluruhan, potret Urusan Tenaga Kerja memberikan rekomendasi strategis agar formulasi kebijakan ke depan mulai memberikan fokus intervensi yang lebih tajam pada perluasan fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja serta peningkatan pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan jaminan sosial, sembari terus mempertahankan performa produktivitas dan konsistensi perencanaan program yang sudah berjalan dengan sangat baik.

2) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Capaian indikator kinerja pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan akuntabilitas dan performa yang sangat kuat di hampir seluruh lini program strategis daerah. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh mayoritas indikator urusan yang berhasil menuntaskan target kinerja secara penuh sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai. Kondisi positif ini tecermin pada indikator makro kesetaraan gender dan perlindungan anak, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Perlindungan Anak (IPA), serta Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Selain itu, komitmen tata kelola penganggaran yang inklusif juga berjalan optimal melalui indikator Persentase ARG pada belanja langsung APBD yang mencapai target 100,00%. Pada dimensi penanganan hukum dan sosial, sistem perlindungan daerah menunjukkan keandalan yang tinggi, di mana indikator penanganan terhadap Rasio kekerasan perempuan (termasuk TPPO), Rasio kekerasan terhadap anak, serta Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait seluruhnya berhasil dipenuhi secara paripurna sebesar 100,00% dengan status Tercapai. Performa ini mengindikasikan bahwa instrumen kebijakan responsif gender dan sistem penanganan kekerasan di Kabupaten Bantul telah terintegrasi dengan baik serta memiliki tingkat respons yang cepat terhadap aduan masyarakat.

Meskipun aspek perlindungan, penganggaran, dan penanganan korban kekerasan telah memenuhi target secara penuh, terdapat

satu catatan evaluasi kritis pada dimensi pemenuhan hak anak yang mencatatkan deviasi realisasi sangat tajam. Indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) mencatatkan rasio capaian kinerja yang masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar 42,41% sehingga masuk ke dalam kategori predikat Sangat Rendah dan berstatus Tidak Tercapai. Rendahnya capaian pada indikator makro ini memberikan sinyalemen kuat adanya hambatan dalam pemenuhan indikator-indikator turunan kabupaten layak anak, seperti ketersediaan fasilitas publik yang ramah anak, pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan, ataupun penguatan regulasi perlindungan anak di tingkat terbawah. Kesenjangan ini memerlukan perhatian khusus karena dimensi pemenuhan hak yang bersifat preventif-promotif harus berjalan selaras dengan dimensi perlindungan yang bersifat kuratif.

Secara keseluruhan, potret Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan rekomendasi strategis agar formulasi kebijakan ke depan mulai memberikan fokus intervensi dan perluasan program secara agresif pada penguatan instrumen Pemenuhan Hak Anak (IPHA) di tingkat tapak. Upaya ini penting dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah guna mendongkrak pemenuhan hak anak secara universal, sembari terus mempertahankan serta merawat performa tata kelola anggaran responsif gender, indeks kesetaraan, dan sistem penanganan korban kekerasan yang sudah berjalan dengan sangat baik.

3) Pangan

Capaian indikator kinerja pada Urusan Pangan menunjukkan kondisi ketahanan pangan daerah yang berada pada tingkat stabilitas tinggi, meskipun secara kalkulasi akhir seluruh indikator belum mampu memenuhi target mutlak sehingga dikategorikan berstatus Tidak Tercapai. Dari sisi kualitas konsumsi masyarakat, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencatatkan performa yang sangat impresif dengan rasio capaian kinerja mencapai 98,96% dengan predikat Sangat Tinggi. Angka yang sangat mendekati target

perencanaan ini mengindikasikan bahwa keragaman, keseimbangan gizi, dan mutu konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Bantul sudah berjalan dengan sangat baik. Tren positif ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan edukasi serta kampanye konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) yang dilakukan secara konsisten di tingkat wilayah.

Sementara itu, pada dimensi ketersediaan dan kedaulatan pangan, tata kelola logistik daerah juga menunjukkan kinerja yang cukup kuat namun masih menyisakan ruang penguatan. Indikator Persentase cadangan pangan mencatatkan rasio capaian kinerja sebesar 89,90% dengan predikat Tinggi dan berstatus Tidak Tercapai. Berbeda dengan draf awal yang berasumsi target terpenuhi penuh, realisasi riil ini memberikan catatan evaluasi mengenai pentingnya mengoptimalkan volume pengelolaan stok pangan pemerintah daerah. Penguatan cadangan pangan ini menjadi instrumen krusial sebagai penyangga (buffer stock) dalam melindungi masyarakat dari risiko kerawanan pangan akut, gejolak harga pasar, maupun pemenuhan kebutuhan logistik darurat.

Secara keseluruhan, potret Urusan Pangan memberikan rekomendasi strategis bagi formulasi kebijakan ke depan untuk memfokuskan intervensi pada penutupan celah deviasi target yang ada. Upaya ini perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas gudang cadangan pangan daerah dan penguatan kemitraan lumbung pangan masyarakat, sembari tetap menjaga nilai Skor PPH agar tetap tinggi. Ke depan, penguatan kolaborasi antara sektor pangan, pertanian, dan perdagangan harus diintensifkan guna membangun sistem pangan daerah yang lebih resilien dalam mengantisipasi tantangan perubahan iklim serta gangguan jalur distribusi di periode perencanaan berikutnya.

4) Pertanahan

Capaian indikator kinerja pada Urusan Pertanahan menunjukkan performa yang bervariasi. Keberhasilan mutlak berhasil dipertahankan pada aspek redistribusi lahan dan izin pemanfaatan

dasar, di mana dua indikator utama mencapai target penuh 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai, yaitu Persentase penerima tanah obyek landreform dengan luasan 0,5 ha serta Persentase luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah. Capaian ini mencerminkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengawal agenda reformasi agraria lokal dan kepastian hukum pemanfaatan tanah di tingkat tapak.

Sementara itu, pada indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, realisasi mencapai 75,57% dari target 75,85% (rasio kinerja 99,63% - Tinggi). Belum optimalnya capaian target ini dipengaruhi oleh faktor penghambat berupa tingginya dinamika alih fungsi lahan secara mandiri oleh masyarakat yang belum berkonsultasi/mengajukan KKPR terlebih dahulu, terbatasnya personil pengawasan tata ruang di lapangan, serta belum sepenuhnya terintegrasi peta Detail Tata Ruang (RDTR) digital secara real-time dengan sistem perizinan. Di sisi lain, mayoritas indikator makro, koordinasi kewilayahan, dan tata tertib pertanahan mencatatkan deviasi realisasi yang tajam sehingga masuk kategori Sangat Rendah dan Tidak Tercapai. Kondisi ini disebabkan oleh faktor-faktor penghambat teknis dan struktural sebagai berikut:

- Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pertanahan 18,61% dan Persentase Tertib Administrasi Pertanahan 29,81%, hal ini terkendala oleh lambatnya proses konsolidasi dan verifikasi warkah/dokumen historis pertanahan lintas sektor (termasuk tanah kas desa dan aset daerah) serta keterbatasan anggaran pemetaan kadastral secara menyeluruh.
- Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi 23,21% yang diakibatkan tingginya kompleksitas klaim keperdataan di tingkat tapak yang melibatkan banyak pihak serta minimnya kesepakatan antar-pihak yang bersengketa sehingga proses mediasi sering kali deadlock dan berlanjut ke jalur hukum.

- Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum 50,00% yang terhambat oleh rumitnya proses negosiasi appraisal harga tanah dan kelengkapan administrasi kepemilikan awal dari calon lokasi hibah/pengadaan lahan fasum.
- Persentase Pemanfaatan Tanah Sesuai Izin Lokasi 0,00% dan Sesuai KKPR Penanaman Modal 0,00% disebabkan oleh adanya jeda waktu (lagging period) antara penerbitan dokumen KKPR/Izin Lokasi di sistem OSS dengan dimulainya konstruksi fisik oleh investor di lapangan, sehingga pada saat monitoring semester I belum tercatat realisasi fisik pemanfaatan lahan.

Guna mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan capaian hingga akhir tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan langkah strategis percepatan sebagai berikut:

- Mengakselerasi integrasi Peta Pertanahan ke Geoportal/GIS Kabupaten Bantul serta mempercepat sertifikasi aset Pemda bekerja sama dengan Kantah/BPN melalui program PTSL.
- Mengoptimalkan peran Desk Pertanahan Kapanewon/Kabupaten bersama unsur Forkopimda untuk penyelesaian sengketa tanah garapan secara intensif sebelum masuk ranah litigasi.
- Mempercepat penetapan penilai independen (appraisal) dan penyederhanaan verifikasi administrasi pengadaan lahan publik.
- Melakukan pengawasan lapangan bersama (Dispertaru, DPMPT, dan Bappeda) untuk memverifikasi realisasi pemanfaatan ruang atas KKPR/Izin Lokasi penanaman modal yang telah terbit.

5) Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja pada Urusan Lingkungan Hidup menunjukkan komitmen yang sangat kuat dan kinerja yang optimal dalam menjaga kelestarian ekosistem makro daerah serta penegakan aturan kuratif. Keberhasilan strategis ini dibuktikan oleh mayoritas indikator utama yang berhasil mencapai target secara penuh sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai. Pada dimensi kelestarian lingkungan makro,

performa yang stabil berhasil dipertahankan secara merata pada Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Selaras dengan kualitas rona lingkungan tersebut, sistem manajemen kebersihan daerah juga mencatatkan kinerja paripurna melalui indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah yang menyentuh angka 100,00% dengan status Tercapai. Ditinjau dari penegakan hukum bagi pelanggar lingkungan, indikator Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten juga berhasil dituntaskan seluruhnya sebesar 100,00% (Sangat Tinggi - Tercapai). Kondisi ini mengisyaratkan bahwa regulasi pasca-pelanggaran telah ditegakkan dengan sangat tegas dan responsif di Kabupaten Bantul.

Meskipun indikator kelestarian makro dan penegakan sanksi berjalan optimal, tantangan strategis justru terlihat pada dimensi operasional pengelolaan persampahan harian dan pengawasan preventif terhadap pelaku usaha. Pada dimensi pengelolaan kebersihan, indikator Capaian Pengelolaan Sampah secara persentase mencatatkan rasio capaian kinerja sebesar 82,88% dengan predikat Tinggi, namun dikategorikan dalam status Tidak Tercapai. Celah ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk memperluas jangkauan layanan penanganan sampah di tingkat rumah tangga, meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di tingkat kawasan, serta memperkuat pemenuhan sarana prasarana pendukung operasional lapangan.

Catatan evaluasi yang memerlukan perhatian paling mendasar terdapat pada aspek pengawasan kepatuhan dini pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan. Indikator Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan mencatatkan tingkat capaian kinerja yang paling rendah, yaitu sebesar 70,31% dengan predikat Sedang dan berstatus Tidak

Tercapai. Keterbatasan capaian ini memberikan rekomendasi penting bagi perangkat daerah terkait untuk mengalihkan strategi dari yang semula berfokus pada penanganan responsif terhadap pelanggaran (kuratif), bergeser ke arah penguatan pengawasan berkala dan pembinaan teknis secara preventif di hulu usaha guna mendongkrak kepatuhan sukarela para pelaku usaha.

Secara keseluruhan, potret Urusan Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi strategis bagi arah kebijakan ke depan agar mempertahankan capaian indeks kualitas lingkungan dan pengelolaan sanksi yang sudah berjalan paripurna, sembari mengintensifkan program reduksi sampah harian serta memperketat pembinaan dokumen lingkungan bagi dunia usaha demi menjaga daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bantul secara berkelanjutan.

6) Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Capaian indikator kinerja pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan performa makro yang sangat luar biasa dan akuntabel, di mana hampir seluruh instrumen layanan sipil dan integrasi data berhasil menuntaskan targetnya secara penuh. Keberhasilan strategis dengan rasio capaian kinerja sebesar 100,00% berpredikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai diraih oleh mayoritas indikator urusan, mulai dari Indeks Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai representasi keberhasilan transformasi digital di daerah. Selaras dengan itu, pemenuhan hak sipil anak juga terealisasi secara paripurna yang ditunjukkan oleh capaian 100,00% pada Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA serta Tingkat kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun, yang diperkuat oleh capaian Tingkat kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun sebesar 99,95% dengan status Tercapai. Pada dimensi pencatatan status hukum dewasa dan pemanfaatan data lintas sektor, indikator Kepemilikan

Akta Perkawinan, Kepemilikan Akta Kematian, serta Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama juga berhasil dituntaskan secara mutlak sebesar 100,00% (Sangat Tinggi - Tercapai). Performa ini menegaskan komitmen tinggi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam membangun basis data kependudukan yang valid sekaligus menghadirkan ekosistem pelayanan publik lintas instansi yang berbasis data terintegrasi (data-driven governance).

Di sisi lain, meskipun seluruh indikator dalam urusan ini mengantongi predikat kualitas kinerja yang Sangat Tinggi, terdapat tiga indikator yang secara matematis belum memenuhi target mutlak pembobotan sehingga dikategorikan berstatus Tidak Tercapai. Pada dimensi makro pelayanan, Indeks Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan rasio capaian sebesar 99,03%, sementara pada cakupan identitas wajib, Persentase Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP mencatatkan rasio capaian sebesar 99,77%. Celah deviasi yang sangat tipis di bawah satu persen ini mengindikasikan perlunya intensifikasi layanan jemput bola secara berkala bagi penduduk wajib KTP pemula serta optimalisasi waktu respons pelayanan guna menyempurnakan persepsi publik. Sementara itu, catatan evaluasi administratif yang memerlukan perhatian lebih dinamis terlihat pada indikator Kepemilikan Akta Perceraian yang mencatatkan rasio capaian paling rendah di urusan ini, yaitu sebesar 93,09% dengan status Tidak Tercapai, yang menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi kesadaran hukum masyarakat pasca-putusan hukum perdata.

Secara keseluruhan, potret Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan rekomendasi strategis agar formulasi kebijakan ke depan mempertahankan konsistensi integrasi data serta pemenuhan dokumen sipil anak yang sudah berjalan paripurna. Upaya tersebut perlu diiringi dengan akselerasi perekaman KTP-el bagi kelompok rentan dan pemula, serta

perluasan inovasi digitalisasi layanan demi menutup celah sisa target sehingga kualitas pelayanan publik kependudukan di Kabupaten Bantul dapat terwujud secara modern dan inklusif..

7) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Capaian indikator kinerja pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan performa yang sangat luar biasa dan akuntabel, khususnya dalam mengakselerasi tata kelola pemerintahan serta kemandirian institusional di tingkat kalurahan. Keberhasilan strategis ini ditunjukkan oleh mayoritas indikator urusan yang berhasil memenuhi target kinerja secara penuh sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai. Pada dimensi tata kelola internal pemerintahan desa, efektivitas pembinaan wilayah tecermin dari tercapainya target 100,00% pada indikator Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik serta Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik. Realisasi ini mengindikasikan adanya komitmen kuat dari perangkat kalurahan di Kabupaten Bantul dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pengadaan barang/jasa publik. Berbeda dengan draf awal yang mencantumkan lonjakan persentase yang tidak proporsional, data riil ini menegaskan stabilitas ketercapaian yang presisi sesuai koridor perencanaan.

Selaras dengan penguatan administratif di tingkat hulu, dimensi pembangunan kewilayahan juga mencatatkan hasil yang sangat paripurna. Hal ini dibuktikan dengan capaian target 100,00% (Sangat Tinggi - Tercapai) pada Indeks Desa, yang diperkuat oleh keberhasilan mutlak pada indikator kewilayahan substantif, yaitu Persentase pengentasan desa tertinggal serta Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri yang seluruhnya tuntas mencapai 100,00%. Keberhasilan menuntaskan indikator-indikator tersebut menegaskan bahwa intervensi kebijakan pemberdayaan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul telah berhasil memperkuat struktur kemandirian lokal, mengeliminasi kantong

wilayah tertinggal, serta mendorong transformasi kalurahan menuju status mandiri secara merata dan inklusif.

Meskipun aspek akuntabilitas, pengadaan, dan indeks kemandirian desa makro telah terpenuhi secara sempurna, terdapat satu catatan evaluasi kecil pada dimensi operasional penunjang yang belum memenuhi target mutlak pembobotan. Indikator Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa mencatatkan rasio capaian kinerja sebesar 99,86%. Walaupun tetap mengantongi predikat kualitas kinerja yang Sangat Tinggi, deviasi sangat tipis di bawah satu persen ini menempatkan indikator tersebut dalam status Tidak Tercapai. Celah kecil ini mengisyaratkan perlunya penguatan minor yang lebih spesifik pada pemenuhan fasilitas pelayanan publik, penguatan jaring sosial tapak, ataupun stimulus bagi sektor ekonomi mikro di tingkat kalurahan guna menyempurnakan totalitas dimensi indeks di masa mendatang.

Secara keseluruhan, potret Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan rekomendasi strategis agar formulasi kebijakan ke depan mempertahankan konsistensi tata kelola AKIP dan kelembagaan PBJ kalurahan yang sudah berjalan dengan sangat baik. Upaya tersebut perlu diiringi dengan sinergi lintas sektor untuk melakukan intervensi spesifik pada pemenuhan aspek layanan dasar, sosial, dan ekonomi di tingkat tapak demi menutup celah sisa target, sehingga keberlanjutan status desa mandiri dan kesejahteraan masyarakat kalurahan di Kabupaten Bantul dapat terjaga secara kokoh hingga akhir periode perencanaan.

8) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Capaian indikator kinerja pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan performa yang cukup stabil pada aspek pengembangan institusi mikro kependudukan, meskipun secara kalkulasi akhir sebagian besar indikator pelayanan belum mampu memenuhi target mutlak pembobotan. Keberhasilan strategis yang berhasil dituntaskan secara penuh

sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai diraih oleh indikator Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas Pemerintah Kabupaten Bantul dalam membangun wadah integrasi program kependudukan di tingkat mikro, yang sekaligus menjadi pilar utama dalam melakukan pembinaan ketahanan keluarga serta sinkronisasi program pembangunan sektoral di tingkat tapak. Di sisi lain, bertolak belakang dengan draf evaluasi awal yang berasumsi melampaui target, mayoritas indikator pelayanan keluarga berencana dan stabilitas demografi makro secara riil berada pada status Tidak Tercapai walaupun sebagian besar mengantongi kualitas predikat yang tinggi. Pada dimensi kuantitas dan kepadatan wilayah, indikator Kepadatan Penduduk mencatatkan rasio capaian kinerja sebesar 98,63% dengan predikat Sangat Tinggi. Sementara itu, pada cakupan pemakaian kontrasepsi dan pemenuhan layanan KB, indikator Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (mCPR) meraih rasio capaian sebesar 94,41% (Sangat Tinggi), yang berjalan beriringan dengan indikator Kebutuhan KB yang Terpenuhi dengan rasio capaian sebesar 85,32% dengan predikat Tinggi. Deviasi pada indikator-indikator pelayanan kontrasepsi ini memberikan catatan evaluasi penting mengenai perlunya optimalisasi perluasan akses, jaminan ketersediaan alat obat kontrasepsi (alokon) yang berkesinambungan, serta peningkatan intensitas KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada pasangan usia subur di daerah. Catatan evaluasi yang memerlukan perhatian lebih dinamis dan intervensi yang lebih tajam juga ditemukan pada aspek kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pola pengasuhan keluarga. Indikator Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19) tercatat menorehkan rasio capaian sebesar 75,07% dengan predikat Tinggi, yang selaras dengan Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja dengan rasio capaian sebesar 78,90% dengan predikat Tinggi dan berstatus Tidak Tercapai. Sementara

itu, deviasi realisasi yang paling tajam terlihat pada indikator dampak, yaitu Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 47,43%, serta Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) yang tertahan pada rasio capaian terkecil di urusan ini, yaitu hanya sebesar 12,84% sehingga keduanya masuk ke dalam kategori predikat Sangat Rendah dan berstatus Tidak Tercapai. Keterbatasan capaian kuratif ini menuntut penguatan program Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) demi mereduksi kerentanan sosial-reproduksi di masa mendatang. Secara keseluruhan, potret Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberikan rekomendasi strategis bagi formulasi kebijakan ke depan agar memfokuskan intervensi pada penurunan angka unmet need dan pencegahan kehamilan tidak direncanakan secara agresif. Upaya ini harus diimbangi dengan penguatan fungsi edukasi pengasuhan remaja di tingkat keluarga serta pemeliharaan jaringan Kampung KB Mandiri yang sudah berjalan paripurna, guna mewujudkan keseimbangan pertumbuhan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan di Kabupaten Bantul.

9) Perhubungan

Capaian indikator kinerja pada Urusan Perhubungan menunjukkan performa yang cukup stabil dalam mempertahankan keandalan jaringan transportasi makro, didukung oleh interkoneksi kewilayahan yang berjalan optimal. Keberhasilan strategis utama ditunjukkan oleh indikator Rasio konektivitas kabupaten yang berhasil memenuhi target secara paripurna dengan rasio capaian kinerja sebesar 100,00% berpredikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai. Terpenuhinya target konektivitas ini menegaskan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjaga integrasi antarwilayah melalui jaringan jalan yang memadai, sehingga mampu mendukung kelancaran distribusi logistik, mempermudah aksesibilitas sektor pariwisata, serta

menjamin mobilitas harian penduduk guna menggerakkan roda perekonomian lokal secara inklusif.

Meskipun aspek interkoneksi wilayah telah tercapai secara penuh, dimensi kelancaran lalu lintas harian menunjukkan tingkat stabilitas yang sangat tinggi namun menyisakan deviasi kalkulasi yang sangat tipis di bawah target pembobotan mutlak. Indikator V/C RASIO di Jalan Kabupaten mencatatkan nilai riil sebesar 0,36 dengan rasio capaian kinerja menyentuh angka 97,30%, mengantongi predikat Sangat Tinggi dengan status Tidak Tercapai. Berbeda dengan narasi awal yang berasumsi persentase capaian lebih rendah, data terbaru ini membuktikan bahwa kapasitas tampung jalan kabupaten di Kabupaten Bantul sebenarnya masih berada pada level yang sangat ideal dalam mereduksi potensi titik kemacetan makro. Kendati demikian, sisa celah target yang belum tertutup menuntut penguatan manajemen rekayasa lalu lintas yang lebih dinamis pada jam-jam sibuk serta optimalisasi kapasitas simpang di ruas-ruas jalan strategis.

Catatan evaluasi yang paling krusial dan memerlukan perhatian mendasar terdapat pada aspek keselamatan transportasi publik. Indikator Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas mencatatkan tingkat capaian kinerja yang paling rendah di urusan ini, yaitu hanya sebesar 40,76% sehingga masuk ke dalam kategori predikat Sangat Rendah dan berstatus Tidak Tercapai. Keterbatasan capaian kuratif ini mengisyaratkan bahwa upaya menekan angka fatalitas serta frekuensi insiden di jalan raya masih menghadapi tantangan operasional yang besar di lapangan. Kondisi tersebut memberikan rekomendasi strategis bagi formulasi kebijakan ke depan untuk mengintensifkan penyediaan perlengkapan jalan yang memadai seperti APILL, rambu penunjuk, cermin tikungan, dan marka, melaksanakan audit keselamatan berkala pada titik rawan kecelakaan (black spot), serta memperluas edukasi tertib berlalu lintas demi menurunkan angka kecelakaan secara riil di periode perencanaan berikutnya.

10) Komunikasi dan Informatika

Capaian indikator kinerja pada Urusan Komunikasi dan Informatika menunjukkan performa yang sangat solid dan akuntabel, khususnya dalam memperkuat konektivitas birokrasi dan diseminasi program pembangunan daerah. Keberhasilan strategis ini ditunjukkan oleh mayoritas indikator yang berhasil menuntaskan target kinerjanya secara penuh sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai. Pada dimensi penguatan infrastruktur digital makro, indikator Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo serta Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi seluruhnya berhasil terealisasi mutlak 100,00%. Ketercapaian ini berjalan selaras dengan indikator cakupan informasi publik, di mana Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota juga tuntas mencapai target 100,00% dengan status Tercapai. Performa positif tersebut menegaskan bahwa fondasi infrastruktur digital dan kanal komunikasi publik di Kabupaten Bantul telah tergelar secara andal guna mendukung keterbukaan informasi.

Meskipun sebagian besar indikator pelayanan dan penyebaran informasi berhasil dipenuhi secara paripurna, dimensi penguatan mutu layanan informasi publik mencatatkan tingkat capaian yang sangat tinggi namun menyisakan deviasi kalkulasi yang sangat tipis di bawah target perencanaan. Indikator Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik mencatatkan nilai riil sebesar 84,62 dengan rasio capaian kinerja menyentuh angka 99,85%. Walaupun tetap mengantongi kualitas predikat yang Sangat Tinggi, sisa celah yang belum genap seratus persen ini secara administratif menempatkan indikator tersebut dalam status Tidak Tercapai. Celah minor ini mengindikasikan perlunya optimalisasi berkala pada kecepatan respons pengelolaan permohonan informasi publik serta

peningkatan kapasitas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap instansi guna menyempurnakan totalitas indeks layanan.

Catatan evaluasi yang memerlukan perhatian paling mendasar pada urusan ini terletak pada aspek akuntabilitas pelaporan dan integrasi data administratif hulu. Terdapat hambatan teknis yang cukup krusial pada indikator Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) serta Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information), di mana realisasi akhir keduanya tercatat n/a sehingga menghasilkan nilai rasio, predikat, dan status capaian berupa galat (#VALUE!). Kondisi ini memberikan sinyal kuat perlunya pembenahan sistemik dalam mekanisme sinkronisasi pelaporan lintas instansi serta pengetatan penginputan data penunjang secara tepat waktu. Secara keseluruhan, potret Urusan Komunikasi dan Informatika memberikan rekomendasi strategis bagi formulasi kebijakan ke depan untuk melakukan akselerasi perbaikan tata kelola data hulu dan mempertahankan stabilitas layanan internet dan keterbukaan informasi yang sudah berjalan sangat baik demi mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi secara paripurna.

11) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Capaian indikator kinerja pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan performa yang sangat kuat pada pilar kelembagaan serta penciptaan wirausaha baru sebagai penggerak ekonomi kerakyatan daerah. Keberhasilan strategis dengan rasio capaian kinerja sempurna sebesar 100,00% berpredikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai berhasil diraih oleh dua indikator utama, yaitu Persentase Koperasi yang berkualitas dengan realisasi angka mutlak 56,05% serta Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha dengan realisasi sebesar 76,16%. Keberhasilan menuntaskan target ini mencerminkan efektivitas Pemerintah

Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan, pembinaan tata kelola kelembagaan koperasi, serta penyediaan ekosistem pendukung yang kondusif bagi transformasi pelaku usaha informal menjadi wirausaha mandiri yang lebih berdaya saing.

Meskipun fondasi kelembagaan dan penciptaan wirausaha berjalan optimal, dimensi penguatan skala usaha mikro mencatatkan capaian yang sangat tinggi namun secara administratif dikategorikan berstatus Tidak Tercapai karena adanya deviasi tipis di bawah target pembobotan mutlak. Celah penyerapan pasar terlihat pada indikator Nilai omset usaha mikro yang mencatatkan realisasi sebesar Rp320,679 miliar dengan rasio capaian kinerja sebesar 99,18% (Sangat Tinggi). Kondisi ini berjalan beriringan dengan indikator Persentase usaha mikro yang naik kelas yang menunjukkan performa sangat mepet di angka 99,97% dengan realisasi riil 70,73% (Sangat Tinggi - Tidak Tercapai). Margin deviasi yang sangat tipis ini mengindikasikan bahwa produktivitas dan volume perdagangan usaha mikro di Kabupaten Bantul sebenarnya berjalan sangat dinamis, namun memerlukan dorongan intensifikasi sedikit lagi pada aspek standardisasi produk, akses pembiayaan formal, serta perluasan kemitraan rantai pasok agar mampu menembus target kelas usaha yang lebih tinggi.

Catatan evaluasi yang memerlukan perhatian paling mendasar dan akselerasi program terdapat pada dimensi modernisasi kelembagaan ekonomi. Indikator Cakupan koperasi modern mencatatkan rasio capaian kinerja paling rendah di urusan ini, yaitu sebesar 78,57% dengan realisasi sebesar 1,76% sehingga masuk dalam kategori predikat Tinggi dengan status Tidak Tercapai. Keterbatasan capaian ini memberikan rekomendasi strategis bagi formulasi kebijakan ke depan agar menitikberatkan intervensi pada program reformasi digitalisasi koperasi, penerapan sistem manajemen berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas pengurus dalam diversifikasi usaha. Upaya tersebut harus disinergikan dengan pemeliharaan mutu koperasi eksisting

dan pendampingan naik kelas usaha mikro yang sudah berjalan optimal demi mewujudkan struktur ekonomi daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

12) Penanaman Modal

Capaian indikator kinerja pada Urusan Penanaman Modal menunjukkan performa yang sangat ekspansif dan akuntabel dalam memacu pertumbuhan serta daya tarik investasi di daerah. Keberhasilan strategis dengan rasio capaian kinerja sempurna sebesar 100,00% berpredikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai berhasil diraih oleh dua indikator utama urusan. Indikator Pertumbuhan nilai investasi (persen) mencatatkan realisasi riil sebesar 20,92% dari target yang ditetapkan yaitu 11,79%. Keberhasilan ini berjalan selaras dengan indikator makro Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n yang mencatatkan performa impresif sebesar Rp754,86 Milyar, melampaui target perencanaan awal sebesar Rp475,52 Milyar. Lonjakan nominal yang signifikan ini membuktikan bahwa Kabupaten Bantul memiliki daya saing kewilayahan yang tinggi serta mampu menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi para investor domestik maupun asing.

Meskipun volume kumulatif investasi yang masuk bertumbuh sangat pesat melampaui ekspektasi target nominalnya, dimensi akselerasi laju pertumbuhan tahunan mencatatkan evaluasi yang belum memenuhi target pembobotan perencanaan secara mutlak. Indikator Persentase peningkatan investasi mencatatkan realisasi sebesar 3,82% dari target sebesar 5,04%, sehingga menghasilkan rasio capaian kinerja sebesar 75,79% dengan predikat Tinggi dan berstatus Tidak Tercapai. Berbeda dengan draf narasi awal yang menggunakan asumsi angka kalkulasi pradata, data riil ini mengindikasikan bahwa walaupun secara kuantitas kapital harian yang masuk ke daerah tergolong masif, fluktuasi kecepatan peningkatan antar-waktu masih memerlukan strategi intervensi

yang lebih fokus, terutama dalam menjaga kontinuitas ekspansi usaha eksisting serta menarik minat pemodal baru secara reguler. Secara keseluruhan, potret Urusan Penanaman Modal memberikan rekomendasi strategis bagi arah kebijakan ke depan agar memfokuskan program kerja pada penyederhanaan layanan perizinan terintegrasi (digitalisasi perizinan hulu ke hilir) serta promosi potensi investasi daerah yang berbasis zonasi wilayah secara lebih agresif. Langkah intervensi ini diperlukan demi mengeskalasi laju persentase peningkatan tahunan yang sempat tertahan sekaligus mempertahankan stabilitas nilai realisasi investasi makro yang sudah berjalan sangat paripurna, sehingga mampu memberikan dampak multiplikasi yang luas bagi perluasan lapangan kerja baru dan penguatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bantul..

13) Kepemudaan dan Olahraga

Capaian indikator kinerja pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga menunjukkan performa yang sangat progresif dan akuntabel, terutama dalam penguatan kapasitas makro kepemudaan serta penumbuhan budaya olahraga di tengah masyarakat. Keberhasilan strategis dengan rasio capaian kinerja sempurna sebesar 100,00% berpredikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai berhasil diraih secara kolektif oleh tiga indikator utama urusan. Instrumen pembangunan kepemudaan tecermin dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang berhasil direalisasikan sebesar 71,25 (dari target 67) serta Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) yang tuntas mencapai realisasi 71,77% (dari target 68,75%). Keberhasilan ini berjalan selaras dengan capaian bidang keolahragaan, di mana Indeks Partisipasi Olahraga mencatatkan performa memuaskan dengan nilai riil sebesar 73 dari target perencanaan sebesar 45. Kombinasi capaian ini membuktikan efektivitas program Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menciptakan ekosistem kepemudaan yang produktif sekaligus

menstimulasi kesadaran hidup sehat masyarakat melalui aktivitas fisik yang masif.

Meskipun fondasi partisipasi olahraga dan kemandirian ekonomi pemuda telah terpenuhi secara paripurna, dimensi penguatan institusi dan keterlibatan sosial kepemudaan di tingkat tapak masih mencatatkan deviasi yang belum memenuhi target pembobotan perencanaan secara mutlak. Indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan mencatatkan realisasi riil sebesar 4,88% dari target yang ditetapkan sebesar 5,91%. Hal tersebut menghasilkan rasio capaian kinerja sebesar 82,57% sehingga menempatkan indikator ini ke dalam kategori predikat Tinggi dengan status Tidak Tercapai. Celah kecil ini mengindikasikan bahwa ruang-ruang organisasi kepemudaan lokal—seperti Karang Taruna atau komunitas sosial—masih memerlukan stimulasi pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tren pemuda saat ini agar ketertarikan mereka dalam berorganisasi dapat terdongkrak secara berkala.

Catatan evaluasi yang paling krusial dan membutuhkan perhatian khusus serta perbaikan program yang radikal terletak pada dimensi pencapaian prestasi olahraga kompetitif. Indikator Peningkatan Prestasi Olahraga mencatatkan tingkat capaian kinerja terendah di urusan ini, yaitu hanya sebesar 33,02% dengan jumlah raihan riil sebanyak 35 medali dari target perencanaan awal yang dipatok sebesar 106 medali, sehingga masuk ke dalam kategori predikat Sangat Rendah dengan status Tidak Tercapai. Keterbatasan capaian kuratif ini memberikan rekomendasi strategis bagi formulasi kebijakan ke depan untuk melakukan reformasi pada pola pembinaan atlet sejak usia dini, pemenuhan sarana prasarana latihan yang berstandar sport science, peningkatan frekuensi kompetisi lokal secara berjenjang, serta jaminan kesejahteraan bagi atlet berprestasi. Upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan pemeliharaan tren positif IPP dan indeks olahraga yang sudah

berjalan sangat baik demi mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bantul yang sehat, berdaya saing, dan berprestasi di masa depan.

14) Statistik

Capaian indikator kinerja pada Urusan Statistik menunjukkan performa yang sangat kokoh dalam memperkuat fondasi tata kelola data sektoral guna mewujudkan akuntabilitas perencanaan wilayah yang terukur. Keberhasilan strategis utama ditunjukkan oleh capaian sempurna sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai pada aspek hilirisasi dan pemanfaatan data harian. Performa paripurna ini ditorehkan secara kolektif oleh indikator Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah serta Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah. Realisasi mutlak ini membuktikan bahwa ekosistem birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bantul telah sepenuhnya menginternalisasi budaya pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making), baik pada tahapan formulasi kebijakan makro maupun dalam memotret dampak hasil pembangunan secara akuntabel.

Meskipun dimensi pemanfaatan data oleh perangkat daerah telah berjalan optimal sesuai target mutlakunya, dimensi kualitas sektoral pencapaian indeks makro menunjukkan tingkat stabilitas yang tinggi namun secara administratif menyisakan deviasi kalkulasi sangat tipis di bawah pembobotan target perencanaan terbaru. Indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS) mencatatkan nilai riil sebesar 3,01 dengan rasio capaian kinerja menyentuh angka 98,69% (Sangat Tinggi). Kondisi tersebut berjalan seiring dengan indikator Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia yang meraih nilai riil sebesar 3,25 dengan rasio capaian kinerja sebesar 99,39% (Sangat Tinggi), di mana kedua indikator indeks sektoral ini dikategorikan ke dalam status Tidak Tercapai. Berbeda dengan draf

awal yang berasumsi target terpenuhi mutlak seratus persen, data terbaru ini mengindikasikan adanya margin tipis yang menuntut penguatan kelengkapan instrumen penjaminan mutu data dan standarisasi metadata di tingkat hulu.

Secara keseluruhan, potret Urusan Statistik memberikan rekomendasi strategis bagi formulasi kebijakan ke depan agar memfokuskan intervensi program pada peningkatan standar teknis kelembagaan, interkoneksi arsitektur data, serta penguatan interoperabilitas data antar-sistem informasi birokrasi. Upaya penutupan celah sisa target pada domain Satu Data Indonesia harus diimbangi dengan akselerasi kompetensi sumber daya manusia pengelola data (produsen data dan walidata pembantu) di setiap unit kerja, serta pengembangan inovasi diseminasi data secara digital. Langkah intervensi ini krusial demi memastikan seluruh basis data makro Kabupaten Bantul tidak hanya sekadar tersaji secara lengkap demi pemenuhan administratif, melainkan mampu memberikan nilai tambah dalam merespons dinamika kebutuhan pelayanan publik dan tantangan pembangunan daerah secara cepat, tepat, dan adaptif.

15) Persandian

Capaian indikator kinerja pada Urusan Persandian menunjukkan komitmen dan performa yang andal dalam menjaga integritas serta keamanan aset informasi digital di lingkungan birokrasi daerah. Keberhasilan strategis utama ditunjukkan oleh indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah yang mencatatkan realisasi riil sebesar 91,83% dari target perencanaan yang ditetapkan sebesar 90,2%. Dengan hasil tersebut, indikator ini berhasil menorehkan rasio capaian kinerja sempurna sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai. Berbeda dengan draf narasi awal yang menggunakan kalkulasi pradata, data definitif ini menegaskan bahwa upaya perlindungan terhadap data-data strategis pemerintah dari potensi ancaman kebocoran maupun akses tidak sah telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan

standar protokol tata kelola keamanan informasi yang berlaku di Kabupaten Bantul.

Meskipun aspek operasional pengamanan informasi harian telah dipenuhi secara paripurna, dimensi kematangan sistem siber makro menghadapi kendala administratif pada integrasi data hulu. Indikator Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber serta Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital seluruhnya mencatatkan realisasi akhir n/a sehingga memicu nilai rasio, predikat, dan status capaian berupa galat (#VALUE!). Kondisi ini memberikan rekomendasi strategis bagi formulasi kebijakan ke depan untuk melakukan akselerasi perbaikan tata kelola pelaporan, pengetatan penginputan data sektoral tepat waktu, serta pemenuhan instrumen asesmen mandiri maupun audit formal sesuai standar nasional. Langkah intervensi ini sangat krusial guna menutup celah galat pelaporan sekaligus mengeskalasi nilai indeks kematangan siber, demi memperkuat daya tangkal infrastruktur digital terhadap ancaman siber yang kian kompleks dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkelanjutan.

16) Kebudayaan

Capaian indikator kinerja pada Urusan Kebudayaan menunjukkan performa yang sangat kokoh dalam menjaga, melindungi, dan melestarikan warisan nilai-nilai lokal yang menjadi pilar identitas daerah. Keberhasilan strategis dengan rasio capaian kinerja sempurna sebesar 100,00% berpredikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai berhasil diraih oleh dua indikator utama urusan. Indikator Cakupan pelestarian budaya daerah tuntas merealisasikan angka 87,88% sesuai dengan target perencanaan, yang berjalan beriringan dengan indikator Terlestarikannya Cagar Budaya dengan capaian mutlak sebesar 100,00%. Stabilitas pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemeliharaan benda, situs, kawasan

cagar budaya, serta adat tradisi hulu agar tetap eksis dan lestari di tengah derasnya arus modernisasi global.

Meskipun aspek pelestarian cagar budaya dan makro budaya daerah telah terpenuhi secara penuh, dimensi penguatan kapasitas kebudayaan di tingkat akar rumput mencatatkan tingkat capaian yang sangat tinggi namun secara administratif dikategorikan berstatus Tidak Tercapai. Indikator Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan mencatatkan nilai realisasi riil sebesar 61,90% dari target perencanaan yang ditetapkan sebesar 63,49%. Walaupun menghasilkan rasio capaian kinerja yang sangat tinggi yaitu mencapai 97,50% dengan predikat Sangat Tinggi, sisa deviasi yang sangat tipis di bawah target pembobotan mutlak ini menuntut optimalisasi pendampingan lebih lanjut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akselerasi pemenuhan target kalurahan budaya atau mandiri budaya masih memerlukan penguatan stimulus program, terutama dalam mendorong keterlibatan aktif kelembagaan lokal di tingkat tapak secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, potret Urusan Kebudayaan memberikan rekomendasi strategis bagi formulasi kebijakan ke depan untuk mengintensifkan fasilitasi, pembinaan ekosistem, serta integrasi program pelestarian budaya dengan sektor ekonomi kreatif maupun pariwisata daerah. Upaya menutup celah sisa target pada level kalurahan perlu diperkuat melalui pengoptimalan pemanfaatan Dana Keistimewaan guna mengeskalasi pemberdayaan potensi lokal. Intervensi komprehensif ini krusial demi memastikan bahwa kekayaan adat, seni, dan budaya di Kabupaten Bantul tidak hanya terjaga kelestariannya secara administratif, melainkan juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang inklusif bagi masyarakat tanpa mencabut akar nilai luhur tradisinya.

17) Perpustakaan

Capaian indikator kinerja pada Urusan Perpustakaan memberikan potret evaluasi yang krusial mengenai perlunya penguatan

penetrasi strategi dalam membangun budaya literasi dan kegemaran membaca di tengah masyarakat. Berdasarkan data riil tabel perencanaan terbaru, indikator Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat mencatatkan angka realisasi sebesar 55,93 dari target yang ditetapkan sebesar 81,39. Hasil tersebut menghasilkan rasio capaian kinerja sebesar 68,72% dengan kategori predikat Sedang dan berstatus Tidak Tercapai. Berbeda dengan draf narasi awal yang menggunakan asumsi angka pradata, kondisi riil ini menegaskan bahwa meskipun roda aktivitas literasi daerah tetap bergerak, daya tarik stimulan, keterjangkauan, serta aksesibilitas fasilitas layanan perpustakaan konvensional di Kabupaten Bantul masih menghadapi tantangan berat untuk dapat memacu minat baca publik secara lebih masif dan meluas.

Tantangan strategis yang jauh lebih mendasar dan memerlukan perhatian khusus pemerintah daerah terlihat pada indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Indikator makro ini mencatatkan nilai realisasi riil yang sangat terbatas, yaitu sebesar 8,41 dari target perencanaan awal yang dipatok tinggi pada angka 82,80, sehingga rasio capaian kinerjanya hanya menyentuh 10,16% dengan predikat Sangat Rendah dan berstatus Tidak Tercapai. Rendahnya angka IPLM ini menjadi sinyalmen kuat perlunya intervensi kebijakan yang lebih fundamental, komprehensif, dan terintegrasi pada aspek hulu, terutama dalam hal pemenuhan kecukupan koleksi bahan pustaka, pemerataan tenaga pustakawan bersertifikasi, serta perluasan keterlibatan aktif masyarakat. Formulasi kebijakan ke depan direkomendasikan untuk memprioritaskan transformasi digital melalui e-library, intensifikasi layanan perpustakaan keliling, serta revitalisasi perpustakaan kalurahan sebagai pusat belajar berbasis inklusi sosial demi mendongkrak nilai indeks literasi daerah secara signifikan di masa mendatang.

18) Kearsipan

Capaian indikator kinerja pada Urusan Kearsipan menunjukkan performa tata kelola administrasi yang sangat kuat dan akuntabel di lingkungan internal pemerintahan daerah. Keberhasilan strategis dengan nilai capaian kinerja sempurna sebesar 100,00% berpredikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai ditorehkan oleh indikator Indeks Pengawasan Arsip Internal yang membukukan realisasi riil sebesar 84,19 dari target perencanaan sebesar 80,84. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas upaya pembinaan, penataan, dan pengawasan kearsipan yang dilakukan secara periodik di seluruh unit kerja guna memastikan pengelolaan dokumen negara berjalan sesuai standar. Tren positif ini berjalan beriringan dengan indikator Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah yang mencatatkan nilai riil sebesar 85,27 dari target 86,44, menghasilkan rasio capaian kinerja yang sangat tinggi sebesar 98,65% berpredikat Sangat Tinggi meskipun secara administratif berstatus Tidak Tercapai akibat deviasi tipis di bawah target pembobotan makro.

Di sisi lain, dimensi penyelamatan memori kolektif daerah dan pemenuhan instrumen pertanggungjawaban nasional masih mencatatkan catatan evaluasi yang memerlukan akselerasi program secara lebih terarah. Indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan performa yang sangat mepet dengan realisasi sebesar 83,33% dari target 83,35%, sehingga meraih rasio capaian kinerja sebesar 99,98% (Sangat Tinggi - Tidak Tercapai). Sementara itu, indikator Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional mengalami kontraksi penyerapan target dengan realisasi terendah sebesar 63,20% dari target 82,33%, menghasilkan capaian kinerja sebesar 76,76% dengan predikat Tinggi dan berstatus Tidak Tercapai. Celah capaian ini memberikan rekomendasi strategis bagi arah kebijakan

ke depan untuk segera mengoptimalkan implementasi aplikasi kearsipan dinamis terintegrasi (Srikandi), meningkatkan kompetensi teknis arsiparis, serta memperketat sistem pengamanan arsip vital dan permanen demi mewujudkan digitalisasi kearsipan yang modern, adaptif, dan akuntabel di Kabupaten Bantul.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Capaian indikator kinerja pada Urusan Kelautan dan Perikanan menunjukkan performa yang sangat progresif dan akuntabel dalam mendorong sektor perikanan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Seluruh indikator dalam urusan ini berhasil mencatatkan rapor hijau sempurna dengan rasio capaian kinerja masing-masing sebesar 100,00%, berpredikat Sangat Tinggi, dan berstatus Tercapai. Kontribusi makro sektor ini ditunjukkan secara valid melalui indikator PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB yang berhasil membukukan nilai realisasi riil sebesar Rp207.351,54 Miliar dari target perencanaan yang ditetapkan sebesar Rp207,63 Miliar. Berbeda dengan draf narasi awal yang menyatakan data tahun berjalan belum tersedia, rilis data definitif ini menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul memiliki daya lenting yang luar biasa kuat dalam menopang struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

Keberhasilan di sektor makro ekonomi tersebut berjalan selaras dengan optimalisasi indikator pada dimensi produktivitas di lapangan yang juga meraih capaian kinerja sempurna 100,00% (Sangat Tinggi - Tercapai). Indikator Pertumbuhan produksi sektor perikanan mencatatkan realisasi riil sebesar 2,01%, melampaui target perencanaan awal yang dipatok sebesar 1,94%. Performa impresif ini diperkuat oleh indikator Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang berhasil menembus angka realisasi sebesar 106,45% dari target dasar sebesar 100%. Lompatan angka produksi yang merata di sektor perikanan

tangkap maupun budidaya ini membuktikan efektivitas program pembinaan, penyaluran stimulan bantuan bimbingan teknis, serta pendampingan intensif yang dilakukan pemerintah daerah kepada para nelayan dan pembudidaya ikan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

Secara keseluruhan, potret kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan telah berjalan sangat sukses dan berada pada jalur yang tepat (on track). Untuk mempertahankan tata kelola kinerja yang sudah paripurna ini, rekomendasi kebijakan ke depan diarahkan pada penguatan hilirisasi industri pengolahan guna meningkatkan nilai tambah (value added) produk perikanan pascaproduksi serta modernisasi infrastruktur pendukung di kawasan pesisir. Selain itu, perluasan jejaring pasar digital bagi produk perikanan lokal serta penerapan teknologi budidaya yang ramah lingkungan (eco-fishing) harus terus diakselerasi, demi memastikan pertumbuhan sektor perikanan tetap berkelanjutan dan mampu mengeskalisasi kesejahteraan ekonomi para pelaku usaha perikanan secara berkesinambungan.

2) Pariwisata

Capaian indikator kinerja pada Urusan Pariwisata menunjukkan performa yang cukup dinamis, terutama dalam memberikan kontribusi yang solid terhadap struktur perekonomian makro daerah serta optimalisasi utilitas sarana akomodasi wisata. Keberhasilan strategis dengan rasio capaian kinerja sempurna sebesar 100,00% berpredikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai berhasil diraih oleh dua indikator utama. Indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku mencatatkan realisasi riil sebesar 13,32%, melampaui rentang target perencanaan yang ditetapkan pada kisaran 12,83-13,19%. Keberhasilan makro ini diperkuat oleh indikator Tingkat hunian akomodasi yang terealisasi memuaskan sebesar 51,61% dari target sebesar 47,77%. Angka ini mencerminkan bahwa daya tarik Kabupaten Bantul sebagai destinasi pilihan tetap kompetitif di

tingkat regional, yang dibuktikan dengan tingginya efisiensi pemanfaatan serta pemenuhan fasilitas penginapan oleh para wisatawan yang berkunjung.

Meskipun kontribusi makro ekonomi menunjukkan tren yang positif, sektor pariwisata menghadapi tantangan yang sangat signifikan pada aspek pertumbuhan kunjungan fisik serta kontribusi langsung terhadap pendapatan sekunder daerah. Indikator Peningkatan kunjungan wisatawan baru terealisasi sebesar 1,03% dari target 2,88% (capaian kinerja 35,76% / Sangat Rendah), yang berjalan beriringan dengan Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota dengan realisasi serupa sebesar 1,03% dari target 2,835% (capaian kinerja 36,33% / Sangat Rendah). Kondisi ini diperberat oleh rendahnya Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang hanya mencapai 5,77% dari target ambisius sebesar 24,39% (capaian kinerja 23,66% / Sangat Rendah). Serangkaian deviasi pada volume kunjungan ini berimplikasi langsung pada performa fiskal, di mana Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD baru mencapai 3,67% dari target 7,62% (capaian kinerja 48,16% / Sangat Tinggi) serta Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD yang juga tertahan di angka 3,67% dari target 5.13% (capaian kinerja 71,54% / Sedang), di mana kelima indikator tersebut terkategori ke dalam status Tidak Tercapai.

Secara keseluruhan, kinerja Urusan Pariwisata memberikan fondasi ekonomi makro yang baik namun menuntut adanya reorientasi strategi pemasaran serta percepatan diversifikasi destinasi secara fundamental. Catatan evaluasi ini memberikan rekomendasi strategis bagi formulasi kebijakan ke depan untuk menggeser fokus program pada pengembangan desa wisata yang tematik, intervensi promosi digital yang lebih agresif untuk menysasar pasar domestik maupun internasional, serta penguatan kalender kegiatan (event) pariwisata berskala nasional. Langkah

intervensi yang inklusif dan terintegrasi ini sangat krusial untuk memulihkan laju kunjungan wisatawan pascapandemi secara riil di lapangan, sekaligus memastikan bahwa sektor pariwisata mampu memberikan sumbangsih pendapatan yang optimal dan instan dalam menopang kemandirian fiskal daerah.

3) Pertanian

Capaian indikator kinerja pada Urusan Pertanian memberikan gambaran evaluasi yang komprehensif mengenai tingkat ketahanan pangan daerah serta upaya perlindungan keamanan hayati hewani di tengah dinamika iklim yang menantang. Meskipun seluruh indikator dalam urusan ini secara administratif dikategorikan berstatus Tidak Tercapai, pemerintah daerah menunjukkan konsistensi performa yang kokoh pada dimensi produktivitas lahan dan mitigasi kesehatan hewan. Indikator Produktivitas pertanian per hektar per tahun berhasil mencatatkan nilai realisasi riil yang cukup tinggi sebesar 6,30 Ton/Ha dari target perencanaan yang ditetapkan sebesar 6,52 Ton/Ha. Hasil tersebut menghasilkan rasio capaian kinerja yang sangat memuaskan, yaitu mencapai 96,63% dengan predikat Sangat Tinggi. Angka ini membuktikan bahwa lahan pertanian di Kabupaten Bantul masih mempertahankan daya dukung yang kuat dalam menopang stabilitas output pangan daerah.

Di sisi penguatan keamanan hayati ternak, performa perlindungan kesehatan hewan juga mencatatkan tingkat capaian yang sangat tinggi mendekati batas kesempurnaan target. Indikator Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular mencatatkan nilai penurunan riil sebesar -47,35% dari target akumulatif yang dipatok sebesar -47,39%. Melalui data definitif ini, aspek perlindungan ternak membukukan rasio capaian kinerja mencapai 99,92% dengan predikat Sangat Tinggi. Berbeda dengan draf narasi awal yang mengasumsikan angka keberhasilan mutlak seratus persen secara konvensional, potret data riil terkini menegaskan adanya margin deviasi administratif yang sangat tipis,

namun tetap mencerminkan efektivitas yang tinggi dari sistem surveilans, pengawasan lalu lintas ternak, serta kecepatan respons penanggulangan wabah di lapangan.

Tantangan strategis yang memerlukan perhatian khusus dan intervensi kebijakan yang lebih agresif terletak pada dimensi laju pertumbuhan produksi komoditas utama. Indikator Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%) mencatatkan realisasi yang masih tertahan di angka 0,14% dari target yang ditentukan sebesar 0,60%, sehingga rasio capaian kinerjanya berada pada angka 23,33% dengan predikat Sangat Rendah. Menanggapi catatan evaluasi tersebut, rekomendasi formulasi kebijakan ke depan harus difokuskan pada program akselerasi pertumbuhan produksi melalui penguatan sarana prasarana pengairan (perpipaan dan irigasi), penyediaan benih unggul bersertifikat yang adaptif terhadap perubahan iklim ekstrem, serta intensifikasi penerapan teknologi pertanian modern. Langkah intervensi terpadu ini sangat penting untuk mendongkrak produktivitas sektoral sekaligus memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan ekonomi para petani secara berkelanjutan.

4) Perdagangan

Capaian indikator kinerja pada Urusan Perdagangan di tahun pertama implementasi RPJMD menunjukkan performa yang sangat impresif, khususnya pada jajaran indikator utama yang berhasil mengamankan rasio capaian kinerja sempurna sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai. Keberhasilan strategis yang paling menonjol diperlihatkan oleh indikator Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dengan realisasi riil sebesar 89,89% dari target 71,00%. Capaian luar biasa ini berjalan selaras dengan Persentase capaian kinerja sektor perdagangan yang merealisasikan angka 117,87% dari target 86,00%, serta Persentase penggunaan produk dalam negeri sebesar 99,57% dari target 86,00%. Selain itu, kelancaran distribusi sektor

logistik pertanian juga terjaga secara paripurna, di mana indikator Persentase kinerja realisasi pupuk sukses membukukan realisasi sebesar 67,79% dari target dasar 50,87%, menegaskan ketertiban niaga dan perlindungan konsumen yang berjalan sangat dinamis di Kabupaten Bantul.

Di sisi lain, dimensi kontribusi ekonomi makro dan pemenuhan administratif perizinan menunjukkan tren performa yang sangat tinggi, meskipun secara prosedural dikategorikan berstatus Tidak Tercapai akibat deviasi tipis di bawah target pembobotan mutlak. Indikator Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor mencatatkan realisasi riil sebesar 7,32% dari target perencanaan sebesar 7,39% (capaian kinerja 99,08%). Kondisi serupa dialami oleh indikator Nilai belanja produk dalam negeri yang menyentuh angka realisasi Rp1,79 Triliun dari target Rp1,80 Triliun (capaian kinerja 99,44%), serta Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) yang meraih realisasi sebesar 65,91% dari target 66,82% (capaian kinerja 98,64%). Walaupun ketiga indikator ini belum tuntas memenuhi target seratus persen, capaian yang mendekati angka sempurna ini membuktikan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasar.

Tantangan regulasi yang sangat krusial dan memerlukan reorientasi strategi pengadaan barang/jasa pemerintah secara fundamental terlihat pada indikator Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Indikator ini mengalami kontraksi tajam dengan mencatatkan nilai riil sebesar -3,09% dari target positif yang ditetapkan sebesar 0,56%, sehingga memicu nilai rasio capaian kinerja jatuh ke angka -551,79% dengan predikat Sangat Rendah dan berstatus Tidak Tercapai. Catatan evaluasi mendalam ini memberikan rekomendasi strategis bagi formulasi kebijakan ke

depan untuk melakukan sinkronisasi dan pengetatan kebijakan pengadaan melalui e-katalog lokal serta optimalisasi serapan belanja bagi pelaku UMKM. Langkah intervensi ini, dibarengi dengan perluasan akses pasar digital bagi pedagang lokal serta pemeliharaan status Kabupaten Bantul sebagai Daerah Tertib Ukur, menjadi kunci utama guna mewujudkan ekosistem perdagangan yang adil, modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

5) Perindustrian

Capaian indikator kinerja pada Urusan Perindustrian menunjukkan tata kelola pelayanan publik dan fungsi pengawasan yang sangat kokoh dalam menjaga iklim usaha daerah. Keberhasilan strategis dengan nilai capaian kinerja sempurna sebesar 100,00%, berpredikat Sangat Tinggi, dan berstatus Tercapai berhasil diamankan oleh tiga indikator utama pelayanan. Indikator Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini, serta Indeks ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini, keduanya sukses merealisasikan nilai mutlak sebesar 100 dari target perencanaan 100. Kinerja paripurna ini berjalan seiring dengan indikator Persentase Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang juga tuntas merealisasikan target 100,00%, membuktikan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam menjamin kepastian pemantauan kawasan industri di Kabupaten Bantul.

Meskipun dimensi regulasi dan keterbukaan informasi publik mencatatkan rapor hijau, dimensi pertumbuhan kuantitatif sektor manufaktur skala kecil dan menengah mencatatkan realisasi yang sangat tinggi namun secara administratif dikategorikan berstatus Tidak Tercapai. Indikator Pertumbuhan industri kecil menengah membukukan nilai realisasi riil sebesar 2,25% dari target perencanaan yang ditetapkan sebesar 2,31%. Kondisi ini berjalan linier dengan indikator Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah yang juga mencatatkan angka realisasi 2,25% dari target

2,31%, di mana keduanya menghasilkan rasio capaian kinerja yang sangat tinggi sebesar 97,40% dengan predikat Sangat Tinggi. Kontraksi tipis di bawah target pembobotan ini mengindikasikan bahwa walaupun ekosistem industri kecil menengah di Kabupaten Bantul terus berekspansi di lapangan, akselerasi program pembinaan masih membutuhkan stimulus tambahan untuk menembus batas atas target yang ditetapkan.

Tantangan evaluasi yang memerlukan intervensi khusus dan penyelarasan formulasi kebijakan terlihat pada sektor industri skala besar serta pemenuhan target pembangunan industri makro. Indikator Persentase izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan mencatatkan nilai realisasi yang tertahan di angka 45,45% dari target 55,55%, menghasilkan rasio capaian kinerja sebesar 81,82% dengan predikat Tinggi dan berstatus Tidak Tercapai. Di samping itu, indikator Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK mencatatkan nilai riil sebesar 103,90% namun mengalami anomali kalkulasi sistem sehingga berstatus Tidak Tercapai. Menanggapi catatan tersebut, rekomendasi kebijakan ke depan harus difokuskan pada intensifikasi pemantauan industri skala besar, penguatan integrasi data industri ke dalam sistem informasi nasional, serta pendampingan teknologi bagi IKM agar mampu tumbuh berkelanjutan dan memberikan efek multiplikasi yang lebih besar terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

6) Transmigrasi

Capaian indikator kinerja pada Urusan Transmigrasi di tahun pertama implementasi RPJMD menunjukkan stabilitas operasional dan komitmen pelayanan yang sangat paripurna. Berdasarkan potret data riil pada tabel evaluasi terbaru, satu-satunya indikator kunci dalam urusan ini, yaitu Persentase Penempatan Transmigrasi, sukses mencatatkan nilai realisasi mutlak sebesar

100,00% dari target perencanaan awal yang juga dipatok sebesar 100,00%. Hasil ini menghasilkan rasio capaian kinerja sempurna sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai. Berbeda dengan draf narasi awal yang menggunakan asumsi data belum tersedia (n/a), data definitif ini menegaskan ketepatan serta efektivitas fasilitasi pemerintah daerah dalam mengoordinasikan seluruh tahapan perpindahan penduduk secara terencana.

Keberhasilan pencapaian target yang optimal ini mencerminkan kuatnya jalinan kerja sama dan koordinasi antarwilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan kementerian terkait maupun daerah penerima (tujuan) transmigrasi. Untuk mempertahankan performa kinerja yang sudah berada pada jalur yang semestinya (on track) ini, rekomendasi formulasi kebijakan ke depan diarahkan pada penguatan pembinaan pra-penempatan yang lebih komprehensif bagi calon transmigran agar memiliki keterampilan produktif dan adaptif di lokasi baru. Selain itu, intensifikasi kualitas pemantauan pasca-penempatan perlu terus ditingkatkan guna mendorong kemandirian ekonomi para transmigran, sehingga program ini mampu menjadi katalisator efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Capaian indikator kinerja pada Sekretariat Daerah di tahun pertama implementasi RPJMD menunjukkan performa yang sangat solid dan akuntabel dalam menjalankan fungsi koordinasi, pelayanan administratif, serta pemantapan tata kelola birokrasi. Berdasarkan data definitif, Sekretariat Daerah berhasil membukukan rapor hijau dengan capaian kinerja sempurna sebesar 100,00%, berpredikat Sangat Tinggi, dan berstatus Tercapai pada empat indikator strategis internal. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP yang merealisasikan angka 13,84 dari target

13,82, serta Indeks Kepuasan Masyarakat yang mencapai nilai riil 91,26 dari target perencanaan 91,00. Sinergi capaian ini membuktikan bahwa kualitas layanan administratif dan koordinatif yang diberikan pemerintah daerah tidak hanya akuntabel secara birokrasi, namun juga dinilai sangat baik oleh masyarakat.

Keberhasilan performa tata kelola ini berjalan selaras dengan penguatan transparansi pada dimensi pengadaan barang dan jasa yang juga menorehkan capaian kinerja optimal sebesar 100,00% (Sangat Tinggi - Tercapai). Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan berhasil membukukan realisasi riil sebesar 87,33 dari target perencanaan sebesar 82,00. Tren positif ini diperkuat oleh indikator Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan yang mencatatkan realisasi sebesar 87,26% dari target 86,20%. Berbeda dari draf narasi awal yang menggunakan kalkulasi konvensional di atas seratus persen, visualisasi data terkini menegaskan pembatasan pagu rasio kinerja maksimal di angka seratus persen, mencerminkan peningkatan efisiensi, akurasi perencanaan anggaran, dan penguatan aspek ketertiban administrasi pengadaan yang bersih di lingkungan pemerintah daerah.

Di sisi lain, terdapat indikator koordinasi sektoral dan pengawasan makro yang mencatatkan capaian sangat tinggi namun secara administratif berstatus Tidak Tercapai akibat deviasi tipis di bawah target pembobotan mutlak. Indikator Nilai EPPD mencatatkan realisasi riil sebesar 3,3974 dari target perencanaan yang ditetapkan sebesar 3,4280, menghasilkan rasio capaian kinerja yang sangat tinggi mencapai 99,91% dengan predikat Sangat Tinggi. Kondisi serupa dialami oleh indikator Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif yang memperoleh nilai realisasi riil sebesar 83,00% dari target 83,20% (capaian kinerja 99,76% / Sangat Tinggi). Sementara itu, indikator Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama mencatatkan nilai realisasi nol dengan anomali kalkulasi sistem (#DIV/0!). Catatan evaluasi ini

memberikan rekomendasi kebijakan ke depan untuk melakukan percepatan digitalisasi tata usaha perkantoran serta harmonisasi kebijakan antar-sektor guna memastikan peran Sekretariat Daerah sebagai motor penggerak birokrasi tetap adaptif dan akuntabel.

2) Sekretariat DPRD

Capaian indikator kinerja pada Sekretariat DPRD di tahun pertama implementasi RPJMD menunjukkan kinerja yang sangat stabil dan efektif dalam menjalankan fungsi fasilitasi tugas-tugas legislatif daerah. Keberhasilan utama yang paling menonjol dibukukan oleh indikator Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD yang sukses meraih nilai realisasi mutlak sebesar 100,00% dari target perencanaan awal yang juga dipatok sebesar 100,00%. Hasil riil ini menghasilkan rasio capaian kinerja sempurna sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai. Capaian ini mencerminkan kelancaran proses administrasi operasional serta optimalnya dukungan teknis yudisial yang diberikan oleh Sekretariat dalam mengawal seluruh siklus pembentukan regulasi daerah, sehingga produk hukum yang direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu.

Di sisi lain, dimensi dukungan terhadap fungsi legislasi juga menunjukkan performa kuantitatif yang sangat tinggi di lapangan, meskipun secara prosedural dikategorikan berstatus Tidak Tercapai akibat deviasi tipis di bawah target pembobotan mutlak. Indikator Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD mencatatkan nilai realisasi riil sebesar 94,53 dari target perencanaan yang ditetapkan sebesar 94,91. Berbeda dari draf narasi awal yang mengasumsikan rasio kinerja di angka 99,80% berdasarkan target yang berbeda, visualisasi data definitif terbaru menegaskan bahwa indikator ini menghasilkan rasio capaian kinerja yang sangat tinggi sebesar 99,60% dengan predikat Sangat Tinggi. Pembatasan margin deviasi yang sangat tipis ini membuktikan bahwa kualitas layanan administratif, penyediaan risalah, serta fasilitasi rapat-rapat alat

kelengkapan dewan secara substansial telah berjalan dengan sangat prima.

Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat DPRD telah memberikan kontribusi penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang selaras dan harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif melalui fungsi fasilitasi yang responsif. Catatan evaluasi ini memberikan rekomendasi strategis bagi formulasi kebijakan ke depan untuk berfokus pada penguatan digitalisasi naskah dinas serta integrasi sistem informasi legislatif (e-Legislatif) guna menyediakan akses data yang lebih cepat, transparan, dan akurat. Selain itu, optimalisasi dukungan teknis terhadap fungsi pengawasan anggaran dan penganggaran DPRD harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan, demi memastikan Sekretariat DPRD tetap menjadi unit pendukung yang profesional, modern, dan akuntabel.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan dan Pengendalian

Capaian indikator kinerja pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian di tahun pertama implementasi RPJMD menunjukkan performa yang sangat optimal dalam mengawal kualitas akuntabilitas serta efektivitas pembangunan daerah. Keberhasilan strategis yang paling menonjol diperlihatkan oleh indikator Capaian indikator tujuan dan sasaran Daerah kategori tinggi dan sangat tinggi yang sukses membukukan nilai realisasi mutlak sebesar 100,00% dari target perencanaan yang ditetapkan sebesar 77,42%. Berdasarkan visualisasi data terbaru, indikator makro ini mencatatkan rasio capaian kinerja sempurna sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa keselarasan antara perencanaan strategis dengan koordinasi implementasi program kerja lintas perangkat daerah di lapangan telah berjalan efektif demi mengamankan target utama pembangunan daerah.

Di sisi penguatan tata kelola akuntabilitas internal, dimensi pengukuran kinerja instansi pemerintah juga menunjukkan

stabilitas mutu yang terjaga dengan sangat baik. Indikator Rata-rata nilai AKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja mencatatkan angka realisasi riil sebesar 25,81. Meskipun angka realisasi ini secara faktual telah masuk ke dalam rentang target perencanaan yang ditetapkan yaitu sebesar 25,70–25,95, sistem pengolahan data menetapkan nilai rasio capaian kinerjanya berada di angka 99,46% dengan predikat Sangat Tinggi dan secara administratif berstatus Tidak Tercapai. Deviasi tipis di bawah batas pembobotan mutlak ini merefleksikan adanya margin prosedural yang sangat ketat, namun secara substansial tetap membuktikan bahwa sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) telah terintegrasi secara mendalam pada tiap tahapan perencanaan penganggaran daerah. Secara keseluruhan, kinerja bidang perencanaan dan pengendalian memberikan fondasi manajerial yang kokoh untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan di atas rel yang tepat dan berorientasi hasil. Catatan evaluasi ini memberikan rekomendasi strategis bagi formulasi kebijakan ke depan untuk berfokus pada integrasi ekosistem perencanaan digital yang lebih responsif serta penguatan validitas arsitektur data kinerja sebagai basis pengendalian utama. Langkah intervensi ini sangat krusial untuk mempercepat sinkronisasi dokumen perencanaan, memitigasi risiko pembangunan secara dini, serta memastikan agar seluruh target sasaran daerah pada tahun-tahun berikutnya dapat dievaluasi secara presisi, akurat, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

2) Keuangan

Capaian indikator kinerja pada Urusan Keuangan di tahun pertama implementasi RPJMD menunjukkan performa yang sangat progresif, terutama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah serta efisiensi alokasi anggaran belanja daerah. Berdasarkan data definitif terkini, pemerintah daerah berhasil membukukan rapor hijau dengan capaian kinerja sempurna sebesar 100,00%, berpredikat Sangat Tinggi, dan berstatus Tercapai pada lima indikator strategis utama. Keberhasilan paling signifikan

diperlihatkan oleh indikator Persentase PAD terhadap pendapatan daerah yang merealisasikan angka riil sebesar 30,49% dari target 25,11%, yang mencerminkan keberhasilan strategi intensifikasi sumber pendapatan asli daerah. Keberhasilan ini berjalan linier dengan pencapaian target penuh pada indikator Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan dengan realisasi 40,01% dari target 36,20%, Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) sebesar 74,26% dari target 70,08%, serta manajemen struktural pada indikator Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD sebesar 6,39% dari target 0,113%, yang menegaskan tata kelola serapan belanja yang berjalan optimal di Kabupaten Bantul. Selaras dengan capaian pembelanjaan, dimensi manajemen aset serta tata kelola akuntabilitas internal daerah juga mampu mempertahankan stabilitas performa yang prima pada kategori tertinggi. Indikator Manajemen Aset secara konsisten berhasil mengamankan nilai realisasi mutlak pada Kategori 4 dari target awal Kategori 4, menghasilkan rasio capaian kinerja 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai. Di sisi lain, fungsi pengawasan administratif mencatatkan performa yang sangat tinggi, meskipun secara prosedural masuk ke dalam kategori Tidak Tercapai akibat deviasi sangat tipis di bawah pembobotan target mutlak. Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1 mencatatkan nilai realisasi riil sebesar 73,096 dari target perencanaan 75,364, sehingga menghasilkan rasio capaian kinerja sebesar 96,99% dengan predikat Sangat Tinggi. Kondisi serupa dialami oleh indikator Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku yang meraih nilai realisasi sebesar 94,85% dari target perencanaan sebesar 95,32% (capaian kinerja 99,51% / Sangat Tinggi).

Tantangan regulasi fiskal yang sangat krusial dan memerlukan penyesuaian strategi mobilisasi pendapatan secara mendalam terlihat pada dimensi manajemen kas serta proyeksi pendapatan.

Indikator Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya mencatatkan realisasi sebesar 6,16% dari target 7,00%, menghasilkan capaian kinerja sebesar 88,00% dengan predikat Tinggi dan berstatus Tidak Tercapai. Sementara itu, kontraksi paling tajam dialami oleh indikator Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD yang hanya mencatatkan nilai riil sebesar 0,49% dari target 10,79%, sehingga memicu nilai rasio capaian kinerjanya jatuh ke angka 4,54% dengan predikat Sangat Rendah dan berstatus Tidak Tercapai. Catatan evaluasi mendalam ini memberikan rekomendasi strategis bagi formulasi kebijakan ke depan untuk meningkatkan akurasi proyeksi pendapatan, melakukan akselerasi digitalisasi retribusi dan pajak daerah, serta mempercepat realisasi belanja yang berkualitas guna memastikan setiap rupiah dalam APBD dapat memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

3) Kepegawaian

Capaian indikator kinerja pada Urusan Kepegawaian di tahun pertama implementasi RPJMD menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berbasis merit. Keberhasilan strategis kedinasan dibuktikan oleh indikator Indeks Profesionalitas ASN yang sukses merealisasikan nilai riil sebesar 82,98 dari target perencanaan yang ditetapkan sebesar 82,00. Berdasarkan visualisasi data definitif terkini, performa manajemen aparatur ini menghasilkan rasio capaian kinerja sempurna sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai. Capaian optimal ini menandakan bahwa kualitas sumber daya aparatur di Kabupaten Bantul, baik dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, maupun disiplin pegawai, secara substansial telah berada pada jalur yang tepat untuk mendukung akselerasi pelayanan publik.

Di sisi lain, dimensi tata kelola SDM aparatur dan penguatan kelembagaan menunjukkan tren performa kuantitatif yang sangat

tinggi di lapangan, meskipun secara administratif dikategorikan berstatus Tidak Tercapai akibat deviasi tipis di bawah target pembobotan mutlak. Indikator Capaian Nilai Sistem Merit mencatatkan nilai realisasi riil sebesar 287,50 dari target perencanaan sebesar 305,00, sehingga menghasilkan rasio capaian kinerja yang sangat tinggi sebesar 94,26% dengan predikat Sangat Tinggi. Pembatasan margin deviasi yang ketat ini mengindikasikan bahwa walaupun secara prosedural belum memenuhi target mutlak seratus persen, komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keadilan rekrutmen, pembinaan karier, serta promosi berbasis kompetensi tanpa diskriminasi tetap berjalan secara konsisten dan akuntabel.

Tantangan regulasi dan restrukturisasi komposisi aparatur yang memerlukan reorientasi formulasi kebijakan secara mendalam terlihat pada pemenuhan rasio jabatan serta tingkat pendidikan PNS di luar rumpun utama. Indikator Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mencatatkan realisasi riil sebesar 20,04% dari target perencanaan 26,50%, menghasilkan capaian kinerja sebesar 90,68% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tidak Tercapai. Kondisi serupa terjadi pada indikator Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) yang meraih nilai realisasi 64,60% dari target 69,50% (capaian kinerja 91,71% / Sangat Tinggi). Catatan evaluasi ini memberikan rekomendasi strategis bagi kebijakan ke depan untuk mengoptimalkan formasi jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan yang presisi, pemantapan manajemen talenta, serta akselerasi pengembangan kompetensi digital ASN guna mewujudkan struktur birokrasi yang ramping struktur namun kaya fungsi.

4) Pendidikan dan Pelatihan

Capaian indikator kinerja pada Bidang Pendidikan dan Pelatihan di tahun pertama implementasi RPJMD menunjukkan hasil yang

sangat progresif dan optimal dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur daerah. Keberhasilan signifikan tersebut dibukukan oleh satu-satunya indikator kunci penunjang urusan ini, yaitu Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). Indikator ini sukses mencatatkan nilai realisasi riil sebesar 62,41% yang secara meyakinkan melampaui target perencanaan operasional yang ditetapkan sebesar 47,31%. Berdasarkan visualisasi data terkini, pembobotan evaluasi membatasi pagu rasio capaian kinerja maksimal berada pada angka sempurna sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan brstatus Tercapai.

Akselerasi capaian kinerja yang optimal ini merefleksikan tingginya efektivitas pelaksanaan program pengembangan kompetensi pegawai serta percepatan sertifikasi profesi bagi para pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dengan semakin meningkatnya rasio kuantitas aparatur fungsional yang mengantongi sertifikat kompetensi resmi, standar baku pelayanan publik dan mutu hasil kerja pada lintas sektor kedinasan diharapkan mampu terkerek naik secara linier. Kondisi positif ini sekaligus menegaskan terwujudnya keselarasan yang kuat antara tingginya kesadaran aparatur dalam meningkatkan kapasitas diri dengan dukungan sistemik instansi dalam memfasilitasi diklat teknis, fungsional, maupun manajerial.

Secara keseluruhan, kinerja bidang pendidikan dan pelatihan memberikan jaminan ketersediaan SDM aparatur yang kompeten, responsif, dan terspesialisasi untuk mengawal keberhasilan seluruh program pembangunan daerah. Catatan evaluasi ini memberikan rekomendasi strategis bagi formulasi kebijakan ke depan agar terus berfokus pada diversifikasi jenis pelatihan berbasis teknologi digital serta pemantapan skema sertifikasi khusus pada rumpun bidang strategis baru. Langkah intervensi ini dinilai sangat krusial guna memastikan bahwa keahlian praktis para pejabat fungsional di Kabupaten Bantul tetap relevan, adaptif, dan berdaya saing tinggi

dalam merespons tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks..

5) Penelitian dan Pengembangan

Capaian indikator kinerja pada Bidang Penelitian dan Pengembangan di tahun pertama implementasi RPJMD menunjukkan performa yang sangat baik dalam menjembatani produk riset dengan kebijakan pembangunan daerah. Keberhasilan strategis tersebut dibukukan oleh indikator kunci utama penunjang urusan ini, yaitu Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan dalam pembangunan. Berdasarkan tabel evaluasi terbaru, indikator ini berhasil membukukan nilai realisasi riil sebesar 72,23%, mengungguli target perencanaan operasional yang ditetapkan sebesar 72,01%. Melalui visualisasi data definitif tersebut, sistem menetapkan pagu maksimal rasio capaian kinerjanya berada pada angka sempurna sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai. Realisasi ini sekaligus mengoreksi draf narasi awal yang menggunakan basis target 71,21% dan kalkulasi rasio kinerja konvensional di atas seratus persen.

Efektivitas implementasi riset yang optimal ini memberikan sinyal positif bagi penguatan ekosistem inovasi daerah secara terstruktur. Dengan tingkat serapan hasil penelitian yang berhasil mencapai target perencanaan, pemerintah daerah menunjukkan komitmen dan keterbukaan yang tinggi terhadap pembaruan serta pemanfaatan solusi saintifik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan publik. Fakta empiris ini membuktikan bahwa produk kelitbangan di Kabupaten Bantul tidak hanya berhenti pada tataran dokumen akademis di atas kertas, namun telah memiliki nilai kemanfaatan praktis yang nyata sebagai landasan utama pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, kinerja bidang penelitian dan pengembangan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas tata

kelola pemerintahan melalui integrasi inovasi yang inklusif. Rekomendasi strategis bagi formulasi kebijakan ke depan diarahkan pada peningkatan kualitas metodologi riset makro, perluasan cakupan dan replikasi inovasi hingga ke tingkat kalurahan, serta penguatan perlindungan kekayaan intelektual atas kreativitas inovasi daerah. Langkah intervensi ini dinilai sangat krusial guna memastikan bahwa setiap derap langkah pembangunan di Kabupaten Bantul senantiasa didorong oleh semangat pembaruan yang berkelanjutan serta adaptif dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat

Capaian indikator kinerja pada Inspektorat Daerah di tahun pertama implementasi RPJMD menunjukkan komitmen dan performa kuantitatif yang sangat kuat dalam menjaga integritas, kualitas tata kelola pemerintahan, serta kepatuhan hukum daerah. Hal ini dibuktikan oleh indikator strategis utama yaitu Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten yang mencatatkan realisasi riil sebesar 94,05%. Meskipun angka realisasi tersebut secara faktual menunjukkan tren progresif jika dibandingkan dengan draf perencanaan awal, visualisasi data definitif menetapkan target yang lebih tinggi sebesar 94,19%, sehingga rasio capaian kinerja indikator ini berada di angka 99,85% dengan predikat Sangat Tinggi dan secara administratif berstatus Tidak Tercapai. Margin deviasi yang sangat tipis ini membuktikan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan operasional dalam mengawal rekomendasi perbaikan di lingkungan perangkat daerah pada dasarnya tetap berjalan secara serius dan optimal.

Kondisi performa yang sangat tinggi dengan batas deviasi prosedural yang ketat juga tercermin pada dimensi penguatan kapasitas kelembagaan internal pengawasan daerah. Indikator Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berhasil

membukukan angka realisasi riil sebesar 3,12. Berdasarkan pembobotan target perencanaan terbaru yang dipatok sebesar 3,16 mengoreksi asumsi target lama sebesar 3,13 indikator ini menghasilkan nilai rasio capaian kinerja sebesar 98,73% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tidak Tercapai. Di sisi lain, indikator Nilai Capaian Area Penguatan APIP merealisasikan angka riil sebesar 80,98 dari target perencanaan sebesar 90,30. Koreksi target ini menghasilkan rasio capaian kinerja institusional sebesar 89,68% dengan predikat Tinggi dan berstatus Tidak Tercapai, memberikan gambaran objektif mengenai area administratif pengawasan yang masih memerlukan penguatan kapasitas lebih lanjut.

Secara keseluruhan, kinerja Inspektorat Daerah memberikan fondasi manajerial yang akuntabel bagi terciptanya iklim pemerintahan yang bersih serta bebas dari risiko penyimpangan. Seluruh dinamika capaian dan catatan evaluasi prosedural pada tahun pertama ini memberikan rekomendasi strategis bagi formulasi kebijakan ke depan untuk berfokus pada perbaikan berkelanjutan pada aspek tata laksana kelembagaan, optimalisasi kualitas sumber daya manusia pengawasan, serta penguatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based audit*). Selain itu, pemantapan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi menjadi prioritas utama yang harus terus dipacu guna memitigasi potensi fraud secara dini sekaligus meningkatkan efisiensi serta efektivitas pencapaian sasaran pembangunan makro di Kabupaten Bantul.

7. Kapanewon

Capaian indikator kinerja pada 17 Kapanewon di Kabupaten Bantul pada tahun pertama implementasi RPJMD menunjukkan performa yang sangat impresif dan merata dalam menyelenggarakan pelayanan publik di tingkat kewilayahan. Berdasarkan visualisasi data definitif terbaru, indikator Indeks Pelayanan Publik Kapanewon pada mayoritas wilayah berhasil mencatatkan nilai realisasi yang melampaui target

perencanaan operasional yang ditetapkan seragam sebesar 3,80. Keberhasilan menonjol ini didominasi oleh Kapanewon Dlingo dengan realisasi tertinggi sebesar 4,81, disusul oleh Kapanewon Kasihan sebesar 4,80, Kapanewon Piyungan sebesar 4,66, serta Kapanewon Jetis sebesar 4,64; di mana seluruh wilayah tersebut sukses mengunci rasio capaian kinerja maksimal sebesar 100,00% dengan predikat Sangat Tinggi dan berstatus Tercapai. Meski demikian, draf narasi awal perlu dikoreksi secara faktual karena terdapat satu wilayah, yakni Kapanewon Kretek, yang belum memenuhi target dengan nilai realisasi 3,76, sehingga menghasilkan rasio capaian kinerja sebesar 98,95% dengan predikat Sangat Tinggi namun secara administratif berstatus Tidak Tercapai.

Selaras dengan dimensi pelayanan makro, aspek kualitas teknis kedinasan melalui indikator Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon juga menunjukkan stabilitas mutu yang sangat terjaga di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan predikat kolektif Sangat Tinggi. Pada indikator dengan target perencanaan sebesar 92,48 ini, Kapanewon Pandak mengamankan posisi tertinggi dengan nilai realisasi riil sebesar 94,95, diikuti oleh Kapanewon Dlingo sebesar 94,82, dan Kapanewon Jetis sebesar 94,67, yang seluruhnya meraih capaian kinerja sempurna 100,00% dan berstatus Tercapai. Namun, pencatatan evaluasi juga mengindikasikan adanya dinamika prosedural yang ketat, di mana beberapa wilayah seperti Kapanewon Pleret (92,26), Kapanewon Bantul (92,31), Kapanewon Kasihan (92,17), Kapanewon Sanden (91,93), Kapanewon Kretek (91,30), dan Kapanewon Banguntapan (90,52) harus dikategorikan berstatus Tidak Tercapai akibat deviasi tipis di bawah angka pembobotan target mutlak.

Secara keseluruhan, kinerja Kapanewon pada tahun pertama ini telah berhasil membuktikan perannya yang krusial sebagai ujung tombak birokrasi dan representasi kehadiran pemerintah yang melayani di tingkat akar rumput. Catatan evaluasi deviasi dan capaian ini memberikan rekomendasi strategis bagi formulasi kebijakan ke depan

untuk terus berfokus pada penguatan integrasi layanan berbasis digital melalui optimalisasi aplikasi Paten Online demi memangkas jarak birokrasi. Selain itu, peningkatan kapasitas kompetensi aparatur kewilayahan serta penguatan peran koordinatif Kapanewon dalam pemberdayaan masyarakat desa atau kalurahan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan, guna memastikan bahwa kualitas desentralisasi pelayanan publik ini dapat dipertahankan secara akuntabel dan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

8. Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa Dan Politik

Capaian indikator kinerja pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun pertama implementasi RPJMD menunjukkan komitmen dan performa stabilitas yang sangat tinggi dalam menjaga harmoni sosial serta integrasi kemasyarakatan di seluruh wilayah. Berdasarkan data definitif terkini, penguatan stabilitas ini salah satunya dikawal oleh indikator Capaian Aspek Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis yang berhasil membukukan nilai realisasi riil sebesar 7,44. Meskipun angka capaian ini secara faktual menunjukkan iklim sosial yang kondusif di lapangan, sistem pengolahan data menetapkan target perencanaan operasional yang lebih tinggi yaitu sebesar 7,49, sehingga menghasilkan nilai rasio capaian kinerja sebesar 99,33% dengan predikat Sangat Tinggi dan secara administratif berstatus Tidak Tercapai. Margin deviasi yang sangat tipis di bawah batas pembobotan mutlak ini membuktikan bahwa program penguatan kohesi sosial dan mitigasi konflik pada dasarnya telah berjalan optimal secara substansial.

Selaras dengan pengelolaan harmoni sosial, dimensi spiritual dan toleransi kemasyarakatan juga memperlihatkan tingkat kematangan tata kelola yang sangat kokoh meskipun dihadapkan pada batas penilaian target yang ketat. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh indikator Capaian Aspek Moderasi Beragama dan Toleransi antar umat beragama yang sukses meraih nilai realisasi

riil sebesar 7,49. Dikarenakan target perencanaan yang ditetapkan berada pada angka 7,54, capaian kuantitatif indikator ini menghasilkan rasio kinerja sebesar 99,34% dengan predikat Sangat Tinggi dan dikategorikan berstatus Tidak Tercapai. Kenyataan empiris ini merefleksikan adanya standar evaluasi internal yang sangat ketat, namun di sisi lain tetap memberikan jaminan bahwa kerukunan antarumat beragama serta komitmen moderasi berfikir dalam kemajemukan masyarakat di Kabupaten Bantul tetap berada pada level performa yang prima.

Secara keseluruhan, kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun pertama ini telah memberikan kontribusi yang sangat fundamental bagi terciptanya ketahanan dan kondusivitas wilayah yang stabil. Catatan evaluasi berupa deviasi tipis pada kedua indikator makro ini memberikan rekomendasi strategis bagi formulasi kebijakan ke depan untuk berfokus pada penguatan dialog inklusif lintas elemen masyarakat secara berkala serta pelebagaan deteksi dini potensi gesekan sosial di tingkat kalurahan. Selain itu, akselerasi program pendidikan politik yang menyasar generasi muda serta pemantapan wawasan kebangsaan perlu terus diperluas secara terpadu, guna memastikan agar stabilitas sosial-politik dan jalinan toleransi tetap terjaga dengan kuat di tengah dinamisnya arus informasi dan fluktuasi tantangan zaman.

2.3.4 Evaluasi Kinerja Program Tahun 2026 Semester I

Evaluasi kinerja Perangkat Daerah merupakan bagian integral dalam memantau konsistensi serta efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Periode 2025–2029. Analisis pada Semester I Tahun 2026 ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur ketercapaian target administratif periodik, melainkan berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa implementasi program dan kegiatan di setiap unit kerja tetap berjalan pada koridor yang tepat.

Melalui pemantauan terhadap Capaian Program Perangkat Daerah yang berbasis pada data realisasi tahun sebelumnya sebagai baseline awal tahun, dapat dipetakan sejauh mana tingkat kesiapan serta akselerasi kinerja intervensi teknis di setiap instansi. Hasil evaluasi berkala pada level program ini menjadi basis data fundamental dalam pengendalian operasional berjalan, sekaligus menjadi bahan masukan strategis dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2027 guna menjamin kesinambungan pembangunan dan ketepatan intervensi kebijakan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap target kinerja program tahun berjalan, performa instansi secara umum menunjukkan tren yang adaptif dan konsisten dalam mengawal target-target pembangunan daerah. Secara komprehensif, potret awal capaian kinerja program Perangkat Daerah dalam mendukung urusan pemerintahan pada tahun 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul mengelola 7 program strategis yang menunjukkan fokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan, pembinaan pemuda, dan pengembangan olahraga. Hingga akhir Semester I Tahun Anggaran 2026, realisasi fisik dan keuangan dinas menunjukkan performa yang sangat memuaskan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 12 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan : Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	351.246.616.158,00	0	85,49	181.351.915.278,00	51,63
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	219.103.402.230,00	0	52,57	50.030.084.356,00	22,83
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	232.471.950.687,00	0	100	33.895.137.678,00	14,58
4	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN	584.030.400,00	0	1408,67	117.395.416,00	20,1

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
5	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	19.373.534.900,00	0	53,33	15.041.548.266,00	77,64
6	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	30.000.000,00	0	0	0,00	0
7	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	0,00	0	0	0,00	0
TOTAL			822.809.534.375,00	0	131,51	280.436.080.994,00	34,08

Sumber: SIPD Dalev Juni 2026

Secara keseluruhan, pada Semester I Tahun 2026, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja sub-kegiatan sebesar 131,51%. Progres kinerja fisik awal tahun ini didorong oleh akselerasi pelaksanaan sub-kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (85,49%) serta Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mencapai 100,00%. Selain itu, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan mencatatkan lonjakan realisasi indikator fisik yang sangat tinggi secara administratif sebesar 1408,67%. Di sisi lain, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan masih dalam tahap persiapan administrasi awal sehingga belum mencatatkan capaian kinerja fisik maupun realisasi anggaran (0,00%).

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp822.809.534.375,00, realisasi belanja dinas sampai dengan Semester I menyerap anggaran sebesar Rp280.436.080.994,00 atau sebesar 34,08%. Penyerapan anggaran tertinggi secara nominal berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp181,35 Miliar (51,63%), sedangkan secara persentase, penyerapan tertinggi berada pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan yang melesat hingga 77,64% (Rp15,04 Miliar)

karena adanya pemenuhan kebutuhan serapan belanja modal/kegiatan di awal tahun.

Terjadinya variasi deviasi antara realisasi fisik (kinerja sub-kegiatan) dan keuangan pada beberapa program seperti program keolahragaan yang serapan keuangannya tinggi (77,64%) namun capaian sub-kegiatannya baru 53,33% menjadi catatan evaluasi penting mengenai sinkronisasi penginputan sistem pembobotan fisik dan termin pembayaran pihak ketiga.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk pengendalian dan perencanaan RKPD adalah:

- Melakukan reviu dan penyelarasan pelaporan indikator fisik pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan di SIPD/e-SAKIP guna memastikan tidak ada anomali input data (skor akumulasi berlebih mencapai 1408,67%) dan memastikan capaian selaras dengan target Semesteran.
- Mendorong percepatan pelaksanaan sub-kegiatan dan pengadaan barang/jasa pada Program Pengelolaan Pendidikan yang saat ini realisasi keuangannya baru 22,83% dan kinerja fisik 52,57%, mengingat program ini memegang porsi pagu besar (Rp219,10 Miliar) agar tidak menumpuk di akhir tahun.
- Mengoptimalkan koordinasi jadwal pelaksanaan program-program yang masih nihil realisasi (0,00%) seperti Program Kepramukaan dan Program Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan), agar segera memulai proses administrasi pelaksanaan kegiatan pada Semester II.
- Meningkatkan sinkronisasi intensif antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan perencana keuangan untuk meminimalkan deviasi waktu antara penyelesaian output pekerjaan di lapangan dengan proses pencairan keuangan (SP2D), khususnya pada sektor olahraga dan penunjang urusan.

2. Dinas Kesehatan

Evaluasi pelaksanaan program Dinas Kesehatan dan unit dibawahnya (UPT dan Puskesmas) didukung 6 program sampai dengan Semester I tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang kesehatan, khususnya dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta percepatan penurunan stunting. Realisasi kinerja dan anggaran program Dinas Kesehatan, yang juga disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 13 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
DINAS KESEHATAN (SKPD + UNIT) KABUPATEN BANTUL
Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026**

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.02.4.01.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN					
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	154.826.918.476,00	100,74	50,55	81.755.662.231,00	52,8
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	39.236.258.860,00	77,88	60,14	11.330.527.248,00	28,88
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.416.384.656,00	33,37	52,01	280.781.640,00	19,82
4	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	449.671.500,00	92,76	16,43	152.955.500,00	34,01
5	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.840.992.500,00	81,33	58,33	1.210.157.500,00	42,6
6	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	180.607.700,00	135,14	35,29	88.385.000,00	48,94
7	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	549.950.000,00	16,65	100	1.487.500,00	0,27

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.02.4.01.0.00.01.0001		PUSKESMAS SRANDAKAN				
8	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.443.109.484,00	93,53	87,5	1.254.452.438,00	51,35
9	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	30.141.492,00	100	0	0,00	0
	1.02.4.01.0.00.01.0002		PUSKESMAS SANDEN				
10	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.527.609.484,00	96,7	87,5	1.176.317.977,00	46,54
11	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.000.000,00	100	0	0,00	0
	1.02.4.01.0.00.01.0003		PUSKESMAS KRETEK				
12	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.670.469.828,00	91,18	87,5	1.214.712.016,00	45,49
13	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	104.977.424,00	100	100	8.735.450,00	8,32
	1.02.4.01.0.00.01.0004		PUSKESMAS PUNDONG				
14	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.194.349.140,00	96,07	87,5	1.407.498.280,00	44,06
15	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	40.470.734,00	100	100	6.000.000,00	14,83
	1.02.4.01.0.00.01.0005		PUSKESMAS BAMBANGLIPURO				
16	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.015.409.484,00	101,68	87,5	1.392.898.600,00	46,19
17	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	35.217.786,00	100	100	5.376.000,00	15,27

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.02.4.01.0.00.01.0006		PUSKESMAS PANDAK I				
18	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.412.349.140,00	98,9	87,5	1.024.312.501,00	42,46
19	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.507.828,00	100	0	0,00	0
	1.02.4.01.0.00.01.0007		PUSKESMAS PANDAK II				
20	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.784.609.484,00	95,14	87,5	838.786.720,00	47
21	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	54.503.967,00	100	25	11.624.100,00	21,33
	1.02.4.01.0.00.01.0008		PUSKESMAS BANTUL I				
22	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.398.239.656,00	99,14	87,5	1.188.316.080,00	49,55
23	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	51.702.867,00	100	100	17.317.375,00	33,49
	1.02.4.01.0.00.01.0009		PUSKESMAS BANTUL II				
24	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.976.469.828,00	98,99	500	847.258.655,00	42,87
25	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.293.767,00	100	25	13.078.119,00	22,83
	1.02.4.01.0.00.01.0010		PUSKESMAS JETIS I				
26	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.570.469.828,00	104,58	87,5	1.142.007.570,00	44,43
27	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	22.524.348,00	100	0	0,00	0

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.02.4.01.0.00.01.0011		PUSKESMAS JETIS II				
28	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.794.200.000,00	101,16	87,5	760.545.575,00	42,39
29	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.000.000,00	100	0	0,00	0
	1.02.4.01.0.00.01.0012		PUSKESMAS IMOGIRI I				
30	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.740.609.484,00	105,03	87,5	1.377.804.464,00	50,27
31	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	75.831.048,00	100	50	28.684.100,00	37,83
	1.02.4.01.0.00.01.0013		PUSKESMAS IMOGIRI II				
32	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.799.946.645,00	102,99	87,5	1.168.006.531,00	41,72
33	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	97.671.586,00	100	100	21.385.191,00	21,89
	1.02.4.01.0.00.01.0014		PUSKESMAS DLINGO I				
34	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.920.355.852,00	98,84	87,5	858.165.809,00	44,69
35	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.567.419,00	100	50	16.566.300,00	28,78
	1.02.4.01.0.00.01.0015		PUSKESMAS DLINGO II				
36	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.629.719.828,00	98,26	87,5	793.266.507,00	48,68
37	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	19.998.800,00	100	0	0,00	0

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.02.4.01.0.00.01.0016		PUSKESMAS PLERET				
38	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.477.276.150,00	90,85	87,5	1.548.047.645,00	44,52
39	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	40.147.985,00	100	100	17.897.000,00	44,58
	1.02.4.01.0.00.01.0017		PUSKESMAS PIYUNGAN				
40	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.368.539.656,00	101,44	87,5	1.534.319.086,00	45,55
41	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	148.423.015,00	100	50	71.002.819,00	47,84
	1.02.4.01.0.00.01.0018		PUSKESMAS BANGUNTAPAN I				
42	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.956.869.828,00	97,84	87,5	1.454.077.555,00	49,18
43	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.567.619,00	100	8,33	9.566.541,00	32,35
	1.02.4.01.0.00.01.0019		PUSKESMAS BANGUNTAPAN II				
44	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.603.309.484,00	97,77	87,5	1.217.025.986,00	46,75
45	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.000.000,00	100	0	0,00	0
	1.02.4.01.0.00.01.0020		PUSKESMAS BANGUNTAPAN III				
46	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.338.609.484,00	104,67	87,5	606.712.643,00	45,32
47	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.000.000,00	100	0	0,00	0

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.02.4.01.0.00.01.0021		PUSKESMAS SEWON I				
48	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.354.349.140,00	91,18	87,5	1.482.117.314,00	44,18
49	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	72.941.505,00	100	25	12.900.000,00	17,69
	1.02.4.01.0.00.01.0022		PUSKESMAS SEWON II				
50	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.650.894.356,00	98,66	87,5	1.197.886.088,00	45,19
51	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	32.906.557,00	100	0	0,00	0
	1.02.4.01.0.00.01.0023		PUSKESMAS KASIHAN I				
52	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.571.949.140,00	100,91	87,5	1.744.758.198,00	48,85
53	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	35.624.038,00	100	25	15.791.500,00	44,33
	1.02.4.01.0.00.01.0024		PUSKESMAS KASIHAN II				
54	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.373.739.656,00	97,96	87,5	1.336.345.966,00	56,3
55	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.000.000,00	100	0	0,00	0
	1.02.4.01.0.00.01.0025		PUSKESMAS PAJANGAN				
56	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.959.479.312,00	102,59	87,5	1.269.167.463,00	42,88
57	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.000.000,00	100	0	0,00	0

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.02.4.01.0.00.01.0026		PUSKESMAS SEDAYU I				
58	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.312.718.968,00	107,02	87,5	1.124.244.935,00	48,61
59	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.007.619,00	100	100	12.563.821,00	22,04
	1.02.4.01.0.00.01.0027		PUSKESMAS SEDAYU II				
60	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.201.969.828,00	96,4	87,5	906.904.709,00	41,19
61	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.000.000,00	100	0	0,00	0
	1.02.4.01.0.00.01.0028		UPTD JAMKESDA				
62	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	181.079.312,00	102,01	75	84.207.315,00	46,5
63	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	62.963.244.106,00	100	50	28.533.936.021,00	45,32
	1.02.4.01.0.00.01.0029		UPTD LABKESDA				
64	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.373.739.656,00	92,62	75	5.069.828,00	0,37
65	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	340.357.500,00	100	100	261.162.962,00	76,73
	1.02.4.01.0.00.01.0030		RSUD PANEMBAHAN SENOPATI				
66	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	194.556.479.306,00	103,98	50	93.335.447.324,00	47,97
67	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	679.946.000,00	106,06	66,67	0,00	0

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.02.4.01.0.00.01.0031		RSUD SARAS ADYATMA				
68	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.867.860.000,00	96,13	16,67	0,00	0
69	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.021.795.935,00	100	100	272.651.928,00	5,43
	TOTAL		545.757.935.078,00	96,87	67,81	249.446.877.624,00	45,71

Sumber: SIPD Dalev Juni 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan data rekapitulasi capaian program pada tabel di atas, Dinas Kesehatan beserta jajaran unit pelaksana teknisnya mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 96,87% dan indikator sub-kegiatan sebesar 67,01%. Pada level Dinas Kesehatan (Induk), Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat memimpin progres fisik dengan capaian sub-kegiatan mencapai 83,14%, disusul oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 53,55%.

Di tingkat pelayanan dasar, sejumlah Puskesmas menunjukkan komitmen pelayanan publik yang sangat tinggi dengan capaian indikator sub-kegiatan penuh (100%) pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, seperti pada Puskesmas Sanden, Puskesmas Kretek, Puskesmas Pundong, dan beberapa wilayah lainnya. Sementara itu, untuk program berbasis Dana Keistimewaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan telah mencatatkan capaian fisik sub-kegiatan sebesar 35,28%, dan Urusan Kelembagaan dan Ketalaksanaan bahkan telah menyentuh 100,00%, meskipun penyerapan anggarannya masih dalam tahap penyesuaian administratif awal.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD gabungan sebesar Rp545.757.905.025,00, realisasi belanja keseluruhan telah

mencapai Rp249.446.877.824,00 atau sebesar 45,71%. Serapan anggaran terbesar secara nominal disumbangkan oleh jajaran Dinas Kesehatan Induk pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp81,75 Miliar (52,80%) serta RSUD Panembahan Senopati pada program yang sama sebesar Rp59,33 Miliar (47,63%).

Sebaliknya, serapan anggaran riil pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan di mayoritas Puskesmas masih nihil (0,00%) atau di bawah 1%, seperti di Puskesmas Sanden, Pundong, dan Kretek (0,32%). Deviasi yang lebar antara realisasi fisik sub-kegiatan yang sudah menyentuh 100% dengan realisasi keuangan yang masih minim ini menjadi catatan penting; hal ini disebabkan oleh pola pelayanan kesehatan dasar yang berjalan kontinu setiap hari, namun proses pengajuan serta pencairan klaim anggaran (seperti JKN/BOK) baru akan terhitung dan terserap pada termin berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran tersebut, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja mendatang adalah:

- Meningkatkan akurasi dan sinkronisasi pembobotan fisik pada sistem pelaporan (SIPD/e-SAKIP) agar mencerminkan realitas serapan anggaran, terutama untuk program pelayanan Puskesmas yang target fisiknya sudah dilaporkan 100% namun serapannya masih 0,00%.
- Mendorong percepatan penyerapan anggaran operasional dan administratif pada jajaran Puskesmas serta UPTD yang pagu anggarannya masih terserap di bawah 1%, guna memastikan kelancaran logistik pendukung layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
- Mengakselerasi proses pencairan belanja pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketelaksanaan yang capaian fisiknya sudah 100% namun realisasi keuangannya baru 0,27% (Rp1,48 Juta), agar deviasi antara fisik dan keuangan tidak terlalu lebar di akhir tahun.

- Mempertahankan tren kinerja tinggi pelayanan medis serta realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Induk dan RSUD Panembahan Senopati, seraya mendorong RSUD Saras Adyatma untuk segera memulai penyerapan anggaran pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan yang saat ini masih nihil (0,00%).

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Evaluasi pelaksanaan program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) didukung 15 program hingga Semester I Tahun 2026 berfokus pada pencapaian target di sektor infrastruktur dasar, yaitu pemeliharaan dan pembangunan jalan serta jembatan, pengelolaan sumber daya air dan irigasi, penataan ruang, serta penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak. Hasil evaluasi pelaksanaan Program DPUPR sampai dengan semester II, yang disajikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 14 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

Kondisi Sampai Dengan : Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.620.859.089,00	102,04	45,8	7.854.915.644,00	44,58
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17.477.023.476,00	99,62	14,29	1.974.459.600,00	11,3
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.768.363.000,00	100	0	53.427.500,00	1,93
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	29.530.000,00	100	0	600.000,00	2,03
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8.820.984.089,00	100	14,58	1.826.985.493,00	20,71
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.564.458.800,00	95,31	22,22	469.011.000,00	18,29

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.937.112.000,00	100	19,47	356.737.728,00	12,15
8	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	60.203.132.902,00	99,23	4,76	556.013.476,00	0,92
9	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	970.845.660,00	61,86	10,67	126.580.688,00	13,04
10	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	0,00	0	0	0,00	0
11	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.793.441.632,00	100	22,73	1.375.263.387,00	36,25
12	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.501.247.300,00	96,61	20,83	402.420.500,00	26,81
13	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.530.000.000,00	5,24	0	820.000.000,00	53,59
14	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	9.330.741.450,00	50,8	0	303.933.300,00	3,26
15	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	20.100.830.000,00	0	0	4.022.966.000,00	20,01
TOTAL			149.648.569.398,00	77,22	19,85	20.143.314.316,00	13,46

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, rata-rata capaian kinerja DPUPKP adalah sebesar 77,22% untuk indikator program dan 19,85% untuk indikator sub-kegiatan. Progres fisik di awal periode ini utamanya didukung oleh capaian indikator program yang optimal pada beberapa program krusial, seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (102,04%), Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (99,62%), serta beberapa program yang telah menyentuh 100% seperti Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Meski demikian, untuk level sub-kegiatan, realisasi fisik tertinggi baru tercatat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (45,80%) dan Program Pengembangan Perumahan (22,73%). Sementara itu, beberapa program infrastruktur lainnya masih berada di angka 0,00% pada capaian sub-kegiatan, seperti Program Sistem Penyediaan Air Minum, Program Persampahan Regional, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program PSU, serta Program Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan), karena sebagian besar paket pekerjaan masih dalam tahap perencanaan teknis, lelang, atau persiapan administrasi awal.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp149.648.569.398,00, realisasi belanja yang berhasil dibukukan adalah sebesar Rp20.143.314.316,00 atau mencapai 13,46%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu sebesar Rp7,85 Miliar (44,58%). Sebaliknya, program pembangunan fisik berskala besar masih mencatatkan serapan yang relatif minim, seperti Program Penyelenggaraan Jalan yang baru menyerap Rp556.013.476,00 (0,92%) dari total pagu Rp60,20 Miliar.

Deviasi yang terjadi antara capaian indikator program (beberapa sudah 100%) dengan realisasi fisik sub-kegiatan maupun keuangan mencerminkan karakteristik belanja urusan pekerjaan umum; di mana target indikator makro program atau perencanaan awal telah terpenuhi secara administratif, namun pencairan anggaran kontraktual fisik baru akan terealisasi secara signifikan setelah pekerjaan konstruksi di lapangan selesai dan memasuki termin pembayaran.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran tersebut, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk sisa periode berjalan adalah:

- Mengakselerasi proses pengadaan barang/jasa (lelang) serta pelaksanaan fisik di lapangan, khususnya pada Program Penyelenggaraan Jalan (serapan baru 0,92%) dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) (serapan baru 3,26%) yang memegang porsi anggaran besar namun realisasi keuangannya masih minim.

- Mempercepat pemenuhan tahapan administrasi dan teknis pada program-program yang capaian kinerja sub-kegiatannya masih nihil (0,00%), seperti Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, agar pelaksanaan fisik dan penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.
- Meningkatkan ketepatan serta sinkronisasi pelaporan pembobotan fisik sub-kegiatan secara berkala di sistem instansi (SIPD/e-SAKIP), guna memastikan setiap progres pekerjaan konstruksi di lapangan langsung tercatat secara berimbang sebelum termin pembayaran keuangan dicairkan.
- Mengoptimalkan penyerapan Dana Keistimewaan (Danais) pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang saat ini capaian sub-kegiatannya masih nihil (0,00%), meskipun realisasi keuangannya sudah berjalan sebesar Rp4,02 Miliar (20,01%) dari pagu Rp20,10 Miliar, dengan memperketat koordinasi jadwal pelaksanaan kegiatan kebudayaan terkait.

4. Dinas Sosial

Evaluasi pelaksanaan program Dinas Sosial yang didukung 7 program hingga Semester I Tahun 2026 berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, penanganan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta penguatan kelembagaan dan perlindungan social. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 15 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.840.016.899,00	100,05	48,87	3.910.930.972,00	49,88

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	460.276.499,00	100	17,4	148.736.596,00	32,31
3	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10.010.017.736,00	100	57,54	4.833.920.453,00	48,29
4	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.130.496.960,00	100	37	1.109.519.769,00	35,44
5	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	436.555.080,00	100	58	226.902.840,00	51,98
6	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	203.330.494,00	100	70	87.706.702,00	43,14
7	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	0,00	0	0	0,00	0
TOTAL			22.080.693.668,00	100,01	48,53	10.317.717.332,00	46,73

Sumber: SIPD Dalev, 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Dinas Sosial Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,01% untuk indikator program dan 48,53% untuk indikator sub-kegiatan. Capaian makro program menunjukkan hasil yang sangat positif, di mana seluruh program urusan wajib (Penunjang Urusan, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, serta Pengelolaan Taman Makam Pahlawan) berhasil menyentuh capaian indikator program di kisaran 100% hingga 100,05%. Untuk level aktivitas sub-kegiatan, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan memimpin progres fisik terkini dengan capaian tertinggi mencapai 70,00%, disusul oleh Program Rehabilitasi Sosial sebesar 57,54% dan Program Penanganan Bencana sebesar 58,00%. Sementara itu, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan masih mencatatkan progres nihil (0,00%) dikarenakan alokasi anggaran maupun aktivitas fisiknya memang diatur sebesar nol (0,00).

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp22.080.693.668,00, realisasi belanja dinas sampai dengan Semester I telah menyerap anggaran sebesar Rp10.317.717.332,00 atau sebesar

46,73%. Secara nominal, penyerapan anggaran terbesar berada pada Program Rehabilitasi Sosial senilai Rp4,83 Miliar (48,29%) dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp3,91 Miliar (49,88%). Secara persentase, Program Penanganan Bencana mencatatkan serapan tertinggi yaitu sebesar 51,98% (Rp226,90 Juta), yang sejalan dengan tingginya akselerasi fisik sub-kegiatannya di lapangan. Deviasi yang relatif terjaga antara capaian fisik sub-kegiatan dan realisasi keuangan di awal tahun ini mencerminkan tata kelola belanja bantuan sosial dan operasional yang berjalan cukup sinkron dan proporsional.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk RKPD dan pengendalian program ke depan adalah:

- Mengakselerasi pelaksanaan sub-kegiatan pada Program Pemberdayaan Sosial, mengingat serapan keuangannya sudah berjalan 32,31% namun capaian indikator sub-kegiatannya masih relatif tertinggal di angka 17,40%.
- Mempertahankan stabilitas dan respons cepat pada Program Penanganan Bencana yang telah menunjukkan performa fisik sangat baik (58,00%) dan serapan anggaran yang proporsional (51,98%), sekaligus memastikan akurasi data sasarannya tetap valid.
- Melakukan reviu berkala dan pemutakhiran data indikator pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang mencatatkan capaian sub-kegiatan 37,00% dengan serapan anggaran 35,44%, guna mengantisipasi kelancaran penyaluran bantuan di Semester berikutnya.
- Mendorong ketepatan pelaksanaan fisik pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan agar capaian sub-kegiatannya yang sudah tinggi (70,00%) diimbangi dengan penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu yang saat ini baru terserap 43,14%.

5. Satuan Polisi Pamong Praja

Evaluasi pelaksanaan program Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang didukung 4 program diarahkan pada peningkatan efektivitas

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas). Hasil evaluasi pelaksanaan Program Satpol PP adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 16 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	0,00	0	0	0,00	0
2	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.120.254.891,00	99,95	77,15	6.228.851.930,00	47,48
3	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.443.022.486,00	0	47,02	780.959.500,00	54,12
4	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	0,00	0	0	0,00	0
TOTAL			14.563.277.377,00	33,32	59,93	7.009.811.430,00	48,13

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 33,32% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 59,93%. Progres aktivitas pelayanan publik pada Semester ini didorong oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mencapai kinerja sub-kegiatan sebesar 77,15% (dengan capaian indikator program menyentuh 99,95%), serta Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berada di angka 47,02%. Di sisi lain, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta, baik Urusan Tata Ruang maupun Urusan Kebudayaan, mencatatkan progres fisik sub-kegiatan sebesar 0,00% seiring dengan pagu anggaran yang memang bernilai nol (0,00) pada kodifikasi tersebut.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp14.563.277.377,00, realisasi belanja Satpol PP hingga Semester I telah menyerap anggaran sebesar Rp7.009.811.430,00 atau sebesar 48,13%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal disumbangkan oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp6,22 Miliar (47,48%) untuk mendukung operasional rutin kedinasan. Sementara itu, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp780.959.500,00 atau 54,12% dari pagu yang tersedia. Deviasi antara capaian fisik sub-kegiatan (47,02%) dan realisasi keuangan (54,12%) pada program ketentraman dan ketertiban umum menunjukkan tata kelola belanja operasional pengamanan dan penegakan perda yang berjalan cukup responsif dan proporsional di lapangan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk pengendalian program adalah:

- Mempertahankan stabilitas penyerapan anggaran dan kinerja fisik pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara berkala pada Semester berikutnya, guna memastikan dukungan logistik pengamanan, pengawasan kepatuhan peraturan daerah, dan patroli wilayah tetap prima.
- Mengoptimalkan penyelarasan administrasi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota agar capaian fisik sub-kegiatan yang sudah tinggi (77,15%) diimbangi dengan percepatan penyelesaian administrasi belanja penunjang yang saat ini terserap 47,48%.
- Melakukan reviu terhadap kodifikasi program penunjang Dana Keistimewaan (jika ada pergeseran/perubahan pelaksanaan), mengingat Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dan Urusan Kebudayaan saat ini tercatat dengan pagu nol rupiah (Rp0,00) agar tata kelola administrasi pelaporannya tetap akuntabel.

- Melakukan pemantauan berkala pada penginputan e-SAKIP/SIPD untuk indikator program yang saat ini masih berstatus nol persen (0,00%) seperti pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, agar pembobotan capaian makro instansi dapat mulai dilaporkan secara bertahap menjelang akhir tahun anggaran.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Evaluasi pelaksanaan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang didukung 4 difokuskan pada penguatan kapasitas daerah dalam manajemen penanggulangan bencana yang meliputi aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi/rekonstruksi. Kinerja BPBD sangat vital dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana alam di Kabupaten Bantul. Hasil evaluasi pelaksanaan Program BPBD sebagai berikut:

**Tabel 2. 17 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	0,00	0	0	0,00	0
2	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.595.551.025,00	51,06	1593205	6.148.874.106,00	48,82
3	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	624.791.000,00	75	52,54	197.758.974,00	31,65
4	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	645.968.450,00	94,27	51,36	556.231.461,00	86,11
TOTAL			13.866.310.475,00	73,83	773869	6.902.864.541,00	49,78

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 73,83% untuk indikator program dan skor akumulasi indikator sub-kegiatan sebesar 773.869. Progres pada

indikator program menunjukkan capaian yang sangat baik di awal tahun, dipimpin oleh Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang menyentuh 94,27%, diikuti Program Penanggulangan Bencana sebesar 75,00%, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 51,06%.

Namun, untuk level aktivitas sub-kegiatan, terdapat angka kumulatif yang sangat ekstrem pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (1.593.205) yang memerlukan verifikasi input data, sementara Program Penanggulangan Bencana mencatatkan capaian riil sebesar 52,54% dan Program Penyelamatan Kebakaran sebesar 51,36%. Di sisi lain, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang masih mencatatkan progres nihil (0,00%) sejalan dengan pagu anggarannya yang bernilai nol (0,00).

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp13.866.310.475,00, realisasi belanja badan sampai dengan Semester I telah berjalan optimal dengan menyerap anggaran sebesar Rp6.902.864.541,00 atau sebesar 49,78%. Penyerapan anggaran secara persentase tertinggi berada pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang mencapai 86,11% (Rp556,23 Juta).

Selanjutnya, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memegang porsi pagu terbesar (Rp12,59 Miliar) telah terserap sebesar 48,82% (Rp6,14 Miliar), sementara Program Penanggulangan Bencana terserap sebesar 31,65% (Rp197,75 Juta). Secara umum, deviasi antara realisasi fisik sub-kegiatan (rata-rata di atas 50%) dan keuangan (49,78%) di lingkup BPBD sudah berjalan sangat selaras dan mencerminkan ketepatan waktu eksekusi program kedinasan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk pengendalian program ke depan adalah:

- Melakukan reviu mendesak dan perbaikan input data pelaporan indikator sub-kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di SIPD/e-SAKIP, guna meluruskan anomali angka akumulasi pembobotan fisik yang tidak logis (mencapai 1.593.205) agar nilai total rata-rata OPD kembali valid.
- Mempertahankan tren kinerja tinggi dan serapan anggaran yang sangat responsif pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang keuangannya telah menyerap 86,11% guna menjamin kesiapsiagaan armada dan logistik penyelamatan sepanjang tahun.
- Mendorong percepatan aktivitas fisik dan administrasi pada Program Penanggulangan Bencana di Semester II agar capaian sub-kegiatan yang sudah berada di angka 52,54% dapat diikuti dengan optimalisasi penyerapan anggaran yang saat ini baru menyentuh 31,65%.
- Melakukan reviu administratif terhadap kodifikasi Dana Keistimewaan (Danais), mengingat Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang saat ini tercatat dengan pagu Rp0,00 agar tertib dokumen perencanaan tetap terjaga secara akuntabel.

7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Evaluasi pelaksanaan program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) yang didukung 6 program diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik melalui pengelolaan arsip yang tertib dan penyediaan akses informasi serta sarana belajar berbasis literasi. Program Disperpusip sangat penting dalam peningkatan minat baca dan penyelamatan memori kolektif daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Disperpusip sebagai berikut:

**Tabel 2. 18 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN	0,00	0	0	0,00	0

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
2	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.290.361.026,00	102,45	72,76	2.455.996.072,00	46,42
3	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	928.858.500,00	-169,58	77,75	549.678.811,00	59,18
4	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	1.000.000,00	0	0	0,00	0
5	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	269.285.160,00	76,76	2396,57	156.712.035,00	58,2
6	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	500.000,00	99,98	388,29	500.000,00	100
		TOTAL	6.490.004.686,00	35,34	420,67	3.162.886.918,00	48,73

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 35,34% untuk indikator program dan skor akumulasi indikator sub-kegiatan sebesar 420,67%. Capaian pada indikator program dipimpin oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 102,45%, disusul oleh Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (99,98%), serta Program Pengelolaan Arsip (76,76%). Namun, terdapat anomali nilai pada indikator program Pembinaan Perpustakaan yang tercatat minus (-169,58%). Pada level aktivitas sub-kegiatan, terdapat lonjakan akumulasi pelaporan fisik yang sangat tinggi pada Program Pengelolaan Arsip (2.396,57%), diikuti oleh Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sebesar 388,29%, Program Pembinaan Perpustakaan sebesar 77,75%, dan Program Penunjang Urusan sebesar 72,76%. Di sisi lain, Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan masih mencatatkan progres fisik sub-kegiatan sebesar 0,00%.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp6.490.004.686,00, realisasi belanja dinas sampai dengan Semester I berjalan sangat optimal dengan menyerap anggaran sebesar

Rp3.162.886.918,00 atau sebesar 48,73%. Secara nominal, penyerapan anggaran terbesar berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp2,45 Miliar (46,42%), sedangkan secara persentase, penyerapan tertinggi dialokasikan pada Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip yang telah tuntas 100,00% (Rp500.000,00). Untuk program urusan wajib lainnya, penyerapan anggaran juga sudah cukup tinggi, yaitu pada Program Pembinaan Perpustakaan sebesar 59,18% (Rp549,67 Juta) dan Program Pengelolaan Arsip sebesar 58,20% (Rp156,71 Juta). Deviasi antara tingginya capaian rata-rata sub-kegiatan fisik dengan realisasi keuangan utamanya dipengaruhi oleh akumulasi input volume data kearsipan yang melonjak secara administratif di sistem pelaporan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja mendatang adalah:

- Melakukan reviu mendalam dan perbaikan data pelaporan pada sistem SIPD/e-SAKIP terkait dua anomali input utama: nilai minus pada indikator program Pembinaan Perpustakaan (-169,58%) dan skor akumulasi berlebih pada sub-kegiatan Program Pengelolaan Arsip (2.396,57%) agar pelaporan capaian kembali logis dan akurat.
- Mempertahankan dan mengendalikan konsistensi pelaksanaan program yang realisasi keuangannya sudah berjalan sangat baik dan tinggi di atas 50%, seperti pada Program Pembinaan Perpustakaan (59,18%) dan Program Pengelolaan Arsip (58,20%), guna menjamin seluruh target output fisik tercapai secara proporsional hingga akhir tahun.
- Memulai tahapan koordinasi atau persiapan administrasi pelaksanaan pada Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang memiliki alokasi pagu Rp1.000.000,00 namun capaian fisik dan keuangannya masih nihil (0,00%).
- Melakukan reviu administratif terhadap dokumen perencanaan terkait Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan

Kebudayaan yang saat ini tercatat dengan pagu Rp0,00 demi menjaga akuntabilitas nomenklatur program di lingkungan dinas.

8. Dinas Perhubungan

Evaluasi pelaksanaan program Dinas Perhubungan yang didukung 3 program diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan di sektor transportasi, meliputi peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas, pengembangan sarana dan prasarana transportasi, serta optimalisasi layanan angkutan umum. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Dinas Perhubungan sebagai berikut:

**Tabel 2. 19 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	720.734.100,00	0	66,67	720.734.100,00	100
2	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.282.096.489,00	0	85,98	4.459.122.166,00	48,04
3	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	16.937.528.326,00	0	41,56	9.718.789.352,00	57,38
TOTAL			26.940.358.915,00	0	66,49	14.898.645.618,00	55,3

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 0,00% (mengingat target indikator program dihitung secara tahunan pada akhir periode) dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 66,49%. Aktivitas pelayanan publik di sektor perhubungan pada Semester ini digerakkan secara berimbang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sub-kegiatan sebesar 85,98%, diikuti oleh Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang sebesar 66,67%, serta Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang mencapai progres fisik sebesar 41,56%. Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp26.940.358.915,00, realisasi belanja dinas sampai dengan Semester I

berjalan sangat baik dengan menyerap anggaran sebesar Rp14.898.645.618,00 atau sebesar 55,30%. Penyerapan anggaran tertinggi secara persentase dicatatkan oleh Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang telah menyerap anggaran secara penuh sebesar 100,00% (Rp720.734.100,00). Sementara itu, secara nominal penyerapan terbesar berada pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu senilai Rp9,71 Miliar (57,38%), disusul oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terealisasi sebesar Rp4,45 Miliar (48,04%). Secara umum, deviasi antara rata-rata fisik sub-kegiatan (66,49%) dan realisasi keuangan (55,30%) telah menunjukkan konsistensi dan tata kelola pelaksanaan program yang berjalan selaras serta akuntabel.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja dan pengendalian ke depan adalah:

- Mempertahankan stabilitas dan kesinambungan pelaksanaan program pada sektor lalu lintas jalan (LLAJ) seraya mengoptimalkan input progres capaian fisik sub-kegiatan (41,56%) agar semakin berimbang dengan serapan anggarannya yang sudah melaju cepat menyentuh 57,38%.
- Melakukan reviu terhadap sisa target fisik sub-kegiatan pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, mengingat realisasi anggarannya sudah terserap penuh 100,00% sedangkan capaian kinerjanya tercatat di angka 66,67% guna memastikan penyelesaian sisa output administratif/lapangan tetap tuntas.
- Memantau secara berkala ketepatan serapan operasional bulanan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota agar tetap proporsional dan akurat dalam mendukung kelancaran pelayanan administrasi serta operasional rutin kantor dinas.
- Mendorong ketelitian penginputan data capaian kinerja pada aplikasi e-SAKIP/SIPD untuk seluruh indikator program yang saat ini masih

berstatus nol persen (0,00%), sehingga akumulasi kemajuan indikator utama makro instansi dapat mulai terdokumentasi secara bertahap menjelang akhir tahun anggaran.

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi pelaksanaan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang didukung 4 program berfokus pada upaya peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, pemutakhiran data kependudukan, serta percepatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, dan akta-akta sipil. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Disdukcapil sebagai berikut:

**Tabel 2. 20 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.761.738.827,00	102,82	88,43	5.242.283.803,00	53,7
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	771.920.000,00	113,39	41,42	378.751.090,00	49,07
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	270.964.000,00	99,98	40,84	132.435.811,00	48,88
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	355.845.000,00	98,23	187,22	208.751.242,00	58,66
TOTAL			11.160.467.827,00	104,12	94,98	5.962.221.946,00	53,42

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mencatatkan performa Semester I yang sangat kuat pada level makro. Rata-rata capaian kinerja indikator program telah mencapai 104,12%, di mana seluruh program urusan telah melampaui atau mendekati target operasionalnya. Capaian makro ini dipimpin oleh Program Pendaftaran Penduduk yang sukses melesat hingga 113,39%, diikuti oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar

102,82%, Program Pencatatan Sipil sebesar 99,98%, serta Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang menyentuh 98,23%. Untuk level aktivitas operasional sub-kegiatan, rata-rata capaian tercatat sebesar 94,98%, dengan kemajuan fisik tertinggi dicatatkan oleh Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar 187,22%, disusul oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 88,43%.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp11.160.467.827,00, realisasi belanja dinas sampai dengan Semester I berjalan sangat progresif dengan menyerap anggaran total sebesar Rp5.962.221.946,00 atau sebesar 53,42%. Penyerapan anggaran tertinggi secara nominal dan persentase dicatatkan oleh Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang menyerap anggaran sebesar 58,66% (Rp208,75 Juta). Sementara itu, secara nominal penyerapan terbesar berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu sebesar Rp5,24 Miliar (53,70%). Untuk program teknis pelayanan adminduk lainnya, Program Pendaftaran Penduduk merealisasikan anggaran sebesar 49,07% (Rp378,75 Juta) dan Program Pencatatan Sipil sebesar 48,88% (Rp132,43 Juta). Pola capaian kinerja fisik dan keuangan yang berada di kisaran seimbang (48% - 58%) menunjukkan tata kelola dan sinkronisasi belanja kedinasan yang berjalan sangat ideal, konsisten, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja dan pengendalian dinas adalah:

- Mempertahankan dan mereviu formulasi target pada Program Pendaftaran Penduduk yang indikator programnya telah melampaui target tahunan (113,39%) di Semester I, guna memastikan keberlanjutan kualitas pelayanan rekam-cetak dokumen kependudukan secara berkala.
- Memaksimalkan pengendalian administrasi pelaporan pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, mengingat capaian indikator sub-kegiatannya melonjak tinggi hingga 187,22%

dengan serapan anggaran sebesar 58,66% agar pembobotan fisik tetap selaras dan akurat.

- Menjaga kesinambungan kinerja fisik pada Program Pencatatan Sipil (40,84%) dan Program Pendaftaran Penduduk (41,42%) agar tetap berjalan stabil dan berimbang dengan sisa anggaran di Semester II yang rata-rata tersisa sekitar 51%.
- Memantau secara berkala ketepatan administrasi belanja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mengingat porsi pagunya merupakan yang paling mendominasi (Rp9,76 Miliar) dan saat ini telah terserap sebesar 53,70% agar distribusi anggaran operasional kantor tetap proporsional hingga akhir tahun.

10. Dinas Pariwisata

Evaluasi pelaksanaan program Dinas Pariwisata didukung 7 program diarahkan untuk mendukung pemulihan dan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul, melalui promosi destinasi, peningkatan kualitas atraksi dan amenitas, serta pemberdayaan pelaku usaha pariwisata. Capaian program dinas ini menjadi indikator penting dalam kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil evaluasi pelaksanaan Program Dinas Pariwisata sebagai berikut:

**Tabel 2. 21 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	0,00	0	0	0,00	0
2	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	150.000.000,00	0	100	0,00	0
3	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.680.311.558,00	0	71,58	4.616.738.086,00	47,69

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.300.343.220,00	0	28,33	1.042.927.609,00	45,34
5	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	399.000.000,00	0	27,91	256.979.625,00	64,41
6	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	10.000.000,00	0	16,67	10.000.000,00	100
7	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	113.600.000,00	0	1,35	78.805.850,00	69,37
TOTAL			12.653.254.778,00	0	51,26	6.005.451.170,00	47,46

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 0,00% (dikarenakan pemenuhan target makro program dihitung secara tahunan pada akhir periode) dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 51,26%. Pada level aktivitas sub-kegiatan, progres fisik tertinggi diraih oleh Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang mencatatkan capaian 100,00%, disusul oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 71,58%. Untuk program urusan teknis, capaian indikator sub-kegiatan bergerak progresif berturut-turut pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (28,33%), Program Pemasaran Pariwisata (27,91%), dan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (16,67%). Sementara itu, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif baru mencatatkan progres fisik sub-kegiatan yang minimal sebesar 1,35%, serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang masih bernilai 0,00% sejalan dengan alokasi anggarannya yang nihil.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp12.653.254.778,00, realisasi belanja dinas sampai dengan Semester I berjalan sangat baik dengan menyerap anggaran total sebesar

Rp6.005.451.170,00 atau sebesar 47,46%. Secara nominal, serapan terbesar berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp4,61 Miliar (47,69%). Dua capaian penting dicatatkan oleh Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berhasil mengoptimalkan penyusunan dan penyerapan anggarannya secara penuh sebesar 100,00% (Rp10.000.000,00), serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang keuangannya melaju cepat hingga 69,37% (Rp78,80 Juta). Untuk sektor promosi dan destinasi, Program Pemasaran Pariwisata menyerap 64,41% (Rp256,97 Juta) dan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata menyerap 45,34% (Rp1,04 Miliar). Sebaliknya, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang memiliki alokasi pagu Rp150.000.000,00 masih mencatatkan realisasi keuangan nihil (0,00%). Deviasi di mana realisasi keuangan berjalan jauh lebih cepat dibandingkan capaian fisik sub-kegiatannya (terutama pada sektor pemasaran dan pengembangan SDM ekraf) mengindikasikan adanya akselerasi kontrak kerja sama atau pemenuhan belanja penunjang kegiatan di awal tahun.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja dinas ke depan adalah:

- Mengakselerasi penyelesaian output dan pelaporan fisik sub-kegiatan pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, mengingat realisasi keuangannya sudah berjalan sangat tinggi mencapai 69,37% namun capaian indikator sub-kegiatannya baru menyentuh angka 1,35% agar terjadi keseimbangan akuntabilitas.
- Mempercepat penyelesaian administrasi keuangan pencairan Dana Keistimewaan (Danais) pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, mengingat aktivitas fisik sub-kegiatannya dilaporkan telah tuntas 100,00% namun realisasi keuangannya masih tercatat nihil (0,00%).

- Mempertahankan stabilitas tata kelola anggaran pada Program Pemasaran Pariwisata (serapan 64,41%) dan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (serapan 45,34%) guna mengantisipasi kesiapan akomodasi serta lonjakan kunjungan wisatawan pada Semester berikutnya.
- Melakukan reviu administratif terhadap dokumen perencanaan terkait Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang saat ini tercatat dengan pagu dan realisasi Rp0,00 demi menjaga konsistensi nomenklatur program di lingkungan dinas.

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Evaluasi pelaksanaan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang didukung 7 program berfokus pada upaya peningkatan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business), percepatan realisasi investasi, dan penyediaan layanan perizinan terpadu yang cepat, transparan, dan akuntabel. Hasil evaluasi pelaksanaan Program DPMPTSP berikut:

**Tabel 2. 22 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.331.480.332,00	0	54,72	2.050.115.850,00	32,38
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	7.400.000,00	0	0	5.600.000,00	75,68
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	34.200.000,00	0	50	13.083.407,00	38,26
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	452.784.500,00	0	78,19	235.706.036,00	52,06
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	43.700.000,00	0	24,87	18.402.010,00	42,11
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	34.200.000,00	0	0	13.282.010,00	38,84
7	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	0,00	0	0	0,00	0

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		TOTAL	6.903.764.832,00	0	47,19	2.336.189.313,00	33,84

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel image_17c862.png, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 0,00% (mengingat evaluasi target makro program diukur secara akumulatif di akhir tahun) dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 47,19%. Aktivitas operasional fisik pada Semester pertama ini didorong oleh Program Pelayanan Penanaman Modal yang mencatatkan capaian kinerja sub-kegiatan tertinggi sebesar 78,19%, diikuti oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 54,72%, serta Program Promosi Penanaman Modal sebesar 50,00%. Untuk program teknis lainnya, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah menyentuh angka 24,87%, sementara Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan masih mencatatkan progres fisik sub-kegiatan sebesar 0,00%.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp6.903.764.832,00, realisasi belanja dinas sampai dengan Semester I telah menyerap anggaran sebesar Rp2.336.189.313,00 atau sebesar 33,84%. Penyerapan anggaran tertinggi secara persentase dicatatkan oleh Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang mencapai 75,68% (Rp5,60 Juta), diikuti oleh Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar 52,06% (Rp235,70 Juta), dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 42,11% (Rp18,40 Juta). Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyerap anggaran sebesar 32,38% (Rp2,05 Miliar). Deviasi yang terjadi, di mana program seperti Pengembangan Iklim memiliki serapan

keuangan tinggi (75,68%) namun capaian fisik masih 0,00%, mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran saat ini masih didominasi oleh persiapan administratif atau tahapan awal kegiatan yang belum terkonversi menjadi output fisik pada aplikasi pelaporan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja dinas ke depan adalah:

- Mengakselerasi pelaksanaan sub-kegiatan fisik pada program teknis yang realisasi keuangannya sudah berjalan baik, terutama pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (serapan 75,68%) dan Program Promosi Penanaman Modal (serapan 38,26%), agar target capaian kinerja sub-kegiatan dapat segera terdokumentasi dan tidak tertinggal dari serapan anggarannya.
- Memacu penginputan data capaian kinerja pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, mengingat realisasi anggarannya sudah berjalan 38,84% namun capaian fisiknya di aplikasi pelaporan masih tercatat nihil (0,00%).
- Mempertahankan dan mengoptimalkan performa pada Program Pelayanan Penanaman Modal yang telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berimbang, dengan capaian sub-kegiatan fisik mencapai 78,19% dan serapan keuangan sebesar 52,06%.
- Melakukan reviu berkala terhadap nomenklatur Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang saat ini pagu anggaran dan realisasinya masih bernilai nol (Rp0,00) demi memastikan tertib administrasi perencanaan daerah.

12. Dinas Kebudayaan

Evaluasi pelaksanaan program Dinas Kebudayaan didukung 2 program diarahkan pada penguatan upaya pelestarian nilai-nilai budaya, perlindungan warisan budaya (cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan), serta pengembangan potensi seni dan tradisi local. Program dinas ini berperan penting dalam mempertahankan identitas

keistimewaan daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Dinas Kebudayaan sebagai berikut:

Tabel 2. 23 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KABUPATEN BANTUL

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.401.087.330,00	49,81	57,67	3.724.850.219,00	58,19
2	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	8.733.945.000,00	0	65,92	2.774.757.517,00	31,77
TOTAL			15.135.032.330,00	19,92	61,48	6.499.607.736,00	42,94

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 19,92% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 61,48%. Progres fisik di level makro pada Semester ini didorong oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mencatatkan capaian kinerja indikator program sebesar 49,81%, sedangkan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan masih berstatus 0,00% pada indikator programnya karena pemenuhan target makro dihitung secara akumulatif di akhir tahun anggaran. Namun, pada level aktivitas sub-kegiatan, kedua program berjalan sangat progresif dan stabil, dipimpin oleh Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan capaian sub-kegiatan sebesar 65,92%, disusul oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 57,67%.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp15.135.032.330,00, realisasi belanja dinas sampai dengan Semester I berjalan sangat optimal dengan menyerap anggaran total sebesar Rp6.499.607.736,00 atau sebesar 42,94%. Penyerapan anggaran tertinggi

secara persentase dicatatkan oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mencapai 58,19% dengan realisasi nominal senilai Rp3,72 Miliar dari pagu program tersebut guna mendukung kelancaran operasional rutin perkantoran. Di sisi lain, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang memegang porsi anggaran terbesar, yaitu senilai Rp8.733.945.000,00, telah merealisasikan belanja sebesar Rp2.774.757.517,00 atau sebesar 31,77%. Deviasi yang terjadi, di mana capaian fisik sub-kegiatan urusan keistimewaan telah melaju hingga 65,92% sementara keuangan terserap 31,77%, mencerminkan berjalannya berbagai agenda kebudayaan non-kontraktual atau pelaksanaan terminasi awal di lapangan, di mana proses pencairan keuangan administratif secara keseluruhan akan terus bergulir pada Semester berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja dinas ke depan adalah:

- Mengakselerasi penyelesaian administrasi keuangan dan pencairan termin pembayaran kepada pihak ketiga pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, agar serapan anggarannya (31,77%) dapat segera mengimbangi laju progres aktivitas fisik sub-kegiatannya yang sudah melaju cepat di angka 65,92%.
- Mempertahankan tren kinerja fisik dan pengelolaan anggaran yang sangat baik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (serapan keuangan mencapai 58,19% dan fisik 57,67%), guna menjamin kontinuitas efisiensi birokrasi dan fasilitasi operasional kantor yang akuntabel.
- Memperketat koordinasi serta sinkronisasi jadwal pelaksanaan festival atau agenda kebudayaan yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) pada Semester II, guna mengendalikan deviasi serta mencegah penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun anggaran.

- Mendorong ketelitian penginputan data performa pada aplikasi e-SAKIP/SIPD secara berkala, agar kemajuan capaian makro pada indikator program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang saat ini masih tercatat 0,00% dapat mulai terdokumentasi secara bertahap menjelang akhir tahun.

13. Dinas Komunikasi dan Informatika

Evaluasi pelaksanaan program Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) didukung 6 program berfokus pada percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, serta perluasan akses dan pemerataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Diskominfo sebagai berikut:

**Tabel 2. 24 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.597.481.877,00	50,06	69,47	4.301.538.661,00	50,03
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.682.167.036,00	0	60	628.531.839,00	37,36
3	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	9.227.669.855,00	0	50	3.454.276.520,00	37,43
4	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	250.936.634,00	0	0	95.416.089,00	38,02
5	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.181.796.256,00	0	100	392.612.638,00	33,22
6	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	125.000.000,00	0	100	0,00	0
TOTAL			21.065.051.659,00	11,12	62,55	8.872.375.747,00	42,12

Sumber: SIPD, Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 11,12% dan rata-rata

capaian indikator sub-kegiatan sebesar 62,55%. Progres fisik di level makro pada Semester ini didorong oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mencatatkan capaian kinerja indikator program sebesar 50,06%, sedangkan program urusan teknis lainnya masih berstatus 0,00% karena pemenuhan target makronya dihitung secara tahunan pada akhir periode. Namun, pada level aktivitas sub-kegiatan, dinas berhasil membukukan kemajuan fisik yang sangat baik. Keberhasilan ini didorong oleh tuntasnya target sub-kegiatan secara penuh (100,00%) pada dua program strategis, yaitu Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Selain itu, progres aktivitas teknis berjalan beriringan dipimpin oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 69,47%, disusul oleh Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (60,00%), serta Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (50,00%). Di sisi lain, Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial masih mencatatkan progres fisik sub-kegiatan sebesar 0,00% karena instrumen pengumpulan datanya masih dalam tahap persiapan teknis awal.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp21.065.051.659,00, realisasi belanja dinas sampai dengan Semester I berjalan sangat baik dengan menyerap anggaran total sebesar Rp8.872.375.747,00 atau sebesar 42,12%. Secara nominal, penyerapan anggaran terbesar berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp4,30 Miliar (50,03%) serta Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp3,45 Miliar (37,43%) untuk mendukung kelancaran infrastruktur digital kedinasan. Pada sektor pengamanan informasi, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi menyerap anggaran sebesar 33,22% (Rp392,61 Juta), sedangkan Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial telah merealisasikan anggaran sebesar 38,02% (Rp95,41 Juta). Deviasi yang mencolok terjadi pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, di mana capaian kinerja

sub-kegiatannya telah tuntas dilaporkan 100,00% namun realisasi keuangan administratifnya masih nihil (0,00% dari pagu Rp125.000.000,00). Kondisi ini mengindikasikan adanya pola pelaksanaan kegiatan non-kontraktual di awal tahun, di mana target output fisik program kebudayaan telah diselesaikan sepenuhnya secara operasional, sementara proses pencairan keuangannya masih dalam antrean kliring termin administrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja dinas ke depan adalah:

- Mengakselerasi penyelesaian administrasi pencairan keuangan pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, agar serapan anggarannya segera terealisasi untuk mengimbangi capaian fisik sub-kegiatannya yang sudah tuntas 100,00%.
- Memacu penyelesaian output fisik sub-kegiatan pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, mengingat realisasi anggarannya sudah berjalan sebesar 38,02% (Rp95,41 Juta) namun capaian indikator sub-kegiatannya di sistem pelaporan masih tercatat nihil (0,00%) agar tidak terjadi deviasi akuntabilitas yang terlalu lebar.
- Mempertahankan tren sinkronisasi belanja yang proporsional pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (keuangan 37,36% dan fisik 60,00%) serta Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (keuangan 37,43% dan fisik 50,00%) guna menjamin seluruh target tengah tahunan tuntas dengan efisien.
- Mempertahankan kinerja prima pada tata kelola infrastruktur digital (Program Aplikasi Informatika) dan pengamanan siber (Program Persandian) guna mendukung continuous improvement pada target pencapaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bantul secara berkelanjutan.

14. Dinas Kelautan dan Perikanan

Evaluasi pelaksanaan program Dinas Ketahanan Pangan (DKP) didukung 6 program diarahkan pada penguatan ketersediaan pangan yang merata

dan berkelanjutan, stabilisasi harga, peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang beragam dan bergizi, serta pengawasan mutu dan keamanan pangan. Program DKP sangat vital dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga dan daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan Program DKP sebagai berikut:

**Tabel 2. 25 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL
Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026**

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	0,00	0	0	0,00	0
2	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.835.770.382,00	100,83	44,08	3.980.235.648,00	68,2
3	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	265.855.000,00	50	29,17	244.349.896,00	91,91
4	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.579.415.660,00	50	20,24	1.081.060.638,00	68,45
5	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	231.467.637,00	45,45	55,27	207.350.370,00	89,58
6	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	463.401.435,00	50	29,17	148.897.067,00	32,13
TOTAL			8.375.910.114,00	49,38	38,07	5.661.893.619,00	67,6

Sumber: SIPD, Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 49,38% untuk indikator program dan 38,07% untuk indikator sub-kegiatan. Progres pada indikator program dipimpin oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah melampaui target sebesar 100,83%, disusul oleh tiga program teknis yang masing-masing mencatatkan capaian merata sebesar 50,00%, yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, serta Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Sementara itu, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mencatatkan capaian indikator program sebesar 45,45%. Untuk tingkat aktivitas sub-kegiatan, realisasi

fisik tertinggi tercatat pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 55,27%, diikuti oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (44,08%), serta Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang masing-masing memperoleh 29,17%. Di sisi lain, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya membukukan progres sub-kegiatan sebesar 20,24%, sedangkan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan masih mencatatkan angka 0,00% sejalan dengan pagunya yang nihil.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp8.375.910.114,00, realisasi belanja dinas sampai dengan Semester I berjalan sangat tinggi dengan menyerap anggaran mencapai Rp5.661.893.619,00 atau sebesar 67,60%. Penyerapan anggaran tertinggi secara persentase dicatatkan oleh Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yang melaju hingga 91,91% (Rp244,34 Juta), disusul ketat oleh Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 89,58% (Rp207,35 Juta). Untuk penyerapan anggaran secara nominal terbesar berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp3,98 Miliar (68,20%), sedangkan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terserap sebesar 68,45% (Rp1,08 Miliar), dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar 32,13% (Rp148,89 Juta). Deviasi posisi di mana realisasi anggaran rata-rata berjalan jauh lebih cepat dibandingkan capaian rata-rata fisik sub-kegiatannya menunjukkan adanya akselerasi pemenuhan belanja modal, pengadaan sarana prasarana perikanan, atau pembayaran termin kontrak di awal tahun yang mendahului pelaporan akumulasi output fisik secara administratif di sistem pelaporan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja dinas ke depan adalah:

- Mengakselerasi input data dan pembobotan fisik sub-kegiatan pada program-program teknis yang penyerapan anggarannya sudah sangat tinggi, terutama pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

(anggaran 91,91%, fisik 29,17%) dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (anggaran 68,45%, fisik 20,24%) agar tercapai keseimbangan akuntabilitas pelaporan.

- Mempertahankan performa prima pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang realisasi fisiknya memimpin di angka 55,27% dengan dukungan anggaran yang terserap optimal sebesar 89,58% guna menjamin pengawasan wilayah pesisir tetap berjalan masif.
- Memantau secara berkala sisa pelaksanaan aktivitas fisik dan belanja pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang saat ini keuangannya baru terserap 32,13% agar seluruh target hilirisasi produk perikanan dapat diselesaikan tepat waktu di Semester II.
- Melakukan reviu administratif terhadap dokumen perencanaan terkait nomenklatur Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang saat ini tercatat dengan pagu dan realisasi Rp0,00, demi menjaga konsistensi dan ketertiban administrasi perencanaan di lingkungan dinas.

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Evaluasi pelaksanaan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) didukung 18 program berfokus pada penguatan daya saing koperasi dan UMKM, peningkatan nilai tambah produk industri lokal, serta pengendalian dan pengembangan sektor perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan Program DKUKMPP sebagai berikut:

**Tabel 2. 26 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.213.803.438,00	100,34	65,59	8.074.700.199,00	49,8
2	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	36.300.000,00	0	0	14.000.000,00	38,57
3	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	36.150.000,00	73,11	67,26	16.804.172,00	46,48
4	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	47.000.000,00	0	75	24.226.172,00	51,55
5	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	143.202.000,00	16,65	88,89	66.772.275,00	46,63
6	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	40.432.000,00	0	50	19.673.672,00	48,66
7	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	327.552.436,00	129,76	56,33	214.490.869,00	65,48
8	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	118.665.650,00	65,07	69,23	50.671.644,00	42,7
9	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	0,00	0	0	0,00	0
10	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	184.804.800,00	100	37,5	123.618.847,00	66,89
11	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.695.635.074,00	0	41,25	1.788.797.361,00	38,09
12	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	170.790.000,00	0	37,5	73.141.688,00	42,83
13	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	82.452.372,00	24,93	50	35.710.344,00	43,31
14	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	274.756.088,00	28,46	117,57	106.426.654,00	38,73
15	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	94.450.000,00	18,33	0	4.662.500,00	4,94

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
16	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.566.564.799,00	22,4	29,76	672.837.513,00	42,95
17	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	31.022.036,00	100	85	14.741.575,00	47,52
18	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	53.957.000,00	100	90	47.718.000,00	88,44
TOTAL			24.117.537.693,00	46,28	57,23	11.348.993.485,00	47,06

Sumber: SIPD, Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 46,28% untuk indikator program dan 57,23% untuk indikator sub-kegiatan. Pada level makro, performa yang sangat baik ditunjukkan oleh keberhasilan beberapa program utama yang telah mencapai atau melampaui target indikator programnya hingga 100% atau lebih, yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar 129,76%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (100,34%), serta Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang masing-masing tepat menyentuh 100,00%. Sejalan dengan hal tersebut, kemajuan aktivitas sub-kegiatan fisik tertinggi diraih oleh Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebesar 117,57%, diikuti oleh Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (90,00%), Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (88,89%), serta Program Pengendalian Izin Usaha Industri (85,00%). Di sisi lain, Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan masih mencatatkan progres fisik sub-kegiatan sebesar 0,00%.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp24.117.537.693,00, realisasi belanja dinas sampai dengan Semester I berjalan sangat optimal dengan total serapan mencapai Rp11.348.993.485,00 atau sebesar 47,06%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal dikontribusikan oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp8,07 Miliar (49,80%) dan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan senilai Rp1,78 Miliar (38,09%). Sementara secara persentase, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional mencatatkan akselerasi tertinggi dengan menyerap anggaran hingga 88,44% (Rp47,71 Juta) dari pagunya, disusul oleh Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan sebesar 66,89% (Rp123,61 Juta) dan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar 65,48% (Rp214,49 Miliar). Pola deviasi yang perlu dicermati muncul pada Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam serta Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, di mana serapan keuangan masing-masing telah berjalan sebesar 38,57% dan 4,94% meskipun input capaian fisik sub-kegiatannya di sistem pelaporan masih berstatus nihil (0,00%). Hal ini disebabkan oleh pengeluaran administratif awal atau belanja penunjang operasional yang pelaporan output kinerjanya baru akan terakumulasi secara utuh pada semester berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja dinas ke depan adalah:

- Mengakselerasi input data capaian fisik sub-kegiatan secara berkala pada Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, mengingat kemajuan penyerapan anggarannya sudah melaju hingga 38,57% namun capaian fisiknya masih tertulis 0,00% agar tidak terjadi deviasi akuntabilitas yang terlalu lebar.
- Memacu aktivitas fisik operasional dan sinkronisasi laporan pada Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang keuangannya baru terserap 4,94% dan fisiknya masih nihil (0,00%)

guna mendorong perluasan pasar produk lokal Bantul secara efektif di paruh kedua tahun.

- Mempertahankan tren efisiensi dan efektivitas kinerja yang tinggi pada Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (anggaran 88,44%, fisik sub-kegiatan 90,00%) serta Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (fisik sub-kegiatan 117,57%, anggaran 38,73%) guna menjamin perlindungan konsumen dan integrasi data industri daerah yang akurat.
- Melakukan reviu atau penyesuaian administratif pada dokumen perencanaan terkait nomenklatur Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang saat ini pagu, capaian kinerja, serta realisasi keuangannya tercatat Rp0,00 (nihil) demi menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah.

16. Dinas Lingkungan Hidup

Evaluasi pelaksanaan program Dinas Lingkungan Hidup (DLH) didukung 14 program diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta edukasi publik mengenai pentingnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hasil evaluasi pelaksanaan Program DLH, yang disajikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 27 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
DINAS LINGKUNGAN HIDUP (SKPD + UNIT) KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.11.0.00.0.00.01.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	250.000.000,00	0	0	17.501.500,00	7
2	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.697.864.580,00	102,73	41,77	7.189.830.588,00	43,06

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	394.650.000,00	0	0	900.000,00	0,23
4	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.323.365.610,00	0	0	461.701.797,00	19,87
5	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.379.953.480,00	96,35	26,5	377.915.893,00	27,39
6	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	8.400.000,00	93,19	250	4.900.000,00	58,33
7	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	126.673.000,00	88,99	61,94	46.099.024,00	36,39
8	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	154.517.500,00	0	44,44	56.911.000,00	36,83
9	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	61.047.500,00	100	0	7.610.000,00	12,47
10	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	72.020.000,00	100	77,5	12.625.000,00	17,53
11	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.505.625.080,00	82,88	40	2.010.933.382,00	30,91
	2.11.0.00.0.00.01.0001		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN				
12	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	365.540.308,00	0	100	110.229.878,00	30,16
	2.11.0.00.0.00.01.0002		UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN				

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
13	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.189.011.600,00	96,35	38,86	1.537.545.924,00	48,21
14	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	16.772.281.960,00	82,88	47,72	6.600.662.329,00	39,35
TOTAL			48.300.950.618,00	63,07	45,39	18.435.366.315,00	38,17

Sumber: SIPD, Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Dinas Lingkungan Hidup (termasuk gabungan UPTD) Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 63,07% untuk indikator program dan 45,39% untuk indikator sub-kegiatan. Pada level makro, performa awal tahun ditunjukkan oleh keberhasilan beberapa program yang mencatatkan capaian optimal, di antaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang melampaui target indikator programnya hingga 102,73%, serta Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang masing-masing tepat menyentuh 100,00%. Diikuti kemudian oleh Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) sebesar 96,35%, Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sebesar 93,19%, serta Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebesar 88,99%.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, capaian tertinggi sebesar 250,00% dicatatkan oleh Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) pada dinas induk, disusul oleh Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada UPTD Laboratorium Lingkungan yang berhasil menuntaskan target sub-kegiatannya penuh sebesar 100,00%. Sektor kewilayahan melalui UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan juga bergerak sangat produktif dengan capaian fisik sub-kegiatan Program Pengelolaan

Persampahan sebesar 47,72% dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) sebesar 38,86%. Di sisi lain, beberapa program teknis seperti Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Dinas Induk), serta Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat masih mencatatkan progres fisik sub-kegiatan 0,00% seiring konsolidasi persiapan teknis lapangan di paruh pertama tahun.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD gabungan yang bernilai Rp48.300.950.618,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat baik dengan menyerap anggaran total sebesar Rp18.435.366.315,00 atau sebesar 38,17%. Distribusi serapan anggaran terbesar secara nominal diserap oleh operasional Program Pengelolaan Persampahan pada UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan senilai Rp6,60 Miliar (39,35%), disusul oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada dinas induk senilai Rp7,18 Miliar (43,06%). Secara persentase, Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) mencatatkan daya serap tertinggi sebesar 58,33% (Rp4,90 Juta). Pola akumulasi keuangan pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang juga mulai berjalan dengan serapan awal sebesar 7,00% (Rp17.501.500,00) dari pagunya yang bernilai Rp250.000.000,00.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja dinas ke depan adalah:

- Mengakselerasi input data dan pembobotan fisik sub-kegiatan secara berkala pada program yang serapan anggarannya sudah berjalan cukup tinggi namun capaian sub-kegiatannya masih tercatat nihil, khususnya pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di tingkat dinas induk (anggaran 19,87% / Rp461,70 Juta, fisik 0,00%) agar tercapai keseimbangan akuntabilitas.

- Memacu tahapan pelaksanaan fisik operasional pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang agar realisasi fisiknya (saat ini masih 0,00%) segera berprogres mengejar penyerapan keuangannya yang sudah dimulai sebesar 7,00%.
- Mempertahankan stabilitas kinerja pelayanan rutin dan pengelolaan keuangan yang sangat optimal di bawah kendali UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan (Program Persampahan terserap 39,35% anggaran dan 47,72% fisik; Program KEHATI terserap 48,21% anggaran dan 38,86% fisik) guna mendukung kebersihan wilayah kota secara berkelanjutan.
- Mendorong ketelitian berkala dalam sinkronisasi pelaporan performa pada aplikasi e-SAKIP/SIPD, terutama pada program-program teknis yang aktivitas fisiknya telah berjalan masif di lapangan namun pembobotannya perlu terus dimutakhirkan secara akurat.

17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)

Evaluasi pelaksanaan program DP3AP2KB didukung 9 program berfokus pada upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan hak anak dan pencegahan kekerasan, serta penguatan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam rangka pembangunan keluarga berkualitas. Hasil evaluasi pelaksanaan Program DP3AP2KB sebagai berikut:

Tabel 2. 28 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD DP3AP2KB KABUPATEN BANTUL

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	232.829.600,00	156,5	33,33	22.150.000,00	9,51
2	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	543.525.674,00	100	32,51	245.804.788,00	45,22
3	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	176.943.480,00	115,38	30,83	77.800.000,00	43,97

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	628.231.440,00	117,68	34,23	295.835.847,00	47,09
5	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.936.155.657,00	98,8	32,89	2.668.734.569,00	44,96
6	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	269.650.000,00	124,93	37,5	142.525.000,00	52,86
7	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.647.170.292,00	144,71	48,44	961.678.354,00	36,33
8	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.932.597.500,00	99,93	50	1.385.674.000,00	47,25
9	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	0,00	0	0	0,00	0
TOTAL			13.367.103.643,00	110,43	35,94	5.800.202.558,00	43,39

Sumber: SIPD, Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul mencatatkan performa makro yang luar biasa di awal tahun anggaran ini. Rata-rata capaian kinerja indikator program secara akumulatif telah berhasil menembus angka 110,43%, sementara rata-rata capaian indikator sub-kegiatan berada pada angka 35,94%.

Pada level program, hampir seluruh urusan teknis telah melampaui atau mendekati target tahunan 100%. Lonjakan tertinggi diraih oleh Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang mencatatkan capaian indikator program sebesar 156,50%, disusul oleh Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebesar 144,71%, Program Pengendalian Penduduk (124,93%), Program Perlindungan Khusus Anak (117,68%), dan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebesar 115,38%. Sementara itu, Program Perlindungan Perempuan tepat menyentuh target 100,00%, disusul oleh Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) sebesar 99,93% dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 98,80%. Untuk tingkat

aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) memimpin dengan capaian fisik tertinggi sebesar 50,00%, diikuti oleh Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebesar 48,44%, Program Pengendalian Penduduk (37,50%), serta Program Perlindungan Khusus Anak (34,23%).

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp13.367.103.643,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat akseleratif dengan menyerap anggaran total sebesar Rp5.800.202.558,00 atau sebesar 43,39%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp2,66 Miliar (44,96%) guna mendukung operasional rutin kedinasan, disusul oleh Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) senilai Rp1,38 Miliar (47,25%). Secara persentase serapan, posisi tertinggi dicatatkan oleh Program Pengendalian Penduduk yang melaju hingga 52,86% (Rp142,52 Juta). Untuk urusan teknis perlindungan dan pemenuhan hak anak, Program Perlindungan Khusus Anak menyerap anggaran sebesar 47,09% (Rp295,83 Juta), diikuti oleh Program Perlindungan Perempuan sebesar 45,22% (Rp245,80 Juta), dan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebesar 43,97% (Rp77,80 Juta).

Pola deviasi yang perlu dicermati muncul pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; meskipun capaian indikator makronya melompat sangat tinggi (156,50%), realisasi keuangan dan aktivitas fisik sub-kegiatannya bergerak paling efisien dengan serapan belanja sebesar 9,51% (Rp22,15 Juta) dan fisik sub-kegiatan sebesar 33,33%. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan advokasi kebijakan makro di awal tahun, di mana target antara dapat dipenuhi secara optimal sementara kliring administrasi keuangan dan sisa sub-kegiatan taktis diproyeksikan baru akan terhitung masif pada semester berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja dinas ke depan adalah:

- Mengoptimalkan koordinasi berkala dan penyerapan anggaran pendukung pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, guna mendorong aktivitas fisik sub-kegiatannya yang saat ini berada di angka 33,33% agar selaras dengan akselerasi capaian makronya yang telah melampaui target tahunan.
- Mempertahankan tren kinerja operasional dan keuangan yang sangat tinggi pada program pelayanan dasar kedinasan, terutama Program Pengendalian Penduduk (keuangan 52,86%, fisik sub-kegiatan 37,50%) dan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (keuangan 36,33%, fisik sub-kegiatan 48,44%) demi menjaga kualitas pelayanan KB-KS di wilayah Bantul.
- Memantau sisa pelaksanaan sub-kegiatan serta percepatan pengadaan pada klaster perlindungan anak dan perempuan, khususnya Program Perlindungan Khusus Anak dan Program Perlindungan Perempuan yang rata-rata serapan keuangannya telah berjalan optimal di atas 45% agar target output fisik penunjangnya segera tuntas di paruh kedua tahun.
- Melakukan rewiu atau penyesuaian administratif mengenai dokumen perencanaan terkait nomenklatur Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang saat ini pagu, capaian, serta realisasinya tercatat Rp0,00 (nihil) guna memastikan tata kelola dan akuntabilitas pelaporan perencanaan daerah tetap tertib.

18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMKal)

Evaluasi pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMKal) didukung 6 program berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan kalurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta fasilitasi dana transfer ke kalurahan agar tepat sasaran dan akuntabel. Hasil evaluasi pelaksanaan Program DPMKal sebagai berikut:

**Tabel 2. 29 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
DPMKAL KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	215.348.000,00	14,15	0	34.083.200,00	15,83
2	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.093.928.616,00	99,86	40,94	3.246.129.589,00	63,73
3	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	750.000,00	0	100	1.500.000,00	200
4	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.114.196.832,00	0	61,11	2.594.115.514,00	63,05
5	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	793.931.494,00	37,04	33,33	551.297.940,00	69,44
6	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	156.500.000,00	0	0	54.910.000,00	35,09
TOTAL			10.374.654.942,00	35,84	46,98	6.482.036.243,00	62,48

Sumber: SIPD, Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 35,84% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 46,98%. Pada level makro, kemajuan indikator program dipimpin oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang hampir menyentuh target penuh sebesar 99,86%, disusul oleh Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sebesar 37,04%, serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan sebesar 14,15%. Sementara itu, program teknis lainnya masih berstatus 0,00% pada indikator programnya karena target tahunan diukur secara akumulatif di akhir periode.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, pencapaian luar biasa dicatatkan oleh Program Peningkatan Kerja Sama Desa yang telah

tuntas penuh sebesar 100,00%. Selain itu, Program Administrasi Pemerintahan Desa mencatatkan progres fisik sub-kegiatan yang tinggi sebesar 61,11%, diikuti oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (40,94%), serta Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (33,33%). Di sisi lain, dua program strategis yang didanai oleh Dana Keistimewaan (Danais), yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan serta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, masih mencatatkan progres fisik sub-kegiatan sebesar 0,00% seiring pematangan berkas operasional di paruh pertama tahun. Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp10.374.654.942,00, realisasi belanja dinas sampai dengan Semester I berjalan sangat akseleratif dengan menyerap anggaran total sebesar Rp6.482.036.243,00 atau sebesar 62,48%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal dikontribusikan oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp3,24 Miliar (63,73%) serta Program Administrasi Pemerintahan Desa senilai Rp2,59 Miliar (63,05%). Secara persentase, Program Peningkatan Kerja Sama Desa mencatatkan angka daya serap yang tidak biasa hingga mencapai 200,00% dengan merealisasikan belanja senilai Rp1.500.000,00 dari alokasi pagu awal Rp750.000,00, yang mengindikasikan adanya penyesuaian kebutuhan mendesak di lapangan. Selanjutnya, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terserap sebesar 69,44% (Rp551,29 Juta).

Pola deviasi belanja pada urusan keistimewaan menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan telah menyerap keuangan sebesar 15,83% (Rp34,08 Juta) dengan fisik sub-kegiatan yang masih nihil (0,00%). Hal ini mencerminkan bahwa penyerapan anggaran di awal tahun difokuskan pada koordinasi administratif dan tata ruang spasial awal, sementara output fisik akumulatif baru akan terinput pada semester berikutnya. Di sisi lain, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan pagu Rp156.500.000,00 juga

mulai membukukan realisasi keuangan sebesar 35,09% (Rp54,91 Juta) meskipun progres fisik sub-kegiatannya masih tercatat 0,00%.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja dinas ke depan adalah:

- Mengakselerasi input data capaian fisik sub-kegiatan secara berkala pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (anggaran 15,83%) serta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (anggaran 35,09%), agar ketertiban pelaporan fisik segera mengimbangi realisasi keuangan Danais yang sudah berjalan.
- Memperketat sinkronisasi pembobotan fisik dan keuangan pada program-program penguatan desa, terutama pada Program Administrasi Pemerintahan Desa (anggaran 63,05%, fisik 61,11%) dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan... (anggaran 69,44%, fisik 33,33%) agar deviasi pelaporan di aplikasi e-SAKIP/SIPD tetap terkendali.
- Melakukan reviu atau klarifikasi administratif atas tata kelola penganggaran pada Program Peningkatan Kerja Sama Desa yang mencatatkan realisasi keuangan hingga 200,00%, guna memastikan kepatuhan mekanisme pergeseran/perubahan anggaran kedinasan berjalan akuntabel.
- Mempertahankan performa makro dan operasional rutin perkantoran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah berjalan harmonis antara capaian program (99,86%), capaian fisik sub-kegiatan (40,94%), dan serapan keuangan (63,73%).

19. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Evaluasi pelaksanaan program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) didukung 7 program diarahkan pada penguatan implementasi kebijakan pertanahan sesuai kewenangan keistimewaan, penertiban penataan ruang, serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul. Hasil evaluasi pelaksanaan Program DPTR sebagai berikut:

**Tabel 2. 30 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
DPTR KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	8.843.800,00	0	0	1.260.000,00	14,25
2	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	344.591.614,00	0	5,56	83.303.000,00	24,17
3	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	0,00	0	0	0,00	0
4	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.945.447.144,00	99,71	41,02	3.296.924.916,00	47,47
5	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	30.206.100,00	11,61	20	228.500,00	0,76
6	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	124.383.680,00	50	27,78	3.772.500,00	3,03
7	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	5.564.091.800,00	13,61	18,33	1.213.138.839,00	21,8
TOTAL			13.017.564.138,00	28,62	27,47	4.598.627.755,00	35,33

Sumber: SIPD, Dalev, Juli 2026.

Secali keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 28,62% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 27,47%. Kemajuan pada level makro indikator program dipimpin oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang hampir menyentuh target penuh sebesar 99,71%, disusul oleh Program Penatagunaan Tanah (50,00%), Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (13,61%), serta Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (11,61%). Sementara itu, program teknis lainnya masih berstatus nol persen pada indikator programnya karena target tahunannya diukur secara tahunan pada akhir periode.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, pergerakan di awal tahun ini dipimpin oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota yang mencatatkan progres fisik sub-kegiatan sebesar 41,02%, diikuti oleh Program Penatagunaan Tanah (27,78%), Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (20,00%), serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan yang mencatatkan progres sub-kegiatan sebesar 18,33%. Di sisi lain, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang baru membukukan capaian fisik sub-kegiatan sebesar 5,56%, sedangkan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang masih mencatatkan angka 0,00%.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp13.017.564.138,00, realisasi belanja dinas sampai dengan Semester I berjalan sangat baik dengan menyerap anggaran total sebesar Rp4.598.627.755,00 atau sebesar 35,33%. Secara nominal, penyerapan anggaran terbesar berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp3,29 Miliar (47,47%) untuk mendanai operasional rutin kedinasan. Pada pilar urusan keistimewaan yang memegang porsi anggaran sangat besar, yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan dengan pagu Rp5.564.091.800,00, telah merealisasikan belanja sebesar Rp1.213.138.839,00 atau sebesar 21,80%. Selanjutnya, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terserap sebesar 24,17% (Rp83,30 Juta), Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya terserap 14,25% (Rp1,26 Juta), serta Program Penatagunaan Tanah terserap 3,03% (Rp3,77 Juta).

Pola deviasi yang perlu dicermati muncul pada beberapa program strategis, seperti Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang keuangannya telah menyerap anggaran 14,25% namun progres fisik sub-kegiatannya masih tertulis 0,00%. Sementara pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, realisasi keuangan baru berjalan 0,76% (Rp228.500,00) meskipun input aktivitas fisik sub-kegiatannya di pelaporan telah melaju hingga 20,00%. Kondisi ini mencerminkan variasi kliring administrasi keuangan, di mana beberapa program teknis memerlukan persiapan dokumen belanja di awal, sedangkan program

penyelesaian sengketa menunjukkan efisiensi operasional tinggi di lapangan pada paruh pertama tahun ini.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja dinas ke depan adalah:

- Mempertahankan keselarasan progres pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan yang telah berjalan seimbang antara capaian makro program (13,61%), fisik sub-kegiatan (18,33%), dan penyerapan anggaran pendukung Danais (21,80%).
- Mengakselerasi tahapan fisik lapangan pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (anggaran 24,17%, fisik 5,56%) serta Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya (anggaran 14,25%, fisik 0,00%), guna memastikan target output spasial fisik di lapangan tidak tertinggal dari realisasi keuangannya.
- Memacu penyelesaian administrasi keuangan dan pencairan termin pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, agar penyerapan anggarannya yang masih minim (0,76%) dapat segera mengejar kemajuan aktivitas fisiknya yang sudah berjalan baik di angka 20,00%.
- Melakukan reviu atau penyesuaian administratif pada dokumen perencanaan mengenai Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang saat ini pagu, capaian kinerja, serta realisasi keuangannya tercatat Rp0,00 (nihil) demi menjaga tertib administrasi dan akuntabilitas pelaporan satu data daerah.

20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Evaluasi pelaksanaan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) didukung 6 program berfokus pada upaya peningkatan kompetensi dan daya saing angkatan kerja, perluasan akses informasi pasar kerja, serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Program dinas ini sangat penting dalam menekan angka pengangguran terbuka dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Disnakertrans sebagai berikut:

**Tabel 2. 31 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.938.776.433,00	49,43	43,38	3.903.264.828,00	49,17
2	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.147.785.144,00	0	77,11	540.187.163,00	47,06
3	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	31.777.333.400,00	59,67	14,1	7.691.692.322,00	24,2
4	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	798.532.192,00	97,74	53,57	625.451.917,00	78,33
5	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	3.197.052.000,00	104,4	100	3.037.060.778,00	95
6	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	175.705.600,00	0	0	82.972.716,00	47,22
TOTAL			45.035.184.769,00	57,3	44,62	15.880.629.724,00	35,26

Sumber: SIPD, Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapulitasi data pada tabel di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 57,30% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 44,62%. Kemajuan pada level makro indikator program dipimpin secara luar biasa oleh Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang melampaui target tahunan hingga 104,40%, disusul oleh Program Hubungan Industrial (97,74%), Program Penempatan Tenaga Kerja (59,67%), serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (49,43%). Sementara itu, dua program teknis lainnya masih berstatus 0,00% karena pengukuran indikator kinerjanya bersifat akumulatif di akhir periode anggaran.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, capaian tertinggi dan sempurna dituntaskan oleh Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang mencatatkan progres fisik sebesar 100,00%. Sektor operasional teknis lainnya juga bergerak sangat

progresif, dipimpin oleh Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (77,11%), Program Hubungan Industrial (53,57%), Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (43,38%), serta Program Penempatan Tenaga Kerja (14,10%). Di sisi lain, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi masih mencatatkan progres fisik sub-kegiatan sebesar 0,00% seiring persiapan administrasi teknis di paruh pertama tahun.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp45.035.184.769,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat akseleratif dengan total serapan anggaran mencapai Rp15.880.629.724,00 atau sebesar 35,26%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal dikontribusikan oleh Program Penempatan Tenaga Kerja senilai Rp7,69 Miliar (24,20%) serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp3,90 Miliar (49,17%). Secara persentase serapan anggaran, posisi tertinggi dicatatkan oleh Program Hubungan Industrial yang melaju pesat hingga mencapai 78,33% (Rp625,45 Juta), disusul oleh penyerapan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang sukses mencairkan 95,00% (Rp3,03 Miliar) dari total pagu Danais yang dialokasikan.

Pola deviasi yang memerlukan perhatian khusus muncul pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi; program ini telah menyerap alokasi anggaran yang cukup signifikan sebesar 47,22% (Rp82,97 Juta) dari total pagunya, namun input progres fisik sub-kegiatannya di sistem pelaporan masih tercatat nihil (0,00%). Hal ini mengindikasikan adanya kliring administrasi keuangan atau pembayaran termin belanja modal di awal tahun yang belum diimbangi dengan pelaporan input capaian fisik sub-kegiatan secara berjenjang di sistem.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja dinas ke depan adalah:

- Mengakselerasi koordinasi dan input data capaian fisik sub-kegiatan secara berkala pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi,

agar kemajuan pelaporan output fisik di lapangan segera mengimbangi realisasi anggarannya yang sudah berjalan cukup tinggi di angka 47,22%.

- Mempertahankan keselarasan kinerja makro dan realisasi anggaran yang sangat tinggi pada urusan keistimewaan, khususnya Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang telah berjalan harmonis dan sukses menyentuh capaian program 104,40%, fisik sub-kegiatan 100,00%, serta serapan keuangan 95,00%.
- Melakukan pemantauan dan reviu sisa pelaksanaan sub-kegiatan pada Program Hubungan Industrial guna mengawal penuntasan sisa output fisik lapangan (53,57%) sejalan dengan penyerapan anggarannya yang telah mendominasi hingga 78,33%.
- Mendorong percepatan tahapan aktivitas fisik pada Program Penempatan Tenaga Kerja, mengingat realisasi keuangannya secara nominal menyerap pagu terbesar (Rp7,69 Miliar), agar kemajuan capaian sub-kegiatan fisiknya yang saat ini baru terdokumentasi 14,10% dapat melaju lebih seimbang di semester berikutnya.

21. Inspektorat Daerah

Evaluasi pelaksanaan program Inspektorat Daerah didukung 3 program berfokus pada penguatan pengawasan internal, peningkatan kapabilitas APIP, serta pelaksanaan audit, reviu, dan evaluasi dalam rangka memastikan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Inspektorat Daerah sebagai berikut:

**Tabel 2. 32 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.888.606.112,00	0	60,68	6.170.181.328,00	47,87

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	64.625.000,00	0	47,7	18.112.500,00	28,03
3	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	901.661.500,00	0	51,93	353.772.500,00	39,24
TOTAL			13.854.892.612,00	0	55,98	6.542.066.328,00	47,22

Sumber: SIPD, Dalev, Juli 2026

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 0,00% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 55,98%. Nilai nol persen pada level makro indikator program di Semester pertama ini merupakan hal yang wajar bagi lembaga pengawas internal pemerintah (APIP), mengingat target capaian program (seperti nilai kapabilitas APIP atau opini laporan keuangan) umumnya diukur dan dievaluasi secara akumulatif di akhir tahun anggaran.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, pergerakan awal tahun didominasi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mencatatkan progres fisik sub-kegiatan tertinggi sebesar 60,68%. Sementara itu, dua program substantif pengawasan hulu ke hilir juga telah berjalan dengan sangat progresif, dipimpin oleh Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar 51,93%, serta Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar 47,70%.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp13.854.892.612,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat masif dengan total serapan anggaran mencapai Rp6.542.066.328,00 atau sebesar 47,22%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp6,17 Miliar (47,87%) guna memenuhi belanja pegawai serta pemeliharaan rutin kantor.

Akselerasi serapan pada program urusan teknis kedinasan dicatatkan oleh Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang

telah menyerap anggaran sebesar 39,24% (Rp353.772.500,00) dari alokasi pagu Rp901.661.500,00. Di sisi lain, Program Penyelenggaraan Pengawasan yang memiliki pagu Rp64.625.000,00 merealisasikan anggaran sebesar 28,03% (Rp18.112.500,00). Hubungan antara realisasi anggaran dan input fisik sub-kegiatan pada seluruh program teknis menunjukkan pola yang sangat sehat dan berimbang (proporsional), di mana kemajuan fisik lapangan sedikit mendahului atau sejalan dengan penyerapan keuangannya.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Inspektorat ke depan adalah:

- Mempertahankan keselarasan laju fisik dan keuangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah berjalan sangat optimal di kisaran 47% - 60% guna menjaga stabilitas operasional serta layanan rutin kantor.
- Menjaga konsistensi tata kelola pengawasan pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang performanya berjalan selaras antara capaian fisik sub-kegiatan (51,93%) dan serapan anggarannya (39,24%) agar pendampingan bagi perangkat daerah tetap berjalan akuntabel.
- Mendorong intensitas pelaksanaan audit berkala, reviu, dan evaluasi pada Program Penyelenggaraan Pengawasan memasuki paruh kedua tahun seiring dengan jadwal pemeriksaan reguler, guna mengoptimalkan sisa serapan anggaran (28,03%) dan fisik sub-kegiatan (47,70%).
- Memastikan integrasi hasil monitoring pencegahan korupsi (seperti MCP KPK atau SPI) tetap berjalan selaras dengan pelaporan sistem e-SAKIP/SIPD daerah untuk mengawal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh di Kabupaten Bantul.

22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Evaluasi pelaksanaan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) didukung 5 program berfokus pada penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, koordinasi yang

efektif antar Perangkat Daerah, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan guna memastikan keselarasan dengan sasaran RKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Bappeda sebagai berikut:

**Tabel 2. 33 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
BAPPEDA KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	333.057.000,00	25	27,38	66.057.000,00	19,83
2	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.628.405.527,00	50,45	66,08	4.543.243.642,00	47,19
3	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.093.343.150,00	25	135,19	492.319.890,00	45,03
4	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	922.841.200,00	125,93	4,17	303.638.070,00	32,9
5	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	175.301.200,00	49,99	0	15.795.000,00	9,01
TOTAL			12.152.948.077,00	67,08	56,62	5.421.053.602,00	44,61

Sumber: SIPD, Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 67,08% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 56,62%. Kemajuan pada level makro indikator program dipimpin secara signifikan oleh Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang melampaui target tahunan hingga mencapai 125,93%. Sektor perencanaan lainnya juga menunjukkan performa yang kuat, disusul oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (50,45%), Program Riset dan Inovasi Daerah (49,99%), serta Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang keduanya kompak mencatatkan nilai capaian program sebesar 25,00%.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, akselerasi luar biasa diperlihatkan oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang melesat melampaui target parsialnya hingga mencapai 135,19%. Progres ini sangat logis mengingat Semester I merupakan periode krusial bagi penyusunan dokumen perencanaan makro dan evaluasi daerah. Selanjutnya, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga bergerak sangat dinamis dengan progres fisik sub-kegiatan sebesar 66,08%, diikuti oleh Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (27,38%), serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (4,17%). Di sisi lain, Program Riset dan Inovasi Daerah masih mencatatkan progres fisik sub-kegiatan sebesar 0,00% seiring pematangan regulasi serta penyusunan kerangka kerja operasional riset.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp12.152.948.077,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat progresif dengan menyerap anggaran total sebesar Rp5.421.053.602,00 atau sebesar 44,61%. Secara nominal, porsi penyerapan anggaran terbesar berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp4,54 Miliar (47,19%) untuk mendukung belanja operasional rutin kantor. Selanjutnya, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyerap anggaran sebesar 45,03% (Rp492,31 Juta), disusul Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 32,90% (Rp303,63 Juta), Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 19,83% (Rp66,05 Juta), serta Program Riset dan Inovasi Daerah sebesar 9,01% (Rp15,79 Juta).

Pola deviasi belanja pada urusan teknis strategis memperlihatkan variasi karakteristik yang berbeda. Pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi

Perencanaan Pembangunan Daerah, realisasi anggaran telah berjalan sebesar 32,90% namun capaian fisik sub-kegiatannya baru terdokumentasi 4,17%, yang mengindikasikan serapan di paruh pertama difokuskan pada pemenuhan administrasi keuangan rapat koordinasi awal lintas sektor. Sebaliknya, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menunjukkan efektivitas pelaksanaan yang sangat tinggi; dengan serapan anggaran sebesar 45,03%, aktivitas fisik sub-kegiatannya mampu dipacu melaju cepat hingga 135,19%. Sementara pada Program Riset dan Inovasi Daerah, penyerapan keuangan awal sebesar 9,01% digunakan untuk persiapan administratif dan koordinasi dasar, sehingga output fisik riil risetnya (0,00%) baru akan dilaporkan secara masif pada paruh kedua tahun.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Bappeda ke depan adalah:

- Mengakselerasi penyusunan laporan hasil koordinasi serta penginputan capaian fisik sub-kegiatan secara berkala pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, agar kemajuan di sistem dapat segera mengimbangi penyerapan anggarannya yang sudah menyentuh 32,90%.
- Mempertahankan tren performa tinggi dan efisiensi pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (fisik 135,19%, anggaran 45,03%), sekaligus memastikan dokumen perencanaan makro daerah yang dihasilkan tetap terjaga kualitas dan konsistensinya.
- Memacu tahapan pelaksanaan fisik riset serta penyusunan proposal kajian pada Program Riset dan Inovasi Daerah guna mendorong kemajuan fisiknya yang masih nihil (0,00%) agar sejalan dengan penyerapan keuangan yang mulai berjalan (9,01%).
- Mengoptimalkan pemanfaatan sistem pelaporan digital (e-SAKIP/SIPD) dalam memonitor jadwal pelaksanaan sisa kegiatan, termasuk koordinasi Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan (fisik 27,38%,

anggaran 19,83%), guna mengawal akuntabilitas kinerja perencanaan secara terpadu di Kabupaten Bantul.

23. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Evaluasi pelaksanaan program Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) didukung 5 program berfokus pada efisiensi pengelolaan kas daerah, optimalisasi penyerapan anggaran, peningkatan realisasi pendapatan daerah, dan penertiban penatausahaan serta pemanfaatan aset daerah. Capaian BPKPAD sangat menentukan kesehatan fiskal Kabupaten Bantul. Hasil evaluasi pelaksanaan Program BPKPAD sebagai berikut:

**Tabel 2. 34 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
BPKPAD KABUPATEN BANTUL
Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026**

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	72.586.000,00	0	33,33	24.303.800,00	33,48
2	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.308.590.536,00	49,65	60,66	33.472.884.722,00	41,17
3	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	318.321.804.796,00	0	41,38	108.970.447.856,00	34,23
4	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.686.943.500,00	0	70,31	809.813.890,00	48
5	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.339.745.400,00	0	59,23	5.564.783.745,00	49,07
TOTAL			412.729.670.232,00	11,03	54,71	148.842.234.013,00	36,06

Sumber: SIPD, Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 11,03% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 54,71%. Kemajuan pada level makro indikator program baru terdokumentasi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 49,65%. Sementara itu, empat program substantif lainnya masih mencatatkan angka 0,00% pada indikator programnya karena indikator sasaran utama (seperti

opini WTP, rasio kemandirian fiskal, atau indeks tata kelola aset) bersifat tahunan dan evaluasi finalnya baru dapat diukur secara akumulatif setelah akhir tahun anggaran.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, pergerakan di paruh pertama tahun ini berjalan sangat progresif. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah memimpin dengan capaian fisik sub-kegiatan tertinggi sebesar 70,31%, disusul oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (60,66%), Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (59,23%), Program Pengelolaan Keuangan Daerah (41,38%), serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang mencatatkan progres sub-kegiatan sebesar 33,33%.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp412.729.670.232,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I telah berjalan masif dengan menyerap anggaran total sebesar Rp148.842.234.013,00 atau sebesar 36,06%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal dikontribusikan oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah senilai Rp108,97 Miliar (34,23%) dari pagunya yang mencapai Rp318,32 Miliar—di mana porsi ini mencakup pengelolaan kas daerah, transfer belanja, maupun dukungan pembiayaan. Selanjutnya, penyerapan terbesar berikutnya berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp33,47 Miliar (41,17%), disusul oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah senilai Rp5,56 Miliar (49,07%), Program Pengelolaan Barang Milik Daerah senilai Rp809,81 Juta (48,00%), serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar Rp24,30 Juta (33,48%).

Analisis deviasi performa menunjukkan keselarasan yang sangat sehat dan proporsional pada hampir seluruh urusan program. Hubungan antara persentase capaian fisik sub-kegiatan dan realisasi keuangan berjalan beriringan dan seimbang. Sebagai contoh, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan mencatatkan keseimbangan yang presisi antara capaian fisik (33,33%) dan serapan anggarannya (33,48%). Begitu pula dengan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (fisik 70,31%, anggaran 48,00%) serta Program

Pengelolaan Pendapatan Daerah (fisik 59,23%, anggaran 49,07%) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan aktivitas operasional di lapangan mampu dipacu mendahului atau sejalan dengan pencairan keuangannya.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja BPKPAD ke depan adalah:

- Mempertahankan ritme tata kelola keuangan dan pendapatan yang stabil dan harmonis pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah (anggaran 34,23%) serta Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (anggaran 49,07%), mengingat kedua pilar ini menjadi motor penggerak utama fiskal daerah.
- Menjaga konsistensi akselerasi fisik pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah berjalan sangat baik (fisik 70,31%, anggaran 48,00%) guna memastikan penuntasan target inventarisasi, rekonsiliasi, dan pengamanan aset daerah selesai tepat waktu.
- Mengawal kesinambungan program urusan keistimewaan pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan agar sisa alokasi Dana Keistimewaan dapat terus diserap secara akuntabel sejalan dengan target operasional kelembagaan.
- Mengoptimalkan integrasi sistem informasi keuangan dan pendapatan daerah (seperti SIPD RI dan sistem digital perpajakan daerah) untuk mempercepat pelaporan desk evaluasi serta menjaga kualitas penyerapan APBD berbasis satu data daerah secara berkala.

24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) didukung 4 program diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen ASN, pengembangan kompetensi dan profesionalisme pegawai, serta penataan formasi dan distribusi kepegawaian yang efektif guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil evaluasi pelaksanaan Program BKPSDM sebagai berikut:

**Tabel 2. 35 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
BKPSDM KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	150.000.000,00	0	0	0,00	0
2	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.950.941.180,00	100,67	53,51	3.850.291.821,00	38,69
3	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.261.606.000,00	18,18	51,44	195.749.528,00	15,52
4	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.243.318.000,00	23,82	298,44	444.277.000,00	35,73
TOTAL			12.605.865.180,00	37,94	72,81	4.490.318.349,00	35,62

Sumber; SIPD Dalev, Juli 2026

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, BKPSDM Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 37,94% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 72,81%. Berhasil memecah nilai pada level makro sejak paruh pertama tahun, capaian indikator program tertinggi dicatatkan oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sukses melampaui target tahunan hingga 100,67%, disusul oleh Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (23,82%), serta Program Kepegawaian Daerah (18,18%). Sementara itu, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan masih berstatus nihil (0,00%).

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, lompatan kinerja yang sangat masif terjadi pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan capaian fisik sub-kegiatan melesat hingga 298,44%. Angka akumulatif yang melebihi target tahunan ini mengindikasikan adanya akselerasi volume output di lapangan yang melampaui perencanaan awal paruh waktu, seperti penyelenggaraan orientasi,

pelatihan aparatur, atau pemenuhan jam diklat pegawai yang disebut secara optimal. Sementara itu, aktivitas operasional pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bergerak stabil di angka 53,51%, disusul oleh Program Kepegawaian Daerah sebesar 51,44%. Di sisi lain, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan masih mencatatkan progres fisik sub-kegiatan sebesar 0,00% seiring dengan tahapan persiapan administrasi kedinasan.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp12.605.865.180,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat progresif dengan menyerap anggaran total sebesar Rp4.490.318.349,00 atau sebesar 35,62%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal didominasi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp3,85 Miliar (38,69%) untuk mendanai operasional rutin kantor, pemenuhan gaji, dan penyediaan jasa aparatur. Selanjutnya, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia menyerap anggaran sebesar 35,73% (Rp444,27 Juta) dari pagu Rp1,24 Miliar, disusul oleh Program Kepegawaian Daerah yang merealisasikan anggaran sebesar 15,52% (Rp195,74 Juta) dari total alokasi Rp1,26 Miliar.

Analisis deviasi performa menunjukkan adanya efisiensi anggaran belanja yang berjalan sangat baik pada program-program pelayanan teknis kepegawaian. Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan realisasi keuangan sebesar 35,73%, program ini secara luar biasa mampu menggerakkan capaian fisik sub-kegiatan hingga melesat ke angka 298,44%, membuktikan optimalisasi metode pelaksanaan peningkatan kapasitas yang berjalan masif. Tren efisiensi yang senada juga terlihat pada Program Kepegawaian Daerah, di mana progres fisik sub-kegiatannya sudah menyentuh 51,44%, namun penyerapan anggarannya baru berjalan hemat sebesar 15,52%. Sebaliknya, deviasi nihil dialami oleh Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan alokasi pagu Rp150.000.000,00 yang serapan keuangan maupun

fisiknya masih sepenuhnya 0,00%, menandakan belum adanya realisasi operasional khusus urusan keistimewaan pada paruh awal ini.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja BKPSDM ke depan adalah:

- Mempertahankan dan mendokumentasikan praktik baik (best practice) efisiensi pelaksanaan aktivitas pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Program Kepegawaian Daerah, seraya memastikan substansi peningkatan kompetensi aparatur tetap berjalan optimal.
- Mengakselerasi tahapan persiapan teknis dan administratif pembelanjaan pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, agar alokasi Dana Keistimewaan sebesar Rp150 Juta dapat segera dieksekusi memasuki Semester kedua guna menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun.
- Melakukan reviu berkala terhadap target dan formula input data fisik pada aplikasi pelaporan perencanaan, khususnya pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang capaiannya melompat tinggi (298,44%), untuk memastikan validitas dan akuntabilitas data dukung dalam penilaian SAKIP daerah.
- Mendorong kelanjutan program digitalisasi manajemen ASN sejalan dengan optimalnya penyerapan anggaran penunjang urusan pemerintahan (anggaran 38,69%, fisik 53,51%) demi mewujudkan tata kelola kepegawaian yang cepat, terintegrasi, dan berbasis satu data.

25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Evaluasi pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) didukung 7 program berfokus pada upaya pemeliharaan ketenteraman dan stabilitas politik di daerah, fasilitasi dan penguatan kerukunan antarumat beragama dan antar etnis, serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) guna mendukung terciptanya kondisi daerah yang aman dan kondusif. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kesbangpol sebagai berikut:

**Tabel 2. 36 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL
Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026**

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.164.636.374,00	0	38,05	1.555.257.975,00	49,14
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.285.011.400,00	0	52,69	310.932.000,00	24,2
3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.755.178.100,00	0	56,41	3.687.923.100,00	98,21
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	106.519.900,00	0	22,75	58.820.000,00	55,22
5	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	764.189.900,00	0	69,7	489.204.900,00	64,02
TOTAL			9.075.535.674,00	0	41,24	6.102.137.975,00	67,24

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 0,00% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 41,24%. Nilai nol persen pada level makro indikator program di Semester pertama ini merupakan hal yang wajar bagi badan urusan pemerintahan umum, mengingat target sasaran makro program (seperti indeks keharmonisan atau indeks demokrasi daerah) diukur secara tahunan dan evaluasi akhirnya baru terakumulasi setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, pergerakan dinamis diperlihatkan oleh Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang memimpin dengan capaian fisik sub-kegiatan tertinggi mencapai 69,70%. Akselerasi operasional yang baik juga dicatatkan oleh Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui

Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik sebesar 56,41%, disusul oleh Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar 52,69%, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 38,05%. Sementara itu, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan mencatatkan progres fisik sub-kegiatan sebesar 22,75%.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp9.075.535.674,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat akseleratif dengan total serapan anggaran mencapai Rp6.102.137.975,00 atau sebesar 67,24%. Secara nominal, penyerapan anggaran terbesar berada pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang menyerap anggaran secara masif hingga Rp3.687.923.100,00 atau mencapai 98,21% dari pagunya yang sebesar Rp3,75 Miliar. Penyerapan terbesar berikutnya disusul oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp1.555.257.975,00 (49,14%), Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial senilai Rp489.204.900,00 (64,02%), Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan senilai Rp310.932.000,00 (24,20%), serta Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan senilai Rp58.820.000,00 (55,22%).

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Bakesbangpol ke depan adalah:

- Mengakselerasi penyelesaian dokumen administrasi dan input data fisik secara berkala pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik serta Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan agar progres capaian fisiknya segera mengimbangi laju penyerapan keuangan yang sudah sangat tinggi (masing-masing 98,21% dan 55,22%).

- Mempertahankan ritme kerja yang responsif pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang performanya berjalan selaras dan progresif baik dari sisi fisik (69,70%) maupun keuangan (64,02%) guna menjaga stabilitas ketenteraman wilayah.
- Mengoptimalkan sisa alokasi belanja operasional dan teknis pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan memasuki paruh kedua tahun agar perluasan sasaran pembinaan karakter kebangsaan berjalan semakin merata sejalan dengan sisa anggaran yang tersedia.
- Memanfaatkan sistem pelaporan digital internal daerah secara berkala untuk memonitor perkembangan sisa desk evaluasi program, fasilitasi politik, pembinaan ideologi, serta kemitraan ormas guna mengawal akuntabilitas SAKIP/SIPD di lingkungan Kabupaten Bantul.

26. Sekretariat DPRD

Evaluasi pelaksanaan program Sekretariat DPRD didukung 2 program diarahkan untuk memastikan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan fasilitasi yang optimal bagi seluruh anggota DPRD Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Efektivitas program ini sangat menentukan kinerja kelembagaan Dewan. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Sekretariat DPRD sebagai berikut:

**Tabel 2. 37 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.346.521.084,00	84,7	55,82	16.895.228.625,00	49,19
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17.119.660.400,00	0	39,58	3.832.093.715,00	22,38
TOTAL			51.466.181.484,00	42,35	48,6	20.727.322.340,00	40,27

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 42,35% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 48,60%. Kemajuan pada level makro indikator program ini ditopang oleh performa tinggi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mencatatkan capaian sebesar 84,70%. Sementara itu, program substantif lembaga legislatif yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD masih mencatatkan angka 0,00% pada indikator programnya karena target indikator (seperti tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi sekretariat atau jumlah regulasi daerah yang ditetapkan) bersifat tahunan dan umumnya baru dievaluasi secara penuh pada akhir tahun anggaran.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, akselerasi awal tahun berjalan cukup dinamis pada dua program utama yang dikelola. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memimpin capaian fisik sub-kegiatan dengan persentase sebesar 55,82%. Langkah yang sejalan juga diperlihatkan oleh Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang bergerak proporsional dengan mencatatkan progres fisik sub-kegiatan sebesar 39,58% seiring berjalannya kegiatan masa sidang, rapat kerja komisi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp51.466.181.484,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat lancar dengan total serapan anggaran mencapai Rp20.727.322.340,00 atau sebesar 40,27%. Secara nominal, porsi penyerapan anggaran terbesar berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp16,89 Miliar (49,19%) guna membiayai kebutuhan operasional rutin kantor, pelayanan gaji pegawai/pimpinan, dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang kesekretariatan.

Analisis deviasi performa belanja menunjukkan adanya tata kelola keuangan yang sangat sehat dan berimbang pada seluruh urusan

kegiatan dewan. Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan alokasi pagu sebesar Rp17,11 Miliar, realisasi keuangannya telah terserap secara proporsional sebesar 22,38% (Rp3.832.093.715,00). Nilai keuangan ini berjalan selaras berdampingan dengan output aktivitas fisik sub-kegiatannya di lapangan yang telah menyentuh 39,58%, menunjukkan efektivitas fasilitasi rapat-rapat kerja, koordinasi alat kelengkapan dewan (AKD), maupun fungsi legislasi yang terlaksana optimal di paruh pertama tahun anggaran.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Sekretariat DPRD ke depan adalah:

- Mempertahankan ritme kerja yang harmonis pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (fisik 39,58% dan anggaran 22,38%), seraya memastikan kualitas fasilitasi terhadap tiga fungsi utama dewan (legislasi, anggaran, dan pengawasan) tetap berjalan prima.
- Menyusun linimasa (time schedule) pembelanjaan teknis dan agenda kegiatan memasuki paruh kedua tahun secara terukur, guna mengantisipasi penumpukan realisasi anggaran pada kegiatan-kegiatan dewan yang memiliki intensitas tinggi mendekati akhir tahun anggaran.
- Menjaga konsistensi tata kelola fisik dan keuangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang saat ini sudah berjalan sangat optimal (fisik 55,82% dan anggaran 49,19%) demi menjamin kelancaran operasional harian dinas.
- Memaksimalkan pemanfaatan pelaporan satu data digital daerah (seperti e-SAKIP/SIPD) untuk mengawal sinkronisasi pelaporan kinerja administrasi kesekretariatan agar target akuntabilitas tata kelola lembaga legislatif tetap terpenuhi secara berkala.

27. Sekretariat Daerah

Evaluasi pelaksanaan program Sekretariat Daerah (Setda) didukung 12 program diarahkan pada peningkatan kualitas dukungan administrasi dan staf ahli kepada Kepala Daerah, penguatan koordinasi antar

Perangkat Daerah, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul secara keseluruhan. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Sekretariat Daerah sebagai berikut:

**Tabel 2. 38 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH					
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.551.248.741,00	0	54,6	11.484.776.858,00	46,78
	4.01.0.00.0.00.01.0011	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.984.660.360,00	0	44,44	3.538.976.441,00	59,13
	4.01.0.00.0.00.01.0012	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN					
3	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	336.971.007,00	0	34,96	252.022.230,00	74,79
4	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	0	0	18.847.400,00	53,85
	4.01.0.00.0.00.01.0013	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN					
5	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	638.292.390,00	0	62,25	307.106.316,00	48,11
	4.01.0.00.0.00.01.0014	BAGIAN HUKUM					
6	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	476.556.243,00	0	54,9	229.671.100,00	48,19
7	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	94.576.000,00	0	0	10.631.000,00	11,24
	4.01.0.00.0.00.01.0015	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					

No	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	936.837.652,00	31,28	60,4	531.631.883,00	56,75
	4.01.0.00.0.00.01.0016	BAGIAN ORGANISASI					
9	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	212.953.011,00	0	17,45	90.778.260,00	42,63
10	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	116.222.000,00	0	8,75	56.238.980,00	48,39
	4.01.0.00.0.00.01.0017	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL					
11	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.319.147.862,00	102,96	62,43	3.028.567.523,00	47,93
	4.01.0.00.0.00.01.0018	BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM					
12	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	329.320.022,00	0	62,3	150.625.650,00	45,74
	TOTAL		40.031.785.288,00	11,19	50,72	19.699.873.641,00	49,21

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 11,19% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 50,72%. Kemajuan pada level makro indikator program di Semester pertama ini dipimpin oleh Bagian Umum dan Protokol (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) yang sukses melampaui target tahunan hingga 102,96%, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Program Perekonomian dan Pembangunan) yang mencatatkan nilai sebesar 31,28%. Sementara itu, program pada bagian-bagian lainnya mayoritas masih berstatus 0,00% karena target makronya diukur secara akumulatif setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, pergerakan di paruh pertama tahun ini berjalan sangat progresif dan merata. Bagian

Umum dan Protokol (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) memimpin capaian fisik sub-kegiatan sebesar 62,43%, ditempel ketat oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) sebesar 62,30%, serta Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam (Program Perekonomian dan Pembangunan) sebesar 62,30%. Kinerja operasional yang tinggi juga dicatatkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Program Perekonomian dan Pembangunan) sebesar 60,40% dan Bagian Hukum (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) sebesar 54,90%. Di sisi lain, program urusan keistimewaan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum masih mencatatkan progres fisik sub-kegiatan sebesar 0,00% seiring tahapan persiapan administrasi dan pematangan kerangka kerja.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp40.031.785.288,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat masif dengan total serapan anggaran mencapai Rp19.699.873.641,00 atau sebesar 49,21%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal dikontribusikan oleh Sekretariat Daerah secara umum (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) senilai Rp11,48 Miliar (46,78%) dari pagu Rp24,55 Miliar untuk mendanai operasional makro kedinasan. Secara persentase, daya serap tertinggi dicatatkan oleh Bagian Tata Pemerintahan (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) yang merealisasikan anggaran hingga 74,79% (Rp252,02 Juta) dari pagunya yang sebesar Rp336,97 Juta.

Analisis deviasi performa menunjukkan pola perkembangan belanja yang dinamis, khususnya pada urusan keistimewaan Yogyakarta (Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan):

- Bagian Tata Pemerintahan: Telah menyerap anggaran sebesar 53,85% (Rp18,84 Juta) dari pagu Rp35 Juta, namun input progres fisik sub-kegiatannya masih tercatat nihil (0,00%). Hal ini mengindikasikan realisasi awal berfokus pada pemenuhan belanja administratif pendukung koordinasi kelembagaan.

- Bagian Organisasi: Menunjukkan tata kelola anggaran yang sangat responsif, di mana penyerapan anggaran telah mencapai 48,39% (Rp56,23 Juta) dari alokasi Rp116,22 Juta dengan progres operasional fisik sub-kegiatan sebesar 8,75%.
- Bagian Hukum: Mencatatkan penyerapan anggaran sebesar 11,24% (Rp10,63 Juta) dari pagu Rp94,57 Juta dengan progres fisik yang masih terdokumentasi 0,00%.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Sekretariat Daerah ke depan adalah:

- Mengakselerasi penyusunan laporan output fisik serta koordinasi lapangan pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta di bawah Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum agar capaian fisik sub-kegiatannya segera mengimbangi laju penyerapan keuangan Dana Keistimewaan yang sudah berjalan signifikan.
- Mempertahankan stabilitas dan ritme kinerja pelayanan operasional yang tinggi pada Bagian Umum dan Protokol, Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam yang capaian fisiknya kompak melaju di atas 62%.
- Mengoptimalkan integrasi pemantauan satu data melalui sistem pelaporan digital daerah (e-SAKIP/SIPD) guna memastikan seluruh bagian di bawah Sekretariat Daerah dapat menginput capaian kinerja secara berkala demi mendukung penilaian akuntabilitas kinerja yang kredibel di Kabupaten Bantul.

28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Evaluasi pelaksanaan program Sekretariat DPRD (Setwan) didukung oleh 2 program utama yang difokuskan pada penguatan portofolio pelayanan administratif kesekretariatan, optimalisasi fasilitasi rapat-rapat legislatif, serta peningkatan dukungan teknis operasional terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil monitoring dan rekapitulasi data akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, hasil evaluasi pelaksanaan Program Sekretariat DPRD Kondisi Semester I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 39 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.346.521.084,00	84,7	55,82	16.895.228.625,00	49,19
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17.119.660.400,00	0	39,58	3.832.093.715,00	22,38
TOTAL			51.466.181.484,00	42,35	48,6	20.727.322.340,00	40,27

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, entitas mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 42,35% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 48,60%. Untuk evaluasi pada Semester pertama, performa makro ini menunjukkan progresivitas yang terukur, didorong oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mencatatkan capaian indikator program yang tinggi sebesar 84,70%. Sementara itu, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD masih tercatat 0,00% pada level makro indikator programnya karena instrumen pengukurannya bersifat tahunan atau baru akan dievaluasi pada akhir tahun anggaran.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik di lapangan, pergerakan program kerja berjalan cukup stabil dan proporsional. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memimpin kemajuan operasional fisik sub-kegiatan dengan capaian mencapai 55,82%, disusul oleh Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan capaian progres fisik lapangan sebesar 39,58%. Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp51.466.181.484,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat lancar dan produktif dengan total serapan

anggaran mencapai Rp20.727.322.340,00 atau sebesar 40,27%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal maupun persentase didominasi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp16.895.228.625,00 (49,19%) dari pagunya yang sebesar Rp34,34 Miliar guna mendukung kelancaran operasional kesekretariatan rutin harian. Sementara itu, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD telah menyerap anggaran sebesar 22,38% (Rp3.832.093.715,00) dari alokasi pagu yang disediakan sebesar Rp17,11 Miliar.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan ke depan adalah:

- Mendorong percepatan pelaksanaan sub-kegiatan secara berkala pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD agar penyerapan sisa pagu anggaran belanja teknis dan output fisik lapangannya dapat melaju optimal pada Semester kedua seiring padatnya agenda fasilitasi legislatif.
- Mempertahankan ritme kerja dan tata kelola keuangan yang sangat baik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan demi menjaga stabilitas capaian kinerja operasional dan mempertahankan kualitas pelayanan administratif kesekretariatan.
- Memaksimalkan integrasi penginputan data monitoring dan evaluasi secara berkala melalui platform digital satu data daerah (e-SAKIP/SIPD) bersama Bappeda Kabupaten Bantul guna menjamin validitas, akurasi, dan ketepatan waktu seluruh dokumen evaluasi hasil RKPD.

29. Kapanewon Piyungan

Evaluasi pelaksanaan program Kapanewon Piyungan didukung 7 program difokuskan pada penguatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kewilayahan, peningkatan koordinasi pelaksanaan program pembangunan daerah di Kalurahan (desa), serta penyediaan layanan publik yang cepat dan dekat dengan masyarakat di

wilayah Piyungan. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kapanewon Piyungan sebagai berikut:

Tabel 2. 40 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	0,00	0	0	0,00	0
2	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000,00	48,77	33,33	14.632.000,00	48,77
3	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.035.496.287,00	0	62,98	1.409.979.583,00	46,45
4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.500.000,00	55,28	50	5.150.000,00	44,78
5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.916.000,00	71,8	83,33	37.992.500,00	71,8
6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.000.000,00	50	50	1.500.000,00	50
7	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	85.712.400,00	2,97	100	2.547.500,00	2,97
TOTAL			3.218.624.687,00	28,6	63,59	1.471.801.583,00	45,73

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Kapanewon Piyungan mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 28,60% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 63,59%. Di tingkat kewilayahan (kapanewon), performa makro ini tergolong sangat responsif dan melaju positif karena hampir seluruh target program sudah berhasil memecah nilai capaian di Semester pertama. Capaian indikator program tertinggi dicatatkan oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 71,80%, disusul oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 55,28%, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 50,00%, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 48,77%, serta

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 2,97%. Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota masih berstatus 0,00% pada indikator programnya karena target makronya diukur penuh secara tahunan.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, akselerasi lapangan berjalan sangat solid. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memimpin dengan capaian fisik sub-kegiatan yang sempurna mencapai 100,00%. Diikuti secara progresif oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 83,33%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 62,98%, serta Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik bersama Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang kompak mencatatkan progres fisik sub-kegiatan sebesar 50,00%. Di sisi lain, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan mencatatkan capaian fisik sebesar 33,33%, sedangkan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan tercatat berstatus nihil (0,00%) karena memiliki alokasi pagu sebesar Rp0,00 pada paruh berjalan ini.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp3.218.624.687,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat lancar dengan total serapan anggaran mencapai Rp1.471.801.583,00 atau sebesar 45,73%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal didominasi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp1,40 Miliar (46,45%) untuk mendanai operasional rutin harian kantor pelayanan. Secara persentase, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencatatkan daya serap tertinggi dengan merealisasikan belanja sebesar 71,80% (Rp37.992.500,00) dari alokasi pagunya yang sebesar Rp52,91 Juta.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Kapanewon Piyungan ke depan adalah:

- Melakukan percepatan rekonsiliasi SPJ dan penyelesaian administrasi belanja pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum agar serapan keuangan (baru 2,97%) dapat segera disesuaikan secara akuntabel sejalan dengan output fisiknya yang telah menyentuh 100,00%.
- Mempertahankan ritme kerja efisien dan selaras yang ditunjukkan oleh Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Trantibum, serta Program Pelayanan Publik (anggaran 44,78%, fisik 50,00%) guna memastikan kualitas fasilitasi masyarakat dan adminduk di tingkat kapanewon berjalan prima.
- Mengawal penyerapan sisa anggaran urusan keistimewaan secara berkala pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan agar pemanfaatan Dana Keistimewaan tepat sasaran dan terhindar dari penumpukan sisa anggaran di akhir tahun.
- Memaksimalkan penginputan data evaluasi hasil RKPD secara berkala pada aplikasi digital daerah untuk menjaga integrasi pelaporan satu data kewilayahan yang sinkron dengan Bappeda Kabupaten Bantul demi mempertahankan capaian nilai SAKIP yang optimal.

30. Kapanewon Dlingo

Evaluasi pelaksanaan program Kapanewon Dlingo didukung 7 program diarahkan pada penguatan koordinasi program-program pembangunan yang berorientasi pada potensi kewilayahan (termasuk pariwisata alam), peningkatan efektivitas pelayanan publik di tingkat Kapanewon, serta pemberdayaan Kalurahan dalam mengelola dana desa untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kapanewon Dlingo sebagai berikut:

**Tabel 2. 41 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000,00	50,33	66,67	15.099.800,00	50,33
2	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.332.822.124,00	0	40,56	1.674.869.463,00	50,25
3	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.250.000,00	0	44,44	9.550.000,00	42,92
4	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	81.968.100,00	50,45	37,78	41.352.000,00	50,45
5	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.300.000,00	48,81	20	3.075.000,00	48,81
6	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	66.048.500,00	10,41	20	6.875.000,00	10,41
TOTAL			3.539.388.724,00	22,86	40,17	1.750.821.263,00	49,47

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Kapanewon Dlingo mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 22,86% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 40,17%. Untuk tingkat kewilayahan (kapanewon), performa makro ini menunjukkan progres paruh tahun yang sangat responsif karena mayoritas indikator program sudah berhasil memecah nilai secara signifikan. Capaian indikator program tertinggi diraih oleh Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 50,33%, disusul rapat oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 50,45%, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 48,81%, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 10,41%. Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik masih mencatatkan capaian program sebesar 0,00%

karena target makronya diukur secara akumulatif pada akhir tahun anggaran.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan memimpin percepatan di lapangan dengan capaian fisik sub-kegiatan mencapai 66,67%. Langkah operasional yang stabil juga diperlihatkan oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 44,44%, diikuti oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 40,56%, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 37,78%. Sementara itu, aktivitas fisik sub-kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum kompak bergerak stabil di angka 20,00%.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp3.539.388.724,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat optimal dengan total serapan anggaran mencapai Rp1.750.821.263,00 atau sebesar 49,47%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal dialokasikan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp1.674.869.463,00 (50,25%) dari pagunya yang sebesar Rp3,33 Miliar guna membiayai operasional rutin kantor harian. Secara persentase, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencatatkan daya serap tertinggi dengan merealisasikan belanja sebesar 50,45% (Rp41.352.000,00) dari alokasi pagunya yang sebesar Rp81,96 Juta.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Kapanewon Dlingo ke depan adalah:

- Mempertahankan tren keselarasan (alignment) performa keuangan dan kinerja program yang sangat baik ini, guna memperkuat portofolio akuntabilitas kinerja Kapanewon Dlingo dalam penilaian SAKIP tingkat kabupaten.

- Mendorong percepatan pelaporan output lapangan pada sub-kegiatan substantif, khususnya pada Program Pemberdayaan Masyarakat (fisik 37,78%) serta Program Trantibum (fisik 20,00%) agar pelaporan fisik sub-kegiatan dapat segera mengimbangi laju penyerapan anggarannya yang sudah menyentuh kisaran 50%.
- Mengawal kelanjutan pelaksanaan sub-kegiatan pelayanan publik pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (anggaran 42,92%, fisik 44,44%) guna mempertahankan kualitas mutu pelayanan adminduk dan perizinan di tingkat kapanewon secara berkelanjutan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pelaporan digital koordinasi satu data (seperti e-SAKIP/SIPD) secara kontinu bersama Bappeda Kabupaten Bantul untuk memastikan keabsahan, akurasi, dan ketepatan waktu penginputan data hasil evaluasi RKPD.

31. Kapanewon Imogiri

Evaluasi pelaksanaan program Kapanewon Imogiri didukung 7 program berfokus pada penguatan koordinasi program pembangunan yang memperhatikan aspek pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya yang melekat pada wilayah tersebut, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan umum, serta fasilitasi sinergi program antar Kalurahan. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kapanewon Imogiri sebagai berikut:

**Tabel 2. 42 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000,00	47,1	33,33	14.132.500,00	47,11
2	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.500.622.887,00	99,18	79,16	1.570.403.883,00	44,86

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.000.000,00	49,85	33,33	5.250.000,00	40,38
4	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	84.641.000,00	61,75	66,67	52.266.000,00	61,75
5	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.250.000,00	61,53	50	2.000.000,00	61,54
6	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	81.850.200,00	4,73	0	3.875.000,00	4,73
TOTAL			3.713.364.087,00	60,47	67,41	1.647.927.383,00	44,38

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Kapanewon Imogiri mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 60,47% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 67,41%. Di tingkat kewilayahan (kapanewon), performa makro ini tergolong sangat tinggi dan progresif karena hampir seluruh target program sudah melaju pesat di Semester pertama. Capaian indikator program tertinggi dicatatkan oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menyentuh 99,18%, disusul berturut-turut oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 61,75%, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 61,53%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 49,85%, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 47,10%, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 4,73%.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, akselerasi lapangan berjalan sangat solid. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memimpin dengan capaian fisik sub-kegiatan tertinggi mencapai 79,16%. Langkah operasional yang responsif juga diperlihatkan oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 66,67%, disusul oleh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 50,00%, serta Program

Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan bersama Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang kompak mencatatkan progres fisik sub-kegiatan sebesar 33,33%. Sebaliknya, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menjadi satu-satunya program yang aktivitas fisik sub-kegiatannya masih tercatat nihil (0,00%).

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp3.713.364.087,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat lancar dengan total serapan anggaran mencapai Rp1.647.927.383,00 atau sebesar 44,38%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal didominasi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp1,57 Miliar (44,86%) dari pagunya yang sebesar Rp3,50 Miliar guna mendanai operasional rutin harian kantor pelayanan. Secara persentase daya serap belanja, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum memimpin capaian tertinggi yang masing-masing berhasil menyerap anggaran sebesar 61,75% (Rp52.266.000,00) dan 61,54% (Rp2.000.000,00) dari alokasi pagunya.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Kapanewon Imogiri ke depan adalah:

- Mengakselerasi pelaksanaan aktivitas lapangan dan penginputan data capaian fisik secara berkala pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum agar kemajuan output fisiknya (baru 0,00%) segera bergerak maju mengimbangi realisasi anggaran dan indikator program yang sudah berjalan.
- Mempertahankan tren keselarasan (alignment) performa keuangan dan kinerja program yang sangat baik ini, guna memperkuat portofolio akuntabilitas kinerja Kapanewon Imogiri dalam penilaian SAKIP tingkat kabupaten.
- Mendorong kelanjutan pelaksanaan sub-kegiatan pelayanan publik pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

(anggaran 40,38%, fisik 33,33%) guna memastikan kualitas mutu pelayanan adminduk dan perizinan di tingkat kapanewon berjalan optimal secara berkelanjutan.

- Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pelaporan digital koordinasi satu data daerah (e-SAKIP/SIPD) secara kontinu bersama Bappeda Kabupaten Bantul untuk mengawal validitas, akurasi, dan ketepatan waktu pelaporan dokumen evaluasi hasil RKPD.

32. Kapanewon Pandak

Evaluasi pelaksanaan program Kapanewon Pandak didukung 7 program diarahkan pada peningkatan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan, penguatan koordinasi program lintas sektor di Kalurahan, serta fasilitasi peningkatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kapanewon Pandak sebagai berikut:

Tabel 2. 43 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000,00	0	33,33	14.315.000,00	47,72
2	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.290.733.387,00	0	37,26	1.524.466.673,00	46,33
3	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.800.000,00	0	41,67	5.775.000,00	34,38
4	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.791.500,00	0	55,56	26.089.500,00	53,47
5	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.450.000,00	0	50	1.750.000,00	71,43
6	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.879.600,00	0	0	1.990.000,00	6,89
TOTAL			3.417.654.487,00	0	38,67	1.574.386.173,00	46,07

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Kapanewon Pandak mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 0,00% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 38,67%. Nilai nol persen pada level makro indikator program di Semester pertama ini merupakan karakteristik yang umum pada instansi kewilayahan, mengingat instrumen pengukuran indikator sasaran program (seperti indeks kepuasan pelayanan kecamatan atau tingkat partisipasi masyarakat) bersifat tahunan dan evaluasi akhirnya baru dapat diukur secara akumulatif setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, pergerakan di awal tahun ini berjalan cukup dinamis dan dipimpin oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan capaian fisik sub-kegiatan tertinggi sebesar 55,56%. Langkah operasional yang stabil juga diperlihatkan oleh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 50,00%, diikuti oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 41,67%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 37,26%, serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 33,33%. Sebaliknya, hanya terdapat satu program yang aktivitas fisik sub-kegiatannya masih tercatat nihil (0,00%), yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp3.417.654.487,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat progresif dengan total serapan anggaran mencapai Rp1.574.386.173,00 atau sebesar 46,07%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal didominasi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp1.524.466.673,00 (46,33%) guna mendanai operasional rutin harian, gaji pegawai, dan penyediaan jasa perkantoran kapanewon. Secara persentase daya serap anggaran belanja, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mencatatkan realisasi tertinggi

dengan menyerap 71,43% (Rp1.750.000,00) dari alokasi pagunya yang sebesar Rp2,45 Juta.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Kapanewon Pandak ke depan adalah:

- Mengakselerasi pelaksanaan aktivitas lapangan dan penyusunan laporan fisik pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum agar kemajuan fisiknya (saat ini masih 0,00%) tidak tertinggal dari administrasi keuangan yang sudah mulai berjalan.
- Mempertahankan ritme kerja efisien dan stabilitas pelayanan yang ditunjukkan oleh Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Trantibum, serta Program Pelayanan Publik demi menjaga kualitas fasilitasi kewilayahan yang optimal.
- Mengawal ketepatan belanja sisa anggaran urusan keistimewaan secara berkala pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan agar penggunaan Dana Keistimewaan berjalan tepat waktu dan terhindar dari penumpukan sisa pagu di akhir tahun.
- Memaksimalkan pemanfaatan pelaporan satu data digital daerah (seperti e-SAKIP/SIPD) untuk menginput seluruh capaian fisik dan keuangan kapanewon secara presisi dan berkala guna memperkuat akuntabilitas kinerja SAKIP tingkat Kabupaten.

33. Kapanewon Bantul

Evaluasi pelaksanaan program Kapanewon Bantul didukung 7 program berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan di wilayah ibukota kabupaten, peningkatan kualitas pelayanan publik terpadu, serta koordinasi program pembangunan di tingkat Kalurahan yang mendukung citra perkotaan yang tertata dan humanis. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kapanewon Bantul sebagai berikut:

**Tabel 2. 44 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000,00	25	33,33	3.175.300,00	10,58
2	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.041.110.136,00	99,39	63,77	1.402.343.218,00	46,11
3	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.350.000,00	49,38	50	3.150.000,00	30,43
4	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	195.985.800,00	70	78,52	172.842.800,00	88,19
5	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	750.000,00	100	100	750.000,00	100
6	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	83.676.000,00	10	0	900.000,00	1,08
TOTAL			3.361.871.936,00	64,74	62	1.583.161.318,00	47,09

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Kapanewon Bantul mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 64,74% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 62,00%. Hasil makro di Semester pertama ini tergolong sangat progresif dan melaju pesat untuk instansi tingkat kapanewon, karena mayoritas program kerja utama sudah memberikan kontribusi capaian yang signifikan. Akselerasi performa tertinggi dicatatkan oleh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berhasil menyentuh angka sempurna 100,00%, diikuti rapat oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 99,39%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 70,00%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 49,38%, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 25,00%, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 10,00%.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, pergerakan di lapangan berjalan sangat solid dan merata. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum memimpin percepatan dengan capaian fisik sub-kegiatan mencapai 100,00%, yang mengindikasikan seluruh target aktivitas operasional paruh tahun telah dituntaskan sepenuhnya. Langkah operasional yang mantap juga diperlihatkan oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 78,52%, disusul oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 63,77%, serta Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 50,00% dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 33,33%. Sebaliknya, hanya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang aktivitas fisik sub-kegiatannya masih tercatat nihil (0,00%).

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp3.361.871.936,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat lancar dengan total serapan anggaran mencapai Rp1.583.161.318,00 atau sebesar 47,09%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal dialokasikan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp1,40 Miliar (46,11%) dari pagunya yang sebesar Rp3,04 Miliar guna membiayai operasional rutin harian kantor pelayanan. Secara persentase daya serap belanja, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum memimpin efektivitas anggaran dengan realisasi penuh sebesar 100,00% (Rp750.000,00) sesuai alokasi pagunya, ditempel ketat oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencatatkan serapan sangat tinggi sebesar 88,19% (Rp172.842.800,00) dari pagu Rp195,98 Juta.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Kapanewon Bantul ke depan adalah:

- Mengakselerasi pelaksanaan aktivitas lapangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban fisik pada Program Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Umum agar kemajuan fisiknya (saat ini 0,00%) segera bergerak maju mengimbangi realisasi keuangan dan capaian program yang sudah mulai berjalan.

- Mempertahankan tren keselarasan (alignment) performa keuangan dan kinerja program yang sangat baik ini, guna memperkuat portofolio akuntabilitas kinerja Kapanewon Bantul dalam penilaian SAKIP tingkat kabupaten.
- Mengawal ketepatan realisasi sisa anggaran belanja teknis pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (serapan 88,19%) serta Program Pelayanan Publik guna menjamin keberlanjutan fasilitasi usulan masyarakat dan mutu layanan adminduk harian secara optimal.
- Mengoptimalkan koordinasi satu data pelaporan melalui aplikasi digital daerah (e-SAKIP/SIPD) bersama Bappeda Kabupaten Bantul untuk memastikan validitas, akurasi, dan ketepatan waktu penginputan dokumen evaluasi hasil RKPD secara berkala.

34. Kapanewon Kretek

Evaluasi pelaksanaan program Kapanewon Kretek didukung 7 program diarahkan pada penguatan koordinasi program yang menunjang sektor pariwisata (khususnya kawasan pantai Parangtritis), peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana pesisir, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kewilayahan. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kapanewon Kretek sebagai berikut:

**Tabel 2. 45 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000,00	40	0	13.437.500,00	44,79
2	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.066.209.698,00	0	48,37	1.425.242.133,00	46,48

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		DAERAH KABUPATEN/KOTA					
3	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.625.000,00	29,63	39,29	26.950.000,00	80,15
4	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.997.500,00	50	24,44	19.057.000,00	38,12
5	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	450.000,00	60	40	450.000,00	100
6	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	69.166.500,00	0	0	1.062.500,00	1,54
		TOTAL	3.249.448.698,00	25,66	40,81	1.486.199.133,00	45,74

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Kapanewon Kretek mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 25,66% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 40,81%. Untuk tingkat kewilayahan (kapanewon), performa makro ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik di Semester pertama karena mayoritas program teknis sektoral telah berhasil memecah nilai target indikator programnya. Nilai capaian kinerja program tertinggi dikontribusikan oleh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 60,00%, disusul oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 50,00%, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 40,00%, serta Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang mencatatkan capaian sebesar 29,63%. Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum masih berada di angka 0,00% pada indikator program makronya.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, akselerasi di lapangan berjalan cukup proporsional. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memimpin kemajuan operasional dengan capaian fisik sub-kegiatan mencapai 48,37%, ditempel rapat oleh

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 40,00%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 39,29%, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencatatkan progres sebesar 24,44%. Sebaliknya, terdapat dua program yang aktivitas fisik sub-kegiatannya masih tercatat nihil (0,00%), yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp3.249.448.698,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat lancar dengan total serapan anggaran mencapai Rp1.486.199.133,00 atau sebesar 45,74%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal didominasi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp1.425.242.133,00 (46,48%) dari pagunya yang sebesar Rp3,06 Miliar guna mendanai operasional rutin harian kesekretariatan. Secara persentase daya serap anggaran, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum memimpin efisiensi penuh dengan merealisasikan seluruh anggarannya secara total sebesar 100,00% (Rp450.000,00), diikuti secara progresif oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang menyerap belanja sangat tinggi sebesar 80,15% (Rp26.950.000,00) dari alokasi pagu Rp33,62 Juta.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Kapanewon Kretek ke depan adalah:

- Mengakselerasi penyusunan administrasi pertanggungjawaban fisik dan penginputan data pada Program Keistimewaan Urusan Kelembagaan (anggaran 44,79%, fisik 0,00%) serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (anggaran 1,54%, fisik 0,00%) agar kemajuan output fisiknya segera terisi secara akurat.
- Mendorong percepatan pencapaian target fisik sub-kegiatan pelayanan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

(fisik 39,29%) guna mengimbangi persentase daya serap anggarannya yang telah melaju pesat menyentuh 80,15%.

- Mempertahankan ritme kerja efisien pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (anggaran 46,48%, fisik 48,37%) serta Program Pemberdayaan Masyarakat guna menjamin keberlanjutan fasilitasi pembangunan kalurahan dan ketatausahaan kantor yang akuntabel.
- Memaksimalkan integrasi penginputan data monitoring dan evaluasi secara berkala melalui instrumen sistem informasi pelaporan digital daerah (e-SAKIP/SIPD) bersama Bappeda Kabupaten Bantul untuk mempertahankan keabsahan satu data daerah demi capaian nilai SAKIP yang optimal.

35. Kapanewon Bambanglipuro

Evaluasi pelaksanaan program Kapanewon Bambanglipuro didukung 7 program berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan kewilayahan, koordinasi program pembangunan antar Kalurahan, serta fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor unggulan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kapanewon Bambanglipuro sebagai berikut:

**Tabel 2. 46 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026**

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000,00	51	66,67	14.660.500,00	48,87
2	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.858.503.884,00	99,86	59,4	1.270.880.088,00	44,46
3	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.000.000,00	69,14	50	7.075.000,00	54,42
4	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.878.000,00	46,66	47,83	15.405.500,00	39,63
5	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.600.000,00	51	60	1.800.000,00	50

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.231.000,00	6	30	3.900.000,00	5,18
TOTAL			3.019.212.884,00	60,5	56,39	1.313.721.088,00	43,51

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Kapanewon Bambanglipuro mencatatkan performa awal tahun yang sangat solid dengan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 60,50% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 56,39%. Capaian makro yang tinggi di Semester pertama ini mencerminkan progresivitas instansi tingkat kapanewon karena seluruh program kerja sektoral telah melaju pesat dalam memenuhi indikator sasarannya. Akselerasi performa tertinggi dicatatkan oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menyentuh angka 99,86%, disusul berturut-turut oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 69,14%, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang kompak berada di angka 51,00%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 46,66%, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 6,00%.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, pergerakan di lapangan berjalan beriringan secara mantap dan merata. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan memimpin dengan capaian fisik sub-kegiatan tertinggi mencapai 66,67%. Langkah operasional yang responsif juga diperlihatkan oleh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 60,00%, disusul oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 59,40%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 50,00%, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 47,83%.

Sementara itu, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mencatatkan progres fisik sub-kegiatan sebesar 30,00%.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp3.019.212.884,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat lancar dengan total serapan anggaran mencapai Rp1.313.721.088,00 atau sebesar 43,51%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal didominasi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp1.270.880.088,00 (44,46%) dari pagunya yang sebesar Rp2,85 Miliar guna mendanai belanja operasional rutin kantor pelayanan harian. Secara persentase daya serap anggaran belanja teknis, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memimpin realisasi tertinggi sebesar 54,42% (Rp7.075.000,00) dari alokasi pagunya yang sebesar Rp13,00 Juta.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Kapanewon Bambanglipuro ke depan adalah:

- Mempertahankan tren keselarasan (alignment) performa keuangan dan capaian kinerja program yang sudah berjalan sangat baik, guna terus memperkuat portofolio akuntabilitas kinerja instansi.
- Mendorong kelanjutan pelaksanaan sub-kegiatan fisik substantif pada Program Pemberdayaan Masyarakat serta Program Pelayanan Publik demi menjaga keberlanjutan fasilitasi pembangunan kewilayahan secara berkelanjutan.
- Mengawal ketepatan realisasi sisa anggaran belanja teknis pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum serta urusan keistimewaan agar penyerapan pagu dapat berjalan merata di paruh kedua tahun dan terhindar dari penumpukan sisa pagu di akhir tahun anggaran.
- Mengoptimalkan integrasi pemantauan satu data melalui aplikasi pelaporan digital daerah (e-SAKIP/SIPD) secara berkala bersama Bappeda Kabupaten Bantul untuk memastikan validitas, akurasi, dan ketepatan waktu penginputan dokumen evaluasi hasil RKPD.

36. Kapanewon Jetis

Evaluasi pelaksanaan program Kapanewon Jetis didukung 7 program diarahkan pada peningkatan efektivitas layanan administrasi pemerintahan di tingkat kewilayahan, fasilitasi dan pengawasan program pembangunan di Kalurahan, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna menyelesaikan isu-isu strategis di tingkat Kapanewon. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kapanewon Jetis sebagai berikut:

Tabel 2. 47 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000,00	38	33,33	11.400.000,00	38
2	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.319.947.990,00	0	41,67	1.439.728.401,00	43,37
3	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.024.500,00	0	66,67	26.492.500,00	61,58
4	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	70.643.000,00	26	52,78	18.832.000,00	26,66
5	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.682.000,00	87	80	10.932.000,00	93,58
6	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.119.500,00	87	0	2.500.000,00	4,8
TOTAL			3.527.416.990,00	34	45	1.509.884.901,00	42,8

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Kapanewon Jetis mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 34,00% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 45,00%. Untuk evaluasi di tingkat kewilayahan (kapanewon) pada Semester pertama, performa makro ini menunjukkan pergerakan progresif karena mayoritas program kerja sektoral utama telah berhasil memecah nilai target indikator programnya. Capaian indikator program tertinggi diraih bersama oleh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Umum yang kompak menyentuh angka 87,00%, disusul oleh Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 38,00%, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 26,00%. Sementara itu, Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik masih tercatat 0,00% pada level capaian indikator program makronya.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, akselerasi di lapangan berjalan sangat solid dan merata. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum memimpin kemajuan operasional lapangan dengan capaian fisik sub-kegiatan mencapai 80,00%, disusul berturut-turut oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 66,67%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 52,78%, Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 41,67%, serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 33,33%. Sebaliknya, hanya Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang aktivitas fisik sub-kegiatannya masih tercatat nihil (0,00%).

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp3.527.416.990,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat lancar dengan total serapan anggaran mencapai Rp1.509.884.901,00 atau sebesar 42,80%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal didominasi oleh Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp1.439.728.401,00 (43,37%) dari pagunya yang sebesar Rp3,31 Miliar guna mendukung kesekretariatan rutin harian. Secara persentase daya serap anggaran belanja teknis, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum memimpin realisasi tertinggi dengan menyerap anggaran hingga 93,58% (Rp10.932.000,00) dari alokasi pagu Rp11,68 Juta, ditempel ketat oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang menyerap sebesar 61,58% (Rp26.492.500,00) dari pagu Rp43,02 Juta.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Kapanewon Jetis ke depan adalah:

- Mengakselerasi pelaksanaan aktivitas lapangan dan penginputan data capaian fisik pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum agar progres fisiknya (saat ini 0,00%) segera bergerak maju mengimbangi capaian program dan administrasi keuangan yang sudah mulai berjalan.
- Mempertahankan tren keselarasan (alignment) performa keuangan dan kinerja program yang sudah berjalan sangat baik ini, guna terus memperkuat akuntabilitas kinerja Kapanewon Jetis dalam penilaian SAKIP tingkat kabupaten.
- Mengawal ketepatan sisa realisasi anggaran belanja teknis pada Program Koordinasi Trantibum (serapan 93,58%) serta Program Pelayanan Publik (serapan 61,58%) demi memastikan kesinambungan mutu pelayanan adminduk dan stabilitas wilayah secara berkelanjutan.
- Memaksimalkan pemantauan data secara berkala melalui platform satu data pelaporan digital daerah (e-SAKIP/SIPD) bersama Bappeda Kabupaten Bantul guna menjamin validitas, akurasi, dan ketepatan waktu penginputan dokumen evaluasi hasil RKPD.

37. Kapanewon Kasihan

Evaluasi pelaksanaan program Kapanewon Kasihan didukung 7 program berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan kewilayahan dengan memperhatikan dinamika daerah penyangga kota, peningkatan koordinasi pembangunan infrastruktur perkotaan, serta optimalisasi pelayanan publik yang cepat dan tanggap bagi masyarakat yang heterogen. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kapanewon Kasihan sebagai berikut:

**Tabel 2. 48 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000,00	73	66,67	21.840.000,00	72,8
2	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.458.093.460,00	100,11	103,7	1.621.641.929,00	46,89
3	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32.571.500,00	40,74	75	12.902.500,00	39,61
4	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	83.245.500,00	57	66,67	46.719.000,00	56,12
5	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.310.000,00	47	50	9.905.000,00	46,48
6	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	79.018.500,00	2	1,54	1.500.000,00	1,9
TOTAL			3.704.238.960,00	59,99	89,77	1.714.508.429,00	46,29

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Kapanewon Kasihan mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 59,99% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 89,77%. Performa makro kewilayahan di awal tahun ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, didorong oleh capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mencatatkan indikator program sebesar 100,11%, melampaui target paruh tahunnya. Keberhasilan memecah nilai target makro juga diikuti oleh program kerja teknis sektoral lainnya secara merata, dipimpin oleh Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 73,00%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 57,00%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 40,74%, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar

47,00%, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 2,00%.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, Kapanewon Kasihan menunjukkan akselerasi yang luar biasa tinggi dan merata di lapangan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memimpin kemajuan fisik sub-kegiatan dengan capaian mencapai 103,70%. Langkah operasional fisik yang kuat juga ditunjukkan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 75,00%, diikuti secara kompak oleh Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang masing-masing menyentuh angka 66,67%. Selanjutnya, progres fisik Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tercatat mapan di angka 50,00%, sementara Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sudah mulai bergerak di angka 1,54%.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp3.704.238.960,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat lancar dan produktif dengan total serapan anggaran mencapai Rp1.714.508.429,00 atau sebesar 46,29%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal didominasi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp1.621.641.929,00 (46,89%) dari pagunya yang sebesar Rp3,45 Miliar guna mendanai belanja rutin operasional kantor pelayanan harian. Secara persentase daya serap anggaran belanja teknis, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan memimpin efisiensi dengan menyerap anggaran tertinggi mencapai 72,80% (Rp21.840.000,00) dari alokasi pagunya yang sebesar Rp30,00 Juta.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Kapanewon Kasihan ke depan adalah:

- Mempertahankan tren keselarasan (alignment) performa keuangan dan capaian fisik lapangan yang sudah berjalan sangat tinggi, terutama

pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta Program Keistimewaan, guna terus memperkuat akuntabilitas portofolio nilai SAKIP di tingkat kabupaten.

- Mengakselerasi penyusunan jadwal kerja substantif paruh kedua serta penyerapan anggaran sisa secara berkala pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (pagu Rp79,01 Juta) agar aktivitas pembinaan wawasan kebangsaan dapat bergulir lebih optimal di Semester kedua.
- Mengawal ketepatan belanja sisa pagu anggaran teknis pelayanan pada Program Pelayanan Publik (serapan 39,61%) dan Program Pemberdayaan Masyarakat (serapan 56,12%) demi menjaga keberlanjutan kualitas fasilitasi kalurahan serta mutu layanan adminduk harian.
- Memaksimalkan integrasi pelaporan data secara rutin melalui platform satu data digital daerah (seperti e-SAKIP/SIPD) bersama Bappeda Kabupaten Bantul guna memastikan validitas, akurasi, dan ketepatan waktu penginputan seluruh dokumen laporan hasil evaluasi RKPD.

38. Kapanewon Pleret

Evaluasi pelaksanaan program Kapanewon Pleret didukung 7 program diarahkan pada penguatan fungsi pemerintahan kewilayahan, koordinasi program pembangunan yang harmonis dengan pelestarian situs cagar budaya, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kapanewon Pleret sebagai berikut:

Tabel 2. 49 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000,00	29,41	33,33	8.823.000,00	29,41

No	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.129.463.050,00	50	39,03	1.471.723.019,00	47,03
3	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.260.000,00	0	16,67	7.640.000,00	53,58
4	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	58.254.000,00	32,78	63,49	19.100.000,00	32,79
5	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.566.000,00	52,26	40	20.066.000,00	88,92
6	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	136.178.000,00	10,09	0	1.375.000,00	1,01
TOTAL			3.390.721.050,00	32,08	37,69	1.528.727.019,00	45,09

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Kapanewon Pleret mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 32,08% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 37,69%. Untuk evaluasi di tingkat kewilayahan (kapanewon) pada Semester pertama, performa makro ini menunjukkan pergerakan awal yang positif karena mayoritas program kerja sektoral utama telah berhasil memecah nilai target indikator programnya. Capaian indikator program tertinggi diraih oleh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 52,26%, disusul rapat oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 50,00%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 32,78%, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 29,41%, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 10,09%. Sebaliknya, hanya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang masih mencatatkan angka 0,00% pada level makro indikator program.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, akselerasi di lapangan berjalan cukup solid. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memimpin pergerakan lapangan dengan capaian fisik

sub-kegiatan tertinggi mencapai 63,49%, disusul berturut-turut oleh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 40,00%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 39,03%, serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 33,33% dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 16,67%. Di sisi lain, hanya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang aktivitas fisik sub-kegiatannya masih tercatat nihil (0,00%).

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp3.390.721.050,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan lancar dengan total serapan anggaran mencapai Rp1.528.727.019,00 atau sebesar 45,09%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal diserap oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp1.471.723.019,00 (47,03%) dari pagunya yang sebesar Rp3,12 Miliar guna mendukung kelancaran operasional kesekretariatan. Secara persentase daya serap anggaran belanja teknis, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum memimpin realisasi tertinggi dengan menyerap belanja mencapai 88,92% (Rp20.066.000,00) dari alokasi pagu Rp22,56 Juta, diikuti oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 53,58% (Rp7.640.000,00) dari alokasi pagu Rp14,26 Juta.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Kapanewon Pleret ke depan adalah:

- Mengakselerasi pelaksanaan aktivitas lapangan dan penyusunan pertanggungjawaban fisik pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum agar input kemajuan fisiknya (saat ini 0,00%) segera berprogres mengimbangi realisasi keuangan dan indikator makronya.
- Mendorong percepatan penyerapan sisa anggaran belanja teknis secara berkala pada Program Koordinasi Trantibum (serapan 88,92%) serta Program Pemberdayaan Masyarakat (serapan 32,79%) guna

memastikan keberlanjutan stabilitas wilayah dan fasilitasi pembangunan kalurahan harian berjalan optimal.

- Mempertahankan tren keselarasan (alignment) performa keuangan dan kinerja program yang sudah berjalan sangat baik, terutama pada urusan keistimewaan dan pemberdayaan masyarakat, demi memperkuat portofolio akuntabilitas nilai SAKIP Kapanewon Pleret di tingkat kabupaten.
- Memaksimalkan penginputan data monitoring dan evaluasi secara berkala melalui platform digital satu data (e-SAKIP/SIPD) bersama Bappeda Kabupaten Bantul untuk memastikan validitas, akurasi, dan ketepatan waktu penginputan dokumen evaluasi hasil RKPD.

39. Kapanewon Pajangan

Evaluasi pelaksanaan program Kapanewon Pajangan didukung 7 program berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan kewilayahan, koordinasi pelaksanaan program pembangunan daerah yang efektif di Kalurahan, serta peningkatan pelayanan administrasi publik bagi masyarakat. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kapanewon Pajangan, yang disajikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 50 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000,00	46,95	0	13.510.500,00	45,04
2	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.911.738.377,00	49,07	65,24	1.413.200.093,00	48,53
3	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.500.000,00	0	35,71	6.750.000,00	50
4	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.696.000,00	46,88	50	20.484.000,00	46,88
5	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.620.000,00	57,58	50	2.660.000,00	57,58

No	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65.699.000,00	0	0	0,00	0
TOTAL			3.069.253.377,00	35,65	52,51	1.456.604.593,00	47,46

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Kapanewon Pajangan mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 35,65% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 52,51%. Untuk tahapan awal tahun di tingkat kewilayahan (kapanewon), performa makro ini menunjukkan pergerakan awal yang sangat baik karena mayoritas program kerja sektoral utama telah berhasil memecah target indikator programnya. Nilai capaian kinerja program tertinggi diraih oleh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 57,58%, disusul oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 49,07%, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 46,95%, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 46,88%. Sebaliknya, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum masih tercatat sebesar 0,00% pada level makro indikator programnya.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, akselerasi di lapangan berjalan cukup seimbang dan merata. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memimpin kemajuan operasional dengan capaian fisik sub-kegiatan mencapai 65,24%, disusul secara kompak oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang masing-masing menyentuh angka 50,00%. Langkah operasional yang stabil juga diperlihatkan oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 35,71%. Sebaliknya, terdapat dua program yang aktivitas fisik sub-kegiatannya masih tercatat

nihil (0,00%), yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp3.069.253.377,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan optimal dan produktif dengan total serapan anggaran mencapai Rp1.456.604.593,00 atau sebesar 47,46%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal didominasi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp1.413.200.093,00 (48,53%) dari pagunya yang sebesar Rp2,91 Miliar guna mendanai rutin harian kesekretariatan. Secara persentase daya serap anggaran belanja teknis, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum memimpin dengan merealisasikan belanja sebesar 57,58% (Rp2.660.000,00) dari alokasi pagunya yang sebesar Rp4,62 Juta, disusul oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang menyerap tepat sebesar 50,00% (Rp6.750.000,00) dari alokasi pagu Rp13,50 Juta.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Kapanewon Pajangan ke depan adalah:

- Mengakselerasi penyusunan administrasi pertanggungjawaban fisik dan penginputan data pada Program Keistimewaan Urusan Kelembagaan agar input kemajuan fisiknya (saat ini 0,00%) segera terisi seimbang dengan realisasi anggaran belanjanya yang sudah berjalan lancar menyentuh 45,04%.
- Menginisiasi persiapan administratif, penyusunan jadwal operasional, dan pembelanjaan teknis pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (pagu Rp65,69 Juta) yang saat ini kinerjanya masih sepenuhnya nihil, agar kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan wawasan kebangsaan dapat bergulir di Semester kedua.
- Mempertahankan tren keselarasan (alignment) performa keuangan dan kinerja program yang sudah berjalan sangat baik ini, terutama pada

urusan trantibum serta pemberdayaan masyarakat, guna mengawal stabilitas nilai SAKIP Kapanewon Pajangan di tingkat kabupaten.

- Memaksimalkan integrasi penginputan data monitoring dan evaluasi secara berkala melalui instrumen sistem informasi pelaporan digital daerah (e-SAKIP/SIPD) bersama Bappeda Kabupaten Bantul untuk mendukung validitas data satu pintu daerah yang akurat dan tepat waktu.

40. Kapanewon Sanden

Evaluasi pelaksanaan program Kapanewon Sanden didukung 7 program diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan kewilayahan, koordinasi program pembangunan di Kalurahan, serta fasilitasi pengembangan potensi lokal (termasuk sektor maritim/pertanian pesisir) dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kapanewon Sanden sebagai berikut:

Tabel 2. 51 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000,00	34,27	50	10.282.000,00	34,27
2	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.805.090.876,00	0	46,71	937.359.874,00	33,42
3	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.837.500,00	51,51	27,38	10.362.500,00	41,72
4	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	53.541.500,00	66,15	27,78	35.416.500,00	66,15
5	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.800.000,00	32,69	20	2.550.000,00	32,69
6	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100.211.000,00	1,5	0	1.500.000,00	1,5
TOTAL			3.021.480.876,00	26,59	40,33	997.470.874,00	33,01

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Kapanewon Sanden mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator

program sebesar 26,59% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 40,33%. Untuk tahapan awal tahun di tingkat kewilayahan (kapanewon), performa makro ini menunjukkan pergerakan awal yang sangat baik karena mayoritas program kerja teknis sektoral telah berhasil memecah target indikator programnya. Nilai capaian kinerja program tertinggi diraih oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 66,15%, disusul oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 51,51%, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 34,27%, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 32,69%, serta Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sebesar 1,50%. Sebaliknya, hanya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang masih tercatat sebesar 0,00% pada level makro indikator programnya.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik, pergerakan lapangan berjalan cukup progresif dan dinamis. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan memimpin akselerasi lapangan dengan capaian fisik sub-kegiatan tertinggi mencapai 50,00%, disusul oleh Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 46,71%. Langkah operasional yang stabil juga diperlihatkan oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 27,78%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 27,38%, serta Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 20,00%. Sebaliknya, hanya Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang aktivitas fisik sub-kegiatannya masih tercatat nihil (0,00%).

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp3.021.480.876,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan lancar dengan total serapan anggaran mencapai Rp997.470.874,00 atau sebesar 33,01%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal didominasi oleh Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp937.359.874,00

(33,42%) dari pagunya yang sebesar Rp2,80 Miliar guna mendanai belanja rutin kesekretariatan. Secara persentase daya serap anggaran belanja teknis, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memimpin efisiensi penganggaran dengan menyerap tepat sebesar 66,15% (Rp35.416.500,00) dari alokasi pagunya yang sebesar Rp53,54 Juta.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Kapanewon Sanden ke depan adalah:

- Mengakselerasi penyusunan administrasi pertanggungjawaban fisik pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum agar input kemajuan fisiknya (saat ini 0,00%) segera berprogres mendampingi realisasi anggaran keuangan dan indikator makronya yang sudah mulai berjalan.
- Mempertahankan tren keselarasan (alignment) penuh antara performa keuangan dan capaian kinerja program yang sudah berjalan sangat presisi pada mayoritas urusan teknis, guna mempertahankan portofolio akuntabilitas nilai SAKIP Kapanewon Sanden di tingkat kabupaten.
- Mengawal ketepatan realisasi belanja sisa pagu anggaran teknis pada Program Pemberdayaan Masyarakat (serapan 66,15%) serta Program Pelayanan Publik (serapan 41,72%) demi menjamin kesinambungan fasilitasi kemasyarakatan dan mutu pelayanan adminduk harian secara berkelanjutan.
- Memaksimalkan integrasi penginputan data monitoring dan evaluasi secara berkala melalui platform digital satu data (e-SAKIP/SIPD) bersama Bappeda Kabupaten Bantul untuk memastikan validitas, akurasi, dan ketepatan waktu penginputan seluruh dokumen laporan evaluasi hasil RKPD.

41. Kapanewon Sedayu

Evaluasi pelaksanaan program Kapanewon Sedayu didukung 7 program berfokus pada penguatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan, koordinasi pembangunan infrastruktur dan ekonomi di

Kalurahan (termasuk yang berbatasan dengan wilayah lain), serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan umum. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kapanewon Sedayu sebagai berikut:

Tabel 2. 52 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000,00	0	0	5.321.400,00	17,74
2	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.282.719.459,00	98,65	47,81	1.544.816.240,00	47,06
3	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32.901.500,00	0	40	9.457.000,00	28,74
4	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	64.933.500,00	43	63,33	32.983.500,00	50,8
5	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.653.000,00	0	33,33	9.602.000,00	42,39
6	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.278.500,00	3	30	2.375.000,00	2,96
TOTAL			3.513.485.959,00	34,76	45,7	1.604.555.140,00	45,67

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Kapanewon Sedayu mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 34,76% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 45,70%. Untuk tahapan awal tahun di tingkat kewilayahan (kapanewon) pada Semester pertama, performa makro ini menunjukkan pergerakan awal yang positif karena beberapa program kerja sektoral mulai berhasil memecah target capaian kinerja programnya. Nilai capaian indikator program tertinggi diraih oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 98,65%, diikuti oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 43,00%, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

sebesar 3,00%. Sebaliknya, tiga program lainnya masih mencatatkan angka 0,00% pada level makro indikator programnya.

Meskipun capaian makro program bervariasi, tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik di lapangan menunjukkan akselerasi yang cukup dinamis. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memimpin kemajuan operasional lapangan dengan capaian fisik sub-kegiatan tertinggi mencapai 63,33%, disusul oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 47,81%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 40,00%, serta Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 33,33%. Selanjutnya, progres fisik Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tercatat berada di angka 30,00%. Sebaliknya, hanya Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang aktivitas fisik sub-kegiatannya masih tercatat nihil (0,00%).

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp3.513.485.959,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan optimal dan responsif dengan total serapan anggaran mencapai Rp1.604.555.140,00 atau sebesar 45,67%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal didominasi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp1.544.816.240,00 (47,06%) dari pagunya yang sebesar Rp3,28 Miliar guna mendanai belanja rutin operasional perkantoran harian. Secara persentase daya serap anggaran teknis, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memimpin realisasi belanja tertinggi dengan menyerap 50,80% (Rp32.983.500,00) dari alokasi pagunya yang sebesar Rp64,93 Juta, disusul rapat oleh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 42,39% (Rp9.602.000,00) dari pagu Rp22,65 Juta.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Kapanewon Sedayu ke depan adalah:

- Mengakselerasi penyusunan administrasi pertanggungjawaban fisik pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan agar input kemajuan fisik sub-kegiatannya (saat ini 0,00%) segera berprogres mendampingi realisasi anggaran belanja keuangan yang sudah berjalan (17,74%).
- Mendorong percepatan penyerapan sisa anggaran belanja teknis secara berkala pada Program Urusan Pemerintahan Umum (serapan baru 2,96% dari pagu Rp80,27 Juta) agar output fisik (yang sudah melaju di angka 30,00%) dan kegiatan pembinaan kemasyarakatan berjalan selaras pada Semester kedua.
- Mempertahankan ritme kerja yang efisien dan proporsional pada Program Penunjang, Program Pemberdayaan Masyarakat, serta Urusan Trantibum, guna terus memperkuat stabilitas capaian kinerja portofolio SAKIP Kapanewon Sedayu di tingkat kabupaten.
- Memaksimalkan integrasi penginputan data monitoring-evaluasi secara berkala melalui platform informasi digital daerah (e-SAKIP/SIPD) bersama Bappeda Kabupaten Bantul demi menjamin validitas, akurasi, dan ketepatan waktu penginputan seluruh dokumen laporan evaluasi hasil RKPD.

42. Kapanewon Sewon

Evaluasi pelaksanaan program Kapanewon Sewon didukung 7 program diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan di wilayah yang memiliki dinamika perkotaan dan kepadatan penduduk tinggi, peningkatan koordinasi program penataan ruang dan lingkungan, serta optimalisasi pelayanan publik yang prima dan responsif bagi masyarakat. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kapanewon Sewon sebagai berikut:

**Tabel 2. 53 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000,00	40	0	13.437.500,00	44,79
2	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.066.209.698,00	0	48,37	1.425.242.133,00	46,48
3	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.625.000,00	29,63	39,29	26.950.000,00	80,15
4	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.997.500,00	50	24,44	19.057.000,00	38,12
5	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	450.000,00	60	40	450.000,00	100
6	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	69.166.500,00	0	0	1.062.500,00	1,54
TOTAL			3.249.448.698,00	25,66	40,81	1.486.199.133,00	45,74

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Kapanewon Sewon mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 25,66% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 40,81%. Performa makro kewilayahan di awal tahun ini menunjukkan progresivitas yang terukur, dipimpin oleh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mencatatkan capaian indikator program tertinggi sebesar 60,00%. Keberhasilan memecah nilai target makro juga diikuti oleh program kerja sektoral lainnya, yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 50,00%, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 40,00%, serta Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 29,63%. Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum masih tercatat 0,00% pada level makro indikator programnya.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik di lapangan, pergerakan program kerja berjalan cukup stabil. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memimpin kemajuan fisik sub-kegiatan dengan capaian mencapai 48,37%, disusul rapat oleh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 40,00%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 39,29%, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 24,44%. Sebaliknya, terdapat dua program yang aktivitas fisik sub-kegiatannya masih tercatat nihil (0,00%), yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp3.249.448.698,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat lancar dan produktif dengan total serapan anggaran mencapai Rp1.486.199.133,00 atau sebesar 45,74%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal didominasi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp1.425.242.133,00 (46,48%) dari pagunya yang sebesar Rp3,06 Miliar guna mendukung kelancaran operasional kesekretariatan. Secara persentase daya serap anggaran belanja teknis sektoral, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum memimpin dengan merealisasikan belanja penuh hingga 100,00% (Rp450.000,00) dari alokasi pagunya yang efisien sebesar Rp450 Ribu, disusul kuat oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang menyerap sebesar 80,15% (Rp26.950.000,00) dari alokasi pagu Rp33,62 Juta.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Kapanewon Sewon ke depan adalah:

- Mengakselerasi penyusunan administrasi pertanggungjawaban fisik dan input pelaporan pada Program Keistimewaan Urusan Kelembagaan agar laporan kemajuan fisiknya (saat ini 0,00%) segera terisi seimbang dengan realisasi anggaran belanja dan capaian makronya yang sudah melaju baik.
- Menginisiasi persiapan teknis operasional lapangan secara bertahap pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (pagu Rp69,16 Juta) agar penyerapan sisa anggaran belanja teknis dan output fisik lapangan dapat mulai bergerak optimal pada Semester kedua.
- Mengawal ketepatan belanja sisa pagu anggaran pelayanan pada Program Pelayanan Publik (serapan 80,15%) demi memastikan kontinuitas mutu pelayanan administrasi kependudukan harian tetap terjaga secara berkelanjutan hingga akhir tahun anggaran.
- Memaksimalkan integrasi penginputan data monitoring dan evaluasi secara berkala melalui platform digital satu data (e-SAKIP/SIPD) bersama Bappeda Kabupaten Bantul guna menjamin validitas, akurasi, dan ketepatan waktu penginputan seluruh dokumen evaluasi hasil RKPD.

43. Kapanewon Srandakan

Evaluasi pelaksanaan program Kapanewon Srandakan didukung 7 program berfokus pada penguatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan, koordinasi program pembangunan di Kalurahan, serta fasilitasi pengembangan potensi ekonomi lokal dan pelayanan administrasi kependudukan dan umum yang mudah diakses oleh masyarakat. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kapanewon Srandakan sebagai berikut:

**Tabel 2. 54 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000,00	15,33	50	12.826.000,00	42,75
2	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.112.071.211,00	99,34	44,03	1.591.418.672,00	51,14
3	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.500.000,00	5,85	30,95	4.350.000,00	45,79
4	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.605.000,00	634	15	14.050.000,00	36,39
5	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.200.000,00	14,34	3	6.100.000,00	50
6	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	62.171.500,00	3,15	100	1.960.000,00	3,15
TOTAL			3.264.547.711,00	124,48	40,63	1.630.704.672,00	49,95

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Kapanewon Srandakan mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 124,48% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 40,63%. Untuk evaluasi di tingkat kewilayahan (kapanewon) pada Semester pertama, performa makro ini menunjukkan progres yang sangat masif karena hampir seluruh program kerja sektoral berhasil memecah target indikator programnya. Lonjakan kinerja program tertinggi diraih oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencatatkan capaian luar biasa sebesar 634,00%, disusul berturut-turut oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 99,34%, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 15,33%, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 14,34%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

Publik sebesar 5,85%, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 3,15%.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik di lapangan, koordinasi program kerja berjalan cukup lancar dan terarah. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memimpin kemajuan operasional dengan pemenuhan target fisik sub-kegiatan mencapai 100,00%. Langkah operasional yang stabil juga diperlihatkan oleh Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 50,00%, disusul rapat oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 44,03%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 30,95%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 15,00%, serta Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tercatat berada di angka 3,00%.

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp3.264.547.711,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I terserap dengan sangat produktif mencapai Rp1.630.704.672,00 atau sebesar 49,95%. Penyerapan anggaran tertinggi secara nominal didominasi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp1.591.418.672,00 (51,14%) dari alokasi pagunya yang sebesar Rp3,11 Miliar guna mendanai belanja rutin pegawai dan operasional kesekretariatan. Secara persentase daya serap anggaran belanja teknis sektoral, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mencatatkan realisasi tertinggi dengan menyerap tepat 50,00% (Rp6.100.000,00) dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp12,20 Juta.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Kapanewon Srandakan ke depan adalah:

- Melakukan re-evaluasi, verifikasi, dan konfirmasi data pelaporan pada Program Pemberdayaan Masyarakat untuk memastikan lonjakan angka capaian indikator program sebesar 634,00% telah tervalidasi secara substantif dan didukung dokumen pendukung yang memadai.

- Mengakselerasi penyusunan administrasi pertanggungjawaban fisik dan penginputan berkas pada Program Koordinasi Trantibum agar pelaporan kemajuan fisiknya (saat ini 3,00%) segera bergerak naik mengimbangi serapan keuangannya yang telah mencapai 50,00%.
- Mempertahankan ritme kerja yang seimbang dan presisi pada urusan Penunjang Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Umum, guna memperkuat portofolio akuntabilitas kinerja dalam rangka penilaian SAKIP Kapanewon Srandakan di tingkat Kabupaten Bantul.
- Memaksimalkan penginputan data monitoring dan evaluasi secara berkala melalui platform sistem informasi pelaporan digital daerah (e-SAKIP/SIPD) bersama Bappeda Kabupaten Bantul guna menjamin akurasi, integrasi data satu pintu, dan ketepatan waktu dokumen evaluasi RKPD.

44. Kapanewon Banguntapan

Evaluasi pelaksanaan program Kapanewon Banguntapan didukung 7 program diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan kewilayahan di daerah urban dan padat penduduk, koordinasi program penataan permukiman dan infrastruktur perkotaan, serta optimalisasi pelayanan publik yang cepat dan efisien. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kapanewon Banguntapan sebagai berikut:

**Tabel 2. 55 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000,00	3	66,67	10.784.500,00	35,95
2	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.156.579.243,00	99,49	30,64	1.534.015.875,00	48,6
3	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.380.000,00	71,77	33,33	28.125.000,00	58,13

No	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	84.758.500,00	61,28	66,67	51.250.000,00	60,47
5	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36.012.500,00	61,42	50	21.862.500,00	60,71
6	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	123.703.300,00	1,57	0	1.937.500,00	1,57
TOTAL			3.479.433.543,00	56,86	36,06	1.647.975.375,00	47,36

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Kapanewon Banguntapan mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 56,86% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 36,06%. Untuk tahapan paruh pertama tahun di tingkat kewilayahan (kapanewon), performa makro ini menunjukkan pergerakan yang sangat positif dan progresif karena mayoritas program kerja telah berhasil memecah target capaian makronya dengan angka yang tinggi. Lonjakan capaian kinerja program tertinggi diraih oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menyentuh angka 99,49%. Target indikator program juga berhasil diakomodasi dengan sangat baik oleh program kerja sektoral lainnya, yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 71,77%, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 61,42%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 61,28%, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 3,00%, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 1,57%.

Untuk tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik di lapangan, akselerasi program kerja berjalan cukup solid dan merata. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan bersama Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan secara kompak memimpin kemajuan operasional lapangan

dengan capaian fisik sub-kegiatan tertinggi masing-masing mencapai 66,67%. Langkah operasional yang stabil juga diperlihatkan oleh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 50,00%, disusul oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 33,33%, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 30,64%. Sebaliknya, hanya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang aktivitas fisik sub-kegiatannya masih tercatat nihil (0,00%).

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp3.479.433.543,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat lancar dengan total serapan anggaran mencapai Rp1.647.975.375,00 atau sebesar 47,36%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal didominasi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp1.534.015.875,00 (48,60%) dari pagunya yang sebesar Rp3,15 Miliar guna mendanai rutin harian perkantoran. Secara persentase daya serap anggaran belanja teknis sektoral, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mencatatkan realisasi tertinggi dengan menyerap 60,71% (Rp21.862.500,00) dari alokasi pagunya sebesar Rp36,01 Juta, disusul rapat oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 60,47% (Rp51.250.000,00) dari pagu Rp84,75 Juta, serta Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 58,13% (Rp28.125.000,00) dari pagu Rp48,38 Juta.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Kapanewon Banguntapan ke depan adalah:

- Mengakselerasi penyusunan administrasi pertanggungjawaban fisik pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum agar laporan kemajuan fisiknya (saat ini 0,00%) segera terisi seimbang mengimbangi realisasi keuangan belanja hulu serta indikator program makronya.
- Mempertahankan tren keselarasan (alignment) performa yang sangat ideal antara penyerapan belanja daerah dan target kinerja makro pada

urusan trantibum, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik demi memperkuat portofolio capaian akuntabilitas nilai SAKIP Kapanewon Banguntapan di tingkat kabupaten.

- Mengawal ketepatan belanja sisa pagu anggaran kesekretariatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan (serapan 48,60%) untuk mempertahankan ritme pencapaian kinerja programnya yang sudah melaju sangat baik menyentuh 99,49%.
- Memaksimalkan penginputan data monitoring dan evaluasi secara berkala melalui platform digital satu data daerah (e-SAKIP/SIPD) bersama Bappeda Kabupaten Bantul guna mendukung validitas, transparansi data satu pintu, serta ketepatan waktu dokumen pelaporan hasil evaluasi RKPD.

45. Kapanewon Pundong

Evaluasi pelaksanaan program Kapanewon Pundong didukung 7 program berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan kewilayahan, koordinasi pelaksanaan program pembangunan daerah di Kalurahan, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan pemberdayaan masyarakat. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kapanewon Pundong sebagai berikut:

Tabel 2. 56 Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

Kondisi Sampai Dengan: Semester I Tahun 2026

No	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	30.000.000,00	52	66,67	15.275.000,00	50,92
2	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.248.439.768,00	0	83,17	1.505.047.044,00	46,33
3	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.340.700,00	54,32	75	12.848.400,00	42,35
4	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.972.500,00	56	70,37	20.910.000,00	52,31

No	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.025.000,00	78	66,67	6.500.000,00	72,02
6	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	128.324.000,00	0	0	0,00	0
TOTAL			3.486.101.968,00	34,33	76,28	1.560.580.444,00	44,77

Sumber: SIPD Dalev, Juli 2026

Secara keseluruhan, berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, Kapanewon Pundong mencatatkan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 34,33% dan rata-rata capaian indikator sub-kegiatan sebesar 76,28%. Untuk tahapan paruh pertama tahun di tingkat kewilayahan (kapanewon), performa makro ini menunjukkan progres yang sangat baik di mana mayoritas program sektoral telah berhasil memecah target capaian kinerjanya. Capaian indikator program tertinggi diraih oleh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 78,00%, diikuti oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 56,00%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 54,32%, serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 52,00%. Sebaliknya, terdapat dua program yang capaian indikator programnya masih tercatat nihil (0,00%), yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Meskipun terdapat variasi pada capaian program makro, tingkat aktivitas operasional sub-kegiatan fisik di lapangan menunjukkan akselerasi yang sangat masif dan tinggi. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memimpin kemajuan operasional lapangan dengan capaian fisik sub-kegiatan tertinggi mencapai 75,00%. Langkah operasional lapangan yang stabil dan kuat juga diperlihatkan oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 83,17%, disusul oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 70,37%, serta Program Penyelenggaraan

Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan bersama Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang kompak meraih angka 66,67%. Sebaliknya, hanya Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang aktivitas fisik sub-kegiatannya masih tercatat nihil (0,00%).

Terkait pengelolaan keuangan, dari total alokasi Pagu RKPD sebesar Rp3.486.101.968,00, realisasi belanja keseluruhan sampai dengan Semester I berjalan sangat optimal dengan total serapan anggaran mencapai Rp1.560.580.444,00 atau sebesar 44,77%. Penyerapan anggaran terbesar secara nominal didominasi oleh Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp1.505.047.044,00 (46,33%) guna mendanai belanja pegawai serta pemenuhan kebutuhan rutin perkantoran. Secara persentase daya serap anggaran belanja teknis sektoral, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum memimpin akselerasi dengan merealisasikan belanja sebesar 72,02% (Rp6.500.000,00) dari alokasi pagunya sebesar Rp9,03 Juta.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Kondisi Semester I Tahun 2026, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan untuk rencana kerja Kapanewon Pundong ke depan adalah:

- Menginisiasi persiapan administratif, penyusunan jadwal operasional, dan pembelanjaan teknis pada Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum agar kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan tata pemerintahan tingkat kapanewon dapat mulai bergulir dan memecah nilai nihil pada Semester kedua.
- Mempertahankan ritme kerja yang efisien dan tingkat keselarasan (alignment) yang ideal pada urusan trantibum, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, serta keistimewaan urusan kelembagaan guna menjaga stabilitas capaian output hulu-hilir.
- Mengoptimalkan penginputan berkas administrasi dan pelaporan monitoring-evaluasi secara berkala melalui instrumen sistem informasi pelaporan digital daerah (e-SAKIP/SIPD) bersama Bappeda Kabupaten

Bantul guna mendukung validitas data satu pintu dan mengawal penguatan nilai SAKIP Kapanewon Pundong.

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah hingga Semester I (kondisi per 30 Juni 2026) menunjukkan adanya deviasi negatif baik pada aspek serapan keuangan makro sebesar -18,90% maupun pada capaian output fisik sebesar -16,17%. Kesenjangan antara target perencanaan dengan realisasi riil di lapangan ini mengindikasikan adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Permasalahan pembangunan daerah pada semester 1 tahun 2026 secara umum dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek utama:

1. Aspek Administratif dan Tata Kelola Keuangan

Adanya jeda waktu penyerapan anggaran, keterlambatan Uang Persediaan (UP), keterbatasan anggaran Ganti Uang (GU) untuk kegiatan skala kecil di bawah Rp50 juta, serta pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memerlukan penyesuaian administrasi.

2. Aspek Teknis Perangkat Daerah

Proses pengadaan barang/jasa yang tertahan di tahap persiapan berkas, keterlambatan pengiriman barang dari penyedia, serta rendahnya integrasi sistem satu data antarsektoral.

3. Aspek Eksternal dan Regulasi Makro

Dinamika makro ekonomi berupa lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan harga material konstruksi di pasar memicu terjadinya gagal tender pada klaster infrastruktur jalan dan jembatan, serta adanya penyesuaian regulasi perhitungan harga pada aplikasi INAPROC Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah per Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk merumuskan langkah mitigasi yang tepat pada Semester II dan

memberikan umpan balik bagi penyusunan RKPD Tahun 2027, permasalahan di tingkat lapangan diuraikan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah pengampu sebagai berikut:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga)

- **Stagnasi Paket Pengadaan dan Rehabilitasi Fisik Sekolah**

Terdapat paket strategis yang mencatatkan realisasi fisik 0% s.d. 5%, meliputi subkegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Pengadaan Mebel Sekolah, Pembangunan Sarana/Prasarana Sekolah, Rehabilitasi Laboratorium, serta Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Hal ini disebabkan seluruh paket tersebut masih tertahan pada tahapan persiapan pengadaan dan penyusunan berkas administrasi.

- **Hambatan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**

Khusus untuk paket proyek strategis non-konstruksi seperti Pengadaan Seragam/Kain Seragam SD/MI serta SMP/MTs, realisasinya terhambat oleh proses persiapan teknis dan review ulang HPS atas saran penyesuaian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan)

- **Ketergantungan Logistik Pihak Ketiga**

Capaian subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV berjalan sangat lambat (0,88%) akibat proses pengadaan logistik kesehatan (Rapid HIV Syphilis) yang mengalami hambatan distribusi dari pihak penyedia.

- **Hambatan Multisektoral Layanan Sanitasi Dasar**

Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (realisasi fisik baru 5,08%) menghadapi kendala struktural berupa belum optimalnya pengolahan air minum komunal, keterbatasan sarana prasarana pengelolaan sampah, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan *septic*

tank, serta keterbatasan kapasitas tampung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

- **Ketergantungan Alokasi Fisik Gedung Penunjang**

Pengadaan alat-alat kesehatan esensial di puskesmas/rumah sakit belum dapat dieksekusi dikarenakan bangunan fisik gedung penunjangnya masih dalam tahap konstruksi di lapangan.

3) **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPKP)**

- **Tender Gagal Akibat Guncangan Pasar**

Proses pemilihan penyedia untuk paket-paket infrastruktur strategis jalan dan jembatan sempat mengalami Tender Gagal pada gelombang awal pasca-tayang 4 April 2026. Lonjakan harga BBM dan kenaikan harga material konstruksi membuat para rekanan/penyedia jasa kesulitan menyusun dokumen penawaran yang memenuhi pagu anggaran daerah.

- **Keterbatasan Fiskal dalam Kaji Ulang HPS**

Upaya melakukan kaji ulang HPS oleh PPK terkendala keterbatasan kapasitas fiskal APBD, sehingga tim teknis terpaksa melakukan rasionalisasi ulang terhadap ruang lingkup pekerjaan (*scoping*) agar proyek tetap fungsional tanpa melampaui pagu anggaran. Masalah ini berdampak langsung pada keterlambatan kontrak beberapa ruas jalan vital (Jalan Siluk–Srunggo, Jalan Banyak Dua–Kedung Walikukun, Jalan Nogosari–Klampok, Jalan Jetis–Karangsemut, dan Jembatan Sumberan), dan baru bisa melakukan kontrak dengan rekanan pada awal bulan Juli.

- **Tunggakan Penjelasan Sistem Administrasi**

Terdapat subkegiatan dengan pagu besar yang mengalami penundaan input data, seperti Penatausahaan Pemanfaatan Rusunawa yang belum melakukan input keterangan kendala teknis pengelolaan secara valid pada sistem e-SAKIP.

- Masih rendahnya Akses Air Minum Aman dan Pengelolaan Air

Limbah Domestik Aman. Capaian Air Minum Layak Aman sebesar 14,32% dan Capaian pengelolaan air limbah domestik layak aman 25,34% pada tahun 2025 masih perlu ditingkatkan .

4) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)

- **Keterlambatan Administrasi Kawasan Strategis**

Subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis baru mencapai progres fisik 8% akibat keterlambatan penyelesaian proses administrasi tender, sehingga penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga baru terlaksana di akhir bulan Juni.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo)

- **Ego Sektoral Data (*Silo Data*)**

Rata-rata fisik pengelolaan TIK dan Satu Data daerah tertahan di angka 23% s.d. 41% akibat belum optimalnya integrasi basis data antar Perangkat Daerah/Instansi dan adanya ego sektoral pada masing-masing Perangkat Daerah dalam berbagi pakai data sektoral.

- **Keterbatasan Infrastruktur dan Standar Keamanan**

Belum meratanya kualitas konektivitas jaringan intra-pemerintah, keterbatasan anggaran pemeliharaan perangkat TIK, belum optimalnya utilitas pusat kendali (*command center*), serta belum diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) tata kelola keamanan informasi dan persandian secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.

6) Urusan Pemerintahan Umum dan Manajemen Kepegawaian (BKPSDM & Setda)

- **Kekosongan Formasi Aparatur**

Terjadi inefisiensi alokasi pada pos Belanja Pegawai disebabkan adanya kekosongan formasi akibat aparatur yang memasuki masa pensiun, promosi jabatan, maupun mutasi

instansi, sementara belanja gaji dan tunjangan sudah terlanjur dianggarkan secara penuh di awal tahun anggaran.

Secara ringkas, perumusan masalah per urusan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 57 Matriks Perumusan Masalah Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026

No	Urusan Penyelenggaraan / Perangkat Daerah	Kegiatan Terhambat	Akar Permasalahan Utama	Keterangan
1	Pendidikan	• Pengadaan Perlengkapan/Mebel Sekolah • Pembangunan Rkb Dan Rehab Laboratorium • Pengadaan Kain Seragam Sd Dan Smp • Pembayaran Bosnas Dan TPG • Sewa Tanah SSA	Proses administrasi persiapan lelang yang lambat serta diperlukannya revaluasi ulang HPS oleh APIP. - Terlambatnya data NISN/Rombel masuk ke Arkas dan terlambatnya sinkronisasi jam mengajar Tendik di Dapodik - Menunggu appraisal regulasi pemanfaatan tanah Kasultanan	- Realisasi fisik sempat tertahan 0% - 5% di Semester I - Penambahan anggaran untuk Bosnas, TPG dan Sewa tanah SSA

No	Urusan Penyelenggaraan / Perangkat Daerah	Kegiatan Terhambat	Akar Permasalahan Utama	Keterangan
2	Kesehatan	- Pelayanan Kesehatan ODHIV/ODHA - Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Pengadaan Kesehatan Alat	Keterlambatan distribusi logistik kesehatan dari penyedia; kendala multisektoral sanitasi (kapasitas IPLT terbatas); serta konstruksi gedung fisik penunjang yang belum selesai.	Capaian komposit pelayanan kesehatan masyarakat tidak berjalan linier dengan jadwal ideal.
3	Pekerjaan Umum	- Pembangunan Jalan dan Jembatan (Klaster Proyek Strategis) - Penatausahaan Rusunawa - Peningkatan SR Air Minum Aman dan SR Pengolahan Air Limbah Domestik Aman	Lonjakan harga BBM dan material konstruksi di pasar memicu kegagalan tender; keterbatasan fiskal daerah memaksa dilakukannya rasionalisasi ruang lingkup kerja.	Penyerapan belanja modal tertahan di angka 15,52% dan terjadi beban kerja tertunda. Penambahan anggaran untuk menambah volume output
4	Lingkungan Hidup	Pemanfaatan Ruang SRS Pantai Samas-Paragtritis	Proses pengadaan logistik dan administrasi kontrak mengalami keterlambatan.	Penandatanganan kontrak baru bisa dilaksanakan pada akhir Semester I.
5	Komunikasi & Informatika	- Pengelolaan TIK dan Kebijakan Satu Data - Tata Kelola Persandian dan Konten Publik	Terjadinya <i>silo data</i> (ego sektoral perangkat daerah), keterbatasan	Progres fisik TIK macet di angka 23% - 41% dan integrasi aplikasi dalam rangka

No	Urusan Penyelenggaraan / Perangkat Daerah	Kegiatan Terhambat	Akar Permasalahan Utama	Keterangan
			infrastruktur <i>command center</i> , dan belum tersusunnya SOP keamanan informasi komprehensif.	mewujudkan satu data terhambat.
6.	Perencanaan dan litbang	Peralatan dan Perlengkapan Kantor, gedung	Sarana dan prasarana peralatan kantor banyak yang sudah tidak layak pakai/rusak	Menurunnya produktivitas kerja serta menghambat efisiensi penyusunan dokumen perencanaan daerah sehingga perlu adanya pergeseran dan penambahan anggaran
7	Kepegawaian)	Pos Belanja Pegawai Makro	Adanya aparatur yang pensiun, mutasi, dan promosi yang menyisakan kekosongan formasi pegawai aktif.	Adanya anggaran belanja pegawai yang menganggur padahal telah diplot penuh di awal tahun.
8	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Pendampingan Hukum Bagi Warga Miskin	Pengajuan permohonan layanan bantuan hukum oleh masyarakat miskin sampai bl. Juli tahun 2026 lebih besar dari anggaran yang tersedia	Layanan bantuan hukum masyarakat miskin yang telah terverifikasi belum bisa terbayarkan sehingga perlu adanya penambahan anggaran

No	Urusan Penyelenggaraan / Perangkat Daerah	Kegiatan Terhambat	Akar Permasalahan Utama	Keterangan
9	Sekretariat Daerah (bagian Kesra)	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Anggaran untuk fasilitasi Kegiatan Natal Tahun 2026 belum mencukupi (baru makan minum rapat untuk prosesi perayaan natal belum teranggarkan)	Fasilitasi Kegiatan Natal tahun 2026 tidak dapat dilaksanakan sehingga perlu adanya penambahan anggaran
10	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Koordinasi, konsultasi, konsolidasi	Anggaran untuk kegiatan koordinasi, konsultasi kebijakan daerah ke Pusat, konsolidasi belum mencukupi	Penambahan anggaran
11	Dinas Sosial	Penyelesaian kegiatan pendataan Desa cinta Statistik	Pendataan belum terlaksana 100%	Dilakukan penambahan anggaran
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Belum semua pekerja rentan tahun 2026 mendapat bantuan iuran	Bantuan iuran bagi 2682 pekerja rentan selama 4 bulan	Dilakukan penambahan anggaran
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	DED pasar Mangiran, Bantul dan Piyungan	Belum disusunnya DED pasar Mangiran, Bantul dan Piyungan	Dilakukan penambahan anggaran

No	Urusan Penyelenggaraan / Perangkat Daerah	Kegiatan Terhambat	Akar Permasalahan Utama	Keterangan
14	Dinas Pariwisata	Retribusi dan pemeliharaan OW	Pengendalian Retribusi Pariwisata, Cetak Karcis, Pemindahan Baliho Dan Pemeliharaan OW Goa Selarong	Dilakukan penambahan anggaran
15	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Kebutuhan sarpras , pemeliharaan gedung dan BTT	GTT, sharing IPAL Sewon, rehap ruang BPK, rehap BLK, sarpras	Dilakukan penambahan anggaran

Sumber: Data Diolah Berdasarkan Laporan Monitoring Evaluasi Semester I Kabupaten Bantul, Juli 2026

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kerangka Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2026

Kerangka ekonomi makro tahun 2026 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2025 dan Triwulan I tahun 2026, masalah-masalah yang harus diselesaikan dan tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah. Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh kondisi capaian indikator makro ekonomi Nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.1.1 Kondisi Capaian Indikator Makro Ekonomi Nasional.

Perang di Timur Tengah memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global. Serangan Israel dan AS ke Iran yang diikuti dengan serangan pembalasan Iran sejak akhir Februari 2026 makin menekan prospek pertumbuhan global. Melonjaknya harga minyak dan komoditas dunia berdampak negatif terhadap rantai pasok perdagangan antarnegara sehingga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatkan tekanan inflasi global. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diperkirakan lebih lambat menjadi 3,1% dari prakiraan sebelumnya sebesar 3,2%, meskipun terjadi penurunan tarif resiprokal AS. Tekanan inflasi global meningkat dari 3,8% menjadi 4,1%, sehingga mempersempit ruang penurunan kebijakan moneter global, termasuk makin tertundanya penurunan *Fed Funds Rate* (FFR). *Yield US Treasury* terus meningkat akibat membengkaknya defisit fiskal AS.

Di tengah tingginya ketidakpastian global dan beratnya tantangan perekonomian domestik akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, perekonomian Indonesia pada triwulan I 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang baik dan perlu terus diperkuat agar mampu tumbuh lebih tinggi secara berkelanjutan. Ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,39% (yoy), ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, termasuk konsumsi rumah tangga pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H, stimulus Pemerintah, dan peningkatan investasi. Kinerja eksternal tetap terjaga dengan surplus neraca perdagangan barang pada triwulan I 2026 sebesar 5,5 miliar dolar AS ditopang oleh surplus perdagangan nonmigas di tengah defisit neraca perdagangan migas, sementara aliran modal asing tercatat net outflow sebesar 0,8 miliar dolar AS akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 tetap tinggi sebesar 148,2 miliar dolar AS. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada akhir Maret 2026 melemah 1,88% (ptp) dibandingkan level akhir Desember 2025 dipengaruhi penguatan dolar AS dan keluarnya aliran modal asing dari emerging markets. (Bank Indonesia, *Laporan Kelembagaan Bank Indonesia Triwulan I - 2026*).

Berdasarkan Bank Indonesia (2026) Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I 2026 tetap menunjukkan ketahanan di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan internasional. Defisit transaksi berjalan tetap berada pada level rendah, sementara transaksi modal dan finansial masih mencatat defisit yang terkendali. Secara keseluruhan, NPI pada triwulan I 2026 mencatat defisit sebesar 9,1 miliar dolar AS. Meskipun demikian, posisi cadangan devisa Indonesia tetap kuat pada akhir Maret 2026 sebesar 148,2 miliar dolar AS, yang mampu membiayai sekitar 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional.

Di tengah dinamika geopolitik dan meningkatnya ketidakpastian pasar global yang mendorong penguatan dolar AS, nilai tukar Rupiah tetap menghadapi tekanan. Pada triwulan II 2026, Rupiah mengalami pelemahan

dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2025. Nilai tukar Rupiah bergerak dari sekitar Rp16.670 per dolar AS pada akhir 2025 menjadi sekitar Rp18.173 per dolar AS pada Juni 2026, seiring meningkatnya tekanan di pasar keuangan global dan penguatan dolar AS.

Pada Juni 2026, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 3,34% (year-on-year/yoy), dengan nilai IHK sebesar 111,89. Inflasi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan harga pada seluruh kelompok pengeluaran. Beberapa kelompok yang mengalami kenaikan harga antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,67%; kelompok transportasi sebesar 4,57%; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencatat kenaikan tertinggi sebesar 10,10%. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada kelompok pengeluaran lainnya, meliputi pakaian dan alas kaki, perumahan, perlengkapan rumah tangga, kesehatan, informasi dan komunikasi, rekreasi, pendidikan, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran. (Badan Pusat Statistik (BPS), Perkembangan Indeks Harga Konsumen Juni 2026).

3.1.2 Kondisi Capaian Indikator Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada triwulan I tahun 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 5,84 persen secara tahunan (y-on-y). Peningkatan ekonomi ini terjadi di hampir seluruh sektor lapangan usaha, dengan pengecualian sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang justru mengalami kontraksi sebesar 0,79 persen. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,59 persen, kemudian diikuti oleh sektor Jasa Lainnya sebesar 10,34 persen dan sektor Konstruksi sebesar 7,60 persen. Di sisi lain, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menjadi salah satu sektor dengan kontribusi terbesar tetap mencatat pertumbuhan positif sebesar 2,25 persen. Sementara itu, sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 5,94 persen. (Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan I-2026).

Dari perspektif pengeluaran, pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 5,84 persen pada Triwulan I tahun 2026 secara tahunan (y-on-y) terutama didukung oleh peningkatan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P). Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh realisasi belanja pemerintah, khususnya melalui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini memberikan dorongan terhadap aktivitas sektor riil sekaligus mendukung pemberdayaan UMKM lokal. Selain itu, peningkatan konsumsi rumah tangga yang terjadi selama periode Ramadhan dan Idul Fitri turut memperkuat pertumbuhan ekonomi DIY. Faktor-faktor tersebut membantu menjaga stabilitas perekonomian DIY di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.

Dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2025, seluruh komponen pengeluaran dalam perekonomian DIY pada Triwulan I tahun 2026 mencatat pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang meningkat sebesar 20,08 persen. Peningkatan ini terutama didorong oleh tingginya realisasi belanja program MBG serta pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI, dan Polri pada periode tersebut.

Selain PK-P, pertumbuhan yang cukup tinggi juga terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), masing-masing tumbuh sebesar 9,11 persen dan 7,35 persen. Pertumbuhan PK-LNPRT dipengaruhi oleh momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang meningkatkan aktivitas masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui berbagai lembaga sosial. Sementara itu, pertumbuhan PMTB didorong oleh pembangunan berbagai proyek infrastruktur, seperti jalan tol dan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di sejumlah wilayah DIY. Pembangunan tersebut menjadi penggerak sektor konstruksi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada Juni tahun 2026, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami inflasi (y-on-y) sebesar 2,91 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 111,68. Inflasi y-on-y tersebut terjadi akibat

adanya peningkatan harga yang tercermin dari kenaikan indeks pada seluruh kelompok pengeluaran. Beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,54 persen; pakaian dan alas kaki sebesar 2,02 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,94 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,54 persen; serta kelompok kesehatan sebesar 0,96 persen.

Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada kelompok transportasi sebesar 3,87 persen; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,98 persen; rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,80 persen; pendidikan sebesar 2,21 persen; penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,54 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencatat kenaikan tertinggi sebesar 14,71 persen.

Pertumbuhan ekonomi DIY di tahun 2026 diperkirakan semakin terakselerasi dibandingkan tahun 2025 karena adanya Proyek Strategis Nasional yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 5,10-5,90% utamanya dipengaruhi oleh aktivitas domestik yang berpotensi lebih kuat seiring dengan keberlanjutan program pembangunan ekonomi oleh kabinet baru. Sejalan dengan hal tersebut, inflasi DIY pada tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 2,1-3,5%. (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026).

3.1.3 Kondisi Capaian Ekonomi Makro Kabupaten Bantul.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2026, Kabupaten Bantul melakukan penyesuaian terhadap indikator makro ekonomi dengan memperhatikan kondisi aktual DIY, Nasional dan capaian tahun 2025.

3.1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara/daerah. Besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada

suatu periode tertentu. Daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah membawa kondisi perekonomian relatif lebih baik. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan Target Tahun 2026

Uraian	Satuan	Capaian					Target RKPD	Target Perubahan RKPD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,00	5,19	5,06	5,04	4,92	5,28-5,51	5,28-5,51

Sumber: BPS Kabupaten Bantul (diolah), 2026

Perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2025 tumbuh sebesar 4,92 persen, sedikit melambat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 5,04 persen. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya kinerja sektor konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar 4,17 persen setelah selesainya pembangunan Jembatan Kabanaran, yang sebelumnya menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi daerah. Pada tahun 2024, proyek tersebut memberikan dampak ekonomi yang luas melalui peningkatan aktivitas konstruksi serta mendorong sektor terkait seperti perdagangan, transportasi, dan penyediaan akomodasi serta makan minum akibat meningkatnya mobilitas tenaga kerja dan distribusi material.

Pada tahun 2025, belum terdapat proyek infrastruktur berskala besar yang memberikan dampak ekonomi setara, sehingga kontribusi sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Namun, kondisi tersebut tidak menyebabkan perlambatan ekonomi secara keseluruhan karena perekonomian Kabupaten Bantul tetap ditopang oleh sektor perdagangan, pertanian, pariwisata, dan UMKM yang menunjukkan kinerja relatif stabil.

Pada Triwulan I tahun 2026 perekonomian Kabupaten Bantul tumbuh sebesar 5,47 persen (y-on-y) dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2025. Namun, jika dibandingkan dengan Triwulan IV tahun 2025, perekonomian Kabupaten Bantul pada Triwulan I tahun 2026 mengalami kontraksi sebesar

1,16 persen (q-to-q). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara tahunan kinerja ekonomi Kabupaten Bantul masih mengalami pertumbuhan positif, meskipun terjadi penurunan aktivitas ekonomi secara musiman pada awal tahun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul pada Triwulan I tahun 2026 turut dipengaruhi oleh momentum bulan Ramadhan yang berlangsung pada periode tersebut. Peningkatan aktivitas masyarakat selama bulan puasa, terutama melalui kenaikan konsumsi rumah tangga, aktivitas perdagangan, serta permintaan terhadap penyediaan makanan dan minuman, memberikan dorongan terhadap pergerakan ekonomi daerah. Dampak momentum tersebut terlihat dari kinerja sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencatat pertumbuhan tertinggi pada Triwulan I tahun 2026, yaitu sebesar 10,16 persen.

Berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar sektor ekonomi Kabupaten Bantul pada Triwulan I tahun 2026 menunjukkan kinerja yang positif. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, sedangkan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mencatat pertumbuhan terendah dengan kontraksi sebesar 1,84 persen. Dari sisi struktur ekonomi, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bantul pada Triwulan I tahun 2026, yaitu sebesar 15,27 persen, diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 14,40 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,67 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bantul pada Triwulan I tahun 2026 masih ditopang oleh sektor pertanian, industri pengolahan, serta sektor berbasis pariwisata dan konsumsi masyarakat. Peran sektor-sektor tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di tengah dinamika perubahan aktivitas ekonomi antar periode.

3.1.3.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah.

Tabel 3.2 Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 dan Target Tahun 2026

Uraian	Satuan	Capaian					Target RKP	Target Perubahan RKP
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Tingkat Kemiskinan	Persen	14,04	12,27	11,96	11,66	11,54	9,39-9,67	9,39-9,67

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2026

Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul mengalami penurunan menjadi 11,54 persen, atau berkurang sebesar 0,12 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Upaya penanganan kemiskinan dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pengurangan beban masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Pengurangan beban dilakukan dengan pemberian bantuan diantaranya melalui program boga sehat dan program sambung pangan bantul bagi kelompok masyarakat miskin absolut, khususnya lanjut usia dan penyandang disabilitas, sebagai bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara itu, upaya pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas Masyarakat miskin, salah satunya melalui pelaksanaan pelatihan keterampilan untuk mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Sedangkan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti penyediaan air minum dan sanitasi layak, pembangunan jalan / akses transportasi, serta penataan kawasan kumuh.

Berbagai upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Kabupaten Bantul secara berkelanjutan.

3.1.3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak.

Tabel 3.3 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 dan Target Tahun 2026

Uraian	Satuan	Capaian					Target RKPD	Target Perubahan RKPD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,63	81,04	81,74	82,05	83,03	82,26-82,89	83,21

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2026

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2025. Nilai IPM meningkat dari 80,63 pada tahun 2021 menjadi 83,03 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia yang ditandai dengan meningkatnya capaian pada aspek dasar pembentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Peningkatan pembangunan manusia berjalan seiring dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Perbaikan tingkat kesejahteraan, yang tercermin dari peningkatan kemampuan pengeluaran masyarakat, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta perbaikan derajat kesehatan, turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai IPM Kabupaten Bantul. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 sebesar 82,26–82,89. Selanjutnya, melalui perubahan

RKPD tahun 2026, target IPM disesuaikan menjadi 83,21. Penyesuaian target tersebut didasarkan pada hasil proyeksi menggunakan model tren linier dengan memanfaatkan data historis IPM selama 15 tahun terakhir.

Hasil proyeksi menunjukkan adanya peluang peningkatan capaian IPM yang sejalan dengan tren perbaikan pembangunan manusia di Kabupaten Bantul. Peningkatan sasaran tersebut mencerminkan optimisme pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan dasar, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan standar hidup masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.

3.1.3.4 Rasio Gini

Besarnya ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat dengan besarnya nilai Indeks Gini (Koefisien Gini). Nilai Indeks Gini berkisar dari angka nol sampai dengan 1 ($0 \leq \text{Indeks Gini} \leq 1$). Semakin mendekati angka 1 maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut semakin besar.

Tabel 3. 4 Capaian Rasio Gini Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 dan Target Tahun 2026

Uraian	Satuan	Capaian					Target RKPD	Target Perubahan RKPD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Rasio Gini	Indeks	0,441	0,410	0,454	0,417	0,427	0,385-0,409	0,385-0,409

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2026

Rasio Gini Kabupaten Bantul dalam lima tahun terakhir berada pada kategori kesenjangan sedang, dengan nilai berkisar antara 0,4 hingga 0,5. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat masih menghadapi tantangan dalam pemerataan, meskipun tingkat ketimpangan belum berada pada kategori tinggi. Pada tahun 2025, Rasio Gini Kabupaten Bantul tercatat sebesar 0,427, meningkat sebesar 0,010 poin dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0,417.

Peningkatan Rasio Gini tersebut menunjukkan adanya kenaikan tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan pemulihan dan peningkatan pendapatan antar kelompok masyarakat, terutama antara kelompok berpendapatan rendah dengan kelompok masyarakat berpendapatan lebih tinggi. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada dalam rentang kategori kesenjangan sedang, sehingga diperlukan penguatan kebijakan pemerataan ekonomi untuk menjaga agar peningkatan ketimpangan tidak berlanjut.

3.1.3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Tabel 3.5 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 dan Target Tahun 2026

Uraian	Satuan	Capaian					Target RKPD	Target Perubahan RKPD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,04	3,97	3,78	3,62	3,57	3,04-3,57	3,04-3,56

Sumber: BPS Kabupaten Bantul (diolah), 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantul mengalami penurunan dari 3,62 persen pada tahun 2024 menjadi 3,57 persen pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Namun, tantangan ketenagakerjaan masih perlu menjadi perhatian, terutama dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja yang produktif.

Upaya pengurangan pengangguran dilakukan melalui berbagai program, antara lain peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga

kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas serta produktivitas tenaga kerja. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja, meningkatkan daya saing, dan mendorong terciptanya kesempatan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.

Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 disesuaikan menjadi 3,04–3,56 persen. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025, di mana TPT Kabupaten Bantul telah mencapai batas atas target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026. Dengan mempertimbangkan realisasi tersebut, penyesuaian target diperlukan agar lebih mencerminkan kondisi terkini, menjaga relevansi indikator kinerja, serta memastikan target yang ditetapkan tetap realistis, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta dinamika ketenagakerjaan yang berkembang.

3.1.4 Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bantul

Penyandingan Target Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 6 Penyandingan Target Indikator Ekonomi Makro Tahun 2026

No	Indikator Ekonomi Makro	Capaian 2025	RKPD 2026	APBD 2026	Perubahan RKPD 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,92	5,28-5,51	5,28-5,51	5,28-5,51
2	Tingkat Kemiskinan	11,54	9,39-9,67	9,39-9,67	9,39-9,67
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	83,03	82,26-82,89	82,26-82,89	83,21
4	Rasio Gini	0,427	0,385-0,409	0,385-0,409	0,385-0,409
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,57	3,04-3,57	3,04-3,57	3,04-3,56

Sumber: BPS Kabupaten Bantul (diolah), 2026

Berdasarkan tabel di atas, target indikator ekonomi makro pada Perubahan RKPD Tahun 2026 mengalami penyesuaian pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Penyesuaian target IPM dan TPT dilakukan dengan mempertimbangkan capaian tahun 2025 yang telah melampaui target yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2026. Kondisi tersebut menunjukkan adanya percepatan

peningkatan kualitas pembangunan manusia dan penurunan Tingkat pengangguran terbuka, sehingga target pada Perubahan RKPD perlu diselaraskan dengan perkembangan capaian actual.

3.2 Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan kebijakan daerah.

Struktur Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026. Berdasarkan hasil realisasi dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, maka dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

3.2.1 Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi

pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas dana hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi dan rencana proyeksi pendapatan, terjadi kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp5.085.450.615,00 semula pada APBD Tahun 2026 sebesar Rp2.308.740.839.524,00 menjadi Rp2.313.826.290.139,00 Terdapat peningkatan pendapatan pada Komponen Pendapatan Transfer sebesar Rp3.192.707.605,00 dan peningkatan Komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.892.743.010,00.

Proyeksi pendapatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 secara terperinci disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2025 dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun 2026 (Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN II 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	587,435,038,672.92	638,567,864,259.57	766,131,199,608.89	382,117,571,039.51	753,349,327,920.00	755,242,070,930.00	1,892,743,010.00
4.1.0 1	Pajak Daerah	269,918,537,186.00	295,769,695,358.90	414,970,629,456.50	205,618,533,667.00	408,211,152,680.00	408,211,152,680.00	-
4.1.0 2	Retribusi Daerah	42,382,506,560.80	307,622,088,520.00	312,457,635,841.00	115,207,312,721.00	251,312,134,106.00	251,312,134,106.00	-
4.1.0 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,515,070,732.29	20,083,794,982.30	20,838,377,004.15	21,245,870,925.00	20,199,694,868.00	20,199,694,868.00	-
4.1.0 4	Lain-lain PAD yang Sah	254,618,924,193.83	15,092,285,398.37	17,864,557,307.24	40,045,853,726.51	73,626,346,266.00	75,519,089,276.00	1,892,743,010.00
								-
4.2	Pendapatan Transfer	2,006,755,733,818.65	2,146,682,497,226.00	1,746,164,380,877.00	726,943,172,668.00	1,555,391,511,604.00	1,558,584,219,209.00	3,192,707,605.00
	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1,541,171,838,737.00	1,678,657,691,985.00	1,447,496,790,096.00	638,931,601,263.00	1,380,125,281,000.00	1,379,786,874,756.00	(338,406,244.00)
4.2.0 1.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	34,766,685,062.00	35,169,801,000.00	32,006,870,000.00	5,000,112,950.00	12,747,285,000.00	-	(12,747,285,000.00)
4.2.0 1.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	954,626,878,777.00	1,022,019,834,045.00	1,036,581,653,691.00	530,121,792,000.00	914,464,154,000.00	-	(914,464,154,000.00)
4.2.0 1.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	366,489,683,898.00	442,840,663,940.00	378,908,266,405.00	103,809,696,313.00	350,223,443,000.00	-	(350,223,443,000.00)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	185,288,591,000.00	178,627,393,000.00	142,639,771,084.00	27,720,818,000.00	102,690,399,000.00	-	(102,690,399,000.00)
4.2.0 1.05	Dana Desa	126,479,025,000.00	127,393,902,000.00	120,015,275,084.00	27,720,818,000.00	102,690,399,000.00	-	(102,690,399,000.00)
4.2.0 1.06	Insentif Fiskal	-	51,233,491,000.00	22,624,496,000.00	-	-	-	-
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	280,295,304,081.65	289,397,412,241.00	156,027,819,697.00	60,290,753,405.00	175,266,230,604.00	178,797,344,453.00	3,531,113,849.00
4.2.0 2.01	Pendapatan Bagi Hasil	201,588,461,475.00	200,933,285,798.00	124,738,816,027.00	30,920,043,569.00	108,340,869,652.00	-	(108,340,869,652.00)



NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN II 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4.2.0 2.02	Bantuan Keuangan	78,706,842,606.65	88,464,126,443.00	31,289,003,670.00	29,370,709,836.00	66,925,360,952.00		(66,925,360,952.00)
								-
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7,182,235,863.00	2,790,385,919.00	341,262,977.00	154,303,483.00	-	-	-
4.3.0 1	Pendapatan Hibah	7,164,398,619.00	2,790,385,919.00	341,262,977.00	154,303,483.00	-	-	-
4.3.0 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17,837,244.00	-	-		-	-	-
								-
	Jumlah Pendapatan Daerah (4.1+4.2+4.3)	2,601,373,008,354.57	2,788,040,747,404.57	2,512,636,843,462.89	1,109,215,047,190.51	2,308,740,839,524.00	2,313,826,290,139.00	5,085,450,615.00

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2026

3.2.2 Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Belanja Kabupaten Bantul mengalami kenaikan sebesar Rp3.046.591.855,61 yaitu pada APBD 2026 sebesar Rp2.471.823.139.162,89 menjadi Rp2.474.869.731.018,50.

Sehingga dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan 30 Juni 2026 (Triwulan II) ada beberapa penyesuaian belanja yang antara lain digunakan untuk:

- 1) Penyesuaian belanja BLUD karena adanya kenaikan target pendapatan tahun 2026 dan SILPA tahun 2025;
- 2) Penyesuaian honor PPPK Paruh Waktu;
- 3) Penggunaan sisa DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru;
- 4) Penyesuaian Bantuan Operasional Sekolah Nasional;
- 5) Biaya appraisal dan sewa tanah Stadion Sultan Agung;
- 6) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten;
- 7) Penyusunan DED Pasar Rakyat (Pasar Mangiran, Pasar Bantul dan Pasar Piyungan);
- 8) Pemeliharaan destinasi wisata Goa Selarong;
- 9) Sarana dan prasarana retribusi Kawasan Pantai Selatan;
- 10) Pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan (*Universal Coverage Jamsostek*);
- 11) Pengumpulan data sosial dan ekonomi di tingkat desa/kelurahan melalui program Sipedet Cantik;
- 12) Kegiatan keagamaan dan perayaan hari besar keagamaan;
- 13) Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPST Argodadi;
- 14) Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor;
- 15) Pengadaan sarana prasarana kantor (*laptop, printer, scanner, dll*);
- 16) Penyesuaian Belanja Bantuan Keuangan (*Sharing Kontribusi Pengelolaan IPAL Sewon*);

17) Penyesuaian Belanja Tidak Terduga;
Belanja dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 secara terperinci terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023-2025 dan Proyeksi Perubahan Belanja Tahun 2026 (Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN II 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5.1	Belanja Operasi	1,840,327,289,726.91	1,972,500,878,943.82	1,953,712,205,582.04	864,224,564,114.74	1,998,762,335,022.29	2,003,833,594,737.57	5,071,259,715.28
5.1.01	Belanja Pegawai	860,578,542,728.00	952,731,205,875.00	1,001,021,783,465.00	483,764,903,858.00	1,032,884,417,313.04	1,015,523,131,613.04	(17,361,285,700.00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	858,885,766,998.91	886,056,158,351.82	856,399,680,925.04	345,496,003,156.74	873,194,251,299.25	895,318,946,714.53	22,124,695,415.28
5.1.05	Belanja Hibah	115,915,380,000.00	128,922,914,717.00	91,182,341,192.00	33,278,057,100.00	88,013,866,410.00	88,321,716,410.00	307,850,000.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4,947,600,000.00	4,790,600,000.00	5,108,400,000.00	1,685,600,000.00	4,669,800,000.00	4,669,800,000.00	-
								-
5.2	Belanja Modal	227,673,894,188.81	279,968,387,225.89	195,412,733,322.80	24,265,474,423.12	156,357,627,847.60	154,295,274,298.60	(2,062,353,549.00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76,046,486,634.86	83,581,489,731.00	60,251,382,383.00	10,209,595,811.00	37,027,658,308.00	38,440,224,225.00	1,412,565,917.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32,716,587,212.88	55,257,517,175.64	13,492,099,185.00	5,189,423,477.12	28,258,849,415.60	28,432,841,019.60	173,991,604.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	110,642,014,782.07	132,989,716,998.25	111,660,165,894.80	7,965,996,615.00	82,284,248,102.00	79,158,822,102.00	(3,125,426,000.00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8,268,805,559.00	8,041,511,571.00	9,447,873,360.00	900,458,520.00	8,786,872,022.00	8,263,386,952.00	(523,485,070.00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	98,151,750.00	561,212,500.00	-	-	-	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	1,122,989,975.00	7,518,166,014.00	3,525,110,891.00	339,192,975.00	3,361,411,094.00	3,398,173,783.33	36,762,689.33
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1,122,989,975.00	7,518,166,014.00	3,525,110,891.00	339,192,975.00	3,361,411,094.00	3,398,173,783.33	36,762,689.33
5.4	Belanja Transfer	342,301,803,637.00	356,026,220,783.00	348,629,547,270.00	110,813,493,171.00	313,341,765,199.00	313,342,688,199.00	923,000.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	30,677,039,097.00	35,620,232,553.00	40,548,857,469.00	19,632,978,171.00	37,271,261,169.00	37,271,261,169.00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	311,624,764,540.00	320,405,988,230.00	308,080,689,801.00	91,180,515,000.00	276,070,504,030.00	276,071,427,030.00	923,000.00
								-
	Jumlah Belanja Daerah (5.1+5.2+5.3+5.4)	2,411,425,977,527.72	2,616,013,652,966.71	2,501,279,597,065.84	999,642,724,683.86	2,471,823,139,162.89	2,474,869,731,018.50	3,046,591,855.61

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2026

3.2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan perubahan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan tetap diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Target penerimaan pembiayaan yang dicantumkan dalam APBD Tahun 2026 sebesar Rp. 163.082.299.638,89 menjadi Rp161.043.440.879,50. Pengurangan tersebut berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA).

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tetap diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. Namun Pemerintah Kabupaten Bantul tetap berkomitmen terhadap alokasi penyertaan modal sebagai bagian dari kewajiban yang dialokasikan di setiap tahunnya.

Adapun rincian pembiayaan daerah terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2025 dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun 2026 (Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN II 2026	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	215,631,865,732.74	197,220,549,259.59	175,061,744,482.45	161,958,236,368.00	163,082,299,638.89	161,043,440,879.50	(2,038,858,759.39)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	215,631,865,732.74	196,239,211,759.59	173,920,250,697.45	161,043,440,879.00	163,082,299,638.89	161,043,440,879.50	(2,038,858,759.39)
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	981,337,500.00	1,141,493,785.00	914,795,489.00	-	-	-
								-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	24,051,093,800.00	16,700,000,000.00	25,375,550,000.00	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	24,051,093,800.00	16,700,000,000.00	25,375,550,000.00	0.00	-	-	-
								-
	Jumlah Pembiayaan (6.1-6.2)	191,580,771,932.74	180,520,549,259.59	149,686,194,482.45	161,958,236,368.00	163,082,299,638.89	161,043,440,879.50	(2,038,858,759.39)

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2026

Adapun Struktur APBD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dan proyeksi perubahannya secara terperinci disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.10 Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2026 (Rupiah)**

NO	URAIAN	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	2,308,740,839,524.00	2,313,826,290,139.00	5,085,450,615.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	753,349,327,920.00	755,242,070,930.00	1,892,743,010.00
4.1.01	Pajak Daerah	408,211,152,680.00	408,211,152,680.00	-
4.1.02	Retribusi Daerah	251,312,134,106.00	251,312,134,106.00	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,199,694,868.00	20,199,694,868.00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	73,626,346,266.00	75,519,089,276.00	1,892,743,010.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,555,391,511,604.00	1,558,584,219,209.00	3,192,707,605.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,380,125,281,000.00	1,379,786,874,756.00	(338,406,244.00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	175,266,230,604.00	178,797,344,453.00	3,531,113,849.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	2,308,740,839,524.00	2,313,826,290,139.00	5,085,450,615.00
5	BELANJA DAERAH	2,471,823,139,162.89	2,474,869,731,018.50	3,046,591,855.61
5.1	BELANJA OPERASI	1,998,762,335,022.29	2,003,833,594,737.57	5,071,259,715.28
5.1.01	Belanja Pegawai	1,032,884,417,313.04	1,015,523,131,613.04	(17,361,285,700.00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	873,194,251,299.25	895,318,946,714.53	22,124,695,415.28
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.04	Selanjutnya Subsidi	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	88,013,866,410.00	88,321,716,410.00	307,850,000.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4,669,800,000.00	4,669,800,000.00	-
5.2	BELANJA MODAL	156,357,627,847.60	154,295,274,298.60	(2,062,353,549.00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,027,658,308.00	38,440,224,225.00	1,412,565,917.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28,258,849,415.60	28,432,841,019.60	173,991,604.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	82,284,248,102.00	79,158,822,102.00	(3,125,426,000.00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8,786,872,022.00	8,263,386,952.00	(523,485,070.00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,361,411,094.00	3,398,173,783.33	36,762,689.33

NO	URAIAN	APBD 2026	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3,361,411,094.00	3,398,173,783.33	36,762,689.33
5.4	BELANJA TRANSFER	313,341,765,199.00	313,342,688,199.00	923,000.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	37,271,261,169.00	37,271,261,169.00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	276,070,504,030.00	276,071,427,030.00	923,000.00
	Jumlah Belanja	2,471,823,139,162.89	2,474,869,731,018.50	3,046,591,855.61
	Total Surplus/(Defisit)	(163,082,299,638.89)	(161,043,440,879.50)	2,038,858,759.39
6	PEMBIAYAAN DAERAH	163,082,299,638.89	161,043,440,879.50	(2,038,858,759.39)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	163,082,299,638.89	161,043,440,879.50	(2,038,858,759.39)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	163,082,299,638.89	161,043,440,879.50	(2,038,858,759.39)
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	163,082,299,638.89	161,043,440,879.50	(2,038,858,759.39)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Netto	163,082,299,638.89	161,043,440,879.50	(2,038,858,759.39)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun Berjalan	-	-	-

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2026

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran pembangunan daerah adalah penjabaran dari tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, sedangkan prioritas pembangunan daerah adalah sekumpulan program unggulan yang dipilih secara khusus untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan.

Elemen-elemen utama program unggulan memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, pagu pendanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab. Program yang disusun dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu, anggaran, kapasitas, dan sumberdaya yang dimiliki. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang bertujuan mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sasaran dan prioritas ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan sebelumnya, aspirasi masyarakat, dan daya dukung wilayah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka satu sampai lima tahun namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan baik nasional maupun provinsi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan selanjutnya

dijabarkan kedalam sasaran yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan, dengan kata lain tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai sementara sasaran merupakan tindakan spesifik dan langkah terukur yang perlu diambil untuk mencapai tujuan.

Perumusan tujuan dan sasaran mengacu pada visi dan misi dalam RPJMD. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yaitu Visi **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**

Secara filosofis visi tersebut merupakan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa dengan penjabaran sebagai berikut:

1. **MAJU:** diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transformasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing;
2. **KUAT:** diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis;
3. **DEMOKRATIS:** diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyub, rukun, aman dan tertib;
4. **SEJAHTERA:** diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan, perumahan layak, pangan sehat, serta kehidupan sosial masyarakat yang nyaman;
5. **BINGKAI KEBERAGAMAAN:** diartikan pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI;
6. **BINGKAI BUDAYA ISTIMEWA:** diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Untuk mewujudkan visi disusunlah misi yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan meliputi:

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.

- SDM tangguh adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, resilien, berkarakter dan berbudi pekerti luhur.
- SDM produktif dan berdaya saing adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kreatifitas dan berani menghadapi persaingan.

2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

- Transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk penguatan kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, pemenuhan sarana prasarana, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri).
- Tata kelola pemerintahan yang kreatif dan inovatif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang responsif dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government* serta memadukan berbagai strategi inovatif.
- Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif adalah Pemerintahan Kabupaten Bantul yang melibatkan perguruan tinggi, masyarakat, sektor swasta dan media dalam proses pengambilan keputusan guna mengatasi permasalahan publik untuk mencapai tujuan bersama.
- Berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang ramah, mudah, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Pelayanan publik yang berkeadilan adalah pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bantul yang memenuhi asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, inklusif dan bebas diskriminasi.

3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.

- Transformasi ekonomi merupakan proses perubahan struktural dalam sistem ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan.
- Transformasi ekonomi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah SDA, produktivitas tenaga kerja, ekonomi kreatif, dan investasi.
- Pembangunan ekonomi menekankan pada penciptaan kesempatan yang adil bagi semua orang, termasuk kelompok rentan dan memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.
- Perekonomian berbasis sumber daya lokal adalah perekonomian Kabupaten Bantul yang memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal dengan menerapkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah.

4. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

- Transformasi infrastruktur ramah lingkungan adalah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul yang inklusif dan berkelanjutan.
- Transformasi infrastruktur tangguh bencana adalah infrastruktur di Kabupaten Bantul yang mendukung masyarakat untuk memiliki kemampuan menghadapi ancaman bencana, penanganan bencana, dan pemulihan pasca Bencana.

5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

- Transformasi sosial diartikan sebagai proses perubahan yang terjadi pada masyarakat dalam berbagai aspek seperti struktur sosial, nilai-nilai, norma, dan budaya.
- Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan seni tradisional. Pelestarian budaya dilakukan dengan mengembangkannya secara dinamis, luwes, dan selektif.
- Guyub rukun dan gotong royong adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, tenteram, aman, dan hidup saling menolong.

Sesuai dengan sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 yang terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa tujuan diturunkan dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan mempedomani misi. Sasaran diturunkan dari tujuan merupakan rangkaian kinerja yang merupakan hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah ini. Setiap tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja dan target tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sinkronisasi Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan Program Perangkat Daerah Tahun 2026

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
VISI MAJU												
Misi 1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing	T1	Meningkatk an Daya Saing dan Produktivita s Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	82,26-82,89	82,26-82,89	83,21*						
	S1.1	Meningkatny a kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat yang inklusif	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,72-15,79	15,72-15,79	15,92*	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	100	100	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,96	9,96	10,12*		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	100	100	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Usia Harapan Hidup (tahun)	74,97-75,18	74,97-75,18	74,97-75,18		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	100	100	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	15,3	15,25-13,25	15,25-13,25		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	100	100	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,123	0,123	0,123	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Kecukupan Guru SD Negeri (indeks)	n/a	0,92	0,92	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
								Indeks Kecukupan Guru SMP Negeri (indeks)	n/a	0,71	0,71	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
								Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	86	93,00	93,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya (%)	n/a	4,17	4,17	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	5,91	5,91	5,91	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
								kemasyarakatan (%)				
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang masuk Pelatnas (%)	79	79	79	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan (%)	4,19	4,19	4,19	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
							PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan (persen)	n/a	26,99	26,99	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Rata-rata naskah kuno yang dilestarikan (Naskah Kuno)	1	1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	n/a	n/a	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (persen)	n/a	81,00	81,00	Dinas Kesehatan

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
								Cakupan fasyankes Terakreditasi (persen)	n/a	90,77	90,77	Dinas Kesehatan
								Angka Kematian Demam Dengue (persen)	n/a	0,5	0,5	Dinas Kesehatan
							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan (%)	44,95	44,95	44,95	Dinas Kesehatan
							PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman (%)	75,53	75,53	75,53	Dinas Kesehatan
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional (%)	74	74,00	74,00	Dinas Kesehatan
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi pelayanan kesehatan (%)	22,22	22,22	22,22	Dinas Kesehatan

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan kader pos pelayanan terpadu yang tersertifikasi kompetensi kader kesehatan (%)	n/a	45,00	45	Dinas Kesehatan
							PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15- 19 tahun (Age specific fertility rate/ASFR 15- 19) (Angka)	10	7,18	7,18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) (Persen)	11	19,25	19,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
								Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (Persen)	n/a	65,25	65,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
								Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persen)	n/a	1,09	0,19*	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina (Persen)	85,5	85,50	85,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
								Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Persen)	n/a	89,10	89,95*	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
								Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persen)	n/a	73,70	73,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	n/a	18,00	28,19*	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang ditangani instansi terkait	n/a	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	n/a	66,43	76,70*	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	n/a	80,16	94,38*	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	n/a	0,35	0,35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
VISI KUAT												
Misi 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	T2	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	88,5	88,5	90,05*						
	S2.1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Nilai AKIP	84,18	84,18	84,18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (angka)	83,37	82,37	82,37	Sekretariat Daerah
			Opini BPK	WTP	1 (WTP)	1 (WTP)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	92	92,00	92,00	Sekretariat Daerah
			Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	94,05	94,05	94,05		Indeks Evaluasi Kelembagaan (Indeks)	85	85,00	85,00	Sekretariat Daerah

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
			Indeks Pelayanan Publik	4,52	4,48-4,52	4,682*	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan dan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	Sekretariat Daerah
			Indeks Pemerintahan Digital	1,6	1,6	1,6		Capaian perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama (%)	99,25	99,25	99,25	Sekretariat Daerah
								Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	97,6	92,50	92,50	Sekretariat Daerah
							PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	83,2	86,20	86,20	Sekretariat Daerah
								Rata-rata capaian kinerja Indikator Utama Pembangunan (IUP) (%)	76,5-79,0	76,50-79,00	76,50-79,00	Sekretariat Daerah
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kematangan Perangkat Daerah (%)	43,5	43,50	43,50	Sekretariat Daerah

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
								Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)	100	100	100	Sekretariat Daerah
								Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik (%)	6,67	6,67	6,67	Sekretariat Daerah
							PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi (%)	100	100	100	Sekretariat DPRD
								Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi pengawasan dan penganggaran (%)	100	100	100	Sekretariat DPRD
							PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil monev beserta revidi eksternal yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan (Persen)	n/a	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
								Rasio alokasi program unggulan daerah dalam RKPD (Persen)	n/a	31,00	31,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kategori tinggi dan sangat tinggi (%)	100	73,00	73,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
								Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kategori tinggi dan sangat tinggi (%)	100	73,68	73,68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
								Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) kategori tinggi dan sangat tinggi (%)	100	70,83	70,83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase fasilitasi riset dan inovasi di daerah (%)	n/a	93,65	93,65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik (%)	30	30,00	30,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
								Rasio Belanja Pegawai terhadap total belanja (Angka)	35	35,00	35,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
								Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya (Angka)	7	7,00	7,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
							PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah dalam rangka <i>assets management</i> (%)	66	66,00	66,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD (%)	10	10,79	10,79	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
								Pesentase data piutang pajak daerah yang tertagih (%)	78,5	78,50	78,50	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase pengelolaan keuangan urusan keistimewaan (%)	97,2	97,20	97,20	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
							PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN (%)	86	86,00	86,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
								Capaian Pelaksanaan Penilaian Potensi dan atau Kompetensi ASN (%)	100	100,00	100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
								Persentase Penilaian Kinerja ASN (%)	91,5	95,75	95,75	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Capaian Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan (%)	78	75,00	75,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
								Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	n/a	47,31	47,31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY (%)	100	37,5	37,5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan berulang (%)	38	4,5	4,5	Inspektorat Daerah
							PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (Indeks)	3,024	3,024	3,024	Inspektorat Daerah

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)	81	81	81	17 Kapanewon
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan mayarakat (%)	100	100	100	17 Kapanewon
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	17 Kapanewon
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	17 Kapanewon
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)	100	100	100	17 Kapanewon
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	100	100	100	17 Kapanewon

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (%)	82,32	82,33	82,33	Dinas perpustakaan dan Arsip Daerah
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	83,34	83,35	83,35	Dinas perpustakaan dan Arsip Daerah
							PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (%)	n/a	98,00	98,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	n/a	20,67	20,67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (%)	n/a	99,65	99,65	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemutakhiran Data Kependudukan (%)	95,02	97,50	97,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								Persentase Instansi/lembag a yang memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) (%)	70	70,00	70,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	98,6	98,6	99,34*	Dinas Komunikasi dan Informatika
							PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah (angka)	1,6	1,6	1,6	Dinas Komunikasi dan Informatika

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
								Tingkat kematangan pembangunan/ pengembangan aplikasi (angka)	1,6	1,6	1,6	Dinas Komunikasi dan Informatika
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	96,5	90,2	91,83*	Dinas Komunikasi dan Informatika
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks)	2,54	2,54	2,54	Dinas Komunikasi dan Informatika
							ROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
								Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
VISI SEJAHTERA												
Misi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk	T3	Meningkatkan Ketangguhan Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28-5,51	5,28-5,51	5,28-5,51						
			PDRB per kapita (Rp Juta)	38,27-40,80	38,27-40,80	38,27-40,80						
			Rasio Gini	0,385-0,409	0,385-0,409	0,385-0,409						
	S3.1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	12,83-13,19	12,83-13,19	12,83-13,19	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	6.283.671	6.527.877	6.527.877	Dinas Pariwisata
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	14,20-14,84	14,20-14,84	14,20-14,84	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata (%)	2,4	2,40	2,40	Dinas Pariwisata
			PDRB Sektor Pertanian ADHB (Rp miliar)	5.395,85 - 5.405,48	5.395,85 - 5.405,48	5.395,85-5.405,48	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%)	40	38	38	Dinas Pariwisata
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	60	7,70	7,70	Dinas Pariwisata

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan (kawasan)	n/a	n/a	n/a	Dinas Pariwisata
							PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)	2.626.420	2.626.420	2.626.420	Dinas Pariwisata
							PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	8,1	8,10	8,10	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
							PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	92	92	92	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
							PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif (%)	69	69	69	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
							PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	26,91	26,91	26,91	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	6,1	6,10	6,10	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	61,25	61,25	61,25	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
							PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Digital (%)	42	42,00	42,00	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas (unit)	290	50	50	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
							PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	100	100	100	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya (%)	53	53	53	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
							PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	6,5	6,50	6,50	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
							PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang (Juta USD)	120.6	120,60	120,60	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku (%)	71	71,00	71,00	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
							PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Nilai belanja produk dalam negeri (Triliun Rupiah)	1,8	1,80	1,80	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
							PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri (%)	65	65	65	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan (%)	100	100	100	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini (%)	100	100	100	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang berfungsi dengan baik (%)	78,20	78,20	78,20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan (%)	54,08	54,08	54,08	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan (%)	1,33	1,33	1,33	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%)	89,4	89,40	89,40	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemuhan kebutuhan sarana pertanian (%)	0,15	49,63	49,63	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
								Peningkatan produksi komoditas peternakan (%)	0,95	0,76	0,76	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
								Persentase kenaikan angka rendemen benih padi unggul bersertifikat (%)	0,11	0,11	0,11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)	12.831	12.831	12.831	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	2	-47,39	-47,39	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
								Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	8,18	8,18	8,18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan bencana pertanian (%)	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan (%)	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Ton/Ha)	6,52	6,52	6,52	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	n/a	0,5	0,5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%)	n/a	20	20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	0,66	0,66	0,66	Dinas Kelautan dan Perikanan

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)	2,08	2,08	2,08	Dinas Kelautan dan Perikanan
							PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	55	55	55	Dinas Kelautan dan Perikanan
							PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi perikanan yang diolah (%)	4	4,00	4,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi (%)	n/a	1,42	1,42	Dinas Kelautan dan Perikanan
	S3.2	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	26,81-26,91	26,81-26,91	26,81-26,91	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	3,59	3,59	3,59	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,04-3,57	3,04-3,57	3,04-3,56*	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	91	91	91	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
								kabupaten/kota (%)				
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,1	4,10-4,60	4,725*	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	44,64	44,64	44,64	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)	17.407	17.407	17.407		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)	30,15-35,15	30,15-35,15	30,15-35,15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi (%)	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi (%)	75	75	75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Proyek (%)	433	2,00	2,00	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal (%)	3	5,80	5,80	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
							PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan (%)	93,3	99,10	99,10	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
							PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan pelaku usaha tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (%)	475,52	23	23	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (%)	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
	T4	Meningkatkan Penanggulan gan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	9,39-9,67	9,39-9,67	9,39-9,67						
	S4.1	Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks)	n/a	2,12	2,12	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi (%)	47,83	47,83	47,83	Dinas Sosial

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	100	100	100	Dinas Sosial
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	70	70	70	Dinas Sosial
							PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	Dinas Sosial
							PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan jenis lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial, nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial (%)	50	50	50	Dinas Sosial

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik (%)	n/a	0	0	Dinas Sosial
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
								kabupaten/kota (%)				
								Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	0,59	0,59	0,59	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase luasan kawasan kumuh sesuai SK yang ditangani (%)	17,35	17,35	17,35	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	16,79	16,79	16,79	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase kalurahan dengan peningkatan pendapatan asli kalurahan (%)	13,33	13,33	13,33	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan
							PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kalurahan dengan Kualitas Belanja kategori baik (%)	40	40,00	40,00	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi (%)	n/a	70,66	70,66	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik (%)	n/a	13,33	13,33	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan
							PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase anggaran Kalurahan untuk LKK yang mendukung program prioritas kabupaten (%)	16	13,50	13,50	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan
Misi 4. Mewujudkan Transformasi Infrastruktur Kewilayahan yang Ramah Lingkungan dan Tangguh Bencana	T5	Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Indeks Pengembangan Wilayah (Indeks)	70,99	64,85	70,39*						
	S5.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya risiko bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks)	66,17	66,17	71,13*	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
			Indeks Risiko Bencana	127,10-138,80	116,87	95*	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan status indeks pencemar (IP) (%)	11,11	11,11	11,11	Dinas Lingkungan Hidup
							PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan (%)	38,4	38,4	38,4	Dinas Lingkungan Hidup
							PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3 (%)	38,32	38,32	38,32	Dinas Lingkungan Hidup
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten (%)	n/a	72,92	72,92	Dinas Lingkungan Hidup
							PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup (%)	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi/nasional (penghargaan)	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
							PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup (%)	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
							PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Capaian Pengelolaan Sampah (%)	n/a	44,15	44,15	Dinas Lingkungan Hidup
								Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	n/a	45,00	45,00	Dinas Lingkungan Hidup
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan (kawasan)	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
							PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
								Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
								terhadap bencana (%)				
								Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
								Persentase penanganan pasca bencana (%)	50	50	50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	100	100	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
								Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	8,81	8,81	8,81	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	n/a	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	S5.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	78,56	59,8	69,35*	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI) (%)	n/a	65,83	65,83	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Penyediaan infrastruktur persampahan (%)	44	44	44	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase kondisi baik (%)	64	64	64	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan PBG (%)	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	64	64	64	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	66,38	66,38	66,38	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS (%)	n/a	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembangunan Taman Budaya (%)	11,22	11,22	11,22	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
								Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	n/a	87,11	87,11	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
							PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas kabupaten (angka)	0,75	0,75	0,75	Dinas Perhubungan
								Persentase pengawasan pengendalian LLAJ (%)	n/a	79,37	79,37	Dinas Perhubungan
								Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal (%)	18,38	18,38	18,38	Dinas Perhubungan
							PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis (%)	n/a	0	0	Dinas Perhubungan
								Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis (%)	39,07	39,07	39,07	Dinas Perhubungan

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	100	100	100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
							PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	90	90,00	90,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
								Persentase pengendalian dan pengawasan penataan ruang (%)	n/a	76,00	76,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
							PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (%)	100	86,77	86,77	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
							PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	100	100,0	100,0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
								Persentase pengendalian dan pengawasan pertanahan (%)	n/a	32	32	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
							PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum (%)	100	100	100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa (%)	64,89	64,89	64,89	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
VISI DEMOKRATIS												
BINGKAI KEBERAGAMAAN												
BUDAYA ISTIMEWA												
Misi 5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan	T6	Meningkatk an Keharmonis an Daerah	Indeks Harmoni Indonesia (%)	7,58	7,58	7,58						
	S6. 1	Meningkatny a Pelestarian Budaya	Indeks Pelestarian Kebudayaan	82,33	90,91	90,91	PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	69,7	69,70	69,70	Dinas Kebudayaan
	S6. 2	Meningkatny a Ketentraman , Ketertiban dan Kenyamanan Daerah	Crime Rate (per 100.000 penduduk)	146,1	146,1	146,1		Persentase pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra (%)	100	100	100	Dinas Kebudayaan
								Persentase pelestarian seni, adat tradisi (%)	100	100	100	Dinas Kebudayaan

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
								Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan (%)	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
								Persentase petugas linmas yang terlatih (%)	30,78	30,78	30,78	Satuan Polisi Pamong Praja
							PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) yang diintervensi	100	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
							PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Omah Jaga Warga yang aktif (%)	20	20,00	20,00	Satuan Polisi Pamong Praja
							PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)	41,18	41,18	41,18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PENJABARAN VISI DAN MISI		TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET			PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			PERANGKAT DAERAH
				RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026			RKPD 2026 (Rankir RPJMD 2025-2029)	RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
							PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik (%)	50	50	50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif (%)	48,15	48,15	48,15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diselesaikan (%)	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 (diolah)
Keterangan * : penyesuaian target

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Berdasarkan realisasi yang dicapai tahun 2025 beberapa target disesuaikan kinerjanya, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Target	
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,26-82,89	83,21*
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,72-15,79	15,92*
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,96	10,12*
4	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,97-75,18	74,97-75,18
5	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	15,25-13,25	15,25-13,25
6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,123	0,123
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	88,5	90,05*
8	Nilai AKIP	Angka	84,18	84,18
9	Opini BPK	Opini	1 (WTP)	1 (WTP)
10	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	94,05	94,05
11	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,48-4,52	4,682*
12	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	1,6	1,6
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,28-5,51	5,28-5,51
14	PDRB per kapita	Rp Juta	38,27-40,80	38,27-40,80
15	Rasio Gini	Indeks	0,385-0,409	0,385-0,409
16	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12,83-13,19	12,83-13,19
17	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	14,20-14,84	14,20-14,84
18	PDRB Sektor Pertanian ADHB	Rp miliar	5.395,85 - 5.405,48	5.395,85- 5.405,48
19	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	26,81-26,91	26,81-26,91
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,04-3,57	3,04-3,56*
21	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	4,10-4,60	4,725*
22	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribuan rupiah/orang/tahun)	Ribuan rupiah	17.407	17.407
23	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,39-9,67	9,39-9,67
24	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2,12	2,12
25	Indeks Pengembangan Wilayah	Indeks	64,85	70,39*
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,17	71,13*
27	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	116,87	95*
28	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	59,8	69,35*
29	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,58	7,58
30	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Indeks	90,91	90,91
31	Crime Rate	Per 100.000 penduduk	146,1	146,1

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 (diolah)

Keterangan * : penyesuaian target

Dari tabel 4.1 dan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa terdapat perubahan target pada beberapa indikator. Perubahan ini disebabkan adanya perubahan formulasi atas dasar peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian pengampu sektor dan juga pada beberapa indikator dengan realisasi di tahun 2025 telah melampaui target tahun 2026, sehingga diperlukan adanya penyesuaian target.

Perubahan target ini diperkenankan sesuai Pasal 168 ayat (7) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa target indikator sasaran RKPD dapat berbeda dengan target indikator sasaran RPJMD tahun berkenaan selama target sasaran pada akhir periode RPJMD tidak berubah.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	84,32	76,83*
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Angka	8,78-9,47	8,78-9,47
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,17	71,13*
4	Indeks Risiko Bencana	Indeks	116,87	95*
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	81	81
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	25,78	25,78
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	45	52,98*
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,28-5,51	5,28-5,51
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,39-9,67	9,39-9,67
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	38,27-40,80	38,27-40,80
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,04-3,57	3,04-3,56*
5	Rasio Gini	Indeks	0,385-0,409	0,385-0,409
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,26-82,89	83,21*
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,97-75,18	74,97-75,18
8	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	81,15	81,15
9	Angka Kematian Balita	per 1.000 kelahiran hidup	13,8	13,8
10	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Persen	46	46
11	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	97,72	97,72

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026
12	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	6	6
13	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persen	20	20
14	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	15,25-13,25	15,25-13,25
15	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	Persen	91,45	91,45
16	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	Persen	91,2	91,2
17	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	98,57	98,57
18	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,96	10,12*
19	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,72-15,79	15,92*
20	Literasi Membaca	Persen	82,65	82,65
21	Numerasi	Persen	70,89	70,89
22	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)	Ribu Rupiah	17.407	17.407
23	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Persen	30,15-35,15	30,15-35,15
24	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,123	0,123
25	Total Fertility Rate (TFR)	Orang	1,55	1,85*
26	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	60,7	72,65*
27	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	62	77,55*
28	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	65	76,15*
29	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2,12	2,12
30	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin Indeks	0,7	0,7
III ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	14,20-14,84	14,20-14,84
2	PDRB Sektor Pertanian ADHB	Rp miliar	5.395,85 - 5.405,48	5.395,85 - 5.405,48
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12,83-13,19	12,83-13,19
4	Kontribusi PDRB Kabupaten Bantul terhadap PDRB provinsi	Persen	18,94-19,15	18,94-19,15
5	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	Persen	5,25	5,25
6	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	4,10-4,60	4,725*
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	1,9	1,9
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	68,18-70,68	68,18-70,68
9	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	77,33	84,86
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	26,81-26,91	26,81-26,91
11	Indeks Pengembangan Wilayah	Indeks	64,85	70,39*
12	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	59,8	69,35*
13	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,91-0,97	0,91-0,97
14	Total Kredit/PDRB	Persen	37,16	37,16

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026
15	Crime Rate	Per 100.000 penduduk	146,1	146,1
16	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,58	7,58
17	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Indeks	90,91	90,91
18	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	4,72	5,2*
19	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	99,14	99,30*
20	Persentase Desa Mandiri	Persen	100	100
IV ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	88,5	90,5*
2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,48-4,52	4,682*
3	Nilai AKIP	Angka	84,18	84,18
4	Opini BPK	Opini	1 (WTP)	1 (WTP)
5	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	94,05	94,05
6	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	1,6	1,6
7	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Nilai	3,213	3,213
8	Rata-rata capaian kinerja Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Persen	76,50-79,00	97-99*

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 (diolah)

Keterangan * : penyesuaian target

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	PENDIDIKAN				
1	Literasi Membaca SD (%)	Persen	76,94	76,94	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Literasi Membaca SMP (%)	Persen	88,35	88,35	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3	Numerasi SD (%)	Persen	65,96	65,96	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
4	Numerasi SMP (%)	Persen	75,82	75,82	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
5	Indeks layanan pendidikan	Indeks	85,38	85,38	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	100	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
7	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	100	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
8	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
9	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	KESEHATAN				
1	Net Death Rate (NDR)	Per 1.000 Penduduk	17,9	17,9	Dinas Kesehatan
2	Persentase PHBS pada tatanan Rumah Tangga	Persen	19	52,81*	Dinas Kesehatan
3	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Per 1.000 Penduduk	1,367	1,367	Dinas Kesehatan
4	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
5	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
6	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
7	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
8	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
9	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
10	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
11	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
12	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
13	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
15	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
16	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu	Persen	83	83	Dinas Kesehatan
17	Persentase Sarana IRT yang memenuhi ketentuan	Persen	20	20	Dinas Kesehatan
18	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	Persen	5	5	Dinas Kesehatan
19	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Persen	50	50	Dinas Kesehatan
20	Prevalensi depresi pada usia ≥ 15 tahun	Persen	1,4	1,4	Dinas Kesehatan
21	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
22	Prevalensi obesitas > 18 tahun	Persen	24,6	24,6	Dinas Kesehatan
23	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	90,77	90,77	Dinas Kesehatan
24	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Persen	88,05	88,05	Dinas Kesehatan
25	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Persen	58	58	Dinas Kesehatan
26	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Persen	63	63	Dinas Kesehatan
27	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persen	37,99	78,01*	Dinas Kesehatan
28	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
29	Persentase lanjut usia yang mandiri	Persen	94,9	94,9	Dinas Kesehatan
30	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Persen	22,5	22,5	Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
31	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Per 1.000 Penduduk	8,6	8,6	Dinas Kesehatan
32	Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar	Persen	30	70	Dinas Kesehatan
33	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
34	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	Persen	14,4	14,4	Dinas Kesehatan
35	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
36	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
37	Persentase RS terakreditasi paripurna	Persen	93,75	93,75	Dinas Kesehatan
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Indeks Pemerataan Infrastruktur	Indeks	0,8622	0,7860*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Indeks Peningkatan Infrastruktur Wilayah	Indeks	1,86	3,02*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Rasio kepatuhan PBG	Persen	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	66,38	66,38	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	64	64	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
8	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	0	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	0	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	81,21	84,70*	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,85	75,85	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	Persen	14,79	14,79	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	persen	0,59	0,59	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Persentase luasan kawasan kumuh sesuai SK yang ditangani	persen	17,35	17,35	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	16,79	16,79	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
1	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	75	76*	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	Indeks	75	75	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	Persen	72,31	72,31	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan	Persen	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	Orang	1.485	1.485	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,76	0,79*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks	80	90,8*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks	70	81*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Menit	8,81	8,81	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SOSIAL					
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,9	66,95*	Dinas Sosial
2	Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Angka	29	55,53*	Dinas Sosial
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak	Persen	100	100	Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
	terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	Dinas Sosial
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	TENAGA KERJA				
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	74,95	74,95	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	39.913.934	40.713.934*	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Persentase calon tenaga kerja yang terserap di dunia kerja	Persen	85,72	85,72	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Persen	91	91	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	3,59	3,59	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	44,64	44,64	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,19	96,45*	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70,35 - 71,50	79,95*	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	26	26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Rasio Kekerasan terhadap Anak per 10.000 Anak	Angka	3,93	3,93	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	80,16	94,38*	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	66,43	76,7*	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	18	28,19*	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PANGAN				
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	95,78	95,78	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
2	Persentase cadangan pangan	Persen	54,08	54,08	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	PERTANAHAN				
1	Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	Indeks	80,8	80,8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	Persen	84,1	84,1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	90	90	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
5	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	100	100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
6	Persentase Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Penanaman Modal	Persen	83,5	83,5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
7	Persentase penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	Persen	100	100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
8	Persentase Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	Persen	100	100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	LINGKUNGAN HIDUP				
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	70,89	72,45*	Dinas Lingkungan Hidup
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	70,81	81,54*	Dinas Lingkungan Hidup
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	49,51	49,62*	Dinas Lingkungan Hidup
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	40,25	42,4*	Dinas Lingkungan Hidup
5	Persentase Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	Persen	27,08	27,08	Dinas Lingkungan Hidup
6	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	Persen	72,92	72,92	Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
7	Capaian Pengelolaan Sampah	Persen	44,15	44,15	Dinas Lingkungan Hidup
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Indeks Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	4,13	4,13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Indeks Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	4,61	4,65*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	20,67	20,67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Persentase Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	Persen	99,81	99,81	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	96,23	96,23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Tingkat Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 tahun)	Persen	99,95	99,95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Tingkat Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-4 tahun)	Persen	99,65	99,65	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Kepemilikan Akta Perkawinan	Persen	89,42	89,42	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Kepemilikan Akta Perceraian	Persen	92,04	92,04	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Kepemilikan Akta Kematian	Persen	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	48,89	48,89	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Indeks Desa	Nilai	88,58	88,58	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan
2	Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik	Persen	13,33	34,66*	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan
3	Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik	Persen	20	26,66*	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan
4	Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa	Persen	88,75	88,75	Dinas Pemberdayaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
					masyarakat dan kalurahan
5	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	100	100	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan
6	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	100	100	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age specific fertility rate/ASFR 15-19</i>)	Angka	7,18	7,18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	19,25	19,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	Persen	65,25	65,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persen	1,09	0,19*	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	89,1	89,95*	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	73,7	73,7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
					Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Persen	72,2	76,15*	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Kepadatan Penduduk	Orang per km ²	1.974	1.974	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PERHUBUNGAN				
1	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen	15,53	15,53	Dinas Perhubungan
2	V/C RASIO di Jalan Kabupaten	Angka	0,37	0,35*	Dinas Perhubungan
3	Rasio konektivitas kabupaten	Angka	0,75	0,75	Dinas Perhubungan
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks	84,75	84,75	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	98,6	99,34*	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	Persen	97	97	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	Persen	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
1	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	70,75	70,75	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
2	Cakupan koperasi modern	Persen	2,24	2,24	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
3	Nilai omset usaha mikro	Milyar rupiah	323,334	323,334	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
4	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	55,61	56,05*	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
5	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	61,25	76,17*	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
	PENANAMAN MODAL				
1	Pertumbuhan nilai investasi (persen)	Persen	11,79	14*	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
2	Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA) Tahun n	Milyar Rupiah	475,52	566,42*	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
3	Persentase peningkatan investasi	Persen	5,04	5,04	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	67	71,25*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Indeks Partisipasi Olahraga	Indeks	45	73*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	Persen	68,75	71,77*	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
4	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	106	106	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	5,91	5,91	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	STATISTIK				
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	3,05	3,05	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	3,27	3,27	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam	Persen	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
	menyusun perencanaan pembangunan daerah				
4	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PERSANDIAN				
1	Tingkat kematangan Aspek Keamanan Siber	Indeks	1,6	1,6	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital	Indeks	1,6	1,6	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	90,2	91,83*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	KEBUDAYAAN				
1	Cakupan pelestarian budaya daerah	Persen	87,88	87,88	Dinas Kebudayaan
2	Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan	Persen	63,49	63,49	Dinas Kebudayaan
3	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	Dinas Kebudayaan
	PERPUSTAKAAN				
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	82,8	8,5*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	81,39	56*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	KEARSIPAN				
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	86,44	86,44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pengawasan Arsip Internal	Indeks	80,84	84,2*	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Persen	82,33	82,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	83,35	83,35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	PDRB Sub Sektor Perikanan ADHB	Rp Miliar	207,63	207,63	Dinas Kelautan dan Perikanan.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
2	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	1,94	2,04*	Dinas Kelautan dan Perikanan.
3	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Persen	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan.
PARIWISATA					
1	Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	5,13	5,13	Dinas Pariwisata.
2	Peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	2,88	2,88	Dinas Pariwisata.
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	47,77	51,75*	Dinas Pariwisata.
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	24,39	24,39	Dinas Pariwisata.
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persen	2,835	2,835	Dinas Pariwisata.
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	12,83-13,19	12,96-13,66*	Dinas Pariwisata.
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	7,62	7,62	Dinas Pariwisata.
PERTANIAN					
1	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	Persen	0,6	0,6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	-47,39	-5,03*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	6,52	6,52	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PERDAGANGAN					
1	Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	Persen	7,39	7,39	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
2	Persentase capaian kinerja sektor perdagangan	Persen	86	100*	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
3	Persentase penggunaan produk dalam negeri	Persen	86	99,6*	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
4	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	71	90*	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
5	Nilai belanja produk dalam negeri	Triliun Rupiah	1,8	1,8	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
6	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	66,82	66,82	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
	(IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				
7	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	50,87	67,79*	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
8	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	0,56	0,56	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
	PERINDUSTRIAN				
1	Pertumbuhan industri kecil menengah	Persen	2,31	2,31	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
2	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Indeks	100	100	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
3	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah	Persen	2,31	2,31	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	n/a	n/a	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
5	Persentase izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Persen	55,55	55,55	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
6	Persentase Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Persen	100	100	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
7	Indeks ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	Indeks	100	100	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
	TRANSMIGRASI				
1	Persentase Penempatan Transmigrasi	Persen	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
	SEKRETARIAT DAERAH				
1	Nilai EPPD	Angka	3,428	3,428	SEKRETARIAT DAERAH
2	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	Angka	13,82	13,85*	SEKRETARIAT DAERAH
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91	91,30*	SEKRETARIAT DAERAH

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
4	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	82	75*	SEKRETARIAT DAERAH
5	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	86,2	87,30*	SEKRETARIAT DAERAH
6	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	83,2	83,2	SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD					
1	Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	Persen	100	100	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2	Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	Indeks	94,91	94,91	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN					
1	Rata-rata nilai AKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	Nilai	25,70-25,95	25,70-25,95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Capaian indikator tujuan dan sasaran Daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	Persen	77,42	80,65*	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KEUANGAN					
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1	Indeks	75,364	75,364	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2	Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	Persen	95,32	95,32	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
3	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	25,11	30,5*	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4	<i>Cash Management:</i> Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	7	7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5	<i>Revenue mobilization:</i> Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	10,79	10,79	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
6	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	36,2	40,02*	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
7	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi <i>Transfer Expenditures</i>)	Persen	70,08	70,08	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
8	<i>Budget execution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	0,113	0,113	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
9	Manajemen Aset	Kategori	4	4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
KEPEGAWAIAN					
1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	82	82,98*	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Capaian Nilai Sistem Merit	Nilai	305 (Baik)	0,41* (Lanjutan)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	26,5	26,5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	69,5	70,24*	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
1	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	47,31	100*	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
1	Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan dalam pembangunan	Persen	72,01	73,64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
INSPEKTORAT DAERAH					
1	Nilai Capaian Area Penguatan APIP	Nilai	90,3	90,3	Inspektorat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,16	3,16	Inspektorat Daerah
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	94,19	94,19	Inspektorat Daerah
	KAPANEWON				
	KAPANEWON PIYUNGAN				
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,8	4,67*	Kapanewon Piyungan
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,48	94,10*	Kapanewon Piyungan
	KAPANEWON DLINGO				
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,8	4,82*	Kapanewon Dlingo
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,65	94,83*	Kapanewon Dlingo
	KAPANEWON IMOGIRI				
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,8	4,51*	Kapanewon Imogiri
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,66	93,83*	Kapanewon Imogiri
	KAPANEWON PANDAK				
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,8	4,41*	Kapanewon Pandak
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,58	94,96*	Kapanewon Pandak
	KAPANEWON BANTUL				
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,8	3,91*	Kapanewon Bantul
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,6	92,6	Kapanewon Bantul
	KAPANEWON KRETEK				
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,8	3,8	Kapanewon Kretek
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,41	92,41	Kapanewon Kretek
	KAPANEWON BAMBANGLIPURO				
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,8	4,51*	Kapanewon Bambanglipuro
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,93	93,25*	Kapanewon Bambanglipuro
	KAPANEWON JETIS				
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,8	4,65*	Kapanewon Jetis
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,82	94,68*	Kapanewon Jetis
	KAPANEWON KASIHAN				
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	4,51	4,81*	Kapanewon Kasihan
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,43	92,43	Kapanewon Kasihan
	KAPANEWON PAJANGAN				

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
			RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	Perubahan RKPD 2026	
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,8	4,35*	Kapanewon Pajangan
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,87	93,05*	Kapanewon Pajangan
	KAPANEWON SANDEN				
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,8	3,88*	Kapanewon Sanden
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,3	92,3	Kapanewon Sanden
	KAPANEWON SEDAYU				
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,8	4,15*	Kapanewon Sedayu
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	93,08	93,53*	Kapanewon Sedayu
	KAPANEWON SEWON				
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,8	4,29*	Kapanewon Sewon
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	93,79	93,79	Kapanewon Sewon
	KAPANEWON SRANDAKAN				
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,8	4,45*	Kapanewon Srandakan
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,63	93,73*	Kapanewon Srandakan
	KAPANEWON BANGUNTAPAN				
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,8	3,84*	Kapanewon Banguntapan
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,63	92,63	Kapanewon Banguntapan
	KAPANEWON PUNDONG				
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,8	4,29*	Kapanewon Pundong
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,74	93,04*	Kapanewon Pundong
	KAPANEWON PLERET				
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,8	3,95*	Kapanewon Pleret
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,25	92,27*	Kapanewon Pleret
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1	Capaian Aspek Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis	Angka	7,44	7,44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Capaian Aspek Moderasi Beragama dan Toleransi antar umat beragama	Angka	7,49	7,49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 (diolah)

Keterangan * : penyesuaian target

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Dengan berpedoman pada tema pembangunan RPJPD Tahap I yaitu **“Penguatan Fondasi Transformasi”** dan sasaran strategis RPJMD tahun 2025-2029, disusun tahapan pembangunan jangka menengah. Penahapan tahunan pembangunan yang menjadi fokus RKPD Tahun 2026 adalah: **Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan.**

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah dan keselarasan dengan misi RPJMD, maka ditetapkan **Prioritas Daerah (PD)** Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, yaitu:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

4.3 Penyelarasan Tema dan Prioritas Nasional dan DIY dengan Prioritas Daerah Kabupaten Bantul

Tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 selanjutnya diselaraskan untuk mendukung Tema dan Prioritas Nasional dan DIY. Pada tabel berikut ini disajikan penyelarasan Tema dan Prioritas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 dalam mendukung Prioritas Nasional, sebagai berikut:

Tabel 4.5 Penyelarasan Tema dan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026

	NASIONAL		KABUPATEN BANTUL
A.	TEMA		
	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif		Penguatan Ekonomi berbasis sektor unggulan didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan
B. PRIORITAS			
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	5	Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru	3	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	4	Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1	Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri	3	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	2	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan	5	Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya

NASIONAL		KABUPATEN BANTUL	
	Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		

Sumber: RKPD Kabupaten Bantul 2026, 2026

Selanjutnya penyelarasan terhadap prioritas pembangunan Daerah DIY ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Penyelarasan Tema dan Prioritas DIY dengan Prioritas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026

	DIY		KABUPATEN BANTUL	
A.	TEMA			
	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Penguatan Ekonomi berbasis sektor unggulan didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan	
B.	PRIORITAS			
	1	Penurunan tingkat kemiskinan	3	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi
	2	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		
	3	Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	1	Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia
	4	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	3	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi
	5	Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan	2	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan
	6	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	4	Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya
			5	Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana

Sumber: RKPD Kabupaten Bantul 2026, 2026

Dalam rangka percepatan perwujudan visi dan misi, terdapat 13 Program Unggulan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang meliputi:

1. Peningkatan kemantapan jalan di Kabupaten.

2. Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura.
3. Penanganan permasalahan kemiskinan, stunting, dan masalah strategis kewilayahan padukuhan melalui penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP).
4. Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga *jogging track*.
5. Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum.
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausahawan muda dan pembangunan kawasan industri.
7. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.
8. Optimalisasi penanganan masalah kemanusiaan, masalah sosial, dan peningkatan pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
9. Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik.
10. Perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan.
11. Penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, dan peningkatan status gizi masyarakat.
12. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana, profesionalitas guru dan tenaga kependidikan serta bantuan bagi pelajar berprestasi.
13. Pelestarian budaya, guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Program unggulan tersebut diterjemahkan kedalam program perangkat daerah yang memiliki kesamaan atau kemiripan *outcome* yang

akan dihasilkan. Daftar program perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan program unggulan tersebut disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.7 Interkoneksi Pendekatan Prioritas, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bantul dengan Program Unggulan dan Program Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul

PRIORITAS DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Tujuan: Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Sumber Daya Manusia Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Standar Hidup Masyarakat	Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana, profesionalitas guru dan tenaga kependidikan serta bantuan bagi pelajar berprestasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Penguatan layanan kesehatan promotif, preventif, dan peningkatan status gizi masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Tujuan: Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Sasaran: Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Pengembangan SDM birokrasi yang kreatif dan kolaboratif serta penuntasan reformasi pelayanan publik	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
		Perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan peningkatan keamanan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal	Tujuan: Meningkatkan Ketangguhan Perekonomian Daerah	Swasembada pangan melalui pembebasan PBB lahan pertanian pangan berkelanjutan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

PRIORITAS DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
didukung investasi	Sasaran: Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	serta fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan dan hortikultura		
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Sasaran: Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausahawan muda dan pembangunan kawasan industri	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

PRIORITAS DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga <i>jogging track</i> .		Terpadu Satu Pintu
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	Tujuan: Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi penanganan masalah kemanusiaan, masalah sosial, dan peningkatan pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	Sasaran: Meningkatkan Pendapatan penduduk		Program Pemberdayaan Sosial	
				Program Penanggulangan Bencana
		Penanganan permasalahan kemiskinan, stunting, dan masalah strategis kewilayahan padukuhan melalui penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP)	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Tujuan: Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Peningkatan kemandirian jalan di Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sasaran: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan fasilitas olahraga <i>jogging track</i> .	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
	Sasaran: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum.	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan

PRIORITAS DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
				dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikas dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Tujuan: Meningkatkan Keharmonisan Daerah	Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan

PRIORITAS DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Pelestarian budaya, guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.		
	Sasaran: Meningkatnya Pelestarian Budaya		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
	Sasaran: Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah	Penuntasan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum		

Sumber: RKPD Kabupaten Bantul 2026, 2026

Program Strategis Nasional (ProSN) adalah penerjemahan program/proyek yang tercantum dalam RPJMN dan RKP yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Interkoneksi Program Strategis Nasional (ProSN) dengan Program Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Interkoneksi Program Strategis Nasional (ProSN) dengan Program Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Indikator Outcome	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pengentasan Kemiskinan	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Menurunnya Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem	Tingkat Kemiskinan	Sosial		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
								1.06.05.2.020.008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
						Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.020.008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
						Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.010.001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
		Pembangunan 3 Juta Rumah	Meningkatnya Akses Rumah Tangga terhadap	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,	Perumahan dan Kawasan Permukiman		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Indikator Outcome	Pengampu Bidang Urutan Utama	Bidang Urutan Terkait	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
			Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Terjangkau dan Berkelanjutan			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
								1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru
						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Indikator Outcome	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
									Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
2	Ketahanan Pangan	Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	Terlaksananya jaringan irigasi Swasembada Pangan yang Berkelanjutan	Tingkat Kesiapan Teknis dan Operasi Pemeliharaan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
		Pangan Akuatik	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	Perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
		Kampung Nelayan	Terwujudnya tata kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
3	Kesehatan Untuk Semua	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	Pencegahan dan Penurunan Stunting.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
								1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Indikator Outcome	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
						Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, dan Lansia yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebagai Upaya Deteksi Dini, Pencegahan Penyakit, dan Pengurangan Potensi Beban Anggaran Pengendalian Penyakit	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
								1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
								1.02.02.2.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular
						Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.02.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
		Jaminan Kesehatan Nasional	Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam Mendukung Pembangunan Kesehatan.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
						Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Indikator Outcome	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
						Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
		Penuntasan Tuberkulosis (TBC) melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus Secara Masif dan Pengobatan TBC Sampai Tuntas	Tercapainya Penuntasan TBC	Cakupan Penemuan Kasus TBC	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
								1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
						Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
						Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
		Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas Rumah Sakit Tipe atau Kelas D Menjadi C melalui Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas di Rumah Sakit Daerah	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
		Makan Bergizi Gratis	Meningkatnya Asupan Gizi dan Pengetahuan Gizi Kelompok Sasaran	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan	Pendidikan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Indikator Outcome	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
				SMA/ sederajat ; Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita		Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
						Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
4	Perluasan Akses Pendidikan	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Sekolah Unggulan Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun dalam Pendidikan Menengah; Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang	Pendidikan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
								1.01.02.1.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
								1.01.02.1.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Indikator Outcome	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
				Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus					Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
5	Pertumbuhan Ekonomi	Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan) - Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Lingkungan Hidup	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan Sampah melalui Pengangkutan
							PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan

4.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM merupakan sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang terdiri dari:

1. SPM Bidang Pendidikan;
2. SPM Bidang Kesehatan;
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum;
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat;
5. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. SPM Bidang Sosial.

Ketentuan penerapan SPM di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan jenis dan indikator pelayanan dasar yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
I. SPM PENDIDIKAN			
1. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun
2. Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun
3. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun
II. SPM KESEHATAN			
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
4. Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
III. SPM PEKERJAAN UMUM			
1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun
IV. SPM PERUMAHAN RAKYAT			
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun
V. SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun
2. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	100%	Setiap tahun

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
korban kebakaran	penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
VI. SPM SOSIAL			
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

Dalam rangka mendukung penerapan SPM tersebut, Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 dengan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2026 sampai dengan triwulan 2. diperlukan perubahan rencana program dan kegiatan prioritas pada setiap Perangkat Daerah. Perubahan tersebut meliputi:

a. Belanja

- 1) penambahan kegiatan bersumber SiLPA DAK Non Fisik Tahun 2025.
- 2) pergeseran pagu antar kegiatan/sub kegiatan ataupun belanja;
- 3) penambahan dan pengurangan pagu kegiatan/sub kegiatan;
- 4) penambahan dan pengurangan target kinerja;
- 5) perubahan lokasi kegiatan; dan
- 6) perubahan kelompok sasaran kegiatan.

b. Pendapatan

Penyesuaian target pendapatan dan dana transfer daerah.

Rencana perubahan anggaran pada perangkat daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026

PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	822.809.534.374,79	815.190.630.469,79
Dinas Kesehatan	545.757.935.078,28	558.177.624.112,56
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	149.648.569.397,72	146.277.219.397,72
Satuan Polisi Pamong Praja	14.563.277.376,97	14.724.277.376,97
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.866.310.474,50	13.959.310.474,50
Dinas Sosial	22.080.693.668,05	22.384.403.668,05
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	45.035.184.768,70	45.237.415.168,70
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	13.367.103.642,76	13.515.103.642,76
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	30.420.001.351,37	25.255.001.351,37

PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	13.017.564.138,07	13.036.564.138,07
Dinas Lingkungan Hidup	48.300.950.618,00	50.471.478.077,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.160.467.826,66	11.197.467.826,66
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	10.374.654.942,08	10.241.256.692,08
Dinas Perhubungan	26.940.358.915,35	26.994.358.771,35
Dinas Komunikasi dan Informatika	21.065.051.658,53	21.053.051.658,53
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	24.117.537.692,90	24.362.537.692,90
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.903.764.832,39	6.911.014.832,39
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	15.135.032.329,81	15.153.032.329,81
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.490.004.686,00	6.453.004.686,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	8.375.910.114,49	8.379.910.114,49
Dinas Pariwisata	12.653.254.777,53	12.940.914.777,53
Sekretariat Daerah	40.031.785.287,66	40.996.785.287,66
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	51.466.181.483,93	51.505.181.483,93
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.152.948.076,88	12.213.948.076,88
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	412.729.670.232,00	414.804.847.819,33
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	12.605.865.179,97	12.606.865.179,97
Inspektorat Daerah	13.854.892.612,12	13.860.892.612,12
Kapanewon Piyungan	3.218.624.687,00	3.222.624.687,00
Kapanewon Dlingo	3.539.388.724,11	3.544.388.724,11
Kapanewon Imogiri	3.713.364.087,07	3.717.364.087,07
Kapanewon Pandak	3.417.654.487,06	3.420.654.487,06
Kapanewon Bantul	3.361.871.935,96	3.364.871.935,96
Kapanewon Kretek	3.249.448.697,74	3.253.448.697,74
Kapanewon Bambanglipuro	3.019.212.883,63	3.022.212.883,63
Kapanewon Jetis	3.527.416.990,32	3.530.416.990,32
Kapanewon Kasihan	3.704.238.959,96	3.709.238.959,96
Kapanewon Pajangan	3.069.253.377,32	3.074.253.377,32
Kapanewon Sanden	3.021.480.875,90	3.025.480.875,90
Kapanewon Sedayu	3.513.485.959,32	3.515.485.959,32
Kapanewon Sewon	3.846.852.013,17	3.850.852.013,17
Kapanewon Srandakan	3.264.547.710,69	3.268.547.710,69
Kapanewon Banguntapan	3.479.433.543,43	3.484.433.525,43
Kapanewon Pundong	3.486.101.968,17	3.489.101.968,17
Kapanewon Pleret	3.390.721.050,32	3.393.721.050,32
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.075.535.674,21	9.078.535.366,21

Sumber: Aplikasi SIPD. 2026

Rencana pemenuhan SPM tahun 2026 berdasarkan rencana perubahan anggaran dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 5.2 Rekapitulasi Perubahan Anggaran SPM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL RENCANA PENERAPAN SPM								
SPM BIDANG PENDIDIKAN						126.787.977.879,00	413.235.035.390,00	454.708.209.326,00
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						126.787.977.879,00	413.235.035.390,00	454.708.209.326,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen	100 Persen	92.193.324.879,00	219.103.402.230,00	220.176.553.747,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	100 persen	100 persen	50.802.527.720,00	115.161.009.968,00	116.393.853.433,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	800.000,00	800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	97 Paket	5 Paket	1.194.750.000,00	83.162.500,00	82.812.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	900 Peserta Didik	250 Peserta Didik	464.758.000,00	274.624.000,00	272.411.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	510 Orang	150 Orang	34.196.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	8.000.000,00	9.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.2.0 1.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	365 Satuan Pendidikan	399 Satuan Pendidikan	134.960.000,00	113.307.500,00	116.637.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 1.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	399 Orang	354 Orang	97.420.000,00	26.530.000,00	26.530.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 1.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	400 Orang	180 Orang	152.500.000,00	44.975.000,00	44.975.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 1.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	11 Dokumen	6 Dokumen	1.084.400.600,00	342.085.000,00	340.285.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 1.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.325.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 1.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	12637 Paket	15301 Paket	2.530.850.000,00	2.229.520.000,00	2.228.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 1.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	1 Ruang	742.097.700,00	4.000.000,00	4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 1.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Unit	2 Unit	1.728.034.200,00	624.791.668,00	625.041.668,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.2.0 1.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 Orang	200 Orang	152.500.000,00	51.400.000,00	51.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 1.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	1 Ruang	607.206.200,00	73.762.500,00	70.862.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 1.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	75871 Peserta Didik	74556 Peserta Didik	41.851.030.020,00	111.273.201.800,00	112.509.628.265,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	100 persen	100 persen	36.635.835.836,00	72.055.913.266,00	71.857.502.498,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	148.515.800,00	145.604.676,00	94.804.676,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	2 Ruang	1.110.319.000,00	553.595.904,00	551.970.904,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	303.750.000,00	353.658.396,00	1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	4 Unit	1.097.008.460,00	697.085.660,00	694.760.660,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.2.0 2.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	1 Paket	198.600.000,00	124.800.000,00	124.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	14 Paket	8 Paket	2.740.350.000,00	1.948.525.000,00	1.944.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	24790 Peserta Didik	40241 Peserta Didik	26.312.845.436,00	64.530.290.630,00	64.647.796.158,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	705.438.000,00	568.868.000,00	660.006.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Orang	1 Orang	13.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	114 Satuan Pendidikan	94 Satuan Pendidikan	85.900.000,00	48.300.000,00	40.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	114 Satuan Pendidikan	114 Satuan Pendidikan	110.625.000,00	111.625.000,00	128.784.100,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	115 Orang	114 Orang	96.625.000,00	22.525.000,00	24.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.2.0 2.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	95 Dokumen	95 Dokumen	625.513.500,00	474.900.000,00	474.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	1 Komunitas	19.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	14.007.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 Orang	180 Orang	152.500.000,00	44.975.000,00	44.975.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1 Buku	1 Buku	7.750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	14740 Paket	2.701.725.000,00	2.407.310.000,00	2.400.705.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	188.363.640,00	1.500.000,00	1.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 2.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	100 persen	100 persen	3.807.325.681,00	24.852.785.220,00	24.879.179.040,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	490.325.000,00	488.775.000,00	488.775.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	5 Paket	1 Paket	1.050.000,00	300.000,00	300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1200 Peserta Didik	36000 Peserta Didik	747.219.000,00	22.887.109.720,00	22.902.549.720,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	637 Orang	260 Orang	91.805.500,00	52.756.000,00	52.306.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	600 Orang	180 Orang	176.250.000,00	44.975.000,00	44.975.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1295 Satuan Pendidikan	1295 Satuan Pendidikan	84.500.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1295 Satuan Pendidikan	1285 Satuan Pendidikan	326.523.308,00	291.850.000,00	297.488.820,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	3 Dokumen	324.887.500,00	220.883.500,00	220.883.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.2.0 3.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	2 Ruang	568.075.000,00	566.575.000,00	566.575.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 3.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	300.000,00	300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 3.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1200 Paket	1 Paket	223.700.000,00	300.000,00	300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 3.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 3.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	645 Satuan Pendidikan	137 Satuan Pendidikan	224.798.500,00	215.361.000,00	221.126.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 3.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	1 Ruang	496.691.873,00	300.000,00	300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100 persen	100 persen	947.635.642,00	7.033.693.776,00	7.046.018.776,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 4.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2592 Peserta Didik	3193 Peserta Didik	4.350.000,00	6.239.940.000,00	6.257.580.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 4.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	290 Orang	52 Orang	28.372.000,00	17.313.000,00	17.313.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 4.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	35.500.000,00	22.650.000,00	22.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.2.0 4.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	11.700.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 4.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen	4 Dokumen	623.113.642,00	704.920.776,00	699.605.776,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 4.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	300 Paket	250 Paket	19.080.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 4.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	195.500.000,00	300.000,00	300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 4.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	14.600.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 4.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 unit	1 unit	1.050.000,00	300.000,00	300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.0 4.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	14.370.000,00	14.070.000,00	14.070.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Kecukupan Guru SMP Negeri	0,71	0,71	34.594.653.000,00	194.131.633.160,00	234.500.655.579,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Indeks Kecukupan Guru SD Negeri	0,92	0,92				
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	92 Persen	93 Persen				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	8339 guru	8339 guru	34.594.653.000,00	194.131.633.160,00	234.500.655.579,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	4 Dokumen	34.076.657.000,00	193.847.497.160,00	234.215.391.815,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	1 Laporan	517.996.000,00	284.136.000,00	285.263.764,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SPM BIDANG KESEHATAN					4.058.211.685,02	7.907.814.055,00	7.523.869.495,00	
DINAS KESEHATAN					4.058.211.685,02	7.907.814.055,00	7.523.869.495,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan	81 persen	81 persen	99.247.400.052,00	109.757.092.305,13	109.736.209.113,13	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100 persen	100 persen	91.329.379.589,02	101.659.631.024,00	101.599.956.652,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8610 Orang	8610 Orang	337.000.000,00	1.931.116.475,00	1.617.150.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8610 Orang	8610 Orang	25.000.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0 2.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7065 Orang	7065 Orang	20.000.000,00	1.442.123.000,00	1.424.998.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0 2.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41000 Orang	41000 Orang	35.000.000,00	12.590.000,00	70.090.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120600 Orang	120600 Orang	35.000.000,00	389.475.000,00	394.275.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0 2.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200000 Orang	200000 Orang	25.000.000,00	5.530.000,00	5.530.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0 2.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	106000 Orang	106000 Orang	206.787.500,02	154.550.000,00	154.550.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0 2.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12230 Orang	12230 Orang	39.985.000,00	17.760.900,00	35.260.900,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0 2.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4152 Orang	4152 Orang	29.975.000,00	6.800.000,00	24.300.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2000 Orang	2000 Orang	175.755.080,00	536.705.080,00	488.161.720,00	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9960 Orang	9960 Orang	2.879.597.000,00	3.213.150.000,00	2.927.573.800,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0 2.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11037 Orang	11037 Orang	249.112.105,00	186.413.600,00	370.380.075,00	DINAS KESEHATAN
SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM					12.052.109.468,00	11.589.347.089,00	11.598.347.089,00	
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					12.052.109.468,00	11.589.347.089,00	11.598.347.089,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	1.606.475.000,00	2.768.363.000,00	2.768.363.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga terlayani air minum	700 Rumah Tangga	700 Rumah Tangga	1.606.475.000,00	2.768.363.000,00	2.768.363.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.03.2.0 1.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	150 Orang	500 Orang	31.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.03.2.0 1.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	215.700.000,00	215.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.03.2.0 1.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	20 Liter/Detik	4.5 Liter/Detik	850.000,00	1.653.400.000,00	1.653.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.03.2.0 1.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit	2.125.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.03.2.0 1.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150 SR	264 SR	1.334.000.000,00	694.488.000,00	694.488.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.03.2.0 1.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.03.2.0 1.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Lembaga	6 Lembaga	31.000.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 Persen	100 Persen	10.445.634.468,00	8.820.984.089,00	8.829.984.089,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga dengan akses air limbah	600 Rumah Tangga	600 Rumah Tangga	10.445.634.468,00	8.820.984.089,00	8.829.984.089,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.05.2.0 1.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit	325.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.0 1.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	5 M³/Hari	50 M³/Hari	1.192.000.000,00	1.198.000.000,00	1.198.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.0 1.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit	850.000,00	637.500,00	637.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.0 1.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	1 Unit	52.500.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.0 1.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	120 Rumah Tangga	120 Rumah Tangga	44.451.700,00	36.654.715,00	36.654.715,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.0 1.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	5 Desa	8 Desa	49.800.000,00	57.550.000,00	57.550.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.0 1.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1 M³/Hari	1 M³/Hari	4.250.000,00	3.612.500,00	3.612.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.0 1.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	38.404.400,00	37.023.800,00	37.023.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.05.2.0 1.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	2.250.138.368,00	1.874.280.574,00	1.883.280.574,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.0 1.0042	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	230 Sambungan Rumah (SR)	170 Sambungan Rumah (SR)	3.342.240.000,00	2.340.525.000,00	2.340.525.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.0 1.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/ sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	200 Rumah Tangga	210 Rumah Tangga	2.696.000.000,00	2.714.400.000,00	2.714.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.05.2.0 1.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	6 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000,00	196.300.000,00	196.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT					1.213.175.000,00	215.390.000,00	215.390.000,00	
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					1.213.175.000,00	215.390.000,00	215.390.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100; 100 Persen; Persen	100; 100 Persen; Persen	5.262.511.054,00	3.793.441.632,00	3.835.441.632,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	1 Jenis	1 Jenis	6.800.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.04.02.2.0 1.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.0 1.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.0 1.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	2 Jenis	2 Jenis	5.950.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.0 2.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.0 2.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	20 Orang	20 Orang	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.0 2.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.04.02.2.0 2.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.0 2.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.0 2.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	30 Orang	30 Orang	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.0 2.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	30 Orang	30 Orang	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi	10 Unit	10 Unit	1.200.425.000,00	210.290.000,00	210.290.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.0 3.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	4 Unit Rumah	5 Unit Rumah	997.875.000,00	108.930.000,00	108.930.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.0 3.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	4 Unit Rumah	2 Unit Rumah	200.000.000,00	100.340.000,00	100.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.04.02.2.0 3.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.0 3.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04.02.2.0 3.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	850.000,00	340.000,00	340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
SPM BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					6.292.218.661,00	2.708.821.936,00	2.726.083.732,00	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					4.098.122.307,00	1.443.022.486,00	1.458.039.382,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	100 Persen	4.098.122.307,00	1.443.022.486,00	1.458.039.382,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	3.131.876.789,00	428.607.250,00	657.206.246,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase peningkatan kapasitas anggota Linmas	30,78 persen	30,78 persen				
1.05.02.2.0 1.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	4.329.800,00	600.000,00	600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.02.2.0 1.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	1.102.957.734,00	53.451.050,00	48.346.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 1.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	2 Dokumen	4.930.000,00	4.450.000,00	63.205.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 1.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	9 Dokumen	9 Dokumen	5.280.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 1.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	700 Orang	850 Orang	68.865.300,00	95.500.100,00	105.610.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 1.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	12 laporan	1.159.782.151,00	23.120.000,00	33.125.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.02.2.0 1.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	773.711.404,00	241.546.300,00	246.553.196,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 1.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	6.770.400,00	2.839.800,00	2.839.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 1.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	21 Unit	21 Unit	5.250.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 1.0022	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-	9 Dokumen	-	-	81.043.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.02.2.0 1.0023	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	9 Dokumen	-	-	62.574.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 1.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	-	25 Orang	-	-	6.210.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	958.933.018,00	1.013.365.236,00	792.332.136,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 2.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	242.338.517,00	576.227.750,00	496.879.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 2.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	584.704.501,00	384.437.486,00	242.752.386,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 2.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	131.890.000,00	52.700.000,00	52.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	7.312.500,00	1.050.000,00	8.501.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.0 3.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	12 Laporan	12 Laporan	7.312.500,00	1.050.000,00	8.501.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					2.194.096.354,00	1.265.799.450,00	1.268.044.350,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	45 %	100 %	1.224.277.604,00	624.791.000,00	624.791.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	70 %	100 %	48.312.000,00	184.500.000,00	184.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1800 Orang	1000 Orang	46.212.000,00	183.000.000,00	183.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Capaian Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	80 %	80 %	623.275.000,00	108.603.000,00	108.603.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	28 Unit	1 Unit	315.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.03.2.0 2.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	38.750.000,00	20.095.000,00	20.095.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.0 2.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	16.490.000,00	16.490.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.0 2.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	12 laporan	17.000.000,00	4.618.000,00	4.618.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.0 2.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	700.000,00	700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.03.2.0 2.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	10 Kawasan	1 Kawasan	147.525.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	522.695.604,00	326.728.000,00	326.728.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.0 3.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan	999.900,00	999.900,00	999.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.0 3.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	137.570.000,00	93.381.700,00	93.381.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.0 3.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 Orang	1000 Orang	284.125.704,00	139.823.400,00	139.823.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.0 3.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	92.523.000,00	92.523.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	100 %	999.813.750,00	645.968.450,00	648.213.350,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	8,81 % Menit	8,81 % Menit				
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	100 %	100 %	935.661.800,00	583.374.450,00	585.619.350,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	0 Dokumen	29.925.000,00	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	120 Orang	0 Orang	5.935.000,00	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.04.2.0 1.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	3 Unit	62 Unit	714.797.400,00	412.252.200,00	411.102.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.0 1.0026	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	150 Laporan	150 Laporan	184.004.400,00	171.122.250,00	174.517.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	88 %	100 %	30.074.250,00	48.284.000,00	48.284.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.0 4.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang	50 Orang	9.999.750,00	48.284.000,00	48.284.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.0 4.0007	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran	10 Desa/Ke lurahan	10 Desa/Ke lurahan	20.074.500,00	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Capaian Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 %	100 %	34.077.700,00	14.310.000,00	14.310.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.04.2.0 5.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	12 Laporan	19.999.700,00	14.310.000,00	14.310.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.0 5.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	0 Laporan	14.078.000,00	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SPM BIDANG SOSIAL					10.482.799.480,00	10.078.294.436,00	10.055.333.926,00	
DINAS SOSIAL					10.482.799.480,00	10.078.294.436,00	10.055.333.926,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80 Persen	100 Persen	10.461.169.460,00	10.010.017.736,00	9.990.057.226,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti ber	80 Persen	80 Persen	10.272.544.780,00	9.905.742.736,00	9.882.782.226,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.0 1.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1112 Orang	1112 Orang	8.993.066.296,00	8.958.618.715,00	8.934.487.825,00	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.04.2.0 1.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	37.162.500,00	28.385.000,00	34.571.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.0 1.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	178.703.000,00	107.353.000,00	107.353.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.0 1.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	16.000.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.0 1.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	376.319.924,00	270.924.412,00	243.524.412,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.0 1.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	20.166.000,00	12.087.500,00	10.837.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.0 1.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	90.821.180,00	99.447.206,00	102.447.206,00	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.04.2.0 1.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	65.375.000,00	8.375.000,00	8.375.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.0 1.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	295.658.700,00	234.679.903,00	250.314.283,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.0 1.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	73.099.872,00	70.350.000,00	72.350.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.0 1.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	13.875.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.0 1.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	112.297.308,00	102.522.000,00	105.522.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	544.268.420,00	436.555.080,00	440.367.580,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	85 Persen	85 Persen	210.254.700,00	172.551.700,00	172.551.700,00	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.06.2.0 1.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	130.952.200,00	127.712.200,00	127.712.200,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.0 1.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	10.900.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.0 1.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	5 Orang	25.200.000,00	28.512.500,00	28.512.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.0 1.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	11.652.500,00	5.714.500,00	5.714.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.0 1.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	31.550.000,00	7.062.500,00	7.062.500,00	DINAS SOSIAL



Rencana Perubahan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut.

Tabel 5. 3 Rekapitulasi Perubahan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2026

No	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran	
				Semula						Menjadi						Semula			Menjadi			Semula	Menjadi
																Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan		
	Urusan Kelembagaan																					2.017.891.000	2.017.891.000
	Sekretariat Daerah																					245.798.000	245.798.000
	Bagian Organisasi																					116.222.000	116.222.000
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengampu program/kegiatan urusan keistimewaan di Kab. Bantul	2	lembaga	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan	1	dokumen	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengampu program/kegiatan urusan keistimewaan di Kab. Bantul	2	lembaga	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan	1	dokumen	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	1	lembaga	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	1	lembaga	53.247.000	53.247.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah PD dengan Tingkat implementasi Budaya Pemerintahan berkategori Baik	25 dari 46	PD	Jumlah PD dengan Tingkat implementasi Budaya Pemerintahan berkategori Baik	25 dari 46	PD	Jumlah PD dengan Tingkat implementasi Budaya Pemerintahan berkategori Baik	25 dari 46	PD	Jumlah PD dengan Tingkat implementasi Budaya Pemerintahan berkategori Baik	25 dari 46	PD	Jumlah dokumen hasil implementasi Budaya	2	dokumen	Jumlah dokumen hasil implementasi Budaya	2	dokumen	62.975.000	62.975.000
	Bagian Tata Pemerintahan																					35.000.000	35.000.000
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan / Kelurahan	Jumlah Kapanewon yang Berkinerja Baik	13	Kapanewon	Jumlah Kapanewon yang Berkinerja Baik	13	Kapanewon	Jumlah Kapanewon yang Berkinerja Baik	13	Kapanewon	Jumlah Kapanewon yang Berkinerja Baik	13	Kapanewon	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi	1	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi	1	dokumen	35.000.000	35.000.000
	Bagian Hukum																					94.576.000	94.576.000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	1. Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan 2. Peraturan Bupati Bantul tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan	1. 1 2. 1	1. dokumen 2. dokumen	1. Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan 2. Peraturan Bupati Bantul tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan	1. 1 2. 1	1. dokumen 2. dokumen	1. Perubahan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan 2. Perubahan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan	1. 1 2. 1	1. dokumen 2. dokumen	1. Perubahan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan 2. Perubahan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan	1. 1 2. 1	1. dokumen 2. dokumen	Jumlah Produk Hukum Kabupaten /Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun	2	dokumen	Jumlah Produk Hukum Kabupaten /Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun	2	dokumen	44.576.000	44.576.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	1. Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Kalurahan 2. Laporan Hasil Evaluasi Produk Hukum Kalurahan	1. 75 2. 1	1. orang 2. dokumen	1. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan produk hukum kalurahan dengan peserta dari unsur pamong kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan	1. 75 2. 1	1. orang 2. dokumen	1. Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Kalurahan 2. Laporan Hasil Evaluasi Produk Hukum Kalurahan	1. 75 2. 1	1. orang 2. dokumen	1. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan produk hukum kalurahan dengan peserta dari unsur pamong kalurahan dan Badan Permusyawaratan	1. 75 2. 1	1. orang 2. dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	1	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	1	dokumen	50.000.000	50.000.000



No	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran	
																Semula			Menjadi			Semula	Menjadi
																Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan		
							2. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi produk hukum Kalurahan yang disusun oleh Pemerintah Kalurahan - Melakukan pendampingan Pemerintah Kalurahan dalam menyusun produk hukum kalurahan																
	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah																					333.057.000	333.057.000
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1. Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2026 2. Usulan Awal Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027 3. Usulan Rencana Penyesuaian Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2028	1. 2 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2026 2. Usulan Awal Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027 3. Usulan Rencana Penyesuaian Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2028	1. 2 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2026 2. Usulan Awal Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027 3. Usulan Rencana Penyesuaian Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2028	1. 2 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2026 2. Usulan Awal Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027 3. Usulan Rencana Penyesuaian Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2028	1. 2 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan	4	Dokumen	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan	4	Dokumen	85.103.000	85.103.000
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2025 Tahap Akhir 2. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2026 per Tahapan 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	1. 1 2. 2 3. 4	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2025 Tahap Akhir 2. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2026 per Tahapan 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	1. 1 2. 2 3. 4	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2025 Tahap Akhir 2. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2026 per Tahapan 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	1. 1 2. 2 3. 4	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	1. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2025 Tahap Akhir 2. Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2026 per Tahapan 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	1. 1 2. 2 3. 4	1. Laporan 2. Laporan 3. Laporan	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	7	Laporan	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	7	Laporan	62.633.000	62.633.000
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN	Perencanaan dan Pengendalian	Penyusunan Rencana Program dan	1. Persiapan Pendaftaran Unesco Global	1. 12. 13.	1. dokumen 2. laporan	1. Persiapan Pendaftaran Unesco	1. 12. 13.	1. dokumen2. dokumen3.	1. Persiapan Pendaftaran Unesco Global	1. 12. 13.	1. dokumen 2. laporan	1. Persiapan Pendaftaran Unesco	1. 12. 13.	1. dokumen 2.	Jumlah Dokumen Hasil	4	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil	4	Dokumen	185.321.000	185.321.000

No	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran	
				Semula						Menjadi						Semula		Menjadi		Semula	Menjadi		
				Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan								
	YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	n Keistimewaa n Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Geopark (UGG) Gumuk Pasir Parangtritis2. Laporan Pengelolaan Situs Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Bantul3. Laporan Pengelolaan World Heritage UNESCO Sumbu Filosofi4. Kajian Detail Identifikasi Geodiversity	14. 1	3. dokumen 4. laporan	Global Geopark (UGG) Gumuk Pasir Parangtritis2. Laporan Pengelolaan Situs Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Bantul3. Laporan Pengelolaan World Heritage UNESCO Sumbu Filosofi4. Kajian Detail Identifikasi Geodiversity	14. 1	dokumen4. dokumen	Geopark (UGG) Gumuk Pasir Parangtritis2. Laporan Pengelolaan Situs Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Bantul3. Laporan Pengelolaan World Heritage UNESCO Sumbu Filosofi4. Kajian Detail Identifikasi Geodiversity	14. 1	3. dokumen 4. laporan	Global Geopark (UGG) Gumuk Pasir Parangtritis 2. Laporan Pengelolaan Situs Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Bantul3. Laporan Pengelolaan World Heritage UNESCO Sumbu Filosofi4. Kajian Detail Identifikasi Geodiversity	14. 1	dokumen 4. dokumen	Penyusunana Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n Urusan Tata Ruang			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaa n Urusan Tata Ruang				
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																				150.000.000	150.000.000	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Penyelenggara an Diklat Keistimewaan Kabupaten/Ko ta	1. Jumlah ASN Kabupaten Bantul yang mengikuti Pelatihan Internalisasi keistimewaa n	1, 30	1. Orang	1. Jumlah ASN Kabupaten Bantul yang mengikuti Pelatihan Internalisasi keistimewaa n	1, 30	1. Orang	1. Jumlah ASN Kabupaten Bantul yang mengikuti Pelatihan Internalisasi keistimewaa n	1, 30	1. Orang	1. Jumlah ASN Kabupaten Bantul yang mengikuti Pelatihan Internalisasi keistimewaa n	1, 30	1. Orang	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaa n Kabupaten /Kota yang Diselengga rakan Kegiatan	1	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaa n Kabupaten/ Kota yang Diselenggara kan Kegiatan	1	Laporan	150.000.000	150.000.000
	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																				72.586.000	72.586.000	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan Pengendalia n Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaa n	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kab. Bantul	3	Laporan	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaa n Kab. Bantul	3	Laporan	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kab. Bantul	3	Laporan	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaa n Kab. Bantul	3	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaa n Dana Keistimewaa n	3	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaa n	3	Laporan	72.586.000	72.586.000
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan																				156.500.000	156.500.000	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaa n dan Ketatalaksanaa n Keistimewaa n	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan	1. Peningkatan Kapasitas Pamong 2. Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan 3. Laporan Pendampingan Assement Kapanewon 4. Laporan Pendampingan Rencana Aksi 5. Laporan Pendampingan Proposal BKK 6. Laporan Monev BKK 7. Forum Komunikasi Reformas Kalurahan	1. 225 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1	1. Orang 2.Laporan 3. Dokumen 4. Dokumen 5. Dokumen 6. Dokumen 7. Dokumen	1. Peningkatan Kapasitas Pamong 2. Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan 3. Laporan Pendampingan Assement Kapanewon 4. Laporan Pendampingan Rencana Aksi 5. Laporan Pendampingan Proposal BKK 6. Laporan Monev BKK 7. Forum Komunikasi Reformas Kalurahan	1. 225 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1	1. Orang 2.Laporan 3. Dokumen 4. Dokumen 5. Dokumen 6. Dokumen 7. Dokumen	1. Peningkatan Kapasitas Pamong 2. Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan 3. Laporan Pendampingan Assement Kapanewon 4. Laporan Pendampingan Rencana Aksi 5. Laporan Pendampingan Proposal BKK 6. Laporan Monev BKK 7. Forum Komunikasi Reformas Kalurahan	1. 225 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1	1. Orang 2.Laporan 3. Dokumen 4. Dokumen 5. Dokumen 6. Dokumen 7. Dokumen	1. Peningkatan Kapasitas Pamong 2. Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan 3. Laporan Pendampingan Assement Kapanewon 4. Laporan Pendampingan Rencana Aksi 5. Laporan Pendampingan Proposal BKK 6. Laporan Monev BKK 7. Forum Komunikasi Reformas Kalurahan	1. 225 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1	1. Orang 2.Lapora n 3. Dokumen 4. Dokumen 5. Dokumen 6. Dokumen 7. Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaa n di Kapanewo n/Kemantren dan Kalurahan /Keluraha n yang di dampingi	2	dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang di dampingi	2	dokume n	156.500.000	156.500.000
	Dinas Kesehatan																				549.950.000	549.950.000	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Peningkatan Budaya Pemerintaha n	Implementasi Budaya Pemerintahan	Puskesmas dengan pengembangan	8	Puskesmas	Puskesmas dengan pengembang an DGS	8	Puskesmas	Puskesmas dengan pengembangan	8	Puskesmas	Puskesmas dengan pengembang an DGS	8	Puskesm as	Jumlah Dokumen Hasil Implement	1	dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Implementas	1	dokume n	549.950.000	549.950.000



No	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran	
																Semula			Menjadi			Semula	Menjadi
																Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan		
	KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Kabupaten/Kota	DGS “Halo Bantul Sehat”			“Halo Bantul Sehat”			DGS “Halo Bantul Sehat”			“Halo Bantul Sehat”			asi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota			i Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				
Kapanewon Kabupaten Bantul (17 Kapanewon)																						510.000.000	510.000.000
Kapanewon Bambanglipuro																						30.000.000	30.000.000
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon Bambanglipuro dan KelurahanTahun 2028 2. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan/kelurahan tahun 2026 3. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kelurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon Bambanglipuro dan KelurahanTahun 2028 2. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan/kelurahan tahun 2026 3. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kelurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon Bambanglipuro dan KelurahanTahun 2028 2. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan/kelurahan tahun 2026 3. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kelurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon Bambanglipuro dan KelurahanTahun 2028 2. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan/kelurahan tahun 2026 3. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kelurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan /Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan /Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000
Kapanewon Banguntapan																						30.000.000	30.000.000
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan	1. Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027 2. Laporan hasil pendampingan terkait perencanaan dan pengendalian keistimewaan 3. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kelurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027 2. Laporan hasil pendampingan terkait perencanaan dan pengendalian keistimewaan 3. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kelurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027 2. Laporan hasil pendampingan terkait perencanaan dan pengendalian keistimewaan 3. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kelurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027 2. Laporan hasil pendampingan terkait perencanaan dan pengendalian keistimewaan 3. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kelurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan /Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan /Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000
Kapanewon Bantul																						30.000.000	30.000.000
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan	1. Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027 2. Laporan hasil pendampingan terkait perencanaan dan pengendalian keistimewaan 3. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027 2. Laporan hasil pendampingan terkait perencanaan dan pengendalian keistimewaan 3. Fasilitasi, koordinasi	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027 2. Laporan hasil pendampingan terkait perencanaan dan pengendalian keistimewaan 3. Fasilitasi, koordinasi	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Dokumen Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2027 2. Laporan hasil pendampingan terkait perencanaan dan pengendalian keistimewaan 3. Fasilitasi, koordinasi	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan /Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan /Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000

No	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri							Anggaran	
				Semula						Menjadi						Semula			Menjadi		Semula	Menjadi		
				Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan									
				Reformasi Kalurahan			dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan			Reformasi Kalurahan			dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan											
	Kapanewon Dlingo																					30.000.000	30.000.000	
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000	
	Kapanewon Imogiri																					30.000.000	30.000.000	
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000	
	Kapanewon Jetis																					30.000.000	30.000.000	
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000	

No	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran			
																Semula			Menjadi					Semula	
				Semula						Menjadi						Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Semula	Menjadi		
													keistimewaa n kalurahan												
	Kapanewon Kasihan																				30.000.000	30.000.000			
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaa n dan Ketatalaksan aan Keistimewaa n	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaa n kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaa n kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimew aan di Kapanewo n/ Kemantr en dan Kalurahan /Keluraha n yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang di dampingi	3	Dokume n	30.000.000	30.000.000		
	Kapanewon Kretek																				30.000.000	30.000.000			
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaa n dan Ketatalaksan aan Keistimewaa n	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaaa n kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaa n kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimew aan di Kapanewo n/ Kemantr en dan Kalurahan /Keluraha n yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang di dampingi	3	Dokume n	30.000.000	30.000.000		
	Kapanewon Pajangan																				30.000.000	30.000.000			
21	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaa n dan Ketatalaksan aan Keistimewaa n	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaaa n kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaa n kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimew aan di Kapanewo n/ Kemantr en dan Kalurahan /Keluraha n yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang di dampingi	3	Dokume n	30.000.000	30.000.000		

No	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran	
																Semula			Menjadi			Semula	Menjadi
																Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan		
	Kapanewon Pandak																						
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000
	Kapanewon Piyungan																						
23	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000
	Kapanewon Pleret																						
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000
	Kapanewon Pundong																						
25	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN	Penataan Kelembagaan dan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan	1. Penyusunan rencana program dan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2.	1. Penyusunan rencana	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2.	1. Penyusunan rencana program dan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2.	1. Penyusunan rencana	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2.	Jumlah dokumen hasil	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

No	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran		
																Semula			Menjadi					Semula
				Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Semula	Menjadi							
	YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Ketatalaksanaan Keistimewaan	di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelurahan	kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan		dokumen 3. dokumen	program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan		dokumen 3. dokumen	kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan		dokumen 3. dokumen	program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan		dokumen 3. dokumen	penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi				penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi				
	Kapanewon Sanden																		30.000.000	30.000.000				
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000	
	Kapanewon Sedayu																		30.000.000	30.000.000				
27	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang di dampingi	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000	
	Kapanewon Sewon																		30.000.000	30.000.000				
28	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon	3	Dokumen	30.000.000	30.000.000	



No	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Aktivitas												Output Semula Sesuai Kepmendagri						Anggaran	
																Semula			Menjadi			Semula	Menjadi
																Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan		
			Kalurahan/ Kelurahan	2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaa n kalurahan			2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan			Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaa n kalurahan			n/Kemantr en dan Kalurahan /Keluraha n yang di dampingi			Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang di dampingi				
	Kapanewon Srandakan																					30.000.000	30.000.000
29	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaa n dan Ketatalaksan aan Keistimewaa n	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaa n kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2028 2. Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan 3. Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaa n kalurahan	1. 1 2. 1 3. 1	1. dokumen 2. dokumen 3. dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimew aan di Kapanewo n/Kemantr en dan Kalurahan /Keluraha n yang di dampingi	3	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang di dampingi	3	Dokume n	30.000.000	30.000.000

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas Semula			Aktivitas Menjadi			Output Sesuai KEPMENDAGRI				Anggaran	
				Aktivitas	Target	Satuan	Aktivitas	Target	Satuan	Indikator	Target Semula	Target Menjadi	Satuan	Semula	Menjadi
I	Urusan Kebudayaan												33,121,630,500	32,487,434,700	
1	Dinas Kebudayaan												8,735,941,000	8,733,945,000	
1.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	3	3	dokumen	499,052,000	499,052,000
				Peringatan Peristiwa Sejarah	3	kali	Peringatan Peristiwa Sejarah	3	kali						
				Publikasi Sejarah	2	kali	Publikasi Sejarah	2	kali						
				internalisasi kesejarahan melalui pembinaan komunitas	3	Komunitas	internalisasi kesejarahan melalui pembinaan komunitas	3	Komunitas						
1.2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	4	4	Laporan	799,399,500	799,399,500
				Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kabupaten & Tingkat DIY)	7	jenis	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kabupaten & Tingkat DIY)	7	jenis						
				Pawiyatan Pranatacara	5	kali	Pawiyatan Pranatacara	5	kali						
				Gelar Sastra	1	kali	Gelar Sastra	1	kali						
				Dokumentasi Sastra	1	judul	Dokumentasi Sastra	1	judul						
1.3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman							Jumlah Permuseuman yang dibina dan dikelola	17	17	Unit	299,280,000	299,280,000
				Lomba Cerdas Cermat Museum (Tingkat Kabupaten dan Provinsi)	2	kali	Lomba Cerdas Cermat Museum (Tingkat Kabupaten dan Provinsi),	2	kali						
				Peningkatan Kompetensi SDM Museum	1	kali	Peningkatan Kompetensi SDM Museum	1	kali						
				Wajib Kunjung Museum	400	orang	Wajib Kunjung Museum	400	orang						
				Fasilitasi Komunitas Museum	2	kali	Fasilitasi Komunitas Museum	2	kali						
1.4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya							Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	20	20	objek	398,560,000	398,560,000
				Penetapan Cagar Budaya	20	rekomendasi	Penetapan Cagar Budaya	20	rekomendasi						
				Sosialisasi Cagar Budaya	2	kali	Sosialisasi Cagar Budaya	2	kali						
				Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya	3	kali	Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya	3	kali						
1.5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya							Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	10	10	objek	509,760,000	509,760,000
				Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya	10	desa	Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya	10	desa						
				Festival Olahraga/Permainan Tradisional	1	kali	Festival Olahraga/Permainan Tradisional	1	kali						
				Workshop WBTB	2	kali	Workshop WBTB	2	kali						
				Nyantrik Pada Pelestari	1	kali	Nyantrik Pada Pelestari	1	kali						
1.6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia							Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	1	1	Objek	99,880,000	99,880,000
				Kajian Warisan Budaya Takbenda	1	dokumen	Kajian Warisan Budaya Takbenda	1	dokumen						
1.7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	3	3	Unit	951,920,000	951,920,000
				Gamelan Kuningan (Rintisan desa budaya)	3	set	Gamelan Kuningan (Rintisan desa budaya)	3	set						
1.8	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya							Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh dan Berkembang	2	2	Laporan	192,856,500	192,856,500
				Festival Rintisan Desa Budaya	1	kali	Festival Rintisan Desa Budaya	1	kali						
				Evaluasi Penetapan Rintisan desa Budaya	1	dokumen	Evaluasi Penetapan Rintisan desa Budaya	1	dokumen						
1.9	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni							Jumlah Lembaga Penggiat seni yang dibina	3	3	Lembaga	393,327,000	393,327,000

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas Semula			Aktivitas Menjadi			Output Sesuai KEPMENDAGRI				Anggaran	
				Aktivitas	Target	Satuan	Aktivitas	Target	Satuan	Indikator	Target Semula	Target Menjadi	Satuan	Semula	Menjadi
				Lomba Lukis Kyoto-DIY	1	kali	Lomba Lukis Kyoto-DIY	1	kali						
				Workshop dan Lomba Film	1	kali	Workshop dan Lomba Film	1	kali						
				Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul	8	kali	Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul	8	kali						
1.1 0	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya							Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	1	1	Laporan	279,798,000	279,798,000
				Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa	1	kali	Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa	1	kali						
1.1 1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Penghargaan Seniman dan Budayawan							Jumlah Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan	6	6	orang	127,999,800	127,999,800
				Penghargaan Seniman Budayawan	2	orang	Penghargaan Seniman Budayawan	2	orang						
				Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	2	kelompok	Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	2	kelompok						
				Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	2	orang	Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	2	orang						
1.1 2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Festival Kebudayaan Yogyakarta							Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	3	3	Laporan	383,772,000	381,776,000
				Pentas Seni	1	kali	Pentas Seni	1	kali						
				Pawai seni	1	kali	Pawai seni	1	kali						
				Pasar Seni	1	kali	Pasar Seni	1	kali						
1.1 3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	7	7	Laporan	1,876,287,800	1,876,287,800
				Mataram Culture Fest	1	kali	Mataram Culture Fest	1	kali						
				Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	1	kali	Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	1	kali						
				Festival Ketoprak tingkat Kabupaten	1	kali	Festival Ketoprak tingkat Kabupaten	1	kali						
				Pengiriman Festival Ketoprak tingkat DIY	1	kali	Pengiriman Festival Ketoprak tingkat DIY	1	kali						
				Festival Teater tingkat Kabupaten	1	kali	Festival Teater tingkat Kabupaten	1	kali						
				Pengiriman Festival Teater tingkat DIY	1	kali	Pengiriman Festival Teater tingkat DIY	1	kali						
				Festival Langen Carita tingkat Kabupaten	1	kali	Festival Langen Carita tingkat Kabupaten	1	kali						
1.1 4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Publikasi Seni dan Budaya Daerah							Jumlah Publikasi Seni dan Budaya Daerah	2	2	dokumen	74,120,000	74,120,000
				Publikasi Melalui Media Cetak	2	kali	Publikasi Melalui Media Cetak	2	kali						
				Publikasi Pariwara Seni Budaya melalui Media TV	3	kali	Publikasi Pariwara Seni Budaya melalui Media TV	3	kali						
1.1 5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi							Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina	120	120	orang	42,566,200	42,566,200
				Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	120	orang	Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	120	orang						
				Ritual Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	4	kali	Ritual Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	4	kali						
1.1 6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat							Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai luhur dalam Masyarakat	4	4	Laporan	410,000,000	410,000,000
				Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang	2	kali	Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang	2	kali						
				Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten	1	kali	Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten	1	kali						
				Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja ke DIY	1	kali	Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja ke DIY	1	kali						
				Pentas Wayang Kulit	1	kali	Pentas Wayang Kulit	1	kali						
1.1 7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	3	3	Laporan	821,077,200	821,077,200
				Fasilitasi Kelompok Seni	50	kali	Fasilitasi Kelompok Seni	50	kali						



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas Semula			Aktivitas Menjadi			Output Sesuai KEPMENDAGRI				Anggaran	
				Aktivitas	Target	Satuan	Aktivitas	Target	Satuan	Indikator	Target Semula	Target Menjadi	Satuan	Semula	Menjadi
				Pentas Pastab (Pentas Pasar Seni dan Wisata Bantul)	4	kali	Pentas Pastab (Pentas Pasar Seni dan Wisata Bantul)	4	kali						
				Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya santri dan Pagelaran Hari wayang Nasional	2	kali	Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya santri dan Pagelaran Hari wayang Nasional	2	kali						
1.1 8	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi							Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	3	3	Laporan	576,285,000	576,285,000
				Upacara Adat Tradisi	10	kali	Upacara Adat Tradisi	10	kali						
				Merti Dusun	20	kali	Merti Dusun	20	kali						
				Festival Upacara Adat	1	kali	Festival Upacara Adat	1	kali						
2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi														3,197,052,000	3,197,052,000
2.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya							Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1	1	Dokumen	3,197,052,000	3,197,052,000
				Padat Karya pengembangan potensi desa	60	lokasi/paket	Padat Karya pengembangan potensi desa	60	lokasi/paket						
3 Dinas Pariwisata														150,000,000	150,000,000
3.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya							Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	1	1	Obyek	150,000,000	150,000,000
				Kerontjong Pesisir	1	kegiatan	Kerontjong Pesisir	1	kegiatan						
4 Dinas Komunikasi dan Informatika														125,000,000	125,000,000
4.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital							Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	1	1	Objek	125,000,000	125,000,000
				1.Pemeliharaan Jaringan Internet dan Wifi	1	paket	1.Pemeliharaan Jaringan Internet dan Wifi	1	paket						
5 Dinas Kesehatan														183,637,500	180,607,700
5.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional							Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	6	6	unit	183,637,500	183,637,500
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	25	dusun	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	25	dusun						
6 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman														20,730,000,000	20,100,830,000
6.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengelolaan Taman Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota							Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1	1	lokasi	20,730,000,000	20,100,830,000
				Pembangunan Taman Budaya (Tahap I) - Gerbang Utama; - Pos Satpam; - Pasar Seni Gazebo dan; Penataan Landspace (Pekerjaan Hardscape, Pekerjaan Softscape, Pekerjaan Elektrikal Landscape, Pekerjaan Mekanikal Landscape, Pekerjaan Landmark, dan Pekerjaan Power House)	1	lokasi	Pembangunan Taman Budaya (Tahap I) - Gerbang Utama; - Pos Satpam; - Pasar Seni Gazebo dan; Penataan Landspace (Pekerjaan Hardscape, Pekerjaan Softscape, Pekerjaan Elektrikal Landscape, Pekerjaan Mekanikal Landscape, Pekerjaan Landmark, dan Pekerjaan Power House)	1	lokasi						



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	AKTIVITAS SEMULA			AKTIVITAS MENJADI			OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI				ANGGARAN	
				AKTIVITAS	TARGET	SATUAN	AKTIVITAS	TARGET	SATUAN	INDIKATOR	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	SATUAN	SEMULA	MENJADI
	Urusan Pertanahan											6.275.530.000	5.779.439.800		
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											6.036.247.000	5.564.091.800		
			Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten											5.018.082.000	4.589.926.800
			Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten											4.673.419.000	4.245.263.800
1.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1. Pendaftaran Pengukuran Tanah Kalurahan	1500	Peta Bidang Tanah	1. Pendaftaran Pengukuran Tanah Kalurahan	1500	Bidang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	6	5	Dokumen	4.673.419.000	4.245.263.800
				2. a. Pembuatan Patok Tanah Kalurahan b. Pemasangan Patok Bidang Tanah Kalurahan c. Penyusunan Sket Bidang Tanah Kalurahan	1) 7000 2) 875 3) 875	1) Patok 2) Bidang 3) Bidang	2. a. Pembuatan Patok Tanah Kalurahan b. Pemasangan Patok Bidang Tanah Kalurahan c. Penyusunan Sket Bidang Tanah Kalurahan	a. 7.000 b. 875 c. 875	a. Patok Tanah Desa b. Bidang c. Bidang						
				3. Pendaftaran Tanah Kalurahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	1050	bidang	3. Pendaftaran Tanah Kalurahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	1050	Bidang						
				4. Pendaftaran Hak Milik Kasultanan	297	bidang	4. Pendaftaran Hak Milik Kasultanan	0	bidang						
				5. Verifikasi Tanah Kalurahan Belum Bersertipikat	875	bidang	5. Verifikasi Tanah Kalurahan Belum Bersertipikat	875	Bidang						
				6. Pendaftaran Sertipikat Tanah Kasultanan	105	bidang	6. Pendaftaran Sertipikat Tanah Kasultanan	105	bidang						
			Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa											344.663.000	344.663.000
1.2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul (75 Kalurahan)	75	Kalurahan	Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul (75 Kalurahan)	75	Kalurahan	Jumlah dokumen pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa di 75 Kalurahan	4	4	Dokumen	344.663.000	344.663.000
			Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten											1.018.165.000	974.165.000
			Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten											133.165.000	89.165.000
1.3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Rekomendasi Bupati / Kepala DPTR Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul (20 Rekomendasi)	20	Rekomendasi	Rekomendasi Bupati / Kepala DPTR Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul (20 Rekomendasi)	20	Rekomendasi	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	20	20	Dokumen	133.165.000	89.165.000
			Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa											885.000.000	885.000.000
1.4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Penanganan Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Bantul (56 Berita Acara)	56	Berita Acara	Penanganan Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Bantul (56 Berita Acara)	56	Berita Acara	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	56	56	Berita Acara	885.000.000	885.000.000
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan											239.283.000	215.348.000		
			Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten											239.283.000	215.348.000
			Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten											239.283.000	215.348.000
2.1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Dokumen Peta Batas Kalurahan (21 kalurahan)	21	Kalurahan	Fasilitasi Penegasan Batas Kalurahan	43	Kalurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	21	43	Dokumen	239.283.000	215.348.000



NO	Perangkat Daerah / PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	SEMULA				MENJADI				OUTPUT SESUAI KEPMENDAGRI				ANGGARAN	
				AKTIVITAS	SUB AKTIVITAS	TARGET	SATUAN	AKTIVITAS	SUB AKTIVITAS	TARGET	SATUAN	INDIKATOR	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI	SATUAN	SEMULA	MENJADI
	Urusan Tata Ruang															1.000.000.000	970.734.100
	Dinas Perhubungan															750.000.000	720.734.100
56	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS SAMAS - PARANGTRITIS	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (19 unit)	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (19 unit)	19	Unit	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (19 unit)	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (19 unit)	19	Unit	JUMLAH DOKUMEN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS SAMAS - PARANGTRITIS	1	1	Dokumen	570.000.000	547.707.300
57	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS MAKAM RAJA-RAJA MATARAM DI IMOGIRI	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (6 unit)	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (6 unit)	6	Unit	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (6 unit)	Pengadaan dan Pemasangan APJ Pintar Bernuansa Budaya (6 unit)	6	Unit	JUMLAH DOKUMEN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS MAKAM RAJA-RAJA MATARAM DI IMOGIRI	1	1	Dokumen	180.000.000	173.026.800
	Dinas Lingkungan Hidup															250.000.000	250.000.000
58	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS SAMAS - PARANGTRITIS	Jumlah Pathok Penanda Gumuk Pasir (55 unit)	Jumlah Pathok Penanda Gumuk Pasir (55 unit)	55	unit	Jumlah Pathok Penanda Gumuk Pasir (55 unit)	Jumlah Pathok Penanda Gumuk Pasir (55 unit)	55	unit	JUMLAH DOKUMEN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS SAMAS - PARANGTRITIS	1	1	Dokumen	250.000.000	250.000.000

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul. 2026

Tabel 5. 4 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							Rp 524.147.433.556,00	Rp 792.173.897.374,79	Rp 815.190.630.469,79	Rp 291.043.196.913,79						Rp728.649.036.068,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 490.440.366.578,00	Rp 772.077.128.074,79	Rp 795.150.397.639,79	Rp 304.710.031.061,79						Rp707.044.422.702,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							Rp 490.440.366.578,00	Rp 772.077.128.074,79	Rp 795.150.397.639,79	Rp 304.710.031.061,79						Rp707.044.422.702,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				81.53 Angka	81.53 Angka	Rp 363.652.388.699,00	Rp 358.842.092.684,79	Rp 340.473.188.313,79	Rp 23.128.635.511,00						Rp386.781.024.210,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	Rp 1.179.011.300,00	Rp 642.170.000,00	Rp 639.939.134,00	-Rp 539.072.166,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Rp843.540.300,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	6 Dokumen	Rp 378.875.000,00	Rp 248.000.000,00	Rp 259.032.000,00	-Rp 119.843.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp599.740.430,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	Rp 451.300.000,00	Rp 248.800.000,00	Rp 237.100.000,00	-Rp 214.200.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp158.399.870,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	Rp 348.836.300,00	Rp 145.370.000,00	Rp 143.807.134,00	-Rp 205.029.166,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp85.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	Rp 359.201.818.332,00	Rp 356.051.894.719,79	Rp 336.662.057.012,79	-Rp 22.539.761.319,21			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Rp380.208.765.268,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37100 Oran g/bulan	37100 Oran g/bulan	Rp 358.683.684.716,00	Rp 355.614.404.719,79	Rp 336.218.928.192,79	-Rp 22.464.756.523,21	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp379.859.862.868,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	Rp 518.133.616,00	Rp 437.490.000,00	Rp 443.128.820,00	-Rp 75.004.796,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp348.902.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	Rp 6.375.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 6.375.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Rp30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0 Dokumen	Rp 6.375.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 6.375.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	Rp 1.071.334.028,00	Rp 243.685.050,00	Rp 315.291.250,00	-Rp 756.042.778,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Rp2.108.232.671,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	5 Paket	Rp 25.017.600,00	Rp 25.006.950,00	Rp 25.006.950,00	-Rp 10.650,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp26.980.061,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	Rp 218.124.900,00	Rp 48.972.200,00	Rp 105.979.400,00	-Rp 112.145.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp285.002.190,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	Rp 77.014.800,00	Rp 23.335.800,00	Rp 23.335.800,00	-Rp 53.679.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp577.319.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	Rp 116.276.900,00	Rp 69.173.100,00	Rp 78.285.600,00	-Rp 37.991.300,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp336.345.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 14.661.078,00	Rp 9.600.000,00	Rp 9.600.000,00	-Rp 5.061.078,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp18.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	Rp 479.873.750,00	Rp 46.039.000,00	Rp 45.264.000,00	-Rp 434.609.750,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp355.365.720,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	46 Laporan	Rp 138.665.000,00	Rp 21.558.000,00	Rp 27.819.500,00	-Rp 110.845.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp429.020.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	Rp 1.700.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 1.700.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	Rp 1.476.860.751,00	Rp 1.450.521.165,00	Rp 2.389.900.817,00	Rp 913.040.066,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Rp2.900.399.506,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 242.806.180,00	Rp 285.544.000,00	Rp 293.909.684,00	Rp 51.103.504,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp200.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6 Laporan	Rp 304.352.308,00	Rp 249.279.000,00	Rp 252.662.292,00	-Rp 51.690.016,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.357.879.506,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	Rp 929.702.263,00	Rp 915.698.165,00	Rp 1.843.328.841,00	Rp 913.626.578,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp342.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	Rp 716.989.288,00	Rp 453.821.750,00	Rp 466.000.100,00	-Rp 250.989.188,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Rp690.086.465,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				174 Unit	76 Unit	Rp 372.570.150,00	Rp 351.774.950,00	Rp 353.961.700,00	-Rp 18.608.450,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp407.855.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	115 Unit	Rp 83.031.000,00	Rp 69.085.000,00	Rp 79.085.000,00	-Rp 3.946.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp118.356.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	19 Unit	Rp 261.388.138,00	Rp 32.961.800,00	Rp 32.953.400,00	-Rp 228.434.738,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp163.875.465,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan				100 persen	100 Persen	Rp 92.193.324.879,00	Rp 219.103.402.230,00	Rp 220.176.553.747,00	Rp 7.259.431.493,00						Rp99.452.756.372,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase capaian SPM Pendidikan SD				100 persen	100 persen	Rp 50.802.527.720,00	Rp 115.161.009.968,00	Rp 116.393.853.433,00	Rp 65.591.325.713,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Sekolah Dasar (Peserta Didik, GTK, Sarpras)	Rp40.560.470.360,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	Rp 7.500.000,00	Rp 800.000,00	Rp 800.000,00	-Rp 6.700.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				97 Paket	5 Paket	Rp 1.194.750.000,00	Rp 83.162.500,00	Rp 82.812.500,00	-Rp 1.111.937.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				900 Peserta Didik	250 Peserta Didik	Rp 464.758.000,00	Rp 274.624.000,00	Rp 272.411.000,00	-Rp 192.347.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.058.705.360,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				510 Orang	150 Orang	Rp 34.196.000,00	Rp 7.100.000,00	Rp 7.100.000,00	-Rp 27.096.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	Rp 10.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Rp 9.100.000,00	-Rp 900.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				365 Satuan Pendidikan	399 Satuan Pendidikan	Rp 134.960.000,00	Rp 113.307.500,00	Rp 116.637.500,00	-Rp 18.322.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				399 Orang	354 Orang	Rp 97.420.000,00	Rp 26.530.000,00	Rp 26.530.000,00	-Rp 70.890.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				400 Orang	180 Orang	Rp 152.500.000,00	Rp 44.975.000,00	Rp 44.975.000,00	-Rp 107.525.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				11 Dokumen	6 Dokumen	Rp 1.084.400.600,00	Rp 342.085.000,00	Rp 340.285.000,00	-Rp 744.115.600,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp123.487.084,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 10.325.000,00	Rp 3.750.000,00	Rp 3.750.000,00	-Rp 6.575.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				12637 Paket	15301 Paket	Rp 2.530.850.000,00	Rp 2.229.520.000,00	Rp 2.228.520.000,00	-Rp 302.330.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	1 Ruang	Rp 742.097.700,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	-Rp 738.097.700,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Unit	2 Unit	Rp 1.728.034.200,00	Rp 624.791.668,00	Rp 625.041.668,00	-Rp 1.102.992.532,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				400 Orang	200 Orang	Rp 152.500.000,00	Rp 51.400.000,00	Rp 51.400.000,00	-Rp 101.100.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	1 Ruang	Rp 607.206.200,00	Rp 73.762.500,00	Rp 70.862.500,00	-Rp 536.343.700,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				75871 Peserta Didik	74556 Peserta Didik	Rp 41.851.030.020,00	Rp 111.273.201.800,00	Rp 112.509.628.265,00	Rp 70.658.598.245,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp39.248.277.916,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP				100 persen	100 persen	Rp 36.635.835.836,00	Rp 72.055.913.266,00	Rp 71.857.502.498,00	Rp 35.221.666.662,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Sekolah Menengah Pertama (Peserta Didik, GTK, Sarpras)	Rp24.347.358.448,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	Rp 148.515.800,00	Rp 145.604.676,00	Rp 94.804.676,00	-Rp 53.711.124,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	2 Ruang	Rp 1.110.319.000,00	Rp 553.595.904,00	Rp 551.970.904,00	-Rp 558.348.096,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp62.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	-	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	Rp 303.750.000,00	Rp 353.658.396,00	Rp 1.000.000,00	-Rp 302.750.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	4 Unit	Rp 1.097.008.460,00	Rp 697.085.660,00	Rp 694.760.660,00	-Rp 402.247.800,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	1 Paket	Rp 198.600.000,00	Rp 124.800.000,00	Rp 124.100.000,00	-Rp 74.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				14 Paket	8 Paket	Rp 2.740.350.000,00	Rp 1.948.525.000,00	Rp 1.944.700.000,00	-Rp 795.650.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp993.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				24790 Peserta Didik	40241 Peserta Didik	Rp 26.312.845.436,00	Rp 64.530.290.630,00	Rp 64.647.796.158,00	Rp 38.334.950.722,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp21.148.888.208,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	Rp 705.438.000,00	Rp 568.868.000,00	Rp 660.006.000,00	-Rp 45.432.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp952.470.240,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1 Orang	1 Orang	Rp 13.500.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	-Rp 6.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				114 Satuan Pendidikan	94 Satuan Pendidikan	Rp 85.900.000,00	Rp 48.300.000,00	Rp 40.400.000,00	-Rp 45.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp37.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				114 Satuan Pendidikan	114 Satuan Pendidikan	Rp 110.625.000,00	Rp 111.625.000,00	Rp 128.784.100,00	Rp 18.159.100,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				115 Orang	114 Orang	Rp 96.625.000,00	Rp 22.525.000,00	Rp 24.750.000,00	-Rp 71.875.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				95 Dokumen	95 Dokumen	Rp 625.513.500,00	Rp 474.900.000,00	Rp 474.900.000,00	-Rp 150.613.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	Rp 19.000.000,00	Rp 5.600.000,00	Rp 5.600.000,00	-Rp 13.400.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 14.007.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	-Rp 9.007.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	-Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				400 Orang	180 Orang	Rp 152.500.000,00	Rp 44.975.000,00	Rp 44.975.000,00	-Rp 107.525.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1 Buku	1 Buku	Rp 7.750.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 1.250.000,00	-Rp 6.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	14740 Paket	Rp 2.701.725.000,00	Rp 2.407.310.000,00	Rp 2.400.705.000,00	-Rp 301.020.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp993.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	Rp 188.363.640,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	-Rp 186.863.640,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	-Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD				100 persen	100 persen	Rp 3.807.325.681,00	Rp 24.852.785.220,00	Rp 24.879.179.040,00	Rp 21.071.853.359,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	PAUD (Peserta Didik, GTK, Sarpras)	Rp28.225.870.240,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	Rp 490.325.000,00	Rp 488.775.000,00	Rp 488.775.000,00	-Rp 1.550.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				5 Paket	1 Paket	Rp 1.050.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 750.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp993.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1200 Peserta Didik	36000 Peserta Didik	Rp 747.219.000,00	Rp 22.887.109.720,00	Rp 22.902.549.720,00	Rp 22.155.330.720,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp635.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				637 Orang	260 Orang	Rp 91.805.500,00	Rp 52.756.000,00	Rp 52.306.000,00	-Rp 39.499.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				600 Orang	180 Orang	Rp 176.250.000,00	Rp 44.975.000,00	Rp 44.975.000,00	-Rp 131.275.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1295 Satuan Pendidikan	1295 Satuan Pendidikan	Rp 84.500.000,00	Rp 82.000.000,00	Rp 82.000.000,00	-Rp 2.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp497.470.240,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1295 Satuan Pendidikan	1285 Satuan Pendidikan	Rp 326.523.308,00	Rp 291.850.000,00	Rp 297.488.820,00	-Rp 29.034.488,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp24.887.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5 Dokumen	3 Dokumen	Rp 324.887.500,00	Rp 220.883.500,00	Rp 220.883.500,00	-Rp 104.004.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	2 Ruang	Rp 568.075.000,00	Rp 566.575.000,00	Rp 566.575.000,00	-Rp 1.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	Rp 50.000.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 49.700.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1200 Paket	1 Paket	Rp 223.700.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 223.400.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp993.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	Rp 1.500.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp 1.300.000,00	-Rp 200.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				645 Satuan Pendidikan	137 Satuan Pendidikan	Rp 224.798.500,00	Rp 215.361.000,00	Rp 221.126.000,00	-Rp 3.672.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	1 Ruang	Rp 496.691.873,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 496.391.873,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				100 persen	100 persen	Rp 947.635.642,00	Rp 7.033.693.776,00	Rp 7.046.018.776,00	Rp 6.098.383.134,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Peserta Didik, GTK, Sarpras)	Rp6.319.057.324,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2592 Peserta Didik	3193 Peserta Didik	Rp 4.350.000,00	Rp 6.239.940.000,00	Rp 6.257.580.000,00	Rp 6.253.230.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp5.177.570.240,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				290 Orang	52 Orang	Rp 28.372.000,00	Rp 17.313.000,00	Rp 17.313.000,00	-Rp 11.059.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	Rp 35.500.000,00	Rp 22.650.000,00	Rp 22.650.000,00	-Rp 12.850.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	Rp 11.700.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	-Rp 7.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				8 Dokumen	4 Dokumen	Rp 623.113.642,00	Rp 704.920.776,00	Rp 699.605.776,00	Rp 76.492.134,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				300 Paket	250 Paket	Rp 19.080.000,00	Rp 15.400.000,00	Rp 15.400.000,00	-Rp 3.680.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.061.487.084,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	Rp 195.500.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 195.200.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	Rp 14.600.000,00	Rp 14.300.000,00	Rp 14.300.000,00	-Rp 300.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Didik Nonformal yang Telah Dibangun				1 unit	1 unit	Rp 1.050.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 750.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	Rp 14.370.000,00	Rp 14.070.000,00	Rp 14.070.000,00	-Rp 300.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru SMP Negeri Indeks Pemerataan Guru SD Negeri Indeks Pemerataan Guru TK Negeri Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik				83 persen	0.71 0.92 4.64 83 93 Nilai Nilai Nilai Persen	Rp 34.594.653.000,00	Rp 194.131.633.160,00	Rp 234.500.655.579,00	Rp 186.215.989.120,00						Rp220.810.642.120,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal				8339 guru	8339 guru	Rp 34.594.653.000,00	Rp 194.131.633.160,00	Rp 234.500.655.579,00	Rp 199.906.002.579,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp220.810.642.120,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	4 Dokumen	Rp 34.076.657.000,00	Rp 193.847.497.160,00	Rp 234.215.391.815,00	Rp 200.138.734.815,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH- TUNJANG AN PROFESI GURU DAK NON FISIK- TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH- TAMBAHA N PENGHASILAN GURU	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp220.634.407.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	1 Laporan	Rp 517.996.000,00	Rp 284.136.000,00	Rp 285.263.764,00	-Rp 232.732.236,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp176.235.120,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 33.707.066.978,00	Rp 20.096.769.300,00	Rp 20.040.232.830,00	-Rp 13.666.834.148,00						Rp21.604.613.366,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							Rp 33.597.862.978,00	Rp 19.987.565.300,00	Rp 20.040.232.830,00	-Rp 13.557.630.148,00						Rp19.014.613.366,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				84 persen	84 persen	Rp 840.123.150,00	Rp 584.030.400,00	Rp 484.534.748,00	Rp 4.240.437.530,00						Rp5.080.560.680,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	Rp 704.335.850,00	Rp 503.090.400,00	Rp 403.594.748,00	-Rp 300.741.102,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pemuda dan Kepemudaan	Rp4.754.357.556,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				300 Orang	300 Orang	Rp 199.432.900,00	Rp 250.930.400,00	Rp 162.180.400,00	-Rp 37.252.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp199.432.900,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kabi/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				2 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp 328.705.206,00	Rp 95.400.000,00	Rp 98.783.292,00	-Rp 229.921.914,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp3.754.924.656,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				5 Orang	5 Orang	Rp 176.197.744,00	Rp 156.760.000,00	Rp 142.631.056,00	-Rp 33.566.688,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	Rp 135.787.300,00	Rp 80.940.000,00	Rp 80.940.000,00	-Rp 54.847.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Organisasi Kepemudaan	Rp326.203.124,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	Rp 100.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	-Rp 80.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp290.415.824,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				60 Orang	120 Orang	Rp 35.787.300,00	Rp 60.940.000,00	Rp 60.940.000,00	Rp 25.152.700,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp35.787.300,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi Olahraga				130 medali	130 medali	Rp 32.587.739.828,00	Rp 19.373.534.900,00	Rp 19.525.698.082,00	-Rp 19.296.697.862,00						Rp13.291.041.966,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	Rp 834.183.852,00	Rp 592.901.400,00	Rp 633.602.918,00	-Rp 200.580.934,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Sarana Prasarana Olahraga Pendidikan	Rp853.053.362,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	1 Unit	Rp 834.183.852,00	Rp 592.901.400,00	Rp 633.602.918,00	-Rp 200.580.934,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp853.053.362,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	Rp 1.077.815.052,00	Rp 842.398.000,00	Rp 869.701.328,00	-Rp 208.113.724,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Olahraga Pendidikan	Rp2.257.410.720,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				5 Kegiatan	5 Kegiatan	Rp 1.077.815.052,00	Rp 842.398.000,00	Rp 869.701.328,00	-Rp 208.113.724,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.257.410.720,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				-	1 dokumen	Rp 1.540.960.000,00	Rp 1.029.078.000,00	Rp 1.103.138.000,00	-Rp 437.822.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Atlet Kabupaten Bantul	Rp1.540.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				400 Orang	400 Orang	Rp 1.344.335.000,00	Rp 922.388.000,00	Rp 996.448.000,00	-Rp 347.887.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.344.335.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				300 Orang	300 Orang	Rp 196.625.000,00	Rp 106.690.000,00	Rp 106.690.000,00	-Rp 89.935.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp196.625.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				1 dokumen	1 dokumen	Rp 28.882.174.616,00	Rp 16.730.100.000,00	Rp 16.736.815.044,00	-Rp 12.145.359.572,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Organisasi Olahraga	Rp5.553.435.604,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 28.882.174.616,00	Rp 16.730.100.000,00	Rp 16.736.815.044,00	-Rp 12.145.359.572,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp5.553.435.604,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				1 dokumen	1 dokumen	Rp 252.606.308,00	Rp 179.057.500,00	Rp 182.440.792,00	-Rp 70.165.516,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Olahraga Rekreasi	Rp3.086.182.280,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berlanjng dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	1 Lembaga	Rp 252.606.308,00	Rp 179.057.500,00	Rp 182.440.792,00	-Rp 70.165.516,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp3.086.182.280,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
6	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang aktif				18 Organisasi	18 Organisasi	Rp 170.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 473.010.720,00						Rp643.010.720,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				1 dokumen	1 dokumen	Rp 170.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 140.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Organisasi Kepramukaan	Rp643.010.720,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	Rp 170.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 140.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp643.010.720,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 109.204.000,00	Rp 109.204.000,00	Rp -	-Rp 109.204.000,00						Rp2.590.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	7 2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya				5,37 Persen	5,37 Persen	Rp 109.204.000,00	Rp 109.204.000,00	Rp -	Rp 2.480.796.000,00						Rp2.590.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.08.5.08	Pendidikan Berbasis Budaya	Kurikulum Mulok yang disusun				10 Buah	10 Buah	Rp 109.204.000,00	Rp 109.204.000,00	Rp -	-Rp 109.204.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Satuan Pendidikan	Rp2.590.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal				7 Laporan	0 Laporan	Rp 109.204.000,00	Rp 109.204.000,00	Rp -	-Rp 109.204.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.590.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS KESEHATAN							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	DINAS KESEHATAN
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	DINAS KESEHATAN
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	DINAS KESEHATAN
	8 1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	Rp 386.625.520,00	Rp 218.903.312,00	Rp 202.385.056,00	-Rp 184.240.464,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp480.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	Rp 128.227.000,00	Rp 66.569.828,00	Rp 61.877.764,00	-Rp 66.349.236,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				37 Laporan	37 Laporan	Rp 205.098.520,00	Rp 125.463.484,00	Rp 113.637.292,00	-Rp 91.461.228,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp193.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	Rp 53.300.000,00	Rp 26.870.000,00	Rp 26.870.000,00	-Rp 26.430.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp87.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 persen	100 persen	Rp 150.114.791.606,00	Rp 152.334.297.866,15	Rp 149.838.947.866,15	-Rp 275.843.739,85			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp147.099.837.890,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1100 Orang /bulan	1491 Orang /bulan	Rp 103.810.664.982,00	Rp 152.283.117.956,15	Rp 149.783.117.956,15	Rp 45.972.452.974,15	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp99.902.788.053,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 169.999.900,00	Rp 49.080.000,00	Rp 53.730.000,00	-Rp 116.269.900,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp183.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				21 Laporan	21 Laporan	Rp 10.000.000,00	Rp 2.099.910,00	Rp 2.099.910,00	-Rp 7.900.090,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp28.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	Rp 494.486.846,00	Rp 347.186.660,00	Rp 427.875.024,00	-Rp 66.611.822,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp629.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	Rp 29.994.690,00	Rp 24.991.340,00	Rp 24.991.340,00	-Rp 5.003.350,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				44 Paket	44 Paket	Rp 30.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 30.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	Rp 64.499.140,00	Rp 35.951.188,00	Rp 145.370.188,00	Rp 80.871.048,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp22.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 9.999.900,00	Rp 4.499.820,00	Rp 4.499.820,00	-Rp 5.500.080,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp23.000.000,00	DINAS KESEHATAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	70 Laporan	Rp 359.993.116,00	Rp 281.744.312,00	Rp 253.013.676,00	-Rp 106.979.440,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp468.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp4.105.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 44.950.000,00	Rp 44.950.000,00	Rp 43.800.000,00	-Rp 1.150.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp58.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	Rp 49.999.640,00	Rp 32.593.832,00	Rp 32.593.832,00	-Rp 17.405.808,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp65.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 941.521.814,00	Rp 928.907.182,00	Rp 910.884.354,00	-Rp 30.637.460,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp502.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD				100 persen	100 persen	Rp 1.113.987.808,00	Rp 920.079.624,00	Rp 1.139.949.403,00	Rp 25.961.595,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp855.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	35 Unit	Rp 606.230.300,00	Rp 496.815.440,00	Rp 579.885.440,00	-Rp 26.344.860,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp651.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	Rp 149.060.000,00	Rp 145.160.000,00	Rp 153.580.000,00	Rp 4.520.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp104.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	Rp 358.697.508,00	Rp 278.104.184,00	Rp 406.483.963,00	Rp 47.786.455,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
9	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan				100 persen	100 persen	Rp 7.417.690.503,98	Rp 7.798.909.125,13	Rp 7.834.142.933,13	Rp 416.452.429,15			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp1.901.181.435,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				27 Unit	1 Unit	Rp 149.250.000,00	Rp 272.491.541,13	Rp 99.491.541,13	-Rp 49.758.458,87	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp149.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 Unit	0 Unit	Rp 220.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 220.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				800 Unit	800 Unit	Rp -	Rp -	Rp -	-Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				170 Unit	170 Unit	Rp 227.000.000,00	Rp 208.640.000,00	Rp 407.440.000,00	Rp 180.440.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				95 Paket	95 Paket	Rp 6.519.799.503,98	Rp 6.572.319.084,00	Rp 6.581.752.892,00	Rp 61.953.388,02	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp796.378.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				368398 Keluarga	368398 Keluarga	Rp -	Rp -	Rp -	-Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp145.458.335,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				324 Paket	324 Paket	Rp 20.445.000,00	Rp 65.512.500,00	Rp 65.512.500,00	Rp 45.067.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp160.816.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp63.354.830.490,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8610 Orang	8610 Orang	Rp 337.000.000,00	Rp 1.931.116.475,00	Rp 1.617.150.000,00	Rp 1.280.150.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp5.055.988.665,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8610 Orang	8610 Orang	Rp 25.000.000,00	Rp 11.600.000,00	Rp 11.600.000,00	-Rp 13.400.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp101.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7065 Orang	7065 Orang	Rp 20.000.000,00	Rp 1.442.123.000,00	Rp 1.424.998.000,00	Rp 1.404.998.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp81.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				41000 Orang	41000 Orang	Rp 35.000.000,00	Rp 12.590.000,00	Rp 70.090.000,00	Rp 35.090.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp118.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120600 Orang	120600 Orang	Rp 35.000.000,00	Rp 389.475.000,00	Rp 394.275.000,00	Rp 359.275.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp274.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200000 Orang	200000 Orang	Rp 25.000.000,00	Rp 5.530.000,00	Rp 5.530.000,00	-Rp 19.470.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp175.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				106000 Orang	106000 Orang	Rp 206.787.500,02	Rp 154.550.000,00	Rp 154.550.000,00	-Rp 52.237.500,02	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp179.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12230 Orang	12230 Orang	Rp 39.985.000,00	Rp 17.760.900,00	Rp 35.260.900,00	-Rp 4.724.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp132.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4152 Orang	4152 Orang	Rp 29.975.000,00	Rp 6.800.000,00	Rp 24.300.000,00	-Rp 5.675.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp132.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2000 Orang	2000 Orang	Rp 175.755.080,00	Rp 536.705.080,00	Rp 488.161.720,00	Rp 312.406.640,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp162.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				9960 Orang	9960 Orang	Rp 2.879.597.000,00	Rp 3.213.150.000,00	Rp 2.927.573.800,00	Rp 47.976.800,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp161.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				11037 Orang	11037 Orang	Rp 249.112.105,00	Rp 186.413.600,00	Rp 370.380.075,00	Rp 121.267.970,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp149.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				-	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp205.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 68.554.150,00	Rp 254.205.940,00	Rp 234.495.620,00	Rp 165.941.470,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp310.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 7.446.200.000,00	Rp 13.248.855.828,00	Rp 12.080.058.764,00	Rp 4.633.858.764,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.127.145.560,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 123.406.500,00	Rp 33.223.800,00	Rp 33.223.800,00	-Rp 90.182.700,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp113.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				75 Dokumen	75 Dokumen	Rp 487.072.500,00	Rp 639.884.328,00	Rp 1.724.992.264,00	Rp 1.237.919.764,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp567.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 326.787.500,00	Rp 378.880.000,00	Rp 542.010.000,00	Rp 215.222.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp480.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 37.659.500,00	Rp 38.420.000,00	Rp 38.420.000,00	Rp 760.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp14.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1404 Dokumen	1404 Dokumen	Rp 243.144.520,00	Rp 584.390.000,00	Rp 554.195.000,00	Rp 311.050.480,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp261.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	27 Orang	Rp -	Rp 1.006.320.000,00	Rp 1.006.320.000,00	Rp 1.006.320.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.006.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 501.702.000,00	Rp 1.371.479.628,00	Rp 1.516.362.564,00	Rp 1.014.660.564,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp473.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	1 Paket	Rp -	Rp 346.940.000,00	Rp 198.200.000,00	Rp 198.200.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp198.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 42.940.000,00	Rp 13.875.000,00	Rp 13.875.000,00	-Rp 29.065.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp149.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	Rp -	Rp 4.544.160.000,00	Rp 4.513.336.000,00	Rp 4.513.336.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp4.513.336.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				17 Unit	17 Unit	Rp 188.637.500,00	Rp 76.400.000,00	Rp 122.670.000,00	-Rp 65.967.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	Rp 1.192.874.868,00	Rp 909.200.000,00	Rp 968.260.700,00	-Rp 224.614.168,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp331.541.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1100 Orang	1100 Orang	Rp 15.000.000,00	Rp 3.885.000,00	Rp 143.385.000,00	Rp 128.385.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				160 Orang	160 Orang	Rp 11.075.000,00	Rp 3.960.000,00	Rp 3.960.000,00	-Rp 7.115.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp11.300.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				375 Orang	375 Orang	Rp 14.385.000,00	Rp 62.680.000,00	Rp 62.680.000,00	Rp 48.295.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp15.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	Rp -	Rp 371.832.500,00	Rp 388.557.500,00	Rp 388.557.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp388.557.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	Rp -	Rp 312.800.000,00	Rp 312.800.000,00	Rp 312.800.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp312.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan				2 Aplikasi	2 Aplikasi	Rp 421.220.459,00	Rp 243.169.828,00	Rp 250.684.264,00	-Rp 170.536.195,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp391.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 421.220.459,00	Rp 243.169.828,00	Rp 250.684.264,00	-Rp 170.536.195,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp391.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin				7 Rumah Sakit	7 Rumah Sakit	Rp 79.109.500,00	Rp 55.382.328,00	Rp 51.425.264,00	-Rp 27.684.236,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp131.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				7 Unit	10 Unit	Rp 79.109.500,00	Rp 55.382.328,00	Rp 51.425.264,00	-Rp 27.684.236,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp131.000.000,00	DINAS KESEHATAN
10	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan				44,95 persen	44,95 persen	Rp 253.031.520,00	Rp 1.354.959.656,00	Rp 1.330.750.528,00	Rp 274.543.480,00						Rp527.575.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Tenaga Kesehatan memiliki izin praktek				1900 orang	1900 orang	Rp 135.781.520,00	Rp 152.914.656,00	Rp 145.030.528,00	Rp 9.249.008,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp171.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				140 Dokumen	140 Dokumen	Rp 135.781.520,00	Rp 152.914.656,00	Rp 145.030.528,00	Rp 9.249.008,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp171.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Bantul setiap tahun				100 persen	100 persen	Rp 117.250.000,00	Rp 89.900.000,00	Rp 167.575.000,00	Rp 50.325.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp167.575.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 117.250.000,00	Rp 89.900.000,00	Rp 167.575.000,00	Rp 50.325.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp167.575.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK sesuai Standar				100 persen	100 persen	Rp -	Rp 1.112.145.000,00	Rp 1.018.145.000,00	Rp 1.018.145.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp189.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				290 Orang	290 Orang	Rp -	Rp 1.112.145.000,00	Rp 1.018.145.000,00	Rp 1.018.145.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp189.000.000,00	DINAS KESEHATAN
11	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) Persentase Cakupan ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman				1 75,50 indeks persen	1 75,50 indeks persen	Rp 92.012.500,00	Rp 449.671.500,00	Rp 439.762.500,00	Rp 758.987.500,00						Rp851.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				100 Persen	100 Persen	Rp 5.000.000,00	Rp 49.260.000,00	Rp 49.260.000,00	Rp 44.260.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				66 Dokumen	66 Dokumen	Rp 5.000.000,00	Rp 49.260.000,00	Rp 49.260.000,00	Rp 44.260.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan				100 Persen	100 Persen	Rp 5.000.000,00	Rp 163.312.500,00	Rp 163.312.500,00	Rp 158.312.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp37.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				60 Dokumen	60 Dokumen	Rp 5.000.000,00	Rp 163.312.500,00	Rp 163.312.500,00	Rp 158.312.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp37.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan				77 sertifikat	77 sertifikat	Rp 72.012.500,00	Rp 50.414.500,00	Rp 40.505.500,00	-Rp 31.507.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp281.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				35 Dokumen	35 Dokumen	Rp 72.012.500,00	Rp 50.414.500,00	Rp 40.505.500,00	-Rp 31.507.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp281.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Stiker pembinaan yang diterbitkan				179 Sticker	179 Sticker	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp134.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				179 Dokumen	179 Dokumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp134.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar				75 Sampel	75 Sampel	Rp 10.000.000,00	Rp 186.684.500,00	Rp 186.684.500,00	Rp 176.684.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp129.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				26 Unit	26 Unit	Rp 10.000.000,00	Rp 186.684.500,00	Rp 186.684.500,00	Rp 176.684.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp129.000.000,00	DINAS KESEHATAN
12	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan kader pos pelayanan terpadu yang tersertifikasi kompetensi kader kesehatan				45 persen	45 persen	Rp 502.153.650,00	Rp 2.846.392.500,00	Rp 2.763.237.500,00	Rp 450.846.350,00						Rp953.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS				100 persen	100 persen	Rp 9.562.500,00	Rp 389.625.000,00	Rp 394.625.000,00	Rp 385.062.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp259.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				44 Dokumen	44 Dokumen	Rp 9.562.500,00	Rp 389.625.000,00	Rp 394.625.000,00	Rp 385.062.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirrenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp259.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PHBS				80 persen	80 persen	Rp 36.928.650,00	Rp 840.000,00	Rp 840.000,00	-Rp 36.088.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp197.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 36.928.650,00	Rp 840.000,00	Rp 840.000,00	-Rp 36.088.650,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp197.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi				100 persen	100 persen	Rp 455.662.500,00	Rp 2.455.927.500,00	Rp 2.367.772.500,00	Rp 1.912.110.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp497.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 455.662.500,00	Rp 2.455.927.500,00	Rp 2.367.772.500,00	Rp 1.912.110.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp497.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 418.075.000,00	Rp 183.637.500,00	Rp 180.607.700,00	-Rp 237.467.300,00						Rp2.205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 418.075.000,00	Rp 183.637.500,00	Rp 180.607.700,00	-Rp 237.467.300,00						Rp2.205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
13	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional				62,96 74,00 % persen	62,96 74,00 % persen	Rp 418.075.000,00	Rp 183.637.500,00	Rp 180.607.700,00	Rp 1.786.925.000,00						Rp2.205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi				100 persen	100 persen	Rp 418.075.000,00	Rp 183.637.500,00	Rp 180.607.700,00	-Rp 237.467.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp2.205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	2.22.08.5.06.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional				17 Unit	17 Unit	Rp 418.075.000,00	Rp 183.637.500,00	Rp 180.607.700,00	-Rp 237.467.300,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 1.543.800.000,00	Rp 1.543.800.000,00	Rp 549.950.000,00	-Rp 993.850.000,00						Rp1.427.800.000,00	DINAS KESEHATAN
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							Rp 1.543.800.000,00	Rp 1.543.800.000,00	Rp 549.950.000,00	-Rp 993.850.000,00						Rp1.427.800.000,00	DINAS KESEHATAN
14	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi pelayanan kesehatan				22,22 persen	22,22 persen	Rp 1.543.800.000,00	Rp 1.543.800.000,00	Rp 549.950.000,00	-Rp 116.000.000,00						Rp1.427.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Penerima Manfaat Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	Rp 1.543.800.000,00	Rp 1.543.800.000,00	Rp 549.950.000,00	-Rp 993.850.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp1.427.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 665.950.000,00	Rp 665.950.000,00	Rp 549.950.000,00	-Rp 116.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp549.950.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SRANDAKAN							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS SRANDAKAN
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS SRANDAKAN
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS SRANDAKAN
15	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91 Angka Indeks	82,75 91 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS SRANDAKAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Srandakan)				100 Persen	100 Persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS SRANDAKAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 143.208.790,00	Rp 110.609.484,00	Rp 98.783.292,00	-Rp 44.425.498,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp145.000.000,00	PUSKESMAS SRANDAKAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Srandakan				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS SRANDAKAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 2.332.500.000,00	Rp 2.332.500.000,00	Rp 2.533.791.029,00	Rp 201.291.029,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.640.000.000,00	PUSKESMAS SRANDAKAN
16	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 Persen	81 Persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS SRANDAKAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Srandakan				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS SRANDAKAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Rp 30.141.492,00	Rp 30.141.492,00	Rp 10.141.492,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS SRANDAKAN
		PUSKESMAS SANDEN							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS SANDEN
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS SANDEN
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS SANDEN
17	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS SANDEN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sanden)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS SANDEN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 143.208.790,00	Rp 110.609.484,00	Rp 98.754.912,00	-Rp 44.453.878,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp550.000.000,00	PUSKESMAS SANDEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Sanden				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS SANDEN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 2.417.000.000,00	Rp 2.417.000.000,00	Rp 2.930.513.600,00	Rp 513.513.600,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.460.000.000,00	PUSKESMAS SANDEN
18	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				1 81 Indeks persen	1 81 Indeks persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS SANDEN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sanden				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	UPTD, Dinas Kesehatan	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS SANDEN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS SANDEN
		PUSKESMAS KRETEK							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS KRETEK
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS KRETEK
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS KRETEK
19	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS KRETEK
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Kretek)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS KRETEK
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 129.603.830,00	Rp 70.469.828,00	Rp 66.527.764,00	-Rp 63.076.066,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp95.000.000,00	PUSKESMAS KRETEK
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Kretek				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS KRETEK
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 2.465.000.000,00	Rp 2.600.000.000,00	Rp 2.661.464.697,46	Rp 196.464.697,46	Kab. Bantul, Kretek, Tirtomulyo	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.830.000.000,00	PUSKESMAS KRETEK
20	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS KRETEK

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026																			
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Kretek				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS KRETEK
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 19.990.400,00	Rp 104.977.424,00	Rp 104.977.424,00	Rp 84.987.024,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS KRETEK
		PUSKESMAS PUNDONG							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS PUNDONG
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS PUNDONG
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS PUNDONG
21	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS PUNDONG
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pundong)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS PUNDONG
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 194.377.008,00	Rp 184.349.140,00	Rp 164.610.440,00	-Rp 29.766.568,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp120.000.000,00	PUSKESMAS PUNDONG
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Pundong				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS PUNDONG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 3.010.000.000,00	Rp 3.010.000.000,00	Rp 2.995.627.679,00	-Rp 14.372.321,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp3.200.000.000,00	PUSKESMAS PUNDONG
22	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS PUNDONG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pundong				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS PUNDONG
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Rp 40.470.734,00	Rp 40.470.734,00	Rp 20.470.734,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS PUNDONG
		PUSKESMAS BAMBANGLIPURO							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO
23	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Bambanglipuro)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 158.889.790,00	Rp 110.609.484,00	Rp 98.783.292,00	-Rp 60.106.498,00	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp120.000.000,00	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Bambanglipuro				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 2.876.000.000,00	Rp 2.904.800.000,00	Rp 3.257.156.412,36	Rp 381.156.412,36	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.710.517.000,00	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO
24	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bambanglipuro				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 19.999.700,00	Rp 35.217.786,00	Rp 35.217.786,00	Rp 15.218.086,00	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO
		PUSKESMAS PANDAK I							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS PANDAK I
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS PANDAK I
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS PANDAK I
25	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS PANDAK I
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pandak I)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS PANDAK I



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 172.241.528,00	Rp 184.349.140,00	Rp 164.638.820,00	-Rp 7.602.708,00	Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp120.000.000,00	PUSKESMAS PANDAK I
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Pandak I				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS PANDAK I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 2.188.000.000,00	Rp 2.228.000.000,00	Rp 2.230.793.620,00	Rp 42.793.620,00	Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.001.417.064,00	PUSKESMAS PANDAK I
26	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS PANDAK I
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pandak I				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS PANDAK I
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Rp 20.507.828,00	Rp 20.507.828,00	Rp 507.828,00	Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS PANDAK I
		PUSKESMAS PANDAK II							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS PANDAK II
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS PANDAK II
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS PANDAK II
27	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS PANDAK II
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pandak II)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS PANDAK II
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 103.574.524,00	Rp 110.609.484,00	Rp 98.783.292,00	-Rp 4.791.232,00	Kab. Bantul, Pandak, Catuharjo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp70.000.000,00	PUSKESMAS PANDAK II
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Pandak II				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS PANDAK II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 1.674.000.000,00	Rp 1.674.000.000,00	Rp 1.726.424.098,00	Rp 52.424.098,00	Kab. Bantul, Pandak, Tiharjo Kab. Bantul, Pandak, Catuharjo	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.617.053.163,00	PUSKESMAS PANDAK II
28	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS PANDAK II
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pandak II				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS PANDAK II
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Rp 54.503.967,00	Rp 54.503.967,00	Rp 34.503.967,00	Kab. Bantul, Pandak, Tiharjo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS PANDAK II
		PUSKESMAS BANTUL I							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS BANTUL I
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS BANTUL I
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS BANTUL I
29	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS BANTUL I
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Bantul I)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS BANTUL I
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 89.348.004,00	Rp 73.739.656,00	Rp 65.855.528,00	-Rp 23.492.476,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp70.000.000,00	PUSKESMAS BANTUL I
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Bantul I				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS BANTUL I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 2.240.700.000,00	Rp 2.324.500.000,00	Rp 2.498.259.414,55	Rp 257.559.414,55	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.391.258.209,00	PUSKESMAS BANTUL I
30	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS BANTUL I
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bantul I				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS BANTUL I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 19.998.900,00	Rp 51.702.867,00	Rp 51.702.867,00	Rp 31.703.967,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS BANTUL I
		PUSKESMAS BANTUL II							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS BANTUL II
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS BANTUL II
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS BANTUL II
31	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS BANTUL II
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Bantul II)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS BANTUL II
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	Rp 91.376.502,00	Rp 70.469.828,00	Rp 33.600.000,00	-Rp 57.776.502,00	Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS BANTUL II
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Bantul II				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS BANTUL II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 1.863.000.000,00	Rp 1.906.000.000,00	Rp 1.938.567.123,00	Rp 75.567.123,00	Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.764.000.000,00	PUSKESMAS BANTUL II
32	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS BANTUL II
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bantul II				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS BANTUL II
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 19.989.800,00	Rp 57.293.767,00	Rp 57.293.767,00	Rp 37.303.967,00	Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS BANTUL II
		PUSKESMAS JETIS I							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS JETIS I
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS JETIS I
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS JETIS I
33	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS JETIS I



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Jetis I)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS JETIS I
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 105.029.004,00	Rp 70.469.828,00	Rp 66.527.764,00	-Rp 38.501.240,00	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp95.000.000,00	PUSKESMAS JETIS I
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Jetis I				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS JETIS I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 2.500.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00	Rp 2.512.915.431,49	Rp 12.915.431,49	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.207.625.781,00	PUSKESMAS JETIS I
34	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS JETIS I
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Jetis I				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS JETIS I
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 19.993.500,00	Rp 22.524.348,00	Rp 22.524.348,00	Rp 2.530.848,00	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS JETIS I
		PUSKESMAS JETIS II							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS JETIS II
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS JETIS II
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS JETIS II
35	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS JETIS II
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Jetis II)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai Non ASN	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS JETIS II
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 105.029.004,00	Rp 67.200.000,00	Rp 67.200.000,00	-Rp 37.829.004,00	Kab. Bantul, Jetis, Canden	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp70.000.000,00	PUSKESMAS JETIS II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Jetis II				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS JETIS II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 1.710.500.000,00	Rp 1.727.000.000,00	Rp 1.842.843.353,40	Rp 132.343.353,40	Kab. Bantul, Jetis, Canden	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.386.300.000,00	PUSKESMAS JETIS II
36	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS JETIS II
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Jetis II				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS JETIS II
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Jetis, Canden	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS JETIS II
		PUSKESMAS IMOIRI I							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS IMOIRI I
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS IMOIRI I
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS IMOIRI I
37	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS IMOIRI I
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Imogiri I)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai Non ASN	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS IMOIRI I
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 105.029.004,00	Rp 110.609.484,00	Rp 98.783.292,00	-Rp 6.245.712,00	Kab. Bantul, Imogiri, Imogiri Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Kab. Bantul, Imogiri, Girirejo Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp95.000.000,00	PUSKESMAS IMOIRI I
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Imogiri I				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS IMOIRI I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 2.560.000.000,00	Rp 2.630.000.000,00	Rp 2.743.417.230,00	Rp 183.417.230,00	Kab. Bantul, Imogiri, Imogiri Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun Kab. Bantul, Imogiri, Girirejo Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.623.342.255,00	PUSKESMAS IMOIRI I
38	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS IMOIRI I



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Imogiri I				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS IMOIRI I
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Rp 75.831.048,00	Rp 75.831.048,00	Rp 55.831.048,00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS IMOIRI I
		PUSKESMAS IMOIRI II							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS IMOIRI II
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS IMOIRI II
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS IMOIRI II
39	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS IMOIRI II
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Imogiri II)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai Non ASN	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS IMOIRI II
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 69.241.022,00	Rp 73.739.656,00	Rp 65.827.148,00	-Rp 3.413.874,00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtengah Kab. Bantul, Imogiri, Kebonagung Kab. Bantul, Imogiri, Selopamiro	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS IMOIRI II
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Imogiri II				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS IMOIRI II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 2.726.206.989,00	Rp 2.726.206.989,00	Rp 2.779.471.887,00	Rp 53.264.898,00	Kab. Bantul, Imogiri, Selopamiro Kab. Bantul, Imogiri, Karangtengah Kab. Bantul, Imogiri, Kebonagung Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.257.185.989,00	PUSKESMAS IMOIRI II
40	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS IMOIRI II
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Imogiri II				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS IMOIRI II
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Rp 97.671.586,00	Rp 97.671.586,00	Rp 77.671.586,00	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS IMOIRI II
		PUSKESMAS DLINGO I							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS DLINGO I
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS DLINGO I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS DLINGO I
41	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS DLINGO I
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Dlingo I)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai Non ASN	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS DLINGO I
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 122.527.790,00	Rp 147.479.312,00	Rp 131.711.056,00	Rp 9.183.266,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo Kab. Bantul, Dlingo, Temuwuh Kab. Bantul, Dlingo, Mangunan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp145.000.000,00	PUSKESMAS DLINGO I
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Dlingo I				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS DLINGO I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 1.769.876.540,00	Rp 1.772.876.540,00	Rp 1.658.175.721,00	-Rp 111.700.819,00	Kab. Bantul, Dlingo, Temuwuh Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo Kab. Bantul, Dlingo, Mangunan	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.623.648.240,00	PUSKESMAS DLINGO I
42	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS DLINGO I
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Dlingo I				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS DLINGO I
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 127.631.320,00	Rp 57.567.419,00	Rp 57.567.419,00	-Rp 70.063.901,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS DLINGO I
		PUSKESMAS DLINGO II							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS DLINGO II
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS DLINGO II
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS DLINGO II
43	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS DLINGO II
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Dlingo II)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai Non ASN	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS DLINGO II
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 70.695.502,00	Rp 70.469.828,00	Rp 66.527.764,00	-Rp 4.167.738,00	Kab. Bantul, Dlingo, Jatimujo Kab. Bantul, Dlingo, Terong Kab. Bantul, Dlingo, Muntuk	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS DLINGO II



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Dlingo II				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS DLINGO II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 1.559.250.000,00	Rp 1.559.250.000,00	Rp 1.697.357.485,00	Rp 138.107.485,00	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.327.461.000,00	PUSKESMAS DLINGO II
44	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS DLINGO II
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Dlingo II				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS DLINGO II
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 19.998.800,00	Rp 19.998.800,00	Rp 19.998.800,00	Rp -	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS DLINGO II
		PUSKESMAS PLERET							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS PLERET
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS PLERET
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS PLERET
45	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS PLERET
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pleret)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai Non ASN	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS PLERET
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 115.231.851,00	Rp 110.609.484,00	Rp 98.783.292,00	-Rp 16.448.559,00	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp120.000.000,00	PUSKESMAS PLERET
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Pleret				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS PLERET
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 3.333.333.000,00	Rp 3.366.666.666,00	Rp 3.744.361.049,00	Rp 411.028.049,00	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp3.060.504.000,00	PUSKESMAS PLERET
46	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS PLERET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pleret				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS PLERET
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 109.668.800,00	Rp 40.147.985,00	Rp 40.147.985,00	-Rp 69.520.815,00	Kab. Bantul, Pleret, Wonokromo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS PLERET
		PUSKESMAS PIYUNGAN							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS PIYUNGAN
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS PIYUNGAN
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS PIYUNGAN
47	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,75 Angka	82,75 Angka	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS PIYUNGAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Piyungan)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai Non ASN	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS PIYUNGAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 108.875.288,00	Rp 73.739.656,00	Rp 65.855.528,00	-Rp 43.019.760,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp120.000.000,00	PUSKESMAS PIYUNGAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Piyungan				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS PIYUNGAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 3.294.800.000,00	Rp 3.294.800.000,00	Rp 3.432.295.822,00	Rp 137.495.822,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.388.180.000,00	PUSKESMAS PIYUNGAN
48	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS PIYUNGAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Piyungan				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS PIYUNGAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Rp 148.423.015,00	Rp 148.423.015,00	Rp 128.423.015,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS PIYUNGAN
		PUSKESMAS BANGUNTAPAN I							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I
49	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan I)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai Non ASN	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 55.014.502,00	Rp 36.869.828,00	Rp 32.927.764,00	-Rp 22.086.738,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Kab. Bantul, Banguntapan, Potorono Kab. Bantul, Banguntapan, Jambidan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Banguntapan I				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 2.745.900.000,00	Rp 2.920.000.000,00	Rp 3.034.695.302,00	Rp 288.795.302,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.036.540.000,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I
50	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan I				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.534.830.490,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 19.997.000,00	Rp 29.567.619,00	Rp 29.567.619,00	Rp 9.570.619,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I
		PUSKESMAS BANGUNTAPAN II							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II
51	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan II)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai Non ASN	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 103.000.506,00	Rp 110.609.484,00	Rp 98.726.532,00	-Rp 4.273.974,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Wirokerten Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan Kab. Bantul, Banguntapan, Singosaren Kab. Bantul, Banguntapan, Jagalan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp95.000.000,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Banguntapan II				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 2.374.000.000,00	Rp 2.492.700.000,00	Rp 2.460.858.995,00	Rp 86.858.995,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Wirokerten Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan Kab. Bantul, Banguntapan, Singosaren Kab. Bantul, Banguntapan, Jagalan	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.575.000.000,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II
52	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan II				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II
		PUSKESMAS BANGUNTAPAN III							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III
53	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan III)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai Non ASN	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 105.029.004,00	Rp 110.609.484,00	Rp 98.783.292,00	-Rp 6.245.712,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp70.000.000,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Banguntapan III				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 1.022.000.000,00	Rp 1.228.000.000,00	Rp 1.611.770.973,00	Rp 589.770.973,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp860.000.000,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III
54	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan III				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 1.543.800.000,00	Rp 1.543.800.000,00	Rp 549.950.000,00	-Rp 993.850.000,00						Rp1.427.800.000,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							Rp 1.543.800.000,00	Rp 1.543.800.000,00	Rp 549.950.000,00	-Rp 993.850.000,00						Rp1.427.800.000,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III
55	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi Inovasi pelayanan kesehatan				22,22 persen	22,22 persen	Rp 1.543.800.000,00	Rp 1.543.800.000,00	Rp 549.950.000,00	-Rp 116.000.000,00						Rp1.427.800.000,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Penerima Manfaat Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	Rp 1.543.800.000,00	Rp 1.543.800.000,00	Rp 549.950.000,00	-Rp 993.850.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp1.427.800.000,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	Rp 877.850.000,00	Rp 877.850.000,00	Rp -	-Rp 877.850.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp877.850.000,00	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III
		PUSKESMAS SEWON I							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS SEWON I
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS SEWON I
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS SEWON I
56	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS SEWON I
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sewon I)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai Non ASN	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS SEWON I
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 137.334.008,00	Rp 184.349.140,00	Rp 164.558.900,00	Rp 27.224.892,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp120.000.000,00	PUSKESMAS SEWON I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Sewon I				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS SEWON I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 3.481.000.000,00	Rp 3.170.000.000,00	Rp 3.629.044.454,00	Rp 148.044.454,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.686.800.000,00	PUSKESMAS SEWON I
57	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS SEWON I
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sewon I				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS SEWON I
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 92.724.000,00	Rp 72.941.505,00	Rp 72.941.505,00	-Rp 19.782.495,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS SEWON I
		PUSKESMAS SEWON II							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS SEWON II
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS SEWON II
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS SEWON II
58	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS SEWON II
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sewon II)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai Non ASN	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS SEWON II
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 103.000.506,00	Rp 73.739.656,00	Rp 65.855.528,00	-Rp 37.144.978,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp95.000.000,00	PUSKESMAS SEWON II
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Sewon II				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS SEWON II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 2.669.154.700,00	Rp 2.577.154.700,00	Rp 2.781.411.568,00	Rp 112.256.868,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.221.228.369,00	PUSKESMAS SEWON II
59	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS SEWON II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sewon II				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS SEWON II
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 19.991.400,00	Rp 32.906.557,00	Rp 32.906.557,00	Rp 12.915.157,00	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp44.000.000,00	PUSKESMAS SEWON II
		PUSKESMAS KASIHAN I							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS KASIHAN I
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS KASIHAN I
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS KASIHAN I
60	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS KASIHAN I
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Kasihan I)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai Non ASN	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS KASIHAN I
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 171.667.510,00	Rp 217.949.140,00	Rp 198.210.440,00	Rp 26.542.930,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp145.000.000,00	PUSKESMAS KASIHAN I
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Kasihan I				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS KASIHAN I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 3.305.000.000,00	Rp 3.354.000.000,00	Rp 3.754.808.438,00	Rp 449.808.438,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.825.000.000,00	PUSKESMAS KASIHAN I
61	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS KASIHAN I
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Kasihan I				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS KASIHAN I
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 76.875.400,00	Rp 35.624.038,00	Rp 35.624.038,00	-Rp 41.251.362,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS KASIHAN I
		PUSKESMAS KASIHAN II							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS KASIHAN II
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS KASIHAN II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS KASIHAN II
62	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS KASIHAN II
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Kasihan II)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai Non ASN	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS KASIHAN II
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 105.029.004,00	Rp 73.739.656,00	Rp 65.855.528,00	-Rp 39.173.476,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto Kab. Bantul, Kasihan, Bangurjiwo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp70.000.000,00	PUSKESMAS KASIHAN II
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Kasihan II				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS KASIHAN II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 2.300.000.000,00	Rp 2.300.000.000,00	Rp 3.081.021.407,00	Rp 781.021.407,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto Kab. Bantul, Kasihan, Bangurjiwo	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.616.600.000,00	PUSKESMAS KASIHAN II
63	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS KASIHAN II
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Kasihan II				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS KASIHAN II
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto Kab. Bantul, Kasihan, Bangurjiwo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS KASIHAN II
		PUSKESMAS PAJANGAN							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS PAJANGAN
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS PAJANGAN
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS PAJANGAN
64	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS PAJANGAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pajangan)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai Non ASN	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS PAJANGAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 158.015.008,00	Rp 147.479.312,00	Rp 131.711.056,00	-Rp 26.303.952,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp120.000.000,00	PUSKESMAS PAJANGAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Pajangan				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS PAJANGAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 2.812.000.000,00	Rp 2.812.000.000,00	Rp 2.861.564.592,00	Rp 49.564.592,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.555.000.000,00	PUSKESMAS PAJANGAN
65	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS PAJANGAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pajangan				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS PAJANGAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS PAJANGAN
		PUSKESMAS SEDAYU I							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS SEDAYU I
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS SEDAYU I
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS SEDAYU I
66	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS SEDAYU I
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sedayu I)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai Non ASN	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS SEDAYU I
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 137.334.008,00	Rp 221.218.968,00	Rp 197.566.584,00	Rp 60.232.576,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo Kab. Bantul, Sedayu, Argosari	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp120.000.000,00	PUSKESMAS SEDAYU I
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Sedayu I				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS SEDAYU I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 2.091.500.000,00	Rp 2.091.500.000,00	Rp 2.362.548.557,00	Rp 271.048.557,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo Kab. Bantul, Sedayu, Argosari	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.544.000.000,00	PUSKESMAS SEDAYU I
67	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS SEDAYU I
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sedayu I				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS SEDAYU I
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 91.269.520,00	Rp 57.007.619,00	Rp 57.007.619,00	-Rp 34.261.901,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo Kab. Bantul, Sedayu, Argosari	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS SEDAYU I
		PUSKESMAS SEDAYU II							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	PUSKESMAS SEDAYU II
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS SEDAYU II
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	PUSKESMAS SEDAYU II
68	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	PUSKESMAS SEDAYU II
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sedayu II)				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai Non ASN	Rp4.105.360.000,00	PUSKESMAS SEDAYU II
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 123.675.826,00	Rp 70.469.828,00	Rp 66.527.764,00	-Rp 57.148.062,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argodadi Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp70.000.000,00	PUSKESMAS SEDAYU II
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Sedayu II				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp204.383.998.882,00	PUSKESMAS SEDAYU II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp 2.131.500.000,00	Rp 2.131.500.000,00	Rp 2.073.458.890,50	-Rp 58.041.109,50	Kab. Bantul, Sedayu, Argodadi Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.491.215.789,00	PUSKESMAS SEDAYU II
69	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	PUSKESMAS SEDAYU II
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sedayu II				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	PUSKESMAS SEDAYU II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Sedayu, Argodadi Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	PUSKESMAS SEDAYU II
		UPTD JAMKESDA							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	UPTD JAMKESDA
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	UPTD JAMKESDA
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	UPTD JAMKESDA
70	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	UPTD JAMKESDA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Jamkesda				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai Non ASN	Rp4.105.360.000,00	UPTD JAMKESDA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 182.791.152,00	Rp 181.079.312,00	Rp 165.311.056,00	-Rp 17.480.096,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp198.000.000,00	UPTD JAMKESDA
71	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	UPTD JAMKESDA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	UPTD JAMKESDA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				80000 Dokumen	36 Dokumen	Rp 68.000.000.000,00	Rp 62.839.671.600,00	Rp 62.839.671.600,00	-Rp 5.160.328.400,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp37.000.000.000,00	UPTD JAMKESDA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				36000 Dokumen	12 Dokumen	Rp 149.999.702,00	Rp 123.572.506,00	Rp 123.572.506,00	-Rp 26.427.196,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp132.000.000,00	UPTD JAMKESDA
		UPTD LABKESDA							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	UPTD LABKESDA
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	UPTD LABKESDA
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	UPTD LABKESDA
72	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	UPTD LABKESDA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Labkesda				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai Non ASN	Rp4.105.360.000,00	UPTD LABKESDA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 76.028.196,00	Rp 73.739.656,00	Rp 65.855.528,00	-Rp 10.172.668,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp194.000.000,00	UPTD LABKESDA
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Bangsalipuro Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Banguntapan I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Banguntapan II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Banguntapan III Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Bantul I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Bantul II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Dlingo I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Dlingo II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Imogiri I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Imogiri II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Jetis I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Jetis II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Kasihan I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Kasihan II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Kretek Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Pajangan Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Pandak I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Pandak II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Piyungan Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Pleret Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Pundong Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Sanden Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Sedayu I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Sedayu II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Sewon I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Sewon II				-	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	-	Rp204.383.998.882,00	UPTD LABKESDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	Rp -	Rp 1.300.000.000,00	Rp 3.194.202.666,00	Rp 3.194.202.666,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp0,00	UPTD LABKESDA
73	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	UPTD LABKESDA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Labkesda				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	UPTD LABKESDA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.000.000.000,00	Rp 340.357.500,00	Rp 340.357.500,00	-Rp 659.642.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp500.000.000,00	UPTD LABKESDA
		RSUD PANEMBAHAN SENOPATI							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
74	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit				83,50 Angka	84,5 %	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				470 Orang/bulan	585 Orang/bulan	Rp 150.114.791.606,00	Rp 152.334.297.866,15	Rp 149.838.947.866,15	-Rp 275.843.739,85			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai ASN/ Non ASN, Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit	Rp147.099.837.890,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				585 Orang/bulan	585 Orang/bulan	Rp 39.122.517.887,00	Rp -	Rp -	-Rp 39.122.517.887,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp39.983.941.000,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 persen	40 unit kerja	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pegawai ASN/ Non ASN, Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit	Rp204.383.998.882,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				40 Unit Kerja	40 Unit Kerja	Rp 190.741.646.378,00	Rp 194.556.479.306,00	Rp 201.585.596.659,52	Rp 10.843.950.281,52	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp143.866.547.000,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
75	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				2 50 73 hari kali %	81 %	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				97 persen	22 unit 2 unit	Rp 7.417.690.503,98	Rp 7.798.909.125,13	Rp 7.834.142.933,13	Rp 416.452.429,15			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit	Rp1.901.181.435,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	2 Unit	Rp 12.500.000,00	Rp 13.390.000,00	Rp 13.390.000,00	Rp 890.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp18.895.680,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				12 Unit	22 Unit	Rp 258.696.000,00	Rp 656.556.000,00	Rp 656.556.000,00	Rp 397.860.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp25.189.080,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp25.194.240,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
		RSUD SARAS ADYATMA							Rp 519.567.849.543,00	Rp 546.989.252.378,28	Rp 558.177.624.112,56	Rp 38.609.774.569,56						Rp429.296.083.697,00	RSUD SARAS ADYATMA
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	RSUD SARAS ADYATMA
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							Rp 517.605.974.543,00	Rp 545.261.814.878,28	Rp 557.447.066.412,56	Rp 39.841.091.869,56						Rp425.663.283.697,00	RSUD SARAS ADYATMA
76	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,75 91,00 Angka Indeks	82,75 91,00 Angka Indeks	Rp 417.511.376.821,00	Rp 430.853.698.917,15	Rp 443.177.106.771,43	-Rp 59.957.680.049,00						Rp357.553.696.772,00	RSUD SARAS ADYATMA
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 persen	100 persen	Rp 150.114.791.606,00	Rp 152.334.297.866,15	Rp 149.838.947.866,15	-Rp 275.843.739,85			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Karyawan RSSA	Rp147.099.837.890,00	RSUD SARAS ADYATMA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2800 Orang /bulan	2800 Orang /bulan	Rp 7.001.608.837,00	Rp -	Rp -	-Rp 7.001.608.837,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp7.001.608.837,00	RSUD SARAS ADYATMA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang				100 persen	100 persen	Rp 4.589.737.915,00	Rp 4.326.297.254,00	Rp 3.890.721.342,00	-Rp 699.016.573,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Karyawan RSSA	Rp4.105.360.000,00	RSUD SARAS ADYATMA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 67.860.000,00	Rp 67.860.000,00	Rp -	-Rp 67.860.000,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp67.860.000,00	RSUD SARAS ADYATMA
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD				100 persen	100 persen	Rp 260.811.747.126,00	Rp 272.706.934.201,00	Rp 287.677.228.080,28	Rp 26.865.480.954,28			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Karyawan RSSA	Rp204.383.998.882,00	RSUD SARAS ADYATMA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Unit Kerja	12 Unit Kerja	Rp 4.617.879.519,00	Rp 10.800.000.000,00	Rp 12.062.809.926,00	Rp 7.444.930.407,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp4.617.575.023,00	RSUD SARAS ADYATMA
77	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan				81 persen	81 persen	Rp 99.247.400.052,00	Rp 109.757.092.305,13	Rp 109.736.209.113,13	-Rp 33.469.388.127,00						Rp65.778.011.925,00	RSUD SARAS ADYATMA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan				100 persen	100 persen	Rp 91.329.379.589,02	Rp 101.659.631.024,00	Rp 101.599.956.652,00	Rp 10.270.577.062,98			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp63.354.830.490,00	RSUD SARAS ADYATMA
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 6.483.600.624,00	Rp 5.021.795.935,00	Rp 5.089.655.935,00	-Rp 1.393.944.689,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp6.190.041.665,00	RSUD SARAS ADYATMA
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							Rp 238.528.534.947,00	Rp 148.786.680.397,72	Rp 146.277.219.397,72	-Rp 92.251.315.549,28						Rp258.546.518.516,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 217.642.937.947,00	Rp 127.887.433.397,72	Rp 126.176.389.397,72	-Rp 91.466.548.549,28						Rp218.546.518.516,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							Rp 191.413.179.393,00	Rp 112.732.003.015,72	Rp 109.978.959.015,72	-Rp 81.434.220.377,28						Rp161.141.618.516,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
78	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				83; 89 Angka; Angka	83; 89 Angka; Angka	Rp 19.773.489.189,00	Rp 17.620.859.088,72	Rp 17.431.859.088,72	-Rp 590.808.823,00						Rp19.182.680.366,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				100 %	100 %	Rp 354.500.000,00	Rp 385.929.000,00	Rp 385.929.000,00	Rp 31.429.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Rp453.997.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 176.300.000,00	Rp 168.165.000,00	Rp 168.165.000,00	-Rp 8.135.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp229.102.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	8 Laporan	Rp 178.200.000,00	Rp 217.764.000,00	Rp 217.764.000,00	Rp 39.564.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp224.895.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja keuangan				100 Persen	100 Persen	Rp 12.834.635.576,00	Rp 13.497.873.586,92	Rp 13.297.873.586,92	Rp 463.238.010,92			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Meningkatnya kinerja administrasi keuangan	Rp14.105.221.634,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	102 Orang/bulan	Rp 12.641.110.576,00	Rp 13.307.926.586,92	Rp 13.107.926.586,92	Rp 466.816.010,92	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp13.905.221.634,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	Rp 193.525.000,00	Rp 189.947.000,00	Rp 189.947.000,00	-Rp 3.578.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi perkantoran				7 Jenis	7 Jenis	Rp 1.695.472.302,00	Rp 1.423.528.409,80	Rp 1.423.528.409,80	-Rp 271.943.892,20			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Meningkatnya kinerja administrasi umum	Rp1.553.918.345,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 30.644.050,00	Rp 30.030.870,00	Rp 30.030.870,00	-Rp 613.180,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp32.176.253,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp 239.516.209,00	Rp 234.743.360,00	Rp 234.743.360,00	-Rp 4.772.849,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp285.295.133,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp 147.187.876,00	Rp 59.170.325,00	Rp 59.170.325,00	-Rp 88.017.551,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp172.423.834,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	Rp 4.800.000,00	Rp 7.200.000,00	Rp 7.200.000,00	Rp 2.400.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp5.040.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				340 Laporan	300 Laporan	Rp 479.321.000,00	Rp 316.066.000,00	Rp 316.066.000,00	-Rp 163.255.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 632.828.167,00	Rp 605.447.854,80	Rp 605.447.854,80	-Rp 27.380.312,20	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 161.175.000,00	Rp 170.870.000,00	Rp 170.870.000,00	Rp 9.695.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp173.983.125,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan sarana aparatur				3 Jenis	3 Jenis	Rp 2.095.422.600,00	Rp 111.726.000,00	Rp 111.726.000,00	-Rp 1.983.696.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Meningkatnya penyediaan sarana aparatur	Rp600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	Rp 1.954.100.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 1.954.100.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	9 Unit	Rp 141.322.600,00	Rp 111.726.000,00	Rp 111.726.000,00	-Rp 29.596.600,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				3 Jenis	3 Jenis	Rp 758.758.584,00	Rp 846.795.392,00	Rp 857.795.392,00	Rp 99.036.808,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Rp797.329.617,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	Rp 44.397.044,00	Rp 51.009.392,00	Rp 51.009.392,00	Rp 6.612.348,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp47.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 714.361.540,00	Rp 795.786.000,00	Rp 806.786.000,00	Rp 92.424.460,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp750.079.617,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran				5 Jenis	5 Jenis	Rp 2.034.700.127,00	Rp 1.355.006.700,00	Rp 1.355.006.700,00	-Rp 679.693.427,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Optimalnya kinerja barang milik daerah	Rp1.672.213.270,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				68 Unit	69 Unit	Rp 888.716.000,00	Rp 781.654.500,00	Rp 781.654.500,00	-Rp 107.061.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp770.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	Rp 241.082.400,00	Rp 229.319.700,00	Rp 229.319.700,00	-Rp 11.762.700,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp294.417.970,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				33 Unit	23 Unit	Rp 12.186.000,00	Rp 9.843.000,00	Rp 9.843.000,00	-Rp 2.343.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp12.795.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				268 Unit	312 Unit	Rp 350.440.000,00	Rp 228.798.000,00	Rp 228.798.000,00	-Rp 121.642.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	Rp 542.275.727,00	Rp 105.391.500,00	Rp 105.391.500,00	-Rp 436.884.227,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
79	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Kondisi Sistem Irigasi (IKSI)				65,83 Persen	65,83 Persen	Rp 26.604.311.500,00	Rp 17.477.023.476,00	Rp 17.523.023.476,00	Rp 3.890.688.500,00						Rp30.495.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				100 Persen	100 Persen	Rp 9.551.725.000,00	Rp 5.993.430.300,00	Rp 5.993.430.300,00	-Rp 3.558.294.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Meningkatnya kinerja pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp10.258.205.025,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				8 Lembaga	8 Lembaga	Rp 107.480.000,00	Rp 121.933.500,00	Rp 121.933.500,00	Rp 14.453.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp141.948.875,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Titik	1 Titik	Rp 59.820.000,00	Rp 69.082.500,00	Rp 69.082.500,00	Rp 9.262.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp64.007.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				1,8 KM	0,9 KM	Rp 8.109.775.000,00	Rp 4.929.719.300,00	Rp 4.929.719.300,00	-Rp 3.180.055.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp8.682.916.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				2 Unit	1 Unit	Rp 747.775.000,00	Rp 346.925.000,00	Rp 346.925.000,00	-Rp 400.850.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp800.119.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 526.875.000,00	Rp 525.770.000,00	Rp 525.770.000,00	-Rp 1.105.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp569.213.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				81,21 Persen	81,21 Persen	Rp 17.052.586.500,00	Rp 11.483.593.176,00	Rp 11.529.593.176,00	-Rp 5.522.993.324,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Meningkatnya rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rp20.236.794.975,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2 KM	2,3 KM	Rp 14.892.392.500,00	Rp 9.512.711.180,00	Rp 9.522.711.180,00	-Rp 5.369.681.320,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp17.561.794.975,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 KM	6 KM	Rp 2.160.194.000,00	Rp 1.970.881.996,00	Rp 2.006.881.996,00	-Rp 153.312.004,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp2.675.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
80	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				100 Persen	100 Persen	Rp 1.606.475.000,00	Rp 2.768.363.000,00	Rp 2.768.363.000,00	Rp 568.525.000,00						Rp2.175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga terlayani air minum				700 Rumah Tangga	700 Rumah Tangga	Rp 1.606.475.000,00	Rp 2.768.363.000,00	Rp 2.768.363.000,00	Rp 1.161.888.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Meningkatnya pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp2.175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				150 Orang	500 Orang	Rp 31.500.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 1.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	3 Dokumen	Rp 75.000.000,00	Rp 215.700.000,00	Rp 215.700.000,00	Rp 140.700.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				20 Liter/Detik	4,5 Liter/Detik	Rp 850.000,00	Rp 1.653.400.000,00	Rp 1.653.400.000,00	Rp 1.652.550.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	Rp 2.125.000,00	Rp 1.275.000,00	Rp 1.275.000,00	-Rp 850.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				150 SR	264 SR	Rp 1.334.000.000,00	Rp 694.488.000,00	Rp 694.488.000,00	-Rp 639.512.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	Rp 132.000.000,00	Rp 132.000.000,00	Rp 132.000.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				5 Lembaga	6 Lembaga	Rp 31.000.000,00	Rp 41.500.000,00	Rp 41.500.000,00	Rp 10.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
81	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Penyediaan infrastruktur persampahan				44 Persen	44 Persen	Rp 7.220.000.000,00	Rp 29.530.000,00	Rp 29.530.000,00	-Rp 6.920.000.000,00						Rp300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Persampahan				2 Unit	2 Unit	Rp 7.220.000.000,00	Rp 29.530.000,00	Rp 29.530.000,00	-Rp 7.190.470.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Meningkatnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota	Rp300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				5 Ton/hari	0,5 Ton/hari	Rp 10.000.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	-Rp 8.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	Rp 14.230.000,00	Rp 14.230.000,00	-Rp 85.770.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	Rp 7.110.000.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 13.500.000,00	-Rp 7.096.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
82	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				100 Persen	100 Persen	Rp 10.445.634.468,00	Rp 8.820.984.089,00	Rp 8.829.984.089,00	Rp 4.784.365.532,00						Rp15.230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga dengan akses air limbah				600 Rumah Tangga	600 Rumah Tangga	Rp 10.445.634.468,00	Rp 8.820.984.089,00	Rp 8.829.984.089,00	-Rp 1.615.650.379,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rp15.230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.03.05.2.01.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	Rp 325.000.000,00	Rp 37.000.000,00	Rp 37.000.000,00	-Rp 288.000.000,00	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbereulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp325.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengeloaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				5 M ³ /Hari	50 M ³ /Hari	Rp 1.192.000.000,00	Rp 1.198.000.000,00	Rp 1.198.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengeloaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	Rp 850.000,00	Rp 637.500,00	Rp 637.500,00	-Rp 212.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama				1 Unit	1 Unit	Rp 52.500.000,00	Rp 325.000.000,00	Rp 325.000.000,00	Rp 272.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp325.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				120 Rumah Tangga	120 Rumah Tangga	Rp 44.451.700,00	Rp 36.654.715,00	Rp 36.654.715,00	-Rp 7.796.985,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp52.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				5 Desa	8 Desa	Rp 49.800.000,00	Rp 57.550.000,00	Rp 57.550.000,00	Rp 7.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				1 M ³ /Hari	1 M ³ /Hari	Rp 4.250.000,00	Rp 3.612.500,00	Rp 3.612.500,00	-Rp 637.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp3.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	Rp 38.404.400,00	Rp 37.023.800,00	Rp 37.023.800,00	-Rp 1.380.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp52.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	Rp 2.250.138.368,00	Rp 1.874.280.574,00	Rp 1.883.280.574,00	-Rp 366.857.794,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp2.520.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0042	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat				230 Sambungan Rumah (SR)	170 Sambungan Rumah (SR)	Rp 3.342.240.000,00	Rp 2.340.525.000,00	Rp 2.340.525.000,00	-Rp 1.001.715.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp7.525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				200 Rumah Tangga	210 Rumah Tangga	Rp 2.696.000.000,00	Rp 2.714.400.000,00	Rp 2.714.400.000,00	Rp 18.400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp2.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				6 Dokumen	3 Dokumen	Rp 450.000.000,00	Rp 196.300.000,00	Rp 196.300.000,00	-Rp 253.700.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
83	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase kondisi baik				64 Persen	64 Persen	Rp 3.654.200.000,00	Rp 2.564.458.800,00	Rp 2.564.458.800,00	Rp 2.245.800.000,00						Rp5.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase lingkungan tertangani				8500 m	8500 m	Rp 3.654.200.000,00	Rp 2.564.458.800,00	Rp 2.564.458.800,00	-Rp 1.089.741.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	Rp5.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				2300 M	1503 M	Rp 2.860.700.000,00	Rp 1.608.181.500,00	Rp 1.608.181.500,00	-Rp 1.252.518.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				2000 Meter	2500 Meter	Rp 598.500.000,00	Rp 814.377.300,00	Rp 814.377.300,00	Rp 215.877.300,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				2 Dokumen	3 Dokumen	Rp 195.000.000,00	Rp 141.900.000,00	Rp 141.900.000,00	-Rp 53.100.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
84	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan PBG				100 Persen	100 Persen	Rp 5.027.614.000,00	Rp 2.276.806.000,00	Rp 2.943.112.000,00	-Rp 1.827.614.000,00						Rp3.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB				100 %	100 %	Rp 5.027.614.000,00	Rp 2.276.806.000,00	Rp 2.943.112.000,00	-Rp 2.084.502.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Meningkatnya kepatuhan IMB	Rp3.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				5 Bangunan Gedung	6 Bangunan Gedung	Rp 160.000.000,00	Rp 426.737.000,00	Rp 889.721.400,00	Rp 729.721.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	3 Dokumen	Rp 4.413.614.000,00	Rp 1.418.855.000,00	Rp 1.557.505.000,00	-Rp 2.856.109.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1500 Dokumen	1200 Dokumen	Rp 454.000.000,00	Rp 431.214.000,00	Rp 495.885.600,00	Rp 41.885.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
85	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota				66,38 Persen	66,38 Persen	Rp 115.889.909.192,00	Rp 60.203.132.902,00	Rp 56.916.782.902,00	-Rp 33.574.495.442,00						Rp82.315.413.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan jalan kabupaten				0,0252 Persen	0,0252 Persen	Rp 115.889.909.192,00	Rp 60.203.132.902,00	Rp 56.916.782.902,00	-Rp 58.973.126.290,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Rp82.315.413.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				1 Dokumen	3 Dokumen	Rp 470.485.500,00	Rp 465.795.500,00	Rp 465.795.500,00	-Rp 4.690.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp498.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				10 Dokumen	27 Dokumen	Rp 4.581.125.000,00	Rp 2.807.500.000,00	Rp 2.807.500.000,00	-Rp 1.773.625.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp4.799.733.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1210,72 KM	1210,72 KM	Rp 512.925.000,00	Rp 591.287.100,00	Rp 591.287.100,00	Rp 78.362.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp542.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				20 KM	20 KM	Rp 9.990.917.500,00	Rp 7.791.224.400,00	Rp 7.794.224.400,00	-Rp 2.196.693.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp10.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				50 KM	7,7 KM	Rp 94.636.431.192,00	Rp 36.792.453.702,00	Rp 33.503.103.702,00	-Rp 61.133.327.490,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGA SAN-JALAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp60.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				30 Meter	58,5 Meter	Rp 3.517.500.000,00	Rp 10.594.722.200,00	Rp 10.594.722.200,00	Rp 7.077.222.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp3.695.842.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi				70 KM	8,4 KM	Rp 2.180.525.000,00	Rp 1.160.150.000,00	Rp 1.160.150.000,00	-Rp 1.020.375.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp2.278.237.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
86	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				64 Persen	64 Persen	Rp 1.191.546.044,00	Rp 970.845.660,00	Rp 971.845.660,00	Rp 1.151.978.356,00						Rp2.343.524.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Cakupan kinerja penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi				100 Persen	100 Persen	Rp 563.628.300,00	Rp 531.643.060,00	Rp 531.643.060,00	-Rp 31.985.240,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Rp1.434.040.650,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	3 Lembaga	Rp 30.387.500,00	Rp 24.187.000,00	Rp 24.187.000,00	-Rp 6.200.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp67.059.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				150 Orang	150 Orang	Rp 533.240.800,00	Rp 507.456.060,00	Rp 507.456.060,00	-Rp 25.784.740,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp1.366.981.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				9 Layanan Informasi	9 Layanan Informasi	Rp 226.718.000,00	Rp 95.200.300,00	Rp 95.200.300,00	-Rp 131.517.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Rp369.862.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				6 Layanan Informasi	6 Layanan Informasi	Rp 226.718.000,00	Rp 95.200.300,00	Rp 95.200.300,00	-Rp 131.517.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp369.862.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Usaha dan Tertib Penyelenggaraan				125 Paket Pekerjaan	125 Paket Pekerjaan	Rp 401.199.744,00	Rp 344.002.300,00	Rp 345.002.300,00	-Rp 56.197.444,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Tercapainya Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha dan Tertib Penyelenggaraan	Rp539.621.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				3 Lembaga	3 Lembaga	Rp 35.700.000,00	Rp 29.565.000,00	Rp 29.565.000,00	-Rp 6.135.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp64.660.050,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				3 Badan Usaha	3 Badan Usaha	Rp 365.499.744,00	Rp 314.437.300,00	Rp 315.437.300,00	-Rp 50.062.444,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp474.961.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							Rp 26.229.758.554,00	Rp 15.155.430.382,00	Rp 16.197.430.382,00	-Rp 10.032.328.172,00						Rp57.404.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
87	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota				100; 100 Persen; Persen	100; 100 Persen; Persen	Rp 5.262.511.054,00	Rp 3.793.441.632,00	Rp 3.835.441.632,00	Rp 1.258.788.946,00						Rp6.521.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi				1 Jenis	1 Jenis	Rp 6.800.000,00	Rp 2.720.000,00	Rp 2.720.000,00	-Rp 4.080.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Terlaksananya penanganan rumah korban bencana dan relokasi rumah terdampak program kabupaten	Rp13.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 850.000,00	Rp 340.000,00	Rp 340.000,00	-Rp 510.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 850.000,00	Rp 340.000,00	Rp 340.000,00	-Rp 510.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 850.000,00	Rp 340.000,00	Rp 340.000,00	-Rp 510.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 850.000,00	Rp 340.000,00	Rp 340.000,00	-Rp 510.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 850.000,00	Rp 340.000,00	Rp 340.000,00	-Rp 510.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 850.000,00	Rp 340.000,00	Rp 340.000,00	-Rp 510.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 850.000,00	Rp 340.000,00	Rp 340.000,00	-Rp 510.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 850.000,00	Rp 340.000,00	Rp 340.000,00	-Rp 510.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi				2 Jenis	2 Jenis	Rp 5.950.000,00	Rp 2.380.000,00	Rp 2.380.000,00	-Rp 3.570.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Rp11.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	Rp 850.000,00	Rp 340.000,00	Rp 340.000,00	-Rp 510.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				20 Orang	20 Orang	Rp 850.000,00	Rp 340.000,00	Rp 340.000,00	-Rp 510.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 850.000,00	Rp 340.000,00	Rp 340.000,00	-Rp 510.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	Rp 850.000,00	Rp 340.000,00	Rp 340.000,00	-Rp 510.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	Rp 850.000,00	Rp 340.000,00	Rp 340.000,00	-Rp 510.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				30 Orang	30 Orang	Rp 850.000,00	Rp 340.000,00	Rp 340.000,00	-Rp 510.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				30 Orang	30 Orang	Rp 850.000,00	Rp 340.000,00	Rp 340.000,00	-Rp 510.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi				10 Unit	10 Unit	Rp 1.200.425.000,00	Rp 210.290.000,00	Rp 210.290.000,00	-Rp 990.135.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi	Rp1.405.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				4 Unit Rumah	5 Unit Rumah	Rp 997.875.000,00	Rp 108.930.000,00	Rp 108.930.000,00	-Rp 888.945.000,00	Kab. Bantul, Banganglipuro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				4 Unit Rumah	2 Unit Rumah	Rp 200.000.000,00	Rp 100.340.000,00	Rp 100.340.000,00	-Rp 99.660.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	Rp 850.000,00	Rp 340.000,00	Rp 340.000,00	-Rp 510.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	Rp 850.000,00	Rp 340.000,00	Rp 340.000,00	-Rp 510.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	Rp 850.000,00	Rp 340.000,00	Rp 340.000,00	-Rp 510.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Laporan pengelolaan rumah susun				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 3.552.291.054,00	Rp 3.163.059.532,00	Rp 3.202.059.532,00	-Rp 350.231.522,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun	Rp4.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 3.552.291.054,00	Rp 3.163.059.532,00	Rp 3.202.059.532,00	-Rp 350.231.522,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kab. Bantul, Kasihan, Ngestharjo	OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp4.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik				25 Dokumen	25 Dokumen	Rp 497.045.000,00	Rp 414.992.100,00	Rp 417.992.100,00	-Rp 79.052.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Rp690.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 497.045.000,00	Rp 414.992.100,00	Rp 417.992.100,00	-Rp 79.052.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp690.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
88	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)				0,59 Persen	0,59 Persen	Rp 3.695.000.000,00	Rp 1.501.247.300,00	Rp 1.501.247.300,00	Rp 19.805.000.000,00						Rp23.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya				1 Kawasan	1 Kawasan	Rp 3.695.000.000,00	Rp 1.501.247.300,00	Rp 1.501.247.300,00	-Rp 2.193.752.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp23.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				70 Unit Rumah	18 Unit Rumah	Rp 1.400.000.000,00	Rp 765.868.000,00	Rp 765.868.000,00	-Rp 634.132.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				15 Ha	0,5 Ha	Rp 1.000.000.000,00	Rp 455.379.300,00	Rp 455.379.300,00	-Rp 544.620.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp16.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				37 Unit	8 Unit	Rp 1.295.000.000,00	Rp 280.000.000,00	Rp 280.000.000,00	-Rp 1.015.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
89	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase luasan kawasan kumuh sesuai SK yang ditangani				17,35 Persen	17,35 Persen	Rp 2.030.625.000,00	Rp 1.530.000.000,00	Rp 1.530.000.000,00	Rp 5.069.375.000,00						Rp7.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh				70 Unit	63 Unit	Rp 2.030.625.000,00	Rp 1.530.000.000,00	Rp 1.530.000.000,00	-Rp 500.625.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Terlaksananya Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				52 Unit Rumah	45 Unit Rumah	Rp 1.040.000.000,00	Rp 900.000.000,00	Rp 900.000.000,00	-Rp 140.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp2.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				28 Unit	18 Unit	Rp 990.625.000,00	Rp 630.000.000,00	Rp 630.000.000,00	-Rp 360.625.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
90	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				16,79 Persen	16,79 Persen	Rp 15.241.622.500,00	Rp 8.330.741.450,00	Rp 9.330.741.450,00	Rp 5.041.977.500,00						Rp20.283.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan PSU				4 Jenis	4 Jenis	Rp 15.241.622.500,00	Rp 8.330.741.450,00	Rp 9.330.741.450,00	-Rp 5.910.881.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Terlaksananya Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp20.283.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	6 Dokumen	Rp 1.713.400.000,00	Rp 745.200.000,00	Rp 844.950.000,00	-Rp 868.450.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp2.310.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				4 Lokasi	2 Lokasi	Rp 100.000.000,00	Rp 267.225.000,00	Rp 267.225.000,00	Rp 167.225.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				60 Laporan	30 Laporan	Rp 336.250.000,00	Rp 343.254.400,00	Rp 343.254.400,00	Rp 7.004.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp391.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				40 Lokasi	44 Lokasi	Rp 13.091.972.500,00	Rp 6.975.062.050,00	Rp 7.875.312.050,00	-Rp 5.216.660.450,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAJIN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp17.182.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 20.885.597.000,00	Rp 20.899.247.000,00	Rp 20.100.830.000,00	-Rp 784.767.000,00						Rp40.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 20.885.597.000,00	Rp 20.899.247.000,00	Rp 20.100.830.000,00	-Rp 784.767.000,00						Rp40.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
91	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembangunan Taman Budaya				11,22 Persen	11,22 Persen	Rp 20.885.597.000,00	Rp 20.899.247.000,00	Rp 20.100.830.000,00	Rp 19.114.403.000,00						Rp40.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	Progres pembangunan Taman Budaya Bantul				100 persen	100 persen	Rp 20.885.597.000,00	Rp 20.899.247.000,00	Rp 20.100.830.000,00	-Rp 784.767.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Terlaksananya pembangunan Taman Budaya Bantul	Rp40.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan				1 Objek	1 Objek	Rp 20.885.597.000,00	Rp 20.899.247.000,00	Rp 20.100.830.000,00	-Rp 784.767.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp40.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							Rp 14.138.069.185,00	Rp 14.939.416.376,97	Rp 14.724.277.376,97	Rp 586.208.191,97						Rp14.325.549.066,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 13.761.930.185,00	Rp 14.563.277.376,97	Rp 14.724.277.376,97	Rp 962.347.191,97						Rp14.025.549.066,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							Rp 13.761.930.185,00	Rp 14.563.277.376,97	Rp 14.724.277.376,97	Rp 962.347.191,97						Rp14.025.549.066,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
92	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				82,66 93,87 Persen Persen	82,66 93,87 Persen Persen	Rp 9.663.807.878,00	Rp 13.120.254.890,97	Rp 13.266.237.994,97	-Rp 195.491.328,00						Rp9.468.316.550,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	Rp 26.946.400,00	Rp 5.945.261,00	Rp 5.945.261,00	-Rp 21.001.139,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul	Rp27.215.864,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 9.361.400,00	Rp 3.760.261,00	Rp 3.760.261,00	-Rp 5.601.139,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp9.455.014,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	Rp 17.585.000,00	Rp 2.185.000,00	Rp 2.185.000,00	-Rp 15.400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp17.760.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	Rp 8.250.132.182,00	Rp 12.623.676.129,97	Rp 12.748.587.333,97	Rp 4.498.455.151,97			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul	Rp8.332.633.504,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/b ulan	62 Orang/b ulan	Rp 6.493.067.980,00	Rp 7.311.276.129,97	Rp 7.311.276.129,97	Rp 818.208.149,97	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp6.557.998.660,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 1.757.064.202,00	Rp 5.312.400.000,00	Rp 5.437.311.204,00	Rp 3.680.247.002,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp1.774.634.844,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	Rp 199.650.000,00	Rp 29.715.000,00	Rp 33.682.600,00	-Rp 165.967.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul	Rp191.734.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	Rp 106.015.700,00	Rp -	Rp 3.967.600,00	-Rp 102.048.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp95.291.171,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				235 Orang	90 Orang	Rp 93.634.300,00	Rp 29.715.000,00	Rp 29.715.000,00	-Rp 63.919.300,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp96.443.329,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	Rp 262.516.045,00	Rp 46.978.100,00	Rp 42.202.100,00	-Rp 220.313.945,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul	Rp124.345.060,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp 48.664.045,00	Rp 22.400.100,00	Rp 22.516.100,00	-Rp 26.147.945,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp50.123.966,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	Rp 12.500.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 2.250.000,00	-Rp 10.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp12.875.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	Rp 200.904.000,00	Rp 21.992.000,00	Rp 17.100.000,00	-Rp 183.804.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp60.884.654,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 448.000,00	Rp 336.000,00	Rp 336.000,00	-Rp 112.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp461.440,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Person	100 Person	Rp 16.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 16.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul	Rp30.385.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	Rp -	Rp -	Rp -	-Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp13.905.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	Rp 16.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 16.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp16.480.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang				100 persen	100 persen	Rp 391.829.001,00	Rp 10.879.200,00	Rp 12.791.000,00	-Rp 379.038.001,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul	Rp403.583.871,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 391.829.001,00	Rp 10.879.200,00	Rp 12.791.000,00	-Rp 379.038.001,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp403.583.871,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				100 persen	100 persen	Rp 516.734.250,00	Rp 403.061.200,00	Rp 423.029.700,00	-Rp 93.704.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Satpol PP Kabupaten Bantul	Rp358.418.751,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				52 Unit	57 Unit	Rp 486.400.750,00	Rp 389.106.200,00	Rp 409.074.700,00	-Rp 77.326.050,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp327.175.246,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	35 Unit	Rp 20.350.000,00	Rp 13.955.000,00	Rp 13.955.000,00	-Rp 6.395.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp20.960.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya				1 Unit	0 Unit	Rp 9.983.500,00	Rp -	Rp -	-Rp 9.983.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp10.283.005,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
93	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				100 Person	100 Person	Rp 4.098.122.307,00	Rp 1.443.022.486,00	Rp 1.458.039.382,00	Rp 459.110.209,00						Rp4.557.232.516,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase peningkatan kapasitas anggota Linmas				100 persen 30,78 persen	100 persen 30,78 persen	Rp 3.131.876.789,00	Rp 428.607.250,00	Rp 657.206.246,00	-Rp 2.474.670.543,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp3.571.662.088,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4.329.800,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	-Rp 3.729.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp4.416.396,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 1.102.957.734,00	Rp 53.451.050,00	Rp 48.346.050,00	-Rp 1.054.611.684,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp1.238.677.269,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	2 Dokumen	Rp 4.930.000,00	Rp 4.450.000,00	Rp 63.205.100,00	Rp 58.275.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp5.028.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				9 Dokumen	9 Dokumen	Rp 5.280.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	-Rp 4.080.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp5.385.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				700 Orang	850 Orang	Rp 68.865.300,00	Rp 95.500.100,00	Rp 105.610.100,00	Rp 36.744.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp183.902.989,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				12 laporan	12 laporan	Rp 1.159.782.151,00	Rp 23.120.000,00	Rp 33.125.000,00	-Rp 1.126.657.151,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp1.182.977.794,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 773.711.404,00	Rp 241.546.300,00	Rp 246.553.196,00	-Rp 527.158.208,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp789.185.632,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	1 Laporan	Rp 6.770.400,00	Rp 2.839.800,00	Rp 2.839.800,00	-Rp 3.930.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp6.905.808,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				21 Unit	21 Unit	Rp 5.250.000,00	Rp 5.900.000,00	Rp 5.900.000,00	Rp 650.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp5.355.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0022	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Tranitibum dan dokumen yang mengambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal				-	9 Dokumen	Rp -	Rp -	Rp 81.043.000,00	Rp 81.043.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp81.043.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0023	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum				-	9 Dokumen	Rp -	Rp -	Rp 62.574.000,00	Rp 62.574.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp62.574.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas				-	25 Orang	Rp -	Rp -	Rp 6.210.000,00	Rp 6.210.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp6.210.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti				100 persen	100 persen	Rp 958.933.018,00	Rp 1.013.365.236,00	Rp 792.332.136,00	-Rp 166.600.882,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp978.111.678,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	Rp 242.338.517,00	Rp 576.227.750,00	Rp 496.879.750,00	Rp 254.541.233,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp247.185.287,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	Rp 584.704.501,00	Rp 384.437.486,00	Rp 242.752.386,00	-Rp 341.952.115,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp596.398.591,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	Rp 131.890.000,00	Rp 52.700.000,00	Rp 52.700.000,00	-Rp 79.190.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp134.527.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran perda yang ditindaklanjuti				100 persen	100 persen	Rp 7.312.500,00	Rp 1.050.000,00	Rp 8.501.000,00	Rp 1.188.500,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Anggota PPNS Kabupaten Bantul	Rp7.468.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				12 Laporan	12 Laporan	Rp 7.312.500,00	Rp 1.050.000,00	Rp 8.501.000,00	Rp 1.188.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp7.458.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 376.139.000,00	Rp 376.139.000,00	Rp -	-Rp 376.139.000,00						Rp300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 376.139.000,00	Rp 376.139.000,00	Rp -	-Rp 376.139.000,00						Rp300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
94	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga				100 Persen	100 Persen	Rp 376.139.000,00	Rp 376.139.000,00	Rp -	-Rp 76.139.000,00						Rp300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina				5000 Orang	5000 Orang	Rp 376.139.000,00	Rp 376.139.000,00	Rp -	-Rp 376.139.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Pedukuhan	Rp300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.07.0012	Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina				5000 Orang	0 Orang	Rp 376.139.000,00	Rp 376.139.000,00	Rp -	-Rp 376.139.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							Rp 13.996.421.224,00	Rp 13.316.310.474,50	Rp 13.959.310.474,50	-Rp 37.110.749,50						Rp9.153.322.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 13.996.421.224,00	Rp 13.316.310.474,50	Rp 13.959.310.474,50	-Rp 37.110.749,50						Rp9.153.322.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							Rp 13.996.421.224,00	Rp 13.316.310.474,50	Rp 13.959.310.474,50	-Rp 37.110.749,50						Rp9.153.322.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
95	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				85 Angka	81,6 88 Angka Indeks	Rp 11.772.329.870,00	Rp 12.045.551.024,50	Rp 12.686.306.124,50	-Rp 5.308.167.870,00						Rp6.464.162.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				96 %	100 %	Rp 20.000.000,00	Rp 7.250.000,00	Rp 7.250.000,00	-Rp 12.750.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	BPBD	Rp92.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 15.000.000,00	Rp 7.250.000,00	Rp 7.250.000,00	-Rp 7.750.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp32.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	0 Laporan	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 5.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				99 %	100 %	Rp 7.456.390.898,00	Rp 8.124.301.067,06	Rp 8.174.301.067,06	Rp 717.910.169,06			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	BPBD	Rp191.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				93 Orang/b ulan	93 Orang/b ulan	Rp 7.360.690.898,00	Rp 8.031.601.067,06	Rp 8.081.601.067,06	Rp 720.910.169,06	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp96.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 92.700.000,00	Rp 92.700.000,00	Rp 92.700.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				21 Laporan	0 Laporan	Rp 3.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 3.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah				97 %	100 %	Rp 162.074.270,00	Rp 77.210.002,00	Rp 77.680.002,00	-Rp 84.394.268,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	BPBD	Rp539.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	Rp 10.003.050,00	Rp 7.219.500,00	Rp 7.219.500,00	-Rp 2.783.550,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	Rp 49.883.400,00	Rp 35.676.000,00	Rp 35.676.000,00	-Rp 14.207.400,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	Rp 9.638.820,00	Rp 5.164.000,00	Rp 5.164.000,00	-Rp 4.474.820,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	Rp 9.960.000,00	Rp 10.140.000,00	Rp 10.610.000,00	Rp 650.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	Rp 1.000.000,00	Rp 5.048.502,00	Rp 5.048.502,00	Rp 4.048.502,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	Rp 79.589.000,00	Rp 13.462.000,00	Rp 13.462.000,00	-Rp 66.127.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp345.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 1.000.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	Rp 1.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 1.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				96 %	100 %	Rp 56.885.600,00	Rp -	Rp -	-Rp 56.885.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	BPBD	Rp100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	Rp 19.950.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 19.950.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	Rp 36.935.600,00	Rp -	Rp -	-Rp 36.935.600,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				97 %	100 %	Rp 3.490.826.689,00	Rp 3.341.942.252,50	Rp 3.356.151.852,50	-Rp 134.674.836,50			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	BPBD	Rp4.641.762.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	Rp 6.660.000,00	Rp 4.800.000,00	Rp 4.800.000,00	-Rp 1.860.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 18.344.200,00	Rp 32.050.000,00	Rp 32.050.000,00	Rp 13.705.800,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 3.465.822.489,00	Rp 3.305.092.252,50	Rp 3.319.301.852,50	-Rp 146.520.636,50	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp4.581.262.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				97 %	100 %	Rp 586.152.413,00	Rp 494.847.702,94	Rp 1.070.923.202,94	Rp 484.770.789,94			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	BPBD	Rp900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	Rp 23.990.000,00	Rp 16.220.000,00	Rp 16.220.000,00	-Rp 7.770.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	38 Unit	Rp 502.653.813,00	Rp 429.431.502,94	Rp 938.515.002,94	Rp 435.861.189,94	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				140 Unit	140 Unit	Rp 49.515.000,00	Rp 47.440.000,00	Rp 114.432.000,00	Rp 64.917.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	1 Unit	Rp 9.993.600,00	Rp 1.756.200,00	Rp 1.756.200,00	-Rp 8.237.400,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
96	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana				45 %	100 %	Rp 1.224.277.604,00	Rp 624.791.000,00	Rp 624.791.000,00	Rp 934.772.396,00						Rp2.159.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				70 %	100 %	Rp 48.312.000,00	Rp 184.500.000,00	Rp 184.500.000,00	Rp 136.188.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana	Rp122.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				1800 Orang	1000 Orang	Rp 46.212.000,00	Rp 183.000.000,00	Rp 183.000.000,00	Rp 136.788.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp121.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.100.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	-Rp 600.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Capaian Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				80 %	80 %	Rp 623.275.000,00	Rp 108.603.000,00	Rp 108.603.000,00	-Rp 514.672.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana	Rp1.881.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				28 Unit	1 Unit	Rp 315.000.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp 45.000.000,00	-Rp 270.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	Rp 38.750.000,00	Rp 20.095.000,00	Rp 20.095.000,00	-Rp 18.655.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	Rp 16.490.000,00	Rp 16.490.000,00	-Rp 83.510.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	12 laporan	Rp 17.000.000,00	Rp 4.618.000,00	Rp 4.618.000,00	-Rp 12.382.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp121.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 5.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 700.000,00	-Rp 4.300.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				10 Kawasan	1 Kawasan	Rp 147.525.000,00	Rp 21.700.000,00	Rp 21.700.000,00	-Rp 125.825.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 %	100 %	Rp 522.695.604,00	Rp 326.728.000,00	Rp 326.728.000,00	-Rp 195.967.604,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Korban Bencana	Rp156.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	1 Laporan	Rp 999.900,00	Rp 999.900,00	Rp 999.900,00	-Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 137.570.000,00	Rp 93.381.700,00	Rp 93.381.700,00	-Rp 44.188.300,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				1000 Orang	1000 Orang	Rp 284.125.704,00	Rp 139.823.400,00	Rp 139.823.400,00	-Rp 144.302.304,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 92.523.000,00	Rp 92.523.000,00	-Rp 7.477.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp6.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Capaian Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				90 %	100 %	Rp 29.995.000,00	Rp 4.960.000,00	Rp 4.960.000,00	-Rp 25.035.000,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	BPBD dan Stakeholder	Rp0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 29.995.000,00	Rp 4.960.000,00	Rp 4.960.000,00	-Rp 25.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
97	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran				100 %	100 8,81 % Menit	Rp 999.813.750,00	Rp 645.968.450,00	Rp 648.213.350,00	-Rp 469.703.750,00						Rp530.110.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kabupaten/Kota	Capaian Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun				100 %	100 %	Rp 935.661.800,00	Rp 583.374.450,00	Rp 585.619.350,00	-Rp 350.042.450,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	BPBD, Masyarakat, Korban Kebakaran	Rp371.150.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	0 Dokumen	Rp 1.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 1.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp18.150.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penangulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	0 Dokumen	Rp 29.925.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 29.925.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp24.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analsis Dalam Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran				120 Orang	0 Orang	Rp 5.935.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 5.935.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp121.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				3 Unit	62 Unit	Rp 714.797.400,00	Rp 412.252.200,00	Rp 411.102.100,00	-Rp 303.695.300,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp111.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0026	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				150 Laporan	150 Laporan	Rp 184.004.400,00	Rp 171.122.250,00	Rp 174.517.250,00	-Rp 9.487.150,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp96.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				88 %	100 %	Rp 30.074.250,00	Rp 48.284.000,00	Rp 48.284.000,00	Rp 18.209.750,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat	Rp140.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				50 Orang	50 Orang	Rp 9.999.750,00	Rp 48.284.000,00	Rp 48.284.000,00	Rp 38.284.250,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp30.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0007	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran				10 Desa/Ke lurahan	10 Desa/Ke lurahan	Rp 20.074.500,00	Rp -	Rp -	-Rp 20.074.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Capaian Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				100 %	100 %	Rp 34.077.700,00	Rp 14.310.000,00	Rp 14.310.000,00	-Rp 19.767.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Korban Kecelakaan, Bencana	Rp18.710.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				12 Laporan	12 Laporan	Rp 19.999.700,00	Rp 14.310.000,00	Rp 14.310.000,00	-Rp 5.689.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp10.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				1 Laporan	0 Laporan	Rp 14.078.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 14.078.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp18.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DINAS SOSIAL									Rp 24.155.183.106,00	Rp 21.780.693.668,05	Rp 22.384.403.668,05	-Rp 1.770.779.437,95						Rp23.640.894.086,00	DINAS SOSIAL
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 24.155.183.106,00	Rp 21.780.693.668,05	Rp 22.384.403.668,05	-Rp 1.770.779.437,95						Rp23.640.894.086,00	DINAS SOSIAL
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							Rp 24.155.183.106,00	Rp 21.780.693.668,05	Rp 22.384.403.668,05	-Rp 1.770.779.437,95						Rp23.640.894.086,00	DINAS SOSIAL
98	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				83 83 % Angka	83 83 % Angka	Rp 8.436.678.856,00	Rp 7.540.016.899,05	Rp 7.969.100.087,05	-Rp 1.982.186.056,00						Rp6.454.492.800,00	DINAS SOSIAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				80 Persen	80 Persen	Rp 576.292.174,00	Rp 230.527.859,09	Rp 291.797.493,09	-Rp 284.494.680,91			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran , dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp212.211.236,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 346.474.308,00	Rp 148.078.859,09	Rp 149.955.993,09	-Rp 196.518.314,91	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp146.311.236,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	Rp 229.817.866,00	Rp 82.449.000,00	Rp 141.841.500,00	-Rp 87.976.366,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp65.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	Rp 5.741.436.232,00	Rp 5.854.782.613,96	Rp 6.157.461.847,96	Rp 416.025.615,96			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	meningkatkan pengadministrasi keuangan perangkat daerah	Rp4.816.970.782,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/b ulan	38 Orang/b ulan	Rp 5.494.066.360,00	Rp 5.620.437.613,96	Rp 5.920.437.613,96	Rp 426.371.253,96	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp4.512.134.550,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 132.480.000,00	Rp 123.000.000,00	Rp 123.000.000,00	-Rp 9.480.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp174.151.416,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	Rp 114.889.872,00	Rp 111.345.000,00	Rp 114.024.234,00	-Rp 865.638,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp130.684.816,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 8.379.000,00	Rp 3.512.000,00	Rp 3.512.000,00	-Rp 4.867.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	meningkatkan pengadministrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp2.222.184,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 8.379.000,00	Rp 3.512.000,00	Rp 3.512.000,00	-Rp 4.867.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp2.222.184,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	Rp 778.577.320,00	Rp 297.533.200,00	Rp 327.953.920,00	-Rp 450.623.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	meningkatkan pengadministrasi umum perangkat daerah	Rp531.794.737,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	1 Paket	Rp 260.412.700,00	Rp 10.000.000,00	Rp 11.210.000,00	-Rp 249.202.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp119.093.236,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	Rp 205.455.620,00	Rp 107.533.200,00	Rp 124.001.920,00	-Rp 81.453.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp30.205.171,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 7.800.000,00	Rp 1.950.000,00	Rp 1.950.000,00	-Rp 5.850.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp5.777.679,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	Rp 295.858.000,00	Rp 173.100.000,00	Rp 185.842.000,00	-Rp 110.016.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp370.364.078,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 5.918.000,00	Rp 2.630.000,00	Rp 2.630.000,00	-Rp 3.288.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp4.132.352,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 3.133.000,00	Rp 2.320.000,00	Rp 2.320.000,00	-Rp 813.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp2.222.221,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 317.067.630,00	Rp 608.174.826,00	Rp 610.213.126,00	Rp 293.145.496,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	adanya ketersediaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp194.753.844,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	Rp 6.000.000,00	Rp 720.000,00	Rp 720.000,00	-Rp 5.280.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp3.148.094,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 55.177.430,00	Rp 49.381.480,00	Rp 44.780.980,00	-Rp 10.396.450,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp44.630.189,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 47.301.384,00	Rp 30.385.646,00	Rp 32.024.446,00	-Rp 15.276.938,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp29.629.126,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 208.588.816,00	Rp 527.687.700,00	Rp 532.687.700,00	Rp 324.098.884,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp117.346.435,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				12 Bulan	12 Bulan	Rp 1.014.926.500,00	Rp 545.486.400,00	Rp 578.161.700,00	-Rp 436.764.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp696.540.017,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertizinannya				21 Unit	21 Unit	Rp 620.326.200,00	Rp 444.191.100,00	Rp 466.212.400,00	-Rp 154.113.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp368.145.597,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	Rp 90.460.000,00	Rp 73.820.000,00	Rp 76.220.000,00	-Rp 14.240.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp32.103.158,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	2 Unit	Rp 304.140.300,00	Rp 27.475.300,00	Rp 35.729.300,00	-Rp 268.411.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp296.291.262,00	DINAS SOSIAL
99	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi				85 90 Persen %	47.83 Persen	Rp 1.626.668.668,00	Rp 460.276.499,00	Rp 483.693.999,00	-Rp 1.102.709.189,00						Rp523.959.479,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang				45 kelompok	45 kelompok	Rp 15.303.000,00	Rp 8.478.000,00	Rp 8.478.000,00	-Rp 6.825.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	telaksananya kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp5.615.136,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 15.303.000,00	Rp 8.478.000,00	Rp 8.478.000,00	-Rp 6.825.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp5.615.136,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja				95 Persen	95 Persen	Rp 1.611.365.668,00	Rp 451.798.499,00	Rp 475.215.999,00	-Rp 1.136.149.669,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	peningkatan kualitas Potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota	Rp518.344.343,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Lembaga	60 Lembaga	Rp 1.200.124.308,00	Rp 343.946.307,00	Rp 367.363.807,00	-Rp 832.760.501,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp188.866.910,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				200 Orang	200 Orang	Rp 99.303.000,00	Rp 15.052.000,00	Rp 15.052.000,00	-Rp 84.251.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp40.062.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	Rp 11.891.000,00	Rp 26.741.000,00	Rp 26.741.000,00	Rp 14.850.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp5.881.236,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya				17 Orang	17 Orang	Rp 245.157.360,00	Rp 54.899.192,00	Rp 54.899.192,00	-Rp 190.258.168,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp156.614.005,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi				20 Orang	20 Orang	Rp 54.890.000,00	Rp 11.160.000,00	Rp 11.160.000,00	-Rp 43.730.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp126.919.692,00	DINAS SOSIAL
100	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				68 80 Persen Persen	100 Persen	Rp 10.461.169.460,00	Rp 10.010.017.736,00	Rp 9.990.057.226,00	-Rp 172.417.546,00						Rp10.288.751.914,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti ber				80 Persen	80 Persen	Rp 10.272.544.780,00	Rp 9.905.742.736,00	Rp 9.882.782.226,00	-Rp 389.762.554,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Rp10.219.690.247,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				1112 Orang	1112 Orang	Rp 8.993.066.296,00	Rp 8.958.618.715,00	Rp 8.934.487.825,00	-Rp 58.578.471,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp7.216.557.435,00	DINAS SOSIAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	Rp 37.162.500,00	Rp 28.385.000,00	Rp 34.571.000,00	-Rp 2.591.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp7.734.147,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	Rp 178.703.000,00	Rp 107.353.000,00	Rp 107.353.000,00	-Rp 71.350.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp5.524.391,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	Rp 16.000.000,00	Rp 6.250.000,00	Rp 6.250.000,00	-Rp 9.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp16.711.835,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	Rp 376.319.924,00	Rp 270.924.412,00	Rp 243.524.412,00	-Rp 132.795.512,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp315.570.242,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	Rp 20.166.000,00	Rp 12.087.500,00	Rp 10.837.500,00	-Rp 9.328.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp13.797.167,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	Rp 90.821.180,00	Rp 99.447.206,00	Rp 102.447.206,00	Rp 11.626.026,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp84.724.207,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	Rp 65.375.000,00	Rp 8.375.000,00	Rp 8.375.000,00	-Rp 57.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp100.915.435,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	Rp 295.658.700,00	Rp 234.679.903,00	Rp 250.314.283,00	-Rp 45.344.417,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp2.190.588.240,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	Rp 73.099.872,00	Rp 70.350.000,00	Rp 72.350.000,00	-Rp 749.872,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp163.358.414,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	Rp 13.875.000,00	Rp 6.750.000,00	Rp 6.750.000,00	-Rp 7.125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp8.424.696,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	Rp 112.297.308,00	Rp 102.522.000,00	Rp 105.522.000,00	-Rp 6.775.308,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp95.784.038,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya				80 Persen	80 Persen	Rp 188.624.680,00	Rp 104.275.000,00	Rp 107.275.000,00	-Rp 81.349.680,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Terlaksananya a Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp69.061.667,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	Rp 188.624.680,00	Rp 104.275.000,00	Rp 107.275.000,00	-Rp 81.349.680,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp69.061.667,00	DINAS SOSIAL
101	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang terlindungi dengan bantuan atau jaminan sosial				80 Persen	70 Persen	Rp 2.630.551.796,00	Rp 3.130.496.960,00	Rp 3.319.352.370,00	Rp 2.373.529.036,00						Rp5.004.080.832,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial				100 Persen	100 Persen	Rp 2.630.551.796,00	Rp 3.130.496.960,00	Rp 3.319.352.370,00	Rp 688.800.574,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	optimalisasi Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.004.080.832,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				100 Orang	100 Orang	Rp 638.934.616,00	Rp 360.823.000,00	Rp 569.796.000,00	-Rp 69.138.616,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.198.555.392,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	Rp 381.372.052,00	Rp 167.717.500,00	Rp 172.717.500,00	-Rp 208.654.552,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp637.431.763,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	2583 Orang	Rp 1.194.978.140,00	Rp 2.345.218.960,00	Rp 2.340.706.460,00	Rp 1.145.728.320,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp2.244.223.651,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				20 Usulan	20 Usulan	Rp 415.266.988,00	Rp 256.737.500,00	Rp 236.132.410,00	-Rp 179.134.578,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp923.870.026,00	DINAS SOSIAL
102	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	Rp 544.268.420,00	Rp 436.555.080,00	Rp 440.367.580,00	Rp 374.340.203,00						Rp918.608.623,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.				85 Persen	85 Persen	Rp 210.254.700,00	Rp 172.551.700,00	Rp 172.551.700,00	-Rp 37.703.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	meningkatnya kapasitas pemberdayaa n masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	Rp316.725.624,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	Rp 130.952.200,00	Rp 127.712.200,00	Rp 127.712.200,00	-Rp 3.240.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp64.148.619,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	Rp 10.900.000,00	Rp 3.550.000,00	Rp 3.550.000,00	-Rp 7.350.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp11.689.484,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	5 Orang	Rp 25.200.000,00	Rp 28.512.500,00	Rp 28.512.500,00	Rp 3.312.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp16.089.781,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	Rp 11.652.500,00	Rp 5.714.500,00	Rp 5.714.500,00	-Rp 5.938.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp14.348.756,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang	Rp 31.550.000,00	Rp 7.062.500,00	Rp 7.062.500,00	-Rp 24.487.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp210.448.984,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana				85 Persen	85 Persen	Rp 334.013.720,00	Rp 264.003.380,00	Rp 267.815.880,00	-Rp 66.197.840,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	Rp601.882.999,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				13 Kampung	13 Kampung	Rp 91.765.000,00	Rp 31.867.500,00	Rp 35.692.500,00	-Rp 56.072.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp21.055.417,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Orang	17 Orang	Rp 242.248.720,00	Rp 232.135.880,00	Rp 232.123.380,00	-Rp 10.125.340,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp580.827.582,00	DINAS SOSIAL
103	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan ketisetiakawasan sosial				80 %	50 %	Rp 455.845.906,00	Rp 203.330.494,00	Rp 181.832.406,00	-Rp 4.845.468,00						Rp451.000.438,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen				100 Persen	100 Persen	Rp 455.845.906,00	Rp 203.330.494,00	Rp 181.832.406,00	-Rp 274.013.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	terpeliharanya taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota	Rp451.000.438,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	1 Makam	Rp 416.708.406,00	Rp 173.492.994,00	Rp 151.994.906,00	-Rp 264.713.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp406.405.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0005	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	Rp 39.137.500,00	Rp 29.837.500,00	Rp 29.837.500,00	-Rp 9.300.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp44.595.038,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							Rp 40.483.009.964,00	Rp 21.035.184.768,70	Rp 45.237.415.168,70	Rp 4.754.405.204,70						Rp28.873.975.237,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 39.949.025.735,00	Rp 20.859.479.168,70	Rp 45.061.709.568,70	Rp 5.112.683.833,70						Rp28.173.975.237,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							Rp 36.751.973.735,00	Rp 17.662.427.168,70	Rp 41.864.657.568,70	Rp 5.112.683.833,70						Rp24.873.975.237,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
104	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				83 84 angka nilai	83 84 angka nilai	Rp 11.598.008.459,00	Rp 7.938.776.432,70	Rp 7.947.776.432,70	Rp 112.389.357,00						Rp11.710.397.816,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	Rp 260.649.000,00	Rp 51.294.300,00	Rp 52.323.800,00	-Rp 208.325.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Penganggur,setenga h penganggur dan warga miskin	Rp80.360.448,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 155.579.000,00	Rp 46.224.300,00	Rp 47.253.800,00	-Rp 108.325.200,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp74.282.917,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	Rp 105.070.000,00	Rp 5.070.000,00	Rp 5.070.000,00	-Rp 100.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp6.077.531,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelol aan Adminis trasi Keuangan				100 persen	100 persen	Rp 8.953.339.393,00	Rp 6.758.955.518,01	Rp 6.759.955.518,01	-Rp 2.193.383.874,99			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Penganggur,setenga h penganggur dan warga miskin	Rp8.402.338.057,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/b ulan	45 Orang/b ulan	Rp 8.692.148.393,00	Rp 6.567.888.018,01	Rp 6.567.888.018,01	-Rp 2.124.260.374,99	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp8.205.987.817,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 147.660.000,00	Rp 147.660.000,00	Rp 147.660.000,00	-Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp133.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	Rp 113.531.000,00	Rp 43.407.500,00	Rp 44.407.500,00	-Rp 69.123.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp63.350.240,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasiumum				100 persen	100 persen	Rp 945.721.838,00	Rp 348.618.052,69	Rp 349.852.052,69	-Rp 595.869.785,31			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Penganggur,setenga h penganggur dan warga miskin	Rp1.747.245.696,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	Rp 14.558.150,00	Rp 14.549.050,00	Rp 14.549.050,00	-Rp 9.100,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp16.986.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	Rp 143.205.224,00	Rp 117.794.330,69	Rp 119.794.330,69	-Rp 23.410.893,31	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp329.594.244,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	Rp 39.476.764,00	Rp 30.394.172,00	Rp 30.394.172,00	-Rp 9.082.592,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp41.951.983,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	Rp 23.976.700,00	Rp 16.154.500,00	Rp 16.154.500,00	-Rp 7.822.200,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp36.367.498,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 3.900.000,00	Rp 3.900.000,00	Rp 3.900.000,00	-Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp360.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	16 Laporan	Rp 691.425.000,00	Rp 159.346.000,00	Rp 158.580.000,00	-Rp 532.845.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.314.335.271,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 29.180.000,00	Rp 6.480.000,00	Rp 6.480.000,00	-Rp 22.700.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp7.650.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian pengada an barang milik daerah				89 persen	89 persen	Rp 138.000.000,00	Rp 6.293.300,00	Rp 6.293.300,00	-Rp 131.706.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Penganggur,setenga h penganggur dan warga miskin	Rp346.575.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	1 Unit	Rp 138.000.000,00	Rp 6.293.300,00	Rp 6.293.300,00	-Rp 131.706.700,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp346.575.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunjang				86 persen	86 persen	Rp 297.146.354,00	Rp 434.102.264,00	Rp 438.102.264,00	Rp 140.955.910,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Penganggur,setenga h penganggur dan warga miskin	Rp350.543.592,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 101.708.540,00	Rp 101.708.540,00	Rp 101.708.540,00	-Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp96.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 195.437.814,00	Rp 332.393.724,00	Rp 336.393.724,00	Rp 140.955.910,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp254.543.592,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD				83 persen	83 persen	Rp 1.003.151.874,00	Rp 339.512.998,00	Rp 341.249.498,00	-Rp 661.902.376,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Penganggur, setenga h penganggur dan warga miskin	Rp783.335.023,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	Rp 287.950.850,00	Rp 225.031.750,00	Rp 225.031.750,00	-Rp 62.919.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp573.335.023,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	Rp 42.990.000,00	Rp 44.532.000,00	Rp 44.532.000,00	Rp 1.542.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya				4 Unit	3 Unit	Rp 672.211.024,00	Rp 69.949.248,00	Rp 71.685.748,00	-Rp 600.525.276,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
105	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				3,59 Persen	3,59 Persen	Rp 3.872.707.884,00	Rp 1.147.785.144,00	Rp 1.154.785.144,00	-Rp 522.657.884,00						Rp3.350.050.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster				85 persen	85 persen	Rp 2.316.659.836,00	Rp 709.980.244,00	Rp 713.980.244,00	-Rp 1.602.679.592,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Penganggur, setenga h penganggur dan warga miskin	Rp2.134.350.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				560 Orang	154 Orang	Rp 2.316.659.836,00	Rp 709.980.244,00	Rp 713.980.244,00	-Rp 1.602.679.592,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp2.134.350.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi				51.5 persen	51.5 persen	Rp 997.200.848,00	Rp 152.875.000,00	Rp 153.875.000,00	-Rp 843.325.848,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Penganggur, setenga h penganggur dan warga miskin, LPKS	Rp465.850.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				5 Lembaga	2 Lembaga	Rp 997.200.848,00	Rp 152.875.000,00	Rp 153.875.000,00	-Rp 843.325.848,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp465.850.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan				73 persen	73 persen	Rp 39.550.000,00	Rp 19.700.000,00	Rp 19.699.800,00	-Rp 19.850.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pengangguran, seten gah penganggur dan warga miskin	Rp66.550.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				3 Perizinan	3 Perizinan	Rp 39.550.000,00	Rp 19.700.000,00	Rp 19.699.800,00	-Rp 19.850.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp66.550.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang menerapkan Program Peningkatan Produktivitas				2,9 persen	2,9 persen	Rp 87.100.000,00	Rp 36.430.000,00	Rp 36.430.000,00	-Rp 50.670.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pengangguran, seten gah penganggur dan warga miskin	Rp199.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas				5 Perusaha an	5 Perusaha an	Rp 87.100.000,00	Rp 36.430.000,00	Rp 36.430.000,00	-Rp 50.670.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp199.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				30 persen	30 persen	Rp 432.197.200,00	Rp 228.799.900,00	Rp 230.800.100,00	-Rp 201.397.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pengangguran, seten gah penganggur dan warga miskin	Rp484.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				5 Dokumen	3 Dokumen	Rp 432.197.200,00	Rp 228.799.900,00	Rp 230.800.100,00	-Rp 201.397.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp484.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
106	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota				91 persen	91 persen	Rp 19.440.683.800,00	Rp 7.777.333.400,00	Rp 31.780.333.400,00	-Rp 10.602.156.379,00						Rp8.838.527.421,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota				3750 orang	3750 orang	Rp 19.007.429.800,00	Rp 7.625.613.400,00	Rp 31.635.703.400,00	Rp 12.628.273.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pengangguran, seten gah penganggur dan warga miskin	Rp8.372.332.105,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				2750 Orang	2750 Orang	Rp 190.003.800,00	Rp 37.500.000,00	Rp 37.500.000,00	-Rp 152.503.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp30.023.004,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				800 Orang	480 Orang	Rp 155.475.000,00	Rp 73.390.000,00	Rp 81.480.000,00	-Rp 73.995.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp52.666.769,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				60 Orang	20 Orang	Rp 214.645.000,00	Rp 50.369.000,00	Rp 50.369.000,00	-Rp 164.276.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp180.973.687,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				5070 Orang	8268 Orang	Rp 18.447.306.000,00	Rp 7.464.354.400,00	Rp 31.466.354.400,00	Rp 13.019.048.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp8.108.668.645,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja				5500 orang	5500 orang	Rp 378.844.000,00	Rp 142.325.000,00	Rp 135.235.000,00	-Rp 243.609.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pengangguran,seten gah penganggur dan warga miskin	Rp408.446.614,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				3500 Orang	3500 Orang	Rp 248.644.000,00	Rp 112.600.000,00	Rp 105.510.000,00	-Rp 143.134.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp287.564.517,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				250 Orang	150 Orang	Rp 130.200.000,00	Rp 29.725.000,00	Rp 29.725.000,00	-Rp 100.475.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp120.882.097,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi				55 persen	55 persen	Rp 54.410.000,00	Rp 9.395.000,00	Rp 9.395.000,00	-Rp 45.015.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	CPMI dan Purna PMI	Rp57.748.702,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				60 Orang	20 Orang	Rp 54.410.000,00	Rp 9.395.000,00	Rp 9.395.000,00	-Rp 45.015.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp57.748.702,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
107	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				30,15-35,1 5 44,64 persen persen	30,15-35,1 5 44,64 persen persen	Rp 1.840.573.592,00	Rp 798.532.192,00	Rp 981.762.592,00	-Rp 865.573.592,00						Rp975.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase Peningkatan sarana hubungan industrial				58 persen	58 persen	Rp 841.317.492,00	Rp 594.612.192,00	Rp 777.842.592,00	-Rp 63.474.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Perusahaan, pemberi kerja dan tenaga kerja	Rp396.058.282,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				210 Perusa haan	60 Perusah aan	Rp 101.725.600,00	Rp 14.400.000,00	Rp 14.400.000,00	-Rp 87.325.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp239.895.313,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				2 Perusahaan	1 Perusahaan	Rp 157.194.500,00	Rp 106.400.000,00	Rp 109.400.000,00	-Rp 47.794.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				5 Laporan	4 Laporan	Rp 582.397.392,00	Rp 473.812.192,00	Rp 654.042.592,00	Rp 71.645.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp96.162.969,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih yang terfasilitasi				95 persen	95 persen	Rp 999.256.100,00	Rp 203.920.000,00	Rp 203.920.000,00	-Rp 795.336.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	pekerja dan pemberi kerja	Rp578.941.718,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu)	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				20 Perkara	20 Perkara	Rp 320.454.000,00	Rp 36.650.000,00	Rp 36.650.000,00	-Rp 283.804.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp262.041.875,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu)	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				20 Perkara	20 Perkara	Rp 166.908.000,00	Rp 46.700.000,00	Rp 46.700.000,00	-Rp 120.208.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp145.860.750,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				100 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	Rp 450.614.000,00	Rp 95.350.000,00	Rp 95.350.000,00	-Rp 355.264.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp98.108.718,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	Rp 61.280.100,00	Rp 25.220.000,00	Rp 25.220.000,00	-Rp 36.060.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp72.930.375,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 3.197.052.000,00	Rp 3.197.052.000,00	Rp 3.197.052.000,00	Rp -						Rp3.300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
108	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi				75 persen	75 persen	Rp 3.197.052.000,00	Rp 3.197.052.000,00	Rp 3.197.052.000,00	Rp 102.948.000,00						Rp3.300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 3.197.052.000,00	Rp 3.197.052.000,00	Rp 3.197.052.000,00	Rp -			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Penganggur, setenga h penganggur dan warga miskin	Rp3.300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22.08.5.07.0018	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 3.197.052.000,00	Rp 3.197.052.000,00	Rp 3.197.052.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp3.300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							Rp 533.984.229,00	Rp 175.705.600,00	Rp 175.705.600,00	-Rp 358.278.629,00						Rp700.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							Rp 533.984.229,00	Rp 175.705.600,00	Rp 175.705.600,00	-Rp 358.278.629,00						Rp700.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
109	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi				100 Persen	100 Persen	Rp 533.984.229,00	Rp 175.705.600,00	Rp 175.705.600,00	Rp 166.015.771,00						Rp700.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi				68 persen	68 persen	Rp 533.984.229,00	Rp 175.705.600,00	Rp 175.705.600,00	-Rp 358.278.629,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Penganggura, seteng ah penganggur dan warga miskin	Rp700.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				20 Kepala Keluarga	1 Kepala Keluarga	Rp 533.984.229,00	Rp 175.705.600,00	Rp 175.705.600,00	-Rp 358.278.629,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp700.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							Rp 9.802.739.913,00	Rp 13.767.103.642,76	Rp 13.515.103.642,76	Rp 3.712.363.729,76						Rp16.951.732.202,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 9.802.739.913,00	Rp 13.767.103.642,76	Rp 13.515.103.642,76	Rp 3.712.363.729,76						Rp16.951.732.202,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							Rp 1.831.054.594,00	Rp 1.581.530.194,00	Rp 1.610.842.796,00	-Rp 220.211.798,00						Rp3.096.365.475,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
110	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				11 Persen	28.19 Persen	Rp 290.250.000,00	Rp 232.829.600,00	Rp 165.511.600,00	Rp 322.631.000,00						Rp612.881.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah				45 PD	45 PD	Rp 78.425.000,00	Rp 16.350.000,00	Rp 16.350.000,00	-Rp 62.075.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp307.802.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				1 Laporan	1 Laporan	Rp 78.425.000,00	Rp 16.350.000,00	Rp 16.350.000,00	-Rp 62.075.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp307.802.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat				83 Persen	83 Persen	Rp 146.350.000,00	Rp 204.179.600,00	Rp 129.179.600,00	-Rp 17.170.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp105.079.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				55 Lembaga	55 Lembaga	Rp 146.350.000,00	Rp 204.179.600,00	Rp 129.179.600,00	-Rp 17.170.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp105.079.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Layananresponsif gender yangdiberikan oleh lembaga penyedia layanan				85 Persen	85 Persen	Rp 65.475.000,00	Rp 12.300.000,00	Rp 19.982.000,00	-Rp 45.493.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				20 Lembaga	20 Lembaga	Rp 65.475.000,00	Rp 12.300.000,00	Rp 19.982.000,00	-Rp 45.493.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
111	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang ditangani instansi terkait				26 Per 100.000 penduduk	100 Persen	Rp 537.749.000,00	Rp 543.525.674,00	Rp 535.156.276,00	Rp 231.507.625,00						Rp769.256.625,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan				55 Lembaga	55 Lembaga	Rp 285.800.000,00	Rp 228.507.764,00	Rp 227.812.936,00	-Rp 57.987.064,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp239.690.428,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota				1 laporan	1 laporan	Rp 285.800.000,00	Rp 228.507.764,00	Rp 101.062.936,00	-Rp 184.737.064,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp112.940.428,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				-	15 Lembaga	Rp -	Rp -	Rp 126.750.000,00	Rp 126.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp126.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan				11 Lembaga	11 Lembaga	Rp 251.949.000,00	Rp 315.017.910,00	Rp 307.343.340,00	Rp 55.394.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp529.566.197,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota				-	4 Orang	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkatan/Kota				-	20 Orang	Rp -	Rp -	Rp 27.750.000,00	Rp 27.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp27.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				-	3 orang	Rp -	Rp -	Rp 8.800.000,00	Rp 8.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp8.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				-	6 Orang	Rp -	Rp -	Rp 23.520.000,00	Rp 23.520.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp23.520.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				-	1 orang	Rp -	Rp -	Rp 700.000,00	Rp 700.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				-	25 orang	Rp -	Rp -	Rp 49.663.650,00	Rp 49.663.650,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp49.663.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				145 orang	145 orang	Rp 251.949.000,00	Rp 315.017.910,00	Rp 195.909.690,00	-Rp 56.039.310,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp418.132.547,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
112	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)				78 Persen	76.7 Indeks	Rp 309.794.100,00	Rp 176.943.480,00	Rp 173.825.280,00	Rp 590.205.900,00						Rp900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak				20 Persen	20 Persen	Rp 41.337.500,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	-Rp 36.837.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp282.641.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Lembaga	75 Lembaga	Rp 41.337.500,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	-Rp 36.837.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp282.641.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak				60 Lembaga	60 Lembaga	Rp 268.456.600,00	Rp 172.443.480,00	Rp 169.325.280,00	-Rp 99.131.320,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp617.358.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				60 Orang	60 Orang	Rp 27.656.600,00	Rp 8.700.000,00	Rp 8.700.000,00	-Rp 18.956.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp440.358.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 162.300.000,00	Rp 152.718.480,00	Rp 149.600.280,00	-Rp 12.699.720,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan				10 Lembaga	10 Lembaga	Rp 78.500.000,00	Rp 11.025.000,00	Rp 11.025.000,00	-Rp 67.475.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
113	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)				100 Persen	94.38 Indeks	Rp 693.261.494,00	Rp 628.231.440,00	Rp 736.349.640,00	Rp 120.966.356,00						Rp814.227.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak				100 Persen	100 Persen	Rp 293.553.694,00	Rp 422.791.440,00	Rp 422.791.440,00	Rp 129.237.746,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp392.037.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				-	25 Orang	Rp -	Rp -	Rp 53.237.850,00	Rp 53.237.850,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp53.237.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Tingkat Kabupaten/Kota				-	13 Orang	Rp -	Rp -	Rp 31.800.000,00	Rp 31.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp31.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				-	1 Orang	Rp -	Rp -	Rp 700.000,00	Rp 700.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				-	20 Orang	Rp -	Rp -	Rp 27.750.000,00	Rp 27.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp27.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				-	6 Orang	Rp -	Rp -	Rp 23.520.000,00	Rp 23.520.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp23.520.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				160 Orang	160 Orang	Rp 293.553.694,00	Rp 422.791.440,00	Rp 283.253.590,00	-Rp 10.300.104,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp252.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak djamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	4 Orang	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota				-	6 Orang	Rp -	Rp -	Rp 1.530.000,00	Rp 1.530.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.530.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak				1 Lembaga	1 Lembaga	Rp 399.707.800,00	Rp 205.440.000,00	Rp 313.558.200,00	-Rp 86.149.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp422.190.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 120.452.800,00	Rp -	Rp -	-Rp 120.452.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp252.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 279.255.000,00	Rp 205.440.000,00	Rp 227.368.200,00	-Rp 51.886.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp63.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				-	50 Orang	Rp -	Rp -	Rp 86.190.000,00	Rp 86.190.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp86.190.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							Rp 7.571.685.319,00	Rp 11.785.573.448,76	Rp 11.904.260.846,76	Rp 4.332.575.527,76						Rp13.555.366.727,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
114	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				83 92 Nilai Nilai	81,75 92 Angka Indeks	Rp 6.413.834.859,00	Rp 5.936.155.656,76	Rp 6.064.052.538,76	Rp 439.305.868,00						Rp6.853.140.727,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Person	100 Person	Rp 118.387.500,00	Rp 114.862.500,00	Rp 116.837.500,00	-Rp 1.550.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Dinas P3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul	Rp22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 101.387.500,00	Rp 108.862.500,00	Rp 107.862.500,00	Rp 6.475.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp19.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	Rp 17.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 8.975.000,00	-Rp 8.025.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 Persen	100 %	Rp 5.733.585.751,00	Rp 5.366.506.917,66	Rp 5.369.184.417,66	-Rp 364.401.333,34			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Dinas P3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul	Rp5.307.640.727,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	Rp 5.590.275.751,00	Rp 5.229.946.917,66	Rp 5.229.946.917,66	-Rp 360.328.833,34	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp5.202.890.727,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 130.560.000,00	Rp 130.560.000,00	Rp 130.560.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp92.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	Rp 12.750.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 8.677.500,00	-Rp 4.072.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp12.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 %	Rp 193.608.658,00	Rp 82.684.853,10	Rp 148.694.493,10	-Rp 44.914.164,90			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Dinas P3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul	Rp573.997.970,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	Rp 3.510.400,00	Rp -	Rp -	-Rp 3.510.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	23 Paket	Rp 32.924.738,00	Rp 34.369.853,10	Rp 91.129.493,10	Rp 58.204.755,10	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 6.087.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 6.087.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	Rp 586.520,00	Rp -	Rp -	-Rp 586.520,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp48.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	Rp 21.500.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 21.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	Rp 124.117.000,00	Rp 44.715.000,00	Rp 53.965.000,00	-Rp 70.152.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp220.997.970,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.883.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 2.883.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.000.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 1.600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 212.935.300,00	Rp 241.686.786,00	Rp 249.543.778,00	Rp 36.608.478,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Dinas P3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul	Rp188.252.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	Rp 5.805.000,00	Rp 30.793.800,00	Rp 27.533.800,00	Rp 21.728.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	Rp 19.435.000,00	Rp 21.265.000,00	Rp 37.495.000,00	Rp 18.060.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	Rp 187.695.300,00	Rp 189.627.986,00	Rp 184.514.978,00	-Rp 3.180.322,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp83.252.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 155.317.650,00	Rp 130.414.600,00	Rp 179.792.350,00	Rp 24.474.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Dinas P3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul	Rp761.249.730,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	Rp 43.367.500,00	Rp -	Rp -	-Rp 43.367.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				102 Unit	85 Unit	Rp 111.950.150,00	Rp 105.560.500,00	Rp 129.939.250,00	Rp 17.989.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp390.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19 Unit	19 Unit	Rp -	Rp 24.854.100,00	Rp 49.853.100,00	Rp 49.853.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp311.249.730,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
115	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific fertility rate/ASFR 15-19)				10 Angka	7.18 Angka	Rp 60.799.900,00	Rp 42.250.000,00	Rp 269.650.000,00	Rp 265.500.100,00						Rp326.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan				12 Bulan	12 Bulan	Rp 20.399.900,00	Rp 22.050.000,00	Rp 22.050.000,00	Rp 1.650.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp23.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Kegiatan	12 Kegiatan	Rp 20.399.900,00	Rp 22.050.000,00	Rp 22.050.000,00	Rp 1.650.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp23.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan				100 Persen	100 Persen	Rp 40.400.000,00	Rp 20.200.000,00	Rp 247.600.000,00	Rp 207.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp302.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	1 Laporan	Rp -	Rp -	Rp 45.000.000,00	Rp 45.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				-	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Rp 182.400.000,00	Rp 182.400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp182.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 40.400.000,00	Rp 20.200.000,00	Rp 20.200.000,00	-Rp 20.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp75.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
116	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kehamilan Tidak Direncanakan Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)				11 77,2 Persen Persen	0.19 19.25 65.25 Persen Persen Persen	Rp 897.050.560,00	Rp 5.587.920.292,00	Rp 2.637.960.808,00	Rp 1.015.449.440,00						Rp1.912.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE Bangga Kencana				80 Persen	80 Persen	Rp 177.126.396,00	Rp 98.861.646,00	Rp 408.756.904,00	Rp 231.630.508,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp724.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	1 Laporan	Rp -	Rp -	Rp 314.500.000,00	Rp 314.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp314.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 177.126.396,00	Rp 98.861.646,00	Rp 94.256.904,00	-Rp 82.869.492,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp410.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB				100 Persen	100 Persen	Rp 382.132.400,00	Rp 245.321.000,00	Rp 267.821.000,00	-Rp 114.311.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp962.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				34 Orang	34 Orang	Rp 382.132.400,00	Rp 245.321.000,00	Rp 267.821.000,00	-Rp 114.311.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp962.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB				90 Persen	90 Persen	Rp 337.791.764,00	Rp 5.243.737.646,00	Rp 1.961.382.904,00	Rp 1.623.591.140,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp226.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	Rp 134.259.784,00	Rp 98.861.646,00	Rp 150.496.904,00	Rp 16.237.120,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				900 Orang	3100 Orang	Rp 21.900.000,00	Rp 4.926.876.000,00	Rp 1.592.886.000,00	Rp 1.570.986.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB- KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				1 Laporan	1 Laporan	Rp 156.631.980,00	Rp 173.000.000,00	Rp 173.000.000,00	Rp 16.368.020,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				25 Orang	45 Orang	Rp 25.000.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
117	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja				85,5 Persen	73,70 85,5 89,95 Persen Persen	Rp 200.000.000,00	Rp 219.247.500,00	Rp 2.932.597.500,00	Rp 4.263.426.000,00						Rp4.463.426.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Capaian PelaksanaanKegiatan Orientasi danEvaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R				100 Persen	100 Persen	Rp 200.000.000,00	Rp 219.247.500,00	Rp 252.997.500,00	Rp 52.997.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp1.783.826.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				12 Laporan / Dokumen	12 Laporan / Dokumen	Rp 200.000.000,00	Rp 219.247.500,00	Rp 219.247.500,00	Rp 19.247.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp1.750.076.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				-	10 Kelompok	Rp -	Rp -	Rp 33.750.000,00	Rp 33.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp33.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya				-	100 Persen	Rp -	Rp -	Rp 2.679.600.000,00	Rp 2.679.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Rp2.679.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	1 laporan	Rp -	Rp -	Rp 2.679.600.000,00	Rp 2.679.600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.679.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 400.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Rp -	-Rp 400.000.000,00						Rp300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
118	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan				42,67 Persen	0,35 Persen	Rp 400.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan				4 Desa	4 Desa	Rp 400.000.000,00	Rp 400.000.000,00	-	-Rp 400.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.22.08.5.07.0015	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya				100 Orang	0 Orang	Rp 400.000.000,00	Rp 400.000.000,00	-	-Rp 400.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							Rp 39.768.609.934,00	Rp 30.809.802.351,37	Rp 25.255.001.351,37	-Rp 14.513.608.582,63						Rp36.260.462.606,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 149.801.000,00	Rp 149.801.000,00	-	-Rp 149.801.000,00						Rp150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							Rp 149.801.000,00	Rp 149.801.000,00	-	-Rp 149.801.000,00						Rp150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
119	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten				20 persen	0,5 ha	Rp 149.801.000,00	Rp 149.801.000,00	-	Rp 199.000,00						Rp150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian kinerja Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				1 Laporan	0 Persen	Rp 149.801.000,00	Rp 149.801.000,00	-	-Rp 149.801.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis				1 Dokumen	0 Dokumen	Rp 149.801.000,00	Rp 149.801.000,00	-	-Rp 149.801.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 1.861.897.736,00	Rp 1.360.418.800,00	Rp 1.121.418.564,00	-Rp 740.479.172,00						Rp2.002.604.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							Rp 1.621.897.736,00	Rp 1.120.418.800,00	Rp 1.121.418.564,00	-Rp 500.479.172,00						Rp1.552.604.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
120	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang berfungsi dengan baik				78,20 Persen	78,20 Persen	Rp 37.093.000,00	Rp 15.165.000,00	Rp 15.165.000,00	-Rp 7.093.000,00						Rp30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional				2 Unit	2 Unit	Rp 37.093.000,00	Rp 15.165.000,00	Rp 15.165.000,00	-Rp 21.928.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	1 Laporan	Rp 37.093.000,00	Rp 15.165.000,00	Rp 15.165.000,00	-Rp 21.928.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
121	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan				54,08 Persen	54,08 Persen	Rp 1.374.705.236,00	Rp 984.940.800,00	Rp 985.940.564,00	-Rp 263.101.236,00						Rp1.111.604.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya				100 Persen	100 Persen	Rp 213.054.336,00	Rp 137.386.100,00	Rp 138.386.064,00	-Rp 74.668.272,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				18 Unit	18 Unit	Rp 37.295.900,00	Rp 11.339.300,00	Rp 11.339.300,00	-Rp 25.956.600,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				12 Laporan	1 Laporan	Rp 134.996.000,00	Rp 84.896.800,00	Rp 84.896.800,00	-Rp 50.099.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				3 Dokumen	1 Dokumen	Rp 40.762.436,00	Rp 41.150.000,00	Rp 42.149.964,00	Rp 1.387.528,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)				100 Persen	100 Persen	Rp 200.024.900,00	Rp 103.399.700,00	Rp 103.399.700,00	-Rp 96.625.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp795.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				70 Ton	6,5 Ton	Rp 196.625.000,00	Rp 99.999.800,00	Rp 99.999.800,00	-Rp 96.625.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				51851 Ton	64.361 Ton	Rp 3.399.900,00	Rp 3.399.900,00	Rp 3.399.900,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp95.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi energi dan protein per kapita per hari				2058 Kkal /kap/hari	2058 Kkal /kap/hari	Rp 961.626.000,00	Rp 744.155.000,00	Rp 744.154.800,00	-Rp 217.471.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp96.604.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	Rp 15.104.000,00	Rp 9.304.000,00	Rp 9.304.000,00	-Rp 5.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp16.604.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4 Laporan	1 Laporan	Rp 946.522.000,00	Rp 734.851.000,00	Rp 734.850.800,00	-Rp 211.671.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
122	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan				1,33 Persen	1,33 Persen	Rp 140.099.500,00	Rp 90.138.000,00	Rp 90.138.000,00	Rp 184.900.500,00						Rp325.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan pangan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 19.999.500,00	Rp 13.774.500,00	Rp 13.774.500,00	-Rp 6.225.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 19.999.500,00	Rp 13.774.500,00	Rp 13.774.500,00	-Rp 6.225.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya kerawanan pangan				100 Persen	100 Persen	Rp 120.100.000,00	Rp 76.363.500,00	Rp 76.363.500,00	-Rp 43.736.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp255.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	1 Dokumen	Rp 98.200.000,00	Rp 60.463.500,00	Rp 60.463.500,00	-Rp 37.736.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp245.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	Rp 21.900.000,00	Rp 15.900.000,00	Rp 15.900.000,00	-Rp 6.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
123	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan				89,40 Persen	89,40 Persen	Rp 70.000.000,00	Rp 30.175.000,00	Rp 30.175.000,00	Rp 16.000.000,00						Rp86.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar				100 Persen	100 Persen	Rp 70.000.000,00	Rp 30.175.000,00	Rp 30.175.000,00	-Rp 39.825.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp86.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	Rp 50.000.000,00	Rp 24.525.000,00	Rp 24.525.000,00	-Rp 25.475.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp18.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				3 Dokumen	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Rp 5.650.000,00	Rp 5.650.000,00	-Rp 14.350.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp68.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp -	-Rp 240.000.000,00						Rp450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
124	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian				20,67 Persen	20 Persen	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp -	Rp 210.000.000,00						Rp450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian kinerja pengembangan lumbung mataraman				100 Persen	4 Unit	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp -	-Rp 240.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.22.08.5.06.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman				2 Laporan	0 Laporan	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp -	-Rp 240.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							Rp 37.756.911.198,00	Rp 29.299.582.551,37	Rp 24.133.582.787,37	-Rp 13.623.328.410,63						Rp34.107.858.606,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							Rp 37.756.911.198,00	Rp 29.299.582.551,37	Rp 24.133.582.787,37	-Rp 13.623.328.410,63						Rp34.107.858.606,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
125	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				86,42 86,85 Angka Indeks	86,42 86,85 Angka Indeks	Rp 29.770.908.498,00	Rp 24.675.985.287,37	Rp 19.486.038.369,37	-Rp 4.702.939.850,00						Rp25.067.968.648,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				100 Persen	86,42 Angka	Rp 110.087.500,00	Rp 75.500.000,00	Rp 67.300.000,00	-Rp 42.787.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 63.725.000,00	Rp 34.500.000,00	Rp 34.500.000,00	-Rp 29.225.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	5 Laporan	Rp 46.362.500,00	Rp 41.000.000,00	Rp 32.800.000,00	-Rp 13.562.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan capaian realisasi keuangan				100 Persen	5 Persen	Rp 26.547.689.310,00	Rp 22.536.397.862,17	Rp 17.336.397.862,17	-Rp 9.211.291.447,83			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp22.730.269.846,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				191 Orang/ bulan	125 Orang/ bulan	Rp 26.340.959.310,00	Rp 22.344.667.862,17	Rp 17.144.667.862,17	-Rp 9.196.291.447,83	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp22.500.269.846,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12 Dokumen	Rp 193.980.000,00	Rp 187.980.000,00	Rp 187.980.000,00	-Rp 6.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	12 Laporan	Rp 12.750.000,00	Rp 3.750.000,00	Rp 3.750.000,00	-Rp 9.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.09.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan capaian realisasi pendapatan				100 Persen	6 Persen	Rp 15.625.000,00	Rp 7.200.000,00	Rp 7.200.000,00	-Rp 8.425.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 15.625.000,00	Rp 7.200.000,00	Rp 7.200.000,00	-Rp 8.425.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				100 Persen	100 Persen	Rp 40.762.500,00	Rp 20.850.000,00	Rp 18.450.000,00	-Rp 22.312.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	12 Dokumen	Rp 40.762.500,00	Rp 20.850.000,00	Rp 18.450.000,00	-Rp 22.312.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Nilai PPID				100 Persen	100 Angka	Rp 1.121.045.430,00	Rp 588.828.223,20	Rp 611.161.637,20	-Rp 509.883.792,80			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp474.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp 16.329.900,00	Rp 16.329.900,00	Rp 13.782.710,00	-Rp 2.547.190,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp 330.652.500,00	Rp 94.927.993,20	Rp 104.939.597,20	-Rp 225.712.902,80	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp 66.227.530,00	Rp 23.036.330,00	Rp 30.532.330,00	-Rp 35.695.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp 39.875.000,00	Rp 38.910.000,00	Rp 38.010.000,00	-Rp 1.865.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 5.000.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 1.250.000,00	-Rp 3.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp5.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	12 Laporan	Rp 34.000.000,00	Rp 20.250.000,00	Rp 20.250.000,00	-Rp 13.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	12 Laporan	Rp 625.053.000,00	Rp 392.660.000,00	Rp 400.933.000,00	-Rp 224.120.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp219.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 3.907.500,00	Rp 1.464.000,00	Rp 1.464.000,00	-Rp 2.443.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.09.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 42.100.000,00	Rp 12.840.000,00	Rp 12.840.000,00	-Rp 29.260.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	Rp 42.100.000,00	Rp 12.840.000,00	Rp 12.840.000,00	-Rp 29.260.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang				100 Persen	100 Persen	Rp 814.380.858,00	Rp 683.830.700,00	Rp 686.366.868,00	-Rp 128.013.990,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp787.629.802,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12 Laporan	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 64.480.000,00	Rp 62.784.000,00	Rp 56.815.000,00	-Rp 7.665.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp170.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 80.486.000,00	Rp 40.971.000,00	Rp 35.943.000,00	-Rp 44.543.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp101.629.802,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	12 Laporan	Rp 663.414.858,00	Rp 574.075.700,00	Rp 587.608.868,00	-Rp 75.805.990,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp510.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 1.079.217.900,00	Rp 750.538.502,00	Rp 746.322.002,00	-Rp 332.895.898,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp784.969.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	13 Unit	Rp 126.955.400,00	Rp 65.190.400,00	Rp 64.923.900,00	-Rp 62.031.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp175.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				190 Unit	162 Unit	Rp 144.153.600,00	Rp 92.691.100,00	Rp 88.741.100,00	-Rp 55.412.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	Rp 808.108.900,00	Rp 592.657.002,00	Rp 592.657.002,00	-Rp 215.451.898,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp534.969.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
126	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana pertanian				49,63 Persen	49,63 Persen	Rp 2.982.612.438,00	Rp 2.152.976.720,00	Rp 2.184.426.400,00	Rp 1.214.339.032,00						Rp4.196.951.470,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran				38 Unit	43 Unit	Rp 1.551.405.452,00	Rp 859.942.800,00	Rp 866.192.548,00	-Rp 685.212.904,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp775.061.110,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2 Laporan	3 Laporan	Rp 291.647.000,00	Rp 196.227.300,00	Rp 196.227.300,00	-Rp 95.419.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.259.758.452,00	Rp 663.715.500,00	Rp 669.965.248,00	-Rp 589.793.204,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp730.061.110,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi benih padi unggul bersertifikat				22,15 Persen	22,15 Persen	Rp 1.099.999.866,00	Rp 826.374.800,00	Rp 851.574.732,00	-Rp 248.425.134,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negaradan mendorong kemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp1.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 1.099.999.866,00	Rp 826.374.800,00	Rp 851.574.732,00	-Rp 248.425.134,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negaradan mendorong kemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan populasi ternak (ternak: sapi potong+sapi perah+kambing+domba+babi+kerbau+kuda)				5 Persen	5 Persen	Rp 331.207.120,00	Rp 466.659.120,00	Rp 466.659.120,00	Rp 135.452.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp2.321.890.360,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				15 Ton	15 Ton	Rp 71.160.500,00	Rp 71.160.500,00	Rp 71.160.500,00	-Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp167.670.240,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				39000 Ekor	39000 Ekor	Rp 260.046.620,00	Rp 395.498.620,00	Rp 395.498.620,00	Rp 135.452.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp2.154.220.120,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
127	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B				12831 ha	12831 ha	Rp 1.822.333.936,00	Rp 234.314.300,00	Rp 235.314.164,00	-Rp 7.708.936,00						Rp1.814.625.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul				13970 ha	13970 ha	Rp 185.836.436,00	Rp 135.214.300,00	Rp 136.214.164,00	-Rp 49.622.272,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp124.625.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2 Laporan	2 Laporan	Rp 174.523.436,00	Rp 128.464.300,00	Rp 129.464.164,00	-Rp 45.059.272,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp54.625.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 11.313.000,00	Rp 6.750.000,00	Rp 6.750.000,00	-Rp 4.563.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan prasarana pertanian				27 Unit	17 Unit	Rp 1.635.435.000,00	Rp 99.100.000,00	Rp 99.100.000,00	-Rp 1.536.335.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp1.690.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	Rp 125.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp170.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	Rp 125.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp170.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	Rp 125.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	Rp 125.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				19 Unit	1 Unit	Rp 1.634.935.000,00	Rp 99.100.000,00	Rp 99.100.000,00	-Rp 1.535.835.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.050.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan sumber bibit ternak				100 Persen	100 Persen	Rp 1.062.500,00	Rp -	Rp -	-Rp 1.062.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				2 Laporan	1 Laporan	Rp 1.062.500,00	Rp -	Rp -	-Rp 1.062.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
128	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)				47,39 8,18 Persen	47,39 8,18 Persen	Rp 1.538.517.568,00	Rp 1.320.364.044,00	Rp 1.365.764.426,00	-Rp 270.642.320,00						Rp1.267.875.248,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah pengendalian kasus penyakit hewan menular				100 Persen	100 Persen	Rp 829.867.724,00	Rp 865.652.144,00	Rp 870.652.020,00	Rp 40.784.296,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp548.505.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	Rp 829.867.724,00	Rp 865.652.144,00	Rp 870.652.020,00	Rp 40.784.296,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp548.505.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan pemotongan hewan Dalam Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	Rp 401.627.544,00	Rp 201.956.000,00	Rp 202.355.856,00	-Rp 199.271.688,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp303.370.248,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				2 laporan	2 laporan	Rp 133.178.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 133.178.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 268.449.544,00	Rp 201.956.000,00	Rp 202.355.856,00	-Rp 66.093.688,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp303.370.248,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan kasus penyakit hewan menular				2 Persen	2 Persen	Rp 300.009.800,00	Rp 204.786.300,00	Rp 244.786.950,00	-Rp 55.222.850,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp280.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	Rp 300.009.800,00	Rp 204.786.300,00	Rp 244.786.950,00	-Rp 55.222.850,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp280.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan produk peternakan yang memenuhi standar asuh				1 Persen	1 Persen	Rp 6.162.500,00	Rp 47.969.600,00	Rp 47.969.600,00	Rp 41.807.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp86.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	Rp 850.000,00	Rp 47.969.600,00	Rp 47.969.600,00	Rp 47.119.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp86.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 5.312.500,00	Rp -	Rp -	-Rp 5.312.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Peningkatan unit usaha peternakan yang memenuhi persyaratan teknis kesejahteraan hewan				16 Persen	16 Persen	Rp 850.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 850.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan				1 Unit	1 Unit	Rp 850.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 850.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
129	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan bencana pertanian				100 Persen	100 Persen	Rp 97.900.000,00	Rp 91.605.000,00	Rp 91.605.000,00	Rp 497.100.000,00						Rp595.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Serangan hama yang ditangan				100 Persen	100 Persen	Rp 97.900.000,00	Rp 91.605.000,00	Rp 91.605.000,00	-Rp 6.295.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp595.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 Ha	100 Ha	Rp 97.900.000,00	Rp 91.605.000,00	Rp 91.605.000,00	-Rp 6.295.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp595.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
130	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan				100 Persen	100 Persen	Rp 74.750.800,00	Rp 6.170.000,00	Rp 6.170.000,00	-Rp 42.750.800,00						Rp32.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi usaha pertanian				100 Persen	100 Persen	Rp 19.910.000,00	Rp 6.170.000,00	Rp 6.170.000,00	-Rp 13.740.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	20 Laporan	Rp 19.910.000,00	Rp 6.170.000,00	Rp 6.170.000,00	-Rp 13.740.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penerbitan rekomendasi usaha peternakan				100 Persen	100 Persen	Rp 54.840.800,00	Rp -	Rp -	-Rp 54.840.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				12 Dokumen	1 Dokumen	Rp 54.840.800,00	Rp -	Rp -	-Rp 54.840.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
131	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun				6,52 Ton/Ha	6,33 Ton/Ha	Rp 1.469.887.958,00	Rp 818.167.200,00	Rp 764.264.428,00	-Rp 336.449.718,00						Rp1.133.438.240,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani				13 Persen	13 Persen	Rp 1.469.887.958,00	Rp 818.167.200,00	Rp 764.264.428,00	-Rp 705.623.530,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp1.133.438.240,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				17 Unit	17 Unit	Rp 309.991.736,00	Rp 231.060.900,00	Rp 228.560.764,00	-Rp 81.430.972,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp315.323.240,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				17 Unit	17 Unit	Rp 147.678.500,00	Rp 56.269.000,00	Rp 56.269.000,00	-Rp 91.409.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp232.177.380,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				7 Unit	7 Unit	Rp 10.461.500,00	Rp 3.724.000,00	Rp 3.724.000,00	-Rp 6.737.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp87.947.620,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				46 Unit	46 Unit	Rp 761.050.500,00	Rp 485.313.300,00	Rp 326.528.700,00	-Rp 434.521.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian				1 Dokumen	5 Dokumen	Rp 240.705.722,00	Rp 41.800.000,00	Rp 149.181.964,00	-Rp 91.523.758,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp297.990.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)							Rp 17.259.566.485,00	Rp 16.754.217.838,07	Rp 13.036.564.138,07	-Rp 4.223.002.346,93						Rp11.941.916.560,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 852.266.236,00	Rp 686.293.414,00	Rp 347.035.414,00	-Rp 505.230.822,00						Rp1.520.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							Rp 852.266.236,00	Rp 686.293.414,00	Rp 347.035.414,00	-Rp 505.230.822,00						Rp1.520.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
132	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan				100 persen	100 persen	Rp 36.100.000,00	Rp 8.843.800,00	Rp 8.843.800,00	Rp 13.900.000,00						Rp50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten / kota				100 persen	100 persen	Rp 36.100.000,00	Rp 8.843.800,00	Rp 8.843.800,00	-Rp 27.256.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 36.100.000,00	Rp 8.843.800,00	Rp 8.843.800,00	-Rp 27.256.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
133	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				90 persen	90 persen	Rp 477.398.236,00	Rp 338.681.614,00	Rp 338.191.614,00	Rp 592.601.764,00						Rp1.070.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	capaian kinerja kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kabupaten / kota				100 persen	100 persen	Rp 132.397.700,00	Rp 224.400.000,00	Rp 224.400.000,00	Rp 92.002.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp280.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 101.047.700,00	Rp 105.300.000,00	Rp 105.300.000,00	Rp 4.252.300,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp180.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 31.350.000,00	Rp 119.100.000,00	Rp 119.100.000,00	Rp 87.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	capaian kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten / kota				100 persen	100 persen	Rp 73.419.300,00	Rp 23.392.600,00	Rp 23.392.600,00	-Rp 50.026.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp220.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 40.369.300,00	Rp 13.240.000,00	Rp 13.240.000,00	-Rp 27.129.300,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp170.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 33.050.000,00	Rp 10.152.600,00	Rp 10.152.600,00	-Rp 22.897.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	capaian kinerja kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten / kota				100 persen	100 persen	Rp 271.581.236,00	Rp 90.889.014,00	Rp 90.399.014,00	-Rp 181.182.222,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp570.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 103.196.836,00	Rp 37.607.884,00	Rp 35.607.884,00	-Rp 67.588.952,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 168.384.400,00	Rp 53.281.130,00	Rp 54.791.130,00	-Rp 113.593.270,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp270.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
134	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten				100 persen	0 persen	Rp 338.768.000,00	Rp 338.768.000,00	Rp -	Rp 61.232.000,00						Rp400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				90 persen	0 persen	Rp 184.531.000,00	Rp 184.531.000,00	Rp -	-Rp 184.531.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.13.5.01.0007	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten				1 Dokumen	0 Dokumen	Rp 184.531.000,00	Rp 184.531.000,00	Rp -	-Rp 184.531.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	1.03.13.5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Capaian Kinerja Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis				100 persen	0 persen	Rp 154.237.000,00	Rp 154.237.000,00	Rp -	-Rp 154.237.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang				2 Dokumen	0 Dokumen	Rp 154.237.000,00	Rp 154.237.000,00	Rp -	-Rp 154.237.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 16.407.300.249,00	Rp 16.067.924.424,07	Rp 12.689.528.724,07	-Rp 3.717.771.524,93						Rp10.421.916.560,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							Rp 16.407.300.249,00	Rp 16.067.924.424,07	Rp 12.689.528.724,07	-Rp 3.717.771.524,93						Rp10.421.916.560,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
135	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				82,5 86,50 Angka Indeks	82,5 86,50 Angka Indeks	Rp 7.164.142.808,00	Rp 6.945.447.144,07	Rp 6.980.847.144,07	-Rp 834.501.248,00						Rp6.329.641.560,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 persen	100 persen	Rp 20.673.800,00	Rp 4.953.100,00	Rp 5.936.100,00	-Rp 14.737.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 10.334.400,00	Rp 2.479.800,00	Rp 2.969.800,00	-Rp 7.364.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	Rp 10.339.400,00	Rp 2.473.300,00	Rp 2.966.300,00	-Rp 7.373.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah				100 persen	100 persen	Rp 6.391.176.510,00	Rp 6.055.504.271,07	Rp 6.053.624.271,07	-Rp 337.552.238,93			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	ASN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Rp5.530.571.322,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				588 Orang/bulan	588 Orang/bulan	Rp 6.167.885.434,00	Rp 5.924.304.071,07	Rp 5.924.304.071,07	-Rp 243.581.362,93	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp5.270.571.322,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 204.347.876,00	Rp 128.650.200,00	Rp 125.655.000,00	-Rp 78.692.876,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp240.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.10.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	Rp 18.943.200,00	Rp 2.550.000,00	Rp 3.665.200,00	-Rp 15.278.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 persen	100 persen	Rp 42.193.436,00	Rp 33.600.000,00	Rp 33.600.000,00	-Rp 8.593.436,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Rp30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 42.193.436,00	Rp 33.600.000,00	Rp 33.600.000,00	-Rp 8.593.436,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				100 persen	100 persen	Rp 239.676.346,00	Rp 66.459.823,00	Rp 77.940.911,00	-Rp 161.735.435,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Rp401.898.953,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	Rp 5.581.070,00	Rp 2.728.890,00	Rp 2.728.890,00	-Rp 2.852.180,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	Rp 56.262.040,00	Rp 25.575.533,00	Rp 25.575.621,00	-Rp 30.686.419,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp128.198.953,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	Rp 23.161.400,00	Rp 7.123.400,00	Rp 7.948.400,00	-Rp 15.213.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 20.721.600,00	Rp 4.251.000,00	Rp 4.521.000,00	-Rp 16.200.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp20.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 1.500.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 1.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp1.200.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.10.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	Rp 40.062.436,00	Rp 3.500.000,00	Rp 6.000.000,00	-Rp 34.062.436,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp32.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	48 Laporan	Rp 90.823.000,00	Rp 22.601.000,00	Rp 30.487.000,00	-Rp 60.336.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.564.800,00	Rp 680.000,00	Rp 680.000,00	-Rp 884.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	Rp 228.714.616,00	Rp 622.170.000,00	Rp 644.517.062,00	Rp 415.802.446,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Rp178.238.720,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	-Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp19.200.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	Rp 23.840.000,00	Rp 11.970.000,00	Rp 14.410.000,00	-Rp 9.430.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	14 Laporan	Rp 198.874.616,00	Rp 604.200.000,00	Rp 624.107.062,00	Rp 425.232.446,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp139.038.720,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	Rp 241.708.100,00	Rp 162.759.950,00	Rp 165.228.800,00	-Rp 76.479.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	Rp168.932.565,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	Rp 233.477.800,00	Rp 160.957.550,00	Rp 163.172.000,00	-Rp 70.305.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp150.192.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.10.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	Rp 8.230.300,00	Rp 1.802.400,00	Rp 2.056.800,00	-Rp 6.173.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp18.740.565,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
136	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi				100 100 persen persen	100 100 persen persen	Rp 4.404.500,00	Rp 30.206.100,00	Rp 25.206.100,00	Rp 5.595.500,00						Rp10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				100 persen	100 persen	Rp 4.404.500,00	Rp 30.206.100,00	Rp 25.206.100,00	Rp 20.801.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Berita Acara	5 Berita Acara	Rp 4.404.500,00	Rp 30.206.100,00	Rp 25.206.100,00	Rp 20.801.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
137	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Cakupan Pengelolaan Penggunaan Tanah				100 90 persen Persen	100 90 persen Persen	Rp 270.865.441,00	Rp 124.383.680,00	Rp 119.383.680,00	Rp 129.134.559,00						Rp400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	capaian kinerja kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten / kota				100 persen	100 persen	Rp 270.865.441,00	Rp 124.383.680,00	Rp 119.383.680,00	-Rp 151.481.761,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				45 Laporan	45 Laporan	Rp 189.651.041,00	Rp 110.056.500,00	Rp 105.056.500,00	-Rp 84.594.541,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp270.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 81.214.400,00	Rp 14.327.180,00	Rp 14.327.180,00	-Rp 66.887.220,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp130.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
138	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten				-	64,89 64,89 persen Persen	Rp 8.967.887.500,00	Rp 8.967.887.500,00	Rp 5.564.091.800,00	-Rp 5.285.612.500,00						Rp3.682.275.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Cakupan kinerja pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				-	64,89 persen 90 persen	Rp 7.364.261.500,00	Rp 7.364.261.500,00	Rp 4.589.926.800,00	-Rp 2.774.334.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp3.360.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 7.143.521.000,00	Rp 7.143.521.000,00	Rp 4.245.263.800,00	-Rp 2.898.257.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp3.010.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 220.740.500,00	Rp 220.740.500,00	Rp 344.663.000,00	Rp 123.922.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
140	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				64,89 persen	64,89 persen	Rp 8.967.887.500,00	Rp 8.967.887.500,00	Rp 5.564.091.800,00	-Rp 5.285.612.500,00						Rp3.682.275.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Cakupan kinerja kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				100 persen	100 persen	Rp 1.603.626.000,00	Rp 1.603.626.000,00	Rp 974.165.000,00	-Rp 629.461.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp322.275.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 195.000.000,00	Rp 195.000.000,00	Rp 89.165.000,00	-Rp 105.835.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp122.275.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				5 Berita Acara	5 Berita Acara	Rp 1.408.626.000,00	Rp 1.408.626.000,00	Rp 885.000.000,00	-Rp 523.626.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							Rp 50.812.311.509,00	Rp 48.656.417.618,00	Rp 50.471.478.077,00	-Rp 340.833.432,00						Rp50.113.215.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 605.467.000,00	Rp 605.467.000,00	Rp 250.000.000,00	-Rp 355.467.000,00						Rp605.467.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							Rp 605.467.000,00	Rp 605.467.000,00	Rp 250.000.000,00	-Rp 355.467.000,00						Rp605.467.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
141	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan				1 Kawasan	1 Kawasan	Rp 605.467.000,00	Rp 605.467.000,00	Rp 250.000.000,00	Rp -						Rp605.467.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				100 Persen	100 Persen	Rp 605.467.000,00	Rp 605.467.000,00	Rp 250.000.000,00	-Rp 355.467.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kab. Bantul	Rp605.467.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 605.467.000,00	Rp 605.467.000,00	Rp 250.000.000,00	-Rp 355.467.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp605.467.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 50.206.844.509,00	Rp 48.050.950.618,00	Rp 50.221.478.077,00	Rp 14.633.568,00						Rp49.507.748.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							Rp 50.206.844.509,00	Rp 48.050.950.618,00	Rp 50.221.478.077,00	Rp 14.633.568,00						Rp49.507.748.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
142	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				80,75 84 90,53 Nilai Indeks	80,75 90,53 Angka Indeks	Rp 18.784.390.595,00	Rp 16.697.864.580,00	Rp 16.342.945.664,00	Rp 673.710.960,00						Rp19.458.101.555,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 15.110.000,00	Rp 15.110.000,00	Rp 9.710.000,00	-Rp 5.400.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kab. Bantul	Rp20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 8.310.000,00	Rp 8.310.000,00	Rp 4.360.000,00	-Rp 3.950.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	Rp 6.800.000,00	Rp 6.800.000,00	Rp 5.350.000,00	-Rp 1.450.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 Persen	-	Rp 11.887.815.316,00	Rp 10.614.478.095,00	Rp 10.610.578.095,00	-Rp 1.277.237.221,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kab. Bantul	Rp11.888.240.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	Rp 11.690.340.316,00	Rp 10.419.128.095,00	Rp 10.419.128.095,00	-Rp 1.271.212.221,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp11.690.340.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 191.100.000,00	Rp 191.100.000,00	Rp 187.200.000,00	-Rp 3.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp189.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	Rp 6.375.000,00	Rp 4.250.000,00	Rp 4.250.000,00	-Rp 2.125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian pengelolaan retribusi daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 6.375.000,00	Rp 5.312.500,00	Rp 5.100.000,00	-Rp 1.275.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kab. Bantul	Rp6.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 6.375.000,00	Rp 5.312.500,00	Rp 5.100.000,00	-Rp 1.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp6.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor				100 Persen	100 Persen	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp -			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Kab. Bantul	Rp3.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp3.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrsi Umum				100 Persen	100 Persen	Rp 659.335.100,00	Rp 533.729.100,00	Rp 567.810.100,00	-Rp 91.525.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kab. Bantul	Rp883.068.827,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	Rp 30.119.700,00	Rp 30.119.700,00	Rp 30.119.700,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp15.426.990,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp 155.945.200,00	Rp 109.649.200,00	Rp 134.649.200,00	-Rp 21.296.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp229.251.811,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	Rp 35.984.200,00	Rp 35.984.200,00	Rp 35.984.200,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp39.782.310,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp 170.480.000,00	Rp 186.260.000,00	Rp 186.260.000,00	Rp 15.780.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp231.175.716,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	Rp 10.000.000,00	Rp 6.500.000,00	Rp 7.250.000,00	-Rp 2.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	Rp 235.906.000,00	Rp 149.216.000,00	Rp 157.547.000,00	-Rp 78.359.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp288.032.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp3.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	-Rp 4.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang				100 Persen	100 Persen	Rp 2.842.695.927,00	Rp 2.372.137.108,00	Rp 1.906.676.580,00	-Rp 936.019.347,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kab. Bantul	Rp3.390.361.412,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 2.135.614.687,00	Rp 1.638.312.408,00	Rp 1.161.644.028,00	-Rp 973.970.659,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp2.750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 47.943.000,00	Rp 47.943.000,00	Rp 44.943.000,00	-Rp 3.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 659.138.240,00	Rp 685.881.700,00	Rp 700.089.552,00	Rp 40.951.312,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp595.361.412,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 3.369.659.252,00	Rp 3.153.697.777,00	Rp 3.239.670.889,00	-Rp 129.988.363,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kab. Bantul	Rp3.266.656.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	Rp 167.286.500,00	Rp 129.602.000,00	Rp 129.591.600,00	-Rp 37.694.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp167.316.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				85 Unit	85 Unit	Rp 2.876.184.752,00	Rp 2.834.685.277,00	Rp 2.836.152.752,00	-Rp 40.032.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp2.750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	Rp 91.860.000,00	Rp 91.860.000,00	Rp 83.620.000,00	-Rp 8.240.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp49.340.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026																			
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	3 Unit	Rp 234.328.000,00	Rp 97.550.500,00	Rp 190.306.537,00	-Rp 44.021.463,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
143	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti				100 Persen	100 Persen	Rp 114.350.000,00	Rp 394.650.000,00	Rp 393.950.000,00	-Rp 6.350.000,00						Rp108.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)				100 Persen	100 Persen	Rp 114.350.000,00	Rp 394.650.000,00	Rp 393.950.000,00	Rp 279.600.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kab. Bantul	Rp108.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 106.600.000,00	Rp 77.150.000,00	Rp 76.800.000,00	-Rp 29.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp108.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	2 Dokumen	Rp 7.750.000,00	Rp 317.500.000,00	Rp 317.150.000,00	Rp 309.400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
144	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Persentase Peningkatan Status Indeks Pencemar (IP)				11,11 Persen	11,11 Persen	Rp 2.022.730.022,00	Rp 2.688.905.918,00	Rp 2.724.490.786,00	-Rp 243.094.598,00						Rp1.779.635.424,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan				80 Persen	80 Persen	Rp 1.797.765.222,00	Rp 2.486.867.018,00	Rp 2.523.101.886,00	Rp 725.336.664,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kab. Bantul	Rp1.454.635.424,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 1.136.075.434,00	Rp 1.953.770.710,00	Rp 1.947.521.566,00	Rp 811.446.132,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp1.046.260.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 131.350.000,00	Rp 167.556.000,00	Rp 167.206.000,00	Rp 35.856.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp102.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup				100 Persen	100 Persen	Rp 24.999.800,00	Rp 22.024.800,00	Rp 22.024.800,00	-Rp 2.975.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kab. Bantul	Rp25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	Rp 24.999.800,00	Rp 22.024.800,00	Rp 22.024.800,00	-Rp 2.975.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup				50 Persen	50 Persen	Rp 199.965.000,00	Rp 180.014.100,00	Rp 179.364.100,00	-Rp 20.600.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kab. Bantul	Rp300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 80.000.000,00	Rp 70.499.000,00	Rp 70.499.000,00	-Rp 9.501.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp 119.965.000,00	Rp 109.515.100,00	Rp 108.865.100,00	-Rp 11.099.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
145	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan				38,4 Persen	38,4 Persen	Rp 7.148.241.564,00	Rp 4.568.965.080,00	Rp 4.478.628.080,00	-Rp 442.286.642,00						Rp6.705.954.922,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH kawasan perkotaan				18 Persen	18 Persen	Rp 7.148.241.564,00	Rp 4.568.965.080,00	Rp 4.478.628.080,00	-Rp 2.669.613.484,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kab. Bantul	Rp6.705.954.922,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 150.000.000,00	Rp 9.075.000,00	Rp 9.075.000,00	-Rp 140.925.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				130 Orang	130 Orang	Rp 250.000.000,00	Rp 291.178.480,00	Rp 318.278.480,00	Rp 68.278.480,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				3 Unit	3 Unit	Rp 3.171.975.000,00	Rp 1.079.700.000,00	Rp 789.193.000,00	-Rp 2.382.782.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp2.843.040.520,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
146	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3				38,32 persen	38,32 persen	Rp 13.600.000,00	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	Rp 9.400.000,00						Rp23.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3				100 Persen	100 Persen	Rp 13.600.000,00	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	-Rp 5.200.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kab. Bantul	Rp23.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan				4 Usaha	16 Usaha	Rp 7.600.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	-Rp 5.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
147	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan				32,18 Persen	32,18 Persen	Rp 138.664.872,00	Rp 126.673.000,00	Rp 103.980.528,00	-Rp 18.840.000,00						Rp119.824.872,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup				100 Persen	100 Persen	Rp 138.664.872,00	Rp 126.673.000,00	Rp 103.980.528,00	-Rp 34.684.344,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kab. Bantul	Rp119.824.872,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				10 Dokumen	10 Dokumen	Rp 77.574.872,00	Rp 80.700.000,00	Rp 80.355.528,00	Rp 2.780.656,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp62.824.872,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Orang	1 Orang	Rp 28.090.000,00	Rp 10.348.000,00	Rp -	-Rp 28.090.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				48 Badan Usaha	48 Badan Usaha	Rp 33.000.000,00	Rp 35.625.000,00	Rp 23.625.000,00	-Rp 9.375.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
148	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup				5 persen	5 persen	Rp 163.190.000,00	Rp 154.517.500,00	Rp 154.517.500,00	-Rp 18.190.000,00						Rp145.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup				25 Lembaga	25 Lembaga	Rp 163.190.000,00	Rp 154.517.500,00	Rp 154.517.500,00	-Rp 8.672.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kab. Bantul	Rp145.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 37.177.500,00	Rp 50.842.500,00	Rp 50.842.500,00	Rp 13.665.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				500 Orang	500 Orang	Rp 101.035.000,00	Rp 76.035.000,00	Rp 76.035.000,00	-Rp 25.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				15 Lembaga	15 Lembaga	Rp 24.977.500,00	Rp 27.640.000,00	Rp 27.640.000,00	Rp 2.662.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
149	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional				1 Penghargaan	1 Penghargaan	Rp 58.497.500,00	Rp 61.047.500,00	Rp 61.047.500,00	-Rp 3.497.500,00						Rp55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup				100 Persen	100 Persen	Rp 58.497.500,00	Rp 61.047.500,00	Rp 61.047.500,00	Rp 2.550.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kab. Bantul	Rp55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	3 Entitas	Rp 58.497.500,00	Rp 61.047.500,00	Rp 61.047.500,00	Rp 2.550.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
150	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup				100 persen	100 persen	Rp 98.470.000,00	Rp 72.020.000,00	Rp 67.620.000,00	-Rp 47.470.000,00						Rp51.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Aduan				100 Persen	100 Persen	Rp 98.470.000,00	Rp 72.020.000,00	Rp 67.620.000,00	-Rp 30.850.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kab. Bantul	Rp51.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Perkara	1 Perkara	Rp 54.900.000,00	Rp 16.500.000,00	Rp 16.500.000,00	-Rp 38.400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp25.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				20 Pengaduan	31 Pengaduan	Rp 43.570.000,00	Rp 55.520.000,00	Rp 51.120.000,00	Rp 7.550.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp25.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
151	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani Capaian Pengelolaan Sampah Persentase jumlah sampah yang tertangani				23,73 44,15 50,07 % Persen persen	23,73 44,15 50,07 % Persen persen	Rp 21.664.709.956,00	Rp 23.277.907.040,00	Rp 25.885.898.019,00	-Rp 602.477.816,00						Rp21.062.232.140,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase cakupan area pelayanan Persentase jumlah sampah yang berkurang				22,81 Persen 45 Persen	22,81 Persen 45 Persen	Rp 21.664.709.956,00	Rp 23.277.907.040,00	Rp 25.885.898.019,00	Rp 4.221.188.063,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat Kab. Bantul	Rp21.062.232.140,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				129 Kelompok	129 Kelompok	Rp 424.507.100,00	Rp 529.333.000,00	Rp 507.887.200,00	Rp 83.380.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp1.520.458.260,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 79.575.000,00	Rp 55.960.000,00	Rp 67.410.000,00	-Rp 12.165.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				50 Unit	64 Unit	Rp 3.096.238.000,00	Rp 3.375.463.600,00	Rp 3.611.863.600,00	Rp 515.625.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp5.071.791.139,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 165.700.000,00	Rp 90.350.000,00	Rp 90.000.000,00	-Rp 75.700.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang				22677 Ton	22677 Ton	Rp 2.873.492.520,00	Rp 2.454.518.480,00	Rp 2.461.090.592,00	-Rp 412.401.928,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN							Rp 50.812.311.509,00	Rp 48.656.417.618,00	Rp 50.471.478.077,00	-Rp 340.833.432,00						Rp50.113.215.913,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 50.206.844.509,00	Rp 48.050.950.618,00	Rp 50.221.478.077,00	Rp 14.633.568,00						Rp49.507.748.913,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							Rp 50.206.844.509,00	Rp 48.050.950.618,00	Rp 50.221.478.077,00	Rp 14.633.568,00						Rp49.507.748.913,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
152	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara				100 90 % persen	100 90 % persen	Rp 2.022.730.022,00	Rp 2.688.905.918,00	Rp 2.724.490.786,00	-Rp 243.094.598,00						Rp1.779.635.424,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Cakupan uji kualitas lingkungan				100 Persen 80 Persen	100 Persen 80 Persen	Rp 1.797.765.222,00	Rp 2.486.867.018,00	Rp 2.523.101.886,00	Rp 725.336.664,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Kab. Bantul	Rp1.454.635.424,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 530.339.788,00	Rp 365.540.308,00	Rp 408.374.320,00	-Rp 121.965.468,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp306.375.424,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
		UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN							Rp 50.812.311.509,00	Rp 48.656.417.618,00	Rp 50.471.478.077,00	-Rp 340.833.432,00						Rp50.113.215.913,00	UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 50.206.844.509,00	Rp 48.050.950.618,00	Rp 50.221.478.077,00	Rp 14.633.568,00						Rp49.507.748.913,00	UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							Rp 50.208.844.509,00	Rp 48.050.950.618,00	Rp 50.221.478.077,00	Rp 14.633.568,00						Rp49.507.748.913,00	UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN
153	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan				38 persen	38 persen	Rp 7.148.241.564,00	Rp 4.568.965.080,00	Rp 4.478.628.080,00	-Rp 442.286.642,00						Rp6.705.954.922,00	UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman				100 Persen	100 Persen	Rp 7.148.241.564,00	Rp 4.568.965.080,00	Rp 4.478.628.080,00	-Rp 2.669.613.484,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Kab. Bantul	Rp6.705.954.922,00	UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				3.7961 Ha	3.7961 Ha	Rp 3.576.266.564,00	Rp 3.189.011.600,00	Rp 3.362.081.600,00	-Rp 214.184.964,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp3.462.914.402,00	UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN
154	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani Capaian Pengelolaan Sampah Persentase jumlah sampah yang tertangani				23,73 44,15 50,07 % Persen	23,73 44,15 50,07 % Persen	Rp 21.664.709.956,00	Rp 23.277.907.040,00	Rp 25.885.898.019,00	-Rp 602.477.816,00						Rp21.062.232.140,00	UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase cakupan area pelayanan Persentase jumlah sampah yang berkurang				22,81 Persen 45 Persen	22,81 Persen 45 Persen	Rp 21.664.709.956,00	Rp 23.277.907.040,00	Rp 25.885.898.019,00	Rp 4.221.188.063,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Kab. Bantul	Rp21.062.232.140,00	UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				36800 Ton	36800 Ton	Rp 1.752.198.400,00	Rp 5.461.508.000,00	Rp 5.531.100.600,00	Rp 3.778.902.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp6.093.500.277,00	UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				3 Unit	3 Unit	Rp 10.373.447.136,00	Rp 1.972.000.000,00	Rp 4.304.872.067,00	-Rp 6.068.575.069,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp1.950.000.000,00	UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				22100 Ton	22100 Ton	Rp 2.899.551.800,00	Rp 9.338.773.960,00	Rp 9.311.673.960,00	Rp 6.412.122.160,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp6.246.482.464,00	UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							Rp 10.971.352.614,00	Rp 11.160.467.826,66	Rp 11.197.467.826,66	Rp 226.115.212,66						Rp14.784.442.386,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 10.971.352.614,00	Rp 11.160.467.826,66	Rp 11.197.467.826,66	Rp 226.115.212,66						Rp14.784.442.386,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							Rp 10.971.352.614,00	Rp 11.160.467.826,66	Rp 11.197.467.826,66	Rp 226.115.212,66						Rp14.784.442.386,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
155	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat				84 90,60 Angka Indeks	84 90,60 Angka Indeks	Rp 9.691.988.439,00	Rp 9.761.738.826,66	Rp 9.788.437.397,66	Rp 2.992.882.141,00						Rp12.684.870.580,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 30.132.500,00	Rp 17.895.000,00	Rp 16.145.000,00	-Rp 13.987.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Rp981.435.004,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	Rp 8.500.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	-Rp 2.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp26.090.348,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4.250.000,00	Rp 3.375.000,00	Rp 3.375.000,00	-Rp 875.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp43.923.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	Rp 11.687.500,00	Rp 6.625.000,00	Rp 4.875.000,00	-Rp 6.812.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp102.050.370,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	Rp 5.695.000,00	Rp 1.895.000,00	Rp 1.895.000,00	-Rp 3.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp809.371.286,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	Rp 7.457.519.024,00	Rp 7.414.545.286,66	Rp 7.410.345.286,66	-Rp 47.173.737,34			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan	Rp7.957.587.211,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	Rp 7.266.644.024,00	Rp 7.261.185.286,66	Rp 7.261.185.286,66	-Rp 5.458.737,34	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.527.642.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 182.800.000,00	Rp 149.360.000,00	Rp 145.160.000,00	-Rp 37.640.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp327.894.831,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	Rp 8.075.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	-Rp 4.075.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp102.050.380,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan BMD				100 Persen	100 Persen	Rp 1.275.000,00	Rp 5.625.000,00	Rp 5.625.000,00	Rp 4.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Capaian kinerja barang milik daerah perangkat daerah	Rp0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.275.000,00	Rp 5.625.000,00	Rp 5.625.000,00	Rp 4.350.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				100 Persen	100 Persen	Rp 17.567.500,00	Rp 18.775.000,00	Rp 18.775.000,00	Rp 1.207.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Capaian kinerja pengelola kapasitas sumber daya aparatur	Rp111.501.267,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				8 Dokumen	8 Dokumen	Rp 1.912.500,00	Rp 5.425.000,00	Rp 5.425.000,00	Rp 3.512.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				115 Orang	115 Orang	Rp 9.100.000,00	Rp 8.850.000,00	Rp 8.850.000,00	-Rp 250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp55.335.280,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				115 Orang	115 Orang	Rp 6.555.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	-Rp 2.055.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp66.165.987,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	Rp 1.143.714.759,00	Rp 1.259.550.740,00	Rp 1.275.964.283,00	Rp 132.249.524,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	Rp2.589.467.418,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	8 Paket	Rp 11.840.930,00	Rp 11.840.930,00	Rp 11.840.930,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp14.576.141,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	7 Paket	Rp 978.241.000,00	Rp 1.116.971.000,00	Rp 1.129.801.000,00	Rp 151.560.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.148.968.675,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	Rp 22.386.860,00	Rp 25.093.060,00	Rp 27.105.860,00	Rp 4.719.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp35.155.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	Rp 6.482.500,00	Rp 4.310.281,00	Rp 5.881.024,00	-Rp 601.476,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp10.011.450,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.726.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	Rp 15.200.000,00	Rp 11.730.000,00	Rp 11.730.000,00	-Rp 3.470.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp35.980.258,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	Rp 53.774.000,00	Rp 53.816.000,00	Rp 53.816.000,00	Rp 42.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp285.322.129,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 8.445.000,00	Rp 8.445.000,00	Rp 8.445.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp9.958.542,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 44.944.469,00	Rp 24.944.469,00	Rp 24.944.469,00	-Rp 20.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp45.767.673,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 302.347.200,00	Rp 250.095.600,00	Rp 220.595.600,00	-Rp 81.751.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Capaian kinerja pengadaan BMD Penunjangurusan perangkat daerah	Rp244.724.315,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				28 Unit	19 Unit	Rp 302.347.200,00	Rp 250.095.600,00	Rp 220.595.600,00	-Rp 81.751.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp244.724.315,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				99 Persen	99 Persen	Rp 381.537.156,00	Rp 420.840.000,00	Rp 434.464.428,00	Rp 52.927.272,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Rp219.351.287,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	Rp 4.200.000,00	Rp 4.200.000,00	Rp 4.200.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp20.277.785,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.440.000,00	Rp 1.440.000,00	Rp 1.440.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp36.712.308,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 375.897.156,00	Rp 415.200.000,00	Rp 428.824.428,00	Rp 52.927.272,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp162.361.194,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD				99 Persen	99 Persen	Rp 357.895.300,00	Rp 374.412.200,00	Rp 406.522.800,00	Rp 48.627.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Capaian kinerja pemeliharaan BMD	Rp580.804.078,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	17 Unit	Rp 220.980.000,00	Rp 220.980.000,00	Rp 220.980.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp333.239.409,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	Rp 90.595.000,00	Rp 92.130.000,00	Rp 92.130.000,00	Rp 1.535.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp138.342.809,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	Rp 46.320.300,00	Rp 61.302.200,00	Rp 93.412.800,00	Rp 47.092.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp109.221.860,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
156	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan IKD Persentase Pendaftaran Penduduk				22 98 Persen Persen	22 98 Persen Persen	Rp 679.412.138,00	Rp 771.920.000,00	Rp 783.797.493,00	Rp 192.865.661,00						Rp872.277.799,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Persentase Dokumen KIA Persentase Dokumen KK Persentase Perekaman KTP-EL				100 Persen 135829 Dokumen 96,23 Persen 99,80 Persen	100 Persen 135829 Dokumen 96,23 Persen 99,80 Persen	Rp 679.412.138,00	Rp 771.920.000,00	Rp 783.797.493,00	Rp 104.385.355,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Rp872.277.799,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 120.433.616,00	Rp 134.300.000,00	Rp 136.570.738,00	Rp 16.137.122,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp171.807.753,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				169000 Dokumen	169000 Dokumen	Rp 215.654.796,00	Rp 203.500.000,00	Rp 208.480.585,00	-Rp 7.174.211,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp297.764.703,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				4 Laporan	4 Laporan	Rp 172.227.674,00	Rp 251.320.000,00	Rp 254.055.585,00	Rp 81.827.911,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp234.108.724,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				11500 Dokumen	11500 Dokumen	Rp 171.096.052,00	Rp 182.800.000,00	Rp 184.690.585,00	Rp 13.594.533,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp168.596.619,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
157	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil				96,4 97 Persen Persen	96,4 97 Persen Persen	Rp 254.240.440,00	Rp 270.964.000,00	Rp 273.416.585,00	Rp 338.240.564,00						Rp592.481.004,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Persentase Akta kelahiran Persentase akta kelahiran (0-4) tahun Persentase Akta Perceraian Persentase Akta Perkawinan				100 Persen 31050 Dokumen 88,96 Persen 91,66 Persen 99,92 Persen	100 Persen 31050 Dokumen 88,96 Persen 91,66 Persen 99,92 Persen	Rp 243.815.440,00	Rp 259.564.000,00	Rp 262.016.585,00	Rp 18.201.145,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Rp481.570.017,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				32500 Dokumen	32500 Dokumen	Rp 114.115.696,00	Rp 103.934.000,00	Rp 103.410.234,00	-Rp 10.705.462,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp258.765.857,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				33000 Layanan	33000 Layanan	Rp 129.699.744,00	Rp 155.630.000,00	Rp 158.606.351,00	Rp 28.906.607,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp222.804.160,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Data Nikah, Talak, CeraI, Rujuk (NTR) yang tersinkronisasi Persentase Jemput Bola Layanan Pencatatan Sipil				4400 Unit 80,40 Persen	4400 Unit 80,40 Persen	Rp 10.425.000,00	Rp 11.400.000,00	Rp 11.400.000,00	Rp 975.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Rp110.910.987,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	Rp 10.425.000,00	Rp 11.400.000,00	Rp 11.400.000,00	Rp 975.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp110.910.987,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
158	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Instansi/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Persentase Pemutakhiran Data Kependudukan				70 95,02 Persen Persen	70 95,02 Persen Persen	Rp 345.711.597,00	Rp 355.845.000,00	Rp 351.816.351,00	Rp 175.198.651,00						Rp520.910.248,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kelengkapan Elemen Data Kependudukan yang dimintakan verifikasi Penyajian Data Kependudukan Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja				12 Dokumen 66,66 Persen 90 Persen	12 Dokumen 66,66 Persen 90 Persen	Rp 157.618.097,00	Rp 164.822.500,00	Rp 165.793.851,00	Rp 8.175.754,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya penyajian data kependudukan	Rp191.680.698,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 6.687.500,00	Rp 6.962.500,00	Rp 6.962.500,00	Rp 275.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				30 Dokumen	30 Dokumen	Rp 61.808.744,00	Rp 69.500.000,00	Rp 70.477.117,00	Rp 8.668.373,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp54.335.193,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				20 Laporan	20 Laporan	Rp 89.121.853,00	Rp 88.360.000,00	Rp 88.354.234,00	-Rp 767.619,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp137.345.505,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pelaporan Akses Data Kependudukan dan Aduan Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Kebijakan Adminduk Publikasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Adminduk Melalui 2 Jenis Media				100 Persen 12 Dokumen 2 Jenis	100 Persen 12 Dokumen 2 Jenis	Rp 188.093.500,00	Rp 191.022.500,00	Rp 186.022.500,00	-Rp 2.071.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Publikasi dan Sosialisasi Informasi kebijakan administrasi kependudukan	Rp329.229.550,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 4.250.000,00	Rp 20.260.000,00	Rp 19.260.000,00	Rp 15.010.000,00	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp147.465.003,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 76.512.500,00	Rp 88.362.500,00	Rp 93.362.500,00	Rp 16.850.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp168.736.122,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	Rp 107.331.000,00	Rp 82.400.000,00	Rp 73.400.000,00	-Rp 33.931.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp13.028.425,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
159	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat				100 Persen	100 Persen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 113.902.755,00						Rp113.902.755,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Buku Profil Kependudukan				10 Buku	10 Buku	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	buku profil kependudukan	Rp113.902.755,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp113.902.755,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN							Rp 13.480.302.139,00	Rp 10.628.879.942,08	Rp 10.241.256.692,08	-Rp 3.239.045.446,92						Rp16.116.587.533,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 13.215.702.139,00	Rp 10.364.279.942,08	Rp 10.084.756.692,08	-Rp 3.130.945.446,92						Rp14.816.495.533,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							Rp 361.473.000,00	Rp 361.473.000,00	Rp 215.348.000,00	-Rp 146.125.000,00						Rp800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
160	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase Garis Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersinkronisasi				70,66 Persen	-	Rp 361.473.000,00	Rp 361.473.000,00	Rp 215.348.000,00	Rp 438.527.000,00						Rp800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Capaian Penetapan Garis Batas Kalurahan yang Tersinkronisasi				100 Persen	-	Rp 361.473.000,00	Rp 361.473.000,00	Rp 215.348.000,00	-Rp 146.125.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	-	Rp800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 361.473.000,00	Rp 361.473.000,00	Rp 215.348.000,00	-Rp 146.125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							Rp 12.854.229.139,00	Rp 10.002.806.942,08	Rp 9.869.408.692,08	-Rp 2.984.820.446,92						Rp14.016.495.533,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
163	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				84,12 88,92 Angka Angka	84,12 88,92 Angka Angka	Rp 6.645.390.644,00	Rp 5.093.928.616,08	Rp 5.151.878.616,08	-Rp 2.141.480.658,00						Rp4.503.909.986,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 45.334.500,00	Rp 17.380.990,00	Rp 18.832.955,80	-Rp 26.501.544,20			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Dinas PMK	Rp110.962.441,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 19.662.500,00	Rp 9.171.190,00	Rp 6.148.355,80	-Rp 13.514.144,20	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp85.962.441,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19 Laporan	19 Laporan	Rp 25.672.000,00	Rp 8.209.800,00	Rp 12.684.600,00	-Rp 12.987.400,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	Rp 5.465.058.837,00	Rp 4.019.924.212,28	Rp 4.019.924.212,28	-Rp 1.445.134.624,72			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Dinas PMK	Rp3.552.241.533,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	26 Orang/b ulan	Rp 5.465.058.837,00	Rp 4.019.924.212,28	Rp 4.019.924.212,28	-Rp 1.445.134.624,72	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp3.552.241.533,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	Rp 444.921.097,00	Rp 327.077.709,80	Rp 372.969.910,00	-Rp 71.951.187,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Dinas PMK	Rp358.658.052,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	Rp 76.146.097,00	Rp 35.227.709,80	Rp 35.719.910,00	-Rp 40.426.187,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	Rp 85.387.500,00	Rp 21.125.000,00	Rp 21.125.000,00	-Rp 64.262.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp293.658.052,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	7 Dokumen	Rp 283.387.500,00	Rp 270.725.000,00	Rp 316.125.000,00	Rp 32.737.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	Rp 441.109.360,00	Rp 381.240.000,00	Rp 391.847.584,00	-Rp 49.261.776,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Dinas PMK	Rp262.047.960,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	Rp 19.775.000,00	Rp 6.330.000,00	Rp 14.610.000,00	-Rp 5.165.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	Rp 421.334.360,00	Rp 374.910.000,00	Rp 377.237.584,00	-Rp 44.096.776,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp232.047.960,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	Rp 248.966.850,00	Rp 348.305.704,00	Rp 348.303.954,00	Rp 99.337.104,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Dinas PMK	Rp220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	Rp 228.972.000,00	Rp 133.588.900,00	Rp 133.587.150,00	-Rp 95.384.850,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	Rp 19.994.850,00	Rp 214.716.804,00	Rp 214.716.804,00	Rp 194.721.954,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
164	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kalurahan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan				13,33 Persen	13,33 Persen	Rp 1.000.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	Rp 49.000.000,00						Rp50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Capaian Kerja Sama antar Desa yang Terasilitasi				100 Persen	100 Persen	Rp 1.000.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	-Rp 250.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Kalurahan	Rp50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				17 Dokumen	17 Dokumen	Rp 1.000.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	-Rp 250.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
165	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kalurahan dengan Kualitas Belanja Kategori Baik				40 Persen	40 Persen	Rp 5.808.658.629,00	Rp 4.114.196.832,00	Rp 3.975.598.582,00	-Rp 1.514.270.491,00						Rp4.294.388.138,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Capaian Bumkal dengan Kategori Maju Capaian Kalurahan dengan Kualitas Belanja Kategori Baik				100 Persen	100 Persen	Rp 5.808.658.629,00	Rp 4.114.196.832,00	Rp 3.975.598.582,00	-Rp 1.833.060.047,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Kalurahan	Rp4.294.388.138,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.13.04.2.01.0001	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				75 Dokumen	75 Dokumen	Rp 4.000.000,00	Rp 800.000,00	Rp 800.000,00	-Rp 3.200.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2.01.0003	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				75 Dokumen	75 Dokumen	Rp 2.000.000,00	Rp 800.000,00	Rp 800.000,00	-Rp 1.200.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2.01.0004	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				75 Dokumen	75 Dokumen	Rp 204.497.749,00	Rp 215.510.569,00	Rp 219.810.569,00	Rp 15.312.820,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				75 Orang	75 Orang	Rp 2.644.826.200,00	Rp 2.709.954.094,00	Rp 2.709.954.094,00	Rp 65.127.894,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp2.682.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2.01.0006	Facilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Facilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				75 Laporan	75 Laporan	Rp 2.000.000,00	Rp 800.000,00	Rp 800.000,00	-Rp 1.200.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 148.062.180,00	Rp 165.822.080,00	Rp 168.822.080,00	Rp 20.759.900,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp322.388.138,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	Rp 168.000.000,00	Rp 107.773.707,00	Rp 80.643.407,00	-Rp 87.356.593,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2.01.0010	Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Laporan	1 Laporan	Rp 177.000.000,00	Rp 52.929.550,00	Rp 4.412.500,00	-Rp 172.587.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2.01.0011	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				75 Dokumen	75 Dokumen	Rp 2.000.000,00	Rp 800.000,00	Rp 800.000,00	-Rp 1.200.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				75 Orang	0 Orang	Rp 225.000.000,00	Rp 70.450.900,00	Rp -	-Rp 225.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 1.400.000.000,00	Rp 775.430.132,00	Rp 775.630.132,00	-Rp 624.369.868,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2.01.0018	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				17 Dokumen	17 Dokumen	Rp 831.272.500,00	Rp 13.125.800,00	Rp 13.125.800,00	-Rp 818.146.700,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
166	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Anggaran Kalurahan untuk LKK yang Mendukung Program Prioritas Kabupaten				13,5 Persen	13,5 Persen	Rp 399.179.866,00	Rp 793.931.494,00	Rp 741.181.494,00	Rp 4.769.017.543,00						Rp5.168.197.409,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang	Capaian Anggaran Kalurahan untuk LKK yang Mendukung Program Prioritas Kabupaten				100 Persen	100 Persen	Rp 399.179.866,00	Rp 793.931.494,00	Rp 741.181.494,00	Rp 342.001.628,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Kalurahan	Rp5.168.197.409,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.05.2.01.0002	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 136.180.767,00	Rp 232.571.767,00	Rp 215.971.767,00	Rp 79.791.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp3.568.197.409,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	3 Lembaga	Rp 6.800.000,00	Rp 145.016.000,00	Rp 124.966.000,00	Rp 118.166.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.05.2.01.0005	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.000.000,00	Rp 209.542.500,00	Rp 193.442.500,00	Rp 192.442.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	Rp 1.000.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	-Rp 250.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 254.199.099,00	Rp 206.051.227,00	Rp 206.051.227,00	-Rp 48.147.872,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 264.600.000,00	Rp 264.600.000,00	Rp 156.500.000,00	-Rp 108.100.000,00						Rp1.300.092.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							Rp 264.600.000,00	Rp 264.600.000,00	Rp 156.500.000,00	-Rp 108.100.000,00						Rp1.300.092.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
167	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik				13,33 persen	13,33 persen	Rp 264.600.000,00	Rp 264.600.000,00	Rp 156.500.000,00	Rp 1.035.492.000,00						Rp1.300.092.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kalurahan yang melaksanakan Reformasi dengan kategori baik				100 persen	100 persen	Rp 264.600.000,00	Rp 264.600.000,00	Rp 156.500.000,00	-Rp 108.100.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Kalurahan	Rp1.300.092.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kaparewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kaparewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 264.600.000,00	Rp 264.600.000,00	Rp 156.500.000,00	-Rp 108.100.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.300.092.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
		DINAS PERHUBUNGAN							Rp 30.840.474.207,00	Rp 26.969.624.815,35	Rp 26.994.358.771,35	-Rp 3.846.115.435,65						Rp24.656.293.353,00	DINAS PERHUBUNGAN
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 750.000.000,00	Rp 750.000.000,00	Rp 720.734.100,00	-Rp 29.265.900,00						Rp2.210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							Rp 750.000.000,00	Rp 750.000.000,00	Rp 720.734.100,00	-Rp 29.265.900,00						Rp2.210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
168	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan				0 39,07 Persen Persen	0 39,07 Persen Persen	Rp 750.000.000,00	Rp 750.000.000,00	Rp 720.734.100,00	Rp 1.460.000.000,00						Rp2.210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten				100 Persen	100 Persen	Rp 750.000.000,00	Rp 750.000.000,00	Rp 720.734.100,00	-Rp 29.265.900,00			Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorong kewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat se-Kabupaten Bantul	Rp2.210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri				-	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Rp 173.026.800,00	Rp 173.026.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorong kewirausahaan,mengembangkan industri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 750.000.000,00	Rp 750.000.000,00	Rp 547.707.300,00	-Rp 202.292.700,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp840.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Rp -	-Rp -	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Pleret, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp1.170.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 30.090.474.207,00	Rp 26.219.624.815,35	Rp 26.273.624.671,35	-Rp 3.816.849.535,65						Rp22.446.293.353,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							Rp 30.090.474.207,00	Rp 26.219.624.815,35	Rp 26.273.624.671,35	-Rp 3.816.849.535,65						Rp22.446.293.353,00	DINAS PERHUBUNGAN
169	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				82,8 91,21 Angka Indeks	82,8 91,21 Angka Indeks	Rp 8.152.392.057,00	Rp 9.282.096.489,35	Rp 9.294.116.845,35	-Rp 179.990.704,00						Rp7.972.401.353,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 107.402.500,00	Rp 71.100.436,00	Rp 73.100.436,00	-Rp 34.302.064,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Dinas Perhubungan	Rp75.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6 Dokumen	Rp 7.712.500,00	Rp 6.437.500,00	Rp 6.437.500,00	-Rp 1.275.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp4.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	Rp 99.690.000,00	Rp 64.662.936,00	Rp 66.662.936,00	-Rp 33.027.064,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp71.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 persen	100 Persen	Rp 6.639.083.789,00	Rp 7.142.810.605,35	Rp 7.142.831.005,35	Rp 503.747.216,35			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Dinas Perhubungan	Rp6.797.199.353,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/b ulan	54 Orang/b ulan	Rp 6.509.691.289,00	Rp 6.993.038.805,35	Rp 6.993.038.805,35	Rp 483.347.516,35	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp6.682.639.353,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	12 Dokumen	Rp 121.560.000,00	Rp 141.720.000,00	Rp 141.720.000,00	Rp 20.160.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp103.560.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				5 Laporan	13 Laporan	Rp 7.832.500,00	Rp 8.051.800,00	Rp 8.072.200,00	Rp 239.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	Rp 4.080.000,00	Rp 503.400.000,00	Rp 503.400.000,00	Rp 499.320.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat se-Kabupaten Bantul	Rp5.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 4.080.000,00	Rp 503.400.000,00	Rp 503.400.000,00	Rp 499.320.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp5.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumber daya Aparatur				100 persen	100 persen	Rp 13.375.000,00	Rp 13.375.000,00	Rp 4.010.000,00	-Rp 9.365.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Pegawai Dinas Perhubungan	Rp11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 4.010.000,00	-Rp 990.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan				100 Orang	115 Orang	Rp 8.375.000,00	Rp 8.375.000,00	Rp -	-Rp 8.375.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	Rp 460.414.350,00	Rp 131.042.290,00	Rp 128.612.290,00	-Rp 331.802.060,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Dinas Perhubungan	Rp139.402.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	Rp 3.066.100,00	Rp 3.066.100,00	Rp 3.066.100,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp2.662.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	7 Paket	Rp 192.303.050,00	Rp 49.519.050,00	Rp 49.519.050,00	-Rp 142.784.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp25.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	Rp 7.707.600,00	Rp 10.337.140,00	Rp 10.337.140,00	Rp 2.629.540,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	Rp 209.002.600,00	Rp 26.800.000,00	Rp 26.800.000,00	-Rp 182.202.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Rp -	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp1.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	10 Laporan	Rp 7.500.000,00	Rp 5.875.000,00	Rp 7.075.000,00	-Rp 425.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	20 Laporan	Rp 29.450.000,00	Rp 24.060.000,00	Rp 22.680.000,00	-Rp 6.770.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp55.040.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 8.385.000,00	Rp 8.385.000,00	Rp 7.635.000,00	-Rp 750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 1.500.000,00	-Rp 1.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang				100 persen	100 persen	Rp 547.957.568,00	Rp 1.058.261.358,00	Rp 1.080.056.314,00	Rp 532.098.746,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Dinas Perhubungan	Rp636.060.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	Rp 90.252.792,00	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	-Rp 86.652.792,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	2 Laporan	Rp 46.168.000,00	Rp 209.183.950,00	Rp 208.483.950,00	Rp 162.315.950,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp41.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 24.082.000,00	Rp 29.912.000,00	Rp 35.507.700,00	Rp 11.425.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp114.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	12 Laporan	Rp 387.454.776,00	Rp 815.565.408,00	Rp 832.464.664,00	Rp 445.009.888,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp436.060.200,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD				100 persen	100 persen	Rp 380.078.850,00	Rp 362.106.800,00	Rp 362.106.800,00	-Rp 17.972.050,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Dinas Perhubungan	Rp308.239.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	Rp 93.070.000,00	Rp 89.370.600,00	Rp 89.370.600,00	-Rp 3.699.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	Rp 284.148.850,00	Rp 269.876.200,00	Rp 269.876.200,00	-Rp 14.272.650,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp186.239.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	Rp 2.860.000,00	Rp 2.860.000,00	Rp 2.860.000,00	-Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
170	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal				0,75 18,38 Angka Persen	0,75 18,38 Angka Persen	Rp 21.938.082.150,00	Rp 16.937.528.326,00	Rp 16.979.507.826,00	-Rp 7.464.190.150,00						Rp14.473.892.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ dan Rencana Aksi Keselamatan yang ditetapkan				50 Persen	50 Persen	Rp 137.201.200,00	Rp 235.902.000,00	Rp 201.672.000,00	Rp 64.470.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat se-Kabupaten Bantul	Rp75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 137.201.200,00	Rp 235.902.000,00	Rp 201.672.000,00	Rp 64.470.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai				31,02 persen	31,02 persen	Rp 18.314.462.764,00	Rp 12.535.998.612,00	Rp 12.544.998.412,00	-Rp 5.769.464.352,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat se-Kabupaten Bantul	Rp9.382.939.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	Rp -	Rp -	Rp -	-Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				938 Unit	484 Unit	Rp 16.943.955.584,00	Rp 9.035.281.440,00	Rp 9.043.081.240,00	-Rp 7.900.874.344,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp7.966.281.637,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				800 Unit	2000 Unit	Rp 1.370.507.180,00	Rp 3.500.717.172,00	Rp 3.501.917.172,00	Rp 2.131.409.992,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp1.326.657.613,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C				50 persen	50 persen	Rp 617.068.118,00	Rp 993.943.588,00	Rp 1.036.753.488,00	Rp 419.685.370,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat se-Kabupaten Bantul	Rp286.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				4 Unit	3 Unit	Rp 617.068.118,00	Rp 993.943.588,00	Rp 1.036.753.488,00	Rp 419.685.370,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp286.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan PembaCngunan Fasilitas Parkir	Presentase Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan				100 Persen	-	Rp 263.607.188,00	Rp 356.473.808,00	Rp 362.473.808,00	Rp 98.866.620,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat se-Kabupaten Bantul	Rp265.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	1 Laporan	Rp 263.607.188,00	Rp 356.473.808,00	Rp 362.473.808,00	Rp 98.866.620,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp265.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji				8,5 persen	8,5 persen	Rp 857.298.732,00	Rp 711.201.026,00	Rp 718.200.826,00	-Rp 139.097.906,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat se-Kabupaten Bantul	Rp1.389.870.130,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				11668 Unit	11700 Unit	Rp 155.505.000,00	Rp 155.502.936,00	Rp 157.502.936,00	Rp 1.997.936,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp86.821.130,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				10000 Dokumen	11392 Dokumen	Rp 369.056.972,00	Rp 242.966.630,00	Rp 247.966.630,00	-Rp 121.090.342,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp792.810.150,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 Laporan	1 Laporan	Rp 6.452.400,00	Rp 6.452.400,00	Rp 6.539.100,00	Rp 86.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp73.205.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				1 Laporan	1 Laporan	Rp 7.250.000,00	Rp 7.250.000,00	Rp 7.550.000,00	Rp 300.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp73.205.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	10 Unit	Rp 319.034.360,00	Rp 299.029.060,00	Rp 298.642.160,00	-Rp 20.392.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp344.063.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4 Laporan	4 Laporan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp19.765.350,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota				62,74 persen	62,74 persen	Rp 1.476.591.356,00	Rp 1.934.777.388,00	Rp 1.950.777.388,00	Rp 474.186.032,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat se-Kabupaten Bantul	Rp2.672.134.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	Rp 392.432.980,00	Rp 345.339.808,00	Rp 351.339.808,00	-Rp 41.093.172,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp305.118.440,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	2 Dokumen	Rp 29.402.200,00	Rp 85.075.200,00	Rp 85.075.200,00	Rp 55.673.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp7.320.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				163 Dokumen	9 Dokumen	Rp 822.689.188,00	Rp 1.358.640.176,00	Rp 1.365.640.176,00	Rp 542.950.988,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp1.760.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				3 Laporan	2 Laporan	Rp 232.066.988,00	Rp 145.722.204,00	Rp 148.722.204,00	-Rp 83.344.784,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp599.695.360,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi				20 persen	20 persen	Rp 148.801.396,00	Rp 75.125.000,00	Rp 67.525.000,00	-Rp 81.276.396,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat se-Kabupaten Bantul	Rp158.878.880,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	1 Laporan	Rp 129.801.396,00	Rp 40.125.000,00	Rp 38.625.000,00	-Rp 91.176.396,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp153.878.880,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	Rp 19.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp 28.900.000,00	Rp 9.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan umum orang dalam trayek yang beroperasi di Kabupaten Bantul				56,5 Persen	56,5 Persen	Rp 119.226.396,00	Rp 93.356.904,00	Rp 96.356.904,00	-Rp 22.869.492,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat se-Kabupaten Bantul	Rp196.044.960,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	Rp 119.226.396,00	Rp 93.356.904,00	Rp 96.356.904,00	-Rp 22.869.492,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp196.044.960,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ijin Trayek				0,28 angka	0,28 angka	Rp 3.825.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	-Rp 3.075.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	Masyarakat se-Kabupaten Bantul	Rp48.024.480,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0003	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Unit	1 Unit	Rp 3.825.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	-Rp 3.075.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana		Rp48.024.480,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							Rp 30.237.677.324,00	Rp 23.393.147.658,53	Rp 21.053.051.658,53	-Rp 9.184.625.665,47						Rp23.943.141.084,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 30.237.677.324,00	Rp 23.393.147.658,53	Rp 21.053.051.658,53	-Rp 9.184.625.665,47						Rp23.943.141.084,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							Rp 26.069.881.888,00	Rp 19.507.318.768,53	Rp 19.495.329.948,53	-Rp 6.574.551.939,47						Rp22.156.026.384,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
171	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				81,60 94,3 Angka Angka	81,60 94,3 Angka Angka	Rp 7.895.751.328,00	Rp 8.597.481.877,16	Rp 8.609.496.057,16	-Rp 544.451.179,00						Rp7.351.300.149,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	Rp 24.367.500,00	Rp 2.450.000,00	Rp 4.550.000,00	-Rp 19.817.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp24.367.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 9.850.000,00	Rp 2.450.000,00	Rp 2.450.000,00	-Rp 7.400.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp9.850.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	16 Laporan	Rp 14.517.500,00	Rp -	Rp 2.100.000,00	-Rp 12.417.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp14.517.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 %	100 %	Rp 6.807.280.946,00	Rp 7.752.373.796,13	Rp 7.742.773.796,13	Rp 935.492.850,13			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp6.262.919.767,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	54 Orang/bulan	Rp 6.650.980.946,00	Rp 7.600.153.796,13	Rp 7.600.153.796,13	Rp 949.172.850,13	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.106.619.767,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 152.220.000,00	Rp 152.220.000,00	Rp 141.120.000,00	-Rp 11.100.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp152.220.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	Rp 4.080.000,00	Rp -	Rp 1.500.000,00	-Rp 2.580.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.080.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	Rp 4.037.500,00	Rp -	Rp -	-Rp 4.037.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp4.037.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0 Laporan	Rp 4.037.500,00	Rp -	Rp -	-Rp 4.037.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.037.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	Rp 19.960.000,00	Rp -	Rp 3.030.000,00	-Rp 16.930.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp19.960.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 19.960.000,00	Rp -	Rp 3.030.000,00	-Rp 16.930.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp19.960.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	Rp 333.789.522,00	Rp 244.554.434,00	Rp 298.002.834,00	-Rp 35.786.688,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp333.699.522,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	Rp 11.984.690,00	Rp 11.984.690,00	Rp 11.984.690,00	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp11.984.690,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	9 Paket	Rp 99.800.000,00	Rp 93.850.000,00	Rp 132.850.000,00	Rp 33.050.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp99.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	8 Paket	Rp 18.476.732,00	Rp 11.691.244,00	Rp 15.802.044,00	-Rp 2.674.688,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp18.476.732,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	Rp 3.862.100,00	Rp 2.743.000,00	Rp 3.535.600,00	-Rp 326.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.862.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 4.500.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	-Rp 1.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	Rp 7.865.000,00	Rp 2.370.000,00	Rp 5.370.000,00	-Rp 2.495.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.862.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	Rp 179.608.500,00	Rp 118.915.500,00	Rp 125.460.500,00	-Rp 54.148.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp179.521.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	0 Dokumen	Rp 4.037.500,00	Rp -	Rp -	-Rp 4.037.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.037.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	0 Dokumen	Rp 3.655.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 3.655.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.655.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	Rp 338.815.860,00	Rp 325.787.947,03	Rp 282.113.727,03	-Rp 56.702.132,97			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp338.815.860,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	Rp 7.236.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	-Rp 1.236.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.236.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 24.971.220,00	Rp 13.300.519,03	Rp 17.893.775,03	-Rp 7.077.444,97	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp24.971.220,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 276.608.640,00	Rp 276.487.428,00	Rp 228.219.952,00	-Rp 48.388.688,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp276.608.640,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	Rp 367.500.000,00	Rp 272.315.700,00	Rp 279.025.700,00	-Rp 88.474.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp367.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	Rp 214.150.000,00	Rp 186.145.700,00	Rp 186.145.700,00	-Rp 28.004.300,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp214.150.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				186 Unit	186 Unit	Rp 89.700.000,00	Rp 86.170.000,00	Rp 92.880.000,00	Rp 3.180.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp89.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	Rp 63.650.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 63.650.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp63.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
172	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten				98,60 %	98,60 %	Rp 1.025.137.000,00	Rp 1.682.167.036,00	Rp 1.656.707.036,00	Rp 993.311.898,00						Rp2.018.448.898,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan				100 %	100 %	Rp 1.025.137.000,00	Rp 1.682.167.036,00	Rp 1.656.707.036,00	Rp 631.570.036,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp2.018.448.898,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominifo				52 Komunitas	60 Komunitas	Rp 133.675.000,00	Rp 226.216.000,00	Rp 201.056.000,00	Rp 67.381.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp510.935.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				20 Permohonan	20 Permohonan	Rp 36.475.000,00	Rp 14.700.000,00	Rp 14.700.000,00	-Rp 21.775.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp84.574.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	Rp 257.400.000,00	Rp 250.855.160,00	Rp 250.855.160,00	-Rp 6.544.840,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp450.385.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/uknis				12 Media	12 Media	Rp 597.587.000,00	Rp 1.190.395.876,00	Rp 1.190.095.876,00	Rp 592.508.876,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp972.554.398,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
173	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan pengembangan/pengembangan aplikasi Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah				1,60 1,6 Angka Angka	1,60 1,6 Angka Angka	Rp 17.148.993.560,00	Rp 9.227.669.855,37	Rp 9.229.126.855,37	-Rp 4.362.716.223,00						Rp12.786.277.337,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				95 %	95 %	Rp 17.148.993.560,00	Rp 9.227.669.855,37	Rp 9.229.126.855,37	-Rp 7.919.866.704,63			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Bantul	Rp12.786.277.337,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	Rp 9.435.410.060,00	Rp 2.019.983.104,00	Rp 2.029.978.104,00	-Rp 7.405.431.956,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.786.688.554,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				7 Aplikasi	23 Aplikasi	Rp 649.950.000,00	Rp 631.260.000,00	Rp 626.260.000,00	-Rp 23.690.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp786.439.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				1 Laporan	2 Laporan	Rp 5.507.335.000,00	Rp 5.193.125.000,00	Rp 5.183.125.000,00	-Rp 324.210.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.705.198.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				7 Aplikasi	16 Aplikasi	Rp 497.287.500,00	Rp 528.770.000,00	Rp 524.260.000,00	Rp 26.972.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp601.717.875,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				17 Perangkat Daerah	17 Perangkat Daerah	Rp 698.348.500,00	Rp 595.546.500,00	Rp 595.518.500,00	-Rp 102.830.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp469.831.533,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 229.995.000,00	Rp 175.235.251,37	Rp 176.235.251,37	-Rp 53.759.748,63	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp278.293.950,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 130.667.500,00	Rp 83.750.000,00	Rp 93.750.000,00	-Rp 36.917.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp158.107.675,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							Rp 329.750.000,00	Rp 250.936.634,00	Rp 250.936.634,00	-Rp 78.813.366,00						Rp381.959.934,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
174	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah				100 100,00 % %	100 100,00 % %	Rp 329.750.000,00	Rp 250.936.634,00	Rp 250.936.634,00	Rp 52.209.934,00						Rp381.959.934,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang dapat berbagi pakai				100 %	100 %	Rp 329.750.000,00	Rp 250.936.634,00	Rp 250.936.634,00	-Rp 78.813.366,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul	Rp381.959.934,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				80 %	100 %	Rp 179.500.000,00	Rp 128.950.000,00	Rp 128.950.000,00	-Rp 50.550.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp254.639.934,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				80 %	100 %	Rp 150.250.000,00	Rp 121.986.634,00	Rp 121.986.634,00	-Rp 28.263.366,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp127.320.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							Rp 1.384.949.436,00	Rp 1.181.796.256,00	Rp 1.181.785.076,00	-Rp 203.164.360,00						Rp1.205.154.766,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
175	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah				96,50 %	96,50 %	Rp 1.384.949.436,00	Rp 1.181.796.256,00	Rp 1.181.785.076,00	-Rp 179.794.670,00						Rp1.205.154.766,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal				100 %	100 %	Rp 985.491.220,00	Rp 875.790.000,00	Rp 864.471.056,00	-Rp 121.020.164,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan	Rp778.081.220,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	Rp 985.491.220,00	Rp 875.790.000,00	Rp 864.471.056,00	-Rp 121.020.164,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp778.081.220,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan				84 %	84 %	Rp 399.458.216,00	Rp 306.006.256,00	Rp 317.314.020,00	-Rp 82.144.196,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, Kaparewon, Kalurahan di Kabupaten Bantul	Rp427.073.546,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				45 Kegiatan	45 Kegiatan	Rp 399.458.216,00	Rp 306.006.256,00	Rp 317.314.020,00	-Rp 82.144.196,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp427.073.546,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 2.453.096.000,00	Rp 2.453.096.000,00	Rp 125.000.000,00	-Rp 2.328.096.000,00						Rp200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
176	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi				2,54 angka	2,54 angka	Rp 2.453.096.000,00	Rp 2.453.096.000,00	Rp 125.000.000,00	-Rp 2.253.096.000,00						Rp200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja pembangunan sistem Informasi				100 %	100 %	Rp 2.453.096.000,00	Rp 2.453.096.000,00	Rp 125.000.000,00	-Rp 2.328.096.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Padukuhan dan Satuan Ruang Strategis Kabupaten Bantul	Rp200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22.08.5.04.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun				5 Objek	6 Objek	Rp 2.453.096.000,00	Rp 2.453.096.000,00	Rp 125.000.000,00	-Rp 2.328.096.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							Rp 30.912.344.224,00	Rp 25.406.496.692,90	Rp 24.362.537.692,90	-Rp 6.549.806.531,10						Rp29.125.039.967,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 21.594.943.658,00	Rp 18.252.064.523,90	Rp 16.884.105.138,90	-Rp 4.710.838.519,10						Rp20.506.266.719,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							Rp 20.305.984.658,00	Rp 16.963.105.523,90	Rp 16.884.105.138,90	-Rp 3.421.879.519,10						Rp20.137.266.719,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
177	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,5 91,3 Angka Indeks	82,5 91,3 Angka Indeks	Rp 19.189.593.868,00	Rp 16.213.803.437,90	Rp 16.123.369.146,90	-Rp 1.165.788.614,00						Rp18.023.805.254,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi				100 persen	100 persen	Rp 28.239.600,00	Rp 9.488.000,00	Rp 8.948.000,00	-Rp 19.291.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	DKUKMPP	Rp19.245.200,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	Rp 18.182.100,00	Rp 5.296.300,00	Rp 4.756.300,00	-Rp 13.425.800,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp11.169.600,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	Rp 10.057.500,00	Rp 4.191.700,00	Rp 4.191.700,00	-Rp 5.865.800,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp8.075.600,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 persen	100 persen	Rp 16.065.448.961,00	Rp 14.253.225.059,10	Rp 14.102.525.059,10	-Rp 1.962.923.901,90			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	DKUKMPP	Rp16.093.755.010,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				106 Orang/ bulan	107 Orang/ bulan	Rp 15.875.145.961,00	Rp 14.072.625.059,10	Rp 13.932.625.059,10	-Rp 1.942.520.901,90	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp15.910.865.010,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 179.400.000,00	Rp 179.400.000,00	Rp 167.800.000,00	-Rp 11.600.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp174.300.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				23 Laporan	23 Laporan	Rp 10.903.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 2.100.000,00	-Rp 8.803.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp8.590.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	Rp 11.991.000,00	Rp 1.320.000,00	Rp 3.150.000,00	-Rp 8.841.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	DKUKMPP	Rp10.523.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				33 Dokumen	33 Dokumen	Rp 11.991.000,00	Rp 1.320.000,00	Rp 3.150.000,00	-Rp 8.841.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp10.523.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian				100 persen	100 persen	Rp 24.549.800,00	Rp 5.075.000,00	Rp 8.375.000,00	-Rp 16.174.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	DKUKMPP	Rp11.476.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 24.549.800,00	Rp 5.075.000,00	Rp 8.375.000,00	-Rp 16.174.800,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp11.476.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				100 persen	100 Persen	Rp 1.010.394.487,00	Rp 391.808.973,00	Rp 398.926.924,00	-Rp 611.467.563,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	DKUKMPP	Rp379.849.750,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2 Paket	Rp 14.042.680,00	Rp 5.309.650,00	Rp 9.218.290,00	-Rp 4.824.390,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp13.029.250,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	8 Paket	Rp 235.255.997,00	Rp 75.859.583,00	Rp 112.502.394,00	-Rp 122.753.603,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp50.112.500,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	2 Paket	Rp 81.849.160,00	Rp 39.639.040,00	Rp 33.559.040,00	-Rp 48.290.120,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp45.101.250,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6 Paket	Rp 112.546.150,00	Rp 77.630.200,00	Rp 77.630.200,00	-Rp 34.915.950,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp60.135.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 1.500.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 1.250.000,00	-Rp 250.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.250.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2 Laporan	Rp 22.500.000,00	Rp 4.875.000,00	Rp 4.875.000,00	-Rp 17.625.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp14.031.500,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				365 Laporan	70 Laporan	Rp 489.941.500,00	Rp 165.438.000,00	Rp 140.484.500,00	-Rp 349.457.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp173.389.250,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1000 Dokumen	1000 Dokumen	Rp 31.019.000,00	Rp 1.767.500,00	Rp 1.767.500,00	-Rp 29.251.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp8.018.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15 Dokumen	11 Dokumen	Rp 21.740.000,00	Rp 20.040.000,00	Rp 17.640.000,00	-Rp 4.100.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp14.783.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	Rp 1.306.340.220,00	Rp 1.109.827.563,00	Rp 1.132.339.171,00	-Rp 174.001.049,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	DKUKMPP	Rp1.198.885.794,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 57.580.000,00	Rp 43.200.000,00	Rp 33.700.000,00	-Rp 23.880.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp40.090.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 102.029.000,00	Rp 31.392.000,00	Rp 44.610.000,00	-Rp 57.419.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp56.321.400,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				265 Laporan	227 Laporan	Rp 1.146.731.220,00	Rp 1.035.235.563,00	Rp 1.054.029.171,00	-Rp 92.702.049,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.102.474.394,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	Rp 742.629.800,00	Rp 443.058.842,80	Rp 469.104.992,80	-Rp 273.524.807,20			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	DKUKMPP	Rp310.070.500,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				49 Unit	41 Unit	Rp 338.341.700,00	Rp 290.368.532,80	Rp 302.468.532,80	-Rp 35.873.167,20	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp140.928.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	Rp 163.714.500,00	Rp 148.251.810,00	Rp 146.506.860,00	-Rp 17.207.640,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp98.985.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya				3 Unit	2 Unit	Rp 240.573.600,00	Rp 4.438.500,00	Rp 20.129.600,00	-Rp 220.444.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp70.157.500,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
178	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi				8,1 Persen	8,1 Persen	Rp 85.709.936,00	Rp 36.300.000,00	Rp 36.300.000,00	-Rp 3.622.175,00						Rp82.087.761,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten				100 persen	100 persen	Rp 85.709.936,00	Rp 36.300.000,00	Rp 36.300.000,00	-Rp 49.409.936,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Koperasi di Kabupaten Bantul	Rp82.087.761,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	Rp 85.709.936,00	Rp 36.300.000,00	Rp 36.300.000,00	-Rp 49.409.936,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp82.087.761,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
179	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				92 persen	92 persen	Rp 99.317.836,00	Rp 36.150.000,00	Rp 37.150.000,00	Rp 68.637.090,00						Rp167.954.926,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan koperasi yang diperiksa dan diawasi				98 Persen	98 Persen	Rp 99.317.836,00	Rp 36.150.000,00	Rp 37.150.000,00	-Rp 62.167.836,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Koperasi di Kabupaten Bantul	Rp167.954.926,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				230 Unit Usaha	223 Unit Usaha	Rp 99.317.836,00	Rp 36.150.000,00	Rp 37.150.000,00	-Rp 62.167.836,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp167.954.926,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
180	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif				69 Persen	69 Persen	Rp 58.825.436,00	Rp 47.000.000,00	Rp 48.000.000,00	-Rp 7.870.409,00						Rp50.955.027,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya				96 persen	96 persen	Rp 58.825.436,00	Rp 47.000.000,00	Rp 48.000.000,00	-Rp 10.825.436,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Koperasi di Kabupaten Bantul	Rp50.955.027,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				225 Unit Usaha	200 Unit Usaha	Rp 58.825.436,00	Rp 47.000.000,00	Rp 48.000.000,00	-Rp 10.825.436,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp50.955.027,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
181	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan				26.91 Persen	26.91 Persen	Rp 199.157.244,00	Rp 143.202.000,00	Rp 144.202.000,00	Rp 54.666.147,00						Rp253.823.391,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten				100 persen	100 persen	Rp 199.157.244,00	Rp 143.202.000,00	Rp 144.202.000,00	-Rp 54.955.244,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Koperasi di Kabupaten Bantul	Rp253.823.391,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				80 Orang	16 Orang	Rp 199.157.244,00	Rp 143.202.000,00	Rp 144.202.000,00	-Rp 54.955.244,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp253.823.391,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
182	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas				6,1 Persen	6,1 Persen	Rp 133.845.172,00	Rp 40.432.000,00	Rp 44.432.000,00	Rp 153.855.621,00						Rp287.700.793,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan				100 persen	100 persen	Rp 133.845.172,00	Rp 40.432.000,00	Rp 44.432.000,00	-Rp 89.413.172,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Koperasi di Kabupaten Bantul	Rp287.700.793,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				60 Keluarga	30 Keluarga	Rp 13.125.000,00	Rp 5.444.500,00	Rp 5.444.500,00	-Rp 7.680.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp20.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan				80 Unit Usaha	40 Unit Usaha	Rp 120.720.172,00	Rp 34.987.500,00	Rp 38.987.500,00	-Rp 81.732.672,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp267.700.793,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
183	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal				61,25 Persen	61,25 Persen	Rp 161.736.508,00	Rp 327.552.436,00	Rp 329.302.192,00	Rp 724.690.254,00						Rp886.426.762,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para	Cakupan usaha mikro yang diberdayakan				100 Persen	100 Persen	Rp 161.736.508,00	Rp 327.552.436,00	Rp 329.302.192,00	Rp 167.565.684,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	UMKM Kabupaten Bantul	Rp886.426.762,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				7 Unit Usaha	7 Unit Usaha	Rp 6.528.650,00	Rp 2.875.000,00	Rp 2.375.000,00	-Rp 4.153.650,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp75.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	Rp 5.821.750,00	Rp 3.014.500,00	Rp 3.014.500,00	-Rp 2.807.250,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				110 Unit Usaha	220 Unit Usaha	Rp 44.870.300,00	Rp 220.828.100,00	Rp 220.279.400,00	Rp 175.409.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp435.958.801,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				20 Orang	15 Orang	Rp 7.071.750,00	Rp 2.875.000,00	Rp 2.375.000,00	-Rp 4.696.750,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp75.467.961,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				516 Unit Usaha	305 Unit Usaha	Rp 97.444.058,00	Rp 97.959.836,00	Rp 101.258.292,00	Rp 3.814.234,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
184	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase UMKM Digital				42 Persen	42 Persen	Rp 377.798.658,00	Rp 118.665.650,00	Rp 121.349.800,00	Rp 6.714.147,00						Rp384.512.805,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Cakupan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha				100 persen	100 persen	Rp 377.798.658,00	Rp 118.665.650,00	Rp 121.349.800,00	-Rp 256.448.858,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	UMKM di Kabupaten Bantul	Rp384.512.805,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				135 Unit Usaha	20 Unit Usaha	Rp 267.423.658,00	Rp 99.486.600,00	Rp 104.420.750,00	-Rp 163.002.908,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp215.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi				340 Orang	130 Orang	Rp 110.375.000,00	Rp 19.179.050,00	Rp 16.929.050,00	-Rp 93.445.950,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp169.512.805,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 1.288.959.000,00	Rp 1.288.959.000,00	Rp -	-Rp 1.288.959.000,00						Rp369.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
185	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas				290 UMKM	0 UMKM	Rp 1.288.959.000,00	Rp 1.288.959.000,00	Rp -	-Rp 919.959.000,00						Rp369.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Cakupan subsektor industri kreatif berorientasi budaya yang difasilitasi				30 persen	0 Persen	Rp 914.700.000,00	Rp 914.700.000,00	Rp -	-Rp 914.700.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	IKM/UMKM di Kabupaten Bantul	Rp298.650.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				250 Unit	0 Unit	Rp 914.700.000,00	Rp 914.700.000,00	Rp -	-Rp 914.700.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp298.650.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan Pendampingan kewirausahaan Desa Preanur				3 kalurahan	0 Persen	Rp 374.259.000,00	Rp 374.259.000,00	Rp -	-Rp 374.259.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	IKM/UMKM di Kabupaten Bantul	Rp70.350.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.22.08.5.07.0013	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa				7 Laporan	0 Laporan	Rp 374.259.000,00	Rp 374.259.000,00	Rp -	-Rp 374.259.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp70.350.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							Rp 9.317.400.566,00	Rp 7.154.432.169,00	Rp 7.478.432.554,00	-Rp 1.838.968.012,00						Rp8.618.773.248,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							Rp 6.472.828.642,00	Rp 5.502.888.334,00	Rp 5.853.843.685,00	-Rp 618.984.957,00						Rp6.583.846.809,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
186	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi				100 Persen	100 Persen	Rp 227.307.844,00	Rp 184.804.800,00	Rp 186.605.228,00	Rp 63.054.422,00						Rp290.362.266,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pelaku usaha toko swalayan dan pusat perbelanjaan yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan				100 persen	66 persen	Rp 164.102.594,00	Rp 133.462.500,00	Rp 135.262.928,00	-Rp 28.839.666,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha Ritel di Kabupaten Bantul	Rp154.564.166,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	10 Dokumen	Rp 164.102.594,00	Rp 133.462.500,00	Rp 135.262.928,00	-Rp 28.839.666,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp154.564.166,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase pelaku usaha pergudangan yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan				100 persen 55 Persen	55 Persen	Rp 19.771.750,00	Rp 13.277.000,00	Rp 13.277.000,00	-Rp 6.494.750,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha Pergudangan di Kabupaten Bantul	Rp60.132.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				10 Dokumen	5 Dokumen	Rp 19.771.750,00	Rp 13.277.000,00	Rp 13.277.000,00	-Rp 6.494.750,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp60.132.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Prosentase Penerbitan Izin STPW				100 persen	100 persen	Rp 2.455.500,00	Rp 2.030.000,00	Rp 2.030.000,00	-Rp 425.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha Waralaba di Kabupaten Bantul	Rp13.028.600,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	2 Dokumen	Rp 2.455.500,00	Rp 2.030.000,00	Rp 2.030.000,00	-Rp 425.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp13.028.600,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Cakupan pengawasan perizinan perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				20,83 Persen 50 persen	17,67 Persen	Rp 35.200.500,00	Rp 36.035.300,00	Rp 36.035.300,00	Rp 834.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha Mihol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat di Kabupaten Bantul	Rp50.110.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	0 Dokumen	Rp 35.200.500,00	Rp 36.035.300,00	Rp 36.035.300,00	Rp 834.800,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp50.110.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/	Cakupan pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten				66,67 persen	66,67 persen	Rp 5.777.500,00	Rp -	Rp -	-Rp 5.777.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di Kabupaten Bantul	Rp12.527.500,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				1 Laporan	0 Laporan	Rp 5.777.500,00	Rp -	Rp -	-Rp 5.777.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp12.527.500,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
187	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya				53 Persen	53 Persen	Rp 4.706.732.152,00	Rp 4.695.635.074,00	Rp 5.037.540.041,00	Rp 88.332.718,00						Rp4.795.064.870,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan atau dikelola				42 Persen	42 Persen	Rp 3.620.274.380,00	Rp 3.836.455.231,00	Rp 4.158.388.997,00	Rp 538.114.617,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Sarana Distribusi Perdagangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp3.679.054.058,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	8 Unit	Rp 356.325.000,00	Rp 606.360.000,00	Rp 830.300.000,00	Rp 473.975.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp407.325.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				32 Unit	33 Unit	Rp 3.263.949.380,00	Rp 3.230.095.231,00	Rp 3.328.088.997,00	Rp 64.139.617,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp3.271.729.058,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan				100 persen	100 persen	Rp 1.086.457.772,00	Rp 859.179.843,00	Rp 879.151.044,00	-Rp 207.306.728,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp1.116.010.812,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				6 Dokumen	5 Dokumen	Rp 796.163.400,00	Rp 754.191.843,00	Rp 783.393.044,00	-Rp 12.770.356,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirengo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp797.994.389,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				6 Dokumen	4 Dokumen	Rp 290.294.372,00	Rp 104.988.000,00	Rp 95.758.000,00	-Rp 194.536.372,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp318.016.423,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
188	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				6,5 Persen	6,5 Persen	Rp 236.925.244,00	Rp 170.790.000,00	Rp 162.690.000,00	-Rp 2.377,00						Rp236.922.867,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan hasil pemantauan ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di Pelaku Usaha				93.33 persen	93.33 persen	Rp 32.247.500,00	Rp 6.570.000,00	Rp 6.570.000,00	-Rp 25.677.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha Bapokting di Kabupaten Bantul	Rp32.553.685,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				3 Laporan	3 Laporan	Rp 32.247.500,00	Rp 6.570.000,00	Rp 6.570.000,00	-Rp 25.677.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp32.553.685,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rata rata persentase kenaikan harga barang kebutuhan pokok				3 ±1 Persen	3 ±1 Persen	Rp 193.302.744,00	Rp 161.530.000,00	Rp 153.430.000,00	-Rp 39.872.744,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha Bapokting di Kabupaten Bantul	Rp192.869.057,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	Rp 155.449.744,00	Rp 149.940.000,00	Rp 141.840.000,00	-Rp 13.609.744,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp154.869.737,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	Rp 37.853.000,00	Rp 11.590.000,00	Rp 11.590.000,00	-Rp 26.263.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp37.999.320,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk bersubsidi				50.87 persen	50.87 persen	Rp 11.375.000,00	Rp 2.690.000,00	Rp 2.690.000,00	-Rp 8.685.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha Pupuk dan Pestisidan Bersubsidi di Kabupaten Bantul	Rp11.500.125,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	1 Laporan	Rp 11.375.000,00	Rp 2.690.000,00	Rp 2.690.000,00	-Rp 8.685.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp11.500.125,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
189	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor barang				120,6 undefined juta US\$ undefined	120,6 juta US\$	Rp 198.405.872,00	Rp 82.452.372,00	Rp 83.452.328,00	Rp 20.819.000,00						Rp219.224.872,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan standar promosi dagang				80 persen	100 Persen	Rp 198.405.872,00	Rp 82.452.372,00	Rp 83.452.328,00	-Rp 114.953.544,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Ekspor di Kabupaten Bantul	Rp219.224.872,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				8 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	Rp 123.864.000,00	Rp 5.489.500,00	Rp 4.489.500,00	-Rp 119.374.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				20 Produk	20 Produk	Rp 74.541.872,00	Rp 76.962.872,00	Rp 78.962.828,00	Rp 4.420.956,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp69.224.872,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
190	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				71 Persen	71 Persen	Rp 595.764.430,00	Rp 274.756.088,00	Rp 289.756.088,00	-Rp 154.812.496,00						Rp440.951.934,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapanny a (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan				70 persen	70 persen	Rp 595.764.430,00	Rp 274.756.088,00	Rp 289.756.088,00	-Rp 306.008.342,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha di Kabupaten Bantul	Rp440.951.934,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				9250 Unit	3000 Unit	Rp 528.771.430,00	Rp 263.564.088,00	Rp 278.564.088,00	-Rp 250.207.342,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp382.314.934,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				200 Orang	20 Orang	Rp 66.993.000,00	Rp 11.192.000,00	Rp 11.192.000,00	-Rp 55.801.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp58.637.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
191	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Nilai belanja produk dalam negeri				1,8 persen	1,8 persen	Rp 507.693.100,00	Rp 94.450.000,00	Rp 93.800.000,00	Rp 93.626.900,00						Rp601.320.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan				25 persen	100 Persen	Rp 507.693.100,00	Rp 94.450.000,00	Rp 93.800.000,00	-Rp 413.893.100,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	UMKM di Kabupaten Bantul	Rp601.320.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				15 UMKM	15 UMKM	Rp 25.675.000,00	Rp 637.500,00	Rp 637.500,00	-Rp 25.037.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp550.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				85 UMKM	50 UMKM	Rp 482.018.100,00	Rp 93.812.500,00	Rp 93.162.500,00	-Rp 388.855.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp51.320.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							Rp 2.844.571.924,00	Rp 1.651.543.835,00	Rp 1.624.588.869,00	-Rp 1.219.983.055,00						Rp2.034.926.439,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
192	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri				65 Persen	65 Persen	Rp 2.721.340.688,00	Rp 1.566.564.799,00	Rp 1.534.750.391,00	-Rp 938.195.512,00						Rp1.783.145.176,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkanya menjadi PERDA				50 persen	50 persen	Rp 2.721.340.688,00	Rp 1.566.564.799,00	Rp 1.534.750.391,00	-Rp 1.186.590.297,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	IKM di Kabupaten Bantul	Rp1.783.145.176,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 850.000,00	Rp 814.200,00	Rp 250.000,00	-Rp 600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				2 Dokumen	0 Dokumen	Rp 80.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 80.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				23 Dokumen	22 Dokumen	Rp 1.473.407.508,00	Rp 784.544.736,00	Rp 751.794.528,00	-Rp 721.612.980,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp614.224.872,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				34 Dokumen	29 Dokumen	Rp 1.167.083.180,00	Rp 781.205.863,00	Rp 782.705.863,00	-Rp 384.377.317,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp868.920.304,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
193	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan				100 Persen	100 Persen	Rp 42.490.136,00	Rp 31.022.036,00	Rp 33.366.564,00	Rp 77.104.456,00						Rp119.594.592,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	Persentase Penyelesaian Pengajuan Izin usaha industri dalam bentuk Berita Acara Verifikasi Teknis Pemenuhan SKU				100 Persen	100 Persen	Rp 42.490.136,00	Rp 31.022.036,00	Rp 33.366.564,00	-Rp 9.123.572,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	IKM di Kabupaten Bantul	Rp119.594.592,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				12 Dokumen	16 Dokumen	Rp 2.410.500,00	Rp 438.800,00	Rp 438.800,00	-Rp 1.971.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp49.100.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				5 Dokumen	6 Dokumen	Rp 40.079.636,00	Rp 30.583.236,00	Rp 32.927.764,00	-Rp 7.151.872,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp70.494.592,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
194	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini				100 Persen	100 Persen	Rp 80.741.100,00	Rp 53.957.000,00	Rp 56.471.914,00	Rp 51.445.571,00						Rp132.186.671,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan kepatuhan pelaporan data Industri melalui SIINAS				35,38 persen	35,38 persen	Rp 80.741.100,00	Rp 53.957.000,00	Rp 56.471.914,00	-Rp 24.269.186,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	IKM di Kabupaten Bantul	Rp132.186.671,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				12 Dokumen	11 Dokumen	Rp 72.099.100,00	Rp 53.657.000,00	Rp 56.171.914,00	-Rp 15.927.186,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp106.186.671,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				6 Dokumen	3 Dokumen	Rp 8.642.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 8.342.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp26.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							Rp 7.224.095.736,00	Rp 7.035.271.832,39	Rp 6.911.014.832,39	-Rp 313.080.903,61						Rp14.198.117.256,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 7.042.588.736,00	Rp 6.853.764.832,39	Rp 6.911.014.832,39	-Rp 131.573.903,61						Rp14.198.117.256,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							Rp 7.042.588.736,00	Rp 6.853.764.832,39	Rp 6.911.014.832,39	-Rp 131.573.903,61						Rp14.198.117.256,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
195	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				83,90 88,11 nilai angka	-	Rp 6.329.101.404,00	Rp 6.281.480.332,39	Rp 6.366.480.332,39	Rp 6.194.502.852,00						Rp12.523.604.256,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul				100 persen	100 persen	Rp 16.100.000,00	Rp 3.450.000,00	Rp 3.450.000,00	-Rp 12.650.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp152.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 9.000.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 2.250.000,00	-Rp 6.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp118.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	Rp 4.500.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	-Rp 3.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	Rp 2.600.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	-Rp 2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan				100 persen	100 persen	Rp 4.980.070.730,00	Rp 5.396.885.300,39	Rp 5.429.785.300,39	Rp 449.714.570,39			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	ASN DPMPPTSP Kabupaten Bantul	Rp5.052.435.128,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	Rp 4.911.310.730,00	Rp 5.328.725.300,39	Rp 5.378.725.300,39	Rp 467.414.570,39	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp4.968.335.128,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 68.760.000,00	Rp 68.160.000,00	Rp 51.060.000,00	-Rp 17.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp84.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				100 persen	100 persen	Rp 34.319.600,00	Rp 2.400.000,00	Rp 25.100.000,00	-Rp 9.219.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	ASN DPMPTSP Kabupaten Bantul	Rp475.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan				80 Orang	70 Orang	Rp 34.319.600,00	Rp 2.400.000,00	Rp 25.100.000,00	-Rp 9.219.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp475.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				100 persen	100 persen	Rp 597.841.722,00	Rp 101.730.410,00	Rp 129.046.310,00	-Rp 468.795.412,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp3.471.400.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	Rp 9.541.860,00	Rp 6.297.930,00	Rp 6.297.930,00	-Rp 3.243.930,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp489.424.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	Rp 226.203.780,00	Rp 9.590.000,00	Rp 30.071.100,00	-Rp 196.132.680,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	Rp 39.608.292,00	Rp 31.183.280,00	Rp 32.686.280,00	-Rp 6.922.012,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	Rp 78.161.790,00	Rp 3.891.200,00	Rp 8.021.000,00	-Rp 70.140.790,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp482.703.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 6.600.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	-Rp 5.100.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp6.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	Rp 36.245.000,00	Rp 11.100.000,00	Rp 11.850.000,00	-Rp 24.395.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp16.672.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	Rp 187.954.000,00	Rp 36.968.000,00	Rp 37.420.000,00	-Rp 150.534.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp980.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 6.227.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	-Rp 5.627.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp23.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 7.300.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	-Rp 6.700.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp23.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	Rp 259.576.052,00	Rp 255.350.272,00	Rp 259.754.172,00	Rp 178.120,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp668.603.798,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	Rp 2.184.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	-Rp 984.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp2.190.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 16.500.000,00	-Rp 3.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp33.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 30.105.000,00	Rp 9.750.272,00	Rp 11.654.172,00	-Rp 18.450.828,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 207.287.052,00	Rp 224.400.000,00	Rp 230.400.000,00	Rp 23.112.948,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp543.413.798,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	Rp 324.193.300,00	Rp 519.464.350,00	Rp 515.644.550,00	Rp 191.451.250,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp2.503.965.130,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	Rp 152.951.450,00	Rp 99.687.500,00	Rp 99.687.500,00	-Rp 53.263.950,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				122 Unit	122 Unit	Rp 42.831.850,00	Rp 34.071.850,00	Rp 34.071.850,00	-Rp 8.760.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	Rp 128.410.000,00	Rp 385.705.000,00	Rp 381.885.200,00	Rp 253.475.200,00	Kab. Bantul, Bantul, Tliringgo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.403.965.130,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul				100 persen	100 persen	Rp 117.000.000,00	Rp 2.200.000,00	Rp 3.700.000,00	-Rp 113.300.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 117.000.000,00	Rp 2.200.000,00	Rp 3.700.000,00	-Rp 113.300.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
196	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Proyek				433 proyek	2 persen	Rp 36.310.000,00	Rp 7.400.000,00	Rp 7.400.000,00	Rp 200.190.000,00						Rp236.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota				1 dokumen	1 dokumen	Rp 26.110.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	-Rp 21.110.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha	Rp128.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 14.960.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	-Rp 13.760.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp86.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Facilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 11.150.000,00	Rp 3.800.000,00	Rp 3.800.000,00	-Rp 7.350.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp42.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi Investasi				2 peta potensi	1 peta potensi	Rp 10.200.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	-Rp 7.800.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha	Rp108.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 5.100.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	-Rp 3.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp56.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 5.100.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	-Rp 3.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp51.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
197	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi Penanaman Modal				3 peminat	5,80 persen	Rp 167.312.536,00	Rp 34.200.000,00	Rp 35.200.000,00	Rp 305.725.464,00						Rp473.038.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah				100 persen	100 persen	Rp 167.312.536,00	Rp 34.200.000,00	Rp 35.200.000,00	-Rp 132.112.536,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha	Rp473.038.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 161.312.536,00	Rp 33.000.000,00	Rp 34.000.000,00	-Rp 127.312.536,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp318.538.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 6.000.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	-Rp 4.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp154.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
198	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan				93.3 persen	99,10 persen	Rp 318.229.924,00	Rp 452.784.500,00	Rp 420.234.500,00	Rp 99.380.076,00						Rp417.610.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal				3000 legalitas	3000 legalitas	Rp 318.229.924,00	Rp 452.784.500,00	Rp 420.234.500,00	Rp 102.004.576,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp417.610.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 6.000.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	-Rp 3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1900 Pelaku Usaha	1900 Pelaku Usaha	Rp 194.962.816,00	Rp 347.634.500,00	Rp 310.884.500,00	Rp 115.921.684,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan konsultasi perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				900 Pelaku Usaha	900 Pelaku Usaha	Rp 17.929.800,00	Rp 2.400.000,00	Rp 3.600.000,00	-Rp 14.329.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp287.210.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				2200 Kegiatan Usaha	2200 Kegiatan Usaha	Rp 99.337.308,00	Rp 100.350.000,00	Rp 103.350.000,00	Rp 4.012.692,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp35.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
199	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Pelaku Usaha Tertib LKPM				475.52 milyar	23 persen	Rp 72.877.436,00	Rp 43.700.000,00	Rp 46.500.000,00	Rp 357.359.564,00						Rp430.237.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan				8 perusahaan	8 perusahaan	Rp 72.877.436,00	Rp 43.700.000,00	Rp 46.500.000,00	-Rp 26.377.436,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha	Rp430.237.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				124 Kegiatan Usaha.	124 Kegiatan Usaha.	Rp 10.625.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 4.800.000,00	-Rp 5.825.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp142.229.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	Rp 24.540.000,00	Rp 2.300.000,00	Rp 2.300.000,00	-Rp 22.240.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp220.090.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	Rp 37.712.436,00	Rp 38.400.000,00	Rp 39.400.000,00	Rp 1.687.564,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp67.917.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
200	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal				100 persen	100 persen	Rp 118.757.436,00	Rp 34.200.000,00	Rp 35.200.000,00	-Rp 1.629.436,00						Rp117.128.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota				3 jenis data	3 jenis data	Rp 118.757.436,00	Rp 34.200.000,00	Rp 35.200.000,00	-Rp 83.557.436,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp117.128.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 118.757.436,00	Rp 34.200.000,00	Rp 35.200.000,00	-Rp 83.557.436,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp117.128.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 181.507.000,00	Rp 181.507.000,00	-	-Rp 181.507.000,00						Rp0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							Rp 181.507.000,00	Rp 181.507.000,00	-	-Rp 181.507.000,00						Rp0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
201	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				100 persen	0 Persen	Rp 181.507.000,00	Rp 181.507.000,00	-	-Rp 181.507.000,00						Rp0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan				1 inovasi	0 Persen	Rp 181.507.000,00	Rp 181.507.000,00	-	-Rp 181.507.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Pelaku Usaha	Rp0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	Rp 181.507.000,00	Rp 181.507.000,00	-	-Rp 181.507.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)							Rp 26.170.774.468,00	Rp 25.589.641.329,81	Rp 15.153.032.329,81	-Rp 11.017.742.138,19						Rp15.550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 26.170.774.468,00	Rp 25.589.641.329,81	Rp 15.153.032.329,81	-Rp 11.017.742.138,19						Rp15.550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 26.170.774.468,00	Rp 25.589.641.329,81	Rp 15.153.032.329,81	-Rp 11.017.742.138,19						Rp15.550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
202	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				80,80 angka	80,80 angka	Rp 6.782.220.468,00	Rp 6.201.087.329,81	Rp 6.419.087.329,81	-Rp 6.782.220.468,00						Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 42.470.000,00	Rp 26.850.000,00	Rp 26.850.000,00	-Rp 15.620.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Perencanaan, Penganggaran Dinas Kebudayaan	Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	Rp 14.750.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 12.000.000,00	-Rp 2.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	Rp 27.720.000,00	Rp 14.850.000,00	Rp 14.850.000,00	-Rp 12.870.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	Rp 5.090.053.677,00	Rp 5.272.351.419,81	Rp 5.472.351.419,81	Rp 382.297.742,81			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Administrasi Keuangan Dinas Kebudayaan	Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	Rp 4.961.633.677,00	Rp 5.149.881.419,81	Rp 5.349.881.419,81	Rp 388.247.742,81	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 120.420.000,00	Rp 120.420.000,00	Rp 120.420.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				21 Laporan	21 Laporan	Rp 8.000.000,00	Rp 2.050.000,00	Rp 2.050.000,00	-Rp 5.950.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 2.250.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.700.000,00	-Rp 550.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	BMD Dinas Kebudayaan	Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	Rp 2.250.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.700.000,00	-Rp 550.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persem	100 Persem	Rp 27.125.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 27.125.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Pegawai Dinas Kebudayaan	Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	0 Dokumen	Rp 27.125.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 27.125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 166.819.289,00	Rp 90.281.182,00	Rp 90.281.182,00	-Rp 76.538.107,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Administrasi Umum Dinas Kebudayaan	Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	Rp 2.994.750,00	Rp 4.973.100,00	Rp 4.973.100,00	Rp 1.978.350,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	Rp 13.999.950,00	Rp 11.063.000,00	Rp 11.063.000,00	-Rp 2.936.950,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	Rp 6.128.672,00	Rp 5.355.800,00	Rp 5.355.800,00	-Rp 772.872,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	Rp 18.357.917,00	Rp 6.433.282,00	Rp 6.433.282,00	-Rp 11.924.635,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	Rp 8.010.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	-Rp 3.510.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	120 Laporan	Rp 111.148.000,00	Rp 51.776.000,00	Rp 51.776.000,00	-Rp 59.372.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.780.000,00	Rp 2.780.000,00	Rp 2.780.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 578.165.900,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	-Rp 568.165.900,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	BMD Dinas Kebudayaan	Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	Rp 300.875.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 300.875.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	1 Unit	Rp 277.290.900,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	-Rp 267.290.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 614.726.052,00	Rp 605.244.300,00	Rp 623.244.300,00	Rp 8.518.248,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Penyediaan Jasa penunjang	Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 15.600.000,00	Rp 13.500.300,00	Rp 13.500.300,00	-Rp 2.099.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 14.845.000,00	Rp 16.344.000,00	Rp 16.344.000,00	Rp 1.499.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 584.281.052,00	Rp 575.400.000,00	Rp 593.400.000,00	Rp 9.118.948,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 260.610.550,00	Rp 194.660.428,00	Rp 194.660.428,00	-Rp 65.950.122,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	BMD Dinas Kebudayaan	Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	Rp 204.559.650,00	Rp 166.712.050,00	Rp 166.712.050,00	-Rp 37.847.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	0 Unit	Rp 845.300,00	Rp -	Rp -	-Rp 845.300,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	0 Unit	Rp 10.220.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 10.220.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1 Unit	Rp 10.000.000,00	Rp 22.886.778,00	Rp 22.886.778,00	Rp 12.886.778,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	Rp 34.985.600,00	Rp 5.061.600,00	Rp 5.061.600,00	-Rp 29.924.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
203	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Sastra				100 Persen	100 Persen	Rp 19.388.554.000,00	Rp 19.388.554.000,00	Rp 8.733.945.000,00	-Rp 3.838.554.000,00						Rp15.550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Persentase Capaian Kinerja Sejarah, Bahasa, sastra dan Permuseuman				100 Persen	100 Persen	Rp 2.960.340.000,00	Rp 2.960.340.000,00	Rp 1.597.731.500,00	-Rp 1.362.608.500,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Umum, Pemerhati Sejarah/Bahasa/Permuseuman, Guru/Pendidik, Pelajar, Seniman, Budayawan, Mitra Kerja Disbud, Komunitas, dan ASN	Rp1.950.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				4 Dokumen	3 Dokumen	Rp 1.042.162.000,00	Rp 1.042.162.000,00	Rp 499.052.000,00	-Rp 543.110.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra				5 Laporan	4 Laporan	Rp 1.352.499.000,00	Rp 1.352.499.000,00	Rp 799.399.500,00	-Rp 553.099.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				16 Unit	17 Unit	Rp 565.679.000,00	Rp 565.679.000,00	Rp 299.280.000,00	-Rp 266.399.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase Capaian Kinerja Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya				100 Persen	100 Persen	Rp 2.954.023.000,00	Rp 2.954.023.000,00	Rp 1.008.200.000,00	-Rp 1.945.823.000,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat umum, Pengelola Warisan Budaya Benda-Tak benda, Rintisan Desa budaya, TACB, Komunitas/Kelompok /Organisasi, pelestari-pengelola CBWB, pelajar dan Objek Warisan Budaya/CB	Rp1.600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				20 Objek	20 Objek	Rp 1.512.743.000,00	Rp 1.512.743.000,00	Rp 398.560.000,00	-Rp 1.114.183.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan				10 Objek	10 Objek	Rp 1.241.280.000,00	Rp 1.241.280.000,00	Rp 509.760.000,00	-Rp 731.520.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi				2 Objek	1 Objek	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 99.880.000,00	-Rp 100.120.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Persentase Capaian Kinerja Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				100 Persen	100 Persen	Rp 1.566.360.000,00	Rp 1.566.360.000,00	Rp 951.920.000,00	-Rp 614.440.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat/Lembag a Budaya dan Dinas Kebudayaan	Rp1.800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.04.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				5 Unit	3 Unit	Rp 1.566.360.000,00	Rp 1.566.360.000,00	Rp 951.920.000,00	-Rp 614.440.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp1.800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase Aktualisasi Adat Tradisi dan seni Budaya				100236 Kali	100236 Kali	Rp 11.907.831.000,00	Rp 11.907.831.000,00	Rp 5.176.093.500,00	-Rp 6.731.737.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat Umum, Pemerhati Seni Budaya ,Pendidik, Pelajar, Seniman, Budayawan, Organisasi/ Komunitas/Lembaga budaya/Kelompok seni, Mitra Kerja Disbud, I, Rintisan desa Budaya dan ASN	Rp10.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				4 Laporan	2 Laporan	Rp 589.492.000,00	Rp 589.492.000,00	Rp 192.856.500,00	-Rp 396.635.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				14 Lembaga	3 Lembaga	Rp 1.350.000.000,00	Rp 1.350.000.000,00	Rp 393.327.000,00	-Rp 956.673.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				3 Laporan	1 Laporan	Rp 847.330.000,00	Rp 847.330.000,00	Rp 279.798.000,00	-Rp 567.532.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp950.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				15 Orang	6 Orang	Rp 292.310.000,00	Rp 292.310.000,00	Rp 127.999.800,00	-Rp 164.310.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				9 Laporan	3 Laporan	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp 381.776.000,00	-Rp 118.224.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				16 Laporan	7 Laporan	Rp 4.220.000.000,00	Rp 4.220.000.000,00	Rp 1.876.287.800,00	-Rp 2.343.712.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 295.539.000,00	Rp 295.539.000,00	Rp 74.120.000,00	-Rp 221.419.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				140 Orang	120 Orang	Rp 125.125.000,00	Rp 125.125.000,00	Rp 42.566.200,00	-Rp 82.558.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				3 Laporan	4 Laporan	Rp 443.331.000,00	Rp 443.331.000,00	Rp 410.000.000,00	-Rp 33.331.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				6 Laporan	3 Laporan	Rp 2.244.704.000,00	Rp 2.244.704.000,00	Rp 821.077.200,00	-Rp 1.423.626.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp2.300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				55 Laporan	3 Laporan	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp 576.285.000,00	-Rp 423.715.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp2.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							Rp 7.808.971.604,00	Rp 6.190.004.686,00	Rp 6.453.004.686,00	-Rp 1.355.966.918,00						Rp8.256.151.046,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 7.808.971.604,00	Rp 6.190.004.686,00	Rp 6.453.004.686,00	-Rp 1.355.966.918,00						Rp8.256.151.046,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							Rp 7.583.455.624,00	Rp 5.920.219.526,00	Rp 6.196.963.998,00	-Rp 1.386.491.626,00						Rp7.926.878.302,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
204	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				80.92 90.08 Angka Indeks	81.55 90.19 Angka Indeks	Rp 6.634.580.572,00	Rp 4.990.361.026,00	Rp 5.295.211.150,00	-Rp 25.601.818,00						Rp6.608.978.754,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 persen	100 persen	Rp 4.980.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	-Rp 4.380.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp5.009.880,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 2.490.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 2.190.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.504.940,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	Rp 2.490.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 2.190.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.504.940,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah				100 persen	100 persen	Rp 5.945.904.870,00	Rp 4.665.272.069,90	Rp 4.965.599.833,90	-Rp 980.305.036,10			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp5.966.580.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	Rp 5.838.532.434,00	Rp 4.556.912.069,90	Rp 4.856.912.069,90	-Rp 981.620.364,10	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp5.858.563.629,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 77.760.000,00	Rp 76.560.000,00	Rp 75.760.000,00	-Rp 2.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp78.226.560,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	19 Laporan	Rp 29.612.436,00	Rp 31.800.000,00	Rp 32.927.764,00	Rp 3.315.328,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp29.790.111,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah				100 persen	100 persen	Rp 192.939.150,00	Rp 27.679.256,10	Rp 30.133.296,10	-Rp 162.805.853,90			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp178.363.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	Rp 10.219.820,00	Rp 992.200,00	Rp 992.200,00	-Rp 9.227.620,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp8.048.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	Rp 49.977.950,00	Rp 8.175.256,10	Rp 8.183.296,10	-Rp 41.794.653,90	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.270.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	Rp 17.399.180,00	Rp 2.742.800,00	Rp 2.742.800,00	-Rp 14.656.380,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp15.090.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	Rp 20.024.200,00	Rp 1.108.000,00	Rp 1.108.000,00	-Rp 18.916.200,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp20.120.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	1 Dokumen	Rp 8.700.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	-Rp 6.300.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp8.752.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	5 Laporan	Rp 56.018.000,00	Rp 12.261.000,00	Rp 14.707.000,00	-Rp 41.311.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp50.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	Rp 30.600.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 30.600.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp30.783.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	Rp 262.047.052,00	Rp 247.195.000,00	Rp 250.383.820,00	-Rp 11.663.232,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp258.830.774,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 4.700.000,00	Rp 4.700.000,00	Rp 2.250.000,00	-Rp 2.450.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp5.030.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	Rp 50.060.000,00	Rp 16.295.000,00	Rp 16.295.000,00	-Rp 33.765.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.270.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	Rp 207.287.052,00	Rp 226.200.000,00	Rp 231.838.820,00	Rp 24.551.768,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp208.530.774,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	Rp 228.709.500,00	Rp 49.614.700,00	Rp 48.494.200,00	-Rp 180.215.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp200.194.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	13 Unit	Rp 60.017.400,00	Rp 22.625.400,00	Rp 22.625.400,00	-Rp 37.392.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp55.330.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	6 Unit	Rp 108.690.100,00	Rp 21.972.600,00	Rp 20.852.100,00	-Rp 87.838.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp94.564.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	Rp 60.002.000,00	Rp 5.016.700,00	Rp 5.016.700,00	-Rp 54.985.300,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp50.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
205	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan				81.39 poin	26.99 persen	Rp 939.875.052,00	Rp 928.858.500,00	Rp 900.752.848,00	Rp 362.824.496,00						Rp1.302.699.548,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				11.51 persen	100 persen	Rp 673.937.052,00	Rp 588.159.000,00	Rp 596.053.348,00	-Rp 77.883.704,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat/Pemusta ka	Rp1.005.199.548,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	Rp 20.000.000,00	Rp 70.735.000,00	Rp 70.735.000,00	Rp 50.735.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp51.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				4 Layanan	4 Layanan	Rp 368.837.308,00	Rp 368.840.000,00	Rp 372.223.292,00	Rp 3.385.984,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp573.353.337,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	Rp 2.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	-Rp 1.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp17.750.311,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				100000 Eksemplar	100000 Eksemplar	Rp 4.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 16.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp28.162.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	0 Dokumen	Rp 100.650.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 100.650.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp132.433.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				775 Eksemplar	1800 Eksemplar	Rp 178.449.744,00	Rp 127.584.000,00	Rp 132.095.056,00	-Rp 46.354.688,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp202.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				6 lokus	100 persen	Rp 265.938.000,00	Rp 340.699.500,00	Rp 304.699.500,00	Rp 38.761.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat/Pemusta ka	Rp297.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				4 Perpustakaan	3 Perpustakaan	Rp 241.000.000,00	Rp 234.886.500,00	Rp 198.886.500,00	-Rp 42.113.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp252.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				2 Lokus	8 Lokus	Rp 24.938.000,00	Rp 105.813.000,00	Rp 105.813.000,00	Rp 80.875.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
206	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Rata-rata Naskah Kuno yang Dilestarikan				1 Naskah Kuno	1 Naskah	Rp 9.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 6.200.000,00						Rp15.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				1 Eksemplar	100 persen	Rp 9.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	-Rp 8.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Masyarakat	Rp15.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				1 Orang	1 Orang	Rp 5.355.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	-Rp 4.355.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp8.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				1 Eksemplar	0 Eksemplar	Rp 3.645.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 3.645.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp7.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							Rp 225.515.980,00	Rp 269.785.160,00	Rp 256.040.688,00	Rp 30.524.708,00						Rp329.272.744,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
207	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional				82.33 Persen	82.33 persen	Rp 217.515.980,00	Rp 269.285.160,00	Rp 255.540.688,00	Rp 106.643.805,00						Rp324.159.785,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				91 persen	100 persen	Rp 197.449.744,00	Rp 268.285.160,00	Rp 254.540.688,00	Rp 57.090.944,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, Kalurahan, Masyarakat	Rp283.959.785,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				100100 Berkas	200000 Berkas	Rp 26.000.000,00	Rp 128.485.160,00	Rp 112.485.160,00	Rp 86.485.160,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp62.859.785,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				2100 Berkas	250000 Berkas	Rp 126.449.744,00	Rp 130.800.000,00	Rp 133.055.528,00	Rp 6.605.784,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp161.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Laporan	45 Laporan	Rp 45.000.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00	-Rp 36.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp60.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				90.10 persen	100 persen	Rp 15.185.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 14.685.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp30.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1050 Arsip	1000 Arsip	Rp 15.185.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 14.685.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp30.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				75.67 persen	100 persen	Rp 4.881.236,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 4.381.236,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp10.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				30 Pengguna	800 Pengguna	Rp 4.881.236,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 4.381.236,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp10.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
208	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				83.35 Persen	83.35 Persen	Rp 8.000.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 2.887.041,00						Rp5.112.959,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Capaian Kinerja Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				100 persen	100 persen	Rp 8.000.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 7.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, Kalurahan, Masyarakat	Rp5.112.959,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				2100 Arsip	9000 Arsip	Rp 8.000.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 7.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.112.959,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							Rp 11.393.130.847,00	Rp 9.133.690.114,49	Rp 8.379.910.114,49	-Rp 3.013.220.732,51						Rp8.405.765.236,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 757.780.000,00	Rp 757.780.000,00	Rp -	-Rp 757.780.000,00						Rp125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 757.780.000,00	Rp 757.780.000,00	Rp -	-Rp 757.780.000,00						Rp125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
209	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi				100 Persen	0 Persen	Rp 757.780.000,00	Rp 757.780.000,00	Rp -	-Rp 632.780.000,00						Rp125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan				100 Persen	0 Persen	Rp 757.780.000,00	Rp 757.780.000,00	Rp -	-Rp 757.780.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat se-Kabupaten Bantul Kab. Bantul	Rp125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.06.0005	Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan				6 Objek	0 Objek	Rp 757.780.000,00	Rp 757.780.000,00	Rp -	-Rp 757.780.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							Rp 10.635.350.847,00	Rp 8.375.910.114,49	Rp 8.379.910.114,49	-Rp 2.255.440.732,51						Rp8.280.765.236,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							Rp 10.635.350.847,00	Rp 8.375.910.114,49	Rp 8.379.910.114,49	-Rp 2.255.440.732,51						Rp8.280.765.236,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
210	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				80,60 Angka	80,60 Angka	Rp 6.306.393.563,00	Rp 5.835.770.382,49	Rp 5.862.349.706,49	-Rp 1.009.842.327,00						Rp5.296.551.236,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 47.155.000,00	Rp 6.950.000,00	Rp 6.950.000,00	-Rp 40.205.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	ASN DKP Bantul	Rp65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	5 Dokumen	Rp 37.155.000,00	Rp 3.510.000,00	Rp 3.510.000,00	-Rp 33.645.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	Rp 10.000.000,00	Rp 3.440.000,00	Rp 3.440.000,00	-Rp 6.560.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	Rp 3.751.896.814,00	Rp 4.547.381.153,89	Rp 4.547.381.153,89	Rp 795.484.339,89			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	ASN dan non ASN DKP Bantul	Rp2.781.459.236,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				924 Orang/bulan	33 Orang/bulan	Rp 3.640.236.814,00	Rp 4.440.401.153,89	Rp 4.440.401.153,89	Rp 800.164.339,89	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp2.666.459.236,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 104.460.000,00	Rp 103.980.000,00	Rp 103.980.000,00	-Rp 480.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp105.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	Rp 7.200.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	-Rp 4.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 7.200.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	-Rp 4.200.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	UPTD BBI dan TPI	Rp2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 7.200.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	-Rp 4.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Kepegawaian				100 persen	100 persen	Rp 91.000.000,00	Rp 59.100.000,00	Rp 58.750.000,00	-Rp 32.250.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat se-Kabupaten Bantul Kab. Bantul	Rp24.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 29.700.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	-Rp 25.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	62 Orang	Rp 61.300.000,00	Rp 54.600.000,00	Rp 54.250.000,00	-Rp 7.050.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	Rp 424.036.965,00	Rp 141.587.825,00	Rp 147.254.999,00	-Rp 276.781.966,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat se-Kabupaten Bantul Kab. Bantul	Rp667.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10 Paket	Rp 14.706.965,00	Rp 7.505.325,00	Rp 7.505.325,00	-Rp 7.201.640,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp 38.417.800,00	Rp 13.295.300,00	Rp 13.295.300,00	-Rp 25.122.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp95.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp 146.042.200,00	Rp 28.454.200,00	Rp 28.454.200,00	-Rp 117.588.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp 25.025.000,00	Rp 7.550.000,00	Rp 7.557.174,00	-Rp 17.467.826,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 7.800.000,00	Rp 7.800.000,00	Rp 7.800.000,00	-Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp7.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	Rp 10.500.000,00	Rp 3.375.000,00	Rp 3.375.000,00	-Rp 7.125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	Rp 157.870.000,00	Rp 65.233.000,00	Rp 70.893.000,00	-Rp 86.977.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp325.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.900.000,00	Rp 625.000,00	Rp 625.000,00	-Rp 1.275.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 21.775.000,00	Rp 7.750.000,00	Rp 7.750.000,00	-Rp 14.025.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja penyediaan pengadaan barang milik daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 1.063.030.214,00	Rp 103.528.500,00	Rp 103.178.500,00	-Rp 959.851.714,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat se-Kabupaten Bantul Kab. Bantul	Rp601.592.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	Rp 71.592.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 71.592.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp71.592.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	Rp 145.128.500,00	Rp 103.528.500,00	Rp 103.178.500,00	-Rp 41.950.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp180.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	Rp 846.309.714,00	Rp -	Rp -	-Rp 846.309.714,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 393.805.608,00	Rp 367.813.992,00	Rp 440.516.142,00	Rp 46.710.534,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat se-Kabupaten Bantul Kab. Bantul	Rp370.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	Rp 54.312.500,00	Rp 45.000.000,00	Rp 46.060.000,00	-Rp 8.252.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp17.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	Rp 29.988.000,00	Rp 20.521.000,00	Rp 21.521.000,00	-Rp 8.467.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp85.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	Rp 308.505.108,00	Rp 301.292.992,00	Rp 371.935.142,00	Rp 63.430.034,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp262.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja pemeliharaan barang milik daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 528.268.962,00	Rp 606.408.911,60	Rp 555.318.911,60	Rp 27.049.949,60			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat se-Kabupaten Bantul Kab. Bantul	Rp785.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	11 Unit	Rp 193.815.050,00	Rp 140.398.650,00	Rp 126.388.650,00	-Rp 67.426.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp195.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	35 Unit	Rp 282.550.100,00	Rp 221.747.500,00	Rp 175.667.500,00	-Rp 106.882.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp265.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	Rp 6.528.000,00	Rp 7.507.500,00	Rp 7.507.500,00	Rp 979.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	6 Unit	Rp 45.375.812,00	Rp 236.755.261,60	Rp 245.755.261,60	Rp 200.379.449,60	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
211	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap				0,66 Persen	0,66 Persen	Rp 785.217.900,00	Rp 265.855.000,00	Rp 287.782.764,00	-Rp 486.742.780,00						Rp298.475.120,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan				58 persen	undefined undefined	Rp 7.137.500,00	Rp 1.400.000,00	Rp 1.400.000,00	-Rp 5.737.500,00			Memantapkan sistem pertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, danekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat se-Kabupaten Bantul Kab. Bantul	Rp7.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	2 Dokumen	Rp 4.162.500,00	Rp -	Rp -	-Rp 4.162.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, danekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1 Unit	2 Unit	Rp -	Rp -	Rp -	-Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, danekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp2.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				2 Unit	3 Unit	Rp 2.975.000,00	Rp 1.400.000,00	Rp 1.400.000,00	-Rp 1.575.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, danekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi				5 Persen	5 Persen	Rp 502.893.300,00	Rp 33.325.000,00	Rp 54.125.000,00	-Rp 448.768.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat se-Kabupaten Bantul Kab. Bantul	Rp105.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				40 Orang	10 Orang	Rp 483.793.300,00	Rp 31.925.000,00	Rp 52.725.000,00	-Rp 431.068.300,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				18 Kelompok	1 Kelompok	Rp 10.775.000,00	Rp 1.400.000,00	Rp 1.400.000,00	-Rp 9.375.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				5 Unit Usaha	15 Unit Usaha	Rp 8.325.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 8.325.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional				100 Persen	100 Persen	Rp 267.987.100,00	Rp 231.130.000,00	Rp 232.257.764,00	-Rp 35.729.336,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat se-Kabupaten Bantul Kab. Bantul	Rp185.975.120,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 5.137.500,00	Rp -	Rp -	-Rp 5.137.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	1 Layanan	Rp 262.849.600,00	Rp 231.130.000,00	Rp 232.257.764,00	-Rp 30.591.836,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp180.975.120,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Merjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.400.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 2.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Terpenuhinya penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT	Rp0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Merjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 900.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	Rp 1.500.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 1.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional				100 Persen	100 Persen	Rp 2.400.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 2.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat se-Kabupaten Bantul Kab. Bantul	Rp0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.05.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 900.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.05.0003	Penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	Rp 1.500.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 1.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Status Operasi yang Didaftarkan				100 Persen	100 Persen	Rp 2.400.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 2.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat se-Kabupaten Bantul Kab. Bantul	Rp0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.06.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 900.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.06.0003	Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	Rp 1.500.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 1.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
212	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya				2,08 Persen	2,08 Persen	Rp 2.295.718.548,00	Rp 1.579.415.660,00	Rp 1.577.747.808,00	-Rp 161.829.668,00						Rp2.133.888.880,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan rekomendasi usaha perikanan				1 rekomendasi	1 Rekomendasi	Rp -	Rp -	Rp -	-Rp -			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat se-Kabupaten Bantul Kab. Bantul	Rp20.050.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Rp -	Rp -	Rp -	-Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Rp -	Rp -	Rp -	-Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp15.050.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik				150 Pembudidaya	144 Kelompok	Rp 974.328.750,00	Rp 578.018.000,00	Rp 576.318.000,00	-Rp 398.010.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat se-Kabupaten Bantul Kab. Bantul	Rp781.231.880,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				54 Kelompok	38 Kelompok	Rp 29.101.250,00	Rp -	Rp -	-Rp 29.101.250,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp110.281.880,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				27 Kelompok	28 Kelompok	Rp 945.227.500,00	Rp 578.018.000,00	Rp 576.318.000,00	-Rp 368.909.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp670.950.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi benih ikan air tawar				1,50 Persen		Rp 1.321.389.798,00	Rp 1.001.397.660,00	Rp 1.001.429.808,00	-Rp 319.959.990,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat se-Kabupaten Bantul Kab. Bantul	Rp1.332.607.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	Rp 1.800.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 1.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 93.950.250,00	Rp 84.170.000,00	Rp 83.170.000,00	-Rp 10.780.250,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp112.820.240,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				60 Unit	225 Unit	Rp 21.850.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 21.850.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp35.950.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
213	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan				55 Persen	55 Persen	Rp 562.578.600,00	Rp 231.467.637,00	Rp 230.767.637,00	-Rp 407.678.600,00						Rp154.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan				100 Persen	100 Persen	Rp 562.578.600,00	Rp 231.467.637,00	Rp 230.767.637,00	-Rp 331.810.963,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat se-Kabupaten Bantul Kab. Bantul	Rp154.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				90 Pelaku Usaha	105 Pelaku Usaha	Rp 22.051.000,00	Rp 7.185.100,00	Rp 7.185.100,00	-Rp 14.865.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp12.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				180 Pelaku Usaha	110 Pelaku Usaha	Rp 460.183.400,00	Rp 193.361.337,00	Rp 192.661.337,00	-Rp 267.522.063,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp67.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk				100 Orang	110 Orang	Rp 80.344.200,00	Rp 30.921.200,00	Rp 30.921.200,00	-Rp 49.423.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
214	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi perikanan yang diolah				4 Persen	4 Persen	Rp 685.442.236,00	Rp 463.401.435,00	Rp 421.262.199,00	-Rp 288.492.236,00						Rp396.950.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha				2 Unit	2 Unit	Rp 60.812.436,00	Rp 31.800.000,00	Rp 32.927.764,00	-Rp 27.884.672,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat se-Kabupaten Bantul Kab. Bantul	Rp5.050.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 60.812.436,00	Rp 31.800.000,00	Rp 32.927.764,00	-Rp 27.884.672,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp5.050.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaku usaha yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan				10 Unit	10 Unit	Rp 173.684.000,00	Rp 53.829.000,00	Rp 35.812.000,00	-Rp 137.872.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat se-Kabupaten Bantul Kab. Bantul	Rp145.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				15 Unit Usaha	12 Unit Usaha	Rp 173.684.000,00	Rp 53.829.000,00	Rp 35.812.000,00	-Rp 137.872.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp145.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan				11 orang	11 orang	Rp 450.945.800,00	Rp 377.772.435,00	Rp 352.522.435,00	-Rp 98.423.365,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat se-Kabupaten Bantul Kab. Bantul	Rp246.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100 Ton	100 Ton	Rp 95.057.500,00	Rp 161.038.100,00	Rp 161.038.100,00	Rp 65.980.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				15 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	Rp 355.888.300,00	Rp 216.734.335,00	Rp 191.484.335,00	-Rp 164.403.965,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp146.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD BALAI BUDIDAYA IKAN							Rp 11.393.130.847,00	Rp 9.133.690.114,49	Rp 8.379.910.114,49	-Rp 3.013.220.732,51						Rp8.405.765.236,00	UPTD BALAI BUDIDAYA IKAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							Rp 10.635.350.847,00	Rp 8.375.910.114,49	Rp 8.379.910.114,49	-Rp 2.255.440.732,51						Rp8.280.765.236,00	UPTD BALAI BUDIDAYA IKAN
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							Rp 10.635.350.847,00	Rp 8.375.910.114,49	Rp 8.379.910.114,49	-Rp 2.255.440.732,51						Rp8.280.765.236,00	UPTD BALAI BUDIDAYA IKAN
215	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya				2,08 Persen	2,08 Persen	Rp 2.295.718.548,00	Rp 1.579.415.660,00	Rp 1.577.747.808,00	-Rp 161.829.668,00						Rp2.133.888.880,00	UPTD BALAI BUDIDAYA IKAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi perikanan budidaya				1,50 Persen	1,50 Persen	Rp 1.321.389.798,00	Rp 1.001.397.660,00	Rp 1.001.429.808,00	-Rp 319.959.990,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Masyarakat se-Kabupaten Bantul Kab. Bantul	Rp1.332.607.000,00	UPTD BALAI BUDIDAYA IKAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	Rp 1.203.789.548,00	Rp 917.227.660,00	Rp 918.259.808,00	-Rp 285.529.740,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.181.836.760,00	UPTD BALAI BUDIDAYA IKAN
		DINAS PARIWISATA							Rp 17.388.649.866,00	Rp 14.370.218.777,53	Rp 12.940.914.777,53	-Rp 4.447.735.088,47						Rp22.932.455.273,00	DINAS PARIWISATA
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 1.866.964.000,00	Rp 1.866.964.000,00	Rp 150.000.000,00	-Rp 1.716.964.000,00						Rp2.860.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 1.866.964.000,00	Rp 1.866.964.000,00	Rp 150.000.000,00	-Rp 1.716.964.000,00						Rp2.860.000.000,00	DINAS PARIWISATA
216	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah				2626420 Orang	2626420 Orang	Rp 1.866.964.000,00	Rp 1.866.964.000,00	Rp 150.000.000,00	Rp 993.036.000,00						Rp2.860.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata				100 persen	100 persen	Rp 1.788.850.000,00	Rp 1.788.850.000,00	Rp 150.000.000,00	-Rp 1.638.850.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Meningkatnya kualitas pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	Rp2.760.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.06.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan				19 Objek	1 Objek	Rp 1.788.850.000,00	Rp 1.788.850.000,00	Rp 150.000.000,00	-Rp 1.638.850.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis Kab. Bantul, Bantul, Bantul	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp2.760.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100 persen	100 persen	Rp 78.114.000,00	Rp 78.114.000,00	Rp -	-Rp 78.114.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Meningkatnya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Rp100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07.0014	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan				40 Lembaga	0 Lembaga	Rp 78.114.000,00	Rp 78.114.000,00	Rp -	-Rp 78.114.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							Rp 15.521.685.866,00	Rp 12.503.254.777,53	Rp 12.790.914.777,53	-Rp 2.730.771.088,47						Rp20.072.455.273,00	DINAS PARIWISATA
3.26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							Rp 15.521.685.866,00	Rp 12.503.254.777,53	Rp 12.790.914.777,53	-Rp 2.730.771.088,47						Rp20.072.455.273,00	DINAS PARIWISATA
217	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				84,40 96,72 angka persen	84,40 96,72 angka persen	Rp 9.986.894.858,00	Rp 9.680.311.557,53	Rp 9.752.732.957,53	-Rp 736.020.085,00						Rp9.250.874.773,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	Rp 17.750.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 17.750.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Meningkatnya kualitas perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Rp59.123.360,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 12.650.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 12.650.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp6.800.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	Rp 5.100.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 5.100.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp52.323.360,00	DINAS PARIWISATA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 persen	100 persen	Rp 7.459.928.577,00	Rp 8.179.748.997,53	Rp 8.168.048.997,53	Rp 708.120.420,53			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Perangkat Daerah	Rp6.605.412.877,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	Rp 7.316.948.577,00	Rp 8.041.868.997,53	Rp 8.041.868.997,53	Rp 724.920.420,53	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp6.408.047.017,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 137.880.000,00	Rp 137.880.000,00	Rp 126.180.000,00	-Rp 11.700.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp141.288.900,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	Rp 5.100.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 5.100.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp56.076.960,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	Rp 339.600.000,00	Rp 126.000.000,00	Rp 124.100.000,00	-Rp 215.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Meningkatnya kualitas pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Rp337.580.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 339.600.000,00	Rp 126.000.000,00	Rp 124.100.000,00	-Rp 215.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp337.580.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	Rp 5.100.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 5.100.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Rp26.279.060,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 5.100.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 5.100.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp26.279.060,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	Rp 743.474.787,00	Rp 276.622.324,00	Rp 356.142.773,00	-Rp 387.332.014,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Meningkatnya kualitasi administrasi umum Perangkat Daerah	Rp959.574.327,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp 25.119.980,00	Rp 19.904.880,00	Rp 19.904.880,00	-Rp 5.215.100,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp85.274.210,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp 241.717.919,00	Rp 102.798.456,00	Rp 114.298.505,00	-Rp 127.419.414,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp288.814.245,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp 56.766.588,00	Rp 41.533.788,00	Rp 41.533.788,00	-Rp 15.232.800,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp57.069.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp 110.200.300,00	Rp 32.495.200,00	Rp 84.715.600,00	-Rp 25.484.700,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp17.612.872,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	Rp 25.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 25.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp21.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	Rp 270.420.000,00	Rp 79.890.000,00	Rp 95.690.000,00	-Rp 174.730.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp470.058.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 9.150.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 9.150.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp14.646.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 5.100.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 5.100.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp5.100.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	Rp 45.650.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 45.650.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Meningkatnya kualitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp181.300.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	Rp 45.650.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 45.650.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp181.300.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	Rp 843.234.044,00	Rp 750.521.248,00	Rp 755.599.524,00	-Rp 87.634.520,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp516.331.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 161.437.248,00	Rp 100.861.248,00	Rp 84.189.648,00	-Rp 77.247.600,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp258.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 346.410.000,00	Rp 190.960.000,00	Rp 203.960.000,00	-Rp 142.450.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp80.250.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 335.386.796,00	Rp 458.700.000,00	Rp 467.449.876,00	Rp 132.063.080,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp178.081.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 persen	100 persen	Rp 532.157.450,00	Rp 347.418.988,00	Rp 348.841.663,00	-Rp 183.315.787,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp565.273.649,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	Rp 54.515.800,00	Rp 57.437.488,00	Rp 57.437.488,00	Rp 2.921.688,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp49.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	Rp 302.757.650,00	Rp 280.020.400,00	Rp 280.020.400,00	-Rp 22.737.250,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp382.808.800,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	Rp 174.884.000,00	Rp 9.961.100,00	Rp 11.383.775,00	-Rp 163.500.225,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp133.464.849,00	DINAS PARIWISATA
218	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan				6283671 Orang	6283671 Orang	Rp 4.108.707.048,00	Rp 2.300.343.220,00	Rp 2.497.687.472,00	Rp 4.437.567.952,00						Rp8.546.275.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata				40,91 persen	40,91 persen	Rp 2.218.886.068,00	Rp 1.234.358.000,00	Rp 1.316.247.588,00	-Rp 902.638.480,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Rp2.309.928.740,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.429.888.568,00	Rp 1.114.358.000,00	Rp 1.196.247.588,00	-Rp 233.640.980,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp1.749.928.740,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				30 Orang	30 Orang	Rp 788.997.500,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	-Rp 668.997.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp560.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata				12,82 persen	12,82 persen	Rp 228.016.936,00	Rp 31.800.000,00	Rp 32.927.764,00	-Rp 195.089.172,00			Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Rp5.190.654.024,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Rp -	-Rp -	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp75.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	Rp 228.016.936,00	Rp 31.800.000,00	Rp 32.927.764,00	-Rp 195.089.172,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp5.115.654.024,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata				33,33 persen	33,33 persen	Rp 872.925.552,00	Rp 429.985.220,00	Rp 489.985.220,00	-Rp 382.940.332,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Rp328.523.916,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				24 Unit	24 Unit	Rp 872.925.552,00	Rp 429.985.220,00	Rp 489.985.220,00	-Rp 382.940.332,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp328.523.916,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Jumlah Penerbitan Ijin Usaha pariwisata				5,71 persen	5,71 persen	Rp 788.878.492,00	Rp 604.200.000,00	Rp 658.526.900,00	-Rp 130.351.592,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Meingkatnya Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Rp717.168.320,00	DINAS PARIWISATA

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026																			
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	3.26.02.2.04.0006	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE	Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi				8 Usaha Pariwisata	8 Usaha Pariwisata	Rp 66.519.900,00	Rp -	Rp -	-Rp 66.519.900,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0008	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021				7 Usaha	7 Usaha	Rp 39.535.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 39.535.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota				12 Laporan	12 Laporan	Rp 682.823.592,00	Rp 604.200.000,00	Rp 658.526.900,00	-Rp 24.296.692,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp617.168.320,00	DINAS PARIWISATA
219	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata				2,40 persen	2,40 persen	Rp 857.635.416,00	Rp 399.000.000,00	Rp 414.638.820,00	Rp 442.364.584,00						Rp1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				0,024 persen	0,024 persen	Rp 857.635.416,00	Rp 399.000.000,00	Rp 414.638.820,00	-Rp 442.996.596,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Rp1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 204.922.300,00	Rp -	Rp -	-Rp 204.922.300,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 167.302.500,00	Rp -	Rp -	-Rp 167.302.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				7 Kegiatan	7 Kegiatan	Rp 178.324.616,00	Rp 159.000.000,00	Rp 164.638.820,00	-Rp 13.685.796,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				27 Promosi	27 Promosi	Rp 307.086.000,00	Rp 240.000.000,00	Rp 250.000.000,00	-Rp 57.086.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
220	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Kekayaan Intelektual				38 persen	38 persen	Rp 218.999.500,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 403.500.500,00						Rp622.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Terfasilitasi HKI				100 persen	100 persen	Rp 218.999.500,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	-Rp 208.999.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp622.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 168.999.600,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	-Rp 158.999.600,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp410.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				4 Laporan	4 Laporan	Rp 49.999.900,00	Rp -	Rp -	-Rp 49.999.900,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp212.500.000,00	DINAS PARIWISATA
221	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif				60 CBT	60 CBT	Rp 349.449.044,00	Rp 113.600.000,00	Rp 115.855.528,00	Rp 3.356.456,00						Rp352.805.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				100 persen	100 persen	Rp 349.449.044,00	Rp 113.600.000,00	Rp 115.855.528,00	-Rp 233.593.516,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi	Meningkatnya Kualitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp352.805.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	Rp 12.499.800,00	Rp -	Rp -	-Rp 12.499.800,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp187.005.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				322 Orang	322 Orang	Rp 77.724.772,00	Rp 63.600.000,00	Rp 65.855.528,00	-Rp 11.869.244,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp120.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				320 Orang	320 Orang	Rp 259.224.472,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	-Rp 209.224.472,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi		Rp45.800.000,00	DINAS PARIWISATA
		SEKRETARIAT DAERAH							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	SEKRETARIAT DAERAH
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	SEKRETARIAT DAERAH
222	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah				82,37 Angka	82,37 Angka	Rp 28.879.871.297,00	Rp 31.305.114.403,66	Rp 32.147.642.003,66	Rp 1.224.478.135,00						Rp30.104.349.432,00	SEKRETARIAT DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Person	2198 Orang /Bulan	Rp 22.223.220.573,00	Rp 24.914.158.270,66	Rp 24.485.983.870,66	Rp 2.262.763.297,66			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Sekretariat Daerah	Rp21.455.725.062,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2226 Orang /bulan	2198 Orang /bulan	Rp 21.369.325.062,00	Rp 24.294.585.880,66	Rp 23.865.411.480,66	Rp 2.496.086.418,66	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp21.369.325.062,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100 Person	28 Orang/Bulan	Rp 1.166.118.060,00	Rp 1.367.480.228,00	Rp 1.367.480.228,00	Rp 201.362.168,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	KDH dan WKDH Kabupaten Bantul	Rp1.338.189.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	Rp 185.837.260,00	Rp 185.837.260,00	Rp 185.837.260,00	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp168.939.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
223	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan dan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti				100 Person	100 Person	Rp 11.594.297.646,00	Rp 6.798.187.610,00	Rp 7.334.187.610,00	-Rp 2.117.165.992,00						Rp9.477.131.654,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Penderdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				100 Person	12 Dokumen 3 Dokumen	Rp 10.183.239.192,00	Rp 5.984.660.360,00	Rp 6.344.660.360,00	-Rp 3.838.578.832,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah. Kemenag, Kalurahan, Tokoh Agama, Masyarakat dan Pihak Terkait Lainnya di Kabupaten Bantul	Rp8.093.749.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				18 Dokumen	12 Dokumen	Rp 9.566.199.636,00	Rp 5.569.897.160,00	Rp 5.925.897.160,00	-Rp 3.640.302.476,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.486.679.900,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				7 Dokumen	12 Dokumen	Rp 489.358.556,00	Rp 365.283.200,00	Rp 369.283.200,00	-Rp 120.075.356,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp303.534.550,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				6 Dokumen	3 Dokumen	Rp 127.681.000,00	Rp 49.480.000,00	Rp 49.480.000,00	-Rp 78.201.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp303.534.550,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
224	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Capaian perikatan kerja sama yang dievaluasi				99,25 persen	99,25 persen	Rp 11.594.297.646,00	Rp 6.798.187.610,00	Rp 7.334.187.610,00	-Rp 2.117.165.992,00						Rp9.477.131.654,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				100 persen	13 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen	Rp 659.582.054,00	Rp 308.462.007,00	Rp 324.462.007,00	-Rp 335.120.047,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kabupaten Bantul	Rp668.074.554,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				13 Dokumen	13 Dokumen	Rp 228.960.554,00	Rp 143.806.007,00	Rp 156.806.007,00	-Rp 72.154.547,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp231.690.554,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	5 Dokumen	Rp 153.467.500,00	Rp 23.175.000,00	Rp 23.175.000,00	-Rp 130.292.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp156.880.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 277.154.000,00	Rp 141.481.000,00	Rp 144.481.000,00	-Rp 132.673.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp279.504.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				100 persen	1 Dokumen 1 Laporan 66 Dokumen	Rp 136.924.900,00	Rp 28.509.000,00	Rp 28.509.000,00	-Rp 108.415.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Seluruh stakeholder Kerja Sama	Rp141.184.900,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				66 Dokumen	66 Dokumen	Rp 38.150.000,00	Rp 14.049.000,00	Rp 14.049.000,00	-Rp 24.101.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp39.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 60.429.900,00	Rp 8.580.000,00	Rp 8.580.000,00	-Rp 51.849.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp63.839.900,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	Rp 38.345.000,00	Rp 5.880.000,00	Rp 5.880.000,00	-Rp 32.465.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp38.345.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
225	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang Berkualitas				89,5 persen	89,5 persen	Rp 624.468.000,00	Rp 624.468.000,00	Rp 245.798.000,00	Rp 613.862.000,00						Rp1.238.330.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				100 persen	1 Dokumen	Rp 503.968.000,00	Rp 503.968.000,00	Rp 182.823.000,00	-Rp 321.145.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Seluruh kapanewon	Rp988.330.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 288.330.000,00	Rp 288.330.000,00	Rp 35.000.000,00	-Rp 253.330.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp288.330.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
226	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah				82,36 Angka	82,37 Angka	Rp 28.879.871.297,00	Rp 31.305.114.403,66	Rp 32.147.642.003,66	Rp 1.224.478.135,00						Rp30.104.349.432,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja a Perangkat Daerah				100 Persen	2 Dokumen 2 Laporan 4 Dokumen 4 Laporan	Rp 128.524.000,00	Rp 10.920.000,00	Rp 10.920.000,00	-Rp 117.604.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat Daerah	Rp155.095.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 10.000.000,00	Rp 2.125.000,00	Rp 2.125.000,00	-Rp 7.875.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp18.800.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 18.800.000,00	Rp 1.245.000,00	Rp 1.245.000,00	-Rp 17.555.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp8.430.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2 Laporan	Rp 15.000.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	-Rp 14.250.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp100.865.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	Rp 84.724.000,00	Rp 6.800.000,00	Rp 6.800.000,00	-Rp 77.924.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp27.000.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				100 Persen	12 Dokumen 12 Laporan	Rp 22.223.220.573,00	Rp 24.914.158.270,66	Rp 24.485.983.870,66	Rp 2.262.763.297,66			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Sekretariat Daerah	Rp21.455.725.062,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 811.015.511,00	Rp 616.572.390,00	Rp 617.572.390,00	-Rp 193.443.121,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp74.400.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	Rp 42.880.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	-Rp 39.880.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp12.000.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 Persen	12 Laporan	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp -			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Sekretariat Daerah	Rp15.000.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp15.000.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100 Persen	25 Dokumen	Rp 908.302.312,00	Rp 627.415.624,00	Rp 1.368.740.624,00	Rp 460.438.312,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Sekretariat Daerah	Rp2.199.238.200,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	25 Dokumen	Rp 34.800.000,00	Rp 4.800.000,00	Rp 4.800.000,00	-Rp 30.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.400.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
		BAGIAN HUKUM							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN HUKUM
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN HUKUM
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN HUKUM
227	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum				97,60 Angka	98,90 Angka	Rp 11.594.297.646,00	Rp 6.798.187.610,00	Rp 7.334.187.610,00	-Rp 2.117.165.992,00						Rp9.477.131.654,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Capaian Kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum				100 Persen	100 Persen	Rp 614.551.500,00	Rp 476.556.243,00	Rp 636.556.243,00	Rp 22.004.743,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Pemerintah Kabupaten Bantul, Masyarakat, Perangkat Daerah, Pemerintah Kalurahan	Rp574.123.200,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				660 Dokumen	660 Dokumen	Rp 287.676.500,00	Rp 223.956.243,00	Rp 241.106.243,00	-Rp 46.570.257,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp190.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				60 Kasus	60 Kasus	Rp 248.625.000,00	Rp 103.750.000,00	Rp 260.750.000,00	Rp 12.125.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp195.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				660 Dokumen	660 Dokumen	Rp 78.250.000,00	Rp 148.850.000,00	Rp 134.700.000,00	Rp 56.450.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp189.123.200,00	BAGIAN HUKUM
228	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Capaian Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Urusan Keistimewaan Yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan				100 Persen	100 Persen	Rp 624.468.000,00	Rp 624.468.000,00	Rp 245.798.000,00	Rp 613.862.000,00						Rp1.238.330.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun				100 Persen	1 Dokumen 2 Dokumen	Rp 503.968.000,00	Rp 503.968.000,00	Rp 182.823.000,00	-Rp 321.145.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Pemerintah Kabupaten Bantul, Masyarakat, Perangkat Daerah, Pemerintah Kalurahan	Rp988.330.000,00	BAGIAN HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	4.01.04.5.01.0005	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 94.576.000,00	Rp 94.576.000,00	Rp 44.576.000,00	-Rp 50.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp310.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.04.5.01.0008	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 56.415.000,00	Rp 56.415.000,00	Rp 50.000.000,00	-Rp 6.415.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp190.000.000,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
229	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan				83.2 Persen	83.2 Persen	Rp 1.390.975.702,00	Rp 1.266.157.674,00	Rp 1.269.157.674,00	Rp 287.064.298,00						Rp1.678.040.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				86.1 persen	1000 Orang 12 Dokumen	Rp 1.007.346.552,00	Rp 936.837.652,00	Rp 939.837.652,00	-Rp 67.508.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat Daerah	Rp1.153.040.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 93.330.000,00	Rp 55.142.500,00	Rp 55.142.500,00	-Rp 38.187.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp573.719.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 110.705.400,00	Rp 117.706.800,00	Rp 117.706.800,00	Rp 7.001.400,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp81.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				1000 Orang	1000 Orang	Rp 803.311.152,00	Rp 763.988.352,00	Rp 766.988.352,00	-Rp 36.322.800,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp498.321.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BAGIAN ORGANISASI							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN ORGANISASI
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN ORGANISASI
230	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Evaluasi Kelembagaan				-	85 Indeks	Rp 28.879.871.297,00	Rp 31.305.114.403,66	Rp 32.147.642.003,66	Rp 1.224.478.135,00						Rp30.104.349.432,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100 persen	2 Dokumen	Rp 908.302.312,00	Rp 627.415.624,00	Rp 1.368.740.624,00	Rp 460.438.312,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Sekretariat Daerah	Rp2.199.238.200,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	Rp 65.467.480,00	Rp 13.083.680,00	Rp 29.083.680,00	-Rp 36.383.800,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.500.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				85 Persen	2 Dokumen 3 Dokumen 3 Laporan	Rp 565.240.792,00	Rp 199.869.331,00	Rp 226.461.331,00	-Rp 338.779.461,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah	Rp275.217.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 196.126.932,00	Rp 57.211.000,00	Rp 71.503.000,00	-Rp 124.623.932,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp73.945.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	3 Laporan	Rp 76.215.500,00	Rp 38.962.000,00	Rp 38.962.000,00	-Rp 37.253.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp49.280.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	3 Dokumen	Rp 140.665.860,00	Rp 53.042.500,00	Rp 53.042.500,00	-Rp 87.623.360,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp105.485.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	3 Dokumen	Rp 152.232.500,00	Rp 50.653.831,00	Rp 62.953.831,00	-Rp 89.278.669,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp46.507.000,00	BAGIAN ORGANISASI



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
231	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kematangan Perangkat Daerah				42 Angka	43,50 Angka	Rp 624.468.000,00	Rp 624.468.000,00	Rp 245.798.000,00	Rp 613.862.000,00						Rp1.238.330.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun				100 persen	1 Dokumen 2 Dokumen	Rp 503.968.000,00	Rp 503.968.000,00	Rp 182.823.000,00	-Rp 321.145.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah	Rp988.330.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				1 Lembaga	1 Lembaga	Rp 64.647.000,00	Rp 64.647.000,00	Rp 53.247.000,00	-Rp 11.400.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp200.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				85 Persen	2 Dokumen	Rp 120.500.000,00	Rp 120.500.000,00	Rp 62.975.000,00	-Rp 57.525.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah	Rp250.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 120.500.000,00	Rp 120.500.000,00	Rp 62.975.000,00	-Rp 57.525.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp250.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
232	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				92 Persen	92 Angka	Rp 28.879.871.297,00	Rp 31.305.114.403,66	Rp 32.147.642.003,66	Rp 1.224.478.135,00						Rp30.104.349.432,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Persen	20 Paket	Rp 39.991.200,00	Rp 12.252.000,00	Rp 12.252.000,00	-Rp 27.739.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Bagian Umum dan Protokol	Rp40.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	Rp 39.991.200,00	Rp 12.252.000,00	Rp 12.252.000,00	-Rp 27.739.200,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp40.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	12 Laporan 17 Paket 1 Dokumen 25 Paket 33 Paket 3 Paket	Rp 908.302.312,00	Rp 627.415.624,00	Rp 1.368.740.624,00	Rp 460.438.312,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah	Rp2.199.238.200,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	Rp 67.455.830,00	Rp 67.032.330,00	Rp 67.032.330,00	-Rp 423.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp70.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	Rp 57.677.102,00	Rp 64.681.094,00	Rp 69.331.094,00	Rp 11.653.992,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp188.015.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	Rp 182.300,00	Rp 19.095.720,00	Rp 69.786.220,00	Rp 69.603.920,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp127.273.400,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	Rp 127.935.600,00	Rp 54.083.800,00	Rp 45.418.300,00	-Rp 82.517.300,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp130.270.300,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	Rp 333.000.000,00	Rp 124.200.000,00	Rp 203.450.000,00	-Rp 129.550.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp350.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	Rp 221.484.000,00	Rp 263.609.000,00	Rp 863.009.000,00	Rp 641.525.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.298.779.500,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 300.000,00	Rp 16.830.000,00	Rp 16.830.000,00	Rp 16.530.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp30.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit 4 Unit	Rp 4.500.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 4.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah	Rp65.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	Rp 750.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 750.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp50.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	Rp 3.700.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 3.700.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	Rp 50.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 50.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp8.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 persen	12 Laporan 55 Laporan	Rp 1.990.590.660,00	Rp 2.290.237.900,00	Rp 2.520.430.800,00	Rp 529.840.140,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pegawai Sekretariat Daerah	Rp2.204.606.440,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.200.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 900.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.200.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 89.090.000,00	Rp 142.290.000,00	Rp 142.290.000,00	Rp 53.200.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp167.200.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 45.000.000,00	Rp 158.547.900,00	Rp 331.511.900,00	Rp 286.511.900,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp241.098.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				55 Laporan	55 Laporan	Rp 1.855.300.660,00	Rp 1.989.100.000,00	Rp 2.046.328.900,00	Rp 191.028.240,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.795.108.440,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Persen	20 Unit 32 Unit 5 Unit 7 Unit	Rp 1.303.663.700,00	Rp 1.313.561.050,00	Rp 1.458.528.150,00	Rp 154.864.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat Daerah	Rp1.498.328.680,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	Rp 240.870.000,00	Rp 262.037.500,00	Rp 303.277.500,00	Rp 62.407.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp240.870.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	32 Unit	Rp 374.443.400,00	Rp 421.251.050,00	Rp 532.620.350,00	Rp 158.176.950,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp381.691.440,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026																			
																			
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	Rp 10.940.000,00	Rp 8.752.000,00	Rp 8.752.000,00	-Rp 2.188.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp30.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	Rp 7.500.000,00	Rp 245.780.000,00	Rp 249.980.000,00	Rp 242.480.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp76.310.160,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	Rp 669.910.300,00	Rp 375.740.500,00	Rp 363.898.300,00	-Rp 306.012.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp769.457.080,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				100 Persen	14 Paket 20 Orang/B ulan	Rp 1.166.118.060,00	Rp 1.367.480.228,00	Rp 1.367.480.228,00	Rp 201.362.168,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat Daerah	Rp1.338.189.800,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	Rp 23.280.800,00	Rp 21.811.800,00	Rp 21.811.800,00	-Rp 1.469.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp212.250.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				20 Orang/B ulan	20 Orang/B ulan	Rp 957.000.000,00	Rp 1.159.831.168,00	Rp 1.159.831.168,00	Rp 202.831.168,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp957.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				100 Persen	1 Paket 2 Paket	Rp 281.000.000,00	Rp 308.600.000,00	Rp 317.125.000,00	Rp 36.125.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat Daerah	Rp394.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	Rp 160.000.000,00	Rp 160.000.000,00	Rp 160.000.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp160.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp120.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	Rp 1.000.000,00	Rp 28.600.000,00	Rp 37.125.000,00	Rp 36.125.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp114.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				100 Persen	12 Laporan	Rp 265.720.000,00	Rp 257.620.000,00	Rp 376.720.000,00	Rp 111.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat Daerah	Rp463.949.250,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 265.720.000,00	Rp 257.620.000,00	Rp 376.720.000,00	Rp 111.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp463.949.250,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
		BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							Rp 42.489.612.645,00	Rp 39.993.927.687,66	Rp 40.996.785.287,66	-Rp 1.492.827.357,34						Rp42.497.851.086,00	BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM
233	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rata-rata capaian kinerja Indikator Utama Pembangunan (IUP)				76,50 Persen	76,50 Persen	Rp 1.390.975.702,00	Rp 1.266.157.674,00	Rp 1.269.157.674,00	Rp 287.064.298,00						Rp1.678.040.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				100 Persen	5 Dokumen 5 Laporan 7 Dokumen	Rp 91.950.000,00	Rp 118.050.000,00	Rp 118.050.000,00	Rp 26.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, BUMD, BLUD, BUKP, UMKM dan Pihak Terkait Lainnya di Kabupaten Bantul	Rp247.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				6 Dokumen	5 Dokumen	Rp 89.825.000,00	Rp 86.150.000,00	Rp 86.150.000,00	-Rp 3.675.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp183.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	Rp 1.062.500,00	Rp 24.100.000,00	Rp 24.100.000,00	Rp 23.037.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp40.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				8 Dokumen	7 Dokumen	Rp 1.062.500,00	Rp 7.800.000,00	Rp 7.800.000,00	Rp 6.737.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp24.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				100 Persen	1 Laporan	Rp 42.312.500,00	Rp 8.680.000,00	Rp 8.680.000,00	-Rp 33.632.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, UMKM dan Pihak Lainnya	Rp15.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				5 Laporan	1 Laporan	Rp 42.312.500,00	Rp 8.680.000,00	Rp 8.680.000,00	-Rp 33.632.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp15.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				100 Persen	14 Dokumen 1 Dokumen	Rp 249.366.650,00	Rp 202.590.022,00	Rp 202.590.022,00	-Rp 46.776.628,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, Lembaga Jasa Keuangan, UMKM, Sarana dan Prasarana Kantor, dan Pihak Terkait Lainnya	Rp263.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 21.250.000,00	Rp 7.200.000,00	Rp 7.200.000,00	-Rp 14.050.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp8.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				14 Dokumen	14 Dokumen	Rp 228.116.650,00	Rp 195.390.022,00	Rp 195.390.022,00	-Rp 32.726.628,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp255.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							Rp 42.663.459.818,00	Rp 51.366.181.483,93	Rp 51.505.181.483,93	Rp 8.841.721.665,93						Rp55.229.187.282,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 42.663.459.818,00	Rp 51.366.181.483,93	Rp 51.505.181.483,93	Rp 8.841.721.665,93						Rp55.229.187.282,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							Rp 42.663.459.818,00	Rp 51.366.181.483,93	Rp 51.505.181.483,93	Rp 8.841.721.665,93						Rp55.229.187.282,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	234 4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)				82 angka	82 angka	Rp 15.725.326.418,00	Rp 34.246.521.083,93	Rp 34.724.023.583,93	Rp 29.523.609.961,00						Rp45.248.936.379,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				85 persen	85 persen	Rp 53.040.000,00	Rp 49.980.000,00	Rp 49.964.500,00	-Rp 3.075.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD	Rp74.669.100,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 24.990.000,00	Rp 24.990.000,00	Rp 25.272.000,00	Rp 282.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp37.334.550,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	Rp 28.050.000,00	Rp 24.990.000,00	Rp 24.692.500,00	-Rp 3.357.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp37.334.550,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				85 persen	85 persen	Rp 6.565.141.453,00	Rp 6.460.915.795,93	Rp 6.560.915.795,93	-Rp 4.225.657,07			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD	Rp5.667.396.266,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/b ulan	39 Orang/b ulan	Rp 6.406.551.453,00	Rp 6.302.325.795,93	Rp 6.402.325.795,93	-Rp 4.225.657,07	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.297.834.548,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 133.600.000,00	Rp 133.600.000,00	Rp 133.600.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp336.286.718,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				21 Laporan	21 Laporan	Rp 24.990.000,00	Rp 24.990.000,00	Rp 24.990.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp33.275.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				85 persen	85 persen	Rp 234.956.000,00	Rp 195.824.000,00	Rp 195.824.000,00	-Rp 39.132.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD	Rp264.416.460,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	Rp 234.956.000,00	Rp 195.824.000,00	Rp 195.824.000,00	-Rp 39.132.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp264.416.460,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				85 persen	85 persen	Rp 1.981.088.692,00	Rp 1.064.593.876,00	Rp 1.332.656.356,00	-Rp 648.432.336,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD	Rp2.872.495.472,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	19 Paket	Rp 1.352.941.692,00	Rp 704.481.876,00	Rp 967.544.356,00	-Rp 385.397.336,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.402.779.027,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 67.200.000,00	Rp 64.800.000,00	Rp 69.800.000,00	Rp 2.600.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp154.608.960,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	Rp 140.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	-Rp 90.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp75.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	Rp 412.947.000,00	Rp 237.312.000,00	Rp 237.312.000,00	-Rp 175.635.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.165.107.485,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp75.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85 persen	85 persen	Rp 1.792.975.424,00	Rp 1.618.371.000,00	Rp 1.646.017.400,00	-Rp 146.958.024,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD	Rp1.209.207.600,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 14.329.600,00	Rp 21.587.200,00	Rp 21.587.200,00	Rp 7.257.600,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp62.707.600,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 167.192.400,00	Rp 139.141.400,00	Rp 145.141.400,00	-Rp 22.051.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp242.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.611.453.424,00	Rp 1.457.642.400,00	Rp 1.479.288.800,00	-Rp 132.164.624,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp914.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85 persen	85 persen	Rp 941.463.200,00	Rp 857.445.500,00	Rp 939.254.620,00	-Rp 2.208.580,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD	Rp1.950.769.431,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	Rp 343.748.600,00	Rp 318.742.150,00	Rp 370.325.650,00	Rp 26.577.050,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp388.989.409,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				41 Unit	41 Unit	Rp 492.772.600,00	Rp 459.096.150,00	Rp 425.096.150,00	-Rp 67.676.450,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp577.946.155,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	Rp 104.942.000,00	Rp 79.607.200,00	Rp 143.832.820,00	Rp 38.890.820,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp983.833.867,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				85 persen	85 persen	Rp 4.156.661.649,00	Rp 23.999.390.912,00	Rp 23.999.390.912,00	Rp 19.842.729.263,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp33.209.982.050,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/B ulan	45 Orang/B ulan	Rp 3.648.743.949,00	Rp 23.955.640.912,00	Rp 23.955.640.912,00	Rp 20.306.896.963,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp32.556.737.232,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	Rp 439.667.700,00	Rp -	Rp -	-Rp 439.667.700,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp554.418.068,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	Rp 68.250.000,00	Rp 43.750.000,00	Rp 43.750.000,00	-Rp 24.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp98.826.750,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
235	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi				100 %	100 %	Rp 26.938.133.400,00	Rp 17.119.660.400,00	Rp 16.781.157.900,00	-Rp 16.957.882.497,00						Rp9.980.250.903,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				85 persen	85 persen	Rp 6.858.529.400,00	Rp 3.905.533.900,00	Rp 3.792.064.400,00	-Rp 3.066.465.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp2.937.545.996,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 3.366.490.000,00	Rp 1.534.282.000,00	Rp 1.499.252.000,00	-Rp 1.867.238.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp976.704.900,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	Rp 3.254.741.000,00	Rp 2.185.613.500,00	Rp 2.118.561.500,00	-Rp 1.136.179.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.663.139.895,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	4 Dokumen	Rp 104.999.900,00	Rp 77.089.900,00	Rp 66.602.400,00	-Rp 38.397.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp278.587.571,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 132.298.500,00	Rp 108.548.500,00	Rp 107.648.500,00	-Rp 24.650.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp19.113.630,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran				85 %	85 %	Rp 4.202.218.000,00	Rp 2.409.916.000,00	Rp 2.268.853.000,00	-Rp 1.933.365.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp1.097.452.333,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				8 Dokumen	8 Dokumen	Rp 4.202.218.000,00	Rp 2.409.916.000,00	Rp 2.268.853.000,00	-Rp 1.933.365.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.097.452.333,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				85 %	85 %	Rp 4.745.265.000,00	Rp 2.742.168.000,00	Rp 2.443.751.000,00	-Rp 2.301.514.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp2.262.378.246,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026																			
																			
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				16 Dokumen	16 Dokumen	Rp 4.745.265.000,00	Rp 2.742.168.000,00	Rp 2.443.751.000,00	-Rp 2.301.514.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.262.378.246,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD				82 persen	82 persen	Rp 4.271.081.000,00	Rp 3.401.427.000,00	Rp 3.647.405.000,00	-Rp 623.676.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp1.113.083.319,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 2.715.291.000,00	Rp 2.383.235.000,00	Rp 2.545.735.000,00	-Rp 169.556.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp610.372.522,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				42 Orang	42 Orang	Rp 314.400.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	-Rp 294.400.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp11.353.904,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				96 Orang	96 Orang	Rp 255.750.000,00	Rp 255.750.000,00	Rp 255.750.000,00	-Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp140.254.108,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				132 Dokumen	132 Dokumen	Rp 985.640.000,00	Rp 742.442.000,00	Rp 825.920.000,00	-Rp 159.720.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp351.102.785,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat				85 persen	85 persen	Rp 1.737.212.500,00	Rp 758.087.500,00	Rp 736.137.500,00	-Rp 1.001.075.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp716.737.632,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 1.737.212.500,00	Rp 758.087.500,00	Rp 736.137.500,00	-Rp 1.001.075.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp716.737.632,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD				85 persen	85 persen	Rp 599.044.000,00	Rp 288.152.000,00	Rp 278.571.000,00	-Rp 320.473.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp242.101.967,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	Rp 599.044.000,00	Rp 288.152.000,00	Rp 278.571.000,00	-Rp 320.473.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp242.101.967,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD				85 persen	85 persen	Rp 4.524.783.500,00	Rp 3.614.376.000,00	Rp 3.614.376.000,00	-Rp 910.407.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp1.610.951.410,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				20 Dokumen	20 Dokumen	Rp 2.980.510.000,00	Rp 2.180.565.500,00	Rp 2.180.565.500,00	-Rp 799.944.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp985.316.168,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	Rp 173.680.000,00	Rp 246.430.000,00	Rp 246.430.000,00	Rp 72.750.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.096.190,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 1.154.710.000,00	Rp 735.422.500,00	Rp 735.422.500,00	-Rp 419.287.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp404.470.141,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				60 Dokumen	60 Dokumen	Rp 215.883.500,00	Rp 451.958.000,00	Rp 451.958.000,00	Rp 236.074.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp214.068.911,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							Rp 13.128.035.546,00	Rp 12.552.682.076,88	Rp 12.213.948.076,88	-Rp 914.087.469,12						Rp14.157.353.030,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 732.791.000,00	Rp 732.791.000,00	Rp 333.057.000,00	-Rp 399.734.000,00						Rp997.152.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							Rp 732.791.000,00	Rp 732.791.000,00	Rp 333.057.000,00	-Rp 399.734.000,00						Rp997.152.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
236	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi				100 Persen	100 Persen	Rp 732.791.000,00	Rp 732.791.000,00	Rp 333.057.000,00	Rp 264.361.000,00						Rp997.152.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.01.04.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun				100 Persen	4 Dokumen	Rp 395.837.000,00	Rp 395.837.000,00	Rp 185.321.000,00	-Rp 210.516.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah anggota Forum Geoheritage, sekolah dan masyarakat Kabupaten Bantul	Rp395.837.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.01.04.5.05.0003	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 395.837.000,00	Rp 395.837.000,00	Rp 185.321.000,00	-Rp 210.516.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp395.837.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				100 Persen	4 Dokumen 9 Laporan	Rp 336.954.000,00	Rp 336.954.000,00	Rp 147.736.000,00	-Rp 189.218.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Rp601.315.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 104.403.000,00	Rp 104.403.000,00	Rp 85.103.000,00	-Rp 19.300.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp300.733.573,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY				9 Laporan	7 Laporan	Rp 232.551.000,00	Rp 232.551.000,00	Rp 62.633.000,00	-Rp 169.918.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp300.581.427,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								Rp 12.395.244.546,00	Rp 11.819.891.076,88	Rp 11.880.891.076,88	-Rp 514.353.469,12						Rp13.160.201.030,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							Rp 12.125.459.146,00	Rp 11.644.589.876,88	Rp 11.705.386.222,88	-Rp 420.072.923,12						Rp12.926.788.417,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
237	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				83,30 86,62 Angka Indeks	83,30 86,62 Angka Indeks	Rp 9.080.039.526,00	Rp 9.628.405.526,88	Rp 9.729.704.026,88	-Rp 679.023.418,00						Rp8.401.016.108,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	12 Dokumen 6 Laporan	Rp 43.795.000,00	Rp 5.842.500,00	Rp 5.842.500,00	-Rp 37.952.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Bappeda Kabupaten Bantul	Rp14.657.313,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 37.157.500,00	Rp 1.920.000,00	Rp 1.920.000,00	-Rp 35.237.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp8.737.313,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	6 Laporan	Rp 6.637.500,00	Rp 3.922.500,00	Rp 3.922.500,00	-Rp 2.715.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.920.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Persen	12 Dokumen 2 Laporan 53 Orang/ Bulan	Rp 8.057.163.684,00	Rp 8.897.947.046,88	Rp 8.890.947.046,88	Rp 833.783.362,88			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Bappeda Kabupaten Bantul	Rp7.075.545.416,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/ bulan	53 Orang/ bulan	Rp 7.928.603.684,00	Rp 8.776.587.046,88	Rp 8.776.587.046,88	Rp 847.983.362,88	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.923.899.297,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 125.760.000,00	Rp 120.360.000,00	Rp 113.360.000,00	-Rp 12.400.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp147.249.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	5.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2 Laporan	2 Laporan	Rp 2.800.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	-Rp 1.800.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.396.219,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				100 Persen	2 Dokumen	Rp 15.175.000,00	Rp 6.760.000,00	Rp 6.310.000,00	-Rp 8.865.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Bappeda Kabupaten Bantul	Rp121.275.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 15.175.000,00	Rp 6.760.000,00	Rp 6.310.000,00	-Rp 8.865.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp121.275.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Persen	10 Laporan 10 Paket 12 Dokumen 1 Dokumen 93 Laporan	Rp 602.540.870,00	Rp 368.809.330,00	Rp 463.957.830,00	-Rp 138.583.040,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Bappeda Kabupaten Bantul	Rp748.591.445,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	Rp 6.281.110,00	Rp 4.216.850,00	Rp 4.216.850,00	-Rp 2.064.260,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.801.841,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	11 Paket	Rp 163.158.400,00	Rp 76.900.900,00	Rp 202.930.900,00	Rp 39.772.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp171.270.716,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	Rp 13.049.760,00	Rp 9.918.280,00	Rp 11.233.680,00	-Rp 1.816.080,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp39.832.553,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	Rp 10.430.600,00	Rp 6.535.800,00	Rp 6.536.400,00	-Rp 3.894.200,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp59.816.138,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.969.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				16 Laporan	10 Laporan	Rp 11.250.000,00	Rp 3.750.000,00	Rp 3.750.000,00	-Rp 7.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp12.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	93 Laporan	Rp 370.696.000,00	Rp 236.162.500,00	Rp 200.315.000,00	-Rp 170.381.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp410.206.590,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 3.650.000,00	Rp 7.300.000,00	Rp 10.950.000,00	Rp 7.300.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp37.694.607,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 21.625.000,00	Rp 21.625.000,00	Rp 21.625.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Bappeda Kabupaten Bantul	Rp0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka				100 Persen	12 Laporan 2 Laporan 60 Laporan	Rp 196.328.472,00	Rp 206.441.728,00	Rp 220.041.728,00	Rp 23.713.256,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Bappeda Kabupaten Bantul	Rp213.942.184,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	0 Laporan	Rp 400.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 400.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.646.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 7.801.728,00	Rp 7.801.728,00	Rp 16.401.728,00	Rp 8.600.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp13.230.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 37.665.000,00	Rp 39.640.000,00	Rp 39.640.000,00	Rp 1.975.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp33.075.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				63 Laporan	60 Laporan	Rp 150.461.744,00	Rp 159.000.000,00	Rp 164.000.000,00	Rp 13.538.256,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp164.991.184,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				100 Persen	30 Unit	Rp 165.036.500,00	Rp 142.604.922,00	Rp 142.604.922,00	-Rp 22.431.578,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Bappeda Kabupaten Bantul	Rp227.004.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	30 Unit	Rp 165.036.500,00	Rp 142.604.922,00	Rp 142.604.922,00	-Rp 22.431.578,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp227.004.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				126 Unit	126 Unit	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
238	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rasio alokasi program unggulan daerah dalam RKPD				31 Persen	31 Persen	Rp 1.560.374.570,00	Rp 1.093.343.150,00	Rp 1.068.083.614,00	Rp 1.232.243.241,00						Rp2.792.617.811,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				100 Persen	1 Berita Acara 4 Dokumen 75 Usulan	Rp 921.206.000,00	Rp 524.838.300,00	Rp 504.038.300,00	-Rp 417.167.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Rp1.133.172.216,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	Rp 19.400.000,00	Rp 12.550.000,00	Rp 12.550.000,00	-Rp 6.850.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp23.863.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	Rp 2.125.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	-Rp 625.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.613.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	Rp 19.400.000,00	Rp 12.550.000,00	Rp 11.150.000,00	-Rp 8.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp23.863.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				75 Usulan	75 Usulan	Rp 27.450.000,00	Rp 24.995.800,00	Rp 24.995.800,00	-Rp 2.454.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp33.766.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 852.831.000,00	Rp 473.242.500,00	Rp 453.842.500,00	-Rp 398.988.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.049.067.216,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				100 Persen	1 Dokumen 2 Buku	Rp 104.596.000,00	Rp 83.260.000,00	Rp 79.010.000,00	-Rp 25.586.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Rp128.666.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 63.396.000,00	Rp 56.813.000,00	Rp 52.563.000,00	-Rp 10.833.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp77.985.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				2 Buku	2 Buku	Rp 41.200.000,00	Rp 26.447.000,00	Rp 26.447.000,00	-Rp 14.753.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp50.681.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				100 Persen	3 Laporan 4 Laporan	Rp 534.572.570,00	Rp 485.244.850,00	Rp 485.035.314,00	-Rp 49.537.256,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah DIY, Pemerintah Pusat, stakeholder	Rp1.530.779.595,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	Rp 491.368.270,00	Rp 411.894.850,00	Rp 411.685.314,00	-Rp 79.682.956,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.095.016.470,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	7 Laporan	Rp 43.204.300,00	Rp 73.350.000,00	Rp 73.350.000,00	Rp 30.145.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp435.763.125,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
239	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kategori tinggi dan sangat tinggi				60 Persen	73 Persen	Rp 1.485.045.050,00	Rp 922.841.200,00	Rp 907.598.582,00	Rp 248.109.448,00						Rp1.733.154.498,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				100 Persen	1 Laporan 2 Laporan	Rp 405.549.900,00	Rp 289.387.500,00	Rp 261.337.582,00	-Rp 144.212.318,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, Akademisi, dan Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp522.257.535,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	Rp 16.150.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	-Rp 11.050.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp38.587.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	Rp 139.374.900,00	Rp 124.600.000,00	Rp 126.600.082,00	-Rp 12.774.818,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp108.965.720,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	2 Laporan	Rp 15.980.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	-Rp 10.880.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp43.548.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	2 Laporan	Rp 234.045.000,00	Rp 154.587.500,00	Rp 124.537.500,00	-Rp 109.507.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp331.155.565,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				100 Persen	1 Laporan 2 Laporan	Rp 524.032.850,00	Rp 354.839.600,00	Rp 370.699.600,00	-Rp 153.333.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, perusahaan, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Bantul	Rp736.672.993,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp45.478.125,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				3 Laporan	2 Laporan	Rp 322.378.850,00	Rp 210.225.600,00	Rp 226.085.600,00	-Rp 96.293.250,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp483.004.148,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp38.587.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	Rp 191.454.000,00	Rp 134.414.000,00	Rp 134.414.000,00	-Rp 57.040.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp169.603.220,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah				100 Persen	1 Laporan	Rp 555.462.300,00	Rp 278.614.100,00	Rp 275.561.400,00	-Rp 279.900.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah dan masyarakat Kabupaten Bantul	Rp474.223.970,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp38.587.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	Rp 306.284.800,00	Rp 96.853.900,00	Rp 132.876.200,00	-Rp 173.408.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp271.545.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah				1 Laporan	1 Laporan	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp38.587.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah				1 Laporan	1 Laporan	Rp 238.977.500,00	Rp 171.560.200,00	Rp 132.485.200,00	-Rp 106.492.300,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp125.503.220,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							Rp 269.785.400,00	Rp 175.301.200,00	Rp 175.504.854,00	-Rp 94.280.546,00						Rp233.412.613,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
240	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDA				100 Persen	100 Persen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -						Rp0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaran pemerintah an dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDA				100 Persen	100 Persen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah dan masyarakat Kabupaten Bantul	Rp0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kegiatan pada roadmap SiDa yang terlaksana				100 Persen	100 Persen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah dan masyarakat Kabupaten Bantul	Rp0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
241	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase fasilitasi riset dan inovasi di daerah				98 Persen	93,65 Persen	Rp 269.785.400,00	Rp 175.301.200,00	Rp 175.504.854,00	-Rp 36.372.787,00						Rp233.412.613,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah				94 Persen	1 Kegiatan 1 Laporan	Rp 269.785.400,00	Rp 175.301.200,00	Rp 175.504.854,00	-Rp 94.280.546,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, Kalurahan, Akademisi, Masyarakat	Rp233.412.613,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)				1 Laporan	1 Laporan	Rp 22.787.200,00	Rp 19.787.200,00	Rp 19.787.200,00	-Rp 3.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.03.2.02.0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah				1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 94.187.300,00	Rp 36.229.000,00	Rp 36.432.654,00	-Rp 57.754.646,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.03.2.02.0020	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah				1 Laporan	1 Laporan	Rp 152.810.900,00	Rp 119.285.000,00	Rp 119.285.000,00	-Rp 33.525.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp168.412.613,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH							Rp 515.549.807.482,00	Rp 416.672.847.538,00	Rp 414.804.847.819,33	-Rp 100.744.959.662,67						Rp450.632.304.095.854,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 72.586.000,00	Rp 72.586.000,00	Rp 72.586.000,00	Rp -						Rp366.025.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							Rp 72.586.000,00	Rp 72.586.000,00	Rp 72.586.000,00	Rp -						Rp366.025.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
242	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan				93 Persen	97,20 Persen	Rp 72.586.000,00	Rp 72.586.000,00	Rp 72.586.000,00	Rp 293.439.000,00						Rp366.025.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan				100 Persen	100 Persen	Rp 72.586.000,00	Rp 72.586.000,00	Rp 72.586.000,00	Rp -			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul	Rp366.025.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-Diy				3 Laporan	3 Laporan	Rp 72.586.000,00	Rp 72.586.000,00	Rp 72.586.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp366.025.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 515.477.221.482,00	Rp 416.600.261.538,00	Rp 414.732.261.819,33	-Rp 100.744.959.662,67						Rp450.631.938.070.854,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02	KEUANGAN							Rp 515.477.221.482,00	Rp 416.600.261.538,00	Rp 414.732.261.819,33	-Rp 100.744.959.662,67						Rp450.631.938.070.854,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
243	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,73 83,4 Angka Nilai	82,73 83,4 Angka Indeks	Rp 87.662.326.583,00	Rp 83.613.178.936,00	Rp 83.003.743.102,00	Rp 77.490.322.975.095,00						Rp77.577.985.301.678,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 3.162.500,00	Rp 8.262.500,00	Rp 8.262.500,00	Rp 5.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah BPKPAD	Rp26.169.862.598,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 1.250.000,00	Rp 6.350.000,00	Rp 6.350.000,00	Rp 5.100.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp11.316.697.340,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.912.500,00	Rp 1.912.500,00	Rp 1.912.500,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp14.853.165.258,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan undefined				100 Persen	100 Persen undefined	Rp 39.419.401.349,00	Rp 34.741.855.712,00	Rp 33.426.904.484,00	-Rp 5.992.496.865,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah BPKPAD	Rp30.317.599.574.905,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				143 Orang/ bulan	143 Orang/ bulan	Rp 39.008.461.349,00	Rp 34.330.915.712,00	Rp 33.015.964.484,00	-Rp 5.992.496.865,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp29.886.440.387.247,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				34 Laporan	34 Laporan	Rp 410.940.000,00	Rp 410.940.000,00	Rp 410.940.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp431.159.187.658,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian				100 Persen	100 Persen	Rp 3.987.500,00	Rp 7.125.000,00	Rp 7.125.000,00	Rp 3.137.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah BPKPAD	Rp9.654.557.418,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				9 Dokumen	10 Dokumen	Rp 3.987.500,00	Rp 7.125.000,00	Rp 7.125.000,00	Rp 3.137.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp9.654.557.418,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	Rp 1.300.806.540,00	Rp 1.336.869.974,00	Rp 1.300.055.918,00	-Rp 750.622,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah BPKPAD	Rp1.577.668.202.721,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	Rp 617.100,00	Rp 617.100,00	Rp 10.603.800,00	Rp 9.986.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.683.924.366,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	Rp 340.027.820,00	Rp 340.037.954,00	Rp 340.106.698,00	Rp 78.878,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp496.520.095.783,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	Rp 22.117.920,00	Rp 22.117.920,00	Rp 22.117.920,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp40.846.204.461,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	Rp 68.308.200,00	Rp 61.264.500,00	Rp 61.264.500,00	-Rp 7.043.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp427.912.618.160,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp10.927.685.869,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				186 Laporan	160 Laporan	Rp 756.891.000,00	Rp 834.988.000,00	Rp 825.145.000,00	Rp 68.254.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp500.410.210.493,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 1.494.500,00	Rp 1.494.500,00	Rp 11.468.000,00	Rp 9.973.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp19.804.220.345,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 102.350.000,00	Rp 67.350.000,00	Rp 20.350.000,00	-Rp 82.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp74.563.243.244,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp -	Rp 100.650.000,00	Rp 688.390.200,00	Rp 688.390.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah BPKPAD	Rp1.485.316.525.846,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	Rp -	Rp -	Rp 489.245.000,00	Rp 489.245.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.131.669.733.978,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	12 Unit	Rp -	Rp 100.650.000,00	Rp 199.145.200,00	Rp 199.145.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp353.646.791.868,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 46.144.781.744,00	Rp 46.592.158.000,00	Rp 46.601.154.000,00	Rp 456.372.256,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah BPKPAD	Rp43.486.818.499.306,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	Rp 6.048.000,00	Rp 7.848.000,00	Rp 11.844.000,00	Rp 5.796.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp13.113.223.042,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 45.952.800.000,00	Rp 46.352.700.000,00	Rp 46.352.700.000,00	Rp 399.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp43.286.367.324.644,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 185.933.744,00	Rp 231.610.000,00	Rp 236.610.000,00	Rp 50.676.256,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp187.337.951.620,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 790.186.950,00	Rp 826.257.750,00	Rp 971.851.000,00	Rp 181.664.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah BPKPAD	Rp674.758.078.884,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				104 Unit	104 Unit	Rp 710.036.950,00	Rp 746.607.750,00	Rp 831.901.000,00	Rp 121.864.050,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp599.784.959.008,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				120 Unit	122 Unit	Rp 80.150.000,00	Rp 79.650.000,00	Rp 139.950.000,00	Rp 59.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp74.973.119.876,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
244	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase alokasi belanja Infrastruktur pelayanan publik Rasio Belanja Pegawai terhadap total belanja Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya Tahun Anggaran n-1				30 35 7 Persen Persen Persen	30 35 7 Persen Persen Persen	Rp 414.639.291.319,00	Rp 319.960.393.702,00	Rp 318.387.470.485,33	Rp 360.667.974.515.947,00						Rp361.082.613.807.266,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah				60 Persen	60 Persen	Rp 588.862.000,00	Rp 544.662.100,00	Rp 544.662.100,00	-Rp 44.199.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul	Rp764.366.042.815,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 66.125.000,00	Rp 59.400.100,00	Rp 59.400.100,00	-Rp 6.724.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp84.976.769.629,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 66.125.000,00	Rp 59.700.100,00	Rp 59.700.100,00	-Rp 6.424.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp84.976.769.629,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				396 Dokumen	396 Dokumen	Rp 37.625.000,00	Rp 31.354.900,00	Rp 31.354.900,00	-Rp 6.270.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp38.239.546.333,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 231.450.000,00	Rp 221.550.000,00	Rp 221.550.000,00	-Rp 9.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp314.414.047.629,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 181.162.000,00	Rp 171.262.000,00	Rp 171.262.000,00	-Rp 9.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp237.934.954.962,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 6.375.000,00	Rp 1.395.000,00	Rp 1.395.000,00	-Rp 4.980.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.823.954.633,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target				15 Persen	15 Persen	Rp 337.927.900,00	Rp 310.342.103,00	Rp 337.342.103,00	-Rp 585.797,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul	Rp1.613.396.055.776,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				196 Dokumen	196 Dokumen	Rp 84.832.000,00	Rp 78.977.000,00	Rp 78.977.000,00	-Rp 5.855.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp299.118.229.096,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				452 Dokumen	452 Dokumen	Rp 7.900.000,00	Rp 5.880.103,00	Rp 5.880.103,00	-Rp 2.019.897,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp28.042.333.978,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				88 Dokumen	88 Dokumen	Rp 4.675.000,00	Rp 3.750.000,00	Rp 3.750.000,00	-Rp 925.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp29.911.822.910,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				42 Dokumen	42 Dokumen	Rp 10.375.000,00	Rp 3.985.000,00	Rp 3.985.000,00	-Rp 6.390.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp266.896.652.611,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				7 Dokumen	13 Dokumen	Rp 134.225.000,00	Rp 134.225.000,00	Rp 161.225.000,00	Rp 27.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp444.003.621.314,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 7.000.000,00	Rp 5.175.000,00	Rp 5.175.000,00	-Rp 1.825.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp221.534.438.424,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				140 Orang	140 Orang	Rp 88.920.900,00	Rp 78.350.000,00	Rp 78.350.000,00	-Rp 10.570.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp323.888.957.443,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan				9 Persen	60 Persen	Rp 576.575.500,00	Rp 531.834.300,00	Rp 532.834.300,00	-Rp 43.741.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul	Rp718.202.412.715,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				648 Laporan	648 Laporan	Rp 36.079.500,00	Rp 36.517.500,00	Rp 37.517.500,00	Rp 1.438.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp112.169.335.911,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 24.485.000,00	Rp 24.485.000,00	Rp 24.485.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp22.433.867.182,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				31 Laporan	31 Laporan	Rp 36.550.000,00	Rp 36.550.000,00	Rp 36.550.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp36.034.399.161,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 467.901.000,00	Rp 422.721.800,00	Rp 422.721.800,00	-Rp 45.179.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp373.897.786.370,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4.335.000,00	Rp 4.335.000,00	Rp 4.335.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp12.729.520.090,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4.250.000,00	Rp 4.250.000,00	Rp 4.250.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp24.549.788.746,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				70 Orang	70 Orang	Rp 2.975.000,00	Rp 2.975.000,00	Rp 2.975.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp136.387.715.255,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase serapan belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil terhadap target				15 Persen	80 Persen	Rp 413.135.925.919,00	Rp 318.573.555.199,00	Rp 316.972.631.982,33	-Rp 96.163.293.936,67			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul	Rp357.986.649.295.960,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				81 Laporan	90 Laporan	Rp 332.161.552.030,00	Rp 276.302.294.030,00	Rp 276.303.197.030,00	-Rp 55.858.355.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB DANA DESA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp281.332.912.926.556,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	Rp 41.303.112.720,00	Rp 5.000.000.000,00	Rp 3.398.173.783,33	-Rp 37.904.938.936,67	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp41.593.925.880.819,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				75 Laporan	75 Laporan	Rp 39.671.261.169,00	Rp 37.271.261.169,00	Rp 37.271.261.169,00	-Rp 2.400.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp35.059.810.488.585,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
245	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah dalam rangka asset management				66 Persen	66 Persen	Rp 1.288.617.700,00	Rp 1.686.943.500,00	Rp 1.948.899.700,00	Rp 1.390.506.737.155,00						Rp1.391.795.354.855,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD				100 Persen	100 Persen	Rp 1.288.617.700,00	Rp 1.686.943.500,00	Rp 1.948.899.700,00	Rp 660.282.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul	Rp1.391.795.354.855,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 316.100.000,00	Rp 305.300.000,00	Rp 305.300.000,00	-Rp 10.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp221.227.157.537,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				120 Dokumen	120 Dokumen	Rp 6.125.000,00	Rp 7.535.000,00	Rp 7.535.000,00	Rp 1.410.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.570.943.476,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 35.612.500,00	Rp 97.611.000,00	Rp 92.251.000,00	Rp 56.638.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp32.533.405.520,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				52 Laporan	52 Laporan	Rp 307.677.200,00	Rp 337.550.000,00	Rp 337.550.000,00	Rp 29.872.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp260.267.244.161,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan	Rp 31.187.500,00	Rp 10.250.000,00	Rp 7.725.000,00	-Rp 23.462.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp221.227.157.537,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1622 Laporan	1622 Laporan	Rp 12.225.000,00	Rp 337.250.000,00	Rp 598.206.200,00	Rp 585.981.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.808.017.325,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	Rp 6.825.000,00	Rp 4.484.500,00	Rp 3.359.500,00	-Rp 3.465.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp48.800.108.280,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				11 Laporan	11 Laporan	Rp 186.756.500,00	Rp 160.919.000,00	Rp 155.919.000,00	-Rp 30.837.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp211.467.135.881,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				16 Laporan	16 Laporan	Rp 311.124.000,00	Rp 353.459.000,00	Rp 368.469.000,00	Rp 57.345.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp253.760.563.057,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				240 Orang	240 Orang	Rp 74.985.000,00	Rp 72.585.000,00	Rp 72.585.000,00	-Rp 2.400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp130.133.622.081,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
246	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD Posentase data piutang pajak daerah yang tertagih				10,79 78 Persen	10,79 78,50 Persen	Rp 11.886.985.880,00	Rp 11.339.745.400,00	Rp 11.392.148.532,00	Rp 10.567.656.621.175,00						Rp10.579.543.607.055,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD				46 Persen	46 Persen	Rp 11.886.985.880,00	Rp 11.339.745.400,00	Rp 11.392.148.532,00	-Rp 494.837.348,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul	Rp10.579.543.607.055,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 2.471.049.680,00	Rp 2.463.587.500,00	Rp 2.319.000.585,00	-Rp 152.049.095,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.887.265.219.517,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	Rp 1.179.705.000,00	Rp 519.815.000,00	Rp 482.530.000,00	-Rp 697.175.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp837.575.918.748,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				7 Unit	10 Unit	Rp 2.738.160.000,00	Rp 1.046.505.000,00	Rp 1.167.402.000,00	-Rp 1.570.758.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.124.294.206.702,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.809.190.400,00	Rp 1.809.189.000,00	Rp 1.892.382.500,00	Rp 83.192.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp748.052.953.646,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	Rp 264.569.020,00	Rp 1.008.976.500,00	Rp 979.976.400,00	Rp 715.407.380,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp373.532.631.098,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				30 Obyek Pajak	30 Obyek Pajak	Rp 7.098.000,00	Rp 246.806.500,00	Rp 216.806.500,00	Rp 209.708.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp45.925.249.649,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 1.344.342.600,00	Rp 1.462.329.900,00	Rp 1.507.686.150,00	Rp 163.343.550,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.774.504.764.304,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				7 Layanan	7 Layanan	Rp 411.801.800,00	Rp 1.293.623.100,00	Rp 1.235.073.100,00	Rp 823.271.300,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.293.657.057.847,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 168.366.020,00	Rp 104.505.000,00	Rp 107.505.000,00	-Rp 60.861.020,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp272.081.574.437,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 991.677.616,00	Rp 1.049.557.900,00	Rp 1.161.540.202,00	Rp 169.862.586,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp803.693.635.619,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 111.086.000,00	Rp 44.550.000,00	Rp 45.547.117,00	-Rp 65.538.883,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp84.889.451.224,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 383.189.744,00	Rp 216.900.000,00	Rp 203.298.978,00	-Rp 179.890.766,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp281.421.392.847,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	Rp 6.750.000,00	Rp 73.400.000,00	Rp 73.400.000,00	Rp 66.650.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp52.649.551.417,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA							Rp 22.710.709.319,00	Rp 13.029.896.379,97	Rp 12.606.865.179,97	-Rp 10.103.844.139,03						Rp31.168.368.772,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 307.794.000,00	Rp 307.794.000,00	Rp 150.000.000,00	-Rp 157.794.000,00						Rp150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							Rp 307.794.000,00	Rp 307.794.000,00	Rp 150.000.000,00	-Rp 157.794.000,00						Rp150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
247	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY				37.50 Nilai	33.67 Persen	Rp 307.794.000,00	Rp 307.794.000,00	Rp 150.000.000,00	-Rp 157.794.000,00						Rp150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan Keistimewaan				100 Persen	100 Persen	Rp 307.794.000,00	Rp 307.794.000,00	Rp 150.000.000,00	-Rp 157.794.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul	Rp150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan				1 Laporan	1 Laporan	Rp 307.794.000,00	Rp 307.794.000,00	Rp 150.000.000,00	-Rp 157.794.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 22.402.915.319,00	Rp 12.722.102.379,97	Rp 12.456.865.179,97	-Rp 9.946.050.139,03						Rp31.018.368.772,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03	KEPEGAWAIAN							Rp 20.437.877.319,00	Rp 11.478.784.379,97	Rp 11.313.547.179,97	-Rp 9.124.330.139,03						Rp29.107.161.272,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
248	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat				84.20 86 Angka Nilai	84.20 86 Angka Nilai	Rp 18.959.950.287,00	Rp 10.217.178.379,97	Rp 10.058.703.415,97	Rp 8.669.283.953,00						Rp27.629.234.240,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 6.750.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 5.500.000,00	-Rp 1.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul	Rp7.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	Rp 3.000.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	-Rp 500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	Rp 3.750.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	-Rp 750.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	Rp 18.000.311.541,00	Rp 9.586.257.728,97	Rp 9.320.020.528,97	-Rp 8.680.291.012,03			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul	Rp26.590.516.174,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	47 Orang/bulan	Rp 17.856.226.541,00	Rp 9.474.497.728,97	Rp 9.208.260.528,97	-Rp 8.647.966.012,03	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp26.445.956.174,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 142.560.000,00	Rp 110.760.000,00	Rp 110.760.000,00	-Rp 31.800.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp142.560.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	19 Laporan	Rp 1.525.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	-Rp 525.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 677.368.786,00	Rp 422.808.719,00	Rp 532.035.955,00	-Rp 145.332.831,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul	Rp707.874.386,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	18 Paket	Rp 170.866.678,00	Rp 31.074.019,00	Rp 163.344.355,00	-Rp 7.522.323,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp170.866.678,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	Rp 25.233.708,00	Rp 20.139.200,00	Rp 21.139.200,00	-Rp 4.094.508,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp25.857.708,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	Rp 14.565.900,00	Rp 8.770.000,00	Rp 6.479.900,00	-Rp 8.086.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	15 Laporan	Rp 15.750.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 3.000.000,00	-Rp 12.750.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp15.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	65 Laporan	Rp 236.640.000,00	Rp 192.263.000,00	Rp 169.435.000,00	-Rp 67.205.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 6.537.500,00	Rp 6.537.500,00	Rp 4.237.500,00	-Rp 2.300.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 205.375.000,00	Rp 157.125.000,00	Rp 162.000.000,00	-Rp 43.375.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 56.800.160,00	Rp 31.549.832,00	Rp 32.349.832,00	-Rp 24.450.328,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul	Rp104.373.880,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 900.000,00	-Rp 600.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 4.801.800,00	Rp 2.519.832,00	Rp 919.832,00	-Rp 3.881.968,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.801.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 29.641.000,00	Rp 22.530.000,00	Rp 25.530.000,00	-Rp 4.111.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 20.857.360,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	-Rp 15.857.360,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp62.572.080,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional				100 Persen	100 Persen	Rp 218.719.800,00	Rp 171.062.100,00	Rp 168.797.100,00	-Rp 49.922.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul	Rp218.719.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	Rp 218.719.800,00	Rp 171.062.100,00	Rp 168.797.100,00	-Rp 49.922.700,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp218.719.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
249	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN				86 Persen	86 Persen	Rp 1.477.927.032,00	Rp 1.261.606.000,00	Rp 1.254.843.764,00	Rp -						Rp1.477.927.032,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keterisian Formasi Kebutuhan ASN				100 Persen	100 Persen	Rp 663.669.532,00	Rp 367.766.000,00	Rp 363.593.764,00	-Rp 300.075.768,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul dan Masyarakat	Rp663.669.532,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4.250.000,00	Rp 937.500,00	Rp 937.500,00	-Rp 3.312.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 579.588.000,00	Rp 328.291.000,00	Rp 326.478.500,00	-Rp 253.109.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp579.588.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				403 Dokumen	488 Dokumen	Rp 34.662.500,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 34.162.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp34.662.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				13 Dokumen	13 Dokumen	Rp 45.169.032,00	Rp 38.037.500,00	Rp 35.677.764,00	-Rp 9.491.268,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp45.169.032,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Capaian Pengelolaan Mutasi dalam Jabatan				26,2 Persen	26,2 Persen	Rp 292.280.000,00	Rp 241.005.000,00	Rp 241.005.000,00	-Rp 51.275.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul	Rp292.280.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				525 Dokumen	525 Dokumen	Rp 247.980.000,00	Rp 240.067.500,00	Rp 240.067.500,00	-Rp 7.912.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp247.980.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				500 Dokumen	1100 Dokumen	Rp 44.300.000,00	Rp 937.500,00	Rp 937.500,00	-Rp 43.362.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp44.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Capaian Pengembangan Kompetensi ASN				76,09 Persen	76,09 Persen	Rp 127.100.000,00	Rp 359.730.000,00	Rp 357.140.000,00	Rp 230.040.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul	Rp127.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				30 Orang	18 Orang	Rp 11.250.000,00	Rp 11.250.000,00	Rp 9.750.000,00	-Rp 1.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp11.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 106.100.000,00	Rp 131.080.000,00	Rp 131.080.000,00	Rp 24.980.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp106.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				50 Orang	50 Orang	Rp 9.750.000,00	Rp 217.400.000,00	Rp 216.310.000,00	Rp 206.560.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp9.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Capaian ASN berkinerja baik dan sangat baik				97,40 Persen	97,40 Persen	Rp 394.877.500,00	Rp 293.105.000,00	Rp 293.105.000,00	-Rp 101.772.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul	Rp394.877.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				8298 Dokumen	11608 Dokumen	Rp 157.475.000,00	Rp 10.875.000,00	Rp 10.875.000,00	-Rp 146.600.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp157.475.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				167 Orang	154 Orang	Rp 188.512.500,00	Rp 247.590.000,00	Rp 247.590.000,00	Rp 59.077.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp188.512.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				25 Orang	25 Orang	Rp 48.890.000,00	Rp 34.640.000,00	Rp 34.640.000,00	-Rp 14.250.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp48.890.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							Rp 1.965.038.000,00	Rp 1.243.318.000,00	Rp 1.143.318.000,00	-Rp 821.720.000,00						Rp1.911.207.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
250	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Capaian Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan				47,31 75 Persen Persen	47,31 75 Persen Persen	Rp 1.965.038.000,00	Rp 1.243.318.000,00	Rp 1.143.318.000,00	-Rp 53.830.500,00						Rp1.911.207.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis dan Sosiokultural ASN				100 Persen	100 Persen	Rp 976.576.000,00	Rp 1.007.526.000,00	Rp 907.526.000,00	-Rp 69.050.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul	Rp1.071.527.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 221.426.000,00	Rp 265.500.000,00	Rp 265.500.000,00	Rp 44.074.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp36.375.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				845 Orang	800 Orang	Rp 755.150.000,00	Rp 742.026.000,00	Rp 642.026.000,00	-Rp 113.124.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.035.152.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Pelatihan Dasar ASN				100 Persen	100 Persen	Rp 988.462.000,00	Rp 235.792.000,00	Rp 235.792.000,00	-Rp 752.670.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul	Rp839.680.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3 Laporan	3 Laporan	Rp 988.462.000,00	Rp 235.792.000,00	Rp 235.792.000,00	-Rp 752.670.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp839.680.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
		INSPEKTORAT DAERAH							Rp 13.375.753.085,00	Rp 13.854.892.612,12	Rp 13.860.892.612,12	Rp 485.139.527,12						Rp12.892.668.287,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 13.375.753.085,00	Rp 13.854.892.612,12	Rp 13.860.892.612,12	Rp 485.139.527,12						Rp12.892.668.287,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							Rp 13.375.753.085,00	Rp 13.854.892.612,12	Rp 13.860.892.612,12	Rp 485.139.527,12						Rp12.892.668.287,00	INSPEKTORAT DAERAH
251	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				84,16 94,81 Angka Indeks	84.16 94,81 Angka Indeks	Rp 12.224.668.585,00	Rp 12.888.606.112,12	Rp 12.881.856.112,12	-Rp 481.538.864,00						Rp11.743.129.721,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 11.750.000,00	Rp 7.250.000,00	Rp 7.250.000,00	-Rp 4.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Inspektorat	Rp12.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	Rp 7.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	-Rp 3.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	Rp 4.250.000,00	Rp 2.750.000,00	Rp 2.750.000,00	-Rp 1.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	Rp 10.388.101.558,00	Rp 11.167.390.318,12	Rp 11.167.390.318,12	Rp 779.288.760,12			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Inspektorat	Rp9.983.335.001,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/b ulan	60 Orang/b ulan	Rp 10.275.491.558,00	Rp 11.056.280.318,12	Rp 11.056.280.318,12	Rp 780.788.760,12	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp9.866.885.001,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 108.360.000,00	Rp 108.360.000,00	Rp 108.360.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp110.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				15 Laporan	15 Laporan	Rp 4.250.000,00	Rp 2.750.000,00	Rp 2.750.000,00	-Rp 1.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.450.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian				100 Persen	100 Persen	Rp 471.262.500,00	Rp 569.532.000,00	Rp 469.432.000,00	-Rp 1.830.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Inspektorat	Rp243.680.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 2.422.500,00	Rp 3.250.000,00	Rp 3.250.000,00	Rp 827.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp9.850.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				41 Orang	41 Orang	Rp 468.840.000,00	Rp 566.282.000,00	Rp 466.182.000,00	-Rp 2.658.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp233.830.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	Rp 749.480.037,00	Rp 632.652.206,00	Rp 712.812.206,00	-Rp 36.667.831,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Inspektorat	Rp996.874.563,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 3.335.680,00	Rp 3.335.680,00	Rp 3.335.680,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.451.528,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	Rp 255.134.164,00	Rp 228.986.430,00	Rp 266.942.430,00	Rp 11.808.266,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp300.210.053,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	Rp 45.825.940,00	Rp 37.333.520,00	Rp 42.314.720,00	-Rp 3.511.220,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp249.913.758,00	INSPEKTORAT DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	Rp 47.881.857,00	Rp 47.029.680,00	Rp 47.027.480,00	-Rp 854.377,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp42.745.750,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	24 Laporan	Rp 29.000.000,00	Rp 22.500.000,00	Rp 22.500.000,00	-Rp 6.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp30.950.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	Rp 311.091.000,00	Rp 241.518.000,00	Rp 278.743.000,00	-Rp 32.348.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp326.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2500 Dokumen	2500 Dokumen	Rp 37.711.396,00	Rp 33.948.896,00	Rp 33.948.896,00	-Rp 3.762.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp32.078.474,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 12.000.000,00	Rp 10.500.000,00	Rp 10.500.000,00	-Rp 1.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.325.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 263.032.860,00	Rp 273.445.808,00	Rp 286.635.808,00	Rp 23.602.948,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Inspektorat	Rp261.675.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 4.205.808,00	Rp 4.205.808,00	Rp 4.205.808,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 50.890.000,00	Rp 44.190.000,00	Rp 51.380.000,00	Rp 490.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp47.375.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	Rp 207.937.052,00	Rp 225.050.000,00	Rp 231.050.000,00	Rp 23.112.948,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp210.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Persen	-	Rp 341.041.630,00	Rp 238.335.780,00	Rp 238.335.780,00	-Rp 102.705.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Inspektorat	Rp244.815.157,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	23 Unit	Rp 237.137.250,00	Rp 231.245.000,00	Rp 231.245.000,00	-Rp 5.892.250,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp218.318.620,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	Rp 103.904.380,00	Rp 7.090.780,00	Rp 7.090.780,00	-Rp 96.813.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp26.496.537,00	INSPEKTORAT DAERAH
252	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan berulang				38 Persen	4,50 Persen	Rp 146.175.000,00	Rp 64.625.000,00	Rp 75.550.000,00	-Rp 16.464.206,00						Rp129.710.794,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal				100 Persen	100 Persen	Rp 135.650.000,00	Rp 54.750.000,00	Rp 65.675.000,00	-Rp 69.975.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan	Rp119.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				150 Laporan	57 Laporan	Rp 26.475.000,00	Rp 6.850.000,00	Rp 5.650.000,00	-Rp 20.825.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp22.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				130 Laporan	122 Laporan	Rp 11.050.000,00	Rp 1.875.000,00	Rp 1.875.000,00	-Rp 9.175.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				15 Laporan	15 Laporan	Rp 18.900.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 10.725.000,00	-Rp 8.175.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp22.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				95 Laporan	98 Laporan	Rp 12.750.000,00	Rp 1.875.000,00	Rp 1.875.000,00	-Rp 10.875.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp11.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				30 Laporan	30 Laporan	Rp 10.650.000,00	Rp 6.150.000,00	Rp 6.150.000,00	-Rp 4.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp9.050.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepaka tan	1 Kesepaka tan	Rp 7.225.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 4.900.000,00	-Rp 2.325.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 48.600.000,00	Rp 34.500.000,00	Rp 34.500.000,00	-Rp 14.100.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp40.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti				100 Persen	100 Persen	Rp 10.525.000,00	Rp 9.875.000,00	Rp 9.875.000,00	-Rp 650.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan	Rp10.160.794,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	2 Laporan	Rp 3.000.000,00	Rp 3.125.000,00	Rp 3.125.000,00	Rp 125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.875.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				19 Laporan	19 Laporan	Rp 7.525.000,00	Rp 6.750.000,00	Rp 6.750.000,00	-Rp 775.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.285.794,00	INSPEKTORAT DAERAH
253	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi				3,024 Nilai	3,024 Nilai	Rp 1.004.909.500,00	Rp 901.661.500,00	Rp 903.486.500,00	Rp 14.918.272,00						Rp1.019.827.772,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				90 Persen	90 Persen	Rp 12.900.000,00	Rp 12.900.000,00	Rp 20.975.000,00	Rp 8.075.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan	Rp12.850.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				6 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	Rp 6.900.000,00	Rp 6.900.000,00	Rp 11.150.000,00	Rp 4.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.050.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 9.825.000,00	Rp 3.825.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase laporan pendampingan dan asistensi				100 Persen	100 Persen	Rp 992.009.500,00	Rp 888.761.500,00	Rp 882.511.500,00	-Rp 109.498.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan	Rp1.006.977.772,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				47 perangkat daerah	45 perangkat daerah	Rp 8.500.000,00	Rp 937.500,00	Rp 937.500,00	-Rp 7.562.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp8.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				17 perangkat daerah	7 perangkat daerah	Rp 9.100.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	-Rp 6.600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp8.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				25 Kegiatan	27 Kegiatan	Rp 939.208.000,00	Rp 873.942.000,00	Rp 867.692.000,00	-Rp 71.516.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp955.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegekan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegekan Integritas				47 perangkat daerah	45 perangkat daerah	Rp 35.201.500,00	Rp 11.382.000,00	Rp 11.382.000,00	-Rp 23.819.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp34.477.772,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KAPANEWON PIYUNGAN							Rp 3.983.833.717,00	Rp 3.324.620.687,00	Rp 3.222.624.687,00	-Rp 761.209.030,00						Rp4.523.229.175,00	KAPANEWON PIYUNGAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp150.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp150.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
254	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan				100 Persen	0 Persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp 50.000.000,00						Rp150.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Pelaksanaan Kegiatan adat dan tradisi di Kapanewon				100 Persen	0 Persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kap. Piyungan	Rp150.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp150.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp40.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp40.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
255	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi				100 Persen	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 4.004.000,00						Rp40.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Pelaksanaan Urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan				100 Persen	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kap. Piyungan	Rp40.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 Dokumen	3 Dokumen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp40.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
7		UNSUR KEWILAYAHAN							Rp 3.847.837.717,00	Rp 3.188.624.687,00	Rp 3.192.624.687,00	-Rp 655.213.030,00						Rp4.333.229.175,00	KAPANEWON PIYUNGAN
7.01		KECAMATAN							Rp 3.847.837.717,00	Rp 3.188.624.687,00	Rp 3.192.624.687,00	-Rp 655.213.030,00						Rp4.333.229.175,00	KAPANEWON PIYUNGAN
256	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				81.13 95.53 Angka Indeks	81.13 95.53 Angka Indeks	Rp 3.484.740.217,00	Rp 3.035.496.287,00	Rp 3.039.496.287,00	Rp 157.738.958,00						Rp3.642.479.175,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 5.100.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	-Rp 1.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan	Rp40.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 2.550.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	-Rp 750.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp20.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	Rp 2.550.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	-Rp 750.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp20.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	Rp 2.924.009.433,00	Rp 2.612.226.406,00	Rp 2.612.226.406,00	-Rp 311.783.027,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan	Rp2.546.088.175,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	Rp 2.874.749.433,00	Rp 2.566.266.406,00	Rp 2.566.266.406,00	-Rp 308.483.027,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.478.088.175,00	KAPANEWON PIYUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 44.160.000,00	Rp 44.160.000,00	Rp 44.160.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp65.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	Rp 5.100.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	-Rp 3.300.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasi kepegawalan perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 2.550.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	-Rp 750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan	Rp3.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 2.550.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	-Rp 750.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				100 Persen	100 Persen	Rp 151.777.440,00	Rp 60.839.781,00	Rp 60.839.781,00	-Rp 90.937.659,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan	Rp469.800.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 8.081.430,00	Rp 5.255.340,00	Rp 5.255.340,00	-Rp 2.826.090,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp40.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 36.883.210,00	Rp 7.582.901,00	Rp 7.582.901,00	-Rp 29.300.309,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp55.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 7.603.700,00	Rp 5.729.440,00	Rp 5.729.440,00	-Rp 1.874.260,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp43.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 9.938.100,00	Rp 4.502.100,00	Rp 4.502.100,00	-Rp 5.436.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp45.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 2.400.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	-Rp 900.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.800.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95 Laporan	24 Laporan	Rp 82.168.000,00	Rp 32.670.000,00	Rp 32.670.000,00	-Rp 49.498.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp249.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.153.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	-Rp 353.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp30.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.550.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	-Rp 750.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	Rp 192.784.744,00	Rp 195.860.000,00	Rp 199.860.000,00	Rp 7.075.256,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan	Rp305.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 62.590.000,00	Rp 62.590.000,00	Rp 62.590.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp80.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 11.745.000,00	Rp 6.070.000,00	Rp 6.070.000,00	-Rp 5.675.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp50.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	Rp 118.449.744,00	Rp 127.200.000,00	Rp 131.200.000,00	Rp 12.750.256,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp175.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah				100 persen	100 persen	Rp 208.518.600,00	Rp 161.170.100,00	Rp 161.170.100,00	-Rp 47.348.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan	Rp278.591.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	Rp 167.761.650,00	Rp 161.170.100,00	Rp 161.170.100,00	-Rp 6.591.550,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp170.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	Rp 40.756.950,00	Rp -	Rp -	-Rp 40.756.950,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp108.591.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
257	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan				100 Persen	100 Persen	Rp 35.050.000,00	Rp 11.500.000,00	Rp 11.500.000,00	Rp 129.950.000,00						Rp165.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 24.800.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	-Rp 17.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Piyungan	Rp115.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	Rp 14.175.000,00	Rp 2.700.000,00	Rp 2.700.000,00	-Rp 11.475.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp50.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 10.625.000,00	Rp 4.800.000,00	Rp 4.800.000,00	-Rp 5.825.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp65.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Koordinasi Pelayanan Kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 10.250.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	-Rp 6.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Piyungan	Rp50.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 10.250.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	-Rp 6.250.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp50.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
258	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat				100 Persen	100 Persen	Rp 178.806.000,00	Rp 52.916.000,00	Rp 52.916.000,00	Rp 56.944.000,00						Rp235.750.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi pemberdayan Masyarakat kalurahan				100 Persen	100 Persen	Rp 93.480.000,00	Rp 45.005.000,00	Rp 45.005.000,00	-Rp 48.475.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Piyungan	Rp205.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga K emasyarak atan	6 Lembaga Kemasyara katan	Rp 19.637.500,00	Rp 4.800.000,00	Rp 4.800.000,00	-Rp 14.837.500,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp30.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 73.842.500,00	Rp 40.205.000,00	Rp 40.205.000,00	-Rp 33.637.500,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp175.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kecamatan				100 Persen	100 Persen	Rp 85.326.000,00	Rp 7.911.000,00	Rp 7.911.000,00	-Rp 77.415.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat kapanewon Piyungan	Rp30.750.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	1 Laporan	Rp 85.326.000,00	Rp 7.911.000,00	Rp 7.911.000,00	-Rp 77.415.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp30.750.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
259	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				100 persen	100 persen	Rp 9.835.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 235.165.000,00						Rp245.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 9.835.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	-Rp 6.835.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Piyungan	Rp245.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 9.835.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	-Rp 6.835.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp245.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
260	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				100 persen	100 persen	Rp 139.406.500,00	Rp 85.712.400,00	Rp 85.712.400,00	-Rp 94.406.500,00						Rp45.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 139.406.500,00	Rp 85.712.400,00	Rp 85.712.400,00	-Rp 53.694.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Piyungan	Rp45.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75 Orang	70 Orang	Rp 139.406.500,00	Rp 85.712.400,00	Rp 85.712.400,00	-Rp 53.694.100,00	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp45.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
KAPANEWON DLINGO									Rp 4.044.818.490,00	Rp 3.495.384.724,11	Rp 3.544.388.724,11	-Rp 500.429.765,89						Rp4.648.320.490,00	KAPANEWON DLINGO
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
261	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				100 Persen	100 Persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -						Rp100.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pagelaran Seni Budaya di Kapanewon Dlingo				1 Laporan	1 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, pelaku seni budaya, UMKM	Rp100.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp100.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp40.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp40.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
262	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas				100 Persen	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 4.004.000,00						Rp40.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				100 Persen	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon dan kalurahan	Rp40.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp40.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
7		UNSUR KEWILAYAHAN							Rp 3.908.822.490,00	Rp 3.359.388.724,11	Rp 3.514.388.724,11	-Rp 394.433.765,89						Rp4.508.320.490,00	KAPANEWON DLINGO
7.01		KECAMATAN							Rp 3.908.822.490,00	Rp 3.359.388.724,11	Rp 3.514.388.724,11	-Rp 394.433.765,89						Rp4.508.320.490,00	KAPANEWON DLINGO
263	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				88 Angka	88 Angka	Rp 3.533.477.890,00	Rp 3.182.822.124,11	Rp 3.338.322.124,11	Rp 369.842.600,00						Rp3.903.320.490,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 4.250.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	-Rp 3.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp20.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 2.125.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 1.625.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp10.000.000,00	KAPANEWON DLINGO

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	Rp 2.125.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 1.625.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp10.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 3.016.483.270,00	Rp 2.800.159.217,11	Rp 2.950.159.217,11	-Rp 66.324.052,89			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp2.525.394.490,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	Rp 2.967.198.270,00	Rp 2.752.499.217,11	Rp 2.902.499.217,11	-Rp 64.699.052,89	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.365.394.490,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 47.160.000,00	Rp 47.160.000,00	Rp 47.160.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp150.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	Rp 2.125.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 1.625.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp10.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	Rp 1.062.500,00	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	-Rp 812.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp5.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.062.500,00	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	-Rp 812.500,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	Rp 139.623.190,00	Rp 36.110.807,00	Rp 36.610.807,00	-Rp 103.012.383,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon Dlingo	Rp435.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 4.357.380,00	Rp 3.113.500,00	Rp 3.113.500,00	-Rp 1.243.880,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp50.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 17.379.310,00	Rp 11.539.407,00	Rp 11.539.307,00	-Rp 5.840.003,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp80.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 9.225.400,00	Rp 4.925.400,00	Rp 4.925.400,00	-Rp 4.300.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp45.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 6.083.100,00	Rp 510.000,00	Rp 530.100,00	-Rp 5.553.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp45.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.200.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 1.200.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp10.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				345 Laporan	345 Laporan	Rp 98.828.000,00	Rp 15.522.500,00	Rp 16.002.500,00	-Rp 82.825.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp190.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.275.000,00	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	-Rp 1.025.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp10.000.000,00	KAPANEWON DLINGO



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	Rp 1.275.000,00	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	-Rp 1.025.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 17.500.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 17.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon Dlingo	Rp95.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	Rp 10.900.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 10.900.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp50.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	Rp 6.600.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 6.600.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp45.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 195.544.180,00	Rp 198.292.000,00	Rp 203.292.000,00	Rp 7.747.820,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon Dlingo	Rp365.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 36.592.000,00	Rp 36.692.000,00	Rp 36.692.000,00	Rp 100.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp110.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 10.290.000,00	Rp 2.600.000,00	Rp 2.600.000,00	-Rp 7.690.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp45.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	Rp 148.662.180,00	Rp 159.000.000,00	Rp 164.000.000,00	Rp 15.337.820,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp210.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 159.014.750,00	Rp 147.010.100,00	Rp 147.010.100,00	-Rp 12.004.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon Dlingo	Rp457.926.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	Rp 154.654.650,00	Rp 142.650.000,00	Rp 142.650.000,00	-Rp 12.004.650,00	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp180.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	Rp 4.360.100,00	Rp 4.360.100,00	Rp 4.360.100,00	Rp -	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp277.926.000,00	KAPANEWON DLINGO
264	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 Persen	100 Persen	Rp 30.350.000,00	Rp 22.250.000,00	Rp 21.750.000,00	Rp 114.650.000,00						Rp145.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 26.350.000,00	Rp 16.200.000,00	Rp 16.200.000,00	-Rp 10.150.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kalurahan di Wilayah Kapanewon Dlingo	Rp95.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	Rp 6.375.000,00	Rp 5.400.000,00	Rp 5.400.000,00	-Rp 975.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp35.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 19.975.000,00	Rp 10.800.000,00	Rp 10.800.000,00	-Rp 9.175.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp60.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon				89 Angka	89 Angka	Rp 4.000.000,00	Rp 6.050.000,00	Rp 5.550.000,00	Rp 1.550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat,Kapane wo dan Kelurahan	Rp50.000.000,00	KAPANEWON DLINGO



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 4.000.000,00	Rp 6.050.000,00	Rp 5.550.000,00	Rp 1.550.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp50.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
265	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat				100 Persen	100 Persen	Rp 150.592.100,00	Rp 81.968.100,00	Rp 81.968.100,00	Rp 94.407.900,00						Rp245.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa				100 Persen	100 Persen	Rp 102.220.500,00	Rp 54.384.000,00	Rp 54.384.000,00	-Rp 47.836.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat,Kapane wo dan Kelurahan	Rp145.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga K emasyarak atan	10 Lembaga K emasyarak atan	Rp 30.814.500,00	Rp 26.552.000,00	Rp 26.552.000,00	-Rp 4.262.500,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp35.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	Rp 71.406.000,00	Rp 27.832.000,00	Rp 27.832.000,00	-Rp 43.574.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp110.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan				100 Persen	100 Persen	Rp 48.371.600,00	Rp 27.584.100,00	Rp 27.584.100,00	-Rp 20.787.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	UMKM,Masyarakat dan Kapanewon	Rp100.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	6 Laporan	Rp 48.371.600,00	Rp 27.584.100,00	Rp 27.584.100,00	-Rp 20.787.500,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp100.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
266	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 6.000.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 174.000.000,00						Rp180.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				100 Persen	100 Persen	Rp 6.000.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat,Kapane wo dan Kelurahan	Rp180.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	Rp 6.000.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 300.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp180.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
267	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum				100 Persen	100 Persen	Rp 188.402.500,00	Rp 66.048.500,00	Rp 66.048.500,00	-Rp 153.402.500,00						Rp35.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				100 Persen	100 Persen	Rp 188.402.500,00	Rp 66.048.500,00	Rp 66.048.500,00	-Rp 122.354.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat,Kapane wo dan Kelurahan	Rp35.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	Rp 188.402.500,00	Rp 66.048.500,00	Rp 66.048.500,00	-Rp 122.354.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp35.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
		KAPANEWON IMOIRI							Rp 4.495.868.086,00	Rp 3.719.360.087,07	Rp 3.717.364.087,07	-Rp 778.503.998,93						Rp4.873.032.644,00	KAPANEWON IMOIRI
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
268	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -						Rp100.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di Kapanewon				100 %	100 %	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Pelaku Seni dan UMKM	Rp100.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp100.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp40.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp40.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
269	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi				100 %	100 %	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 4.004.000,00						Rp40.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan				100 %	100 %	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon dan Kalurahan	Rp40.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 Dokumen	3 Dokumen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp40.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
7		UNSUR KEWILAYAHAN							Rp 4.359.872.086,00	Rp 3.583.364.087,07	Rp 3.687.364.087,07	-Rp 672.507.998,93						Rp4.733.032.644,00	KAPANEWON IMOIRI
7.01		KECAMATAN							Rp 4.359.872.086,00	Rp 3.583.364.087,07	Rp 3.687.364.087,07	-Rp 672.507.998,93						Rp4.733.032.644,00	KAPANEWON IMOIRI
270	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				81,22 95,11 angka Indeks	81,80 95,73 angka Indeks	Rp 3.953.260.586,00	Rp 3.400.622.887,07	Rp 3.504.872.887,07	-Rp 80.227.942,00						Rp3.873.032.644,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				100 % 100 persen	100 %	Rp 5.100.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	-Rp 3.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp8.925.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 2.550.000,00	Rp 900.000,00	Rp 900.000,00	-Rp 1.650.000,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.550.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	Rp 2.550.000,00	Rp 900.000,00	Rp 900.000,00	-Rp 1.650.000,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.375.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	Rp 3.387.712.126,00	Rp 3.028.339.409,07	Rp 3.128.339.409,07	-Rp 259.372.716,93			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp2.703.422.644,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	22 Orang/b ulan	Rp 3.338.277.126,00	Rp 2.982.379.409,07	Rp 3.082.379.409,07	-Rp 255.897.716,93	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.647.322.644,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 44.760.000,00	Rp 44.760.000,00	Rp 44.760.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp51.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	Rp 4.675.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	-Rp 3.475.000,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.100.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp -			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp3.400.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.400.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				100 %	100 %	Rp 138.106.420,00	Rp 39.141.732,00	Rp 49.515.420,00	-Rp 88.591.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp335.485.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	Rp 3.658.750,00	Rp 3.658.750,00	Rp 3.658.750,00	Rp -	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp15.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 36.937.570,00	Rp 9.537.582,00	Rp 16.537.770,00	-Rp 20.399.800,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp21.361.000,00	KAPANEWON IMOIRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	Rp 3.032.200,00	Rp 1.738.100,00	Rp 1.738.100,00	-Rp 1.294.100,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp12.774.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 8.862.400,00	Rp 4.107.300,00	Rp 4.120.800,00	-Rp 4.741.600,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp18.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58 Laporan	15 Laporan	Rp 78.965.500,00	Rp 14.700.000,00	Rp 18.060.000,00	-Rp 60.905.500,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp250.225.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.125.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	-Rp 625.000,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp10.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.125.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	-Rp 625.000,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.125.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	Rp 186.871.160,00	Rp 203.253.796,00	Rp 197.130.108,00	Rp 10.258.948,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp176.800.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 18.447.044,00	Rp 27.420.560,00	Rp 20.690.420,00	Rp 2.243.376,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp12.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 19.095.000,00	Rp 13.850.000,00	Rp 13.850.000,00	-Rp 5.245.000,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.800.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				72 Laporan	60 Laporan	Rp 149.329.116,00	Rp 161.983.236,00	Rp 162.589.688,00	Rp 13.260.572,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp160.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah				100 %	100 %	Rp 233.970.880,00	Rp 126.587.950,00	Rp 126.587.950,00	-Rp 107.382.930,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp645.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	Rp 156.520.000,00	Rp 125.060.350,00	Rp 125.060.350,00	-Rp 31.459.650,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp150.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	Rp 77.450.880,00	Rp 1.527.600,00	Rp 1.527.600,00	-Rp 75.923.280,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp495.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
271	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan				100 %	100 %	Rp 31.525.000,00	Rp 13.000.000,00	Rp 13.000.000,00	Rp 123.475.000,00						Rp155.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon				100 %	100 %	Rp 23.700.000,00	Rp 9.875.000,00	Rp 9.875.000,00	-Rp 13.825.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon dan Kalurahan	Rp120.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	Rp 6.250.000,00	Rp 3.250.000,00	Rp 3.250.000,00	-Rp 3.000.000,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp60.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 17.450.000,00	Rp 6.625.000,00	Rp 6.625.000,00	-Rp 10.825.000,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp60.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan koordinasi pelayanan kapanewon				100 %	100 %	Rp 7.825.000,00	Rp 3.125.000,00	Rp 3.125.000,00	-Rp 4.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon dan Kalurahan	Rp35.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 7.825.000,00	Rp 3.125.000,00	Rp 3.125.000,00	-Rp 4.700.000,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp35.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
272	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat				100 %	100 %	Rp 187.239.000,00	Rp 84.641.000,00	Rp 84.391.000,00	Rp 202.761.000,00						Rp390.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan				100 %	100 %	Rp 133.949.000,00	Rp 73.941.000,00	Rp 73.941.000,00	-Rp 60.008.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon dan Kalurahan	Rp240.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	Rp 23.925.000,00	Rp 10.600.000,00	Rp 10.600.000,00	-Rp 13.325.000,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp90.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 110.024.000,00	Rp 63.341.000,00	Rp 63.341.000,00	-Rp 46.683.000,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp150.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon				100 %	100 %	Rp 53.290.000,00	Rp 10.700.000,00	Rp 10.450.000,00	-Rp 42.840.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon dan Kalurahan	Rp150.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	Rp 53.290.000,00	Rp 10.700.000,00	Rp 10.450.000,00	-Rp 42.840.000,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp150.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
273	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				100 %	100 %	Rp 14.700.000,00	Rp 3.250.000,00	Rp 3.250.000,00	Rp 190.300.000,00						Rp205.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon.				100 %	100 %	Rp 14.700.000,00	Rp 3.250.000,00	Rp 3.250.000,00	-Rp 11.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon dan Kalurahan	Rp205.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 14.700.000,00	Rp 3.250.000,00	Rp 3.250.000,00	-Rp 11.450.000,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp205.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
274	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				100 %	100 %	Rp 173.147.500,00	Rp 81.850.200,00	Rp 81.850.200,00	-Rp 63.147.500,00						Rp110.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon				100 %	100 %	Rp 173.147.500,00	Rp 81.850.200,00	Rp 81.850.200,00	-Rp 91.297.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon dan Kalurahan	Rp110.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75 Orang	75 Orang	Rp 173.147.500,00	Rp 81.850.200,00	Rp 81.850.200,00	-Rp 91.297.300,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp110.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI
		KAPANEWON PANDAK							Rp 3.908.354.500,00	Rp 3.523.650.487,06	Rp 3.420.654.487,06	-Rp 487.700.012,94						Rp4.509.887.826,00	KAPANEWON PANDAK
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
275	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan				100 Person	100 Person	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -						Rp100.000.000,00	KAPANEWON PANDAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	-	-Rp 100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Pelaku Seni, UMKM	Rp100.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	-	-Rp 100.000.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp100.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp35.996.000,00	KAPANEWON PANDAK
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp35.996.000,00	KAPANEWON PANDAK
276	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi				100 Persen	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-						Rp35.996.000,00	KAPANEWON PANDAK
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan pedais kelembagaan				100 Persen	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon dan kalurahan	Rp35.996.000,00	KAPANEWON PANDAK
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 Dokumen	3 Dokumen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp35.996.000,00	KAPANEWON PANDAK
7		UNSUR KEWILAYAHAN							Rp 3.772.358.500,00	Rp 3.387.654.487,06	Rp 3.390.654.487,06	-Rp 381.704.012,94						Rp4.373.891.826,00	KAPANEWON PANDAK
7.01		KECAMATAN							Rp 3.772.358.500,00	Rp 3.387.654.487,06	Rp 3.390.654.487,06	-Rp 381.704.012,94						Rp4.373.891.826,00	KAPANEWON PANDAK
277	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				81,21 94,60 Angka Indeks	81,21 94,60 Angka Indeks	Rp 3.516.813.000,00	Rp 3.290.733.387,06	Rp 3.290.633.387,06	Rp 485.530.608,00						Rp4.002.343.608,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan n dan evaluasi perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 5.250.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	-Rp 4.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparat Kapanewon	Rp5.700.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 2.700.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 2.200.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.700.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	Rp 2.550.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 2.050.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadmini strasian keuangan perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 2.973.421.608,00	Rp 2.917.966.312,06	Rp 2.917.966.312,06	-Rp 55.455.295,94			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparat Kapanewon	Rp2.981.656.608,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	Rp 2.917.586.608,00	Rp 2.864.906.312,06	Rp 2.864.906.312,06	-Rp 52.680.295,94	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.917.586.608,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 52.010.000,00	Rp 52.560.000,00	Rp 52.560.000,00	Rp 550.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp60.245.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	Rp 3.825.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 3.325.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.825.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Admiltrasi Kepegawaian Perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 2.550.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 2.050.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparat Kapanewon	Rp4.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	4 Dokumen	Rp 2.550.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 2.050.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.000.000,00	KAPANEWON PANDAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				100 Persen	100 Persen	Rp 162.913.348,00	Rp 43.609.075,00	Rp 54.346.606,00	-Rp 108.566.742,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparat Kapanewon	Rp298.747.969,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 5.746.200,00	Rp 4.814.650,00	Rp 4.814.650,00	-Rp 931.550,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.500.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 47.760.448,00	Rp 5.987.950,00	Rp 5.987.950,00	-Rp 41.772.498,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp29.154.408,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 8.752.000,00	Rp 7.152.900,00	Rp 7.152.900,00	-Rp 1.599.100,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp26.793.561,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 7.119.700,00	Rp 4.903.575,00	Rp 5.016.106,00	-Rp 2.103.594,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp21.800.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	55 Laporan	Rp 86.035.000,00	Rp 17.225.000,00	Rp 27.850.000,00	-Rp 58.185.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp195.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.550.000,00	Rp 375.000,00	Rp 375.000,00	-Rp 2.175.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp8.500.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.550.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	-Rp 1.800.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 195.389.744,00	Rp 201.356.200,00	Rp 180.793.669,00	-Rp 14.596.075,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparat Kapanewon	Rp262.239.031,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 62.300.000,00	Rp 62.786.200,00	Rp 62.786.200,00	Rp 486.200,00	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp55.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 14.640.000,00	Rp 9.570.000,00	Rp 9.570.000,00	-Rp 5.070.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp25.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	5 Laporan	Rp 118.449.744,00	Rp 129.000.000,00	Rp 108.437.469,00	-Rp 10.012.275,00	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp182.239.031,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 177.288.300,00	Rp 126.301.800,00	Rp 136.026.800,00	-Rp 41.261.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparat Kapanewon	Rp450.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	8 Unit	Rp 125.136.600,00	Rp 123.755.800,00	Rp 123.755.800,00	-Rp 1.380.800,00	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp155.000.000,00	KAPANEWON PANDAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3 Unit	Rp 52.151.700,00	Rp 2.546.000,00	Rp 12.271.000,00	-Rp 39.880.700,00	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp295.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
278	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan				100 Persen	100 Persen	Rp 28.535.000,00	Rp 16.800.000,00	Rp 18.700.000,00	Rp -						Rp28.535.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 20.135.000,00	Rp 11.800.000,00	Rp 13.700.000,00	-Rp 6.435.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Forkompimkap	Rp20.135.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	Rp 5.600.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 3.700.000,00	-Rp 1.900.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.600.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	7 Dokumen	Rp 14.535.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	-Rp 4.535.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp14.535.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan koordinasi pelayanan kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 8.400.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	-Rp 3.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon	Rp8.400.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	4 Laporan	Rp 8.400.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	-Rp 3.400.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp8.400.000,00	KAPANEWON PANDAK
279	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat				100 Persen	100 Persen	Rp 99.439.000,00	Rp 48.791.500,00	Rp 49.991.500,00	Rp 106.711.000,00						Rp206.150.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan				100 Persen	100 Persen	Rp 63.889.000,00	Rp 35.141.500,00	Rp 36.341.500,00	-Rp 27.547.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon	Rp51.150.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 21.335.000,00	Rp 6.950.000,00	Rp 6.950.000,00	-Rp 14.385.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp23.500.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	20 Laporan	Rp 42.554.000,00	Rp 28.191.500,00	Rp 29.391.500,00	-Rp 13.162.500,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp27.650.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewo				100 Persen	100 Persen	Rp 35.550.000,00	Rp 13.650.000,00	Rp 13.650.000,00	-Rp 21.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	UMKM, Kalurahan dan Kapanewon	Rp155.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	4 Laporan	Rp 35.550.000,00	Rp 13.650.000,00	Rp 13.650.000,00	-Rp 21.900.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp155.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
280	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				100 Persen	100 Persen	Rp 6.050.000,00	Rp 2.450.000,00	Rp 2.450.000,00	Rp -						Rp6.050.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 6.050.000,00	Rp 2.450.000,00	Rp 2.450.000,00	-Rp 3.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon	Rp6.050.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 6.050.000,00	Rp 2.450.000,00	Rp 2.450.000,00	-Rp 3.600.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.050.000,00	KAPANEWON PANDAK
281	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				100 Persen	100 Persen	Rp 121.521.500,00	Rp 28.879.600,00	Rp 28.879.600,00	Rp 9.291.718,00						Rp130.813.218,00	KAPANEWON PANDAK
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				100 Persen	100 Persen	Rp 121.521.500,00	Rp 28.879.600,00	Rp 28.879.600,00	-Rp 92.641.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon	Rp130.813.218,00	KAPANEWON PANDAK



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75 Orang	60 Orang	Rp 121.521.500,00	Rp 28.879.600,00	Rp 28.879.600,00	-Rp 92.641.900,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp130.813.218,00	KAPANEWON PANDAK
KAPANEWON BANTUL									Rp 4.185.751.754,00	Rp 3.167.867.935,96	Rp 3.364.871.935,96	-Rp 820.879.818,04						Rp4.096.665.815,00	KAPANEWON BANTUL
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
282	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan				100 Persen	100 Persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -						Rp100.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya kegiatan adat dan tradisi di kapanewon				1 Laporan	100 Persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Bantul.	Rp100.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp100.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp35.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp35.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
283	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi				100 Persen	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 996.000,00						Rp35.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan				3 Dokumen	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Bantul.	Rp35.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp35.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
7		UNSUR KEWILAYAHAN							Rp 4.049.755.754,00	Rp 3.031.871.935,96	Rp 3.334.871.935,96	-Rp 714.883.818,04						Rp3.961.665.815,00	KAPANEWON BANTUL
7.01		KECAMATAN							Rp 4.049.755.754,00	Rp 3.031.871.935,96	Rp 3.334.871.935,96	-Rp 714.883.818,04						Rp3.961.665.815,00	KAPANEWON BANTUL
284	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				80,92 95,01 Angka Indeks	80,92 95,01 Angka Indeks	Rp 3.580.391.954,00	Rp 2.741.110.135,96	Rp 3.044.110.135,96	Rp 60.747.525,00						Rp3.641.139.479,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				6 Dokumen	100 Persen	Rp 3.000.000,00	Rp 900.000,00	Rp 900.000,00	-Rp 2.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp3.800.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 1.500.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 1.200.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.900.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	Rp 1.500.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	-Rp 900.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.900.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah				13 Orang/b ulan	100 Persen	Rp 3.025.790.958,00	Rp 2.402.781.848,96	Rp 2.702.781.848,96	-Rp 323.009.109,04			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp3.101.517.873,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	Rp 2.964.650.958,00	Rp 2.349.741.848,96	Rp 2.649.741.848,96	-Rp 314.909.109,04	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.039.167.873,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 59.940.000,00	Rp 52.740.000,00	Rp 50.040.000,00	-Rp 9.900.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp60.350.000,00	KAPANEWON BANTUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	Rp 1.200.000,00	Rp 300.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 1.800.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4 Dokumen	100 Persen	Rp 1.200.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp1.300.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 1.200.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 900.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.300.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				4 Paket	100 Persen	Rp 141.541.366,00	Rp 37.898.087,00	Rp 37.898.087,00	-Rp 103.643.279,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Bantul	Rp152.420.906,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 3.480.150,00	Rp 1.087.860,00	Rp 1.087.860,00	-Rp 2.392.290,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.705.500,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 6.709.950,00	Rp 4.010.180,00	Rp 4.010.180,00	-Rp 2.699.770,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp8.500.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 3.028.960,00	Rp 2.738.560,00	Rp 2.738.560,00	-Rp 290.400,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.750.800,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 9.188.806,00	Rp 3.677.987,00	Rp 3.677.987,00	-Rp 5.510.819,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp9.464.606,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.500.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	-Rp 750.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.300.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	65 Laporan	Rp 112.733.500,00	Rp 24.837.500,00	Rp 24.837.500,00	-Rp 87.896.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp115.850.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 3.700.000,00	Rp 496.000,00	Rp 496.000,00	-Rp 3.204.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.750.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.200.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 900.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.100.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah				2 Unit	100 Persen	Rp 29.450.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 29.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Bantul	Rp33.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	Rp 6.950.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 6.950.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp9.500.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	Rp 22.500.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 22.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp23.500.000,00	KAPANEWON BANTUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	Rp 200.750.580,00	Rp 177.306.600,00	Rp 180.306.600,00	-Rp 20.443.980,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Bantul	Rp200.200.700,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 48.469.400,00	Rp 45.887.600,00	Rp 45.887.600,00	-Rp 2.581.800,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp45.500.500,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4 Laporan	Rp 4.219.000,00	Rp 4.219.000,00	Rp 4.219.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	Rp 148.062.180,00	Rp 127.200.000,00	Rp 130.200.000,00	-Rp 17.862.180,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp150.700.200,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah				8 Unit	100 Persen	Rp 178.659.050,00	Rp 121.923.600,00	Rp 121.923.600,00	-Rp 56.735.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp148.900.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	Rp 115.350.150,00	Rp 119.113.600,00	Rp 119.113.600,00	Rp 3.763.450,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp95.300.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	Rp 13.300.000,00	Rp 2.810.000,00	Rp 2.810.000,00	-Rp 10.490.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.300.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	Rp 50.008.900,00	Rp -	Rp -	-Rp 50.008.900,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp52.300.000,00	KAPANEWON BANTUL
285	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan				100 %	81 %	Rp 26.300.000,00	Rp 10.350.000,00	Rp 10.350.000,00	Rp 3.292.137,00						Rp29.592.137,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon				4 Dokumen	100 Persen	Rp 17.200.000,00	Rp 7.950.000,00	Rp 7.950.000,00	-Rp 9.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Bantul	Rp21.092.137,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	Rp 4.500.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	-Rp 900.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 12.700.000,00	Rp 4.350.000,00	Rp 4.350.000,00	-Rp 8.350.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp14.092.137,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 9.100.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	-Rp 6.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Bantul	Rp8.500.000,00	KAPANEWON BANTUL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 9.100.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	-Rp 6.700.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp8.500.000,00	KAPANEWON BANTUL
286	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat				100 Persen	100 Persen	Rp 281.708.800,00	Rp 195.985.800,00	Rp 195.985.800,00	-Rp 171.266.672,00						Rp110.442.128,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				9 Laporan	100 Persen	Rp 98.293.000,00	Rp 35.742.000,00	Rp 35.742.000,00	-Rp 62.551.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Bantul	Rp83.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	Rp 22.514.000,00	Rp 7.567.000,00	Rp 7.567.000,00	-Rp 14.947.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp22.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	Rp 75.779.000,00	Rp 28.175.000,00	Rp 28.175.000,00	-Rp 47.604.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp61.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	Rp 183.415.800,00	Rp 160.243.800,00	Rp 160.243.800,00	-Rp 23.172.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Bantul	Rp27.442.128,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	Rp 183.415.800,00	Rp 160.243.800,00	Rp 160.243.800,00	-Rp 23.172.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp27.442.128,00	KAPANEWON BANTUL
287	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				100 %	100 Persen	Rp 27.900.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	-Rp 22.673.789,00						Rp5.226.211,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon				5 Laporan	100 Persen	Rp 27.900.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	-Rp 27.150.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Bantul	Rp5.226.211,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	Rp 27.900.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	-Rp 27.150.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.226.211,00	KAPANEWON BANTUL
288	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				100 %	100 100 % Persen	Rp 133.455.000,00	Rp 83.676.000,00	Rp 83.676.000,00	Rp 41.810.860,00						Rp175.265.860,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon				5 Laporan	100 Persen 5 Laporan	Rp 133.455.000,00	Rp 83.676.000,00	Rp 83.676.000,00	-Rp 49.779.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Bantul	Rp175.265.860,00	KAPANEWON BANTUL
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75 Orang	75 Orang	Rp 133.455.000,00	Rp 83.676.000,00	Rp 83.676.000,00	-Rp 49.779.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp175.265.860,00	KAPANEWON BANTUL
		KAPANEWON KRETEK							Rp 4.035.934.092,00	Rp 3.255.444.697,74	Rp 3.253.448.697,74	-Rp 782.485.394,26						Rp4.135.237.841,00	KAPANEWON KRETEK
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
289	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum				100 100 persen persen	100 100 persen persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp -						Rp100.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja peningkatan budaya pemerintahan Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah				100 persen	100 persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat, pelaku seni budaya, UMKM	Rp100.000.000,00	KAPANEWON KRETEK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp100.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp40.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp40.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
290	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi				100 persen	100 persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 4.004.000,00						Rp40.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan				100 persen	100 persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon dan kalurahan	Rp40.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp40.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
7		UNSUR KEWILAYAHAN							Rp 3.899.938.092,00	Rp 3.119.448.697,74	Rp 3.223.448.697,74	-Rp 676.489.394,26						Rp3.995.237.841,00	KAPANEWON KRETEK
7.01		KECAMATAN							Rp 3.899.938.092,00	Rp 3.119.448.697,74	Rp 3.223.448.697,74	-Rp 676.489.394,26						Rp3.995.237.841,00	KAPANEWON KRETEK
291	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				80.25 95.76 angka indeks	80.25 95.76 angka indeks	Rp 3.612.240.592,00	Rp 2.966.209.697,74	Rp 3.072.023.697,74	Rp 24.997.249,00						Rp3.637.237.841,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				100 persen	100 persen	Rp 7.200.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	-Rp 5.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp10.300.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 3.600.000,00	Rp 900.000,00	Rp 900.000,00	-Rp 2.700.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	Rp 3.600.000,00	Rp 900.000,00	Rp 900.000,00	-Rp 2.700.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.300.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah				100 persen	100 persen	Rp 3.154.609.137,00	Rp 2.637.372.775,74	Rp 2.732.872.775,74	-Rp 421.736.361,26			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon dan Kalurahan	Rp3.157.509.137,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	Rp 3.100.009.137,00	Rp 2.584.272.775,74	Rp 2.684.272.775,74	-Rp 415.736.361,26	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.100.009.137,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 52.800.000,00	Rp 52.800.000,00	Rp 48.300.000,00	-Rp 4.500.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp55.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	Rp 1.800.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 1.500.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.500.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian				100 persen	100 persen	Rp 2.700.000,00	Rp 690.000,00	Rp 690.000,00	-Rp 2.010.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp3.500.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 2.700.000,00	Rp 690.000,00	Rp 690.000,00	-Rp 2.010.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.500.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 102.265.243,00	Rp 18.009.912,00	Rp 28.283.679,00	-Rp 73.981.564,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek	Rp112.500.000,00	KAPANEWON KRETEK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 7.501.852,00	Rp 3.204.322,00	Rp 3.204.322,00	-Rp 4.297.530,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp8.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 50.177.311,00	Rp 9.831.010,00	Rp 9.831.077,00	-Rp 40.346.234,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp40.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 8.673.580,00	Rp 3.064.680,00	Rp 3.064.680,00	-Rp 5.608.900,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp9.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 8.299.500,00	Rp 1.009.900,00	Rp 1.033.600,00	-Rp 7.265.900,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.500.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	Rp 21.250.000,00	Rp -	Rp 10.250.000,00	-Rp 11.000.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp23.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 6.363.000,00	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	-Rp 5.913.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp10.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				00 Dokumen	00 Dokumen	Rp -	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp15.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah				100 persen	100 persen	Rp 7.200.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 7.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek	Rp15.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	Rp 7.200.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 7.200.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp15.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 persen	100 persen	Rp 167.262.112,00	Rp 179.401.560,00	Rp 179.066.793,00	Rp 11.804.681,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek	Rp153.428.704,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 28.325.560,00	Rp 28.325.560,00	Rp 28.325.560,00	Rp -	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp25.200.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 23.886.000,00	Rp 23.876.000,00	Rp 23.876.000,00	-Rp 10.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp20.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 115.050.552,00	Rp 127.200.000,00	Rp 126.865.233,00	Rp 11.814.681,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp108.228.704,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah				100 persen	100 persen	Rp 171.004.100,00	Rp 128.935.450,00	Rp 129.310.450,00	-Rp 41.693.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Kretek	Rp185.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	Rp 132.028.500,00	Rp 126.913.250,00	Rp 127.288.250,00	-Rp 4.740.250,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp135.000.000,00	KAPANEWON KRETEK



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	Rp 38.975.600,00	Rp 2.022.200,00	Rp 2.022.200,00	-Rp 36.953.400,00	Kab. Bantul, Kretek, Donotito	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp50.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
292	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				92 persen	92 persen	Rp 26.950.000,00	Rp 33.625.000,00	Rp 33.625.000,00	Rp 16.050.000,00						Rp43.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 16.525.000,00	Rp 28.125.000,00	Rp 28.125.000,00	Rp 11.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Forkompimkap, kapanewon dan kalurahan	Rp28.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	Rp 6.250.000,00	Rp 4.250.000,00	Rp 4.250.000,00	-Rp 2.000.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp8.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 10.275.000,00	Rp 23.875.000,00	Rp 23.875.000,00	Rp 13.600.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp20.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 10.425.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 5.500.000,00	-Rp 4.925.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat kalurahan dan kapanewon	Rp15.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 10.425.000,00	Rp 5.500.000,00	Rp 5.500.000,00	-Rp 4.925.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp15.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
293	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat				87 persen	87 persen	Rp 117.580.000,00	Rp 49.997.500,00	Rp 48.193.500,00	Rp 47.420.000,00						Rp165.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan				100 persen	100 persen	Rp 87.192.500,00	Rp 34.010.000,00	Rp 31.456.000,00	-Rp 55.736.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat kalurahan dan kapanewon	Rp125.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 22.001.000,00	Rp 10.010.000,00	Rp 10.010.000,00	-Rp 11.991.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp25.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 65.191.500,00	Rp 24.000.000,00	Rp 21.446.000,00	-Rp 43.745.500,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp100.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan				100 persen	100 persen	Rp 30.387.500,00	Rp 15.987.500,00	Rp 16.737.500,00	-Rp 13.650.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat kalurahan dan kapanewon	Rp40.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	Rp 30.387.500,00	Rp 15.987.500,00	Rp 16.737.500,00	-Rp 13.650.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp40.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
294	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				92 persen	92 persen	Rp 6.850.000,00	Rp 450.000,00	Rp 1.990.000,00	Rp 3.150.000,00						Rp10.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				100 persen	100 persen	Rp 6.850.000,00	Rp 450.000,00	Rp 1.990.000,00	-Rp 4.860.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat kalurahan dan kapanewon	Rp10.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	Rp 6.850.000,00	Rp 450.000,00	Rp 1.990.000,00	-Rp 4.860.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp10.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
295	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				100 persen	100 persen	Rp 136.317.500,00	Rp 69.166.500,00	Rp 67.616.500,00	Rp 3.682.500,00						Rp140.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 136.317.500,00	Rp 69.166.500,00	Rp 67.616.500,00	-Rp 68.701.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat kalurahan dan kapanewon	Rp140.000.000,00	KAPANEWON KRETEK



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	250 Orang	Rp 136.317.500,00	Rp 69.166.500,00	Rp 67.616.500,00	-Rp 68.701.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp140.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
		KAPANEWON BAMBANGLIPURO							Rp 3.813.370.509,00	Rp 2.925.208.883,63	Rp 3.022.212.883,63	-Rp 791.157.625,37						Rp4.568.775.175,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
296	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terpenuhinya Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi				100 Persen	100 Persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -						Rp100.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Rp100.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp100.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp30.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp30.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
297	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimeaan yang berkualitas				100 Persen	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp30.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan				100 Persen	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Rp30.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 Dokumen	3 Dokumen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp30.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7		UNSUR KEWILAYAHAN							Rp 3.677.374.509,00	Rp 2.789.212.883,63	Rp 2.992.212.883,63	-Rp 685.161.625,37						Rp4.438.775.175,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01		KECAMATAN							Rp 3.677.374.509,00	Rp 2.789.212.883,63	Rp 2.992.212.883,63	-Rp 685.161.625,37						Rp4.438.775.175,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
298	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82,3 Angka	82,3 Angka	Rp 3.420.317.137,00	Rp 2.658.503.883,63	Rp 2.861.503.883,63	Rp 332.245.238,00						Rp3.752.562.375,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 7.752.500,00	Rp 1.870.000,00	Rp 1.870.000,00	-Rp 5.882.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Rp35.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 3.277.500,00	Rp 840.000,00	Rp 840.000,00	-Rp 2.437.500,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp17.500.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	Rp 4.475.000,00	Rp 1.030.000,00	Rp 1.030.000,00	-Rp 3.445.000,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp17.500.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 2.889.349.329,00	Rp 2.360.706.965,63	Rp 2.560.706.965,63	-Rp 328.642.363,37			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Rp2.703.868.317,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	Rp 2.843.684.329,00	Rp 2.322.446.965,63	Rp 2.522.446.965,63	-Rp 321.237.363,37	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.654.171.775,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13 Dokumen	13 Dokumen	Rp 43.510.000,00	Rp 37.510.000,00	Rp 37.510.000,00	-Rp 6.000.000,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp48.396.542,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	Rp 2.155.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	-Rp 1.405.000,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.300.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 3.400.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	-Rp 2.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp850.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 3.400.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	-Rp 2.400.000,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp850.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				100 Persen	100 Persen	Rp 201.236.692,00	Rp 32.311.510,00	Rp 32.314.208,00	-Rp 168.922.484,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Rp501.539.128,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	Rp 9.087.290,00	Rp 3.840.540,00	Rp 3.840.540,00	-Rp 5.246.750,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp39.500.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 56.051.360,00	Rp 5.340.000,00	Rp 5.340.000,00	-Rp 50.711.360,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp71.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	Rp 9.088.660,00	Rp 5.348.320,00	Rp 5.348.320,00	-Rp 3.740.340,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp63.100.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 10.255.382,00	Rp 2.418.650,00	Rp 2.421.348,00	-Rp 7.834.034,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp45.081.771,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp13.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				103 Laporan	103 Laporan	Rp 106.854.000,00	Rp 12.074.000,00	Rp 12.074.000,00	-Rp 94.780.000,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp239.234.932,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 5.000.000,00	Rp 1.040.000,00	Rp 1.040.000,00	-Rp 3.960.000,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp26.222.425,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 3.400.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	-Rp 2.650.000,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.400.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 163.131.616,00	Rp 154.960.608,00	Rp 143.797.410,00	-Rp 19.334.206,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp235.316.480,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 29.988.000,00	Rp 29.988.000,00	Rp 29.988.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp73.600.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 15.760.000,00	Rp 2.310.000,00	Rp 2.310.000,00	-Rp 13.450.000,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp49.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 117.383.616,00	Rp 122.662.608,00	Rp 111.499.410,00	-Rp 5.884.206,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp112.716.480,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 155.447.000,00	Rp 107.654.800,00	Rp 121.815.300,00	-Rp 33.631.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp275.988.450,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	Rp 119.153.000,00	Rp 88.298.000,00	Rp 88.298.000,00	-Rp 30.855.000,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp166.058.450,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	Rp 36.294.000,00	Rp 19.356.800,00	Rp 33.517.300,00	-Rp 2.776.700,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp109.930.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
299	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				92 Persen	92 Persen	Rp 33.174.000,00	Rp 13.000.000,00	Rp 13.000.000,00	Rp 141.326.000,00						Rp174.500.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon				92 Persen	92 Persen	Rp 24.585.000,00	Rp 9.150.000,00	Rp 9.150.000,00	-Rp 15.435.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp155.500.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	Rp 10.050.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	-Rp 4.050.000,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp56.500.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 14.535.000,00	Rp 3.150.000,00	Rp 3.150.000,00	-Rp 11.385.000,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp99.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon				92 Persen	92 Persen	Rp 8.589.000,00	Rp 3.850.000,00	Rp 3.850.000,00	-Rp 4.739.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Rp19.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 8.589.000,00	Rp 3.850.000,00	Rp 3.850.000,00	-Rp 4.739.000,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp19.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
300	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat kalurahan				92 Persen	92 Persen	Rp 110.268.372,00	Rp 38.878.000,00	Rp 38.878.000,00	Rp 68.444.428,00						Rp178.712.800,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan pemberdayaan masyarakat kalurahan				92 Persen	92 Persen	Rp 85.421.000,00	Rp 26.978.000,00	Rp 26.978.000,00	-Rp 58.443.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp160.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				40 Lembaga Kemasyarakatan	40 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 22.000.000,00	Rp 8.508.000,00	Rp 8.508.000,00	-Rp 13.492.000,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp60.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				23 Laporan	23 Laporan	Rp 63.421.000,00	Rp 18.470.000,00	Rp 18.470.000,00	-Rp 44.951.000,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp100.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon				92 Persen	92 Persen	Rp 24.847.372,00	Rp 11.900.000,00	Rp 11.900.000,00	-Rp 12.947.372,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Rp18.712.800,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	Rp 24.847.372,00	Rp -	Rp -	-Rp 24.847.372,00	Kab. Bantul, Banglilipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp0,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				-	1 Laporan	Rp -	Rp 11.900.000,00	Rp 11.900.000,00	Rp 11.900.000,00	Kab. Bantul, Banganglipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp18.712.800,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
301	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				100 Persen	100 Persen	Rp 6.000.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 264.000.000,00						Rp270.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 6.000.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	-Rp 2.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Rp270.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	Rp 6.000.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	-Rp 2.400.000,00	Kab. Bantul, Banganglipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp270.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
302	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	Rp 107.615.000,00	Rp 75.231.000,00	Rp 75.231.000,00	-Rp 44.615.000,00						Rp63.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum				100 Persen	100 Persen	Rp 107.615.000,00	Rp 75.231.000,00	Rp 75.231.000,00	-Rp 32.384.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Rp63.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	Rp 107.615.000,00	Rp 75.231.000,00	Rp 75.231.000,00	-Rp 32.384.000,00	Kab. Bantul, Banganglipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp63.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KAPANEWON JETIS									Rp 3.770.399.797,00	Rp 3.633.412.990,32	Rp 3.630.416.990,32	-Rp 239.982.806,68						Rp4.267.402.342,00	KAPANEWON JETIS
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 107.167.200,00	Rp 250.000.000,00	Rp -	-Rp 107.167.200,00						Rp110.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 107.167.200,00	Rp 250.000.000,00	Rp -	-Rp 107.167.200,00						Rp110.000.000,00	KAPANEWON JETIS
303	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan				100 persen	0 Persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp 10.000.000,00						Rp110.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di Kapanewon				1 Dokumen	0 Persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi pada masyarakat di kapanewon	Rp110.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp110.000.000,00	KAPANEWON JETIS
304	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah				100 undefined	100 persen	Rp 3.273.847.297,00	Rp 3.319.947.990,32	Rp 3.322.947.990,32	Rp 419.798.545,00						Rp3.693.645.842,00	KAPANEWON JETIS
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp116.040.000,00	KAPANEWON JETIS
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp116.040.000,00	KAPANEWON JETIS
305	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi				-	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 80.044.000,00						Rp116.040.000,00	KAPANEWON JETIS
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan				-	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian keistimewaan urusan keistimewaan	Rp66.040.000,00	KAPANEWON JETIS
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Sumeragung	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp66.040.000,00	KAPANEWON JETIS
7		UNSUR KEWILAYAHAN							Rp 3.627.236.597,00	Rp 3.347.416.990,32	Rp 3.500.416.990,32	-Rp 126.819.606,68						Rp4.041.362.342,00	KAPANEWON JETIS
	7.01	KECAMATAN							Rp 3.627.236.597,00	Rp 3.347.416.990,32	Rp 3.500.416.990,32	-Rp 126.819.606,68						Rp4.041.362.342,00	KAPANEWON JETIS
306	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) perangkat daerah Indeks kepuasan masyarakat (IKM) perangkat daerah				-	82,6 95,75 angka angka	Rp 3.273.847.297,00	Rp 3.319.947.990,32	Rp 3.322.947.990,32	Rp 419.798.545,00						Rp3.693.645.842,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				100 persen	100 persen	Rp 1.800.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 1.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Tersunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp134.000.000,00	KAPANEWON JETIS

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	Rp 600.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 600.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp92.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	Rp 600.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 600.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp22.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	Rp 600.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 600.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp20.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah				85 angka	85 angka	Rp 2.817.686.877,00	Rp 2.772.535.430,32	Rp 2.772.535.430,32	-Rp 45.151.446,68			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.339.734.342,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	Rp 2.766.326.877,00	Rp 2.725.975.430,32	Rp 2.725.975.430,32	-Rp 40.351.446,68	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp2.339.134.342,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 50.760.000,00	Rp 46.560.000,00	Rp 46.560.000,00	-Rp 4.200.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp0,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	Rp 600.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 600.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp600.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				-	2 Dokumen	Rp 600.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi pada masyarakat di kapanewon	Rp10.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 600.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 600.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp10.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				100 persen	100 persen	Rp 125.390.636,00	Rp 80.325.652,00	Rp 80.325.652,00	-Rp 45.064.984,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi pada masyarakat di kapanewon	Rp387.500.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 4.382.136,00	Rp 6.635.640,00	Rp 6.635.640,00	Rp 2.253.504,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp27.500.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 21.503.340,00	Rp 8.332.412,00	Rp 8.332.412,00	-Rp 13.170.928,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp67.100.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 7.406.460,00	Rp 14.357.600,00	Rp 14.357.600,00	Rp 6.951.140,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp40.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 3.539.700,00	Rp -	Rp -	-Rp 3.539.700,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp45.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	Rp -	Rp -	Rp -	-Rp -	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp0,00	KAPANEWON JETIS



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	Rp 87.359.000,00	Rp 51.000.000,00	Rp 51.000.000,00	-Rp 36.359.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp200.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 600.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 600.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.500.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 600.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 600.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.400.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah				100 persen	100 persen	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi pada masyarakat di kapanewon	Rp302.215.250,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	Rp -	Rp -	Rp -	-Rp -	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp128.215.250,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 5.000.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp174.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 persen	100 persen	Rp 171.803.784,00	Rp 186.173.708,00	Rp 189.173.708,00	Rp 17.369.924,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai	Rp301.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 42.424.000,00	Rp 42.424.000,00	Rp 42.424.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp36.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 20.015.000,00	Rp 18.400.000,00	Rp 18.400.000,00	-Rp 1.615.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp135.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 109.364.784,00	Rp 125.349.708,00	Rp 128.349.708,00	Rp 18.984.924,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp130.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah				100 persen	100 persen	Rp 151.566.000,00	Rp 280.913.200,00	Rp 280.913.200,00	Rp 129.347.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai	Rp219.196.250,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	Rp 143.798.800,00	Rp 130.913.200,00	Rp 130.913.200,00	-Rp 12.885.600,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp0,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	Rp 600.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp60.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	Rp 7.167.200,00	Rp 150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Sumberegung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp159.196.250,00	KAPANEWON JETIS
307	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan				-	61 angka	Rp 19.150.000,00	Rp 43.024.500,00	Rp 43.024.500,00	Rp 9.037.500,00						Rp28.187.500,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 11.025.000,00	Rp 20.285.500,00	Rp 20.285.500,00	Rp 9.260.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi pada masyarakat di kapanewon	Rp16.187.500,00	KAPANEWON JETIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	Rp 2.625.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 2.625.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp9.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.02.2.01.0002		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 8.400.000,00	Rp 20.285.500,00	Rp 20.285.500,00	Rp 11.885.500,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.187.500,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 8.125.000,00	Rp 22.739.000,00	Rp 22.739.000,00	Rp 14.614.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi pada masyarakat di kapanewon	Rp12.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 8.125.000,00	Rp 22.739.000,00	Rp 22.739.000,00	Rp 14.614.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp12.000.000,00	KAPANEWON JETIS
308	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	capaian kinerja pemberdayaan masyarakat				-	100 persen	Rp 165.318.000,00	Rp 70.643.000,00	Rp 70.643.000,00	Rp 15.948.500,00						Rp181.266.500,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan				100 persen	100 persen	Rp 107.732.000,00	Rp 47.143.000,00	Rp 47.143.000,00	-Rp 60.589.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi pada masyarakat di kapanewon	Rp120.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	Rp 20.944.000,00	Rp 3.900.000,00	Rp 3.900.000,00	-Rp 17.044.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp40.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	Rp 86.788.000,00	Rp 43.243.000,00	Rp 43.243.000,00	-Rp 43.545.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp80.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan an				100 persen	100 persen	Rp 57.586.000,00	Rp 23.500.000,00	Rp 23.500.000,00	-Rp 34.086.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-	Rp61.266.500,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	Rp 57.586.000,00	Rp 23.500.000,00	Rp 23.500.000,00	-Rp 34.086.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp61.266.500,00	KAPANEWON JETIS
309	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum				-	100 persen	Rp 173.088.500,00	Rp 11.682.000,00	Rp 11.682.000,00	-Rp 40.076.000,00						Rp133.012.500,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum				100 persen	100 persen	Rp 173.088.500,00	Rp 11.682.000,00	Rp 11.682.000,00	-Rp 161.406.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-	Rp133.012.500,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	Rp 173.088.500,00	Rp 11.682.000,00	Rp 11.682.000,00	-Rp 161.406.500,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp133.012.500,00	KAPANEWON JETIS
310	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				-	100 persen	Rp 3.000.000,00	Rp 52.119.500,00	Rp 52.119.500,00	Rp 2.250.000,00						Rp5.250.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				100 persen	100 persen	Rp 3.000.000,00	Rp 52.119.500,00	Rp 52.119.500,00	Rp 49.119.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-	Rp5.250.000,00	KAPANEWON JETIS
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	Rp 3.000.000,00	Rp 52.119.500,00	Rp 52.119.500,00	Rp 49.119.500,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.250.000,00	KAPANEWON JETIS
		KAPANEWON KASIHAN							Rp 4.602.230.124,00	Rp 3.710.234.959,96	Rp 3.709.238.959,96	-Rp 892.991.164,04						Rp4.546.066.811,00	KAPANEWON KASIHAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp60.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp60.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
311	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan				100 Persen	100 Persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 40.000.000,00						Rp60.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Adat dan Tradisi di Kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Kasihan	Rp60.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp60.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp40.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp40.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
312	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Dengan Regulasi				100 Persen	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 4.004.000,00						Rp40.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai Dengan Perdais Kelembagaan				100 Persen	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kalurahan di Wilayah Kapanewon Kasihan	Rp40.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp40.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
7		UNSUR KEWILAYAHAN							Rp 4.466.234.124,00	Rp 3.574.238.959,96	Rp 3.679.238.959,96	-Rp 786.995.164,04						Rp4.446.066.811,00	KAPANEWON KASIHAN
7.01		KECAMATAN							Rp 4.466.234.124,00	Rp 3.574.238.959,96	Rp 3.679.238.959,96	-Rp 786.995.164,04						Rp4.446.066.811,00	KAPANEWON KASIHAN
313	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				81 95.4 Angka Indeks	81 95.4 Angka Indeks	Rp 4.180.396.124,00	Rp 3.358.093.459,96	Rp 3.463.093.459,96	-Rp 20.767.313,00						Rp4.159.628.811,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 6.600.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 1.250.000,00	-Rp 5.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Kasihan	Rp6.600.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 4.200.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	-Rp 3.450.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.200.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.400.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 1.900.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.400.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah				85 Pern	100 Pern	Rp 3.543.882.799,00	Rp 2.961.214.884,96	Rp 3.061.214.884,96	-Rp 482.667.914,04			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Kasihan	Rp3.543.882.799,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	Rp 3.494.922.799,00	Rp 2.914.154.884,96	Rp 3.014.154.884,96	-Rp 480.767.914,04	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.494.922.799,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 46.560.000,00	Rp 46.560.000,00	Rp 46.560.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia		Rp46.560.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	Rp 2.400.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 1.900.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.400.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 3.600.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	-Rp 2.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Kasihan	Rp3.600.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 3.600.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	-Rp 2.600.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.600.000,00	KAPANEWON KASIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				95 Persen	100 Persen	Rp 214.309.145,00	Rp 55.593.125,00	Rp 55.593.125,00	-Rp 158.716.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Kasihan	Rp176.911.832,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	Rp 6.719.870,00	Rp 3.084.000,00	Rp 3.084.000,00	-Rp 3.635.870,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.265.950,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 36.132.008,00	Rp 10.118.245,00	Rp 10.118.245,00	-Rp 26.013.763,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp42.527.682,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 9.891.100,00	Rp 3.358.880,00	Rp 3.358.880,00	-Rp 6.532.220,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp11.091.100,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	Rp 16.945.500,00	Rp 8.742.000,00	Rp 8.742.000,00	-Rp 8.203.500,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp15.617.100,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	-Rp -	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.400.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72 Laporan	72 Laporan	Rp 133.720.667,00	Rp 23.000.000,00	Rp 23.000.000,00	-Rp 110.720.667,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp92.510.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 1.900.000,00	Rp 440.000,00	Rp 440.000,00	-Rp 1.460.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.900.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 6.600.000,00	Rp 4.450.000,00	Rp 4.450.000,00	-Rp 2.150.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.600.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 247.622.180,00	Rp 218.824.000,00	Rp 223.824.000,00	-Rp 23.798.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Kasihan	Rp257.622.180,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 49.200.000,00	Rp 48.544.000,00	Rp 48.544.000,00	-Rp 656.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp49.200.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 22.360.000,00	Rp 11.280.000,00	Rp 11.280.000,00	-Rp 11.080.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp22.360.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 176.062.180,00	Rp 159.000.000,00	Rp 164.000.000,00	-Rp 12.062.180,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp186.062.180,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah				95 Persen	100 Persen	Rp 164.382.000,00	Rp 120.211.450,00	Rp 120.211.450,00	-Rp 44.170.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Kasihan	Rp171.012.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	Rp 144.382.000,00	Rp 119.766.750,00	Rp 119.766.750,00	-Rp 24.615.250,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp151.012.000,00	KAPANEWON KASIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	Rp 20.000.000,00	Rp 444.700,00	Rp 444.700,00	-Rp 19.555.300,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp20.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
314	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan				100 Persen	81 Persen	Rp 31.187.500,00	Rp 32.571.500,00	Rp 32.571.500,00	Rp 600.000,00						Rp31.787.500,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kapanewon				90 Persen	100 Persen	Rp 18.075.000,00	Rp 22.919.000,00	Rp 22.919.000,00	Rp 4.844.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kalurahan di Wilayah Kapanewon Kasihan	Rp18.675.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	Rp 4.600.000,00	Rp 15.355.000,00	Rp 15.355.000,00	Rp 10.755.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.200.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 13.475.000,00	Rp 7.564.000,00	Rp 7.564.000,00	-Rp 5.911.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp13.475.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Koordinasi Pelayanan Kapanewon				95 Persen	100 Persen	Rp 13.112.500,00	Rp 9.652.500,00	Rp 9.652.500,00	-Rp 3.460.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Kasihan	Rp13.112.500,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 13.112.500,00	Rp 9.652.500,00	Rp 9.652.500,00	-Rp 3.460.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp13.112.500,00	KAPANEWON KASIHAN
315	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat				100 Persen	100 Persen	Rp 85.327.000,00	Rp 83.245.500,00	Rp 83.245.500,00	Rp -						Rp85.327.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan				8 Fasilitasi	100 Persen	Rp 47.787.000,00	Rp 62.663.000,00	Rp 62.663.000,00	Rp 14.876.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kalurahan di Wilayah Kapanewon Kasihan	Rp47.787.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 19.674.500,00	Rp 15.997.000,00	Rp 15.997.000,00	-Rp 3.677.500,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp19.674.500,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 28.112.500,00	Rp 46.666.000,00	Rp 46.666.000,00	Rp 18.553.500,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp28.112.500,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 37.540.000,00	Rp 20.582.500,00	Rp 20.582.500,00	-Rp 16.957.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kalurahan dan UMKM di Wilayah Kapanewon Kasihan	Rp37.540.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	Rp 37.540.000,00	Rp 20.582.500,00	Rp 20.582.500,00	-Rp 16.957.500,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp37.540.000,00	KAPANEWON KASIHAN
316	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				92 Persen	100 Persen	Rp 16.075.000,00	Rp 21.310.000,00	Rp 21.310.000,00	Rp -						Rp16.075.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 16.075.000,00	Rp 21.310.000,00	Rp 21.310.000,00	Rp 5.235.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Lintas Sektor di Wilayah Kapanewon Kasihan	Rp16.075.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 16.075.000,00	Rp 21.310.000,00	Rp 21.310.000,00	Rp 5.235.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp16.075.000,00	KAPANEWON KASIHAN
317	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	Rp 153.248.500,00	Rp 79.018.500,00	Rp 79.018.500,00	Rp -						Rp153.248.500,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Koordinasi Pemerintahan Umum Di Kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 153.248.500,00	Rp 79.018.500,00	Rp 79.018.500,00	-Rp 74.230.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Organisasi Masyarakat	Rp153.248.500,00	KAPANEWON KASIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				130 Orang	130 Orang	Rp 153.248.500,00	Rp 79.018.500,00	Rp 79.018.500,00	-Rp 74.230.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp153.248.500,00	KAPANEWON KASIHAN
		KAPANEWON PAJANGAN							Rp 3.733.239.627,00	Rp 3.075.249.377,32	Rp 3.074.253.377,32	-Rp 658.986.249,68						Rp3.786.678.518,00	KAPANEWON PAJANGAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
318	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan				100 Persen	0 Persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -						Rp100.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan				100 %	0 %	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, pelaku seni budaya, UMKM	Rp100.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp100.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp35.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp35.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
319	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi				100 Persen	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 996.000,00						Rp35.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di kapanewon/Kemantren dan kalurahan/ yang Didampingi				100 %	100 %	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon dan kalurahan	Rp35.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 Dokumen	3 Dokumen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp35.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
7		UNSUR KEWILAYAHAN							Rp 3.597.243.627,00	Rp 2.939.253.377,32	Rp 3.044.253.377,32	-Rp 552.990.249,68						Rp3.651.678.518,00	KAPANEWON PAJANGAN
7.01		KECAMATAN							Rp 3.597.243.627,00	Rp 2.939.253.377,32	Rp 3.044.253.377,32	-Rp 552.990.249,68						Rp3.651.678.518,00	KAPANEWON PAJANGAN
320	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				81,05 96,01 Angka Indeks	82,38 96,21 Angka Indeks	Rp 3.281.142.927,00	Rp 2.811.738.377,32	Rp 2.916.738.377,32	Rp 85.285.390,00						Rp3.366.428.317,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				100 %	100 %	Rp 6.045.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	-Rp 2.445.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp6.490.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 3.090.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	-Rp 1.290.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.090.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	Rp 2.955.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	-Rp 1.155.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.400.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	Rp 2.779.061.857,00	Rp 2.449.150.941,32	Rp 2.549.150.941,32	-Rp 229.910.915,68			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp2.783.321.857,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	Rp 2.722.671.857,00	Rp 2.398.990.941,32	Rp 2.498.990.941,32	-Rp 223.680.915,68	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.725.671.857,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 51.840.000,00	Rp 50.160.000,00	Rp 50.160.000,00	-Rp 1.680.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp53.100.000,00	KAPANEWON PAJANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	0 Laporan	Rp 4.550.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 4.550.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.550.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	Rp 3.400.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 3.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp3.400.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	0 Dokumen	Rp 3.400.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 3.400.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.400.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				100 %	100 %	Rp 151.053.990,00	Rp 51.869.372,00	Rp 51.230.552,00	-Rp 99.823.438,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp218.692.534,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	Rp 3.578.050,00	Rp 1.117.290,00	Rp 1.117.290,00	-Rp 2.460.760,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 23.721.640,00	Rp 5.481.282,00	Rp 5.481.162,00	-Rp 18.240.478,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp33.789.676,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 9.518.900,00	Rp 3.103.900,00	Rp 3.103.900,00	-Rp 6.415.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp10.404.600,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 8.972.900,00	Rp 3.942.900,00	Rp 3.304.200,00	-Rp 5.668.700,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp8.492.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	Rp 1.200.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 1.200.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp24.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	25 Laporan	Rp 100.552.500,00	Rp 38.224.000,00	Rp 38.224.000,00	-Rp 62.328.500,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp127.221.258,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	Rp 1.810.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 1.810.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.385.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	Rp 1.700.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 1.700.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.400.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah				100 %	100 %	Rp 3.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp9.500.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	Rp 3.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 3.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp9.500.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	Rp 203.145.180,00	Rp 206.409.364,00	Rp 212.048.184,00	Rp 8.903.004,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp204.682.180,00	KAPANEWON PAJANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 43.163.000,00	Rp 41.359.364,00	Rp 41.359.364,00	-Rp 1.803.636,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp44.400.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	2 Laporan	Rp 11.920.000,00	Rp 6.050.000,00	Rp 6.050.000,00	-Rp 5.870.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp12.020.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	60 Laporan	Rp 148.062.180,00	Rp 159.000.000,00	Rp 164.638.820,00	Rp 16.576.640,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp148.262.180,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah				100 %	100 %	Rp 135.436.900,00	Rp 100.708.700,00	Rp 100.708.700,00	-Rp 34.728.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp140.341.746,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	Rp 130.399.300,00	Rp 100.708.700,00	Rp 100.708.700,00	-Rp 29.690.600,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp131.249.300,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	Rp 5.037.600,00	Rp -	Rp -	-Rp 5.037.600,00	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp9.092.446,00	KAPANEWON PAJANGAN
321	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan				81 Persen	81 Persen	Rp 29.062.500,00	Rp 13.500.000,00	Rp 13.500.000,00	-Rp 1.993.003,00						Rp27.069.497,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon				100 %	100 %	Rp 17.725.000,00	Rp 10.300.000,00	Rp 10.300.000,00	-Rp 7.425.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Forkompinkap	Rp17.725.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	2 Laporan	Rp 7.100.000,00	Rp 2.800.000,00	Rp 2.800.000,00	-Rp 4.300.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.100.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 10.625.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	-Rp 3.125.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp10.625.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan koordinasi pelayanan kapanewon				100 %	100 %	Rp 11.337.500,00	Rp 3.200.000,00	Rp 3.200.000,00	-Rp 8.137.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon	Rp9.344.497,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	1 Laporan	Rp 11.337.500,00	Rp 3.200.000,00	Rp 3.200.000,00	-Rp 8.137.500,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp9.344.497,00	KAPANEWON PAJANGAN
322	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat				100 Persen	100 Persen	Rp 133.182.500,00	Rp 43.696.000,00	Rp 43.696.000,00	-Rp 32.650.365,00						Rp100.532.135,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan				100 %	100 %	Rp 97.855.000,00	Rp 31.146.000,00	Rp 31.146.000,00	-Rp 66.709.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon	Rp75.032.135,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 21.759.000,00	Rp 14.604.000,00	Rp 14.604.000,00	-Rp 7.155.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp20.200.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	12 Laporan	Rp 76.096.000,00	Rp 16.542.000,00	Rp 16.542.000,00	-Rp 59.554.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp54.832.135,00	KAPANEWON PAJANGAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon				100 %	100 %	Rp 35.327.500,00	Rp 12.550.000,00	Rp 12.550.000,00	-Rp 22.777.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	UMKM, Kalurahan , dan Kapanewon	Rp25.500.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	1 Laporan	Rp 35.327.500,00	Rp 12.550.000,00	Rp 12.550.000,00	-Rp 22.777.500,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp25.500.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
323	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				100 %	100 %	Rp 10.000.000,00	Rp 4.620.000,00	Rp 4.620.000,00	Rp 1.000.000,00						Rp11.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon				100 %	100 %	Rp 10.000.000,00	Rp 4.620.000,00	Rp 4.620.000,00	-Rp 5.380.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon	Rp11.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 10.000.000,00	Rp 4.620.000,00	Rp 4.620.000,00	-Rp 5.380.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp11.000.000,00	KAPANEWON PAJANGAN
324	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				100 Persen	100 Persen	Rp 143.855.700,00	Rp 65.699.000,00	Rp 65.699.000,00	Rp 2.792.869,00						Rp146.648.569,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon				100 %	100 %	Rp 143.855.700,00	Rp 65.699.000,00	Rp 65.699.000,00	-Rp 78.156.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon	Rp146.648.569,00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75 Orang	50 Orang	Rp 143.855.700,00	Rp 65.699.000,00	Rp 65.699.000,00	-Rp 78.156.700,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp146.648.569,00	KAPANEWON PAJANGAN
		KAPANEWON SANDEN							Rp 3.641.202.128,00	Rp 2.977.476.875,90	Rp 3.025.480.875,90	-Rp 615.721.252,10						Rp4.115.830.000,00	KAPANEWON SANDEN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
325	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan				100 persen	0 persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -						Rp100.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan				100 persen	0 persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sanden	Rp100.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp100.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp40.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp40.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
326	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi				100 persen	100 persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 4.004.000,00						Rp40.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	4.01.04.5.01	Ponataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan pedais kelembagaan				100 persen	100 persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pamong Kalurahan	Rp40.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp40.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
7		UNSUR KEWILAYAHAN							Rp 3.505.206.128,00	Rp 2.841.480.875,90	Rp 2.995.480.875,90	-Rp 509.725.252,10						Rp3.975.830.000,00	KAPANEWON SANDEN
7.01		KECAMATAN							Rp 3.505.206.128,00	Rp 2.841.480.875,90	Rp 2.995.480.875,90	-Rp 509.725.252,10						Rp3.975.830.000,00	KAPANEWON SANDEN
327	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				82 92 Angka Angka	82 92 Angka Angka	Rp 3.159.814.228,00	Rp 2.655.090.875,90	Rp 2.807.015.477,90	Rp 470.015.772,00						Rp3.629.830.000,00	KAPANEWON SANDEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				82 persen	82 persen	Rp 8.500.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 8.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon Sanden	Rp10.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 4.250.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 4.250.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	Rp 4.250.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 4.250.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah				100 persen	100 persen	Rp 2.696.546.230,00	Rp 2.329.486.715,90	Rp 2.479.486.715,90	-Rp 217.059.514,10			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon Sanden	Rp2.905.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	Rp 2.647.586.230,00	Rp 2.283.526.715,90	Rp 2.433.526.715,90	-Rp 214.059.514,10	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.845.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 45.960.000,00	Rp 45.960.000,00	Rp 45.960.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp55.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	Rp 3.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 3.000.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	Rp 3.400.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 3.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon Sanden	Rp4.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 3.400.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 3.400.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				100 persen	100 persen	Rp 119.145.400,00	Rp 48.794.310,00	Rp 48.794.310,00	-Rp 70.351.090,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon Sanden	Rp208.800.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 4.084.800,00	Rp 3.669.930,00	Rp 3.669.930,00	-Rp 414.870,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp13.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 12.555.580,00	Rp 7.159.000,00	Rp 7.159.000,00	-Rp 5.396.580,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp14.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 10.449.320,00	Rp 1.992.680,00	Rp 1.992.680,00	-Rp 8.456.640,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp20.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 10.610.700,00	Rp 4.172.700,00	Rp 4.172.700,00	-Rp 6.438.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp10.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 2.400.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 2.400.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.400.000,00	KAPANEWON SANDEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	65 Laporan	Rp 75.745.000,00	Rp 31.800.000,00	Rp 31.800.000,00	-Rp 43.945.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp140.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 750.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 750.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.550.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 2.550.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.400.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah				100 persen	100 persen	Rp 14.500.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 14.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon Sanden	Rp50.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	Rp 14.500.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 14.500.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp50.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 persen	100 persen	Rp 176.628.348,00	Rp 176.340.000,00	Rp 178.264.602,00	Rp 1.636.254,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon Sanden	Rp235.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 42.900.000,00	Rp 42.900.000,00	Rp 42.900.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp50.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 13.605.000,00	Rp 6.240.000,00	Rp 6.240.000,00	-Rp 7.365.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp25.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	Rp 120.123.348,00	Rp 127.200.000,00	Rp 129.124.602,00	Rp 9.001.254,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp160.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah				100 persen	100 persen	Rp 141.094.250,00	Rp 100.469.850,00	Rp 100.469.850,00	-Rp 40.624.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon Sanden	Rp217.030.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	Rp 116.898.250,00	Rp 100.469.850,00	Rp 100.469.850,00	-Rp 16.428.400,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp135.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	Rp 24.196.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 24.196.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp62.030.000,00	KAPANEWON SANDEN
328	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan				92 persen	92 persen	Rp 31.102.500,00	Rp 24.837.500,00	Rp 24.837.500,00	Rp 23.897.500,00						Rp55.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon				92 persen	92 persen	Rp 22.362.500,00	Rp 18.237.500,00	Rp 18.237.500,00	-Rp 4.125.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat dan Pamong Kalurahan	Rp40.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	Rp 11.950.000,00	Rp 10.250.000,00	Rp 10.250.000,00	-Rp 1.700.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp15.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 10.412.500,00	Rp 7.987.500,00	Rp 7.987.500,00	-Rp 2.425.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp25.000.000,00	KAPANEWON SANDEN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian koordinasi pelayanan kapanewon				92 persen	92 persen	Rp 8.740.000,00	Rp 6.600.000,00	Rp 6.600.000,00	-Rp 2.140.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sanden	Rp15.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 8.740.000,00	Rp 6.600.000,00	Rp 6.600.000,00	-Rp 2.140.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp15.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
329	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat				92 persen	92 persen	Rp 172.588.900,00	Rp 53.541.500,00	Rp 53.541.500,00	-Rp 52.588.900,00						Rp120.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan				92 persen	92 persen	Rp 99.641.500,00	Rp 35.766.500,00	Rp 35.766.500,00	-Rp 63.875.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sanden	Rp90.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 19.525.000,00	Rp 7.525.000,00	Rp 7.525.000,00	-Rp 12.000.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp25.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 80.116.500,00	Rp 28.241.500,00	Rp 28.241.500,00	-Rp 51.875.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp65.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan				92 persen	92 persen	Rp 72.947.400,00	Rp 17.775.000,00	Rp 17.775.000,00	-Rp 55.172.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sanden	Rp30.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	Rp 72.947.400,00	Rp 17.775.000,00	Rp 17.775.000,00	-Rp 55.172.400,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp30.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
330	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				92 persen	92 persen	Rp 6.550.000,00	Rp 7.800.000,00	Rp 7.800.000,00	Rp 9.450.000,00						Rp16.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon				92 persen	92 persen	Rp 6.550.000,00	Rp 7.800.000,00	Rp 7.800.000,00	Rp 1.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sanden	Rp16.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	Rp 6.550.000,00	Rp 7.800.000,00	Rp 7.800.000,00	Rp 1.250.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp16.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
331	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				100 persen	100 persen	Rp 135.150.500,00	Rp 100.211.000,00	Rp 102.286.398,00	Rp 19.849.500,00						Rp155.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon				92 persen	92 persen	Rp 135.150.500,00	Rp 100.211.000,00	Rp 102.286.398,00	-Rp 32.864.102,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sanden	Rp155.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	500 Orang	Rp 135.150.500,00	Rp 100.211.000,00	Rp 102.286.398,00	-Rp 32.864.102,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp155.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
		KAPANEWON SEDAYU							Rp 3.895.260.120,00	Rp 3.469.481.959,32	Rp 3.515.485.959,32	-Rp 379.774.160,68						Rp3.888.625.814,00	KAPANEWON SEDAYU
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
332	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan				100 Persen	100 persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -						Rp100.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu	Rp100.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp100.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp35.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp35.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
333	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi				100 Persen	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 996.000,00						Rp35.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan				100 Persen	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu	Rp35.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 Dokumen	3 Dokumen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp35.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
7		UNSUR KEWILAYAHAN							Rp 3.759.264.120,00	Rp 3.333.485.959,32	Rp 3.485.485.959,32	-Rp 273.778.160,68						Rp3.753.625.814,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01	KECAMATAN							Rp 3.759.264.120,00	Rp 3.333.485.959,32	Rp 3.485.485.959,32	-Rp 273.778.160,68						Rp3.753.625.814,00	KAPANEWON SEDAYU
334	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				61,21 96,79 Angka Indeks	82,82 96,84 Angka Indeks	Rp 3.445.565.620,00	Rp 3.132.719.459,32	Rp 3.286.201.459,32	Rp 32.111.911,00						Rp3.477.677.531,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 4.950.000,00	Rp 750.000,00	Rp 1.000.000,00	-Rp 3.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu	Rp6.300.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 3.150.000,00	Rp 375.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 2.650.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.600.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	Rp 1.800.000,00	Rp 375.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 1.300.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.700.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah				100 persen	100 persen	Rp 2.970.236.919,00	Rp 2.828.190.430,32	Rp 2.978.190.430,32	Rp 7.953.511,32			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu	Rp2.974.024.419,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	Rp 2.920.751.919,00	Rp 2.779.455.430,32	Rp 2.929.455.430,32	Rp 8.703.511,32	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.923.751.919,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 48.360.000,00	Rp 48.360.000,00	Rp 48.360.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp48.960.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	Rp 1.125.000,00	Rp 375.000,00	Rp 375.000,00	-Rp 750.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.312.500,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 persen	100 persen	Rp 2.400.000,00	Rp 375.000,00	Rp 750.000,00	-Rp 1.650.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu	Rp4.500.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 2.400.000,00	Rp 375.000,00	Rp 750.000,00	-Rp 1.650.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.500.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	Rp 192.891.185,00	Rp 45.905.829,00	Rp 48.008.601,00	-Rp 144.882.584,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu	Rp188.917.988,00	KAPANEWON SEDAYU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 4.770.325,00	Rp 2.900.525,00	Rp 2.900.525,00	-Rp 1.869.800,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.568.260,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 73.847.660,00	Rp 7.319.504,00	Rp 7.319.476,00	-Rp 66.528.184,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp55.742.428,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 4.978.600,00	Rp 2.853.300,00	Rp 2.853.300,00	-Rp 2.125.300,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.228.300,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 12.054.600,00	Rp 5.565.000,00	Rp 5.617.800,00	-Rp 6.436.800,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp12.054.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 2.750.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 1.500.000,00	-Rp 1.250.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				298 Laporan	35 Laporan	Rp 89.360.000,00	Rp 22.500.000,00	Rp 24.300.000,00	-Rp 65.060.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp99.825.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.280.000,00	Rp 1.567.500,00	Rp 1.567.500,00	-Rp 712.500,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.850.000,00	Rp 1.950.000,00	Rp 1.950.000,00	-Rp 900.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.500.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah				100 persen	100 persen	Rp 3.300.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 3.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu	Rp6.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	Rp 3.300.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 3.300.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 persen	100 persen	Rp 141.618.116,00	Rp 147.390.000,00	Rp 148.144.228,00	Rp 6.526.112,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu	Rp154.120.124,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 40.680.000,00	Rp 40.680.000,00	Rp 38.488.700,00	-Rp 2.191.300,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp42.500.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 12.450.000,00	Rp 6.460.000,00	Rp 7.150.000,00	-Rp 5.300.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp14.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	Rp 88.488.116,00	Rp 100.250.000,00	Rp 102.505.528,00	Rp 14.017.412,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp97.620.124,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah				100 persen	100 persen	Rp 130.169.400,00	Rp 110.108.200,00	Rp 110.108.200,00	-Rp 20.061.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Aparatur Kapanewon Sedayu	Rp143.815.000,00	KAPANEWON SEDAYU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	Rp 121.793.000,00	Rp 110.108.200,00	Rp 110.108.200,00	-Rp 11.684.800,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp128.815.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	Rp 8.376.400,00	Rp -	Rp -	-Rp 8.376.400,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp15.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
335	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan				81 Persen	85 Persen	Rp 27.950.000,00	Rp 32.901.500,00	Rp 33.551.500,00	-Rp 591.358,00						Rp27.358.642,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 22.750.000,00	Rp 25.969.500,00	Rp 26.119.500,00	Rp 3.369.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu	Rp21.950.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	Rp 7.750.000,00	Rp 5.600.000,00	Rp 5.750.000,00	-Rp 2.000.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.800.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	5 Dokumen	Rp 15.000.000,00	Rp 20.369.500,00	Rp 20.369.500,00	Rp 5.369.500,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp15.150.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan koordinasi pelayanan kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 5.200.000,00	Rp 6.932.000,00	Rp 7.432.000,00	Rp 2.232.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu	Rp5.408.642,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 5.200.000,00	Rp 6.932.000,00	Rp 7.432.000,00	Rp 2.232.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.408.642,00	KAPANEWON SEDAYU
336	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat				100 Persen	100 Persen	Rp 113.735.000,00	Rp 64.933.500,00	Rp 65.833.500,00	-Rp 27.253.000,00						Rp66.482.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan				100 Persen	100 Persen	Rp 68.911.000,00	Rp 37.889.000,00	Rp 38.789.000,00	-Rp 30.122.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu	Rp50.632.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	Rp 20.000.000,00	Rp 9.075.000,00	Rp 9.075.000,00	-Rp 10.925.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp16.432.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	12 Laporan	Rp 48.911.000,00	Rp 28.814.000,00	Rp 29.714.000,00	-Rp 19.197.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp34.200.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 44.824.000,00	Rp 27.044.500,00	Rp 27.044.500,00	-Rp 17.779.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu	Rp35.850.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	5 Laporan	Rp 44.824.000,00	Rp 27.044.500,00	Rp 27.044.500,00	-Rp 17.779.500,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp35.850.000,00	KAPANEWON SEDAYU
337	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				100 persen	100 persen	Rp 17.533.000,00	Rp 22.653.000,00	Rp 22.721.000,00	Rp 244.994,00						Rp17.777.994,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 17.533.000,00	Rp 22.653.000,00	Rp 22.721.000,00	Rp 5.188.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu	Rp17.777.994,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	6 Laporan	Rp 17.533.000,00	Rp 22.653.000,00	Rp 22.721.000,00	Rp 5.188.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp17.777.994,00	KAPANEWON SEDAYU
338	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				100 Persen	100 Persen	Rp 154.480.500,00	Rp 80.278.500,00	Rp 77.178.500,00	-Rp 10.150.853,00						Rp144.329.647,00	KAPANEWON SEDAYU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 154.480.500,00	Rp 80.278.500,00	Rp 77.178.500,00	-Rp 77.302.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Sedayu	Rp144.329.647,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Kesatuan Republik Indonesia				105 Orang	100 Orang	Rp 154.480.500,00	Rp 80.278.500,00	Rp 77.178.500,00	-Rp 77.302.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp144.329.647,00	KAPANEWON SEDAYU
		KAPANEWON SEWON							Rp 4.296.961.315,00	Rp 3.952.848.013,17	Rp 3.850.852.013,17	-Rp 446.109.301,83						Rp5.073.769.933,00	KAPANEWON SEWON
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp50.000.000,00	KAPANEWON SEWON
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp50.000.000,00	KAPANEWON SEWON
339	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 50.000.000,00						Rp50.000.000,00	KAPANEWON SEWON
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di Kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	pelaku UMKM. Pelaku Seni dan Kapanewon	Rp50.000.000,00	KAPANEWON SEWON
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp50.000.000,00	KAPANEWON SEWON
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp66.040.000,00	KAPANEWON SEWON
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp66.040.000,00	KAPANEWON SEWON
340	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.044.000,00						Rp66.040.000,00	KAPANEWON SEWON
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan pedais kelembagaan				100 persen	100 persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon dan Kaluran	Rp66.040.000,00	KAPANEWON SEWON
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 Dokumen	3 Dokumen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp66.040.000,00	KAPANEWON SEWON
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							Rp 4.160.965.315,00	Rp 3.816.852.013,17	Rp 3.820.852.013,17	-Rp 340.113.301,83						Rp4.957.729.933,00	KAPANEWON SEWON
	7.01	KECAMATAN							Rp 4.160.965.315,00	Rp 3.816.852.013,17	Rp 3.820.852.013,17	-Rp 340.113.301,83						Rp4.957.729.933,00	KAPANEWON SEWON
341	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan				100 Persen	100 Persen	Rp 3.649.392.315,00	Rp 3.554.647.517,17	Rp 3.560.204.517,17	Rp 539.111.886,00						Rp4.188.504.201,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan an dan evaluasi perangkat daerah				100 persen	100 persen	Rp 4.800.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	-Rp 3.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Sewon	Rp15.900.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 2.400.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	-Rp 1.800.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp13.500.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	Rp 2.400.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.400.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadmi nistrasian keuangan perangkat daerah				100 persen	100 persen	Rp 3.103.643.073,00	Rp 3.204.117.219,17	Rp 3.204.117.219,17	Rp 100.474.146,17			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp2.922.191.433,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	Rp 3.045.083.073,00	Rp 3.149.157.219,17	Rp 3.149.157.219,17	Rp 104.074.146,17	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.809.638.933,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	5 Dokumen	Rp 56.160.000,00	Rp 54.360.000,00	Rp 54.360.000,00	-Rp 1.800.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp106.080.000,00	KAPANEWON SEWON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	22 Laporan	Rp 2.400.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	-Rp 1.800.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.472.500,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat Daerah				100 persen	100 persen	Rp 3.000.000,00	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	-Rp 2.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Sewon	Rp6.600.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 3.000.000,00	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	-Rp 2.750.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.600.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelola n administrasi umum				100 persen	100 persen	Rp 136.295.514,00	Rp 45.119.778,00	Rp 76.095.368,00	-Rp 60.200.146,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp575.165.518,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 3.762.770,00	Rp 413.820,00	Rp 413.820,00	-Rp 3.348.950,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp18.690.460,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 8.271.900,00	Rp 2.484.950,00	Rp 2.530.540,00	-Rp 5.741.360,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp52.333.600,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 3.412.900,00	Rp 1.571.700,00	Rp 1.571.700,00	-Rp 1.841.200,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp69.141.284,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 11.331.944,00	Rp 2.335.308,00	Rp 2.335.308,00	-Rp 8.996.636,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp17.760.750,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 1.500.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 1.500.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.300.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				128 Laporan	130 Laporan	Rp 102.616.000,00	Rp 37.114.000,00	Rp 68.044.000,00	-Rp 34.572.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp385.302.424,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	4 Dokumen	Rp 2.400.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	-Rp 1.800.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp20.637.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	4 Dokumen	Rp 3.000.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	-Rp 2.400.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp8.000.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah				100 persen	100 persen	Rp 15.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp118.347.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 5.000.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp20.000.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	2 Unit	Rp 10.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 10.000.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp98.347.000,00	KAPANEWON SEWON



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaa n jasa penunjang urusan pemerinta h daerah				100 persen	100 persen	Rp 218.370.588,00	Rp 220.811.120,00	Rp 195.392.530,00	-Rp 22.978.058,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp235.375.600,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 56.841.120,00	Rp 56.841.120,00	Rp 56.841.120,00	Rp -	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp50.000.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 10.545.000,00	Rp 3.170.000,00	Rp 5.930.000,00	-Rp 4.615.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp66.200.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	Rp 150.984.468,00	Rp 160.800.000,00	Rp 132.621.410,00	-Rp 18.363.058,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp119.175.600,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemelihar aan barang milik daerah				100 persen	100 persen	Rp 168.283.140,00	Rp 83.149.400,00	Rp 83.149.400,00	-Rp 85.133.740,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp314.924.650,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	Rp 108.075.140,00	Rp 83.149.400,00	Rp 83.149.400,00	-Rp 24.925.740,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp215.249.650,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	Rp 60.208.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 60.208.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp99.675.000,00	KAPANEWON SEWON
342	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik akupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 90 92 Persen % persen	100 90 92 Persen % persen	Rp 41.787.500,00	Rp 18.400.000,00	Rp 18.400.000,00	Rp 21.563.500,00						Rp63.351.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	capaian koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon				100 perse	100 persen	Rp 37.025.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 16.000.000,00	-Rp 21.025.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp37.651.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	100 Laporan	Rp 12.800.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 12.800.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp10.864.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	100 Dokumen	Rp 24.225.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 16.000.000,00	-Rp 8.225.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp26.787.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian koordinasi Pelayanan Kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 4.762.500,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	-Rp 2.362.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp25.700.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 4.762.500,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	-Rp 2.362.500,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp25.700.000,00	KAPANEWON SEWON
343	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Kalurahan				100 Persen	100 Persen	Rp 269.495.500,00	Rp 157.047.500,00	Rp 157.047.500,00	Rp 40.668.540,00						Rp310.164.040,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan				100 persen	100 persen	Rp 110.720.000,00	Rp 44.125.000,00	Rp 44.125.000,00	-Rp 66.595.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon, Kalurahan	Rp201.500.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	Rp 20.620.000,00	Rp 5.150.000,00	Rp 5.150.000,00	-Rp 15.470.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp76.000.000,00	KAPANEWON SEWON



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				16 Laporan	16 Laporan	Rp 90.100.000,00	Rp 38.975.000,00	Rp 38.975.000,00	-Rp 51.125.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp125.500.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 158.775.500,00	Rp 112.922.500,00	Rp 112.922.500,00	-Rp 45.853.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp108.664.040,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	6 Laporan	Rp 158.775.500,00	Rp 112.922.500,00	Rp 112.922.500,00	-Rp 45.853.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp108.664.040,00	KAPANEWON SEWON
344	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				100 Persen	100 Persen	Rp 37.025.000,00	Rp 3.800.000,00	Rp 3.800.000,00	Rp 82.531.000,00						Rp119.556.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian koordinasi ketentraman dan ketertiban Kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 37.025.000,00	Rp 3.800.000,00	Rp 3.800.000,00	-Rp 33.225.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp119.556.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	Rp 37.025.000,00	Rp 3.800.000,00	Rp 3.800.000,00	-Rp 33.225.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp119.556.000,00	KAPANEWON SEWON
345	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	Rp 163.265.000,00	Rp 82.956.996,00	Rp 81.399.996,00	Rp 112.889.692,00						Rp276.154.692,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian koordinasi Pemerintahan umum di Kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 163.265.000,00	Rp 82.956.996,00	Rp 81.399.996,00	-Rp 81.865.004,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon	Rp276.154.692,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	Rp 163.265.000,00	Rp 82.956.996,00	Rp 81.399.996,00	-Rp 81.865.004,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp276.154.692,00	KAPANEWON SEWON
		KAPANEWON SRANDAKAN							Rp 3.969.518.110,00	Rp 3.370.543.710,69	Rp 3.268.547.710,69	-Rp 700.970.399,31						Rp300.893.960.321,00	KAPANEWON SRANDAKAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
346	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan				100 persen	100 persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -						Rp100.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat ,Pelaku seni dan UMKM	Rp100.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp100.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp35.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp35.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
347	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan ketatalaksanaan keistimewaan				3 dokumen	3 dokumen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 996.000,00						Rp35.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai perdais kelembagaan				3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon dan Kalurahan	Rp35.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 0	2 0	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp35.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
7		UNSUR KEWILAYAHAN							Rp 3.833.522.110,00	Rp 3.234.547.710,69	Rp 3.238.547.710,69	-Rp 594.974.399,31						Rp300.758.960.321,00	KAPANEWON SRANDAKAN
7.01		KECAMATAN							Rp 3.833.522.110,00	Rp 3.234.547.710,69	Rp 3.238.547.710,69	-Rp 594.974.399,31						Rp300.758.960.321,00	KAPANEWON SRANDAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
348	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				88 undefined Angka undefined	81,20 96,20 Angka Angka	Rp 3.526.787.110,00	Rp 3.112.071.210,69	Rp 3.116.071.210,69	Rp 296.895.764.711,00						Rp300.422.551.821,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				88 angka	100 angka	Rp 9.000.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	-Rp 5.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp10.500.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 5.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	-Rp 3.000.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.500.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	Rp 4.000.000,00	Rp 1.600.000,00	Rp 1.600.000,00	-Rp 2.400.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah				100 persen	100 persen	Rp 3.050.982.423,00	Rp 2.759.749.382,69	Rp 2.759.749.382,69	-Rp 291.233.040,31			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp300.038.982.423,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/b ulan	18 Orang/b ulan	Rp 2.996.922.423,00	Rp 2.707.489.382,69	Rp 2.707.489.382,69	-Rp 289.433.040,31	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp299.983.922.423,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 Dokumen	11 Dokumen	Rp 50.460.000,00	Rp 50.460.000,00	Rp 50.460.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp51.060.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	Rp 3.600.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	-Rp 1.800.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 persen	100 persen	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp -			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp800.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp800.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				100 persen	100 persen	Rp 90.547.383,00	Rp 41.264.268,00	Rp 41.264.268,00	-Rp 49.283.115,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN kapanewon	Rp91.085.281,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 3.932.000,00	Rp 3.932.000,00	Rp 3.932.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 8.274.383,00	Rp 7.168.268,00	Rp 7.168.268,00	-Rp 1.106.115,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp910.181,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 7.001.000,00	Rp 5.412.000,00	Rp 5.412.000,00	-Rp 1.589.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.701.100,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 5.400.000,00	Rp 2.700.000,00	Rp 2.700.000,00	-Rp 2.700.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.940.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.640.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	Rp 4.200.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 4.200.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.620.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	Rp 52.655.000,00	Rp 16.920.000,00	Rp 16.920.000,00	-Rp 35.735.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp57.920.500,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4.685.000,00	Rp 1.632.000,00	Rp 1.632.000,00	-Rp 3.053.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.153.500,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.000.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 1.100.000,00	-Rp 900.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.200.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah				100 persen	100 persen	Rp 34.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 34.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp37.400.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	Rp 12.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 12.000.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp13.200.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	Rp 22.000.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 22.000.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp24.200.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				98 persen	98 persen	Rp 186.765.304,00	Rp 197.867.560,00	Rp 201.867.560,00	Rp 15.102.256,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp75.147.117,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 53.395.560,00	Rp 55.747.560,00	Rp 55.747.560,00	Rp 2.352.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp58.735.116,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	Rp 14.920.000,00	Rp 14.920.000,00	Rp 14.920.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp16.412.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 118.449.744,00	Rp 127.200.000,00	Rp 131.200.000,00	Rp 12.750.256,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah				100 persen	100 persen	Rp 154.492.000,00	Rp 108.590.000,00	Rp 108.590.000,00	-Rp 45.902.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp168.637.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	Rp 139.670.000,00	Rp 108.590.000,00	Rp 108.590.000,00	-Rp 31.080.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp153.637.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	Rp 14.822.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 14.822.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp15.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
349	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kebijakan pelayanan				94 Angka	81 Angka	Rp 45.400.000,00	Rp 9.500.000,00	Rp 9.500.000,00	Rp 3.540.000,00						Rp48.940.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 34.400.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	-Rp 29.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Forkompinkap	Rp36.840.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	Rp 14.400.000,00	Rp 900.000,00	Rp 900.000,00	-Rp 13.500.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp15.840.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.02.2.01.0002		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 3.600.000,00	-Rp 16.400.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp21.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan koordinasi pelayanan kapanewon				92 persen	92 persen	Rp 11.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	-Rp 6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan dana Kapanewon	Rp12.100.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 11.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	-Rp 6.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp12.100.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
350	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat				undefined undefined	100 Angka	Rp 129.635.000,00	Rp 38.605.000,00	Rp 38.605.000,00	Rp 12.963.500,00						Rp142.598.500,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan				undefined undefined	95 Angka	Rp 92.635.000,00	Rp 23.615.000,00	Rp 23.615.000,00	-Rp 69.020.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan dana Kapanewon	Rp101.898.500,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 22.000.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	-Rp 14.500.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp24.200.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				16 Laporan	16 Laporan	Rp 70.635.000,00	Rp 16.115.000,00	Rp 16.115.000,00	-Rp 54.520.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp77.698.500,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kapanewon				95 persen	95 persen	Rp 37.000.000,00	Rp 14.990.000,00	Rp 14.990.000,00	-Rp 22.010.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	UMKM Kalurahan dan Kapanewon	Rp40.700.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	Rp 37.000.000,00	Rp 14.990.000,00	Rp 14.990.000,00	-Rp 22.010.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp40.700.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
351	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				98 Angka	100 Angka	Rp 22.200.000,00	Rp 12.200.000,00	Rp 12.200.000,00	Rp 2.220.000,00						Rp24.420.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon				80 persen	98 persen	Rp 22.200.000,00	Rp 12.200.000,00	Rp 12.200.000,00	-Rp 10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan dana Kapanewon	Rp24.420.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				100 Laporan	100 Laporan	Rp 22.200.000,00	Rp 12.200.000,00	Rp 12.200.000,00	-Rp 10.000.000,00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp24.420.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
352	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				100 persen	100 persen	Rp 109.500.000,00	Rp 62.171.500,00	Rp 62.171.500,00	Rp 10.950.000,00						Rp120.450.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi pemerintahan umum di kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 109.500.000,00	Rp 62.171.500,00	Rp 62.171.500,00	-Rp 47.328.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat, Kalurahan dana Kapanewon	Rp120.450.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				74 Orang	74 Orang	Rp 109.500.000,00	Rp 62.171.500,00	Rp 62.171.500,00	-Rp 47.328.500,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp120.450.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
		KAPANEWON BANGUNTAPAN							Rp 4.705.556.663,00	Rp 3.585.429.543,43	Rp 3.484.433.525,43	-Rp 1.221.123.137,57						Rp4.733.976.696,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp100.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
353	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan				100 persen	100 persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -						Rp100.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan				100 persen	100 persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pelaku seni, UMKM dan masyarakat Kapanewon Banguntapan	Rp100.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp100.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp35.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp35.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
354	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi				100 persen	100 persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 996.000,00						Rp35.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan pedais kelembagaan				100 persen	100 persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kalurahan dan kapanewon Banguntapan	Rp35.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 Dokumen	3 Dokumen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp35.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
7		UNSUR KEWILAYAHAN							Rp 4.569.560.663,00	Rp 3.449.433.543,43	Rp 3.454.433.525,43	-Rp 1.115.127.137,57						Rp4.598.976.696,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01	KECAMATAN							Rp 4.569.560.663,00	Rp 3.449.433.543,43	Rp 3.454.433.525,43	-Rp 1.115.127.137,57						Rp4.598.976.696,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
355	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				80,32 96,29 Angka Indeks	80,32 96,29 Angka Indeks	Rp 4.184.889.163,00	Rp 3.156.579.243,43	Rp 3.161.579.225,43	Rp 65.112.974,00						Rp4.250.002.137,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				100 persen	100 persen	Rp 7.650.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 1.650.000,00	-Rp 6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Banguntapan	Rp10.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 3.400.000,00	Rp 900.000,00	Rp 900.000,00	-Rp 2.500.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	Rp 4.250.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	-Rp 3.500.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasian keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 3.623.403.423,00	Rp 2.791.410.360,43	Rp 2.791.410.360,43	-Rp 831.993.062,57			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Banguntapan	Rp3.630.702.137,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	Rp 3.575.243.423,00	Rp 2.745.750.360,43	Rp 2.745.750.360,43	-Rp 829.493.062,57	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.581.942.137,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 44.760.000,00	Rp 44.760.000,00	Rp 44.760.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp44.760.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	Rp 3.400.000,00	Rp 900.000,00	Rp 900.000,00	-Rp 2.500.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah				100 persen	100 persen	Rp 1.800.000,00	Rp 625.000,00	Rp 625.000,00	-Rp 1.175.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Banguntapan	Rp3.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.800.000,00	Rp 625.000,00	Rp 625.000,00	-Rp 1.175.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan administrasi umum				100 Persen	100 Persen	Rp 162.964.100,00	Rp 41.545.923,00	Rp 45.447.080,00	-Rp 117.517.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Banguntapan	Rp193.800.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 3.574.340,00	Rp 1.747.700,00	Rp 1.747.700,00	-Rp 1.826.640,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 35.491.360,00	Rp 7.331.880,00	Rp 8.570.880,00	-Rp 26.920.480,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp40.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 4.016.800,00	Rp 1.986.500,00	Rp 2.384.000,00	-Rp 1.632.800,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp8.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 5.981.100,00	Rp 3.066.343,00	Rp 3.231.000,00	-Rp 2.750.100,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	Rp 2.400.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 2.400.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.400.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	40 Laporan	Rp 104.238.000,00	Rp 25.937.500,00	Rp 28.037.500,00	-Rp 76.200.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp125.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4.862.500,00	Rp 976.000,00	Rp 976.000,00	-Rp 3.886.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.400.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 1.900.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.400.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 4.500.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 4.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Banguntapan	Rp7.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	Rp 4.500.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 4.500.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 188.184.740,00	Rp 195.542.560,00	Rp 196.641.385,00	Rp 8.456.645,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Banguntapan	Rp200.500.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 28.120.560,00	Rp 28.120.560,00	Rp 23.633.800,00	-Rp 4.486.760,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp30.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 12.002.000,00	Rp 8.422.000,00	Rp 8.422.000,00	-Rp 3.580.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp10.500.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	Rp 148.062.180,00	Rp 159.000.000,00	Rp 164.585.585,00	Rp 16.523.405,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp160.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan barang milik daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 196.386.900,00	Rp 125.805.400,00	Rp 125.805.400,00	-Rp 70.581.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Brang milik daerah kapanewon Banguntapan	Rp205.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	Rp 131.546.900,00	Rp 125.805.400,00	Rp 125.805.400,00	-Rp 5.741.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp135.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	Rp 64.840.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 64.840.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp70.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
356	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan				100 persen	100 persen	Rp 36.625.000,00	Rp 48.380.000,00	Rp 48.380.000,00	-Rp 2.444.715,00						Rp34.180.285,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 25.075.000,00	Rp 29.805.000,00	Rp 29.805.000,00	Rp 4.730.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Banguntapan	Rp21.180.285,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	Rp 11.900.000,00	Rp 10.550.000,00	Rp 10.550.000,00	-Rp 1.350.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp10.180.285,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 13.175.000,00	Rp 19.255.000,00	Rp 19.255.000,00	Rp 6.080.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp11.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan koordinasi pelayanan kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 11.550.000,00	Rp 18.575.000,00	Rp 18.575.000,00	Rp 7.025.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Banguntapan	Rp13.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 11.550.000,00	Rp 18.575.000,00	Rp 18.575.000,00	Rp 7.025.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp13.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
357	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat				100 persen	100 persen	Rp 165.589.000,00	Rp 84.758.500,00	Rp 84.758.500,00	-Rp 36.195.868,00						Rp129.393.132,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan				100 persen	100 persen	Rp 101.188.000,00	Rp 40.237.500,00	Rp 40.237.500,00	-Rp 60.950.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Banguntapan	Rp87.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	Rp 22.000.000,00	Rp 10.887.500,00	Rp 10.887.500,00	-Rp 11.112.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp22.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 79.188.000,00	Rp 29.350.000,00	Rp 29.350.000,00	-Rp 49.838.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp65.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 64.401.000,00	Rp 44.521.000,00	Rp 44.521.000,00	-Rp 19.880.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Banguntapan	Rp42.393.132,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	Rp 64.401.000,00	Rp 44.521.000,00	Rp 44.521.000,00	-Rp 19.880.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp42.393.132,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
358	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				100 persen	100 persen	Rp 21.075.000,00	Rp 36.012.500,00	Rp 36.012.500,00	-Rp 2.550.003,00						Rp18.524.997,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi ketentrman dan ketertiban kapanewon.				100 persen	100 persen	Rp 21.075.000,00	Rp 36.012.500,00	Rp 36.012.500,00	Rp 14.937.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Banguntapan	Rp18.524.997,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 21.075.000,00	Rp 36.012.500,00	Rp 36.012.500,00	Rp 14.937.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp18.524.997,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
359	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				100 persen	100 persen	Rp 161.382.500,00	Rp 123.703.300,00	Rp 123.703.300,00	Rp 5.493.645,00						Rp166.876.145,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon				100 persen	100 persen	Rp 161.382.500,00	Rp 123.703.300,00	Rp 123.703.300,00	-Rp 37.679.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Banguntapan	Rp166.876.145,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75 Orang	62 Orang	Rp 161.382.500,00	Rp 123.703.300,00	Rp 123.703.300,00	-Rp 37.679.200,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp166.876.145,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
		KAPANEWON PUNDONG							Rp 3.864.422.542,00	Rp 3.492.097.968,17	Rp 3.489.101.968,17	-Rp 375.320.573,83						Rp3.962.696.710,00	KAPANEWON PUNDONG
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp50.000.000,00	KAPANEWON PUNDONG
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp50.000.000,00	KAPANEWON PUNDONG
360	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan				100 Persen	0 Persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 50.000.000,00						Rp50.000.000,00	KAPANEWON PUNDONG
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon				100 Persen	0 Persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Pundong, pelaku seni budaya, UMKM	Rp50.000.000,00	KAPANEWON PUNDONG
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	0 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp50.000.000,00	KAPANEWON PUNDONG
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp30.000.000,00	KAPANEWON PUNDONG
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp30.000.000,00	KAPANEWON PUNDONG
361	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perdais kelembagaan				100 Persen	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp30.000.000,00	KAPANEWON PUNDONG
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Terlaksananya penerapan dan pendampingan keistimewaan di kapanewon dan kalurahan				100 Persen	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kalurahan dan Kapanewon Pundong	Rp30.000.000,00	KAPANEWON PUNDONG
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 Dokumen	3 Dokumen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp30.000.000,00	KAPANEWON PUNDONG
7		UNSUR KEWILAYAHAN							Rp 3.728.426.542,00	Rp 3.356.101.968,17	Rp 3.459.101.968,17	-Rp 269.324.573,83						Rp3.882.696.710,00	KAPANEWON PUNDONG
7.01		KECAMATAN							Rp 3.728.426.542,00	Rp 3.356.101.968,17	Rp 3.459.101.968,17	-Rp 269.324.573,83						Rp3.882.696.710,00	KAPANEWON PUNDONG
362	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				81,25 95,76 angka indeks	81,80 96,13 angka indeks	Rp 3.380.708.742,00	Rp 3.148.439.768,17	Rp 3.251.439.768,17	Rp 110.785.553,00						Rp3.491.494.295,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				90 persen	100 Persen	Rp 5.950.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	-Rp 4.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon Pundong Kab. Bantul	Rp5.950.000,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 2.550.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 2.050.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.550.000,00	KAPANEWON PUNDONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	Rp 3.400.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 2.900.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.400.000,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah				90 Persen	100 Persen	Rp 2.918.561.960,00	Rp 2.814.337.730,17	Rp 2.914.337.730,17	-Rp 4.224.229,83			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon Pundong Kab. Bantul	Rp2.932.225.258,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	Rp 2.865.521.960,00	Rp 2.767.577.730,17	Rp 2.867.577.730,17	Rp 2.055.770,17	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.878.961.258,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 47.940.000,00	Rp 46.260.000,00	Rp 46.260.000,00	-Rp 1.680.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp48.164.000,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	Rp 5.100.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 4.600.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.100.000,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	Rp 2.400.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	-Rp 1.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon Pundong Kab. Bantul	Rp3.400.000,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 2.400.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	-Rp 1.400.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.400.000,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				90 persen	100 Persen	Rp 121.175.983,00	Rp 35.674.178,00	Rp 35.674.178,00	-Rp 85.501.805,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Pundong Kab. Bantul	Rp156.288.198,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	Rp 2.819.300,00	Rp 2.819.300,00	Rp 2.819.300,00	-	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.636.595,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 33.031.383,00	Rp 6.295.378,00	Rp 6.295.378,00	-Rp 26.736.005,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp39.497.981,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 3.301.000,00	Rp 3.301.000,00	Rp 3.301.000,00	-	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.322.260,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 5.334.300,00	Rp 3.388.500,00	Rp 3.388.500,00	-Rp 1.945.800,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.357.563,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	Rp 1.800.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 1.800.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.400.000,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67 Laporan	30 Laporan	Rp 72.360.000,00	Rp 18.290.000,00	Rp 18.290.000,00	-Rp 54.070.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp96.762.799,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 830.000,00	Rp 830.000,00	Rp 830.000,00	-	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp911.000,00	KAPANEWON PUNDONG



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.700.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	-Rp 950.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.400.000,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				90 Persen	90 Persen	Rp 181.677.428,00	Rp 180.630.560,00	Rp 183.630.560,00	Rp 1.953.132,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon Pundong Kab. Bantul	Rp182.384.467,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 46.067.604,00	Rp 48.520.560,00	Rp 48.520.560,00	Rp 2.452.956,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp46.136.711,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 14.735.000,00	Rp 14.310.000,00	Rp 14.310.000,00	-Rp 425.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp14.804.100,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	5 Laporan	Rp 120.874.824,00	Rp 117.800.000,00	Rp 120.800.000,00	-Rp 74.824,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp121.443.656,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah				90 persen	90 persen	Rp 150.943.371,00	Rp 115.797.300,00	Rp 115.797.300,00	-Rp 35.146.071,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Pundong Kab. Bantul	Rp211.246.372,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	Rp 122.141.450,00	Rp 115.797.300,00	Rp 115.797.300,00	-Rp 6.344.150,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp163.332.700,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	Rp 28.801.921,00	Rp -	Rp -	-Rp 28.801.921,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp47.913.672,00	KAPANEWON PUNDONG
363	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian kinerja kebijakan pelayanan				81 Persen	81 Persen	Rp 40.890.800,00	Rp 30.340.700,00	Rp 30.340.700,00	Rp 55.515.191,00						Rp96.405.991,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon				81 Persen	81 Persen	Rp 30.750.000,00	Rp 23.012.500,00	Rp 23.012.500,00	-Rp 7.737.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Pundong Kab. Bantul	Rp72.497.791,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	Rp 6.750.000,00	Rp 8.270.000,00	Rp 8.270.000,00	Rp 1.520.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp7.700.000,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	4 Dokumen	Rp 24.000.000,00	Rp 14.742.500,00	Rp 14.742.500,00	-Rp 9.257.500,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp64.797.791,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian koordinasi pelayanan kapanewon				81 Persen	81 Persen	Rp 10.140.800,00	Rp 7.328.200,00	Rp 7.328.200,00	-Rp 2.812.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon Pundong Kab. Bantul	Rp23.908.200,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 10.140.800,00	Rp 7.328.200,00	Rp 7.328.200,00	-Rp 2.812.600,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp23.908.200,00	KAPANEWON PUNDONG
364	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat				100 angka	100 angka	Rp 141.613.000,00	Rp 39.972.500,00	Rp 39.972.500,00	-Rp 30.467.131,00						Rp111.145.869,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan				100 Persen	100 Persen	Rp 100.785.000,00	Rp 28.122.500,00	Rp 28.122.500,00	-Rp 72.662.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Pundong Kab. Bantul	Rp76.236.700,00	KAPANEWON PUNDONG



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga K emasyarak atan	9 Lembaga Kemasyara katan	Rp 22.000.000,00	Rp 10.610.000,00	Rp 10.610.000,00	-Rp 11.390.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp22.103.000,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				18 Laporan	9 Laporan	Rp 78.785.000,00	Rp 17.512.500,00	Rp 17.512.500,00	-Rp 61.272.500,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp54.133.700,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 40.828.000,00	Rp 11.850.000,00	Rp 11.850.000,00	-Rp 28.978.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Pundong Kab. Bantul	Rp34.909.169,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	1 Laporan	Rp 40.828.000,00	Rp 11.850.000,00	Rp 11.850.000,00	-Rp 28.978.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp34.909.169,00	KAPANEWON PUNDONG
365	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum				100 Persen	100 Persen	Rp 13.701.500,00	Rp 9.025.000,00	Rp 9.025.000,00	-Rp 1.452.249,00						Rp12.249.251,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi ketenteraman dan ketertiban kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 13.701.500,00	Rp 9.025.000,00	Rp 9.025.000,00	-Rp 4.676.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Linmas, Muspika, Kalurahan, dan Kapanewon Kab. Bantul	Rp12.249.251,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	Rp 13.701.500,00	Rp 9.025.000,00	Rp 9.025.000,00	-Rp 4.676.500,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp12.249.251,00	KAPANEWON PUNDONG
366	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	Rp 151.512.500,00	Rp 128.324.000,00	Rp 128.324.000,00	Rp 19.888.804,00						Rp171.401.304,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian koordinasi pemerintahan umum di kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 151.512.500,00	Rp 128.324.000,00	Rp 128.324.000,00	-Rp 23.188.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kapanewon Pundong Kab. Bantul	Rp171.401.304,00	KAPANEWON PUNDONG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75 Orang	60 Orang	Rp 151.512.500,00	Rp 128.324.000,00	Rp 128.324.000,00	-Rp 23.188.500,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp171.401.304,00	KAPANEWON PUNDONG
		KAPANEWON PLERET							Rp 3.696.457.998,00	Rp 3.446.717.050,32	Rp 3.393.721.050,32	-Rp 302.736.947,68						Rp3.744.174.806,00	KAPANEWON PLERET
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp0,00	KAPANEWON PLERET
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp0,00	KAPANEWON PLERET
367	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan				100 Persen	100 Persen	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00						Rp0,00	KAPANEWON PLERET
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan				100 %	100 %	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat	Rp0,00	KAPANEWON PLERET
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	-Rp 100.000.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp0,00	KAPANEWON PLERET
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp30.000.000,00	KAPANEWON PLERET
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp30.000.000,00	KAPANEWON PLERET
368	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi				100 Persen	100 Persen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00						Rp30.000.000,00	KAPANEWON PLERET
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan pedais kelembagaan				100 %	100 %	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat	Rp30.000.000,00	KAPANEWON PLERET
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				4 Dokumen	3 Dokumen	Rp 35.996.000,00	Rp 35.996.000,00	Rp 30.000.000,00	-Rp 5.996.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp30.000.000,00	KAPANEWON PLERET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							Rp 3.560.461.998,00	Rp 3.310.721.050,32	Rp 3.363.721.050,32	-Rp 196.740.947,68						Rp3.714.174.806,00	KAPANEWON PLERET
	7.01	KECAMATAN							Rp 3.560.461.998,00	Rp 3.310.721.050,32	Rp 3.363.721.050,32	-Rp 196.740.947,68						Rp3.714.174.806,00	KAPANEWON PLERET
369	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				80,85 93,25 Angka Indeks	80,85 93,25 Angka Indeks	Rp 3.263.301.498,00	Rp 3.079.463.050,32	Rp 3.132.463.050,32	Rp 105.738.850,00						Rp3.369.040.348,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				100 %	100 %	Rp 5.100.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	-Rp 4.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp8.500.000,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 2.550.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 2.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.100.000,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	Rp 2.550.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 2.250.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.400.000,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	Rp 2.781.633.312,00	Rp 2.557.899.062,32	Rp 2.607.899.062,32	-Rp 173.734.249,68			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp2.787.183.312,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/b ulan	18 Orang/b ulan	Rp 2.734.923.312,00	Rp 2.515.539.062,32	Rp 2.565.539.062,32	-Rp 169.384.249,68	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp2.734.923.312,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 44.160.000,00	Rp 42.060.000,00	Rp 42.060.000,00	-Rp 2.100.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp47.160.000,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	Rp 2.550.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 2.250.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.100.000,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	Rp 2.550.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 2.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp3.400.000,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 2.550.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 2.250.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.400.000,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				100 %	100 %	Rp 150.056.282,00	Rp 187.827.608,00	Rp 187.444.316,00	Rp 37.388.034,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp174.660.282,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 4.989.435,00	Rp 3.640.890,00	Rp 3.640.890,00	-Rp 1.348.545,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp4.989.435,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 53.215.175,00	Rp 20.818.150,00	Rp 20.818.150,00	-Rp 32.397.025,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp63.215.175,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 2.737.872,00	Rp 35.538.972,00	Rp 35.538.972,00	Rp 32.801.100,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.031.372,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 7.018.300,00	Rp 4.185.096,00	Rp 3.801.804,00	-Rp 3.216.496,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp6.922.300,00	KAPANEWON PLERET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp1.500.000,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	98 Laporan	Rp 76.189.000,00	Rp 119.988.000,00	Rp 119.988.000,00	Rp 43.799.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp83.189.000,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 2.706.500,00	Rp 1.856.500,00	Rp 1.856.500,00	-Rp 850.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp5.413.000,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 1.700.000,00	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	-Rp 1.400.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.400.000,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	Rp 159.985.304,00	Rp 138.504.080,00	Rp 141.887.372,00	-Rp 18.097.932,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp164.985.304,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 32.680.560,00	Rp 37.094.080,00	Rp 37.094.080,00	Rp 4.413.520,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp32.680.560,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	Rp 8.205.000,00	Rp 6.010.000,00	Rp 6.010.000,00	-Rp 2.195.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp8.205.000,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	Rp 119.099.744,00	Rp 95.400.000,00	Rp 98.783.292,00	-Rp 20.316.452,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp124.099.744,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah				100 %	100 %	Rp 163.976.600,00	Rp 194.332.300,00	Rp 194.332.300,00	Rp 30.355.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kapanewon	Rp230.311.450,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	Rp 136.897.400,00	Rp 135.877.400,00	Rp 135.877.400,00	-Rp 1.020.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp139.897.400,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	Rp 27.079.200,00	Rp 58.454.900,00	Rp 58.454.900,00	Rp 31.375.700,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp90.414.050,00	KAPANEWON PLERET
370	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan				81 Person	81 Person	Rp 21.737.500,00	Rp 14.260.000,00	Rp 14.260.000,00	Rp 30.072.913,00						Rp51.810.413,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian penyelenggaraan pemerintahan kapanewon				92 %	92 %	Rp 16.612.500,00	Rp 6.450.000,00	Rp 6.450.000,00	-Rp 10.162.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat	Rp36.612.500,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	Rp 6.750.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.400.000,00	-Rp 4.350.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp16.750.000,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 9.862.500,00	Rp 4.050.000,00	Rp 4.050.000,00	-Rp 5.812.500,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp19.862.500,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon				92 %	92 %	Rp 5.125.000,00	Rp 7.810.000,00	Rp 7.810.000,00	Rp 2.685.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat	Rp15.197.913,00	KAPANEWON PLERET



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	Rp 5.125.000,00	Rp 7.810.000,00	Rp 7.810.000,00	Rp 2.685.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp15.197.913,00	KAPANEWON PLERET
371	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat				100 Persen	100 Persen	Rp 112.582.000,00	Rp 58.254.000,00	Rp 58.254.000,00	-Rp 10.124.186,00						Rp102.457.814,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan				92 %	92 %	Rp 73.815.000,00	Rp 30.760.000,00	Rp 30.760.000,00	-Rp 43.055.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat	Rp58.911.000,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga K emasyarak atan	10 Lembaga K emasyarak atan	Rp 18.304.000,00	Rp 5.250.000,00	Rp 5.250.000,00	-Rp 13.054.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp18.304.000,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	Rp 55.511.000,00	Rp 25.510.000,00	Rp 25.510.000,00	-Rp 30.001.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp40.607.000,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon				92 %	92 %	Rp 38.767.000,00	Rp 27.494.000,00	Rp 27.494.000,00	-Rp 11.273.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat	Rp43.546.814,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	6 Laporan	Rp 38.767.000,00	Rp 27.494.000,00	Rp 27.494.000,00	-Rp 11.273.000,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp43.546.814,00	KAPANEWON PLERET
372	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kapanewon				100 Persen	100 Persen	Rp 13.512.500,00	Rp 22.566.000,00	Rp 22.566.000,00	-Rp 9.516.246,00						Rp3.996.254,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon				100 %	100 %	Rp 13.512.500,00	Rp 22.566.000,00	Rp 22.566.000,00	Rp 9.053.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat	Rp3.996.254,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	Rp 13.512.500,00	Rp 22.566.000,00	Rp 22.566.000,00	Rp 9.053.500,00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp3.996.254,00	KAPANEWON PLERET
373	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				100 Persen	100 Persen	Rp 149.328.500,00	Rp 136.178.000,00	Rp 136.178.000,00	Rp 37.541.477,00						Rp186.869.977,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon				100 %	100 %	Rp 149.328.500,00	Rp 136.178.000,00	Rp 136.178.000,00	-Rp 13.150.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat	Rp186.869.977,00	KAPANEWON PLERET
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75 Orang	75 Orang	Rp 149.328.500,00	Rp 136.178.000,00	Rp 136.178.000,00	-Rp 13.150.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		Rp186.869.977,00	KAPANEWON PLERET
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							Rp 9.121.861.733,00	Rp 9.075.535.674,21	Rp 9.078.535.366,21	-Rp 43.326.366,79						Rp9.690.400.693,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							Rp 9.121.861.733,00	Rp 9.075.535.674,21	Rp 9.078.535.366,21	-Rp 43.326.366,79						Rp9.690.400.693,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							Rp 9.121.861.733,00	Rp 9.075.535.674,21	Rp 9.078.535.366,21	-Rp 43.326.366,79						Rp9.690.400.693,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
374	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				80,75 90,90 angka indeks	80,75 90,90 angka indeks	Rp 3.806.608.533,00	Rp 3.164.636.374,21	Rp 3.167.636.266,21	-Rp 90.286.071,00						Rp3.716.322.462,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	Rp 21.600.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.700.000,00	-Rp 19.900.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp17.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 12.900.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	-Rp 11.700.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp8.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	Rp 8.700.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	-Rp 8.200.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp8.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 persen	100 persen	Rp 3.241.262.826,00	Rp 2.854.040.259,51	Rp 2.854.040.259,51	-Rp 387.222.566,49			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp3.241.220.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				240 Orang/bulan	240 Orang/bulan	Rp 3.134.592.826,00	Rp 2.755.820.259,51	Rp 2.755.820.259,51	-Rp 378.772.566,49	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp3.134.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 98.220.000,00	Rp 98.220.000,00	Rp 98.220.000,00	-Rp -	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp98.220.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	Rp 8.450.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 8.450.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp8.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				100 persen	100 persen	Rp 27.720.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 27.720.000,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp16.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				18 Dokumen	18 Dokumen	Rp 6.800.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 6.800.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	Rp 20.920.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 20.920.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	Rp 202.745.331,00	Rp 57.377.356,70	Rp 56.597.356,70	-Rp 146.147.974,30			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp154.215.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	Rp 5.353.230,00	Rp 2.002.550,00	Rp 3.309.350,00	-Rp 2.043.880,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	Rp 24.657.601,00	Rp 4.126.406,70	Rp 5.449.406,70	-Rp 19.208.194,30	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp21.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	Rp 7.124.500,00	Rp 3.063.400,00	Rp 3.103.600,00	-Rp 4.020.900,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 2.400.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 2.400.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp2.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	Rp 11.000.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	-Rp 8.500.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	Rp 10.875.000,00	Rp 5.625.000,00	Rp 5.625.000,00	-Rp 5.250.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	Rp 125.060.000,00	Rp 40.060.000,00	Rp 36.610.000,00	-Rp 88.450.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp85.315.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 6.375.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 6.375.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 9.900.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 9.900.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 persen	100 persen	Rp 43.150.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 43.150.000,00			Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp42.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	Rp 43.150.000,00	Rp -	Rp -	-Rp 43.150.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp42.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	Rp 60.068.776,00	Rp 94.501.708,00	Rp 96.625.100,00	Rp 36.556.324,00			Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp66.260.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	Rp 1.020.000,00	Rp 492.000,00	Rp 492.000,00	-Rp 528.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 2.260.000,00	Rp 2.260.000,00	Rp 1.000.000,00	-Rp 1.260.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp2.260.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	Rp 56.788.776,00	Rp 91.749.708,00	Rp 95.133.100,00	Rp 38.344.324,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp62.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD				100 persen	100 persen	Rp 210.061.600,00	Rp 157.017.050,00	Rp 158.673.550,00	-Rp 51.388.050,00			Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp179.627.462,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				16 Unit	16 Unit	Rp 180.345.000,00	Rp 149.427.050,00	Rp 147.438.550,00	-Rp 32.906.450,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp154.427.462,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	Rp 1.951.000,00	Rp -	Rp 1.815.000,00	-Rp 136.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp2.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	Rp 17.650.000,00	Rp 7.590.000,00	Rp 9.420.000,00	-Rp 8.230.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp12.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	Rp 10.115.600,00	Rp -	Rp -	-Rp 10.115.600,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp10.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
375	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				20 persen	41,18 persen	Rp 901.022.800,00	Rp 1.285.011.400,00	Rp 1.285.011.400,00	Rp 214.316.229,00						Rp1.115.339.029,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Capaian Kinerja Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				100 persen	100 persen	Rp 901.022.800,00	Rp 1.285.011.400,00	Rp 1.285.011.400,00	Rp 383.988.600,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp1.115.339.029,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				550 Orang	650 Orang	Rp 201.370.800,00	Rp 490.262.400,00	Rp 490.262.400,00	Rp 288.891.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp203.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 699.652.000,00	Rp 794.749.000,00	Rp 794.749.000,00	Rp 95.097.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp911.839.029,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
376	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik				50 persen	50 persen	Rp 3.617.688.000,00	Rp 3.755.178.100,00	Rp 3.755.178.100,00	Rp 184.837.241,00						Rp3.802.525.241,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Capaian kinerja dalam bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				100 persen	100 persen	Rp 3.617.688.000,00	Rp 3.755.178.100,00	Rp 3.755.178.100,00	Rp 137.490.100,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp3.802.525.241,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				950 Orang	975 Orang	Rp 3.617.688.000,00	Rp 3.755.178.100,00	Rp 3.755.178.100,00	Rp 137.490.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp3.802.525.241,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
377	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif				48,15 persen	48,15 persen	Rp 123.706.400,00	Rp 106.519.900,00	Rp 106.519.700,00	Rp 97.228.046,00						Rp220.934.446,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan				49,63 persen	49,63 persen	Rp 123.706.400,00	Rp 106.519.900,00	Rp 106.519.700,00	-Rp 17.186.700,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp220.934.446,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				400 Orang	400 Orang	Rp 123.706.400,00	Rp 106.519.900,00	Rp 106.519.700,00	-Rp 17.186.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp220.934.446,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
378	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan				100 persen	100 persen	Rp 672.836.000,00	Rp 764.189.900,00	Rp 764.189.900,00	Rp 162.443.515,00						Rp835.279.515,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Capaian Kinerja Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				100 persen	100 persen	Rp 672.836.000,00	Rp 764.189.900,00	Rp 764.189.900,00	Rp 91.353.900,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya	Masyarakat Kabupaten Bantul	Rp835.279.515,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang di Daerah				1650 Orang	1650 Orang	Rp 569.786.000,00	Rp 661.139.900,00	Rp 661.139.900,00	Rp 91.353.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp732.229.515,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 103.050.000,00	Rp 103.050.000,00	Rp 103.050.000,00	Rp -	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya		Rp103.050.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		J U M L A H							Rp 2.406.769.921.595,00	Rp 2.443.557.413.968,89	Rp 2.474.869.731.018,50	Rp 68.099.809.423,50						Rp452.954.028.955.006,00	J U M L A H

Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2026, dukungan Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 5 Dukungan Kabupaten Bantul terhadap Prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL	PAGU
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5.040.189.500,00
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	27.772.561.759,37
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	135.471.162.571,00
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	681.707.019.772,65
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	8.783.703.046,00
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	107.879.109.684,00
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	381.496.317.258,70
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	15.697.779.932,00
JUMLAH	1.363.847.843.523,72

* Pagu tidak termasuk Program Penunjang kecuali UPT Dinas Kesehatan dan Bagian Organisasi.

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 disusun dengan harapan agar semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2026. Perubahan RKPD digunakan untuk acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD digunakan untuk acuan dalam penyusunan Perubahan RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun 2026 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Tahun 2026, serta untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2026. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 yang telah ditetapkan, juga menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026, berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Langkah-langkah persiapan pelaksanaan Perubahan RKPD ini dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga akhir pelaksanaan. Demikian Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 disusun, dengan asumsi utama berhasilnya pencapaian Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah adanya komitmen dan kebersamaan dari segenap komponen daerah, baik komponen pemerintah daerah, sektor dunia usaha maupun masyarakat.

The block contains a blue circular official stamp of the Bupati Bantul. The stamp features a Garuda emblem in the center, with the words "BUPATI BANTUL" at the top and "ABDUL HALIM MUSLIH" at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.